RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2023

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor .....);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Pasal 2

(1) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN
   1. Latar Belakang
   2. Dasar Hukum Penyusunan

3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
4. Maksud dan Tujuan
5. Sistematika Penulisan
6. Pendekatan Baru
7. Rujukan Kebijakan

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Provinsi Sumatera Selatan

d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
2. Prioritas Pembangunan Daerah

e. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA

f. BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Daerah
3. Indikator Kinerja Lainnya RKPD Tahun 2023

h. BAB VIII PENUTUP

(2) Isi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini.

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/reviu terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program/ kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 8 Juli 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 14

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 2
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... I - 5
1.3.1 RKPD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ..... I - 6
1.3.2 RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ..... I - 6
1.3.3 RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ..... I - 8
1.3.4 RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota ..... I - 9
1.3.5 RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah ..... I - 9
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 10
1.4.1 Maksud ..... I - 10
1.4.2 Tujuan dan Sasaran ..... I - 10
1.5 Sistematika Penulisan ..... I - 10
1.6 Pendekatan Baru ..... I - 11
1.7 Pendekatan Proses ..... I - 12
1.8 Rujukan Kebijakan ..... I - 14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 35
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II - 67
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... II - 267
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera ..... II - 268
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah ..... II - 268
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... II - 271
2.3.3. Isu Strategis ..... II - 277

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III - 1
3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional ..... III - 2
3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah ..... III - 13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III - 39
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III - 39
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III - 48
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III - 78
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Prov. Sumatera Selatan ..... III - 79
3.3.1. APBD Kabupaten/Kota ..... III - 79
3.3.2. APBN ..... III - 80
3.3.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ..... III - 85

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV - 2
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV - 4
4.2.1. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... IV – 6
4.2.1.1. Telaah Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ..... IV - 6
4.2.1.2. Telaah RKP Tahun 2023 ..... IV - 29
4.2.1.3. Telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 ..... IV - 59
4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ..... IV - 61
4.2.1.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... IV - 66
4.2.1.6. Telaah Isu Strategis Daerah ..... IV - 67

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Kabupaten Ogan Komering Ulu ..... V - 10
5.2. Kabupaten Ogan Komering Ilir ..... V - 12
5.3. Kabupaten Muara Enim ..... V - 14
5.4. Kabupaten Lahat ..... V - 17
5.5. Kabupaten Musi Rawas ..... V - 19
5.6. Kabupaten Musi Banyuasin ..... V - 21
5.7. Kabupaten Banyuasin ..... V - 23
5.8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ..... V - 26
5.9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ..... V - 28
5.10. Kabupaten Ogan Ilir ..... V - 30
5.11. Kabupaten Empat Lawang ..... V - 32
5.12. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ..... V - 34
5.13. Kabupaten Musi Rawas Utara ..... V - 36
5.14. Kota Palembang ..... V - 38
5.15. Kota Prabumulih ..... V - 41
5.16. Kota Pagar Alam ..... V - 42
5.17. Kota Lubuklinggau ..... V - 44

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ..... VI - 1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1. Indikator Makro Pembangunan ..... VII - 1
7.2. Indikator Kinerja Utama ..... VII - 1
7.3. Indikator Kinerja Daerah ..... VII - 4
7.4. Indikator Kinerja Lainnya ..... VII - 20

BAB VIII PENUTUP VIII - 1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023	I – 8
Tabel 1.2	Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dengan Nasional	I - 9
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	II - 2
Tabel 2.2	Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2021	II - 3
Tabel 2.3	Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	II - 11
Tabel 2.4	Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2013-2021.....	II - 26
Tabel 2.5	Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .	II - 28
Tabel 2.6	Data Desa Rawan dan Sangat Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	II - 31
Tabel 2.7	Data Desa Tangguh di BPBD Kabupaten di Sumatera Selatan	II - 31
Tabel 2.8	Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan	II - 32
Tabel 2.9	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2017-2021.....	II - 36
Tabel 2.10	2021Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2014-2021.....	II - 37
Tabel 2.11	PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2013-2021 (Miliar Rupiah) (ADHB) .	II - 38
Tabel 2.12	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah).....	II - 39
Tabel 2.13	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah)	II - 40
Tabel 2.14	Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Pada Tahun 2014-2021 (tahun).....	II - 50
Tabel 2.15	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2021 (tahun)	II - 51
Tabel 2.16	Daftar Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.....	II - 55
Tabel 2.17	Warisan Budaya Tak Benda Sumatera Selatan yang sudah disertifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	II - 66
Tabel 2.18	Jumlah Sanggar Seni di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 - 2021	II - 67
Tabel 2.19	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	II - 76
Tabel 2.20	Pencapaian Realisasi SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	II - 77
Tabel 2.21	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (tahun) Tahun 2014-2021	II - 79
Tabel 2.22	Jumlah Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 Kab/kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Tanggal 22 Februari 2022	II - 81
Tabel 2.23	Persentase Case Detection Rate Penyakit TBC di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021	II - 91
Tabel 2.24	Persentase Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021	II - 94

Tabel 2.25 Jumlah Korban (jiwa) Akibat Bencana per Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2018 ..... II - 95
Tabel 2.26 Persentase Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2021 ..... II - 95
Tabel 2.27 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 II - 99
Tabel 2.28 Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 102
Tabel 2.29 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2021 ..... II - 102
Tabel 2.30 Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2021 ..... II - 103
Tabel 2.31 Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 105
Tabel 2.32 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2036 ..... II - 110
Tabel 2.33 Status Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 111
Tabel 2.34 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2016 – 2021 ..... II - 116
Tabel 2.35 Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2021 ..... II - 118
Tabel 2.36 Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (Backlog) di Provinsi Sumatera Selatan, 2021 ..... II - 120
Tabel 2.37 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 ..... II - 121
Tabel 2.38 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Permukiman Rakyat Tahun 2021 ..... II - 122
Tabel 2.39 Target dan Realisasi SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 130
Tabel 2.40 Nama-nama Panti Sosial di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 131
Tabel 2.41 Jumlah Klien Panti Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ..... II - 133
Tabel 2.42 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021 ..... II - 135
Tabel 2.43 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2020 ..... II - 136
Tabel 2.44 Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Provinsi Sumatera Selatan Februari 2022 ..... II - 139
Tabel 2.45 Rangkuman Penghargaan APE yang Diterima Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 145
Tabel 2.46 Neraca Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (ASEM) . II - 147
Tabel 2.47 Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Eceran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 148
Tabel 2.48 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan Tahun 2021 ..... II - 150
Tabel 2.49 Sebaran Kecamatan Prioritas Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 152
Tabel 2.50 Target dan Realisasi Produksi Peternakan Tahun 2021 ..... II - 153
Tabel 2.51 Sandingan Target RPJMD Terhadap Realisasi Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2020 – 2021 ..... II - 155
Tabel 2.52 Capaian Persentase Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 – 2020 ..... II - 161

Tabel 2.53 Persentasi Penurunan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2022 ..... II - 162
Tabel 2.54 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan serta jumlah hotspot di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021 ..... II - 165
Tabel 2.55 Cakupan KTP-El Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan Per 31 Desember 2021 ..... II - 168
Tabel 2.56 Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 ..... II - 169
Tabel 2.57 Unmet Need KB di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021 ..... II - 172
Tabel 2.58 Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 174
Tabel 2.59 Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel ..... II - 175
Tabel 2.60 Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021 ..... II - 175
Tabel 2.61 Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Kota Palembang ..... II - 176
Tabel 2.62 Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai ..... II - 178
Tabel 2.63 Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan ..... II - 179
Tabel 2.64 Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - api ..... II - 182
Tabel 2.65 Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan ..... II - 183
Tabel 2.66 Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara SMB II Palembang ..... II - 185
Tabel 2.67 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Sudah Ada PPID..... II - 188
Tabel 2.68 Perkembangan Koperasi di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2014 –2021 ..... II - 190
Tabel 2.69 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2021 ..... II - 192
Tabel 2.70 Perkembangan Investasi di Sumatera Selatan ..... II - 193
Tabel 2.71 Perkembangan Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2021 ..... II - 195
Tabel 2.72 Perkembangan Keolahragaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2021 ..... II - 197
Tabel 2.73 Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021 II - 202
Tabel 2.74 Jumlah Perpustakaan yang belum sesuai dengan Standar Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2021 ... II - 203
Tabel 2.75 Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2018-2021 ..... II - 204
Tabel 2.76 Jumlah Koleksi Deposit Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2016-2021 ..... II - 204
Tabel 2.77 Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021 ..... II - 205
Tabel 2.78 Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2021 ..... II - 207
Tabel 2.79 Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2021 ..... II - 208
Tabel 2.80 Produksi Benur dan Nener (Ribu) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021 ..... II - 208
Tabel 2.81 Data Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ..... II - 222
Tabel 2.82 Data Perkembangan Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 222
Tabel 2.83 Lahan Kritis Yang Direhabilitas di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 223

Tabel 2.84 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) .. II - 225
Tabel 2.85 Capaian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014 - 2021 ..... II - 226
Tabel 2.86 Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20120- 2021 ..... II - 228
Tabel 2.87 Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas Sumatera Selatan ..... II - 228
Tabel 2.88 Nilai Impor beberapa komoditi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2021 ..... II - 229
Tabel 2.89 Jumlah Industri Kecil Formal di Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 230
Tabel 2.90 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2016-2021 ..... II - 232
Tabel 2.91 Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2021 ..... II - 233
Tabel 2.92 Rencana Kawasan Transmigrasi yang Telah Ditetapkan Di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 234
Tabel 2.93 Beban Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 235
Tabel 2.94 Capaian Target Indikator Kinerja OPD Urusan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 239
Tabel 2.95 Nilai LKJIP (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 ..... II - 239
Tabel 2.96 Kegiatan Demo/Unjuk Rasa, Audiensi dan Aspirasi Tertulis 2014-2021 II - 243
Tabel 2.97 Rapat-rapat Komisi dan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2021 ..... II - 244
Tabel 2.98 Rapat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2021 ..... II - 244
Tabel 2.99 Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2021 ..... II - 244
Tabel 2.100 Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu Tahun 2014 – 2021 ..... II - 245
Tabel 2.101 Fasilitasi Penyelesaian Produk Hukum Tahun 2014 – 2021 ..... II - 245
Tabel 2.102 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga ..... II - 246
Tabel 2.103 Perkembangan Nilai Tukar Petani ..... II - 248
Tabel 2.104 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan Tahun 2018-2021 ..... II - 248
Tabel 2.105 Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 249
Tabel 2.106 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2016 – 2021 ..... II - 251
Tabel 2.107 Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021 ..... II - 253
Tabel 2.108 Tingkat Kriminalitas di Sumatera Selatan Tahun 2015-2020 ..... II - 253
Tabel 2.109 Tingkat Pendidikan Penduduk di Sumatera Selatan Tahun 2015-2021 . II - 254
Tabel 2.110 Tingkat Ketergantungan Penduduk di Sumatera Selatan Tahun 2014-2020 ..... II - 255
Tabel 2.111 Capaian TPB Pilar I ..... II - 256
Tabel 2.112 Capaian TPB Pilar II ..... II - 264
Tabel 2.113 Capaian TPB Pilar III ..... II - 269
Tabel 2.114 Capaian TPB Pilar IV ..... II - 276

Tabel 2.115 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023 ..... II - 280
Tabel 2.116 Identifikasi Masalah berdasarkan Misi dan Sasaran RPJMD ..... II - 304
Tabel 2.117 Resume Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah ..... II - 316
Tabel 3.1 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021-2022 (Persen, yoy) .... III - 7
Tabel 3.2 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (Persen, yoy) ..... III - 8
Tabel 3.3 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023 ..... III - 11
Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut lapangan usaha, 2017 - 2021 ..... III - 14
Tabel 3.5 Ringkasan Ekspor Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021 (Juta US$) .. III - 20
Tabel 3.6 Ekspor Non Migas Golongan Barang Utama Sumatera Selatan 2021 (Juta US$) ..... III - 21
Tabel 3.7 Ringkasan Impor Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021 (Juta US$) .... III - 24
Tabel 3.8 Impor Non Migas Menurut Golongan Barang Sumatera Selatan (Juta US$) ..... III - 25
Tabel 3.9 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan usaha 2014 – 2021 ..... III - 27
Tabel 3.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2013-2021 (Miliar Rupiah) (ADHB) ... III - 28
Tabel 3.11 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah) ..... III - 29
Tabel 3.12 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah) ..... III - 29
Tabel 3.13 Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ..... III - 36
Tabel 3.14 Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Sektor Unggulan ..... III - 37
Tabel 3.15 Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran ..... III - 37
Tabel 3.16 Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan ..... III - 38
Tabel 3.17 Realiasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 – 2023 ..... III - 48
Tabel 3.18 Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 Tahun 2023 .. III - 50
Tabel 3.19 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023 ..... III - 76
Tabel 3.20 Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 – 2023 ..... III - 78
Tabel 3.21 Realiasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 ..... III - 78
Tabel 3.22 Realisasi Belanja Kab/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2019 dan 2020 ..... III - 79
Tabel 3.23 APBD 17 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 di Provinsi Sumatera Selatan ..... III - 80
Tabel 3.24 Rincian Kegiatan Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ..... III - 81
Tabel 3.25 Rekapitulasi Pendanaan KPBU di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ..... III - 85
Tabel 4.1 Sasaran dan Target Makro Pembangunan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ..... IV - 2
Tabel 4.2 Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ..... IV - 6

Tabel 4.3	Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi I	IV - 8
Tabel 4.4	Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi II	IV - 13
Tabel 4.5	Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi III	IV - 17
Tabel 4.6	Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi IV	IV - 20
Tabel 4.7	Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi V	IV – 22
Tabel 4.8	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap arah kebijakan RPJMD tahun 2023	IV - 26
Tabel 4.9	Sandingan Prioritas RPJMD Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2023	IV - 29
Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023	IV - 41
Tabel 4.11	Sandingan Sasaran Prioritas Nasional RKPD Tahun 2023 dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2023	IV - 41
Tabel 4.12	Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2022	IV - 44
Tabel 4.13	Isu Strategis dan Upaya Tindaklanjut Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan	IV - 63
Tabel 4.14	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023	IV - 67
Tabel 5.1	Progres Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Selatan	V - 5
Tabel 5.2	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu ...	V - 10
Tabel 5.3	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir	V - 12
Tabel 5.4	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim	V - 14
Tabel 5.5	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat	V - 17
Tabel 5.6	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas	V - 19
Tabel 5.7	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin	V - 21
Tabel 5.8	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin	V - 23
Tabel 5.9	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan	V - 26
Tabel 5.10	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Timur	V - 28
Tabel 5.11	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir	V - 30
Tabel 5.12	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang	V - 32
Tabel 5.13	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	V - 34
Tabel 5.14	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara	V - 36
Tabel 5.15	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang	V - 39
Tabel 5.16	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih	V - 41
Tabel 5.17	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam	V - 42
Tabel 5.18	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuklinggau	V – 44
Tabel 5.19	Indeks Williamson Sumatera Selatan Tahun 2016-2020	V - 47
Tabel 6.1	Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	VI – 1
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Satuan, Pagu Indikatif dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab.....	VI – 3

Tabel 6.3 Pagu Anggaran per Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2023 ..... VI - 44
Tabel 7.1 Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 VII - 1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2023 ..... VII - 1
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 2023 ..... VII - 4
Tabel 7.4 Indikator Kinerja Lainnya RKPD Tahun 2023 ..... VII - 20

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023	I - 11
Gambar 2.1	Peta Provinsi Sumatera Selatan	II - 1
Gambar 2.2	Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan	II - 6
Gambar 2.3	Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Sumatera Selatan	II - 8
Gambar 2.4	Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Konversi Provinsi Sumatera Selatan	II - 10
Gambar 2.5	Peta Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	II - 13
Gambar 2.6	Peta Kawasan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	II - 15
Gambar 2.7	Peta Kawasan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	II - 17
Gambar 2.8	Peta Kawasan Peruntukan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 19
Gambar 2.9	Peta Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	II - 21
Gambar 2.10	Peta Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Sumatera Selatan	II - 23
Gambar 2.11	Peta Kawasan Peruntukan Lainnya Provinsi Sumatera Selatan	II - 25
Gambar 2.12	Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel, 2022	II - 30
Gambar 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2021	II - 35
Gambar 2.14	Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera, 2021 (%)	II - 44
Gambar 2.15	Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2011-2021	II - 45
Gambar 2.16	Gini Ratio Sumatera Selatan	II - 46
Gambar 2.17	Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2011-2021 ...	II - 47
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2021	II - 47
Gambar 2.19	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas, 2016-2021	II - 48
Gambar 2.20	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	II - 48
Gambar 2.21	Batu Megalitik di situs Tinggi Hari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan	II - 53
Gambar 2.22	Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya	II - 54
Gambar 2.23	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/MI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021	II - 69
Gambar 2.24	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SLTP/MTs/Paket B Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021	II - 69
Gambar 2.25	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021	II - 70
Gambar 2.26	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/MI Kab/Kota Tahun 2021	II - 70
Gambar 2.27	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMP/MTs Kab/Kota Tahun 2021	II - 70
Gambar 2.28	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA Kab/Kota Tahun 2021	II - 71
Gambar 2.29	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi Tahun 2015-2021	II - 71
Gambar 2.30	Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD/MI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021	II - 73

Gambar 2.31 Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMP/MTs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021 ..... II - 73
Gambar 2.32 Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021 ..... II - 74
Gambar 2.33 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II - 74
Gambar 2.34 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/MTs Menurut Kab/Kota Tahun 2021 ..... II - 75
Gambar 2.35 Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... II - 75
Gambar 2.36 Angka Harapan Hidup (tahun) Sumsel dan Nasional Tahun 2014-2021 ..... II - 80
Gambar 2.37 Peta Sebaran Kasus Positif Covid-19 Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Tanggal 22 Februari 2022 ..... II - 82
Gambar 2.38 Persentase Covid-19 Yang Sembuh Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Tanggal 22 Februari 2022 ..... II - 83
Gambar 2.39 Persentase Covid-19 Yang Meninggal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Tanggal 22 Februari 2022 ..... II - 83
Gambar 2.40 Jumlah penyakit penyerta pada kasus konfirmasi covid 19 yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan sampai tanggal 22 Februari 2022 ..... II - 84
Gambar 2.41 Cakupan Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan KPC-PEN ..... II - 85
Gambar 2.42 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2014-2021 di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 86
Gambar 2.43 Jumlah Kematian bayi Tahun 2014-2021 di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 86
Gambar 2.44 Tren prevalensi balita stunting Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 ..... II - 87
Gambar 2.45 Tren Prevalensi Balita Stunting per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 87
Gambar 2.46 Angka Gizi Buruk pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021 ..... II - 88
Gambar 2.47 Cakupan ASI Ekslusif di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2021 ..... II - 89
Gambar 2.48 Persentase Desa Yang Melaksanakn STBM di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2021 ..... II - 89
Gambar 2.49 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2021 ..... II - 90
Gambar 2.50 Annual Parasit Incidence (API) Malaria Provinsi Sumatera Selatan dalam 6 Tahun Terakhir ..... II - 91
Gambar 2.51 Cakupan Pengobatan HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) Tahun 2017-2021 ..... II - 92
Gambar 2.52 Jumlah Kasus DBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2020 ..... II - 93
Gambar 2.53 Distribusi Kejadian Bencana per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2016-2018 ..... II - 94
Gambar 2.54 Distribusi Kejadian Bencana per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 ..... II - 95

Gambar 2.55 Persentase Penduduk yang terdampak KLB yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 ..... II - 97
Gambar 2.56 Distribusi Lokasi KLB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2018..... II - 98
Gambar 2.57 Distribusi Jenis KLB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2018..... II - 98
Gambar 2.58 Peta Rencana Struktur Ruang di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 109
Gambar 2.59 Peta Rencana Pola Ruang di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 111
Gambar 2.60 Portal Tanah Air Indonesia..... II - 114
Gambar 2.61 Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021 ..... II - 115
Gambar 2.62 Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun ..... II - 116
Gambar 2.63 2021 Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021 ..... II - 117
Gambar 2.64 2021Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, 2021 ..... II - 118
Gambar 2.65 Jumlah Kepala Keluarga MBR yang tidak memiliki Rumah di Provinsi Sumatera Selatan, 2021 ..... II - 120
Gambar 2.66 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2021 ..... II - 126
Gambar 2.67 2021Pemberian Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja di Mataram Provinsi Nusa Tengara Barat Tahun 2020 .. II - 127
Gambar 2.68 Piagam BNPB Tahun 2017-2018 ..... II - 128
Gambar 2.69 Penyerahan Piagam BNPB ..... II - 129
Gambar 2.70 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan Tahun 2010-2022 ..... II - 138
Gambar 2.71 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 141
Gambar 2.72 Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal Provinsi Sumatera Selatan ..... II - 142
Gambar 2.73 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan ..... II - 143
Gambar 2.74 Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Provinsi Sumatera Selatan II - 144
Gambar 2.75 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2021..... II - 146
Gambar 2.76 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2021..... II - 146
Gambar 2.77 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ..... II - 148
Gambar 2.78 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021 ..... II - 163
Gambar 2.79 2021Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) . II - 171
Gambar 2.80 Total Fertility Rate (TFR) ..... II - 172
Gambar 2.81 Angkutan Sungai di Sungai Musi..... II - 178
Gambar 2.82 Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api ..... II - 184
Gambar 2.83 Penghargaan Smart Society Smart Province ..... II - 185

Gambar 2.84 Penghargaan tingkat Nasional Top Digital Awarddan kategori Top Digital Implementation 2021 on Province Government Tahun 2021..... II - 186
Gambar 2.85 Nilai Indeks SPBE Sumatera Selatan ..... II - 187
Gambar 2.86 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 ..... II - 188
Gambar 2.87 Jumlah Perolehan Medali Sumsel pada PON ..... II - 196
Gambar 2.88 Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang ..... II - 199
Gambar 2.89 Foto Ikan Patin, salah satu Komoditas Unggulan Sumatera Selatan.... II - 208
Gambar 2.90 Peta Promosi Wisata Religi di Sumatera Selatan ..... II - 209
Gambar 2.91 Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin..... II - 210
Gambar 2.92 Pulau Kemaro ..... II - 211
Gambar 2.93 Museum Al Quran Raksasa ..... II - 212
Gambar 2.94 Rumah di Kampung Arab Al-Munawar ..... II - 214
Gambar 2.95 Enam Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring ..... II - 215
Gambar 2.96 Politeknik Pariwisata Palembang..... II - 216
Gambar 2.97 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Sumsel Tahun 2010-2019 (Ribu Orang) ..... II - 217
Gambar 2.98 Target dan Realisasi Produksi Padi Tahun 2018-2021 (Ton) ..... II - 218
Gambar 2.99 Target dan Realisasi Produksi Jagung Tahun 2018-2021 (Ton) ..... II - 220
Gambar 2.100 Target dan Realisasi Produksi Kedelai Tahun 2018-2021 (Ton) ..... II - 221
Gambar 2.101 Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021 (000 US$) ..... II - 227
Gambar 2.102 Sertifikat ISO yang diterima Bappeda Provinsi Sumatera Selatan..... II - 236
Gambar 2.103 Kebun Raya Sriwijaya ..... II - 242
Gambar 2.104 Kebun Raya Sriwijaya I..... II - 242
Gambar 2.105 Pabrik Pakan Ternak ..... II - 243
Gambar 2.106 Nilai Tukar Petani Tahun 2015-2021 ..... II - 247
Gambar 2.107 Capaian Pembangunan Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021..... II - 251
Gambar 3.1 Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2021 ..... III - 3
Gambar 3.2 Pertumbuhan PDB menurut pengeluaran 2019 - 2021 ..... III - 4
Gambar 3.3 Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera, 2021 (%) ..... III - 32
Gambar 3.4 Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2011 - 2021..... III - 32
Gambar 3.5 Gini Ratio Sumatera Selatan..... III - 33
Gambar 4.1 Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV - 4
Gambar 4.2 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2022 ..... IV - 30
Gambar 4.3 Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ..... IV - 31
Gambar 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV - 32
Gambar 4.5 Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023..... IV - 33
Gambar 4.6 Prioritas Nasional Tahun 2023 ..... IV - 34
Gambar 4.7 Highlight Major Project RKP Tahun 2023 ..... IV - 39
Gambar 5.1 Kawasan Tanjung Api-Api dan Rencana Perkembangan..... V - 3
Gambar 5.2 Peta Arahan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 ..... V - 4
Gambar 5.3 Peta Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Selatan ..... V - 4
Gambar 5.4 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kab. Ogan Komering Ulu ..... V - 11
Gambar 5.5 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir..... V - 13

Gambar 5.6 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Muara Enim ..... V - 16
Gambar 5.7 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Lahat ..... V - 19
Gambar 5.8 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Musi Rawas ..... V - 21
Gambar 5.9 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ..... V - 23
Gambar 5.10 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Banyuasin.. V - 25
Gambar 5.11 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten OKU Selatan ..... V - 28
Gambar 5.12 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten OKU Timur. V - 30
Gambar 5.13 Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir .... V - 32
Gambar 5.14 Peta Arahan Strategis Pembangunan Kabupaten Empat Lawang..... V - 34
Gambar 5.15 Peta Arahan Strategis Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ..... V - 36
Gambar 5.16 Peta Arahan Strategis Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara .. V - 38
Gambar 5.17 Peta Arahan Strategis Pembangunan Kota Palembang ..... V - 40
Gambar 5.18 Peta Arahan Strategis Pembangunan Kota Prabumulih ..... V - 42
Gambar 5.19 Peta Arahan Strategis Pembangunan Kota Pagar Alam ..... V - 44
Gambar 5.20 Peta Arahan Strategis Pembangunan Kota Lubuk Linggau ..... V - 46
Gambar 5.21 Tipologi Klassen Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020 ..... V - 46
Gambar 5.22 Mekanisme Sistam Informasi Penataan Ruang (SITARUNG) ..... V - 49

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2014-2021	III - 14
Grafik 3.2	Struktur PDRB Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2021	III - 16
Grafik 3.3	Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan Tahun 2021 Menurut Pengeluaran (%)	III - 16
Grafik 3.4	Perkembangan PMDN dan PMA Wilayah Sumatera Selatan	III - 18
Grafik 3.5	Perkembangan Ekspor Sumatera Selatan (Juta US$)	III - 19
Grafik 3.6	Pangsa Ekspor Sumatera Selatan Menurut Negara Tujuan Tahun 2021 (Juta US$)	III - 22
Grafik 3.7	Struktur Ekspor Provinsi Sumatera Selatan Menurut Sektor Tahun 2020-2021	III - 22
Grafik 3.8	Perkembangan Impor Sumatera Selatan (Juta US$)	III - 23
Grafik 3.9	Pangsa Impor Non Migas Sumatera Selatan Tahun 2021 (Juta US$) ...	III - 26
Grafik 3.10	Persentase Nilai Impor Sumatera Selatan menurut Golongan Penggunaan Barang 2020-2021	III - 26
Grafik 3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Selatan (%)	III - 34
Grafik 3.12	Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan (%)	III - 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023, Yang Merupakan Tahap Kelima Dari Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. RKPD disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sesuai dengan kewenangannya maka, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip yang meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peranan dan kewenangan masing-masing, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan laksanakan sesuai dengan kondisi daerah serta dinamika daerah dan nasional.

Dalam prosesnya perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah dan bawah atas. Selain itu terkait dengan substansi maka perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, yang lebih dikenal dengan istilah THIS.

Penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan. RKPD yang sudah ditetapkan menjadi acuan dalam penyempurnaan rancangan Renja

Perangkat Daerah dan sebagai bahan penyusuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RKPD Tahun 2023 juga merupakan tahun ketiga diimplementasikannya SIPD. Seluruh tahapan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 diinput secara sistematis melalui aplikasi SIPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
31. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tanggal 27 Desember 2021.
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yang merupakan tahun kelima dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, penyusunan RKPD ini mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dan kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2023. Secara detail keterkaitan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 ini, dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode lima tahun (2019-2023) adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengurangan Pengangguran dan Antisipasi Bonus Demografi;
4. Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan;
5. Perbaikan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar;
6. Optimalisasi Reformasi Birokrasi;
7. Pelestarian Ekosistem dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
8. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Nilai Tukar Petani;
9. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; dan
10. Pengembangan Sosial Budaya dan Olahraga;

1.3.2. RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan,
2. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan,
3. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah,
4. Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Sementara itu kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi Kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1. Memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung,
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

Sementara itu Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

1. Meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional,
2. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
3. Meningkatkan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan.

Sinkronisasi dan sinergi RKPD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan:

(1) Mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;

(2) Memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

(3) Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

(4) Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi;

(5) Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

(6) Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta

(7) Menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian kegiatan antar sektor dan antar Perangkat Daerah.

Dalam menyusun RKPD, selain berpedoman pada RTRWP, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini untuk melihat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam tataran perencanaan ruang di tingkat nasional. Beberapa wilayah Sumatera Selatan dalam konstelasi tata ruang nasional masuk ke dalam Pusat Kawasan Nasional, Pusat Kawasan Wilayah dan Kawasan Andalan.

Selain itu RKPD Sumatera Selatan mencoba meilhat arahan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi; (2)

keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.3. RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 mengacu pada dokumen RKP 2023 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL (RKP)	PRIORITAS DAERAH (RKPD)	ISU STRATEGIS DAERAH
➢ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing ➢ Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	➢ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	➢ Percepatan penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting ➢ Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi
➢ Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ➢ Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayaan Dasar ➢ Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubaham Iklim	➢ Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi ➢ Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	➢ Pemulihan Ekonomi pasca pandemi melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata ➢ Peningkatan Infrastruktur yang Merata, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
➢ Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ➢ Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	➢ Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	➢ Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Polhukhankam

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023 tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022, target RKP Tahun 2023 serta mempertimbangkan situasi terkini sehingga didapat 5 (lima) isu strategis yaitu:

1. Percepatan penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting.
2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi.
3. Pemulihan Ekonomi pasca pandemi melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata.
4. Peningkatan Infrastruktur yang Merata, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana.
5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Polhukhankam.

Tabel 1.2

Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dengan Nasional

INDIKATOR MAKRO	NASIONAL	PROVINSI
Tingkat Kemiskinan	7,5 – 8,5 %	11,59-12,66%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0 %	3,06-4,22%
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,9 %	5,8-6,5%
Indeks Pembangunan Manusia	73,29-73,35	73,09
Rasio Gini	0,375-0,378	0,380

Tabel diatas menunjukkan target indikator makro Provinsi yang harus dicapai di tahun 2023 untuk mendukung capaian nasional.

1.3.4. RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya adalah akumulasi dari capaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sinergitas perencanaan pembangunan yang disusun di tiap tingkatan menjadi sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan. Secara detail dijelaskan pada Bab V.

1.3.5. RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

RKPD tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berwawasan tahunan. Renja PD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Untuk detail Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dijelaskan lebih lanjut di Bab VI.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencaaan tahunan yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 Juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak dalam rangka terjaganya konsistensi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan baik dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, regional maupun provinsi.

1.4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(1) Mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dalam mempercepat pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;

(2) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh para pihak yang akan memerlukan panduan dalam rangka keselerasan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan;

(3) Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data yang terkini dan akurat;

(4) Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal;

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII PENUTUP

1.6. Pendekatan Baru

Penyusunan RKPD 2023 dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan ***money follows program dan program follows result*** dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat untuk mencapai target kinerja yang akan dialokasikan anggarannya dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

Inovasi Siklus Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023

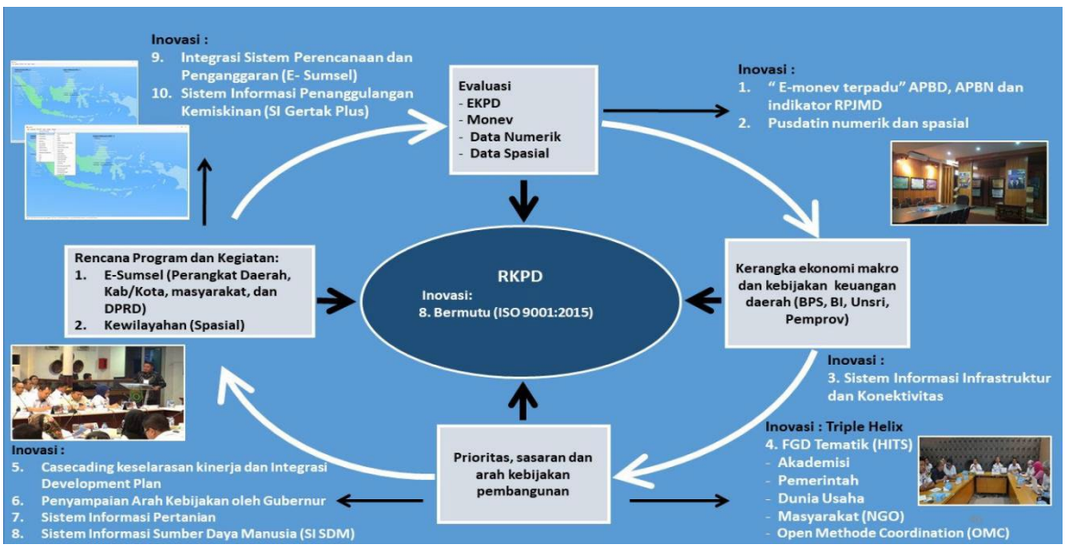

Pendekatan Substansi yang digunakan adalah:

1. Tematik : Merupakan pendekatan perencanaan dimana difokuskan sampai dengan program prioritas daerah.
2. Holistik : Untuk mencapai sasaran prioritas daerah dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir misalnya dalam penanggulangan kemiskinan, program yang dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga dengan memberikan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan kepemilikan asset, sehingga penduduk miskin dapat lepas dari jerat kemiskinan
3. Integratif : Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi, harus jelas siapa melakukan apa serta integrasi anggaran. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Pembangunan Pertanian Dinas Pertanian dan Hortikultura melakukan program kegiatan peningkatan produktivitas lahan, Dinas Pengelolaan Sumber Air melakukan perbaikan atau pembangunan saluran irigasi, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan melakukan upaya penghentian konversi lahan produktif dan reforma agrarian yang merupakan kombinasi berbagai program/kegiatan.

4. Spasial : Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi secara jelas dan spesifik. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

1.7. Pendekatan Proses

1). Pendekatan SIPD

Dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan telah dilakukan melalui SIPD yang diatur melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 274, 391 sampai 395. Kemudian turunan berupa Permendagri Nomor 70 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178. Dimana seluruh usulan Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, Kabupaten/Kota dan Pokok-pokok pikiran DPRD/hasil penjaringan asprirasi masyarakat bersumber dari APBD dan seluruh pembuatan dokumen perencanaan daerah (dokrenda) termasuk RKPD tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi SIPD.

Guna memenuhi amanat peraturan-peraturan diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menggunakan aplikasi SIPD untuk perencanaan tahun 2023. Di dalam aplikasi SIPD terdapat 3 informasi pemerintah daerah yaitu :

1. Informasi Pembangunan Daerah
   Kaitan dengan data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah
   Terdiri dari Informasi Perencanaan Anggaran Daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya.
3. Informasi Pemerintah Daerah lainnya
   Terdiri dari informasi LPPD, EPPD, Perda, dan Binwas/Audit, dst.

Proses verifikasi pokok pikiran anggota dewan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. *Inputting* usulan pokir melalui *username* anggota dewan
2. Validasi oleh Sekretariat DPRD
3. Validasi oleh Mitra Bappeda
4. Validasi oleh OPD Tujuan
5. Validasi TAPD

2). Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk membahas permasalahan yang ada serta menyepakati solusi yang akan dilaksanakan bersama-sama dan menciptakan rasa memiliki, melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Forum Konsultasi Publik,
2. Rapat Stakeholder Provinsi, dan
3. Musrenbang.

3). Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam setiap tahapan proses penyusunan, yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pertemuan tematik yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan mengikut sertakan unsur akademisi, praktisi, ahli, dan tenaga fungsional perencana yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4). Pendekatan Bottom Up dan Top Down

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kualitas dokumen RKPD tahun 2023 dan proses perencanaan Provinsi Sumatera Selatan maka Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat/Umum, dan Perangkat Daerah telah dapat menyampaikan usulan kegiatan tahun 2023 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Secara detil dapat dijelaskan sebagai berikut : Musrenbang Sektoral (Ratek Trilateral Meeting) yang dihadiri oleh *stakeholder* untuk memfokuskan dan mempermudah memfollow-up usulan dari Kabupaten/Kota yang akan diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Usulan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk RKPD Tahun 2023 yang diinput oleh Kabupaten/Kota melalui SIPD. Selanjutnya usulan kegiatan ini dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dan sinkron dengan target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan skala prioritas arah kebijakan RKPD Tahun 2023 dapat diakomodir menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.

a. Usulan Masyarakat

Ada beberapa inovasi yang dilaksanakan pada pendekatan ini yaitu:

1. Sosialisasi untuk mekanisme pengusulan kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial (facebook, instagram, twitter), dan secara langsung melalui penyebaran brosur/flyer di mall, sekolah, perguruan tinggi.
2. Masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan melalui datang langsung (tatap muka), usulan/proposal, melalui website www.bappeda.sumselprov.go.id dan melalui SIPD.
3. Penjaringan aspirasi masyarakat secara interaktif melalui radio.
4. Usulan dapat dilakukan juga dengan Proposal dan melalui reses DPRD yang nantinya diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Usulan didistribusikan ke Perangkat Daerah oleh Bappeda untuk selanjutnya diverifikasikan oleh Perangkat Daerah.

5). Pendekatan Politik

Rekomendasi kebijakan dari DPRD yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD diarahkan untuk sejalan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran provinsi yang ditempatkan pada pos belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

1.8. Rujukan Kebijakan

Arah kebijakan pada RKPD 2023 merujuk kepada beberapa hal yaitu :

1. Kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2021;
2. Analisis Masalah dan Isu Strategis Tahun 2021;
3. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
4. Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2023; dan
5. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's);
6. RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi geografis terletak antara 1º 25’ 13” sampai 4º 55’ 17” Lintang Selatan dan antara 102º 3’ 52” dan 106º 19’ 45” Bujur Timur, yang berbatasan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Peta Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Provinsi Sumatera Selatan

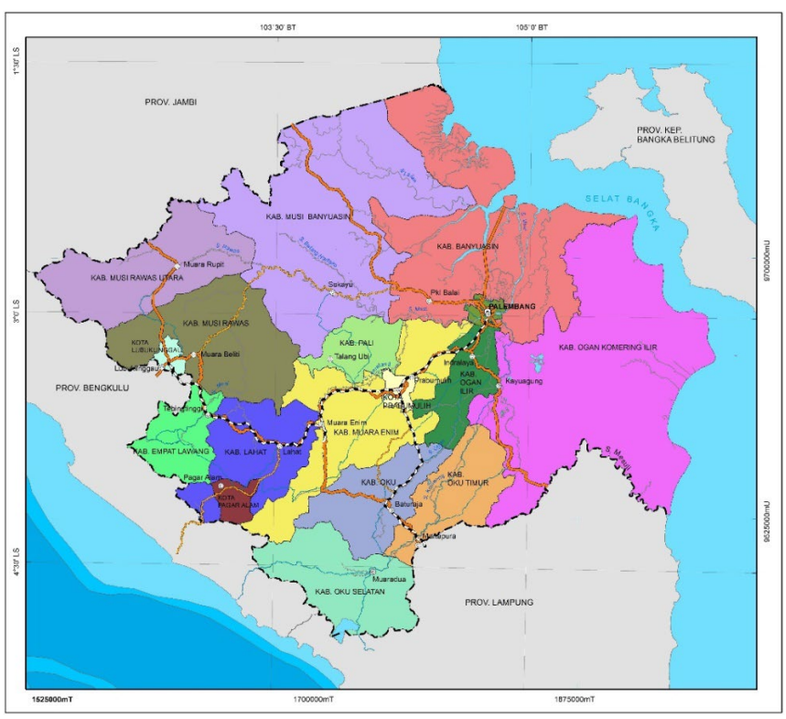

Sumber : geoportal.sumselprov.go.id, 2017

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 91.592,43 Km^2 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km^2)[a]	Jumlah Kecamatan[a]	Jumlah Desa[a]	Jumlah Kelurahan[a]	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)[b]
1	Ogan Komering Ulu	4.797,06	13	143	14	77,36
2	Ogan Komering Ilir	18.359,04	18	314	13	42,09
3	Muara Enim	7.383,90	22	245	10	83,67
4	Lahat	5.311,74	24	360	18	81,88
5	Musi Rawas	6.350,10	14	186	13	62,79
6	Musi Banyuasin	14.266,26	15	227	13	43,95
7	Banyuasin	11.832,99	21	288	17	71,32
8	OKU Selatan	5.493,94	19	252	7	75,83
9	OKU Timur	3.370,00	20	305	7	193,79
10	Ogan Ilir	2.666,09	16	227	14	157,31
11	Empat Lawang	2.256,44	10	147	9	152,38
12	PALI	1.840,00	5	65	6	107,22
13	Musi Rawas Utara	6.008,55	7	82	7	31,69
14	Palembang	369,22	18	0	107	4.566,58
15	Prabumulih	251,94	6	12	25	776,96
16	Pagar Alam	633,66	5	0	35	229,25
17	Lubuk Linggau	401,50	8	0	72	589,86
	Sumatera Selatan	**91.592,43**	**241**	**2.853**	**387**	**93,36**

Sumber: [a] BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka Kota Palembang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.566 jiwa per Km^2. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 31 jiwa per Km^2. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 di atas.

Total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebanyak 8.565.814 jiwa yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar pada tahun 2021 berada di Kota Palembang sebanyak 1.704.538 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kota Pagar Alam sebanyak 147.640 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2021

KABUPATEN/ KOTA	TAHUN							
	2015*	2016*	2017**	2018***	2019***	2020*	2020***	2021***
Ogan Komering Ulu	352.366	356.508	357.502	363.885	366.889	367.603	369.567	372.272
Ogan Komering Ilir	716.964	719.412	721.571	727.789	730.399	769.348	734.354	740.346
Muara Enim	561.223	565.752	567.450	576.105	580.608	612.900	593.769	615.720
Lahat	422.992	426.043	427.320	432.957	434.904	430.071	435.375	435.419
Musi Rawas	404.587	407.375	408.597	408.816	403.993	395.570	406.196	410.210
Musi Banyuasin	601.477	606.306	608.125	574.415	588.782	622.206	620.229	651.861
Banyuasin	798.831	801.491	803.895	810.222	814.492	836.914	818.766	824.551
OKU Timur	628.953	631.914	633.810	639.112	643.603	649.853	647.225	655.703
OKU Selatan	407.303	326.074	410.303	414.252	415.971	408.981	417.201	417.424
Ogan Ilir	430.048	419.529	410.529	409.310	414.036	416.549	420.783	428.108
Empat Lawang	324.630	327.053	327.053	332.515	333.857	333.622	334.809	335.024
PALI	165.808	170.497	170.497	177.111	182.402	194.900	195.729	200.855
Musi Rawas Utara	186.595	188.680	188.680	192.164	193.630	188.861	194.507	194.799
Palembang	1.551.115	1.509.297	1.569.297	1.592.248	1.619.533	1.668.848	1.668.164	1.704.538
Pagar Alam	137.862	139.448	139.867	145.549	196.460	143.844	146.889	147.640
Lubuk Linggau	211.471	213.749	217.119	224.032	227.330	234.166	229.063	232.739
Prabumulih	188.731	190.341	190.913	197.069	146.128	193.196	197.641	198.605
Sumatera Selatan	**8.090.956**	**8.146.207**	**8.152.528**	**8.217.551**	**8.293.017**	**8.467.432**	**8.430.267**	**8.565.814**

Sumber:
**Badan Pusat Statistik;*
***Permendagri No. 92 Tahun 2019,*
****Data Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan, 2022*

Kondisi Geologi

Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau,

batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

Kondisi Hidrologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai- sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau.

Kondisi Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17- 634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni, dimana merupakan salah satu pemicu timbulnya hotspot (titik api) yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan kelembapannya bervariasi antara 81 sampai dengan 88 persen.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Jika dilihat dari deskripsi karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Selatan maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung (konservasi). Hingga tahun 2015, luas kawasan budidaya sebesar 7.779.146,89 Ha atau 84,93% sedangkan luas kawasan lindung sebesar 1.380.096,11 Ha atau 15,06%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

   Pengembangan Kawasan Hutan Produksi ditujukan untuk menciptakan pemanfaatan hasil hutan yang optimal, terkendali, serta tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

   a. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 213.688,39 Ha, meliputi:
      1) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 94.301,17 Ha;
      2) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 36.511,59 Ha;
      3) Kabupaten Muara Enim dengan luas 25.498,07 Ha;
      4) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas 18.646,99 Ha;
      5) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 10.238,82 Ha; dan
      6) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 10.034,54 Ha;
      7) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 7.385,84 Ha;
      8) Kabupaten Empat Lawang dengan luas 4.555,02 Ha;
      9) Kabupaten Lahat dengan luas 4.350,98 Ha;
      10) Kota Lubuk Linggau dengan luas 1.096,22 Ha;
      11) Kota Prabumulih dengan luas 1.069,14 Ha.

      Peta mengenai peruntukan kawasan hutan produksi terbatas diatas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2.

Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan

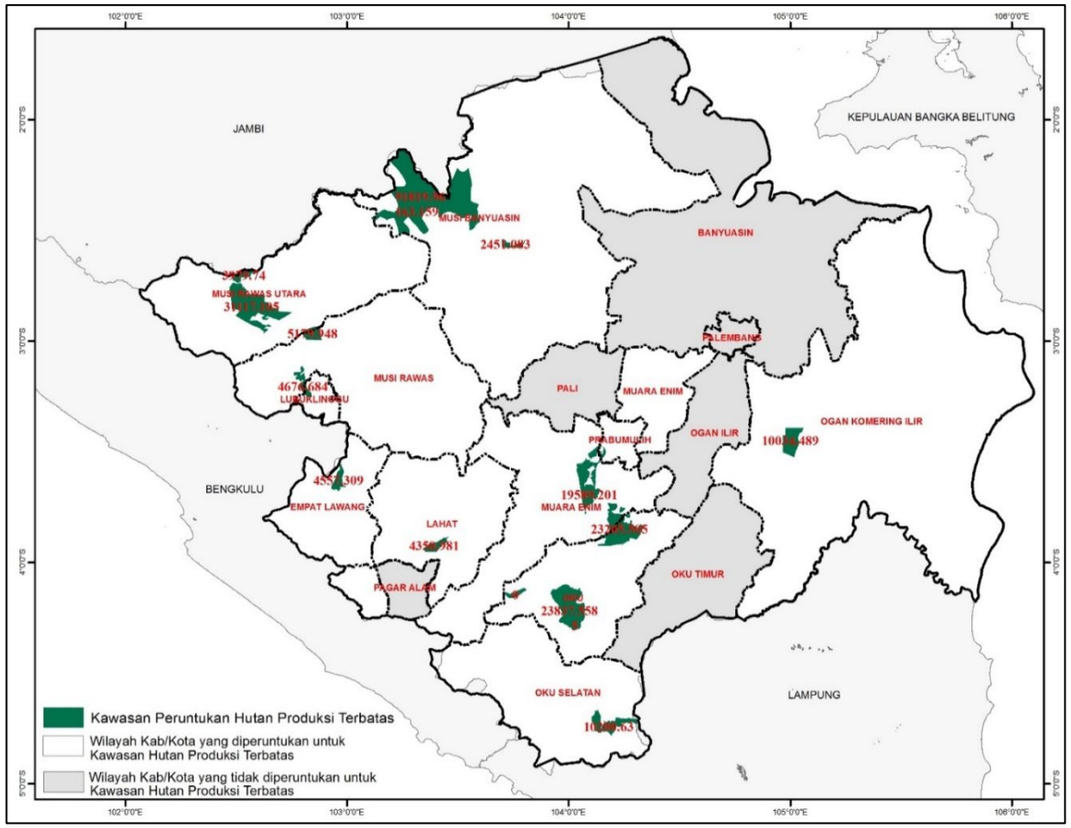

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

b. Kawasan hutan produksi tetap merupakan kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap, dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam, dengan luas 1.690.839,50 Ha.
   1) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 642.534,22 Ha;
   2) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 398.493,87 Ha;
   3) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 167.044,67 Ha;
   4) Kabupaten Muara Enim dengan luas 156.139,89 Ha;
   5) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 109.927,10 Ha;
   6) Kabupaten Banyuasin dengan luas 70.757,90 Ha;
   7) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas 54.958,68 Ha;
   8) Kabupaten Lahat dengan luas 27.160,94 Ha;
   9) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan luas 23.168,03 Ha;
   10) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan luas 19.475,77 Ha;
   11) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan luas 17.845,18 Ha;
   12) Kabupaten Empat Lawang dengan luas 3.233,26 Ha; dan
   13) Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 100,00 Ha.

Gambar 2.3.

Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap Provinsi Sumatera Selatan

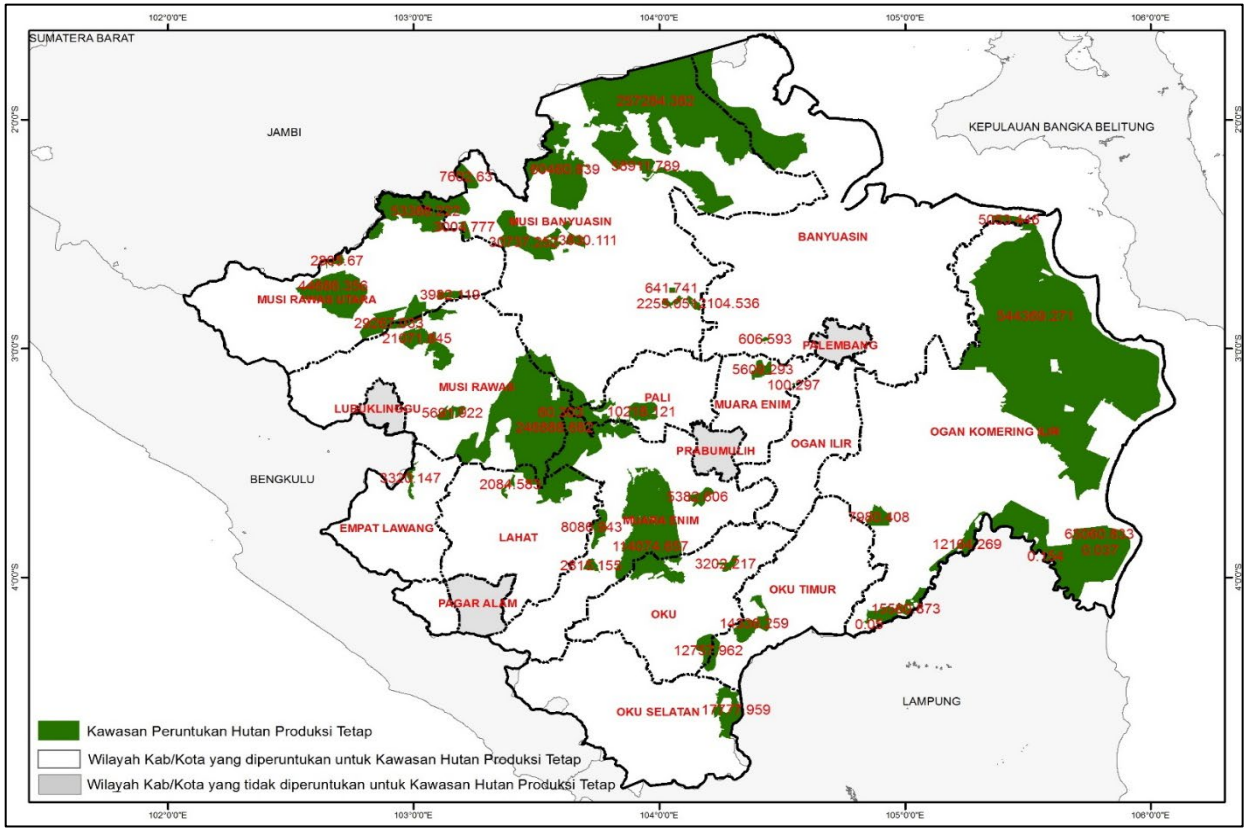

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

c. Kawasan hutan produksi konversi merupakan kawasan yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain, dengan luas 145.356,92 hektar :
   1) Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 59.986,87 Ha;
   2) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 24.069,55 Ha;
   3) Kabupaten Banyuasin dengan luas 27.248,50 Ha;
   4) Kabupaten Musi Rawas dengan luas 19.795,43 Ha;
   5) Kabupaten Muara Enim dengan luas 13.105,27 Ha;
   6) Kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas 1.136,57 Ha; dan
   7) Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 14,73 Ha.

Gambar 2.4.

Peta Sebaran Kawasan Hutan Produksi Konversi Provinsi Sumatera Selatan

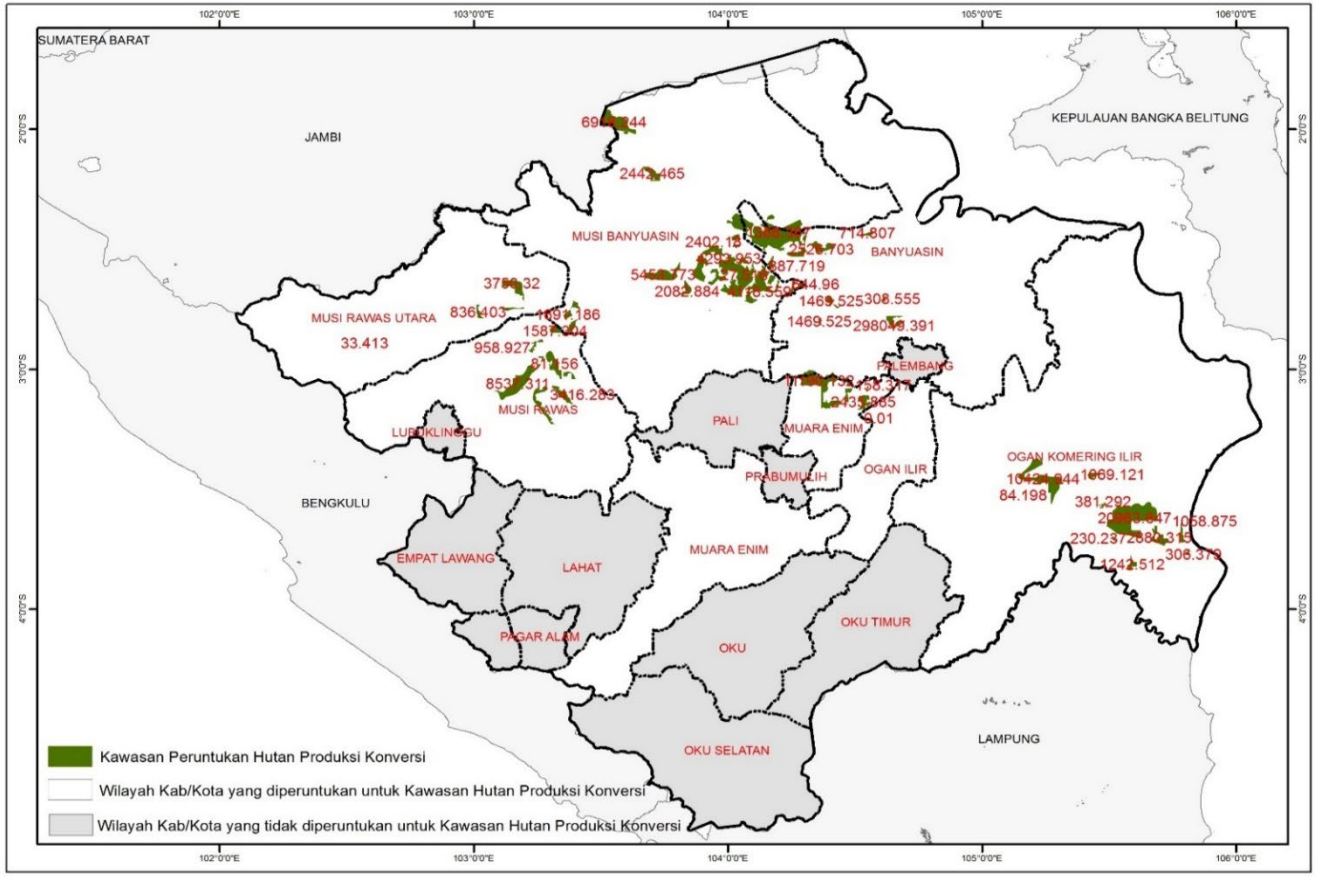

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Tabel 2.3.

Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Ha)

No	Kabupaten /Kota	HPT	HP	HPK	Keterangan
1	Banyuasin	-	70.757,90	27.248,50	HPT = Hutan Produksi Terbatas
2	Empat Lawang	4.555,02	3.233,26	-	HP = Hutan Produksi Tetap
3	Lahat	4.350,98	27.160,94	-	HPK = Hutan Produksi yang dapat diKonversi
4	Muara Enim	25.498,07	156.139,89	13.105,27	
5	Musi Banyuasin	94.301,17	398.493,87	59.986,87	
6	Musi Rawas	7.385,84	167.044,67	19.795,43	
7	Musi Rawas Utara	36.511,59	109.927,10	1.136,57	
8	Ogan Ilir	-	100,00	14,73	
9	Ogan Komering Ilir	10.034,54	642.534,22	24.069,55	
10	Ogan Komering Ulu	18.646,99	54.958,68	-	
11	Ogan Komering Ulu Selatan	10.238,82	17.845,18	-	
12	Ogan Komering Ulu Timur	-	19.475,77	-	
13	Penukal Abab Lematang Ilir	-	23.168,03	-	
14	Lubuk Linggau	1.096,22	-	-	
15	Pagar Alam	-	-	-	
16	Palembang	-	-	-	
17	Prabumulih	1.069,14	-	-	
	Jumlah	**213.688,39**	**1.690.839,50**	**145.356,92**	

Catatan

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan KepMenLHK Nomor : SK.8094/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018

2. Kawasan peruntukan pertanian

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian adalah pengendalian alih fungsi pertanian khususnya pada lahan produktif yang memiliki irigasi dipertahankan fungsi dan peruntukannya guna menunjang program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan kawasan pertanian ditujukan untuk mengembangkan area produksi pertanian dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan.

Rencana kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

a. Kawasan pertanian pangan yang dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
   1) Padi (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Ilir);
   2) Jagung (terutama di Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan); dan
   3) Kedelai (terutama di Kabupaten Banyuasin).

b. Kawasan pertanian hortikultura yang dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dengan jenis komoditas unggulan diantaranya:
   1) Cabai (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang)
   2) Bawang merah (terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Banyuasin); dan
   3) Jeruk (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam).

Gambar 2.5.

Peta Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

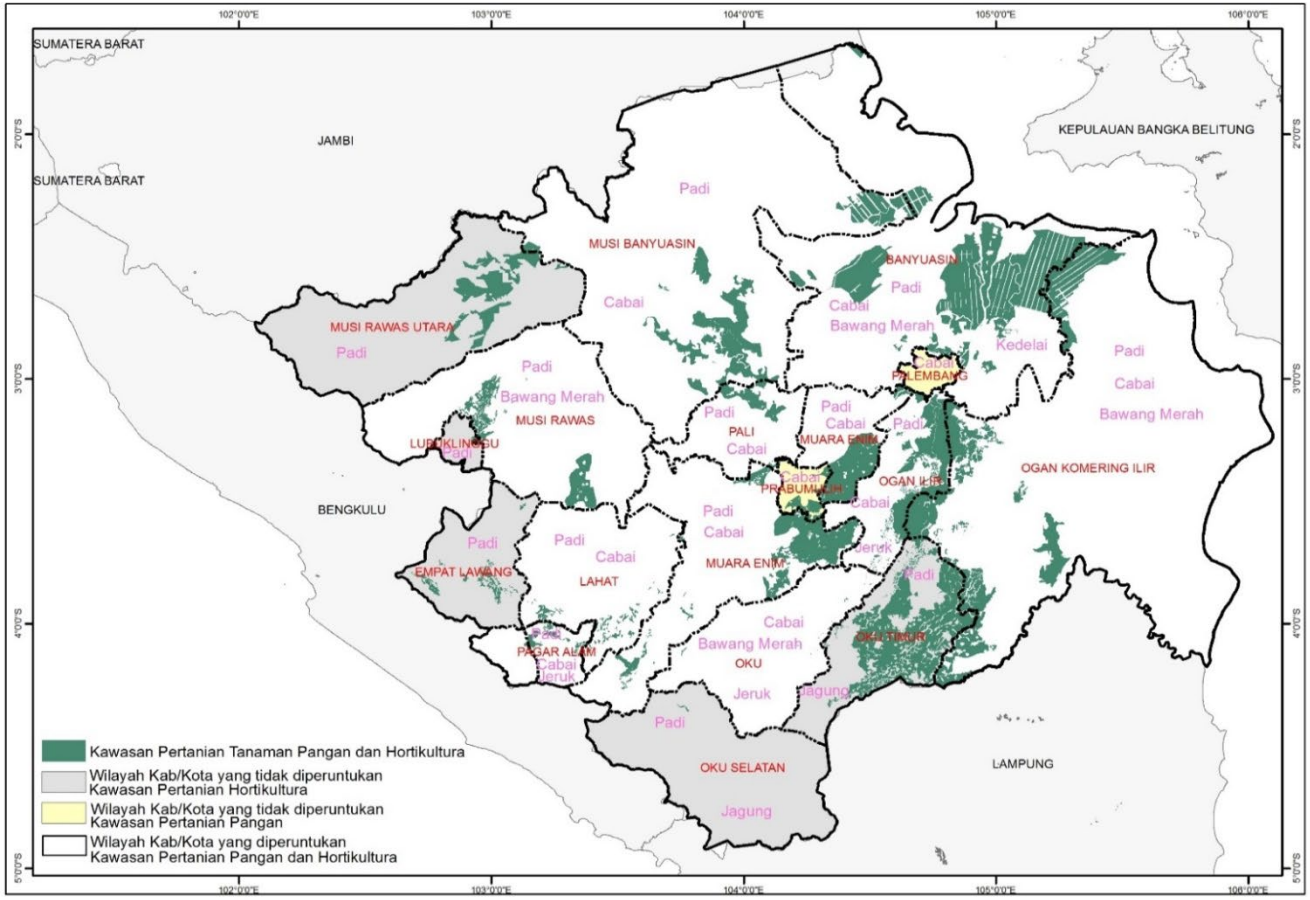

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

c. Kawasan perkebunan yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan, serta pengembangan sentra produksi perkebunan di seluruh wilayah Provinsi dengan jenis komoditi unggulan, meliputi:
   1) Karet (terutama di Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim, Lahat OKU Selatan, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau);
   2) Kelapa sawit (terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
   3) Kopi (terutama di Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam);
   4) Kelapa (terutama di Kabupaten Banyuasin; dan Kabupaten Ogan Ilir);
   5) Tebu (terutama di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir); dan
   6) Teh (terutama di Kota Pagar Alam).

Gambar 2.6.

Peta Kawasan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

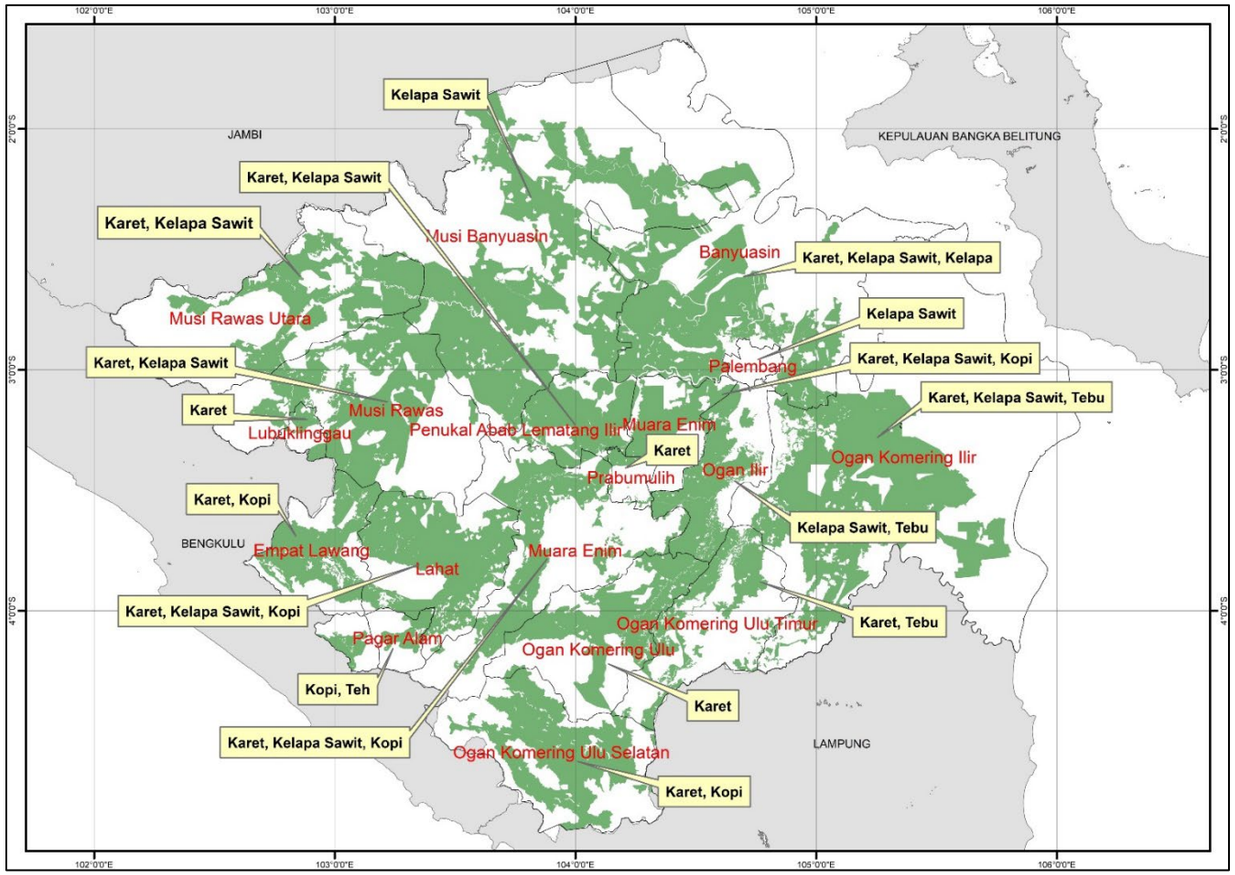

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

d. Kawasan peternakan yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi terutama di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Gambar 2.7.
Peta Kawasan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan

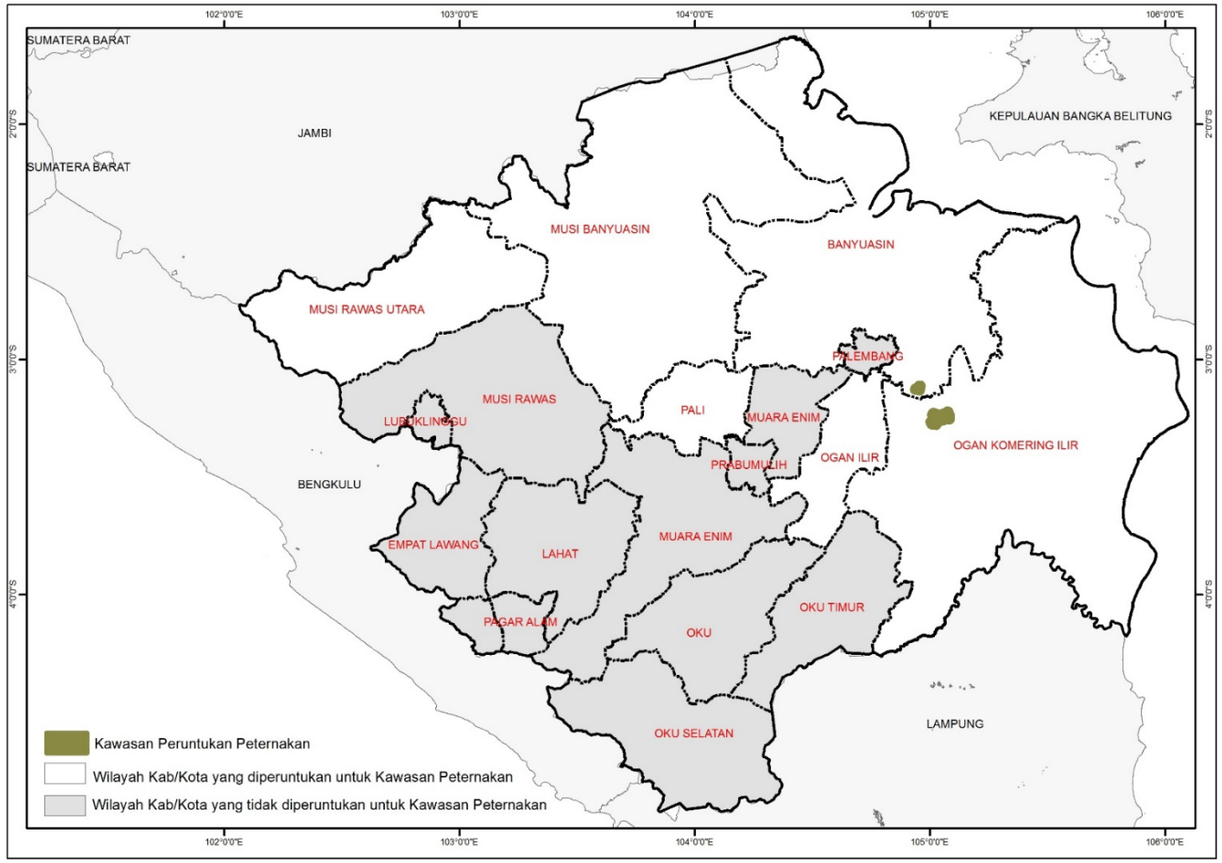

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

3. Kawasan peruntukan perikanan

   Pengembangan perikanan tangkap meliputi:

   a. Perikanan Tangkap Laut, terutama dikembangkan di sepanjang Pantai Timur Sumatera (wilayah pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin); dan
   b. Perikanan Tangkap Perairan Umum, diarahkan di seluruh kabupaten/kota terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas dan Ogan Ilir.

Gambar 2.8.

Peta Kawasan Peruntukan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

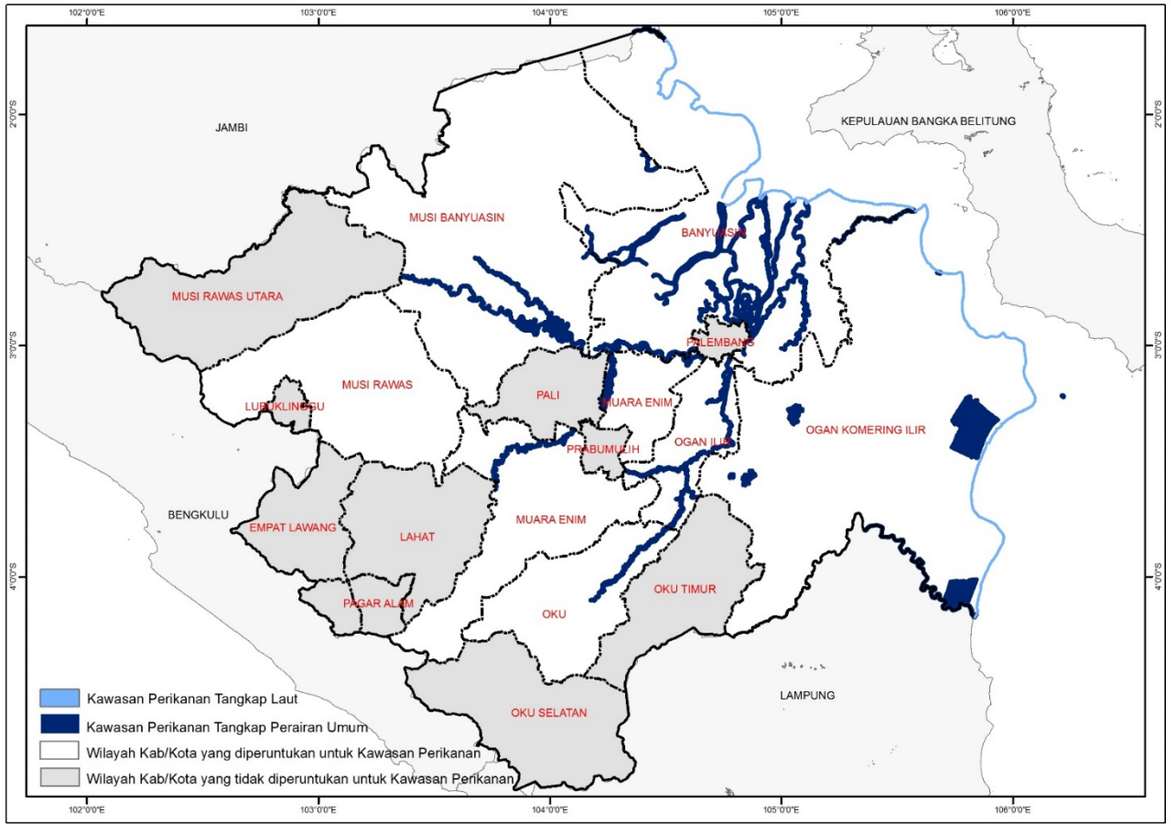

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

4. Kawasan peruntukan permukiman

   Pengembangan Kawasan Permukiman ditujukan untuk menciptakan pemusatan permukiman penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan beserta sarana prasarana dan fasilitas pendukung bagi kegiatan masyarakat.

   Arahan pengembangan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
   b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat; dan
   c. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

5. Kawasan peruntukan pariwisata

   Kriteria dalam penetapan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki:

   a. Keindahan alam dan keindahan panorama;
   b. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan; dan
   c. Bangunan peninggalan budaya atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

   Pengembangan pariwisata diarahkan di setiap kabupaten/kota, dengan prioritas pengembangan pada:

   a. Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, Bukit Siguntang, Kota Pusaka Palembang, Pulau Kemaro, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Pulo Kerto dan Jakabaring Sport City (Palembang);
   b. Megalith dan Air Terjun (Lahat dan Pagar Alam);
   c. Danau Ranau dan sekitarnya (OKU Selatan);
   d. Gunung Dempo dan sekitarnya (Pagar Alam);
   e. Gua Putri dan Sekitarnya (OKU);
   f. Danau Teluk Gelam dan Pulau Maspari (OKI);
   g. Taman Nasional Sembilang (Banyuasin);
   h. Air Terjun dan Bukit Sulap (Lubuk Linggau);
   i. Air Terjun (Muara Enim);
   j. Danau Ulak Lia (Musi Banyuasin);
   k. Danau Raya dan sekitarnya (Musi Rawas Utara); dan
   l. Candi Bumi Ayu (Penukal Abab Lematang Ilir).

Gambar 2.9.

Peta Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

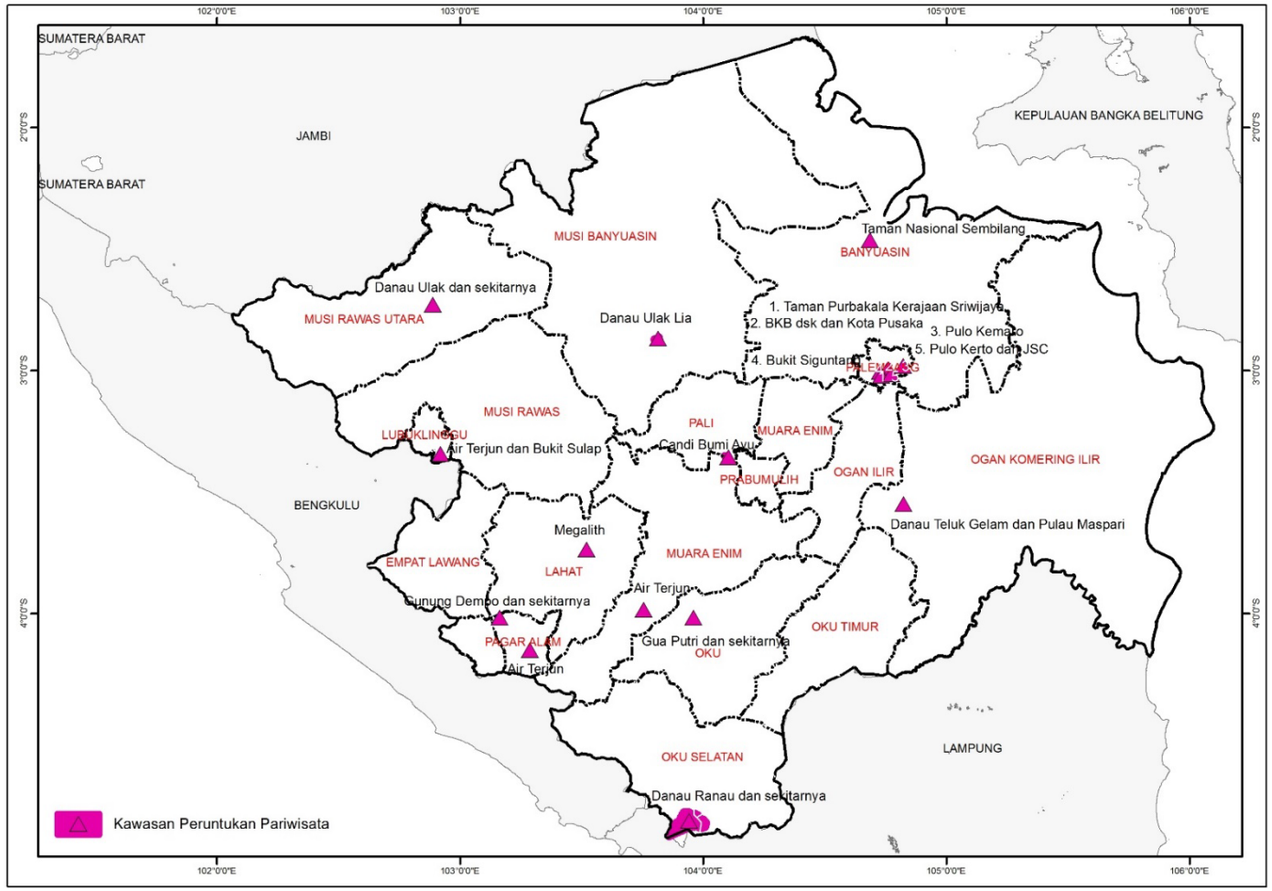

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

6. Kawasan peruntukan industri

   Arahan Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan industri yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas penunjang.

   Pengembangan kawasan industri dikelompokkan berdasarkan jenis industri yang terdapat di Provinsi, yaitu:

   a. Industri skala besar direncanakan dikembangkan di Tanjung Api-Api (Kabupaten Banyuasin) dan Pendopo (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
   b. Industri sedang dan industri kecil dan sentra-sentra industri direncanakan tersebar di setiap kabupaten/ kota; dan
   c. Industri yang menjadi prioritas Provinsi terdapat di Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir.

Gambar 2.10.

Peta Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Sumatera Selatan

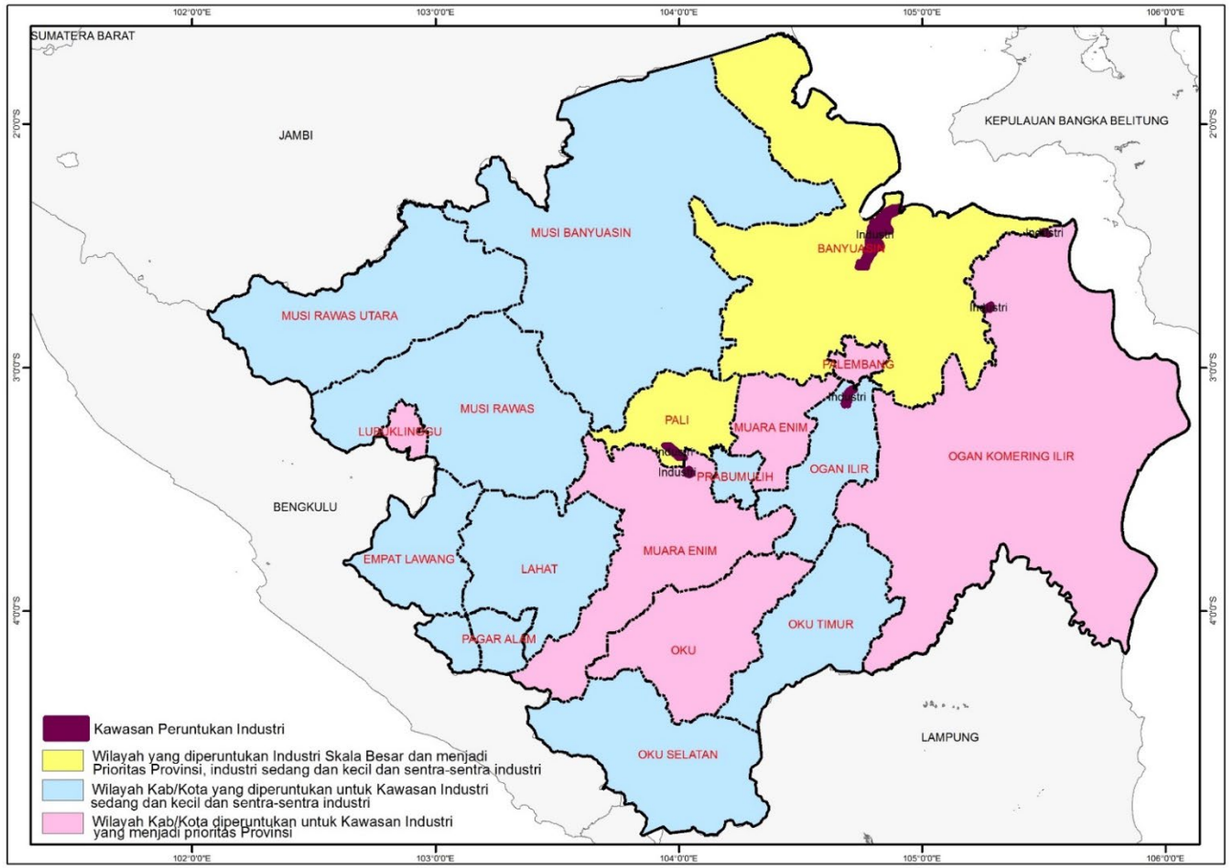

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

7. Kawasan peruntukan lainnya

   Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya ditujukan bagi peruntukan kawasan yang meliputi :

   a. Kawasan dan/atau wilayah pertahanan dan keamanan diarahkan di seluruh wilayah provinsi terutama Daerah Latihan Militer di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur;
   b. Kawasan bersejarah (situs) dan peninggalan perang diarahkan di seluruh wilayah Provinsi; dan
   c. Kawasan pelabuhan dan industri di Kabupaten Banyuasin, meliputi areal reklamasi pantai yang diarahkan peruntukannya sebagai kawasan pelabuhan/ terminal dan industri, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut/Peti Kemas dan Pusat Distribusi Regional (PDR).

Gambar 2.11.
Peta Kawasan Peruntukan Lainnya Provinsi Sumatera Selatan

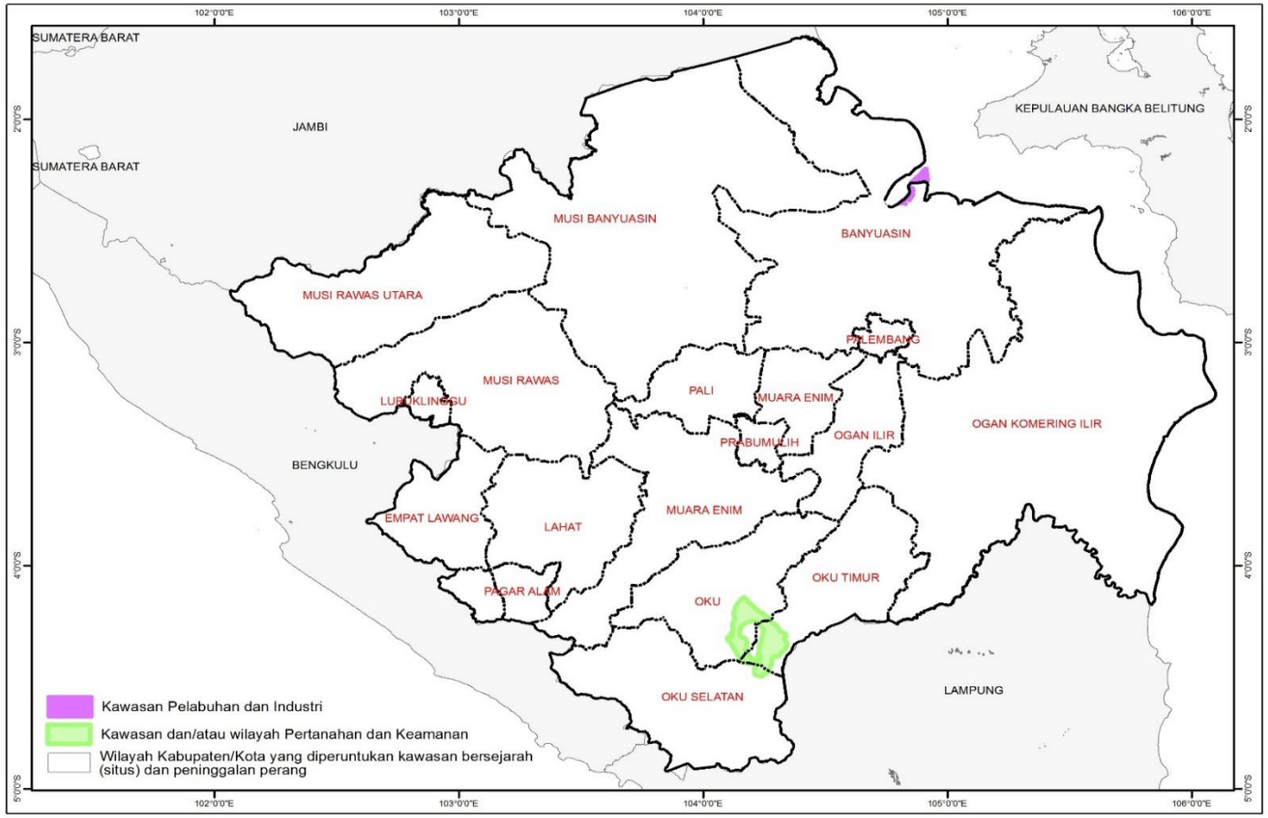

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

2.1.1.1. Wilayah Rawan Bencana

Jumlah kejadian bencana alam dan non alam di Sumatera Selatan pada kurun tahun 2013 sampai tahun 2021 berjumlah 1369 kejadian. Kejadian bencana terbagi atas bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, dan angin puting beliung. Jumlah kejadian bencana terbesar adalah bencana kebakaran sebanyak 805 kejadian dari tahun 2013 sampai tahun 2021.

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2013 – 2021

No	Jenis Bencana	Kejadian Bencana									Total
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Banjir	47	24	22	29	22	34	31	47	**22**	**278**
2	Kebakaran	106	91	90	25	91	99	117	88	**98**	**805**
3	Tanah longsor	23	19	19	9	18	18	14	17	**7**	**144**
4	Puting Beliung	30	7	5	11	25	20	11	12	**21**	**142**
	Total	**206**	**141**	**136**	**74**	**156**	**171**	**173**	**164**	**148**	**1.369**

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan adalah Bencana asap akibat dari kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam dan ulah dari perbuatan manusia seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan, sistem tanam padi sonor dan berbagai kegiatan lainnya yang memicu terjadinya kebakaran hutan. Jumlah bencana banjir sebanyak 278 kejadian yang juga dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Jumlah kejadian bencana terkecil atau yang paling sedikit adalah bencana puting beliung yaitu sebanyak 142 kejadian selama delapan tahun terakhir pada periode 2013-2021.

Rekapitulasi kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 adalah sebanyak 206 kejadian yang terdiri dari bencana banjir, kebakaran, tanah longsor dan angin puting beliung. Pada tahun 2014 jumlah kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 141 kejadian bencana. Pada tahun 2021 jumlah kejadian bencana alam sebanyak 148 kejadian dengan total kejadian bencana alam selama 8 (delapan) tahun terakhir adalah 1.369 kejadian.

Jumlah kejadian bencana terbanyak terdapat di Kota Palembang yaitu sebanyak 182 kejadian selama lima tahun terakhir sedangkan jumlah kejadian yang paling sedikit terjadi di Kota Lubuk Linggau dan

Kabupaten Muratara sebanyak masing-masing 37 kejadian di Kota Lubuk Linggau dan 39 kejadian di Kabupaten Muratara selama tahun 2013-2019. Bencana yang terjadi yang paling banyak sepanjang tahun 2013-2019 adalah bencana alam kebakaran. Secara keseluruhan jumlah kejadian bencana alam mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2013 sampai 2019. Bencana alam yang terjadi tidak hanya disebabkan karena faktor alam melainkan juga disebabkan karena faktor ulah tangan manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, karena dampak dari bencana itu sendiri akan kembali ke manusia dan merugikan dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Dilihat dari Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang sedang dan tinggi. Indeks Risiko bencana tersebut tiap tahunnya stabil dan berada dalam kategori yang rawan sedang dan tinggi. Adapun daerah yang memiliki risiko bencana yang paling tinggi adalah Kabupaten Lahat, sedangkan yang memiliki risiko bencana yang paling sedang adalah Kota Lubuklinggau. Meskipun demikian, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki risiko bencana yang sedang dan tinggi sehingga perlu adanya upaya penanggulangan bencana dan penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.5.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	2013-2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		TOTAL	KELAS	TOTAL	KELAS	TOTAL	KELAS	TOTAL	KELAS	TOTAL	KELAS	TOTAL	KELAS	TOTAL	KELAS
1	OGAN KOMERING ULU	155	TINGGI	155	TINGGI	155	TINGGI	155	TINGGI	155,2	TINGGI	155,2	TINGGI	155,2	TINGGI
2	OGAN KOMERING ILIR	153	TINGGI	153	TINGGI	153	TINGGI	153	TINGGI	153,2	TINGGI	153,2	TINGGI	153,2	TINGGI
3	MUARA ENIM	155	TINGGI	155	TINGGI	155	TINGGI	155	TINGGI	155,2	TINGGI	155,2	TINGGI	155,2	TINGGI
4	LAHAT	162	TINGGI	162	TINGGI	162	TINGGI	162	TINGGI	109,07	SEDANG	109,07	SEDANG	116,55	SEDANG
5	MUSI RAWAS	155	TINGGI	155	TINGGI	155	TINGGI	155	TINGGI	155,2	TINGGI	155,2	TINGGI	145,27	TINGGI
6	MUSI BANYUASIN	132	SEDANG	132	SEDANG	132	SEDANG	132	SEDANG	132,4	SEDANG	132,4	SEDANG	125,53	SEDANG
7	BANYUASIN	156	TINGGI	156	TINGGI	156	TINGGI	156	TINGGI	136,07	SEDANG	141,43	SEDANG	133,14	SEDANG
8	OGAN KOMERING ULU SELATAN	130	SEDANG	130	SEDANG	130	SEDANG	130	SEDANG	130	SEDANG	130	SEDANG	120,26	SEDANG
9	OGAN KOMERING ULU TIMUR	131	SEDANG	131	SEDANG	131	SEDANG	131	SEDANG	131,2	SEDANG	131,2	SEDANG	131,2	SEDANG
10	OGAN ILIR	132	SEDANG	132	SEDANG	132	SEDANG	132	SEDANG	132,4	SEDANG	120,56	SEDANG	116,43	SEDANG
11	EMPAT LAWANG	158	TINGGI	158	TINGGI	158	TINGGI	158	TINGGI	158	SEDANG	158	SEDANG	153,07	TINGGI
12	KOTA PALEMBANG	132	SEDANG	132	SEDANG	132	SEDANG	132	SEDANG	131,6	SEDANG	131,6	SEDANG	131,6	SEDANG
13	KOTA PRABUMULIH	132	SEDANG	132	SEDANG	132	SEDANG	132	SEDANG	132,4	SEDANG	132,4	SEDANG	132,4	SEDANG
14	KOTA PAGAR ALAM	126	SEDANG	126	SEDANG	126	SEDANG	126	SEDANG	126,4	SEDANG	126,4	SEDANG	126,4	SEDANG
15	KOTA LUBUKLINGGAU	125	SEDANG	125	SEDANG	125	SEDANG	125	SEDANG	124,8	SEDANG	124,8	SEDANG	124,8	SEDANG

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1.1.1. Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu dari tahun 2013 hingga Tahun 2019 tercatat 209 kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Berikut adalah kondisi banjir di DAS Musi :

- Di Sub DAS Musi banjir bandang sering terjadi. Pada tahun 1999 di Talang Padang beberapa rumah roboh diterjang banjir. Di Sub DAS Batang Harileko banjir terjadi dipertemuan dengan Sungai Musi.
- Di Sub DAS Rawas banjir terjadi Bingin Teluk dan Noman.
- Di Sub DAS Lematang banjir di Belimbing dan Pagar Alam.
- Di Sub DAS Ogan banjir terjadi Muara Kuang.
- Di Sub DAS Komering banjir terjadi di Muaradua.
- Di pertemuan Sungai Musi - Sungai Kelingi, Sungai Musi - Sungai Lakitan dan Sungai Musi - Sungai Rawas terjadi pada saat debit puncak sungai-sungai.
- Wilayah kota di hilir seperti Palembang dan Sekayu.

2.1.1.1.2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Tercacat 619 kejadian bencana kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 7 tahun yaitu dari Tahun 2013 hingga Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran sangat tinggi terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga diperlukan penanganan dan upaya antisipasi kebakaran di daerah rawan kebakaran

Gambar 2.12.
Peta Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan Sumsel, 2022

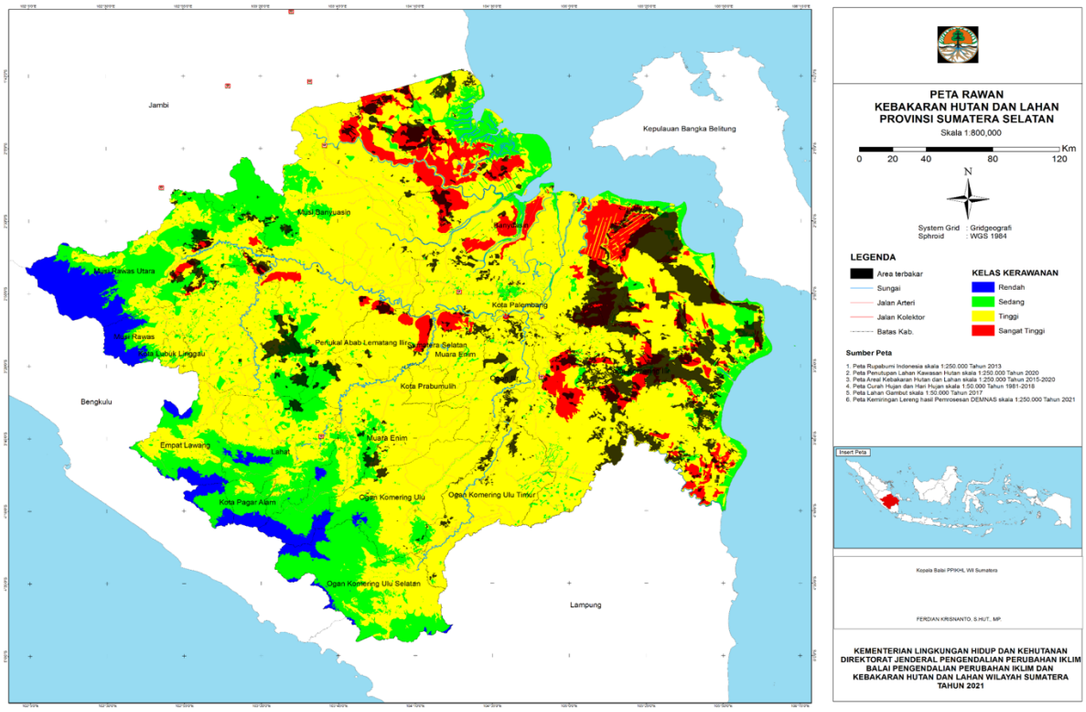

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Pada Peta Rawan Bencana Kebakaran hutan dan lahan Tahun 2022, terlihat bahwa terdapat beberapa titik yang telah terbakar antara lain Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas dan Muara Enim. Kemudian terdapat juga titik-titik dengan kelas kerawanan sangat tinggi antara lain Musi Banyuasin, OKI, PALI, Banyuasin, dan Musi Rawas Utara .

Tabel 2.6.
Data Desa Rawan dan Sangat Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Kecamatan		Desa		Jumlah
		Rawan	Sangat Rawan	Rawan	Sangat Rawan	
1	Ogan Komering Ilir	18	14	63	87	150
2	Banyuasin	19	14	111	35	146
3	Musi Banyuasin	14	12	68	66	134
4	Ogan Ilir	13	7	57	15	72
5	Muara Enim	18	12	102	39	141
6	Penukal Lematang Abab Ilir	5	5	34	11	45
7	Musirawas	13	8	88	27	115
8	Musirawas Utara	7	7	43	21	64
9	Empat Lawang	7	3	47	5	52
10	Lahat	18	7	80	12	92
11	Ogan Komering Ulu	12	7	68	23	91

No	Kabupaten	Kecamatan		Desa		Jumlah
		Rawan	Sangat Rawan	Rawan	Sangat Rawan	
12	Ogan Komering Ulu Selatan	17	8	83	20	103
13	Ogan Komering Ulu Timur	12	na	22	25	47
14	Pagaralam	4	8	5	1	6
15	Palembang	8	1	10	1	11
16	Lubuk Linggau	5	2	9	4	13
17	Prabumulih	5	2	10	4	14
JUMLAH		**195**	**118**	**900**	**396**	**1.296**

Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat desa rawan dan sangat rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015, Kabupaten/Kota yang memiliki desa terbanyak rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 111 desa, sedangkan Kabupaten/Kota yang paling sedikit memiliki desa rawan kebakaran hutan dan bencana adalah Kota Pagaralam yaitu hanya 5 desa.

Kemudian untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai desa terbanyak dengan kategori sangat rawan kebakan hutan dan lahan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jumlah 87 desa, sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki desa paling sedikit dengan kategori sangat rawan kebakaran hutan dan lahan adalah Kota Pagaralam dan Kota Palembang yaitu hanya satu desa.

Tabel 2.7.
Data Desa Tangguh di BPBD Kabupaten di Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Desa	Kecamatan	Ket
1	Ogan Ilir	Rambutan	Indralaya Utara	
		Tanjung Pering	Indralaya Utara	
2	Ogan Komering Ilir	Riding	Pangkalan Lampan	
		Sumber Makmur	Lempuing	
		Suka Putih	Pedamaran	
		Cinta Jaya	Pedamaran	
		Tanjung Beringin	Tanjung Lubuk	
		Kota Bumi	Tanjung Lubuk	
3	Banyuasin	Lebung	Rantau Bayur	
4	Musi Banyuasin	Mangsang	Bayung Lincir	
		Muara Medak	Bayung Lincir	
		Mendes	Bayung Lincir	

Sumber: Sumber: Dinas BPBD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui desa tangguh di BPBD Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Pada Kabupaten Ogan Ilir terdapat dua desa yang masuk dalam data Desa Tangguh yaitu, Desa Rambutan dan Desa Tanjung Pering yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara. Selanjutnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki enam desa yaitu, Desa Riding, Desa Suka Putih, Desa Cinta Jaya, Desa Tanjung Beringin, dan Desa Kota Bumi.

Selanjutnya pada Kabupaten Banyuasin hanya terdapat di Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, dan yang terakhir adalah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tiga Desa Tangguh yaitu, Desa Mangsang, Desa Muara Medak, dan Desa Mendes yang terletak di Kecamatan Bayung Lincir.

2.1.1.1.3. Bencana Tanah Longsor

Tercacat 105 kejadian longsor di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017. Berdasarkan dari data hasil pemetaan gerakan tanah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan, dapat diketahui bahwa potensi gerakan tanah yang melanda Provinsi Sumatera Selatan relatif cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari data yang tercatat bahwa terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki potensi gerakan tanah, dimana lokasi yang memiliki potensi sebagian besar berada pada jaringan jalan dengan jenis potensi bencana berupa longsor. Kabupaten/kota yang rawan mengalami longsor adalah Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

Tabel 2.8.
Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
1	Musi Rawas	Surulangun		Longsor	Jalan raya
		Muara Rupit	Madang	Longsor	Jalan raya
			Bingin rupit	Longsor	Jalan raya
			Tanjung Beringin	Longsor	Jalan raya
		Muara Kelingi			
		Muara Beliti			
		Terawas			
2	Lahat	Pendopo	Lingge	Longsor	Kebun kopi & buah

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
			Tanjung Raya	Longsor	Kebun kopi & buah
		Tanjung Sakti	Tebing S. Manna	Runtuh	Jalan raya, km 10
			Pulau panas	Longsor Batu	Jalan raya, km 19,5
			Sindang Panjang	Runtuh Batu	Jalan raya, km 27
			Tanjung Sakti Lama	Longsor Batu	Jalan raya, km 2
			Ds Pulau Timun	Longsor	Jalan raya, km 8
		Pulau Pinang	Ds Tj. Mulak	Amblesan	Badan jalan 5 m
				Gejala runtuh	km 17
			Tanjung Sirih	aliran batu	Jalan raya, km 14
			Muara Seban	kompleks	Jalan raya, km 3
			Jati	longsoran	Jalan raya, km 3,3
			Kuba	longsoran	Jalan raya, km 6,4
		Kikim	Saung Naga	longsoran	Jalan raya, km 63
			Bungamas	longsoran	Jalan raya, km 15
			Gunung Kerto	longsoran	Jalan raya, km 40
			Paduraksa	longsoran	Jalan raya, km 34,5
			Gn. Kembang	longsoran	Jalan raya, km 25
		Lahat	Sugiwaras	longsoran	Jalan raya, km 19,5
			Sukarame	longsoran	Jalan raya, km 18,5
		Kota Agung	Tj. Tebat	longsoran	Jalan raya, km 31,5
3	Empat Lawang	Ulu Musi	Bandaraji	Longsor	Jalan raya
			Karang Jaya	Longsor	Jalan raya
			Tangga Rasa	Longsor	Jalan raya
			Karang Dapo	Longsor	Tebing sungai
		Tebing tinggi	Penanggungan	kompleks	Jalan raya, km 72
4	Pagar Alam	Dempo selatan	Paharudipo	gejala runtuh	Jalan raya, km 56
			Sukajadi	gejala runtuh	Jalan raya, km 57
			Air Betung	gejala runtuh	Jalan raya, km 5 PA
			Mingkik	gejala runtuh	Jalan raya, km 37,5
		Dempo Utara	Krinjing	longsor	Jalan raya, km 15-18

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
5	Muara Enim	G. Megang	Ujanmas	longsor	Jalan raya
		Tanjung Enim	Tanjung Raja	longsor	Jalan raya
		Tanjung Agung	Darmo	longsor	Jalan raya
			Seleman	longsor	Jalan raya
			Paduraksa	longsor	Jalan raya
			Padang Bindu	longsor	Jalan raya, km 4-9
			Talang T. Benawa	Aliran tanah	Jalan raya, km 13
			Talang T. Semen	Aliran tanah	Jalan raya, km 16
		Semedo Darat Laut	Talang habibnuh	longsor	Jalan raya, km 19
			Talang keli	longsor	Jalan raya, km 23
			talang P.Rinkeh	longsor	Jalan raya, km 27-30
			Pulau Panggung	Runtuh	Jalan raya
			Padang Bindu	Runtuh	Jalan raya
			Sukaraya	Aliran tanah	Jalan raya
			Penyandingan	Aliran tanah	kebun
			Talang Gudang	longsor	Jalan raya, km 35
			Ds. P Panggung	longsor	Jalan raya, km 3 - 3,2
			Ds. Batusurau	Runtuh	Jalan raya, km 4,3
			Ds. Muarobanau	longsor	Jalan raya, km 3
			Ds. Penyandingan	longsor	Jalan raya, km 72
			Karang raja	longsor	Jalan raya, km 6
			Lingga	longsor	Jalan raya, km 12
		Semedo Darat Tengah	Ds. Sri Tanjung	longsor	Jalan raya, km 11
			Ds. Muara Tenang	longsor	Jalan raya, km 14
		Muara Enim	Karang raja	longsor	Jalan raya, km 6
			Lingga	longsor	Jalan raya, km 12
		Lawang Kidul	Karang asam	longsor	Jalan raya, km 16
		Tanjung Agung	Penyandingan	longsor	Jalan raya, km 29
			Pandan enim	Runtuh	Jalan raya, km 49
			Pulau Pinang	Runtuh	Jalan raya, km 51
			Pandan Dulang	Runtuh	Jalan raya, km 52

No	Daerah Yang Berpotensi			Jenis	Keterangan
	Kab/Kota	Kecamatan	Desa		
			Simpang Meo	longsor	Jalan raya, km 56
6	OKU	Pengandonan		longsor	Jalan raya
7	OKU Timur	Martapura		longsor	Jalan raya
8	*OKU Selatan*	*Muara dua*		*longsor*	*Jalan raya*
		Banding agung	Ds Mekakau hilir	Aliran tanah	Jalan Desa
		Pulau beringin	P Bgin- Ulu Danau	Aliran tanah	Jalan raya
			Gunung Batu	Runtuh Batu	Jalan raya
			Pagar agung	longsoran	Jalan raya
			Wates	Runtuh Batu	Jalan Desa

Sumber : Pemetaan Gerakan Tanah Dinas Pertambangan dan Energi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,93 persen dan terjadi pada sebagian lapangan usaha, namun masih di atas capaian Nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen.

Gambar 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2021

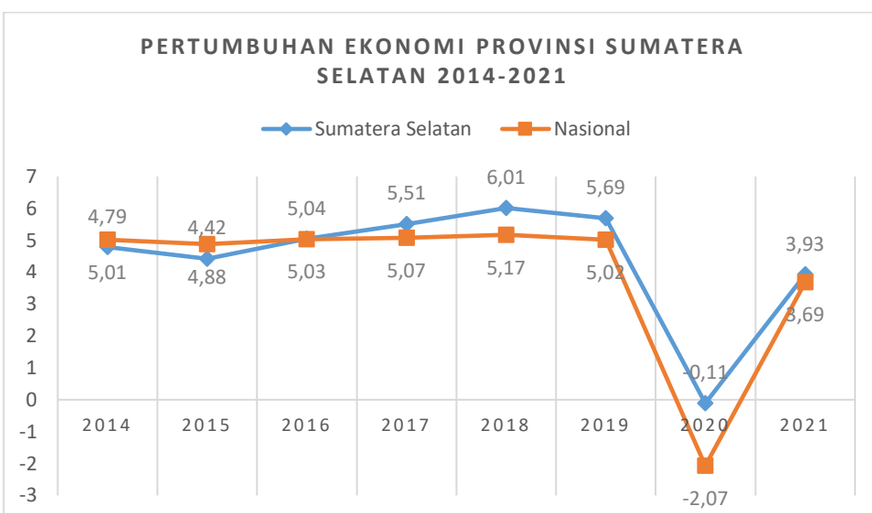

Sumber: BPS Tahun 2022

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diantaranya Jasa Pendidikan sebesar 6,57 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,04 persen; dan Real Estate sebesar 5,81

persen. Adapun Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga tumbuh sebesar 2,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan ada beberapa lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi antara lain Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,69 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,86 persen. Konstruksi yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen.

Tabel 2.9.
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2017-2021

KATEGORI	Lapangan Usaha	Pertumbuhan					Distribusi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	2,33	3,34	1,75	2,91	15,80	14,84	14,48	15,22	15,12
B	Pertambangan dan Penggalian	5,40	9,09	8,11	-4,08	5,35	19,24	20,17	20,33	18,35	19,92
C	Industri Pengolahan	6,55	5,40	4,82	0,72	2,30	19,56	19,51	19,37	19,81	19,46
D	Pengadaan Listrik dan	5,30	8,85	10,29	14,67	5,76	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,13	7,96	7,46	4,83	-4,69	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
F	Konstruksi	8,92	5,59	3,34	-0,01	-0,02	13,24	12,99	12,55	12,50	12,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,69	8,09	8,22	-1,34	5,79	12,43	12,95	13,54	13,65	13,52
H	Transportasi dan Pergudangan	8,37	7,36	8,30	-5,91	-1,86	2,31	2,37	2,48	2,34	2,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,15	13,15	15,34	-7,21	4,43	1,64	1,76	1,97	1,88	1,83
J	Informasi dan Komunikasi	8,43	7,73	8,15	12,79	6,04	2,78	2,85	2,91	3,27	3,22
K	Jasa Keuangan dan	2,72	1,78	-1,44	1,64	4,19	2,63	2,54	2,36	2,38	2,39
L	Real Estate	7,33	7,95	8,03	2,24	5,81	3,03	3,08	3,19	3,33	3,31
M,N	Jasa Perusahaan	7,93	9,51	9,57	-2,08	0,60	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,40	2,70	1,09	4,17	3,88	3,16	2,85	2,67	2,89	2,79
P	Jasa Pendidikan	0,21	2,72	4,73	-1,50	6,57	2,47	2,36	2,35	2,40	2,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,19	2,56	9,57	10,14	5,63	0,62	0,59	0,62	0,71	0,71
R,S,T,	Jasa lainnya	4,41	9,06	7,77	5,23	0,93	0,73	0,76	0,79	0,85	0,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		**5,04**	**6,01**	**5,69**	**-0,11**	**3,58**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2022

Pada tahun 2021, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah: 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,92%; 2) Industri Pengolahan sebesar 19,46%; 3) Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan sebesar 15,12%; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,52% dan 5) Konstruksi sebesar 12,00%.

Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2014-2021

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2014-2021							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Pertambangan dan Penggalian (23,93%)	Pertambangan dan Penggalian (21,81%)	Industri Pengolahan (19,94%)	Industri Pengolahan (19,56%)	Pertambangan dan Penggalian (20,17%)	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambang an dan Penggalian (19,92)%
II	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,76%)	Industri Pengolahan (18,36%)	Pertambangan dan Penggalian (19,71%)	Pertambangan dan Penggalian (19,24%)	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35)%	Industri Pengolahan (19,46%)
III	Industri Pengolahan (17,35%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,13%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,70%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,80%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,12%)
IV	Konstruksi (13,40%)	Konstruksi (12,58%)	Konstruksi (13,10%)	Konstruksi (13,24%)	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)
V	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,07%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,58%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,68%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,43%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2014-2021, dimana dari tahun 2015 sampai dengan 2020 posisi tertinggi bergantian berada di sektor pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan, pada tahun 2020 peringkat teratas terkait kontribusi sektor lapangan usaha yaitu di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,92%, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,46%, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,12%, peringkat ke 4 dan ke 5 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,52% dan sektor konstruksi sebesar 12,00%.

Meningkatnya sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2021 dipengaruhi oleh kenaikan volume produksi batubara serta perbaikan harga komoditas batubara global yang masih berlanjut. Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertambangan dan penggalian sebesar 19,92%, industri pengolahan sebesar 19,46% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,12%.

Tabel 2.11.

PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2013-2021 (Triliun Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Triliun Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	60.507,65	62.231,17	65.661,81	69.501,21	74.311,31
B. Pertambangan dan Penggalian	73.673,20	84.604,26	92.166,26	83.796,10	97.933,56
C. Industri Pengolaham	74.900,28	81.822,06	87.834,52	90.477,24	95.639,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	493,32	536,90	575,06	673,04	727,68
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	444,86	501,98	557,98	606,00	594,96
F. Konstruksi	50.682,61	54.494,83	56.906,62	57.092,35	58.982,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.577,22	54.322,42	61.412,85	62.324,46	66.480,85
H. Transportasi dan Pergudangan	8.854,64	9.947,75	11.223,42	10.664,00	10.512,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.263,42	7.396,58	8.937,50	8.594,71	9.008,09
J. Informasi dan Komunikasi	10.627,82	11.943,21	13.177,44	14.936,51	15.852,29
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10.081,69	10.640,92	10.716,05	10.878,28	11.728,23
L. Real Estat	11.596,64	12.901,15	14.462,11	15.202,63	16.294,01
M,N. Jasa Perusahaan	459,95	529,79	615,14	616,52	623,07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12.098,34	11.959,46	12.100,89	13.198,71	13.722,16
P. Jasa Pendidikan	9.463,37	9.899,24	10.636,67	10.941,94	11.734,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.365,74	2.479,31	2.820,44	3.254,87	3.473,37
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.794,96	3.178,14	3.598,13	3.889,29	3.947,37
Produk Domestik Regional Bruto	**382.885,70**	**419.392,16**	**453.402,71**	**456.647,86**	**491.566,45**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2017-2021, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2017 nilai PDRB ADHB dengan migas sebesar 382.885,70 Miliar Rupiah meningkat menjadi 491.566,45 Miliar Rupiah tahun 2021.

Tabel 2.12.

PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	ADHB Per Kategori (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	257.277,12	277.771,06	296.904,98	296.555,35	307.655,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.688,64	6.358,15	7.240,99	6.748,58	7.130,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29.902,58	32.460,27	36.686,87	32.465,00	34.555,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146.998,04	157.634,55	160.152,72	163.051,12	163.215,57
5. Perubahan Inventori	189,64	-972,55	-731,37	-1.972,33	80,65
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	-57.170,31	-53.859,32	-46.851,48	-40.199,85	-21.071,13
Produk Domestik Regional Bruto	**382.885,70**	**419.392,16**	**453.402,71**	**456.647,86**	**491.566,45**

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2022

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2012-2020 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2017 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 257.277,12 miliar rupiah pada tahun 2021 meningkat menjadi 307.655,30 miliar. Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2017 sebesar 146.998,04 miliar rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 163.215,57 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.13.

PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	ADHK Per Kategori (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	175.670,78	183.420,98	190.641,45	186.943,08	190.560,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.202,88	4.563,10	5.009,23	4.710,91	4.806,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.167,19	21.604,63	22.801,46	19.869,06	20.444,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	107.287,54	111.301,18	113.186,34	114.605,19	111.007,10
5. Perubahan Inventori	**313,21**	**-227,60**	**-319,38**	**-1.331,43**	**54,85**
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	**-26.070,58**	**-22.178,22**	**-15.854,35**	**-9.667,59**	**-466,25**
PDRB	**281.571,01**	**298.484,07**	**315.464,75**	**315.129,22**	**326.407,93**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2017-2021 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2017 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 175.670,78 miliar rupiah pada tahun 2021 meningkat menjadi 190.560,72 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2017 sebesar 107.287,54 miliar rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 111.007,10, komponen ini terus mengalami peningkatan tiap tahunya.

Laju Inflasi

Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2021 mengalami Inflasi sebesar 0,42 persen, Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Desember 2021 sama dengan Inflasi Tahunan "Year on Year" (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,82 persen. Komoditas dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Desember 2021 di Sumatera Selatan antara lain: minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit yang mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan rata-rata harga bulan November 2021. Berdasarkan kelompok pengeluaran, diuraikan sebagai berikut:

1. **Makanan, Minuman, dan Tembakau**, pada bulan Desember 2021 kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi sebesar 1,24 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,37 persen. Komoditas dominan menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini, adalah minyak goreng naik harganya rata-rata sebesar 9,43 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,14 persen, daging ayam ras naik harganya rata-rata sebesar 4,51 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,08 persen, dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 8,82 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,07 persen. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga signifkan pada kelompok ini, yaitu tomat turun harganya rata-rata sebesar sebesar 14,74 persen menyumbang andil inflasi sebesar -0,04 persen.
2. **Pakaian dan Alas Kaki**, pada bulan Desember 2021 kelompok pengeluaran ini tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen. Perubahan harga tipis komoditas pada kelompok ini tidak memberikan andil inflai secara signifikan.
3. **Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,06 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,01 persen. Komoditas dominan menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini, adalah semen mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 1,75 persen, menyumbang andil inflasi sebesar 0,01 persen. Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga , yaitu cat tembok, seng, multiroof/ genteng metal dan besi beton namun tidak memberikan andil inflasi secara signifikan.
4. **Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,13 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,01 persen. Komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini adalah sabun detergent bubuk/cair, sabun cair/cuci piring, dan kipas angin, mengalami kenaikan harga tipis, yang secara kumulatif memberikan andil inflasi sebesar 0,01 persen.

5. **Kesehatan**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen. Komoditas menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini diantaranya obat batuk mengalami kenaikan harga tipis tetapi tidak memberikan andil inflasi secara signifikan.
6. **Transportasi**, pada bulan Desember 2021 kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi sebesar 0,16 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,02 persen. Komoditas dominan menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini, adalah angkutan udara mengalami kenaikan harga sebesar 1,73 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,01 persen, angkutan antar kota mengalami kenaikan harga sebesar 1,77 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,01 persen. Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga pada kelompok ini adalah mobil dan tarif kereta api mengalami kenaikan harga namun tidak memberikan andil inflasi secara signifikan.
7. **Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,04 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,00 persen. Komoditas penyebab terjadinya deflasi pada kelompok ini adalah biaya administrasi transfer uang mengalami penurunan harga sebesar 9,23 persen namun tidak menyumbang andil inflasi secara signifikan.
8. **Rekreasi, Olahraga, dan Budaya**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen
9. **Pendidikan**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen.
10. **Penyediaan Makanan, Minuman/Restoran**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,20 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,02 persen. Komoditas dominan menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini, adalah mie siap saji mengalami kenaikan harga sebesar 1,83 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,01 persen, dan ikan goreng, kopi siap saji, soto, nasi dengan lauk, sate mengalami kenaikan harga tipis menyumbang andil inflasi secara kumulatif sebesar 0,01 persen.

11. **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,05 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,00 persen. Komoditas yang menyebabkan deflasi pada kelompok ini pada bulan Desember 2021, yaitu emas perhiasan mengalami penurunan harga rata-rata sebesar 0,37 persen dan tidak menyumbang andil inflasi secara signifikan.

Gambar 2.14.
Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera, 2021 (%)

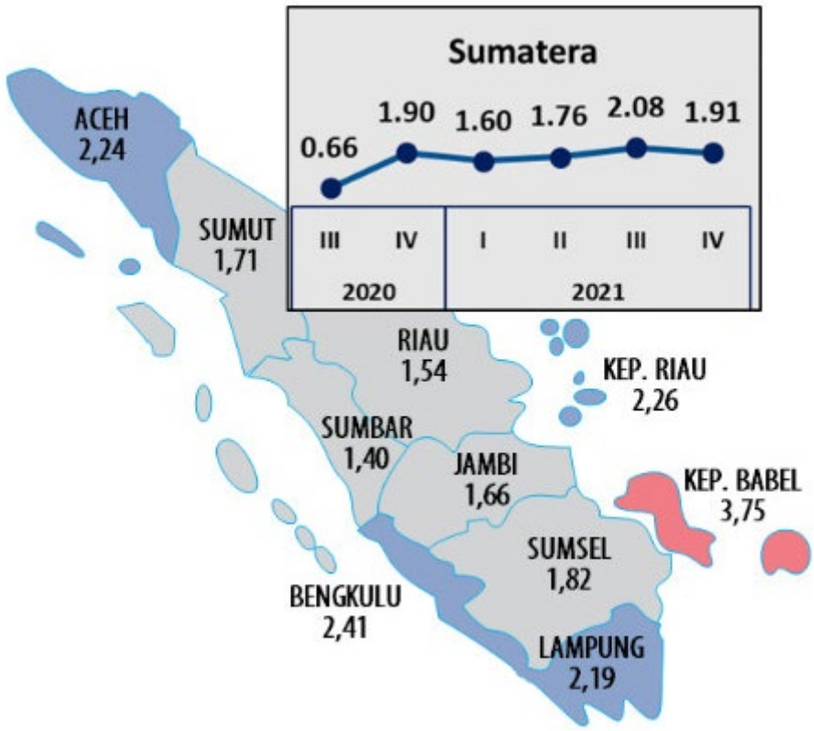

Sumber: Laporan Nusantara Februari 2022, Bank Indonesia (Diolah)

Jika melihat perbandingan inflasi pada tahun 2021 di Pulau Sumatera, inflasi Provinsi Sumatera Selatan (1,82%) masih relatif terkendali dan berada di bawah inflasi nasional (1,87% yoy). Selain itu, secara urutan di Pulau Sumatera, inflasi Sumsel berada pada urutan kelima terendah setelah Provinsi Sumatera Utara (1,71%).

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,48 persen (*yoy*), khusus tahun 2014 kenaikan inflasi Sumsel meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di pertengahan triwulan IV 2014. Pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,10 persen hingga tahun 2021 sebesar 1,82 persen.

Gambar 2.15.
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2011-2021

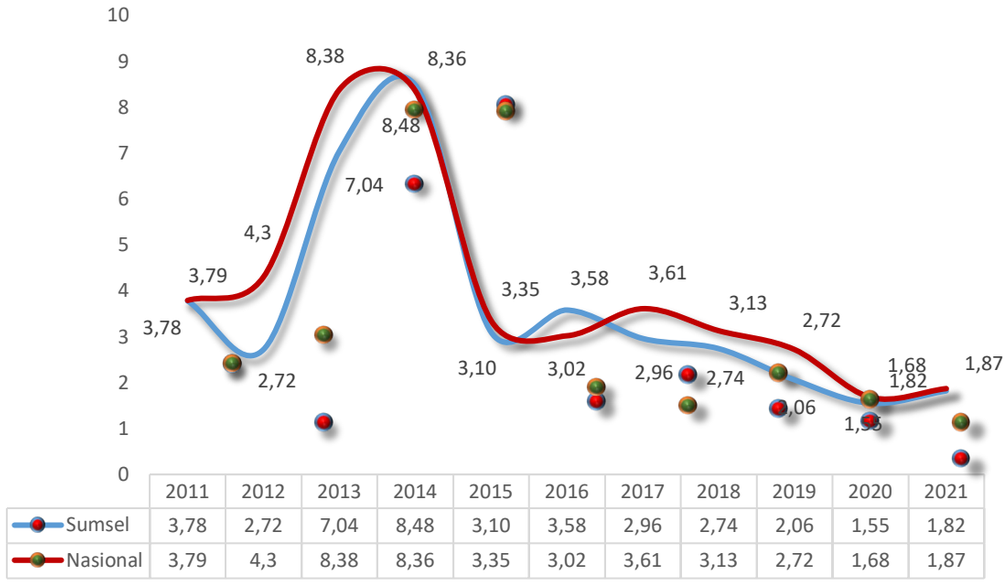

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumsel	3,78	2,72	7,04	8,48	3,10	3,58	2,96	2,74	2,06	1,55	1,82
Nasional	3,79	4,3	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Gini Ratio

Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2015-2021 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun terakhir atau pada periode September 2020-September 2021 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 0,338 keadaan September 2020 menjadi 0,340 keadaan September 2021 atau naik 0,002 poin, tetapi terjadi penurunan untuk periode Maret 2021-September 2021 sebesar 0,001 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 2.16.
Gini Ratio Sumatera Selatan

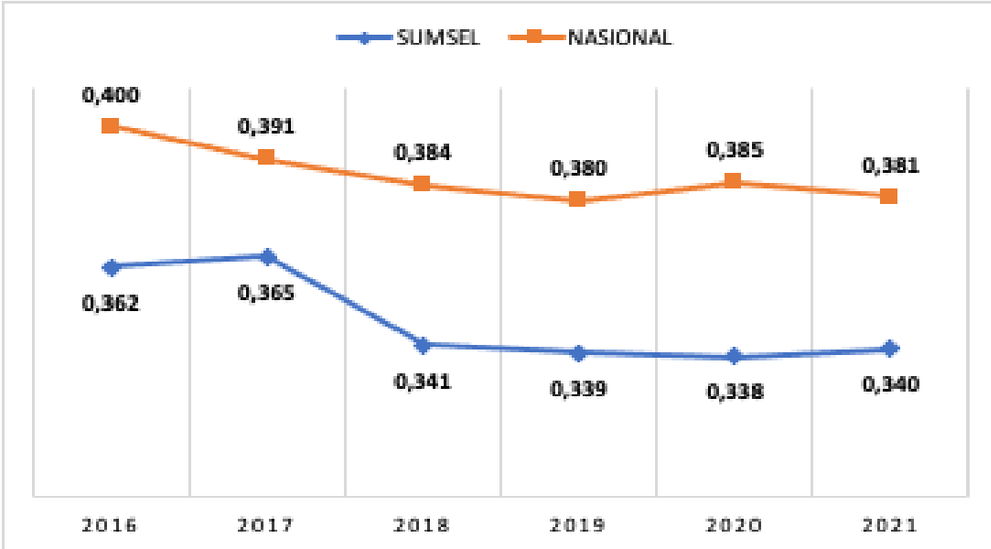

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Ditinjau dari wilayahnya, Gini Ratio di daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan. Gini ratio perkotaan pada September 2021 sebesar 0,363 sedangkan di perdesaan sebesar 0,314. Gini ratio di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan pada periode 2016-2021 mengalami fluktuasi, namun dalam satu tahun terakhir atau periode September 2020-September 2021 Gini Ratio daerah perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami peningkatan. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan searah dengan kondisi nasional, yang diperkirakan juga terkait dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di daerah perkotaan.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada September 2021 mencapai 12,79% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada September 2021 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2020 yang sebesar 12,98%. Penurunan ini searah dengan kondisi yang terjadi secara nasional. Hal ini merupakan salah satu dampak dari mulai pulihnya aktivitas ekonomi akibat pelonggaran pembatasan kegiatan karena kasus COVID-19 yang

perlahan-lahan mereda. Secara Umum, tren pertumbuhan penduduk miskin di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan yang diikuti oleh kenaikan nominal garis kemiskinan.

Gambar 2.17.
Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2011-2021

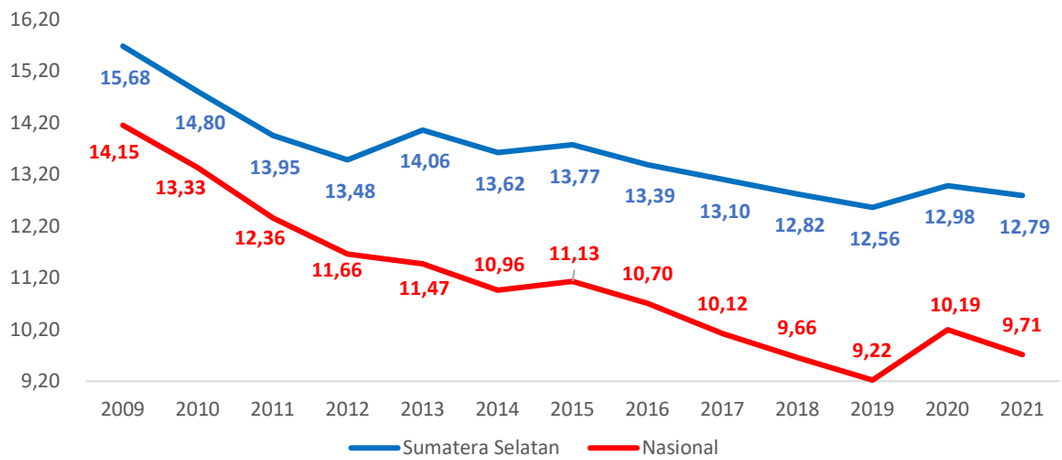

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 mencapai 70,24 dan merupakan tahun kedua status IPM kategori "tinggi" walaupun capaian Provinsi masih di bawah capaian Nasional sebesar 72,29. IPM Provinsi Sumatera Selatan rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen pertahunnya.

Gambar 2.18.
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2021

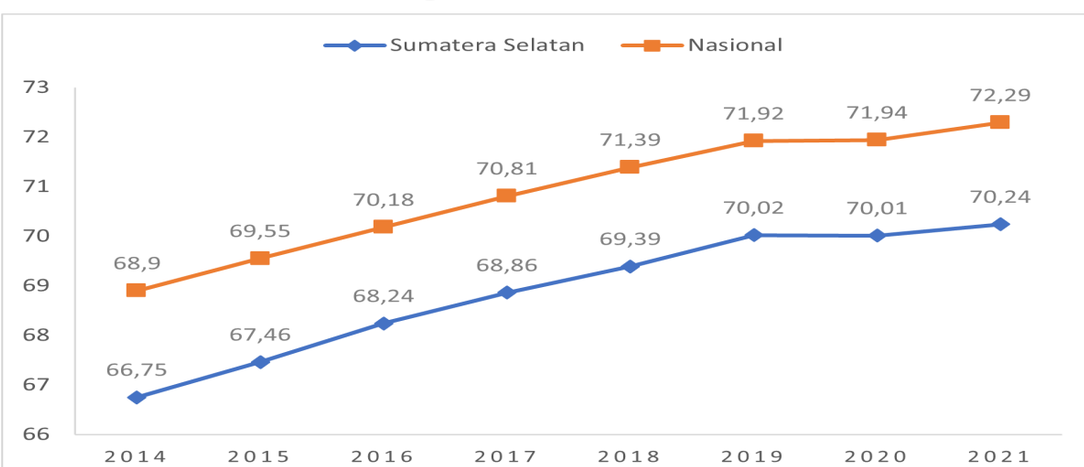

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan dimana capaian Sumatera Selatan Tahun 2021 sebesar 98,78 sudah jauh lebih baik dibandingkan capaian nasional yang sebesar 96,04. Angka melek huruf menunjukan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan sudah hampir mencapai 100% atau masyarakat yang buta huruf semakin berkurang.

Gambar 2.19.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas, 2016-2021

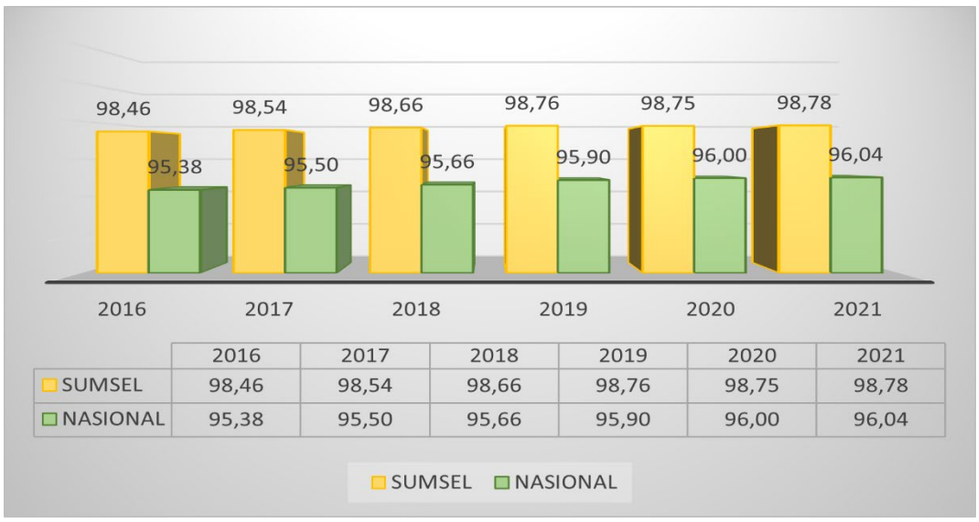

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SUMSEL	98,46	98,54	98,66	98,76	98,75	98,78
NASIONAL	95,38	95,50	95,66	95,90	96,00	96,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.20.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

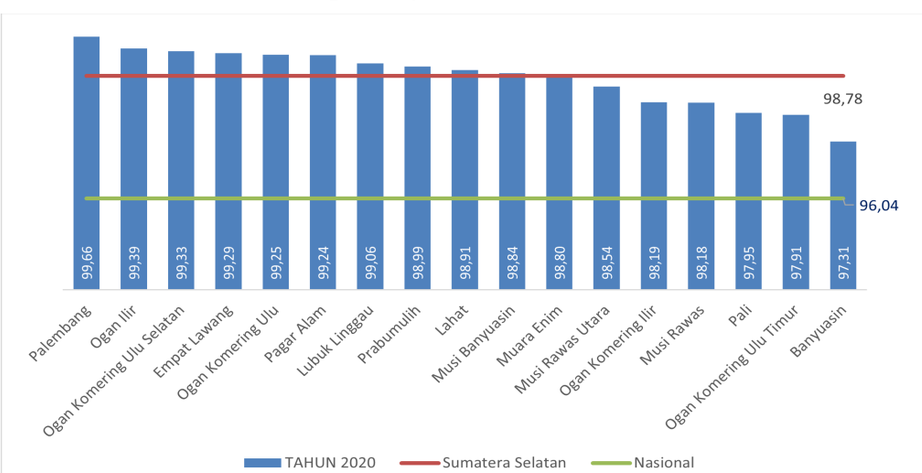

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tahun 2021, capaian angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota bervariasi. Angka melek huruf tertinggi dicapai oleh Kota Palembang, dan terendah di Kabupaten Banyuasin. Apabila dibandingkan capaian nasional maka angka melek huruf semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan cukup baik karena di atas capaian Nasional.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah diukur pada penduduk usia 25 tahun ke atas sebagaimana perhitungan IPM Metode baru dimana rata rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani (tidak termasuk tahun mengulang).

Angka rata-rata lama sekolah pada Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 7,66, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 8,30. Menurut kabupaten/kota, angka rata-rata lama sekolah yang tersingkat pada tahun 2021 yaitu Kabupaten PALI dan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada pada angka 7,05 tahun atau setara tahun pertama pada Sekolah Menengah Pertama. Sementara Kota Palembang sudah mencapai rata-rata kelas 1 SMA menyusul kemudian Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih dan Kota Lubuk Linggau yang sudah mencapai kelas 3 SMP. Untuk kabupaten/kota lainnya, angka rata-rata lama sekolah masih setara dengan kelas 1 sampai dengan kelas 2 SMP.

Tabel 2.14.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas
Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota
Pada Tahun 2014-2021 (tahun)

No	Wilayah Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ogan Komering Ulu	7,91	8,17	8,33	8,67	8,68	8,69	8,70	8,71
2	Ogan Komering Ilir	6,44	6,45	6,74	7,01	7,02	7 03	7,04	7,05
3	Muara Enim	7,19	7,40	7,41	7,49	7,60	7,78	7,79	7,80
4	Lahat	7,86	8,09	8,10	8,43	8,44	8,45	8,46	8,52
5	Musi Rawas	6,61	6,69	6,85	7,18	7,28	7,51	7,52	7,53
6	Musi Banyuasin	7,18	7,54	7,55	7,59	7,60	7,61	7,62	7,63
7	Banyuasin	6,87	6,88	6,89	7,16	7,17	7,19	7,20	7,44
8	OKU Selatan	7,30	7,46	7,47	7,66	7,82	7,83	7,84	7,85
9	OKU Timur	7,05	7,05	7,06	7,12	7,27	7,54	7,55	7,56
10	Ogan Ilir	7,34	7,35	7,36	7,37	7,58	7,85	7,86	7,87
11	Empat Lawang	7,14	7,29	7,30	7,37	7,38	7,39	7,60	7,64
12	PALI	6,50	6,53	6,54	6,57	6,58	6,75	7,04	7,05
13	Musi Rawas Utara	6,06	6,33	6,43	6,44	6,45	6,50	6,84	7,09
14	Kota Palembang	10,23	10,25	10,35	10,36	10,37	10,52	10,53	10,75
15	Kota Prabumulih	9,60	9,62	9,67	9,68	9,71	9,72	9,96	9,97
16	Kota Pagar Alam	8,61	8,63	8,64	8,93	9,08	9,14	9,39	9,40
17	Kota Lubuk Linggau	9,32	9,47	9,49	9,50	9,51	9,81	9,89	9,90
Sumatera Selatan		**7,66**	**7,77**	**7,83**	**7,99**	**8,00**	**8,18**	**8,24**	**8,30**
Nasional		**7,73**	**7,84**	**7,95**	**8,10**	**8,17**	**8,34**	**8,48**	**8,54**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dampak Program Sekolah Gratis yang dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang belum dapat diukur dampaknya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan karena anak-anak yang mengikuti Program Sekolah Gratis masih dibawah umur 25 tahun sehingga belum menjadi responden pengukuran. Dampak Program Sekolah Gratis tersebut akan mulai terlihat nyata setelah anak-anak tersebut usia diatas 25 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah pada Provinsi Sumatera selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,75 tahun sedangkan pada tahun 2021 sebesar 12,54 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Sementara itu, di tingkat

Kabupaten/Kota, angka harapan lama sekolah yang tersingkat pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu baru 11,68 tahun. Sementara angka harapan lama sekolah yang terlama berada di Kota Palembang sudah mencapai 14,42 tahun.

Tabel 2.15.
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2021 (tahun)

No	Wilayah Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ogan Komering Ulu	11,99	12,54	12,55	12,56	12,57	12,59	12,60	12,83
2	Ogan Komering Ilir	10,78	11,34	11,35	11,39	11,40	11,41	11,42	11,68
3	Muara Enim	11,48	11,49	11,93	11,94	11,95	11,96	11,97	11,98
4	Lahat	12,25	12,29	12,30	12,31	12,32	12,33	12,34	12,35
5	Musi Rawas	11,10	11,63	11,73	11,74	11,99	12,07	12,08	12,19
6	Musi Banyuasin	11,57	11,79	11,80	11,97	11,98	11,99	12,00	12,29
7	Banyuasin	10,87	11,32	11,71	11,72	11,73	11,74	11,75	11,77
8	OKU Selatan	11,21	11,22	11,58	11,72	11,73	11,74	11,75	11,76
9	OKU Timur	11,66	11,79	11,79	11,97	12,04	12,22	12,23	12,45
10	Ogan Ilir	11,63	12,24	12,26	12,27	12,28	12,29	12,30	12,31
11	Empat Lawang	11,84	11,85	12,02	12,03	12,04	12,05	12,06	12,07
12	PALI	10,13	10,56	10,92	11,30	11,70	11,90	12,05	12,17
13	Musi Rawas Utara	10,89	11,22	11,53	11,54	11,55	11,56	11,57	11,58
14	Kota Palembang	13,67	13,70	13,71	14,11	14,39	14,40	14,41	14,42
15	Kota Prabumulih	12,21	12,86	12,87	12,88	12,89	12,90	12,91	12,92
16	Kota Pagar Alam	12,78	12,80	12,81	12,82	12,83	12,84	12,85	13,05
17	Kota Lubuk Linggau	13,26	13,28	13,29	13,30	13,31	13,36	13,37	13,38
Sumatera Selatan		**11,75**	**12,02**	**12,23**	**12,35**	**12,36**	**12,39**	**12,45**	**12,54**
Nasional		**12,39**	**12,55**	**12,72**	**12,85**	**12,91**	**12,95**	**12,98**	**13,08**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Secara keseluruhan, kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan belum optimal untuk meningkatkan pemerataan akses. Berdasarkan data tahun 2019, 273 ruang kelas SMA, 39 ruang kelas SMK dan 11 ruang kelas SLB yang mengalami kerusakan berat serta masih ada kabupaten/kota yang belum memiliki gedung SLB negeri yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan OKU Selatan.

Selain permasalahan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata di daerah juga perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2019, mayoritas SDM pendidikan hanya tersebar di daerah perkotaan, yaitu jumlah guru SD di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 54.238 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 7.201 guru, sedangkan yang paling sedikit di Kota Pagaralam sebanyak 1.038 guru; Jumlah guru SMP di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 24.462 guru, terbanyak di

Kota Palembang berjumlah 4.369 guru, sedangkan yang paling sedikit di Kota Pagaralam sebanyak 523 guru; jumlah guru SMA di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 13.448 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 2.812 guru, sedangkan yang paling sedikit di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 344 guru; jumlah guru SMK di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 7.000 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 1.804 guru, sedangkan yang paling sedikit di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 47 guru; jumlah guru SLB di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 423 guru, terbanyak di Kota Palembang sebanyak 213 guru, sedangkan yang paling sedikit bahkan belum memiliki guru SLB yaitu di Kabupaten Musi Rawas Utara, PALI dan Empat Lawang. Namun demikian rasio guru SD terhadap siswa di kabupaten/kota secara keseluruhan masih dalam kondisi ideal yaitu 1 : 20, hanya beberapa kabupaten/kota yang melebihi kondisi ideal yaitu Kota Palembang sebesar 1 : 22 dan untuk rasio guru SMP/MTs dan SMA seluruh kabupaten/kota masih dalam kondisi ideal 1 : 20. Sedangkan rasio guru SMK terhadap siswa masih banyak kabupaten/kota yang melebihi kondisi ideal 1 : 15 yaitu Kota Palembang sebesar 1 : 20, Kota Prabumulih sebesar 1 : 16, Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 1 : 16, Kabupaten PALI sebesar 1 : 19, Kabupaten Empat Lawang sebesar 1 : 16, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 1 : 16, Kabupaten Musi Rawas sebesar 1 : 16, Kabupaten Muara Enim sebesar 1 : 16, Kabupaten OKU sebsar 1 : 16 dan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 1 : 18.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni Budaya

Ragam budaya di Sumatera Selatan, secara umum terbagi dalam jenis rumah adat, pakaian, tarian juga kuliner, selain itu tata kehidupan pun memiliki kekhasan. Sebagaimana daerah lain di Pulau Sumatera, kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi juga oleh budaya melayu, Agama Islam, Agama Hindu dan yang tak bisa lepas adalah keberadaan eksistensi Kerajaan Sriwijaya.

Sejarah, Kepurbakalaan dan museum

Menilik sejarah Sumatera Selatan maka sesungguhnya di daerah ini sudah ada peradaban yang tinggi di masa pra sejarah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya prasasti peninggalan masa pra sejarah. Ditemukannya batu megalit berumur ribuan tahun di daerah Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat merupakan indikasi, berkembangnya kebudayaan masa itu. Kabupaten Lahat sendiri kini dikenal dengan sebuatan daerah "sejuta megalit".

Situs yang paling banyak dikenal adalah Situs Tinggi Hari di Kecamatan Pulau Pinang. Selain itu beberapa situs tersebar secara acak di dibeberapa kecamatan, hingga ke Kota Pagaralam. Situs-situs ini menarik wisatawan dengan minat khusus, diantaranya sejarawan dan peneliti. Diduga masih ada peninggalan lainnya yang masih belum ditemukan, mengingat sebaran situs yang ditemukan berada di beberapa tempat.

Sebagaimana dikutip dari Buku Sejarah Besemah, yang diterbitkan pemerintah Kota Pagaralam tahun 2005, disebutkan bahwa ada perkembangan kemajuan dalam tradisi megalitik, dimana hasil pahatan megalitik sudah semakin indah. Ada indikasi yang menunjukan keterampilan teknik yang mengandung bermacam-macam budaya dan akulturasi yang kompleks.

Gambar 2.21.
Batu Megalitik di situs Tinggi Hari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan

Sumber foto : kompasiana.com dan mongabay.co.id

Untuk melestarikan situs dan bangunan cagar budaya, khususnya peninggalan arkeologi dari masa Kerajaan Sriwijaya, khususnya di Kawasan Karanganyar (Palembang), Pemerintah Provinisi Sumatera Selatan sudah membangun sebuah taman yang dikenal dengan sebuatan Taman Purbakala Kerajaan Siriwijaya, seluas 20 Ha yang berada dalam kawasan Karanganyar yang merupakan situs yang paling penting dalam perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Taman ini menyajikan data lengkap Kerajaan Siriwijaya mulai artefak, replika, foto, peta dan koleksi etnografi.

Gambar 2.22.
Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya

Sumber foto : kamerabudaya.com

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya melakukan peningkatan peranan seni dan budaya terutama untuk meningkatan pariwisata di Sumatera Selatan. Tahun 2020 sudah dilakukan pendataan terhadap bangunan sebagai cagar budaya. Dari hasil pendataan terdapat 550 Cagar Budaya baik situs maupun bangunan yang berupa gedung kantor,

rumah, museum, bungker peninggalan jepang, rumah ibadah, pemakaman, candi dan lain-lain.

Tabel. 2.16.
Daftar Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Cagar Budaya
	PALEMBANG
1.	Masjid Lawangkidul
2.	Gedung Ledeng/ Kantor Walikota
3.	Balai Prajurit
4.	Masjid Jamik Sungai Lumpur
5.	Masjid Kiyai Merogan
6.	Kampung Kapitan
7.	Kampung Arab Al Munawar
8.	Museum Tekstil
9.	SMP Negeri 1 Palembang
10.	Masjid Suro (Al- Mahmudiyah)
11.	Rumah Residen Palembang
12.	Bunker Jepang AKBP H. Umar
13.	Pasar Cinde
14.	Kantor Pos Palembang
15.	R.S. Ak. Gani
16.	Rumah Asessegaf 7
17.	Rumah Asessegaf 6
18.	Rumah Kolonial 4
19.	Rumah Kolonial 3
20.	Rumah Asessegaf 5
21.	Tower Signal Stasiun Kertapati
22.	Rumah Asessegaf 4
23.	Rumah Asessegaf 3
24.	Rumah Asessegaf 2
25.	Rumah Walikota
26.	Rumah Kolonial 2
27.	Rumah Kolonial 1
28.	Kantor PT. Alwi Assegaf
29.	Rumah Tradisional 5 Ulu No.1
30.	Bungker Jakabaring
31.	Rumah Dinas PT. KAI
32.	Rumah Dinas PT. KAI
33.	Balai Diklat Rendang PT. KAI Drive III
34.	Mess Diponegoro No. 12
35.	Mess Diponegoro No. 10
36.	Resort Listrik Umum III. Kertapati
37.	Rumah Assegaf 1
38.	MONPERA (Monumen Perjuangan Rakyat)
39.	Dipo Lokomotif
40.	Stasiun Kertapati
41.	Balai Pertemuan
42.	Bungker Charitas
43.	Rumah Al Munawar 7
44.	Rumah Al Munawar 6
45.	Rumah Al Munawar 5
46.	Rumah Al Munawar 4
47.	Rumah Al Munawar 3

No	Cagar Budaya
48.	Rumah Al Munawar 1
49.	Rumah Kapitan 5
50.	Rumah Kapitan 4
51.	Rumah Kapitan 3
52.	Rumah Kapitan 2
53.	Rumah Kapitan 1
54.	Kantor Telkom
55.	Bangunan Jacobson Van Den Berg
56.	RS. Charitas
57.	Gereja PIB Immanuel
58.	Bangunan Pasar Kuto Batu 4
59.	Bangunan Pasar Kuto Batu 3
60.	Bangunan Pasar Kuto Batu 2
61.	Bangunan Pasar Kuto Batu 1
62.	Bungker Jepang Yayasan Karya Ibu
63.	Bungker Jepang Sumisno
64.	Rumah Batu 5
65.	Rumah Batu 4
66.	Rumah Batu 3
67.	Rumah Batu 2
68.	Rumah Batu 1
69.	Rumah Tua 3 Seberang Ulu
70.	Rumah Tua 2 Seberang Ulu
71.	Rumah Tua 1 Seberang Ulu
72.	Bangunan Sekanak 14
73.	Bangunan Sekanak 13
74.	Bangunan Sekanak 12
75.	Bangunan Sekanak 11 / Bangunan Gudang
76.	Bangunan Sekanak 10 / Rumah Samtung
77.	Bangunan Sekanak 9
78.	Bangunan Sekanak 8
79.	Bangunan Sekanak 7
80.	Bangunan Sekanak 6 / Toko Pisang
81.	Bangunan Sekanak 5 / Bank BRI
82.	Bangunan Sekanak 4 / PT.HOKTONG
83.	Rumah Samping Museum SMB II
84.	Bangunan Sekanak 3
85.	Bangunan Sekanak 2
86.	Bangunan Sekanak 1
87.	Rumah Tradisional Temon 4
88.	Rumah Tradisional Temon 3 / Hasyim Ning
89.	Bungker Joko
90.	Bangunan Temon 3
91.	Bangunan Temon 2
92.	Bangunan Temon 1
93.	Rumah Limas Cek Mas / Nyimas Zuchro
94.	Klenteng Tri Dharma Chandra Nadi (Soei Goeat Kiong)
95.	Rumah Limas Jaya Laksana
96.	Hotel Musi
97.	Pasar Cinde
98.	Benteng Kuto Besak
99.	Masjid Agung Palembang
100.	Makam Keramat Kiai Marogan atau Kiai Muara Ogan
101.	Masjid Kiai Marogan

No	Cagar Budaya
102.	Rumah Ulu
103.	Rumah Limas ‘ Pangeran Syarif Abdulrachaman Alhabsi ‘
104.	Rumah Limas Masayu Hj. Imna
105.	Rumah Gudang Mgs H. Anang Akib
106.	Rumah Limas Rumah Bari
107.	Gedung PD Budiman 1940
108.	Masjid Sultan Agung
109.	Rumah Limas Pangeran Syarif Ali
110.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al-Balajam (Rumah 7)
111.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al-Balajam (Rumah 6)
112.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al-Balajam (Rumah 5) , Ibu Bariah
113.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al-Balajam (Rumah 4) Jamaludin Basuaid
114.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al-Balajam (Rumah 3)
115.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al-Balajam (Rumah 2), Samsuri
116.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al-Balajam (Rumah 1)
117.	Museum Pahlawan Nasional Mayor Jend TNI (Purn) Dr. AK. Gani
118.	Bekas Gedung BP-7 Palembang
119.	Rumah Kapiten Cina Coa Ham Hin
120.	Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
121.	Bangunan 1930
122.	Toko Bangunan Maju jaya
123.	Toko Surya
124.	Toko Besi Saudara
125.	Rumah Limas Lamo
126.	Rumah Limas H. Murod
127.	Masjid Al-Amanah
128.	Rumah Limas Hj. Ningyu
129.	Rumah Limas Nangcik Hasan
130.	Rumah limas A. Tholib Abu bakar
131.	Rumah Limas Kaakapudin
132.	Rumah singgah Soekarno
133.	Rumah Limas Hj Nurjanah
134.	Rumah Limas Abdul karim
135.	Rumah Limas Cikya
136.	Rumah Tinggal (Rumah Bari / Rumah Lama)
137.	Rumah Markas Jepang
138.	Rumah Limas
139.	Rumah Tinggal Kampung Al – Bahrad dan Al- Balajam Rumah 2 Samsuri
140.	Makam Candi Welan (Makam Susuhunan Abdurrachman)
141.	Makam Kambang Koci
142.	Makam Candi Angsoko
143.	Makam Ratu Bagus Kuning
144.	Jembatan Ampera
145.	Makam Ahmad bin Syech
146.	Makam Pangeran Syarif Ali
147.	Kompleks Makam Sabokingking
148.	Makam Pangeran Prabu Diradja H. Abdullah Bin Susuhunan Mahmud Badarrudin Raden Hasan
149.	Makam Ki Ronggo Wirosentiko
150.	Makam Kemas Haji Muhammad Alim (Mertuo SMB II) Pahlawan Nasional Indonesia

No	Cagar Budaya
151.	Makam Pangeran Ario Subekti Bin Pangeran Suryo Wikromo Subekti
152.	Makam Putro Dinato Ali
153.	Makam Ratu Pembayun
154.	Makam Sultan Agung Komarrudin Sri Teruno
155.	Makam Pangeran Mangkubumi Nebing Kapal
156.	Makam Pangeran Kramajayo Perdana Menteri
157.	Jembatan Kertapati Tahun 1939
158.	Kompleks Makam Sabokingking
159.	Situs Karanganyar
160.	Makam Putri Kembang Dadar
161.	Makam Raja Batu Api
162.	Makam Raja Sigentar Alam
163.	Candi Gede Ing Suro 6
164.	Candi Gede Ing Suro 5
165.	Candi Gede Ing Suro 4
166.	Candi Gede Ing Suro 3 / Bagian Bawah
167.	Candi Gede Ing Suro 3 / Bagian Atas
168.	Candi Gede Ing Suro 2
169.	Candi Gede Ing Suro 1
170.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang / Kawah Tengkutep / Bangunan 3
171.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang / Kawah Tengkurep / Bangunan 2
172.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang / Kawah Tengkurep / Bangunan 1
173.	Pemakaman Mansyur
174.	Makam Raden Nangling
175.	Makam Panembahan
176.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang
177.	Kompleks Makam Gede Ing Suro
178.	Komplek Makam Kesultanan Palembang
179.	Kompleks Makam Sabokingking
180.	Makam Madi Alit dan Goa Jepang
181.	Benteng Kuto Besak
182.	Masjid Agung Palembang
183.	Kompleks Makam Gede Ing Suro
184.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang
185.	Kompleks Makam Sabokingk ing
186.	Klenteng Tri Darma Chandra Nadi (Goei Goeat Kiong)
187.	Bangunan Pasar Kuto Batu I
188.	Bangunan Jacobson Van Den Berg
189.	Bangunan Pasar Kuto Batu III
190.	Rumah Limas Cek Mas/Nyim as Zuchro
191.	Candi Gede Ing Suro 2
192.	Candi Gede Ing Suro 6
193.	Hotel Musi
194.	Bangunan Pasar Kuto Batu IV
195.	Bangunan Temon I
196.	Bangunan Temon II
197.	Bangunan Temon III
198.	Bangunan Pasar Kuto Batu II
199.	Rumah Tradisiona l Temon 3/ Hasyim Ning
200.	Rumah Limas Jaya Laksana
201.	Bunker Joko
202.	Gereja BIP Immanuel

No	Cagar Budaya
203.	RS. Charitas
204.	Bangunan Sekanak 1
205.	Rumah Tradisiona l Temon 4
206.	Kantor Telkom
207.	Makam Ahmad bin Syech
208.	Makam Pangeran Syarif Ali
209.	Kompleks Makam Kesultana n Palembang
210.	Makam Panembah an
211.	Bangunan Sekanak 3
212.	Bangunan Sekanak 2
213.	Pasar Cinde
214.	Candi Gede Ing Suro 3 / Bagian Bawah
215.	Candi Gede Ing Suro 3 / Bagian Atas
216.	Candi Gede Ing Suro 4
217.	Rumah Samping Museum SMB II
218.	Candi Gede Ing Suro 5
219.	Makam Raden Nangling
220.	Bangunan Sekanak 4/ PT. HOKTONG
221.	Bangunan Sekanak 5/ Bank BRI
222.	Bangunan Sekanak 6/Toko Pisang
223.	Bangunan Sekanak 7
224.	Bangunan Sekanak 10/Rumah Samtung
225.	Bangunan Sekanak 9
226.	Bangunan Sekanak 8
227.	Kepala Arca Boddhisat wa
228.	Bangunan Sekanak II/ Bangunan Gudang
229.	Jembatan Kertapati Tahun 1939
230.	Rumah Tinggal Kampung Al – Bahrad dan Al- Balajam Rumah 2 Samsuri
231.	Bangunan Sekanak 14
232.	Palung Batu
233.	Makam Keramat Kiai Marogan atau Kiai Muara Ogan
234.	Prasasti Swarnnapa ttra No. Inv. 04.13
235.	Masjid Kiai Marogan
236.	Prasasti Boom Baru
237.	Rumah Tua 3 Seberang Ulu
238.	Celengan Makam
239.	Arca Budha Bingin Jungut
240.	Mimbar
241.	Arca Budha Wairocana
242.	Celengan Masjid
243.	Rumah Limas Pangeran Syarif Ali
244.	Satu Set peralatan makan hadiah dari ibu wakil Presiden Ibu Rachmi Hatta
245.	Lampu Gantung
246.	Setrika Arang
247.	Tempat minum Bir Putih
248.	Mesin Singer Duduk (Mesin Jahit tangan)
249.	Bokor
250.	Selendang Padang Warna Merah
251.	Bangunan Sekanak 13
252.	Rumah Tua 2 Seberang Ulu
253.	Sandaran Tiang Bendera dan Sandaran Tongkat Khotib
254.	Arca Ibu Mendukung Anak

No	Cagar Budaya
255.	Makam Candi Angsoko
256.	Tepak Sirih
257.	Radio
258.	Satu Set Keramik dari Istana Negara
259.	Lukisan Sungai Sekanak
260.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang / Kawah Tengkurep / Bangunan I
261.	Rumah Batu 1
262.	Bangunan Sekanak 12
263.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam (Rumah 7)
264.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam (Rumah 5) , Ibu Bariah
265.	Museum Pahlawan Nasional Mayor Jend TNI (Purn) Dr. AK. Gani
266.	Rumah Kapiten Cina Coa Ham Hin
267.	Lukisan Gunung Jempol
268.	Mobil Jeep
269.	Lukisan Memotong Padi
270.	Kepala Arca Awalokite swara No. Inv. 04.87
271.	Prasasti Swarnnapa Ttra No. Inv.04.13
272.	Bekas Gedung BP-7
273.	Sepeda
274.	Pemakaman Mansyur
275.	Meja Kerja
276.	Koper Bekas
277.	Kompleks Makam Kesultanan Palembang / Kawah Tengkurep / Bangunan 2
278.	Rumah Tua 1 Seberang Ulu
279.	Cupu Tembako
280.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam (Rumah 6)
281.	Dua Kursi Tamu
282.	Kain Batik Tulis Motif Naga
283.	Arca Buddha Wairocana
284.	Rumah tinggal kampung Al- Bahrad dan Al- Balajam (Rumah 4) Jamaludin Basuaid
285.	Lukisan Puteri
286.	Rumah Limas Masayu Hj. Imna
287.	Peluru
288.	Rumah Batu 2
289.	Meriam Lela 9
290.	Bukit Siguntang
291.	Meriam Lela 13
292.	Gedung PD Budiman 1940
293.	Arca Budha Tingkip
294.	Makam Pangeran Mangkubu mi Nebing Kapal
295.	Bungker Jepang
296.	Bungker jepang Yayasan Karya Ibu
297.	Makam Putro Dinato Ali
298.	Meriam Lela 8
299.	Rumah Gudang Mgs H. Anang Akib
300.	Meriam (ke 1)
301.	Makam Kemas Haji Muhammad Alim (Mertuo SMB II) Pahlawan Nasional Indonesia
302.	Meriam Lela 4
303.	Kantor Pos Palembang
304.	Makam Pangeran Ario Subekti Bin Pangeran Suryo Wikromo Subekti

No	Cagar Budaya
305.	Masjid Lawang Kidul
306.	Rumah Limas Rumah Bari
307.	Rumah Batu 3
308.	Meriam Lela 14
309.	Meriam Lela 11
310.	Meriam Lela 7
311.	Rumah Batu 4
312.	Rumah Batu 5
313.	R.S. Ak. Gani
314.	Makam Sultan Agung Komarrudi n Sri Teruno
315.	Gedung Ledeng/Ka ntor Walikota
316.	Makam Pangeran Prabu Diradja H. Abdullah Bin Susuhunan Mahmud Badarrudi n Raden Hasan
317.	Meriam (ke 4)
318.	Meriam Lela 3
319.	Makam Candi Welan (Makam Susuhunan Abdurrach man)
320.	Makam Putri Kembang Dadar
321.	Meriam Lela 12
322.	Mata Uang Logam 1 Sen Tahun 1945
323.	Makam Kambang Koci
324.	Bungker Jepang Sumisno
325.	Jalan Talang Keranggo
326.	Situs Karanganyar
327.	Makam Ki Ronggo Wirosentiko
328.	Meriam Lela 12
329.	Meriam Lela 5
330.	Bangunan Sekanak 13
331.	Meriam Lela 6
332.	Komplek Makam Kesultana n Palembang
333.	SMP Negeri 1 Palembang
334.	Satu Set Keramik dari Istana Negara
335.	Museum Tekstil
336.	Jembatan Ampera
337.	Bunker Jepang AKBP H. Umar
338.	Kampung Arab Al Munawar
339.	Makam Ratu Bagus Kuning
340.	Masjid Suro (Al- Mahmudiy ah)
341.	Kitab Shirotol Mustaqim
342.	Masjid Sultan Agung
343.	5 Sen
344.	Rumah Asessegaf 6
345.	Lampu Gantung
346.	Rumah Asessgaf 7
347.	Kitab Tauhid
348.	Rumah Asessegaf 4
349.	Al-Quran Kuno
350.	Rumah Residen Palembang
351.	Kampung kapitan
352.	Naskah Tanduk
353.	Masjid Jamik Sungai Lumpur
354.	Rumah Kolonial 3
355.	5 Sen
356.	Tower Signal Stasiun Kertapati
357.	Rumah Asessegaf 5

No	Cagar Budaya
358.	Meriam Lela 2
359.	GELUMP AI
360.	Rumah Asessegaf 3
361.	Rumah Kolonial 1
362.	Rumah Kolonial 4
363.	Meriam Lela 1
364.	Kantor PT. Alwi Assegaf
365.	Surat Bolo
366.	Meriam Besar 1
367.	Rumah Walikota
368.	Kitab Undang – Undang Simbol Cahaya
369.	Gelumpai Billah
370.	Khahas
371.	Rumah Asessegaf 2
372.	Arca Singa
373.	Meriam Besar 2
374.	Hikayat Dewa Mendu
375.	Naskah Jaya Sampurna
376.	Rumah Kolonial 2
377.	Piagam Padang Ratu
378.	Gelumpai Biku Suci
379.	Kitab Smaradaha na
380.	Kitab Syahwatai n
381.	Makam Raja Sigentar Alam
382.	Kitab Sejarah Nabi Muhammad
383.	Rumah Tradisiona l 5 Ulu No.1
384.	Arca Ganesha tidak sempurna
385.	Makam Raja Batu Api
386.	Hidayatus As-salikin
387.	Naskah Islam
388.	Kitab Maulud
389.	Kitab Hidayatul Mujahid
390.	Kitab Sairu Salikin II
391.	Kitab At- Takafur Wal'iktibar
392.	Balai Pertemuan
393.	Kitab Sejarah Islam
394.	Kitab Nawawi I
395.	Gelumpai
396.	Arca Budha Siguntang
397.	Sejarah Islam
398.	Dipo Lokomotif
399.	Balai Diklat Rendang PT.KAI Drive III
400.	Naskah Matan Jurumiyah
401.	Mess Diponegor o No. 10
402.	Resort Listrik Umum III. Kertapati
403.	Rumah Assegap 1
404.	Kitab Nawawi II
405.	Kitab Riyadhatu n Nafsi Wat Tahzibil Khalqi
406.	Bungker Jakabaring
407.	Rumah Dinas PT. KAI
408.	Silsilah Tarekat
409.	Stasiun Kertapati
410.	Kitab Berzanzi
411.	Kitab Matan Jurumiah II

No	Cagar Budaya
412.	Mess Diponegor o No. 12
413.	Kitab Hidayatul Salikin
414.	Kitab adabun nikah
415.	MONPER A (Monumen Perjuangan Rakyat)
416.	Kitab Perukunan
417.	Kitab Zakat
418.	Kamus Arab
419.	Kitab Tahlil Amsir Ila Perempuan
420.	Kitab Dammud Dunia
421.	Kitab Hadist Shohih Tumizi
422.	Kitab Dammil Wal Ujub
423.	Bungker Charitas
424.	Kitab Assimak Wal-Wujud
425.	Hidayatus As-Salikin
426.	Rumah Al Munawar 7
427.	Kitab Assimak Wal- Wujud
428.	Makam Ahmad bin Syech
429.	Rumah Al-Munawar 1
430.	Rumah Al-Munawar 6
431.	Kitab Al- khaufur Raja
432.	Rumah Al-Munawar 3
433.	Kitab Al- Azkar Wal-fawa'i
434.	Rumah Kapitan 4
435.	Rumah Al-Munawar 5
436.	Rumah Al-Munawar 4
437.	Rumah Kapitan 2
438.	Candi Gede Ing
439.	Suro 6
440.	Kitab Manakif
441.	Rumah Kapitan 1
442.	Kitab Israris Shalah
443.	Rumah Kapitan 5
444.	Rumah Kapitan 3
445.	Candi gede ing suro 4
446.	Rumah tradisional temon 4
447.	Kompleks makam kesultanan palembang / kawasan tengkurep/ bangunan 1
448.	Kompleks makam kesultanan palembang / kawasan tengkurep/ bangunan 2
449.	Kompleks makam kesultanan palembang / kawasan tengkurep/ bangunan 3
450.	Klenteng tri dharma chandra nadi (soel goeat kiong)
451.	bangunan pasar kuto batu 1
452.	bangunan pasar kuto batu 3
453.	rumah tradisional temon 3 / hasyim ning
454.	Makam Panglima Batu Api
	MUARA ENIM
455.	Kantor Tambang Batu Bara Bukit Asam (Sekolah SD,SMP,SMA Muhammadyah Muara Enim)
456.	Rumah Tradisional
457.	SMA TABA (SMA Bukit Asam)
458.	Elektrik Centre (Sentral Listrik)
459.	Tiang Jembatan Motik
460.	Penyaringan Batu Bara" Lorge" (Penyaringan)
461.	Kamar Bola

No	Cagar Budaya
462.	SMAN 1 Muara Enim
463.	Perumahan Pegawai PT. Bukit Asam (Kantor Koperasi Pensiun)
464.	Rumah Kepala BAM (Kantor CSR PT.Bukit Asam)
465.	Kolam Renang (Antrasita)
466.	Sentral Telepon
467.	Jembatan Lama
468.	Gereja Santo Yosep Tanjung Enim
469.	SD Emanuel (SD Xaverius Emanuel)
	Ogan Komering Ilir
470.	Lapangan Bola Saringan
471.	Rumah Limas Seratus Tiang
472.	Makam Pangeran Rejet Wira Laksana
473.	Rumah Depati Bahar
474.	Rumah Pangeran Djaja Pati Kerama Djaja
475.	Makam Puyang Bucit
476.	Makam Ratu Jimat
477.	Makam Petori Seriam Kuning
478.	Rumah Haji Bahri
479.	Rumah Depati M Nur
480.	Masjid Jamik
481.	Rumah Tokeh Jahri
482.	Rumah Pangeran Haji Toyut
483.	Rumah Depati Amir Hamzah
484.	Batu Paso
485.	Rumah Depati Tjoekronegoro (A. Ambon)
486.	Makam Buyut Bedendang (Petori Kulit Bening)
487.	Rumah Depati Baridun
	Ogan Komering Ulu
488.	Goa Harimau
489.	Goa Putri
490.	Goa Selabe
	PALI
491.	Candi 1 Bumi Ayu
492.	Candi 2 Bumi Ayu
493.	Candi 3 Bumi Ayu
494.	Candi 4 Bumi Ayu
495.	Candi 5 Bumi Ayu
496.	Candi 6 Bumi Ayu
497.	Candi 7 Bumi Ayu
498.	Candi 8 Bumi Ayu
499.	Candi 9 Bumi Ayu
500.	Candi 10 Bumi Ayu
501.	Candi 11 Bumi Ayu
502.	Sungai Batanghari Siku
503.	Sungai Piabung
504.	Sungai Siku Kecil
505.	Sungai Lubuk Panjang
506.	Sungai Tebat Saleh
507.	Sungai Tebat Siku
508.	Sungai Tebat Jambu
	PAGAR ALAM
509.	Kubur Batu, Arca Manusia Dibelit Ular Tanjung
510.	Batu Ber-Relief Belumai
511.	Kubur Batu Belumai

No	Cagar Budaya
512.	Arca Manusia Belumai
513.	Kubur Batu Pematang Bangao
514.	Arca Manusia, Kubur Batu dan Pahatan Bukit Selatan
515.	Arca Manusia dan Megalit Tebing Tinggi
516.	Komplek Megalitik Talang Batu Gong
517.	Komplek Megalit Cawing Lama
518.	Danau Candi
519.	Makam Serunting Sakti (si Pahit Lidah)
	Lahat
520.	Situs Tinggihari II
521.	Situs Tinggihari III
522.	Komplek Megalit Tanjung Mulak
523.	Menhir Batu Aji Karang Dalam Ulu
524.	Area Megalitik (Batu Macan) Pagar Alam Pagun
525.	Komplek Megalitik Sinjar Bulan
526.	Komplek Megalitik Rindu Hati
527.	Komplek Megalit Geramat
528.	Arca Manusia dan Binatang Geramat
529.	Kubur Batu 1,2,3 Kota Raya Lembak
530.	Kubur Batu 4,5,6 Kota Raya, Lembak dan Jalan Setapak
531.	Kubur Batu 7 Kota Raya, Lembak dan Jalan Setapak
532.	Kubur Batu Talang Pagar Agung
533.	Area Megalitik dan Dolmen
534.	Area Manusia dan Dolmen, Gunung Megang
535.	Arca Manusia, Dolmen dan Arca Batu Gunung Kaya
536.	Area Megalitik Tanjung Beringin
537.	Megalitik Tanjung Raja
538.	Arca Megalitik Muara Dua
539.	Megalitik, Padang Perigi
540.	Balai Yasa
541.	Gereja St. Michael
542.	Sungai Lematang
543.	Sungai Perigi
544.	Batu Gajah
545.	Batu Pengantin
546.	Rumah Limas H. Braksan
547.	Rumah Depati Ahmak
548.	Rumah Depati Ahmad
549.	Makam Keluarga Penghulu Kiai Haji Abdul Mukti
550.	Rumah Limas Depati Suut

Sumber: Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sementara itu juga telah ditetapkan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Sumatera Selatan yang memperoleh sertifikat sampai dengan tahun 2020, yaitu Tarian Penguton, Kerajinan Lak Palembang, Rumah Baghi. Adapun 34 Warisan Budaya Tak Benda berikut sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tabel. 2.17.
Warisan Budaya Tak Benda Sumatera Selatan yang sudah disertifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

No.	Tahun	Nama Wbtb	Asal Daerah	Domian
1.	2013	Songket	Palembang	Songket
2.		Dulmuluk	Palembang	Dulmuluk
3.	2014	Rumah Ulu	Oku	Rumah Ulu
4.		Rumah Limas	Palembang	Rumah Limas
5.		Pempek	Palembang	Pempek
6.		Tari Gending Sriwijaya	Palembang	Tari Gending Sriwijaya
7.		Guritan	Pagaralam	Guritan
8.		Irama Batang Hari Sembilan	Pagaralam	Irama Batang Hari Sembilan
9.	2015	Senjang	Musi Banyuasin	Senjang
10.		Bolu Delapan Jam	Palembang	Bolu Delapan Jam
11.	2016	Bidar	Palembang	Bidar
12.		Warahan	Oku Timur	Warahan
13.		Ande-Ande	Banyuasin	Ande-Ande
14.		Rejung	Musirawas	Rejung
15.	2017	Kerajinan Lak	Palembang	Kerajinan Lak
16.		Tari Penguton	Oki	Tari Penguton
17.		Rumah Baghi	Pagaralam	Rumah Baghi
18.	2018	Surat Ulu	Sumsel	Surat Ulu
19.		Timbang Kepala Kebo	Banyuasin	Timbang Kepala Kebo
20.		Tikar Purun	OKI	Tikar Purun
21.		Tari Kebargh	Pagaralam	Tari Kebargh
22.		Tari Silampari Kayangan Tinggi	Musirawas	Tari Silampari Kayangan Tinggi
23.		Pindang	Palembang	Pindang
24.		Idangan/Ngobeng	Palembang	Ngobeng
25.	2019	Midang		Midang
26.		Tanjak	Palembang	Tanjak
27.		Cak Ingkling	Sumsel	Cak Ingkling
28.		Musik Kelentangan	Musi Banyuasin	Musik Kelentangan
29.		Tempoyak	Palembang	Tempoyak
30.		Tam-Tam Duku	Musi Rawas	Tam-Tam Duku
31.		Benteng-Bentengan	Musi Rawas	Benteng-Bentengan
32.		Tari Sambut Muara Enim	Muara Enim	Tari Sambut Muara Enim
33.	2020	Adat Perkawinan Mabang Handak	Kab. OKI	Adat Perkawinan Mabang Handak
34.		Lelang Lebak Lebung	Kab. OKI	Lelang Lebak Lebung

Sumber: Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (data termutakhir)

Kesenian Sumatera Selatan terus dipacu, disamping untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat juga diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian. Pertumbuhan Sanggar seni di Sumatera Selatan, walaupun tidak terlalu pesat namun tetap memperlihatkan pertumbuhan. Hal ini sedikit banyak memperlihatkan adanya kegiatan seni di masyarakat.

Jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan tahun 2021 secara keseluruhan sebanyak 1.044 sanggar seni, jumlah tersebut

meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2020 jumlah sanggar seni sebanyak 1.021 sanggar seni, seiring dengan meningkatnya jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan, dibeberapa Kabupaten maupun Kota ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan, hal ini dapat telihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18.
Jumlah Sanggar Seni di Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2016 - 2021

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Sanggar Seni					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ogan Ilir	13	13	13	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	41	26	31	22	22	22
3	Palembang	57	178	133	111	111	111
4	Muara Enim	130	29	30	411	417	417
5	Ogan Komering Ulu	82	63	63	30	30	30
6	OKU Selatan	17	16	16	24	28	39
7	OKU Timur	6	6	6	6	6	6
8	Prabumulih	10	10	14	14	14	14
9	Empat Lawang	18	21	20	13	15	20
10	Musi Banyuasin	11	14	75	39	39	39
11	Banyuasin	24	24	24	45	45	45
12	Musi Rawas	22	37	37	68	72	79
13	Lahat	18	18	18	60	60	60
14	Pagaralam	22	17	23	45	45	45
15	Lubuk Linggau	25	57	25	57	57	57
16	Musirawas Utara	4	18	33	30	30	30
17	PALI	5	18	18	30	30	30
	Jumlah	**505**	**565**	**559**	**1005**	**1021**	**1044**

Sumber : Statistik Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, diolah, 2022 (diolah)

Olahraga

Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan event-event olahraga yang bertaraf nasional maupun internasional, diantaranya Kejuaraan Internasional MX GP, Qubica AMF Bowling World Cup ke-55, Sriwijaya Ranau Gran Fondo, Kejuaraan Nasional PBSI 2019, International Triathlon 2020, dan yang paling fenomenal adalah terlaksananya gelaran ASIAN GAMES tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan. Suksesnya penyelenggaraan event-event olahraga ini salah satunya karena didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ada. Salah satu fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap dan tercanggih serta berstandar Internasional yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan, terbentang luas di kawasan *Jakabaring Sport*

City, yang semuanya terkoneksi pada suatu wilayah sehingga Sumatera Selatan menjadi surganya pencinta olahraga dan terciptanya industri-industri olahraga, jasa services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Urusan Pendidikan

Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimulai tahun 2017. Berdasarkan regulasi tersebut, kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pendidikan menengah, sedangkan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk penyelenggaraannya. Namun demikian, kinerja pendidikan dasar masih menjadi ukuran kinerja pemerintah provinsi sesuai RPJMD. Pemerintah provinsi bertugas membina dan mendorong pencapaian kinerja tersebut.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan di Sumatera Selatan dari tahun ke tahun bergerak fluktuatif. APK SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 turun menjadi sebesar 111,39%, dari sebelumnya sebesar 111,58% di tahun 2020 (diatas 100%). Artinya di Sumatera Selatan masih terdapat siswa yang sekolah di SD/MI namun usianya di atas usia sekolah SD/MI (di atas 7-12).

APK Jenjang SMP/MTs selama periode 2014-2021 pada umumnya menunjukkan trend fluktuatif, namun pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 88,54% dan tahun 2018 sebesar 86,51%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 86,97%, kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 88,78%, dan pada tahun 2021 menjadi 89,44%. Walaupun mengalami peningkatan persentasenya masih di bawah 100%, hal ini disebabkan masih terdapat anak usia sekolah SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs.

Untuk jenjang SMA/SMK/MA selama periode 2014-2017 menunjukan tren yang meningkat, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penurunan anak usia SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK/MA, namun untuk tahun 2021 terjadi penigkatan yang cukup baik dimana Sumatera Selatan menyentuh angka 85,23% dan dapat berada diatas rata-rata Nasional.

Gambar 2.23.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/MI
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021

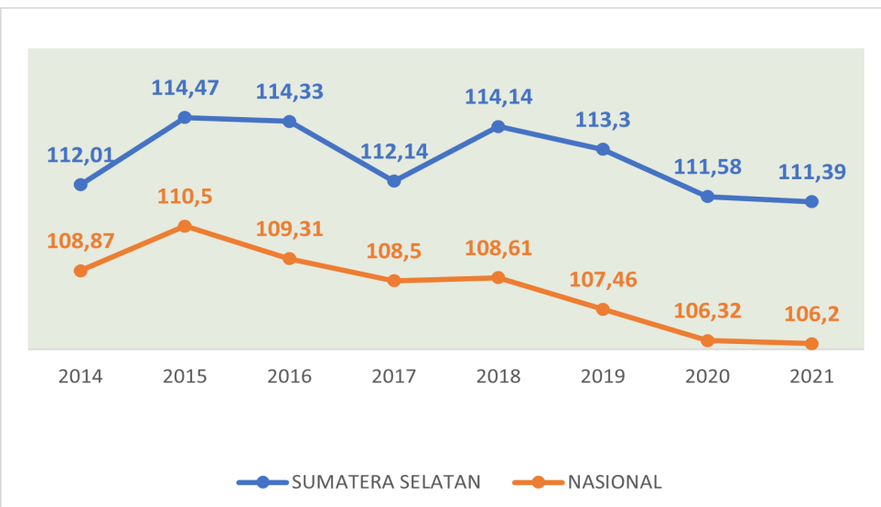

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.24.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SLTP/MTs/Paket B
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021

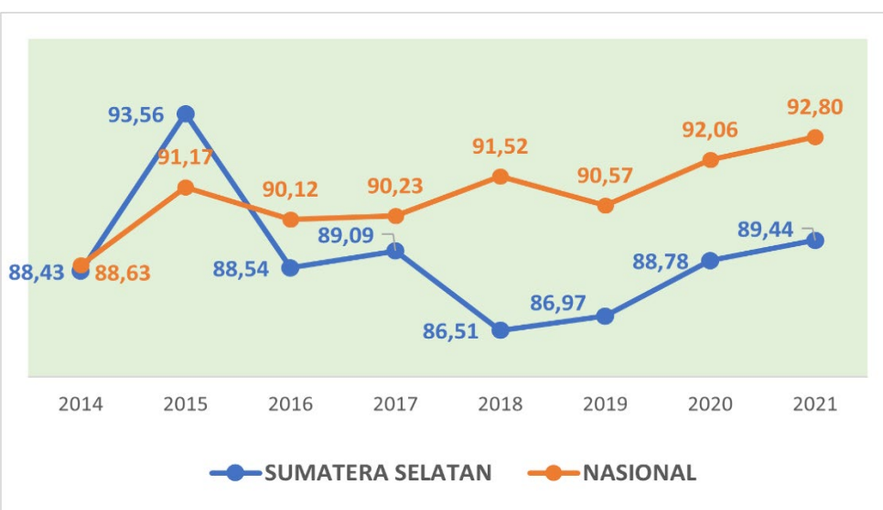

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.25.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.26.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/MI Kab/Kota
Tahun 2021

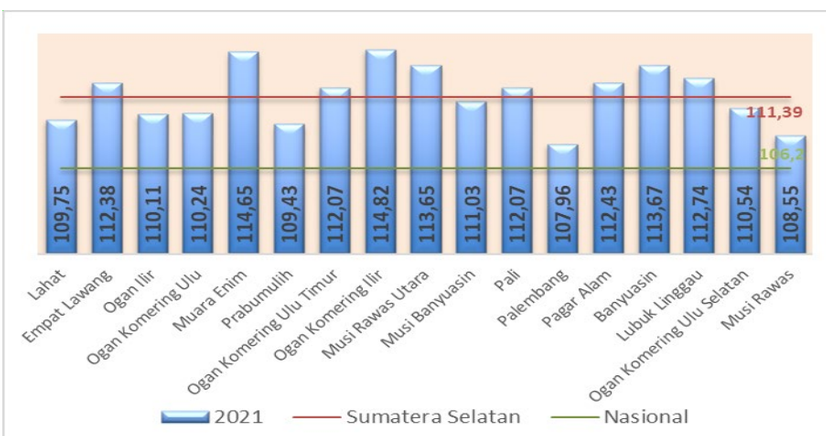

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.27.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMP/MTs
Kab/Kota Tahun 2021

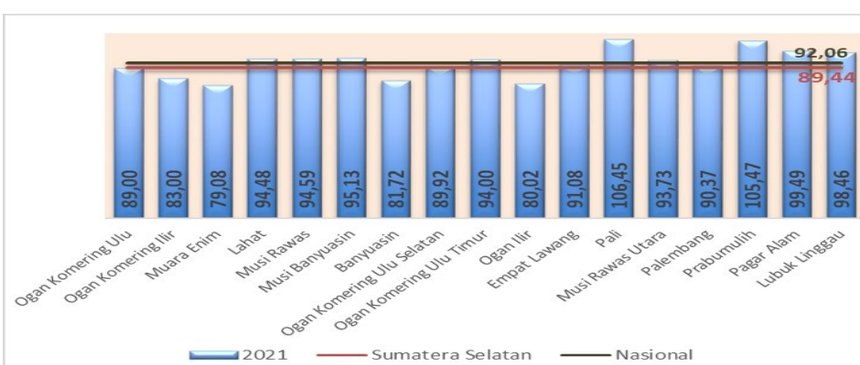

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.28.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA Kab/Kota Tahun 2021

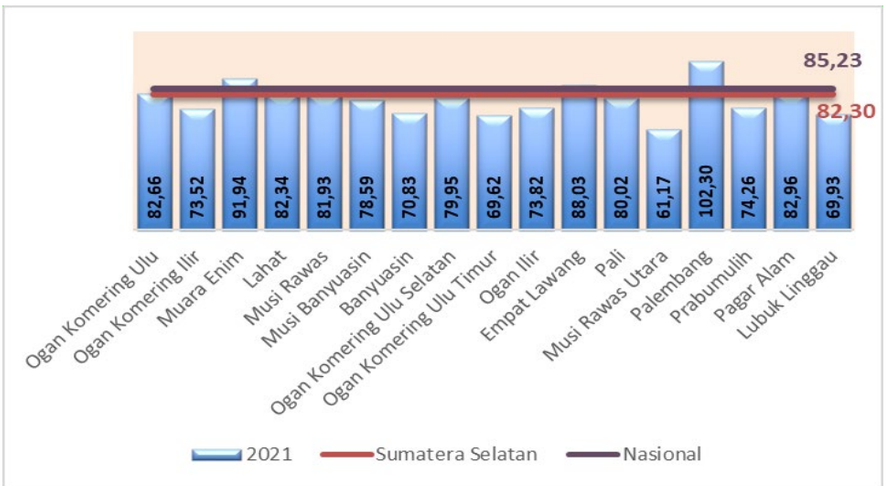

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Apabila dibandingkan dengan APK Nasional Tahun 2020, APK SD/MI Provinsi Sumatera Selatan sebesar 111,58 persen berada diatas nasional sebesar 106,32 persen. Untuk jenjang SMP/MTs APK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 88,78 persen masih dibawah nasional yaitu 92,06 persen, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA APK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 81,73 persen juga berada di bawah nasional sebesar 84,53 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor di antaranya masalah geografis, ekonomi, sosial, dan faktor adat atau tradisi.

Gambar 2.29.
Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi Tahun 2015-2021

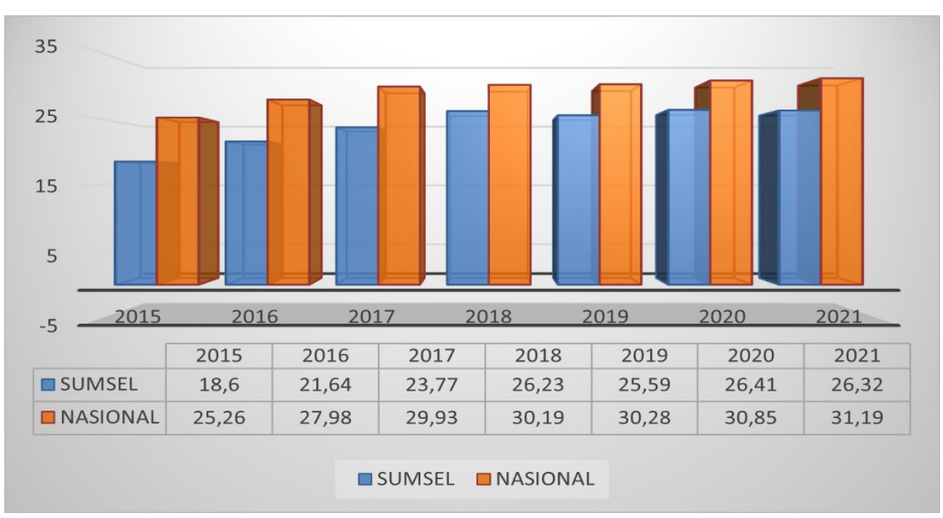

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SUMSEL	18,6	21,64	23,77	26,23	25,59	26,41	26,32
NASIONAL	25,26	27,98	29,93	30,19	30,28	30,85	31,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari data di atas terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan dari tahun 2015-2018 memperlihatkan trend yang meningkat, namun pada tahun 2019, capaian APK Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan turun menjadi sebesar 25,59 dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 26,41 persen, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan pada angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Sumatera Selatan yaitu menjadi 26,32 persen. angka ini masih di bawah capaian nasional yaitu sebesar 31,19 persen, dimana untuk tahun 2021 angka partisipasi kasar perguruan tinggi Nasional meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beban biaya kuliah di perguruan tinggi masih memberatkan masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu perlu dilakukan banyak terobosan, antara lain peningkatan jumlah dan akses Siswa tamatan SMA/SMK masuk ke Perguruan Tinggi misalnya melalui Program Kuliah Gratis.

Angka Partisipasi Murni

Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Selatan jenjang SD/MI sebesar 98,00 persen, angka ini telah melampaui capaian nasional yaitu sebesar 97,80 persen. Angka ini menunjukan hampir 100 persen anak yang bersekolah di jenjang SD/MI sesuai dengan usia sekolahnya. Namun APM jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih dibawah angka nasional, hal tersebut menunjukkan bahwa anak yang sekolah di jenjang tersebut masih tidak sesuai dengan usia sekolahnya. APM dapat disebabkan oleh 1. Rendahnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang ditimbulkan akibat kondisi geografi yang beragam dan sulit dijangkau, 2. Budaya yang belum mendukung untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. 3. Kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak membantu keuangan keluarga, dll.

Gambar 2.30.
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SD/MI
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021

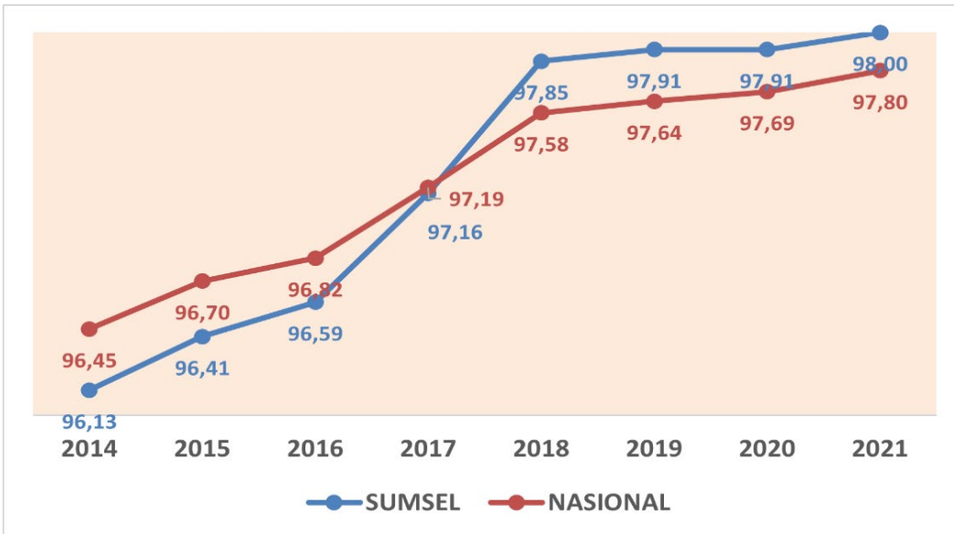

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.31.
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMP/MTs
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021

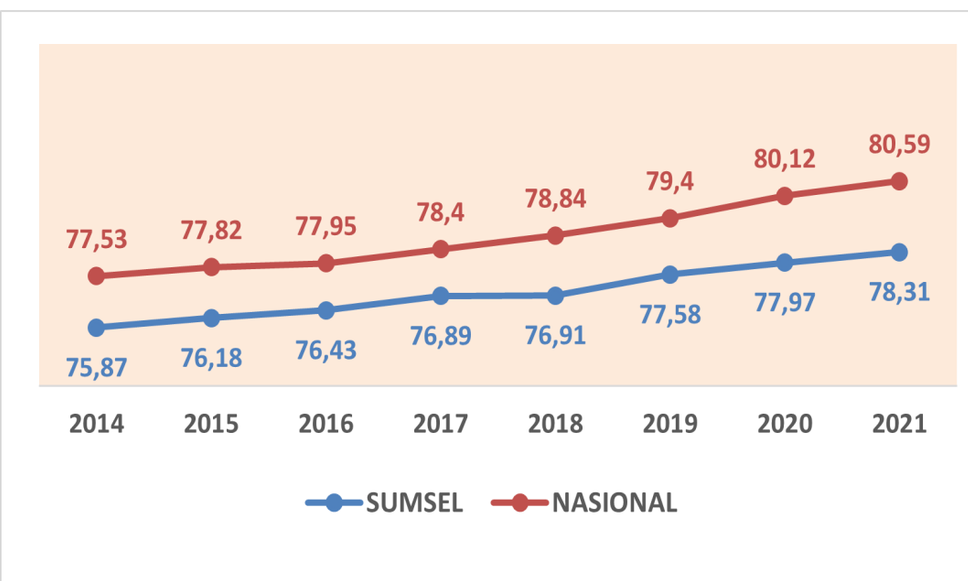

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.32.
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021

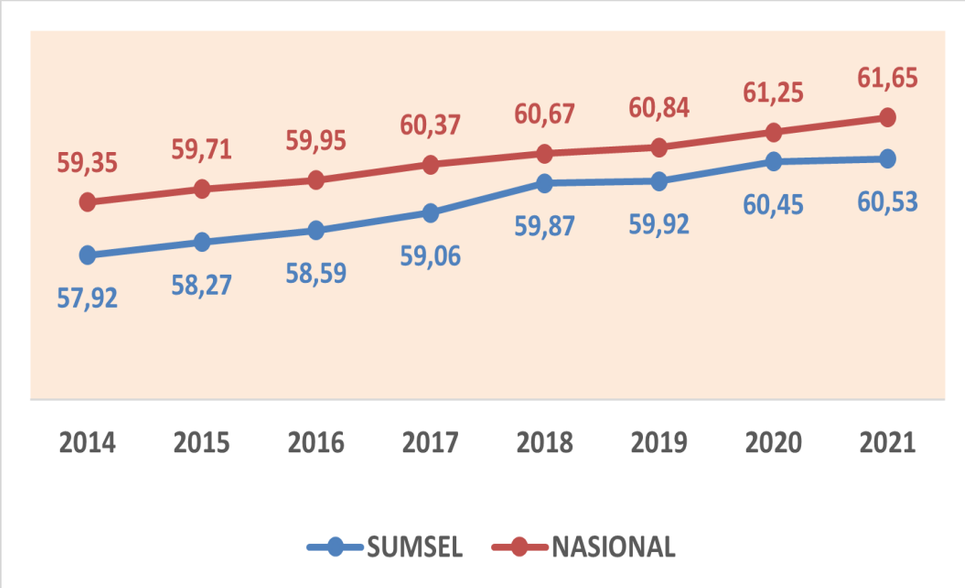

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar. 2.33.
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2021

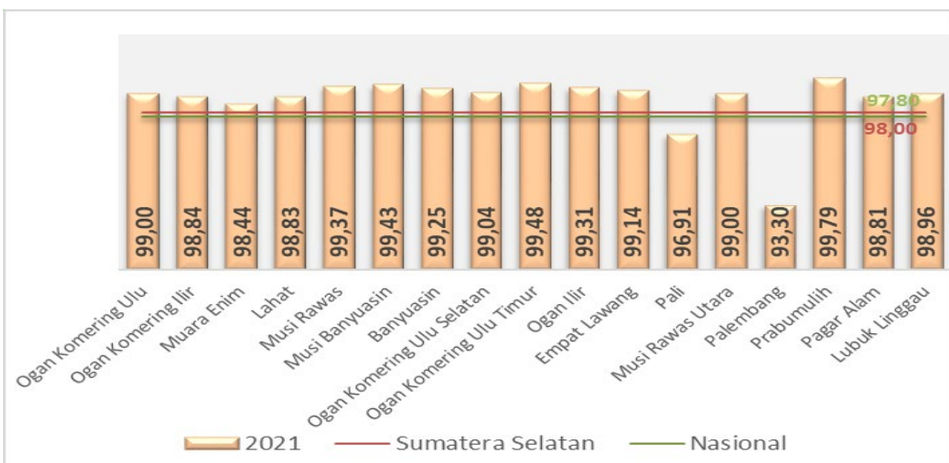

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2021, APM SD/MI Kabupaten/Kota bervariasi. APM tertinggi dicapai oleh Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sedangkan yang terendah dicapai oleh Kota Palembang. APM rendah di Kota Palembang tersebut ini dipengaruhi banyak hal, antara lain siswa SD/MI di Kota Palembang banyak yang usianya bukan usia Sekolah dasar sehingga tidak dihitung pada perhitungan APM. Terutama di pinggiran Kota Palembang yang siswanya banyak berasal dari daerah perbatasan.

Gambar 2.34.
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMP/MTs
Menurut Kab/Kota Tahun 2021

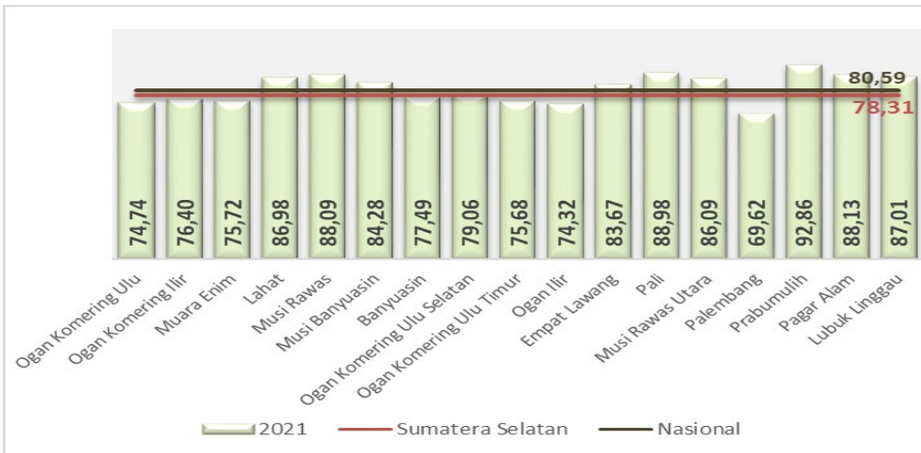

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2021, APM SMP/MTs Kabupaten/Kota bervariasi. APM tertinggi dicapai oleh Kota Prabumulih dan yang terendah dicapai oleh Kota Palembang. Ada 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota yang masih dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan. APM rendah di Kota Palembang tersebut ini dipengaruhi banyak hal. Dilhat dari metodologi perhitungan karena di Kota Palembang banyak siswa yang usianya melebih atau kurang dari usia SMP/MTs (13-15 tahun) yang menduduki bangku SMP/MTs, sehingga tidak terhitung pada APM SMP/MTs.

Gambar 2.35.
Angka Partisipasi Murni Tingkat Pendidikan SMA/SMK/MA
Kabupaten/Kota Tahun 2021

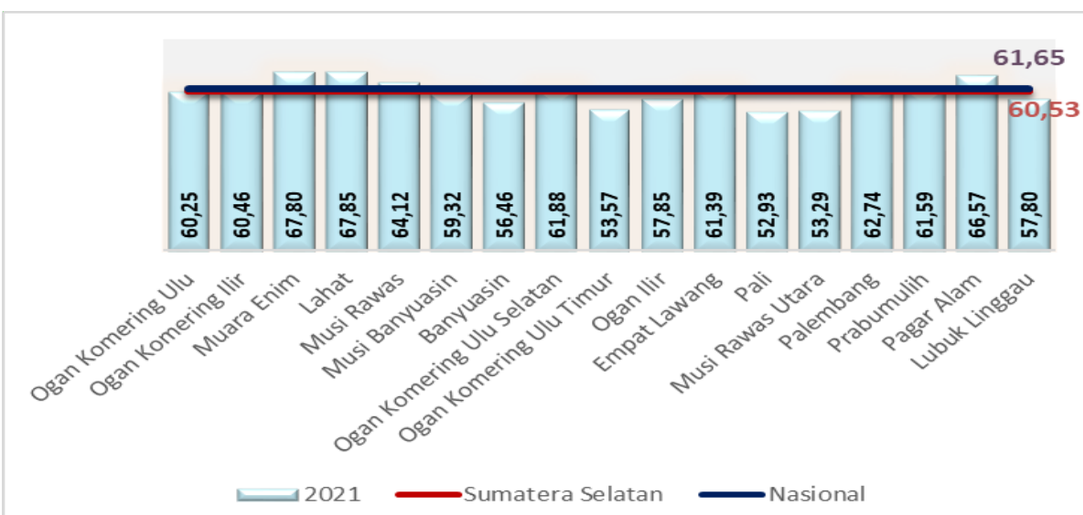

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.32. menggambarkan APM jenjang SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota juga bervariasi. Pada Tahun 2021 terdapat 5 (lima) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota yang capaian APMnya di atas capaian Provinsi bahkan terdapat 4 (empat) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang capaian APMnya di atas capaian Nasional. APM tertinggi dicapai Kota Pagar Alam dan terendah dicapai KAbupaten PALI. Penyebabnya hampir sama dengan APM jenjang SMP/MTs.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri dari Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Tabel 2.19.
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Usia 16 - 18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Menengah	100	58,14
		= **242.549 orang siswa**		
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa Usia 4 -18 Tahun yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Khusus	100	7,88
		= **2.701 orang siswa**		

Sumber : Laporan SPM Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Prov. Sumsel 2021

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah dilakukan dengan cara menghitung perbandingan persentase antara jumlah anak usia 16-18 tahun terhadap jumlah anak usia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan menengah, dengan target SPM sebesar 100%. Jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang menjadi target dalam pemenuhan capaian SPM Pendidikan Menengah pada tahun 2021 sebesar 417.184 orang, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada Pendidikan menengah pada tahun 2021 hanya sebesar 242.549 orang. Berdasarkan data tersebut, didapati bahwa capaian SPM Pendidikan Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 hanya sebesar 58,14%.

Sedangkan pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Khusus dilakukan dengan cara menghitung perbandingan persentase antara jumlah anak usia 4-18 tahun terhadap jumlah anak usia 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus, dengan target SPM sebesar 100%. Jumlah penduduk usia 4 sampai 18 tahun yang masuk dalam kelompok Disabilitas adalah sebesar 34.276 atau sebesar 1,6 % (Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2021). Sedangkan Jumlah siswa yang berusia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar pada Pendidikan khsusu pada tahun 2020 sebesar 2.233 orang. Berdasarkan data tersebut, didapati bahwa capaian SPM Pendidikan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 hanya sebesar 7,88%.

Tabel 2.20.
Pencapaian Realisasi SPM Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	SPM BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	**47,86 %**	**69,03 %**	TAHUN 2021 (1 Tahun)

Sumber : Laporan SPM Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Prov. Sumsel 2021

Pada tahun 2021, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Khususnya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 54,32 % pada Triwulan III, dan mencapai 69,03 % pada Akhir Tahun 2021 atau Triwulan IV Tahun 2021. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Pemenuhan Anggaran serta Realisasi Target Fisik serta Anggaran untuk pelayanan pendidikan menjadi tolak ukur pencapaian target hasil capaian SPM Bidang Pendidikan yang lebih baik.

Permasalahan dan Solusi pada SPM bidang Pendidikan sebagai berikut :

1. Jumlah Total Guru SMA adalah sebanyak 13.992 orang. Untuk Guru di SMA Negeri terdiri dari 5.514 Guru berstatus PNS dan 5.202 orang sedangkan di SMA Swasta terdata memiliki 782 guru PNS. Dari total guru PNS terdata sebanyak 1.899 orang guru yang berstatus PNS di SMA Negeri dan 126 orang guru PNS di SMA

Swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jumlah Guru berstatus PNS di SMK Negeri yang belum tersertifikasi sebanyak 463 orang guru dan di SLB jumlah guru berstatus PNS yang belum tersertifikasi adalah sebanyak 366 orang guru

Solusi : Diajukan program Peningkatan Kualifikasi Guru S.1 yang berstatus PNS sebanyak 2.025 Guru SMA, 463 orang guru SMK dan sebanyak 366 guru dari SLB di provinsi Sumatera Selatan yang terdata untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Sehingga guru berstatus PNS atau Guru yang bersangkutan tersebut dapat memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru.

2. Pada tahun 2021 terdata masih terdapat Kepala Sekolah yang belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). untuk Tingkat SMA Negeri dari 329 Kepala Sekolah, sebanyak 8 orang Kepala Sekolah berstatus PNS yang belum definitif/belum mengikuti diklat kepala sekolah, sedangkan di SMA Swasta sebanyak 11 orang Kepala sekolah berstatus PNS yang belum definitif. Untuk tingkat SMK, terdata ada 6 orang Kepala Sekolah berstatus PNS (terdiri dari 4 orang di SMK Negeri, 2 SMK Swasta) yang belum definitif/belum memiliki status tetap.

   Solusi : Segera diprogramkan untuk mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah, atau mengikuti Diklat CKS melalui jalur mandiri.

3. Masih terdapat sekolah yang belum mengisi pelaporan akreditasi dan belum terdaftar Akreditasi, terutama sekolah-sekolah baru.

   Solusi : Di ajukan ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah untuk di akreditasi (uji kelayakan).

4. Ada beberapa Sekolah Menengah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu; 1.SMA YP Bina Insan (Kab.OKU Timur), 2.SMAS Islamic Center Lahat (Kab.Lahat), 3.SMAS NU IX Lahat (Kab.Lahat), 4.SMAS PGRI 3 Baturaja (Kab.OKU) dan 5.SMK Kesehatan Rizky Patya (Kab.OKU) yang Belum Melakukan Sinkronisasi Dapodik dan Tidak Melakukan Pengiriman Data ke Kemendikbudristekdikti pada semester ganjil TA. 2021/2022.

   Solusi : Segera Melaporkan Dapodik dan Mengisi instrument data untuk segera bisa sinkronisasi.

5. Masih dibutuhkan Peningkatan Koordinasi dan Dokumentasi data penunjang antar Dinas atau Bidang untuk Meningkatkan

Mutu dan Pelayanan SPM khususnya bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan untuk capaian SPM 100%

Solusi: Perlu dilakukan Diseminasi dan Review atas Capaian Standar Pelayanan Minimal Dikdasmen serta diperlukan Sosialisasi atau Review Dapodik dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan agar Data lebih akurat dan akuntabel guna mencapai SPM 100%.

2) Urusan Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan Tahun 2014-2020 menunjukkan trend peningkatan. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup antara lain akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, status gizi, kesehatan lingkungan dan gaya hidup. Kabupaten/Kota yang memiliki angka usia harapan hidup diatas rata-rata Provinsi pada tahun 2020 adalah Kota Palembang 70,79 Tahun dan Kota Prabumulih 70,32 Tahun. Hal tersebut disebabkan antara lain bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan di perkotaan lebih baik dibanding pedesaan.

Secara umum tren Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan meningkat namun capaiannya masih dibawah capaian Angka Harapan Hidup Nasional.

Tabel 2.21.
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (tahun)
Tahun 2014-2021

Kabupaten/Kota	Angka Harapan hidup							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ogan Komering Ulu	67,60	67,63	67,65	67,66	67,83	68,01	68,20	68,24
Ogan Komering Ilir	67,99	68,01	68,02	68,04	68,22	68,41	68,61	68,67
Muara Enim	67,70	68,00	68,07	68,14	68,38	68,63	68,90	69,02
Lahat	64,17	64,87	65,06	65,25	65,50	65,76	66,04	66,16
Musi Rawas	66,88	67,18	67,26	67,34	67,59	67,86	68,14	68,26
Musi Banyuasin	67,99	68,09	68,11	68,14	68,33	68,54	68,75	68,84
Banyuasin	68,21	68,31	68,33	68,36	68,55	68,76	68,97	69,06
Ogan Komering Ulu Selatan	65,78	66,08	66,16	66,24	66,49	66,76	67,04	67,07
Ogan Komering Ulu Timur	67,79	68,19	68,31	68,44	68,65	68,87	69,10	69,17
Ogan Ilir	64,38	64,58	64,65	64,72	64,96	65,21	65,48	65,60
Empat Lawang	63,98	64,18	64,25	64,32	64,56	64,81	65,08	65,13

Kabupaten/Kota	Angka Harapan hidup							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pali	67,55	67,65	67,68	67,70	67,88	68,07	68,27	68,33
Musi Rawas Utara	64,69	64,89	64,94	64,99	65,21	65,43	65,68	65,76
Palembang	69,80	70,00	70,05	70,10	70,32	70,54	70,79	71,01
Prabumulih	69,39	69,59	69,63	69,67	69,88	70,09	70,32	70,47
Pagar Alam	65,50	65,70	65,78	65,87	66,14	66,41	66,71	66,85
Lubuk Linggau	68,49	68,59	68,61	68,64	68,83	69,04	69,25	69,39
Sumatera Selatan	**68,93**	**69,14**	**69,16**	**69,18**	**69,41**	**69,65**	**69,88**	**69,98**
Nasional	**70,40**	**70.59**	**70,78**	**70,90**	**71,06**	**71,34**	**71,47**	**73,5**

Sumber: BPS 2022

Gambar 2.36.
Angka Harapan Hidup (tahun) Sumsel dan Nasional
Tahun 2014-2021

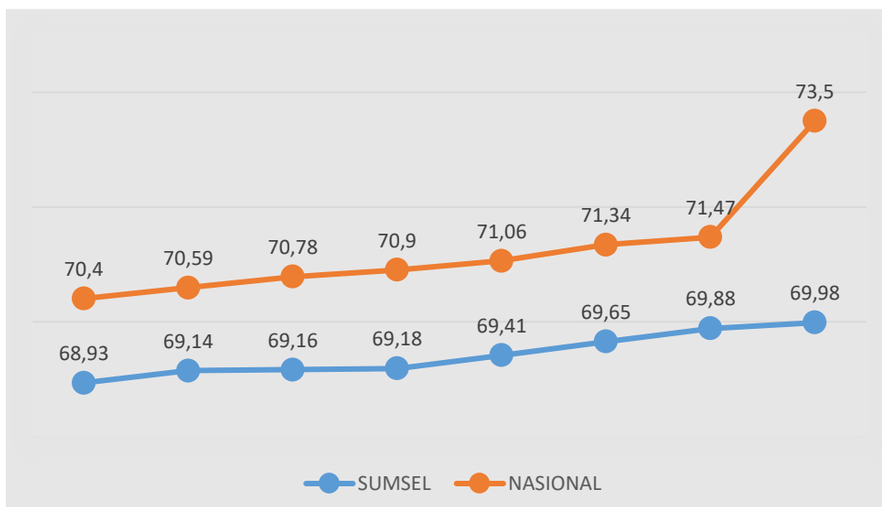

Sumber: BPS 2022

b. Kasus Covid 19

Pada tahun 2020 virus corona atau covid 19 telah menyebar di Indonesia tidak terkecuali Provinsi Sumatera Selatan, Adapun data perkembangan kasus Covid 19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari 2022 seperti gambar berikut :

Tabel 2.22.

Jumlah Kasus Konfirmasi Positif *Covid-19* Kab/kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Tanggal 22 Februari 2022

NAMA KAB / KOTA	KASUS		KONFIRMASI									
			JUMLAH		SEMBUH		MENINGGAL		PROSES			
	ASIMPTOMATIK	SIMPTOMATIK	KUMULATIF	BARU	KUMULATIF	BARU	KUMULATIF	BARU	DIRAWAT DI RS	ISOLASI DI RUMAH	ISOLASI DI SARANA RESH	JUMLAH
Kota Palembang	4914	34126	39040	+806	30515	+222	1217	+6	97	6628	5	6730
Kab. OKI	115	801	916	0	740	+4	95	0	29	52	0	81
Kab. Lahat	1534	1105	2639	+23	2404	0	131	0	16	78	10	104
Kab. OKU	184	960	1144	+4	955	+26	110	0	3	76	0	79
Kab. MUBA	1357	1780	3137	+28	2908	+15	142	0	21	66	0	87
Kab. M. Enim	2439	1945	4384	+78	3697	+20	245	0	44	398	0	442
Kab. MURA	1619	1104	2723	+22	2355	0	88	0	17	263	0	280
Kab. Banyuasin	644	2995	3639	+41	3287	+16	168	0	18	166	0	184
Kab.Ogan Ilir	213	1255	1468	+53	1209	+3	87	0	21	149	2	172
Kota Prabumulih	504	2178	2682	+27	2222	+18	187	+1	46	227	0	273
Kota Pagaralam	302	522	824	+1	701	+3	46	0	15	62	0	77
Kota L Linggau	904	2444	3348	+16	3045	+15	92	0	15	196	0	211
Kab. OKU Timur	1160	1744	2904	+32	2411	+13	271	+1	49	173	0	222
Kab.OKU Selatan	44	723	767	0	610	+12	84	+1	4	69	0	73
Kab. E. Lawang	104	378	482	+8	367	0	35	0	6	74	0	80
Kab. PALI	500	427	927	+5	814	+1	79	0	3	31	0	34
Kab. MURATARA	97	851	948	+22	771	0	55	0	4	118	0	122
Luar Wilayah	10	21	31	0	30	0	1	0	0	0	0	0
JUMLAH	**16644**	**55359**	**72003**	**+1166**	**59041**	**+368**	**3133**	**+9**	**408**	**8826**	**17**	**9251**

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan Februari 2022 Jumlah Kasus konfirmasi positif Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 72.003 penduduk dan kabupaten/kota yang banyak terdapat kasus konfimasi positif adalah Kota Palembang yaitu sebanyak 39.040 penduduk dan yang sedikit terkonfirmasi positif yaitu Kabupaten Empat Lawang yaitu sebanyak 482 penduduk. Adapun peta sebaran kasus konfirmasi Covid 19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Februari 2022 sebagai berikut :

Gambar 2.37.

Peta Sebaran Kasus Positif *Covid-19* Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Tanggal 22 Februari 2022

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Dari Peta Sebaran diatas, Kota Palembang masuk dalam zona orange yang artinya berisiko sedang penyebaran virus corona atau covid 19, sedangkan 16 kabupaten/kota lainnya masuk dalam zona kuning (berisiko rendah). Virus corona atau covid 19 menyebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang artinya tidak ada kabupaten/kota yang tidak ada kasus covid 19.

Dari 72.003 penduduk Provinsi Sumatera Selatan terkonfirmasi positif covid 19 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 sebesar 82,00 persen penduduk yang sembuh, sedangkan persentase covid 19 yang sembuh nasional adalah 90,7 persen.

Gambar 2.38.

Persentase *Covid-19* Yang Sembuh Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Tanggal 22 Februari 2022

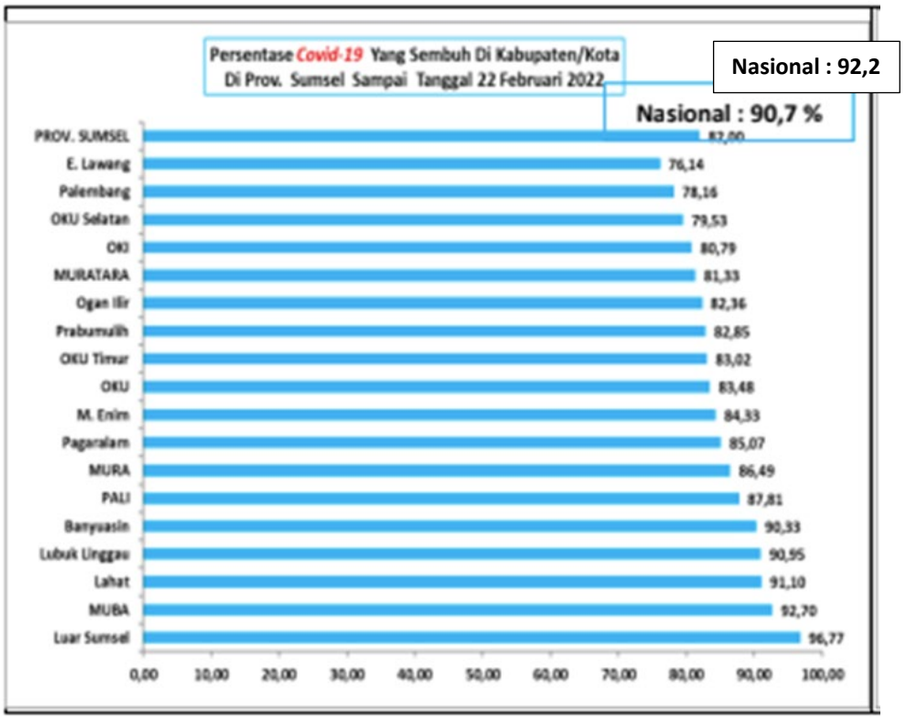

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022

Adapun persentase Covid 19 yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 yaitu 4,35 persen dan nasional sebesar 3,1 persen.

Gambar 2.39.

Persentase *Covid-19* Yang Meninggal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Tanggal 22 Februari 2022

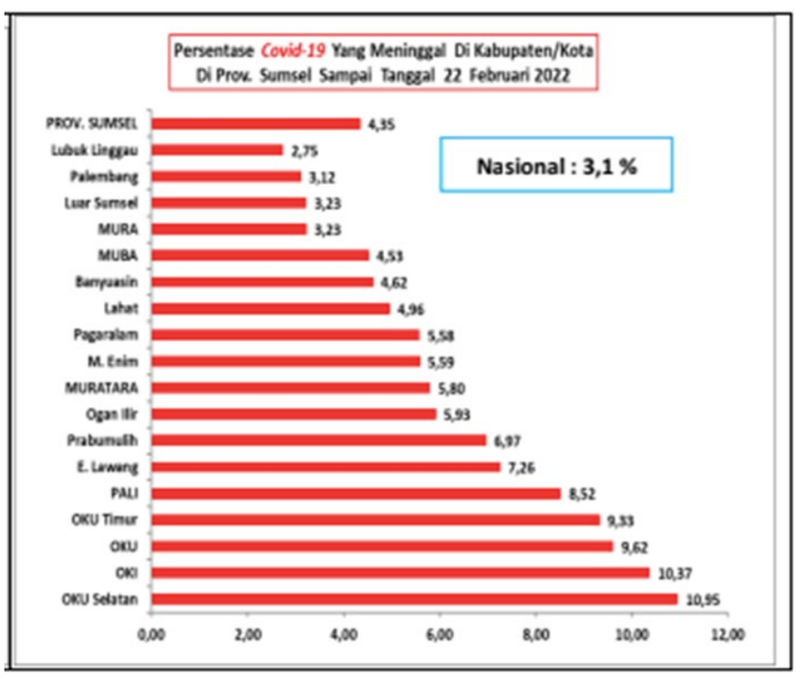

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Pada kasus konfirmasi covid 19 yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan, beberapa disertai dengan penyakit penyerta. Sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 penyakit penyerta yang paling dominan pada kasus konfirmasi covid 19 yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan yaitu penyakit hipertensi sebanyak 548 orang dan penyakit diabetes melitus yaitu sebanyak 530 orang.

Gambar 2.40.

Jumlah penyakit penyerta pada kasus konfirmasi covid 19 yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan sampai tanggal 22 Februari 2022

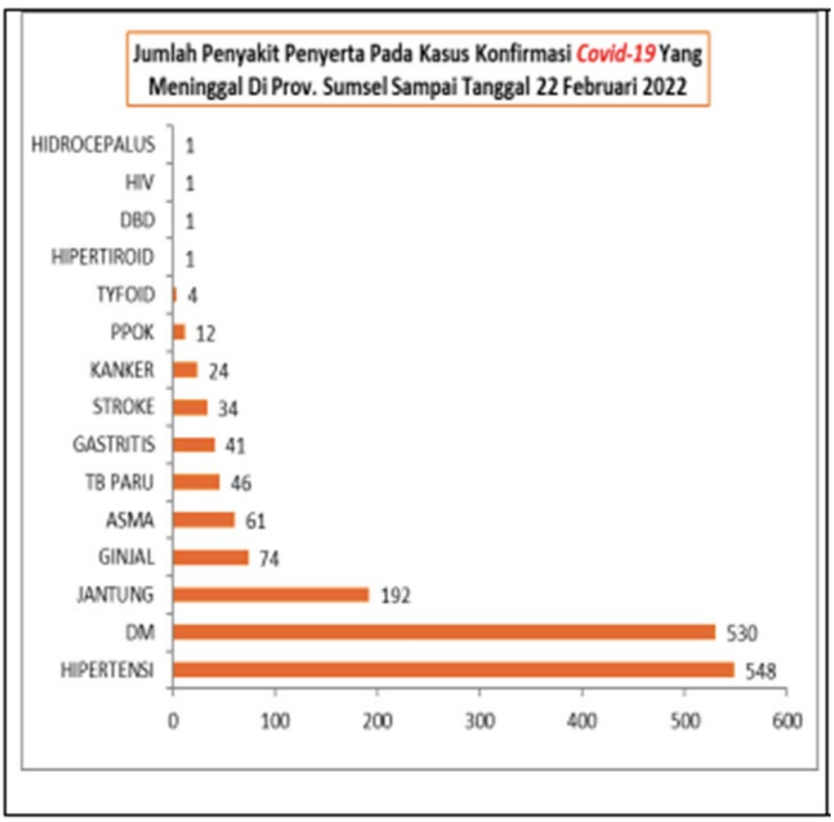

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Adapun cakupan vaksinasi covid 19 Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data dashboard KPC-PEN sampai dengan 22 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.41.
Cakupan Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan KPC-PEN
tahap I, II dan III (SDM Kesehatan, Pelayanan Publik, Lansia,
Masyarakat Rentan dan Umum, Remaja, Anak-anak, Gotong
Royong)
Dosis-1, Dosis-2 dan Dosis-3 Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan sampai tanggal 22 Februari 2022

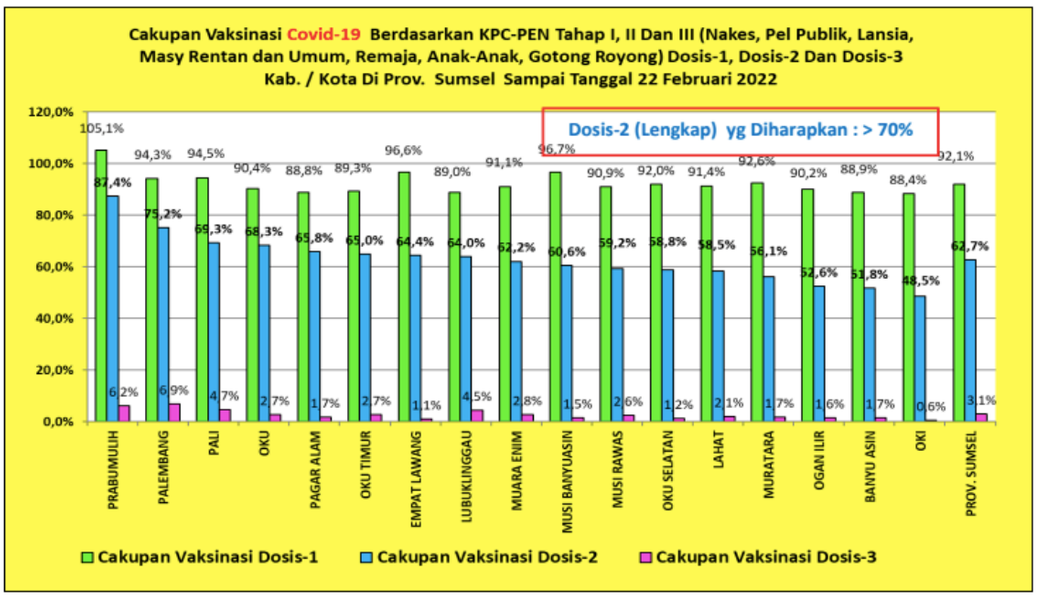

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Untuk tahap I, II dan III (SDM Kesehatan, Pelayanan Publik, Lansia, Masyarakat Rentan dan Umum, Anak-anak, Gotong Royong) Dosis-1, Dosis-2 dan Dosis-3 cakupan yang terendah pada Kabupaten OKI sebesar 88,4% (Dosis-1), 48,5% (Dosis-2) dan 0,6% (Dosis-3) dan Kabupaten Banyuasin sebesar 88,9% (Dosis-1), 51,8% (Dosis-2) dan 1,7% (Dosis-3).

c. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu di Provinsi Sumatera Selatan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat 165 kejadian, mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 142 kejadian, dan terus menurun secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 107 kejadian tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 120 kejadian dan menurun menjadi 105 kejadian pada tahun 2019. Namun mengalami peningkatan kembali menjadi 128 kejadian di tahun 2020 dan 131 kejadian di tahun 2021, dan hal ini masih diatas target RPJMD.

Gambar 2.42.
Jumlah Kematian Ibu Tahun 2014-2021
di Provinsi Sumatera Selatan

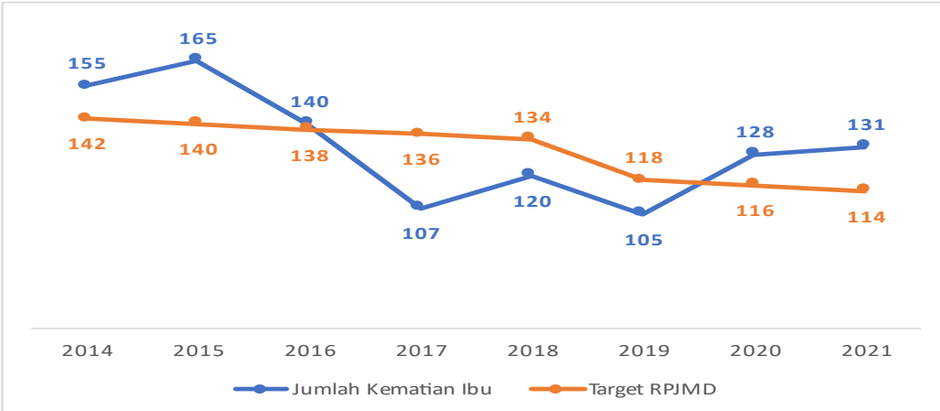

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Gambar 2.43.
Jumlah Kematian bayi Tahun 2014-2021
di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Kematian Bayi selalu berfluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 775 kasus pada 2016 mengalami penurunan menjadi 643 kasus, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 637 kasus dan pada tahun 2018 kembali menurun dengan signifikan menjadi 497 kasus. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 509 kasus dan pada tahun 2020 menjadi 536 kasus. Untuk tahun 2021 angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 502 kasus.

d. Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi balita stunting Provinsi Sumatera Selatan menunjukan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 24,8 persen pada tahun 2021 (data SSGI, 2021), namun capaian ini masih berada diatas capaian nasional yaitu 24,4 persen, oleh karena itu perlu percepatan upaya pencegahan stunting terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga membutuhkan pendekatan mutisektor dalam pencegahan stunting terintegrasi.

Gambar 2.44.

Tren Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021

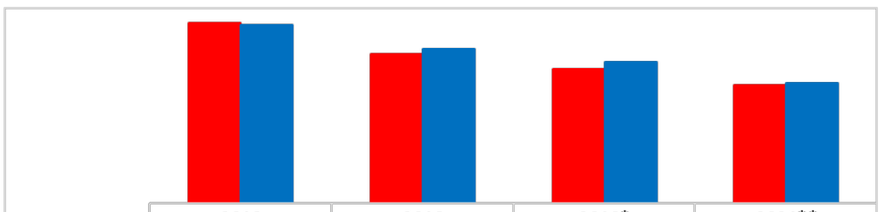

	2013	2018	2019*	2021**
NASIONAL	37,2	30,8	27,67	24,4
SUMSEL	36,7	31,7	28,98	24,8

Sumber: Riset Kesehatan Dasar RI;
**Laporan Integrasi (Susenas) Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019*
*** Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*

Jika melihat capaian prevalensi balita stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2021, ada 7 kabupaten/kota yang berada diatas capaian Provinsi dan 8 kabupaten/kota yang berada diatas capaian nasional. Prevalensi balita stunting menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tren dibawah ini :

Gambar 2.45.

Tren Prevalensi Balita Stunting Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

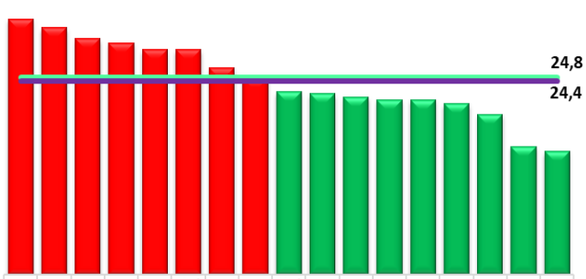

	OKI	OKU	Muara Enim	Ogan Ilir	Musi Rawas	Musi Rawas Utara	Empat Lawang	OKUS	Musi Banyuasin	Lubuklinggau	Lahat	Banyuasin	Prabumulih	OKUT	PALI	palembang	Pagaralam
Prevalensi Stunting	32,2	31,1	29,7	29,2	28,3	28,3	26,0	24,8	23,0	22,8	22,4	22,0	22,0	21,5	20,2	16,1	15,5
SUMATERA SELATAN	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
NASIONAL	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4

Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI, 2022)

e. Angka Gizi Buruk

Persentase angka gizi buruk di Provini Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,018 persen dari tahun 2014 yaitu 0,02 persen, Kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,9 persen di tahun 2016 akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 0,032 persen dan kembali mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 0,037 persen. Namun kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,04 persen. Pada tahun 2020 angka gizi buruk menurun kembali menjadi 0,029 persen tetapi di tahun 2021 angka gizi buruk di Sumatera Selatan kembali meningkat menjadi 0,12 persen.

Gambar 2.46.
Angka Gizi Buruk pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2021

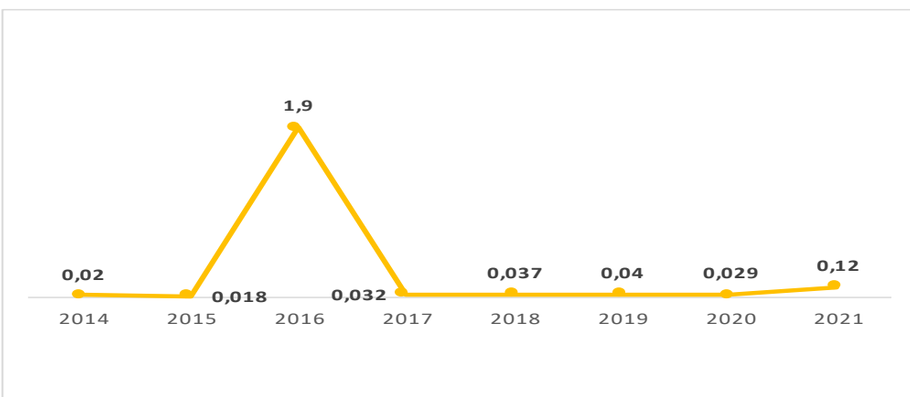

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

f. Cakupan ASI Eksklusif

Cakupan ASI Ekslusif di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015-2017 berfluktuatif, namun pada tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan yaitu 61,66 persen pada tahun 2017, menurun menjadi 60,70 persen pada tahun 2018, 57,79 persen pada tahun 2019 dan 52,71 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 cakupan asi eksklusif di Sumatera Selatan kembali membaik dan meningkat menjadi 59,17 persen.

Gambar 2.47.
Cakupan ASI Eksklusif di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2021

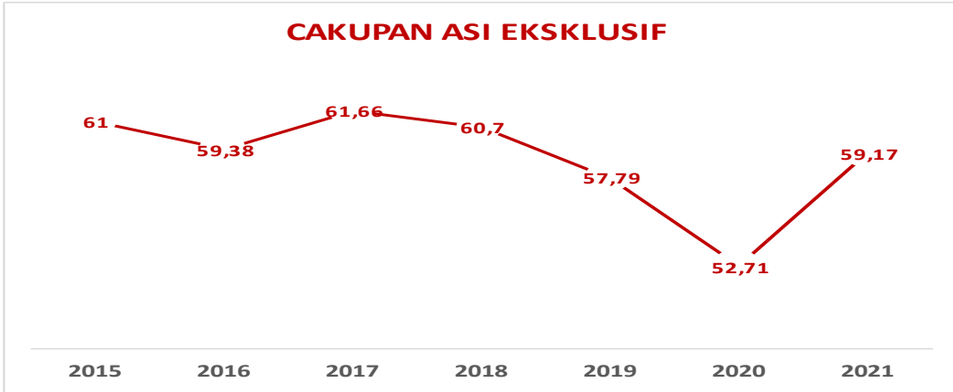

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

g. Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM

Persentase desa yang melaksanakan STBM di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 desa yang melaksakan STBM di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 33 persen, terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi 75 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 74,43 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 87,76 persen.

Gambar 2.48.
Persentase Desa Yang Melaksanakn STBM
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2021

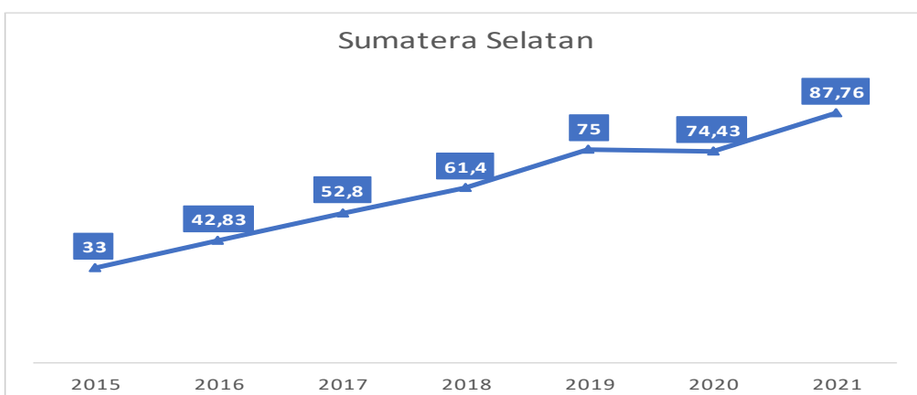

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

h. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

Persentase rumah tangga ber-PHBS di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015-2020 berfluktuatif, pada tahun 2015 rumah

tangga ber-PHBS di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 67,6 persen, terus menurun dan menjadi 55 persen pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 66,18 persen, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 65,32 persen. Untuk tahun 2021 persentase Rumah Tangga ber-PHBS kembali meningkat menjadi 75,28 walaupun masih berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 79,28 persen.

Gambar 2.49.
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2021

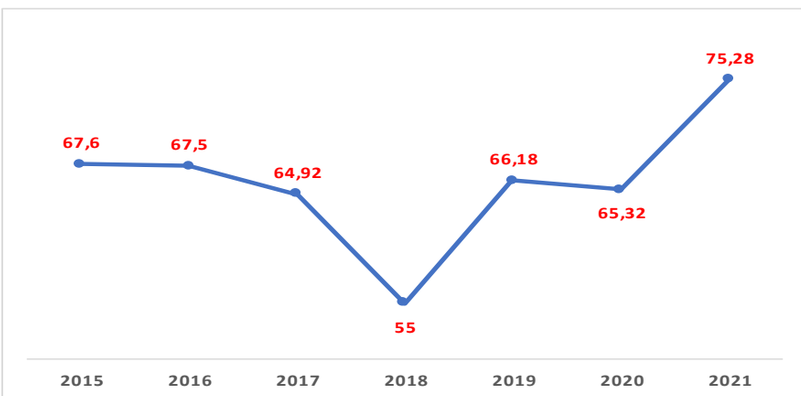

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

i. Penyakit Menular

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Annual Parasit Incidence (API) Malaria mengalami fluktuatif dari 0,22 persen pada tahun 2015 naik 0,29 persen pada tahun 2016 dan turun menjadi 0,10 persen pada tahun 2017 dan naik menjadi 0,16 pada tahun 2018 lalu turun kembali pada tahun 2019 menjadi 0,08 dan pada tahun 2020 juga menurun menjadi 0,01 dan untuk tahun 2021 turun menjadi 0,0000034 per 1000 penduduk, atau dapat dikatakan kasus malaria di Sumatera Selatan sangat sedikit seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2.50.
Annual Parasit Incidence (API) Malaria Provinsi Sumatera Selatan
Dalam 6 Tahun Terakhir

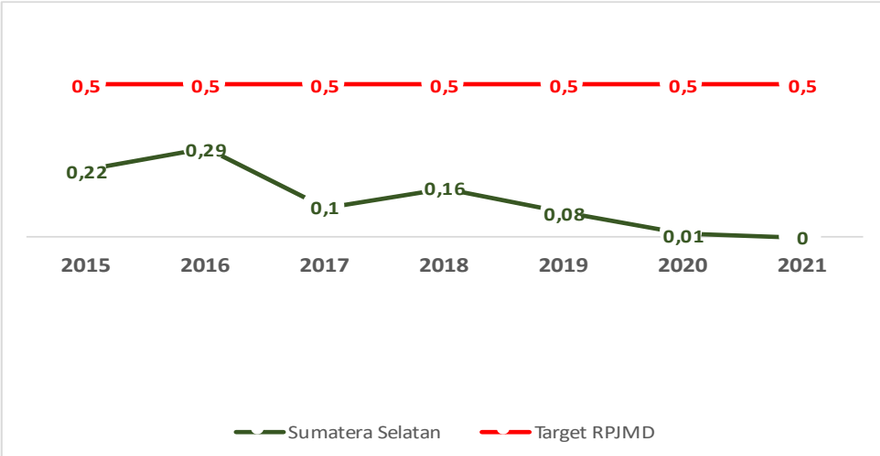

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

TB Paru

Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection Rate) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 48,41%, menurun menjadi 45,05% pada tahun 2015, kembali menurun menjadi 39,01%. Baru pada tahun 2017, naik menjadi 46 % lalu kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 yaitu menjadi 49 dan 67. Pada tahun 2020 angka penemuan pasien baru TB BTA positif menurun menjadi 28%. Namun di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali pada persentase case detection rate penyakit TBC yaitu menjadi 40%. Tabel di bawah ini menunjukan bahwa CDR masih banyak pasien baru TB BTA Positif yang belum terdeteksi, Hal ini memerlukan perhatian kabupaten/kota dan Puskesmas untuk meningkatkan program deteksi kasus TB.

Tabel 2.23.
Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase *Case Detection Rate* Penyakit TBC	48,41	45,05	39,01	46	49	67	28	40

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

HIV/AIDS

Gambar 2.51
Cakupan Pengobatan HIV / AIDS
Di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima)Tahun 2017-2021

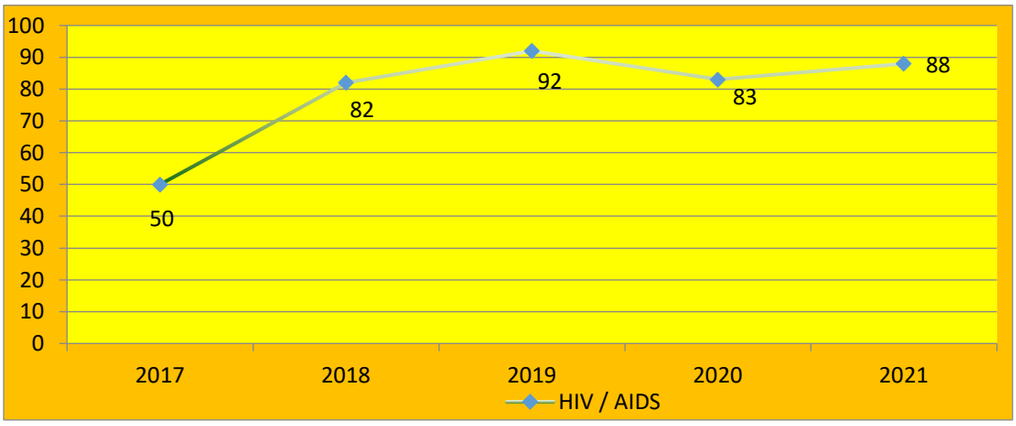

Dilihat dari grafik diatas dalam 5 (lima) tahun mengalami fluaktif dari tahun 2017 sebesar 50% kemudian naik pada tahun 2018 sebesar 82%, naik lagi pada tahun 2019 sebesar 92% tapi turun pada tahun 2020 sebesar 83% kemudian naik pada tahun 2021 sebesar 88%. Permasalahan yang terjadi pada pengobatan HIV/AIDS antara lain;

1. Tidak semua layanan kesehatan mampu tes dan Pengobatan HIV dan PIMS (one stop service)
2. Adanya gap antara jumlah yang dites HIV dengan reagen yang didistribusikan dan jumlah pasien yang memulai pengobatan HIV.Masih minimnya APBD II di Perangkat Daerah Pengampuh Kabupaten/Kota untuk program HIV-AIDS dan IMS, terutama untuk sharing reagen rapid tes HIV,reagen IMS dan obat-obatan IMS sebagai penunjang operasional layanan KTS dan IMS.
3. Keterbatasan logistik reagen HIV dan RPR Sifilis
4. Angka Lost to follow up yang cukup tinggi dari data kumulatif yang pernah memulai pengobatan HIV.
5. Banyaknya pasien yang putus makan obat.

Demam Berdarah Dengue (DBD)

Gambar 2.52.
Jumlah Kasus DBD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014 - 2020

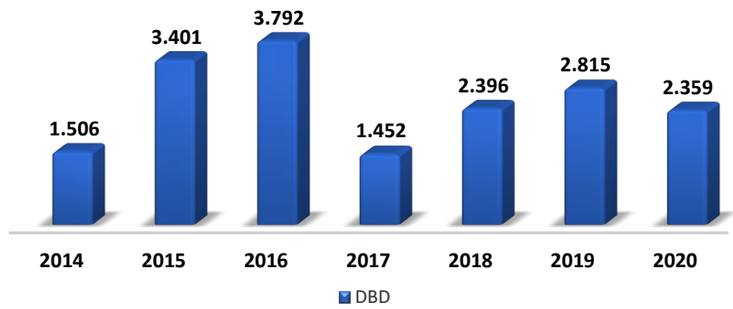

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Bila diperhatikan grafik diatas, dari tahun ke tahun kasus DBD mengalami fluktuasi, Situasi Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun 2016, Pada tahun 2017 jumlah kasus mencapai 1.452 kasus, tahun 2016 jumlah penderita DBD sebanyak 3.792 kasus. Akan tetapi pada Tahun 2018 hingga 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 2.396 kasus dan 2.815 kasus. Namun menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 2.359 kasus.

j. Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Target capaian Pemerintah daerah provinsi untuk indicator ini adalah 100%. Adapun capaian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.24.
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 - 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 – 2018 terus mengalami peningkatan. Kejadian bencana pada tahun 2016 sebanyak 61 kejadian bencana meningkat menjadi 62 kejadian bencana pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 75 kejadian bencana pada tahun 2018. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana terbanyak adalah kabupaten Ogan Komering Ilir, OKU Timur dan Empat Lawang, dimana hampir terjadi peningkatan jumlah bencana per kab/kota di tahun 2018 seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.53.
Distribusi Kejadian Bencana Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 - 2018

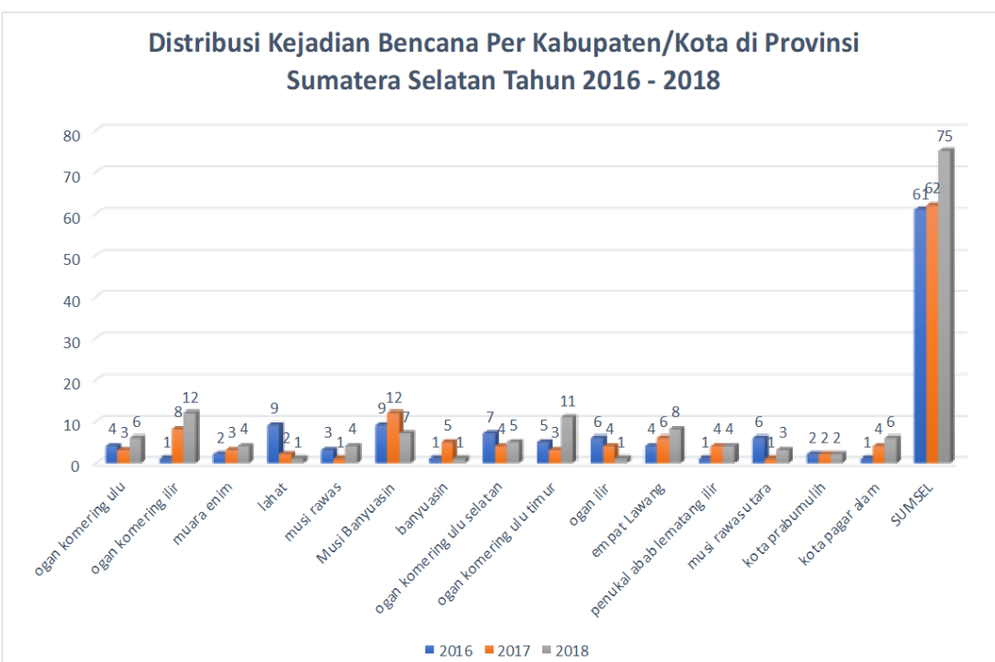

Sumber : BNPB

Gambar 2.54.
Distribusi Kejadian Bencana Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 - 2018

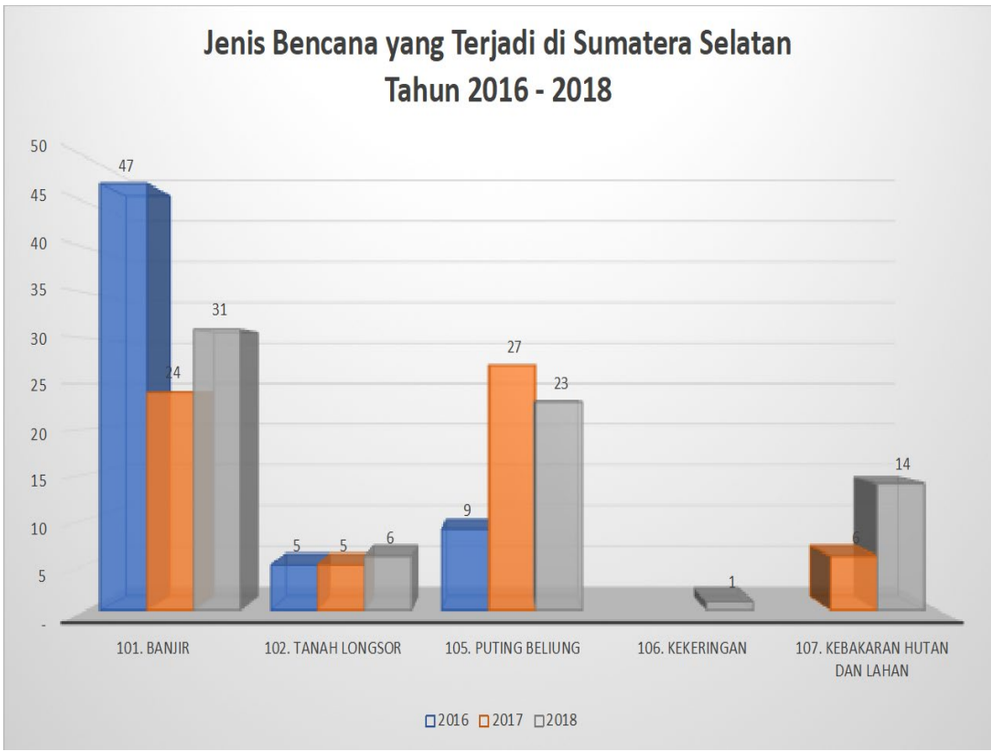

Sumber : BNPB

Jenis bencana yang paling banyak terjadi di Sumatera Selatan yaitu banjir, angin putting beliung, Kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan kekeringan. Seperti terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.25.
Jumlah korban (jiwa) akibat bencana per Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2018

No	Wilayah	Korban (jiwa)								
		Meninggal & Hilang			Luka-luka			Menderita & Mengungsi		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	0	0	340	2285
2	Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0	0	0	5028	15970
3	Muara Enim	0	0	0	0	0	0	0	36	400
4	Lahat	0	0	0	0	0	0	1492	20	0
5	Musi Rawas	1	0	0	0	0	0	12488	160	690
6	Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0	19126	5558	2197
7	Banyuasin	0	0	0	0	15	0	280	184	835
8	OKU Selatan	1	6	0	0	4	1	16580	4	5
9	OKU Timur	0	0	0	1	0	0	18103	245	300
10	Ogan Ilir	1	0	0	0	7	0	2774	98	28
11	Empat Lawang	0	0	0	2	0	0	3132	2644	1258
12	PALI	0	0	0	0	0	0	0	900	46075
13	Musi Rawas Utara	0	1	0	0	0	0	139172	0	0
14	Kota Prabumulih	0	0	1	0	0	0	3996	8030	0
15	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	1	0	176	13
16	**SUMSEL**	3	7	1	3	26	2	217.143	23.423	70.056

Sumber : BNPB

Jumlah korban jiwa meninggal dunia dan hilang akibat bencana pada tahun 2016 sebanyak 3 orang, naik menjadi 7 orang pada tahun 2017 dan turun menjadi 1 orang pada tahun 2018. Untuk korban luka-luka pada tahun 2016 sebanyak 3 orang, naik menjadi 26 orang pada tahun 2017 dan turun menjadi 2 orang pada tahun 2018. Korban jiwa yang menderita dan mengungsi akibat bencana terbanyak pada tahun 2016 sebanyak 217.143 orang kemudian turun menjadi 23.423 orang pada tahun 2017 dan turun lagi menjadi 70.056 orang pada tahun 2018. Untuk semua penduduk terdampak krisis akibat bencana telah mendapatkan pelayanan kesehatan baik ditingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

k. Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Indicator ini juga merupakan indicator provinsi dalam menerapkan SPM Kesehatan.

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB. Adapun capaian Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017-2021 telah mencapai 100%

Tabel 2.26.
Persentase Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2018 terjadi 26 kasus KLB di Sumatera Selatan dengan jumlah pendudluk yang terdampak KLB sebanyak 249 orang. Dari penduduk yang terdampak KLB pada tahun 2018 semuanya telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar kurang dari 24

jam, sehingga persentase penduduk yang terdampak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2018 sebesar 100 persen. Berikut jumlah penduduk yang terdampak KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar pada tahun 2015 – 2018.

Gambar 2.55.
Persentase Penduduk yang terdampak KLB yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 – 2018

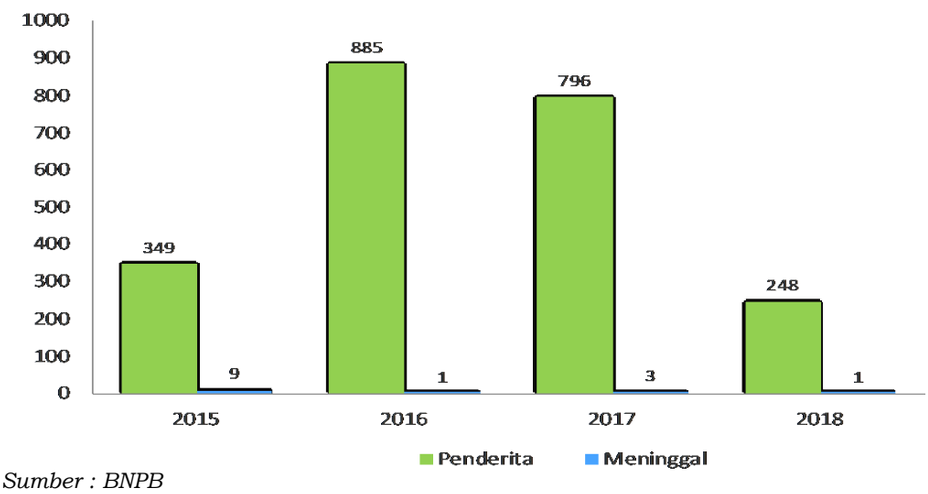

Sumber : BNPB

Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang terdapak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar kurang dari 24 jam sebanyak 358 orang. Dari 358 orang yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut sebanyak 9 orang meninggal dunia. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang terdampak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu sebanyak 886 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 1 orang meninggal dunia. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 dan 2018 dengan masing-masing pada tahun 2017 sebanyak 799 orang yang terdampak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari jumlah tersebut sebanyak 3 orang meninggal dunia. Pada tahun 2018 sebanyak 249 orang yang terdampak KLB dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari jumlah tersebut sebanyak 1 orang meninggal dunia.

Dilihat dari distribusi lokasi terjadinya KLB selama tahun 2015 – 2018, lokasi paling banyak terjadinya KLB yaitu di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan kota Palembang. Dari Grafik diatas juga menunjukkan terjadi peningkatan frekuensi KLB di Sumatera Selatan pada tahun 2018 terjadi di Kota Palembang, Kab.

Muba dan Kab. Banyuasin. Setiap KLB yang terjadi di Kab/Kota sudah dilakukan penanganan terhadap kasus dan penyelidikan epidemiologi serta tindakan dalam upaya pencegahan dan penyebarluasan penyakit.

Gambar 2.56.
Distribusi Lokasi KLB di Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2018

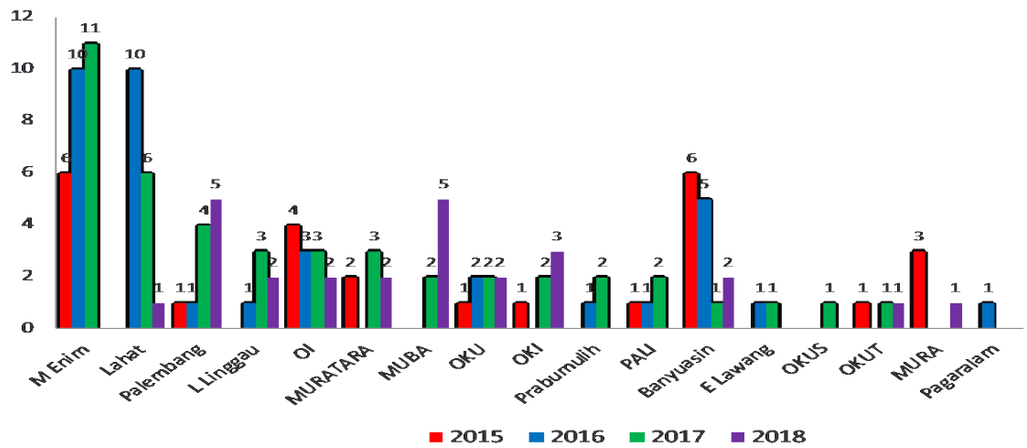

Sumber : BNPB

Gambar 2.57.
Distribusi Jenis KLB di Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2018

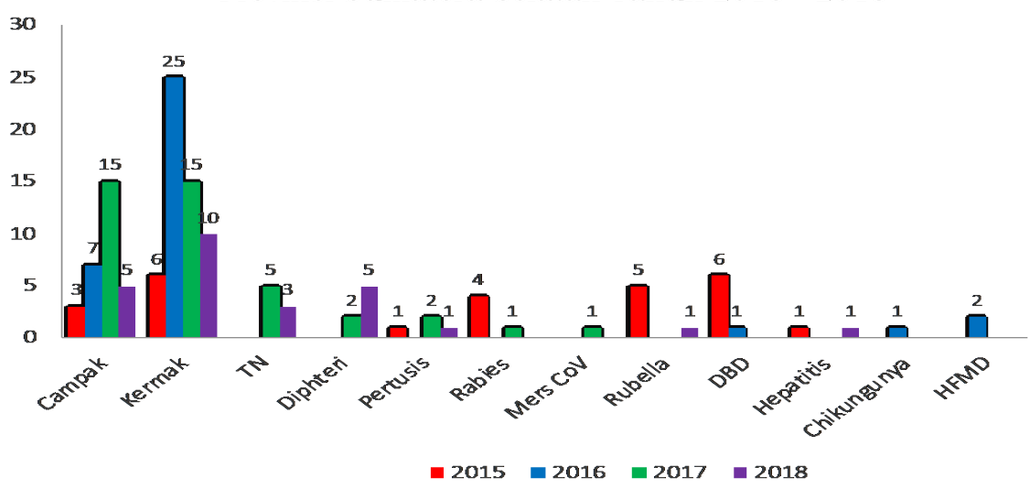

Sumber : BNPB

Dilihat dari jenis KLB yang paling banyak terjadi selama tahun 2015 - 2018 adalah keracunan makanan, campak, tetanus neotorum dan difteri seperti terlihat pada grafik diatas.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian SPM bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan sangat tergantung dari dukungan personil sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kesehatan. Pada tahun 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan didukung sejumlah tim kesehatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota, rumah sakit dan Puskesmas kabupaten/kota.

Tabel 2.27.
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100
		Jumlah = **33.614** orang		
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk terdampak akibat KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100
		Jumlah = **19.500** orang		

Sumber : Laporan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov. Sumsel 2021

Pada tahun 2021, terdapat 33.614 orang yang terdampak krisis bencana dan/atau berpotensi bencana dan sebanyak 1.150 orang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Terdapat 6 kejadian KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Frekuensi KLB ini terdiri dari suspek kasus Tetanus neonatorum 3 kejadian dan Difteri 3 kejadian yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Jumlah penduduk yang terdampak KLB tahun 2021 adalah sebesar 19.500 orang.

Upaya pencapaian target Indikator SPM tahun 2021 memiliki beberapa kendala dan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan masih kurang memberikan daya ungkit langsung terhadap indikator yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

a. Karena perencanaan disusun tidak berbasis fakta/data sehingga tidak berdasarkan masalah yang dihadapi;
b. Sistem penganggaran yang masih menganut "berapa anggaran yang tersedia" bukan berdasarkan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan program (*money follow function*);
c. Rendahnya tingkat pengetahuan tenaga perencana di bidang krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan kondisi kejadian luar biasa provinsi.

2. Alokasi anggaran bidang kesehatan di Sumatera Selatan masih sangat rendah di bawah 10% sehingga tidak sesuai dengan amanat UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sebesar 10% dari total APBD
3. Kebijakan pembangunan daerah lebih mengutamakan fisik, khusus untuk bidang kesehatan masih mengutamakan pelayanan kuratif daripada promotif dan preventif
4. Penentuan jumlah sasaran, serta jumlah dan jenis bencana dan KLB yang masih mengalami kesulitan
5. Perencanaan program kegiatan belum mengacu ke Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Minimnya kemampuan kapasitas sumber daya manusia di lapangan dalam menghadapi bencana, terutama terkait pembinaan dalam pencatatan dan pelaporan
7. Belum adanya pemahaman terkait definisi operasional bencana dan KLB yang termasuk dalam indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan (sesuai dengan PP no. 02 tahun 2018)
8. Sulitnya menyusun kebutuhan anggaran (unit cost) karena perlu melibatkan lintas sektor, khususnya mekanisme pencairan dana pasca bencana yang sifatnya sewaktu-waktu dan memerlukan pencairan dana yang sifatnya segera
9. Badan Penanggulangan Jaminan Sosial bidang Kesehatan tidak menanggung masyarakat terkait bencana.
10. Masih kurangnya dan belum meratanya penempatan dokter (baru mencapai 20 orang per 100.000 penduduk);

11. Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan Tim Penerapan SPM bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sehingga memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan SPM bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia di lapangan dalam menghadapi bencana, terutama terkait pembinaan dalam pencatatan dan pelaporan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penyusunan perencanaan dan perhitungan kebutuhan anggaran per unit cost untuk kebutuhan pelaksanaan SPM kesehatan.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tentu saja mempengaruhi mobilitas orang maupun barang. Salah satu Infrastruktur penentu ialah infrastruktur jalan yang dituntut supaya mampu memfasilitasi. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah. Jalan di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.

Total panjang jalan sampai dengan tahun 2021 sebesar 18.769,44 km, dengan komposisi Jalan Nasional sepanjang 1.600,18 km (8,53%), Jalan Provinsi sepanjang 1.513,66 Km (8.06%) dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 15.655,58 Km (83,41%).

Tabel 2.28.
Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya
di Sumatera Selatan Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Nasional (Km)	%	Panjang Jalan Provinsi (Km)	%	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	%	Total Panjang Jalan (Km)	%
OKU	131,00	10,19	123,02	9,57	1.031,13	80,23	1.285,15	100
OKI	109,60	4,92	79,10	3,55	2.037,11	91,52	2.225,81	100
Muara Enim	178,37	10,98	182,55	11,16	1.275,32	78,49	1.636,25	100
Lahat	166,27	10,37	83,91	14,18	1.339,15	83,50	591,61	100
Musi Rawas	161,06	10,62	38,00	2,39	1.309,71	86,39	1.589,34	100
Musi Banyuasin	310,59	21,81	39,85	2,64	1.073,77	75,39	1.508,77	100
Banyuasin	118,96	8,71	50,137	8,16	1.198,60	87,74	614,39	100
OKU Selatan	0,00	0,00	191,229	13,43	708,13	78,74	1.424,21	100
OKU Timur	7,30	0,64	205,75	24,63	932,57	81,40	835,25	100
Ogan Ilir	64,15	5,85	156,75	32,91	876,00	79,86	476,26	100
Empat Lawang	35,38	3,11	141,51	23,31	984,60	86,56	607,07	100
Muratara	57,90	9,78	56,25	6,25	500,24	84,52	899,36	100
PALI	0,00	0,00	108,30	9,45	483,31	81,69	1.145,62	100
Palembang	96,20	11,50	57,297	5,22	681,75	81,46	1.096,90	100
Prabumulih	84,13	17,25	-		392,13	80,42	1.161,49	100
Pagar Alam	58,82	9,54	-		548,25	88,91	304,26	100
Lubuk Linggau	20,45	6,40	-		283,81	88,84	1.367,70	100
Sumatera Selatan	1.600,18	8,53	1.513,65	8,06	15.655,58	83,41	18.769,44	100

Sumber : BBPJN III, Dinas PU Bina Marga Sumsel dan Data DAK Kab/Kota, 2022

Dilihat dari kondisi kemantapan jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2017-2021 dapat dikatakan bahwa kondisi jalan mantap mengalami kenaikan yaitu mencapai 93,94% (atau sepanjang 1.421.920 km) di tahun 2021, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 90,02%, tahun 2019 yang sebesar 79,17%, meskipun sempat mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu dari 74,2% menjadi 61,22%. Dengan demikian, pada tahun 2021 masih ada jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang belum dalam kondisi mantap sebesar 6,06% dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang sepanjang 91,74 Km.

Tabel 2.29.
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2021

Kab/Kota	2019			2020			2021		
	Panjang	Mantap (B)	% Mantap	Panjang	Mantap (B)	% Mantap	Panjang	Mantap (B)	% Mantap
Ogan Komering Ulu	123,02	99,72	81,06%	123,02	115,12	93,58%	123,02	120,32	97,81%
Ogan Komering Ilir	79,10	63,80	80,66%	79,10	73,90	93,43%	79,10	76,45	96,65%
Muara Enim	182,550	79,35	43,47%	182,550	110,35	60,45%	182,550	123,10	67,43%

Kab/Kota	2019			2020			2021		
	Panjang	Mantap (B)	% Mantap	Panjang	Mantap (B)	% Mantap	Panjang	Mantap (B)	% Mantap
PALI	108,30	100,40	92,71%	108,30	108,30	100,00%	108,30	108,30	100,00%
Lahat	83,91	74,31	88,56%	83,91	80,41	95,82%	83,91	83,91	100,00%
Musi Rawas	38,00	36,60	96,32%	38,00	37,90	99,74%	38,00	38,00	100,00%
Musi Rawas Utara	56,25	45,25	80,44%	56,25	46,75	83,11%	56,25	56,25	100,00%
Musi Banyuasin	39,85	34,15	85,70%	39,85	39,85	100,00%	39,85	39,85	100,00%
Palembang	57,29	53,40	93,19%	57,29	54,70	95,46%	57,29	57,30	100,00%
Prabumulih	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagaralam	47,90	38,50	80,38%	-	-	-	-	-	-
OKU Selatan	191,23	174,73	91,37%	191,23	176,73	92,42%	191,23	189,63	99,16%
OKU Timur	205,75	187,90	91,32%	205,75	201,15	97,76%	205,75	205,75	100,00%
Ogan Ilir	156,75	107,27	68,43%	156,75	143,25	91,38%	156,75	135,79	86,63%
Empat Lawang	93,61	70,31	75,11%	141,51	133,31	94,21%	141,51	139,81	98,80%
Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banyuasin	50,13	32,64	65,10%	50,13	40,94	81,65%	50,13	47,46	94,66%
Provinsi Sumsel	**1.513,65**	**1.198,32**	**79,17%**	**1.513,65**	**1.362,66**	**90,02%**	**1.513,65**	**1.421,92**	**93,94%**

Sumber : DPU BMTR Sumsel 2022

Selain itu untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial infrastruktur sumber daya air juga penting antara lain infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Pada tahun 2021, kondisi jaringan irigasi permukaan kewenangan provinsi di Sumatera Selatan dengan kondisi baik sebesar 77,73%, rusak ringan sebesar 13,65%, rusak sedang sebesar 6,93% dan rusak berat sebesar 1,69%.

Tabel 2.30.

Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2020-2021

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha)			Kondisi (%) TA 2020				Kondisi (%) TA 2021			
		Daerah Irigasi	Areal Tanam	Potensi Tanam	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kab. Empat Lawang												
1	D.I. Air Keban	1.500	975	525	75,33	9,56	12,34	2,78	75,33	9,56	12,43	2,78
Kab. Lahat												
2	D.I. Air Gohong	1.200	780	420	62,53	16,17	18,74	2,57	62,53	16,17	18,74	2,57
3	D.I. Air Makim	1.000	650	350	62,13	12,62	18,94	6,31	98,09	0,00	0,00	0,00
4	D.I. Air Manna I	1.500	975	525	85,12	5,43	7,69	1,76	85,12	5,43	7,69	1,76
5	D.I. Air Merendang	1.341	872	469	95,22	4,78	0,00	0,00	95,22	4,78	0,00	0,00
6	D.I. Air Mulak	1.645	1.069	576	66,82	16,59	12,44	4,15	91,64	8,36	0,00	0,00
7	D.I. Air Pangi	1.001	651	350	75,88	16,08	8,04	0,00	75,88	16,08	8,04	0,00
8	D.I. Masam Bulau	1.500	975	525	98,29	1,71	0,00	0,00	98,29	1,71	0,00	0,00
9	D.I. Tebing Panjang	1.256	816	440	86,24	10,10	3,66	0,00	86,24	10,10	3,66	0,00
Kab. Muara Enim												

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha)			Kondisi (%) TA 2020				Kondisi (%) TA 2021			
		Daerah Irigasi	Areal Tanam	Potensi Tanam	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
10	D.I. Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam)	1.000	650	350	47,00	21,00	13,00	19,00	62,58	21,00	13,00	3,42
11	D.I. Danau Tampang	2.690	1.749	941	49,44	21,00	25,84	3,72	49,44	21,00	25,84	3,72
12	D.I. Endikat Bengkok /T. Bute	1.500	975	525	63,45	23,67	12,89	0,00	71,50	23,66	4,84	0,00
13	D.I. Lecah Paye	1.295	842	453	46,33	22,01	9,58	22,08	46,33	22,01	9,58	22,08
14	D.I. Tunggul Bute	2.400	1.560	840	51,00	25,00	13,00	11,00	51,00	25,00	13,00	11,00
Kab. Musi Rawas												
15	D.I. Air Deras I	1.461	950	511	84,08	6,37	7,96	1,59	84,08	6,37	7,69	1,59
16	D.I. Air Gegas	2.300	1.495	805	60,00	21,00	13,00	6,00	60,00	21,00	13,00	6,00
17	D.I. Air Satan	1.175	764	411	74,81	10,21	10,21	4,76	84,19	10,31	5,50	0,00
18	D.I. Megang Tikip	1.077	700	377	58,87	22,93	13,00	5,20	70,20	22,93	6,87	0,00
Kota Pagaralam												
19	D.I. Air Merah	1.500	975	525	58,00	21,00	13,00	8,00	58,00	21,00	13,00	8,00
20	D.I. Pasemah	1.107	720	387	61,56	11,53	19,22	7,69	61,56	11,53	19,22	7,69
21	D.I. Selangis Besar/ Jemair	1.020	663	357	68,14	15,93	9,56	6,37	86,49	13,51	0,00	0,00
22	D.I. Selangis Kecil	1.352	879	473	58,00	21,00	13,00	8,00	58,00	21,00	13,00	8,00
Kab. OKU Selatan												
23	D.I. Air Pius	1.600	1.040	560	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	D.I. Air Sungkai	1.500	975	525	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	D.I. Air Sunur	1.701	1.106	595	96,85	0,95	2,20	0,00	96,85	0,95	2,20	0,00
Kab. OKU Timur												
26	D.I. Air Gilas	1.050	683	367	58,00	21,00	13,00	8,00	58,00	21,00	13,00	8,00
27	D.I. Lebak Datuk	2.102	1.366	736	99,45	0,55	0,00	0,00	99,45	0,55	0,00	0,00
28	D.I. Lebak Semendawai	1.768	1.149	619	63,04	19,27	10,89	6,80	63,04	19,27	10,89	6,80
	JUMLAH	**41.541**	**27.004**	**14.537**	**64,67**	**14,83**	**12,13**	**8,37**	**77,73**	**13,65**	**6,93**	**1,69**

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sedangkan kondisi jaringan irigasi rawa kewenangan provinsi di Sumatera Selatan pada tahun 2021 dengan kondisi baik sebesar 23,15% dan rusak berat sebesar 76,85%.

Tabel 2.31.

Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kondisi (%) TA 2020						Kondisi (%) TA 2021			
		Daerah Irigasi	Potensi Tanam	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kab. Muara Enim											
1	D.I Rawa Air Putak	1.200	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Banyuasin											
2	D.I. R Bailangu	2.150	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	D.I. R Buntiale	2.000	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	D.I. R Danau Cala	1.769	100	5,65	0,00	0,00	94,35	5,65	0,00	0,00	94,35
5	D.I.R Lumpata n	1.300	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	D.I.R Pinang Banjar	1.000	200	20,00	0,00	0,00	80,00	47,82	0,00	0,00	52,18
7	D.I.R Rantau Bayur	1.500	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	D.I.R Rantau Panjang	1.922	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Ogan Ilir											
9	D.I.R Lbk Bakung	2.975	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	D.I.R Lbk Lorok	1.681	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	D.I.R Lbk Parit	1.575	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	D.I.R Lbk Purna Jaya	2.002	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13	D.I.R Lbk Tj Pering	2.559	650	25,43	0,00	0,00	74,57	25,43	0,00	0,00	74,57
14	D.I.R Lbk Palas	2.450	n.a	5,10	0,00	0,00	94,90	39,02	0,00	0,00	60,98
15	D.I.R Lbk Tiang Bilik	1.750	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Ogan Komering Ilir											
16	D.I.R Bumi Agung	1.750	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	46,63	0,00	0,00	53,37
17	D.I.R Doros	1.400	250	17,86	0,00	0,00	82,14	17,86	0,00	0,00	82,14
18	D.I.R Jejawi	1.400	514	35,71	0,00	0,00	64,29	68,33	0,00	0,00	31,97
19	D.I.R Mesuji Illir/ S. Buaya	2.916	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20	D.I.R Pancur	2.450	250	10,20	0,00	0,00	90,80	9,20	0,00	0,00	90,80

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Kondisi (%) TA 2020						Kondisi (%) TA 2021			
		Daerah Irigasi	Potensi Tanam	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
21	D.I.R Sangkaji	1.400	250	17,86	0,00	0,00	82,14	83,29	0,00	0,00	16,71
22	D.I.R Suka Pulih	1.750	437,5	24,99	0,00	0,00	75,01	24,99	0,00	0,00	75,01
23	D.I.R Ulak Jermun/ Jermal	1.050	n.a	9,52	0,00	0,00	91,48	9,52	0,00	0,00	90,48
Kota OKU Timur											
25	D.I.R Lebak Datuk	1.960	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26	D.I.R Lebak Semendawai	1.400	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	70,71	0,00	0,00	29,29
27	D.I.R Lebak Tobong	2.100	n.a	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	JUMLAH	**47.409**	**2.651,5**	**5,97**	**0,00**	**0,00**	**86,96**	**23,15**	**00,00**	**0,00**	**76,85**

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Penataan Ruang

Penataan Penataan ruang Provinsi mengacu pada peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016-2036, yang merupakan arahan atau dasar dalam pembangunan, baik perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai matra spasial yang bersifat strategis, sehingga perlu dipertimbangkan kondisi capaian dan permasalahan penataan ruang yang ada yaitu :

1. Perlu menetapkan kawasan-kawasan yang potensial dengan nilai pengaruh terhadap provinsi untuk diprioritaskan penangganannya.
2. Percepatan penetapan RTRW Provinsi yang telah memasuki masa 5 tahun pertama.
3. Mendorong revisi RTRW kabupaten/kota dan penyusunan RDTR Kabupaten/kota.
4. Integrasi RTRW kedalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya kebijakan strategs nasional, Ruang Terbuka Hijau perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
6. Percepatan penyelesaian tumpang tindih RTRW, Kawasan hutan dan batas wilayah.

7. Integrasi RZWP-3-K kedalam RTRW Provinsi.
8. Arahan struktur ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2022 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2023.
9. Penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota. Persentase kesesuaian pemanfaaatan ruang baru 80,00%.

   Penataan ruang sebagai matra spasial mengatur pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi dengan memberikan arah peruntukkan sesuai dengan peraturan yang ada tidak terlepas dari pemanfaatan, penggunaan dan penyebarluasan informasi gesospasial.

Arahan struktur ruang di Provinsi Sumatera Selatan meliputi arahan sistem perkotaan yang terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Palembang yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kesebelas kawasan perkotaan yang termasuk kedalam PKW tersebut, tujuh diantaranya sudah ditetapkan dalam RTRW Nasional terdiri dari:
   (1) Prabumulih (Kota Prabumulih); PKW
   (2) Lubuklinggau (KotaLubuklinggau); PKW
   (3) Muara Enim (Kabupaten Muara Enim); PKW
   (4) Baturaja (Kabupaten OKU); PKW
   (5) Lahat (Kabupaten Lahat); PKW
   (6) Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin); PKW
   (7) Kayu Agung (Kabupaten OKI); PKW
c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
   (1) Sungai Lilin (Kabupaten Musi Banyuasin);
   (2) Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang);
   (3) Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas);
   (4) Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan);
   (5) Pangkalan Balai (Kabupaten Banyuasin);
   (6) Gumawang (Kabupaten OKU Timur);
   (7) Tugumulyo (Kabupaten OKI);
   (8) Talang Ubi (kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);

(9) Peninjauan (Kabupaten OKU);

(10) Muara Rupit (Kabupaten Musi Rawas Utara);

(11) Bayung Lencir (Kabupaten Musi Banyuasin);

(12) Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);

(13) Muara Lakitan (Kabupaten Musi Rawas);

(14) Pengandonan (Kabupaten Ogan Komering Ulu).

Pengembangan sistem jaringan konektivitas utama, meliputi Pengembangan sarana dan prasarana Sistem Transportasi berupa:

d. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol) di Sumatera Selatan meliputi : Palembang – Indralaya, Betung-Tempino-Jambi; Betung-Palembang-Kayu Agung; Sp. Indralaya-Muara Enim; Muara Enim-Lahat; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu; Pematang Panggang-Kayu Agung; Palembang-Tanjung Api Api dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

e. Jaringan rel kereta api di Provinsi Sumatera Selatan menghubungkan beberapa wilayah, yaitu : Palembang – Prabumulih – Muara Enim – Lahat - Lubuklinggau dan Palembang – Prabumulih – Baturaja - Tanjung Karang (Provinsi Lampung) dan Palembang – Betung – Jambi.

Pengembangan Pelabuhan sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional meliputi : Boom Baru Palembang sebagai Pelabuhan Utama, Tanjung Api-Api dalam satu sistem dengan Palembang sebagai Pelabuhan Pengumpul, Sungai Lumpur sebagai Pelabuhan Pengumpul, Kertapati sebagai Pelabuhan Pengumpul dan pengembangan pelabuhan angkutan penyeberangan Tanjung Api-Api.

Peta struktur ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.58.

Peta Rencana Struktur Ruang di Provinsi Sumatera Selatan

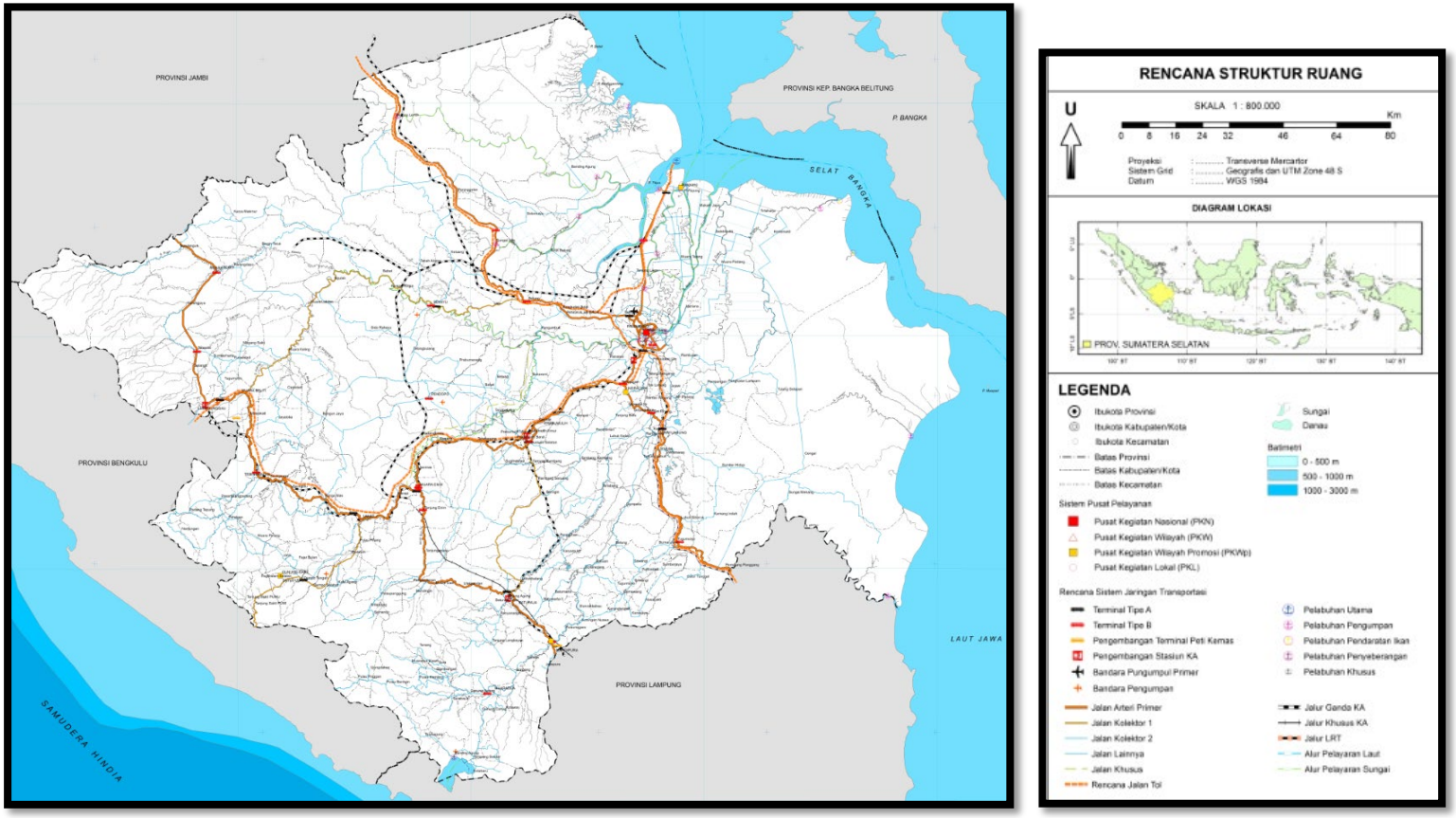

Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Arahan peruntukkan pola ruang pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan meliputi yang terdiri atas:

Tabel 2.32.
Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2036

RENCANA POLA RUANG			LUAS (Ha)	%
A	**KAWASAN LINDUNNG**			
	1	Hutan Lindung	577.327,00	6,63
	2	Sempadan Sungai, Sempadan Danau	13.143,92	0,14
	3	KPA, KSA dan Cagar Budaya	790.625,19	9,09
	4	Kawasan Rawan Bencana*		
	5	Kawasan Lindung Geologi*		
	Jumlah		1.380.096.11	15.06
B	**KAWASAN BUDIDAYA**			
1	Kawasan Hutan Produksi :			
	1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	208.724,00	2,40
	2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.713.581,00	19,69
	3	Kawasan Hutan Produksi Konversi	176.694,00	2,03
2	Kawasan Pertanian :			
	1	Kawasan Pertanian Pangan dan Hortikultura	936.074,00	10,76
	2	Kawasan Perkebunan	3.802.422.21	43,70
	3	Kawasan Perikanan	543.022,32	5,92
	4	Kawasan Peternakan	2.297,31	0,03
3	Kawasan Permukiman		320.924,67	3,69
4	Kawasan Pertambangan*		1.231.361,13	13,4
5	Kawasan Pariwisata		9.933,12	0,11
6	Kawasan Industri		17.072,28	0,20
7	Kawasan Peruntukan Daerah Latihan Militer		45.000,00	0,52
8	Kawasan Peruntukan Lainnya			
	1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	45.000,00	0,52
	2	Kawasan Reklamasi	3.000,00	0,03
	Jumlah		7.779.146,89	84,93
Total = A + B			9.159.243,00	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Catatan :

KPA = Kawasan Pelestarian Alam

KSA = Kawasan Suaka Alam

* Luasan tidak dijumlahkan, yaitu :

a. Kawasan Rawan Bencana
b. Kawasan Lindung Geologi
c. Kawasan Pertambangan

Peta Pola ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 dapat dilihat pada gambar peta 2.6.

Gambar 2.59.
Peta Rencana Pola Ruang di Provinsi Sumatera Selatan

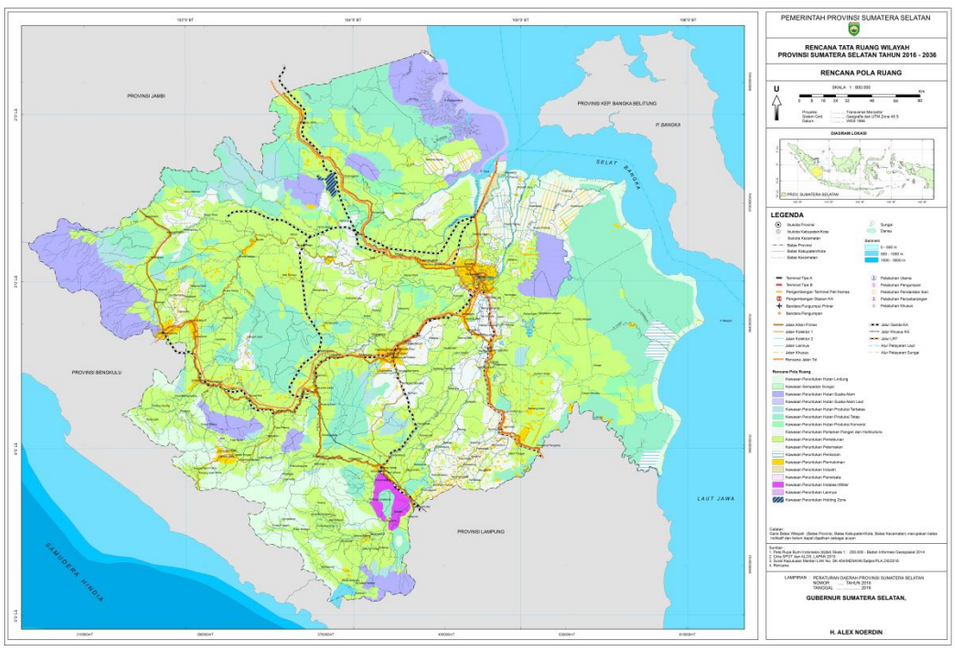

Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Status Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan semua telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.33.
Status-Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Wilayah	Nomor Perda RTRW	Tanggal Perda RTRW
	Sumatera Selatan	No. 11 Tahun 2016	24-Okt-16
1	Banyuasin	No.6 Tahun 2019	24-Okt-18
2	Empat Lawang	No. 09 Tahun 2012	27-Jul-12
3	Lahat	No. 11 Tahun 2012	21-Des-18
4	Muara Enim	No. 13 Tahun 2018	21-Des-18

No	Wilayah	Nomor Perda RTRW	Tanggal Perda RTRW
5	Musi Banyuasin	No. 08 Tahun 2016	30-Sep-16
6	Musi Rawas	No. 02 Tahun 2013	21-Okt-13
7	Musi Rawas Utara	No. 12 Tahun 2018	31-Des-2018
8	Ogan Ilir	No. 01 Tahun 2012	24-Jan-12
9	Ogan Komering Ilir	No. 09 Tahun 2013	09-Jul-13
10	Ogan Komering Ulu	No. 22 Tahun 2012	27-Des-12
11	OKU Selatan	No. 3 Tahun 2021	16-Mar-21
12	OKU Timur	No. 7 Tahun 2021	9-Jul-21
13	PALI	No. 01 Tahun 2018	20-Jul-18
14	Lubuk Linggau	No. 01 Tahun 2012	31-Agust-12
15	Pagar Alam	No. 07 Tahun 2012	19-Nop-12
16	Palembang	No. 15 Tahun 2012	27-Des-12
17	Prabumulih	No. 01 Tahun 2014	02-Apr-14

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kota Se Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan *one map policy* melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 527/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Pelaksana Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, akan dibentuk kelembagaan Informasi Geospasial Daerah (IGD) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Ada beberapa kegiatan utama one map policy, yaitu 1) kompilasi; 2) integrasi; dan 3) sinkronisasi. Saat ini, Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) di Provinsi Sumatera Selatan telah terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kebijakan Satu Peta (KSP) & (JIGD) Sumatera Selatan

Kegiatan KSP di Sumatera Selatan diawali dengan menyusun *"Roadmap",* menyusun Petunjuk teknis dan Standar Operasional (SOP), mengidentifikasi sebanyak 75 Peta Tematik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (dari 85 tematik yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dengan ketelitian Skala 1:50.000), serta 10 peta tematik sektor yang lainnya sesuai kondisi di Sumatera Selatan seperti Peta : Persebaran fasiliitas Pendidikan, Kesehatan, Perkebunan, Desa, Kawasan Kumuh, Air Bersih, Sanitasi,

Kemiskinan, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ekoregion serta peta tematik peta irigasi/ sawa beririgasi sehinga sumatera saat ini mengdidetifikjasi sebanyak 85 peta tematik dengan jumlah layer peta sebanyak 964.

Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejak November 2017 telah memilki geoportal tersendiri, data diakses melalui (http://geoportal.sumselprov.go.id) terkoneksi dengan geoportal pusat **http://tanahair.indonesia.go.id**.

Pelaksanaan Kegiatan JIGD Prov sumsel melalui beberapa pillar antara lain:

Pilar Hukum dan Kebijakan Mempersiapkan Kebijakan dan Kelembagaan agar dapat memberikan kepastian aturan, petujuk, bentuk dan peran tanggung jawab bagi pemangku kepentingan yang terlibat didalam sistem pengelolaan data dan informasi untuk pembangunan daerah.

Pilar Sumber Daya Manusia, mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan data dan informasi untuk pembangunan daerah.

Pilar Teknologi, mendukung pembangunan teknologi dan sistim yang dapat mempermudah pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah secara mandiri, efektif dan efisen tengan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

Pilar Data dan Standard, Mendorong ketersediaan data dan integrasi data secara partisipatif sesuai dengan standar atau kaidah pengelolaan data dan infromasi yang disepakati di tingkat nasional maupun global.

Penghargaan

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 mendapatkan 2 penghargaan *Bhumandala Award* dari Badan Informasi Geospasial dengan katagori sebagai berikut:

A. Bhumandala Rajata yakni penghargaan pembangunan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.
B. Bhumandala Kencana yaitu penghargaan pemanfaatan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembali mendapatkan 2 penghargaan Bhumandala Award yaitu kategori :

A. Bhumandala Rajata yakni penghargaan pembangunan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.
B. Bhumandala Kanaka yaitu penghargaan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Kemudian di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kembali mendapatkan 2 penghargaan Bhumandala Award yaitu kategori :

A. Bhumandala Kanaka yaitu penghargaan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

B. Bhumandala Kencana yaitu penghargaan pemanfaatan simpul jaringan terbaik kategori provinsi.

Sumatera Selatan telah melakukan sinkronisasi Peta Indikatip Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) melalui proses **validasi dan verifikasi** tehnis tematik dan rancangan PITTI terhadap 18 IGT antara lain peta : Penunjukan (DISHUT dan BPKH II), Penetapan (DISHUT dan BPKH II), RTRWP (DPUBMTR) , KHDTK (DISHUT dan BPKH II), IUPHHK HA (DISHUT dan BPKH II), IUPHHK HTI. IUPHHK RE, IUPHHK HTR, IUP (ESDM), HGU (DISBUN dan ATR/BPN), HPL (ATR/BPN) (Tipologi Izin), Lokais Transmigrasi , sebanyak 6603 tipolagi yang terindikasi tumpang tindih yang tersebar 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Gambar 2.60.
Portal Tanahair Indonesia

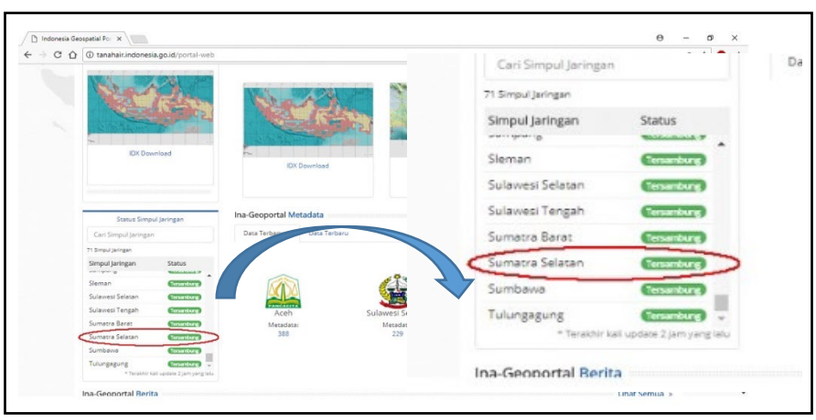

Sumber: tanahair.indonesia.go.id

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Akses Sanitasi

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 84,62 persen pada tahun 2021. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang

dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, guna mencapai target RPJMD Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 92,96 persen. Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman pada tahun 2021 adalah sebesar 79,43% dimana target RPJMN yang harus dikejar pada tahun 2024 adalah sebesar 90%. Proyek prioritas strategis yang diselenggarakan pemerintah pusat untuk mencapai target tersebut adalah Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga). Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat (*Sumber : RPJMN 2020-2024*). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAL Regional. Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

Gambar 2.61.
Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2021

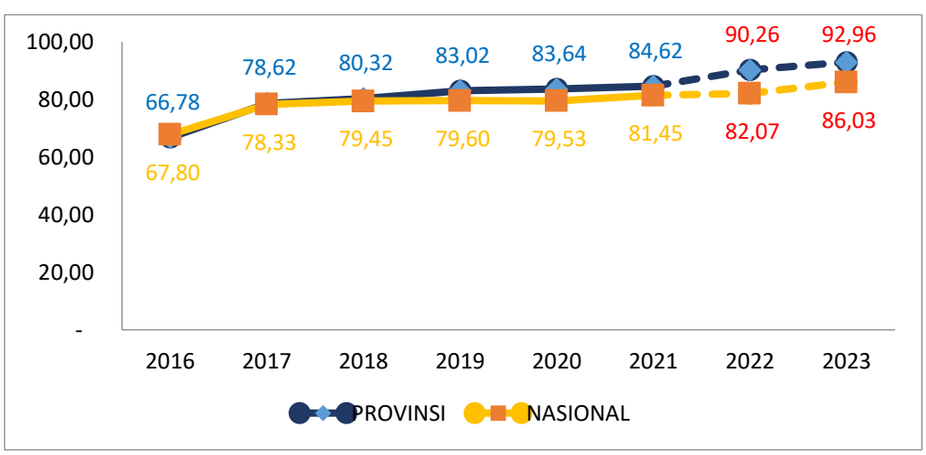

Sumber : BPS Sumsel, 2022

Tabel 2.34.
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2016 – 2021

NO	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ogan Komering Ulu	74,46	91,41	90,48	93,15	92,10	90,48
2	Ogan Komering Ilir	55,41	68,19	65,94	74,78	73,71	74,39
3	Muara Enim	72,08	91,68	90,75	91,47	94,75	92,95
4	Lahat	53,47	68,65	75,89	81,14	85,79	82,85
5	Musi Rawas	61,98	63,42	74,43	71,70	74,33	67,04
6	Musi Banyuasin	64,35	58,91	72,70	73,14	76,57	80,41
7	Banyuasin	57,32	73,35	66,08	66,34	76,70	72,16
8	OKU Selatan	44,32	60,54	72,53	73,41	71,13	76,74
9	OKU Timur	72,39	82,75	81,03	89,09	84,17	87,40
10	Ogan Ilir	73,27	74,86	71,68	82,26	94,56	90,41
11	Empat Lawang	20,68	67,13	82,70	81,39	49,99	75,32
12	PALI	45,34	33,80	98,07	94,91	97,43	97,31
13	Muratara	81,40	88,42	95,24	87,23	89,61	90,37
14	Kota Palembang	54,42	92,01	91,77	95,04	93,19	96,15
15	Kota Prabumulih	53,76	74,57	96,87	95,63	95,97	98,13
16	Kota Pagar Alam	89,39	94,79	63,30	59,18	44,39	54,04
17	Kota Lubuk Linggau	92,08	98,54	90,84	92,03	90,35	91,21
Sumatera Selatan		**66,78**	**78,62**	**80,32**	**83,02**	**83,64**	**84,62**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Gambar 2.62.
Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

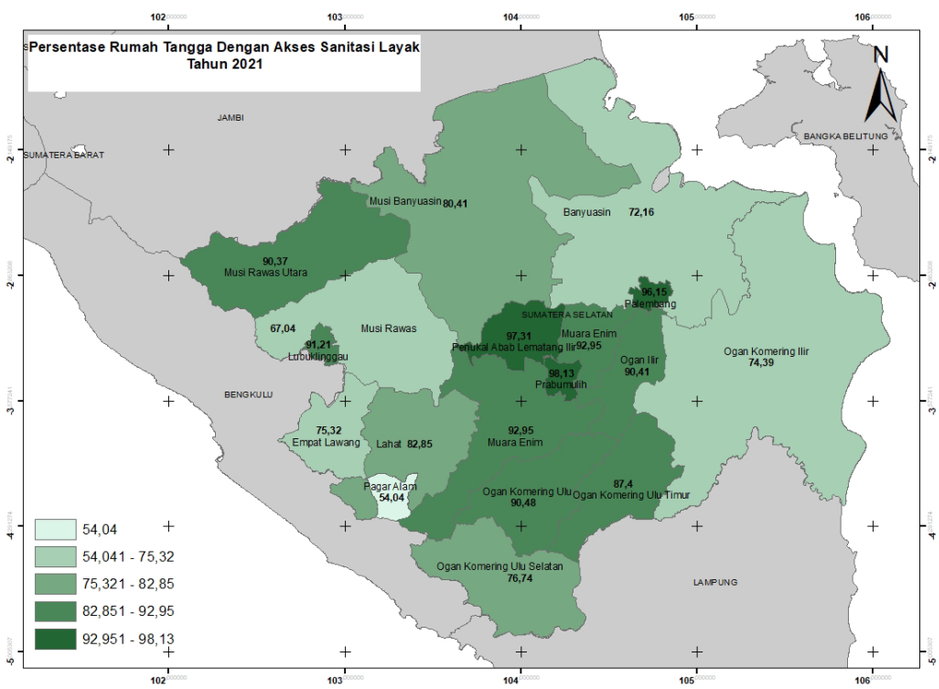

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2022—diolah

Akses Air Bersih

Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 sebesar 63,77 persen menjadi 84,70 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021, akses capaian tertinggi dicapai Kota Palembang sebesar 97,43% dan terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 51,87%. Tantangan yang cukup berat untuk mencapai target RPJMD Sumatera Selatan di tahun 2023 sebesar 86,91 persen. Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2021 adalah sebesar 93,80 % dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (*Sumber : RPJMN 2020-2024*). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAM Regional yaitu jaringan air bersih perpipaan yang melintasi dua Kabupaten/Kota dimana untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu jarak antar kabupaten yang cukup jauh dan sebagian besar berupa hutan-hutan dan rawa.

Gambar 2.63.

Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021

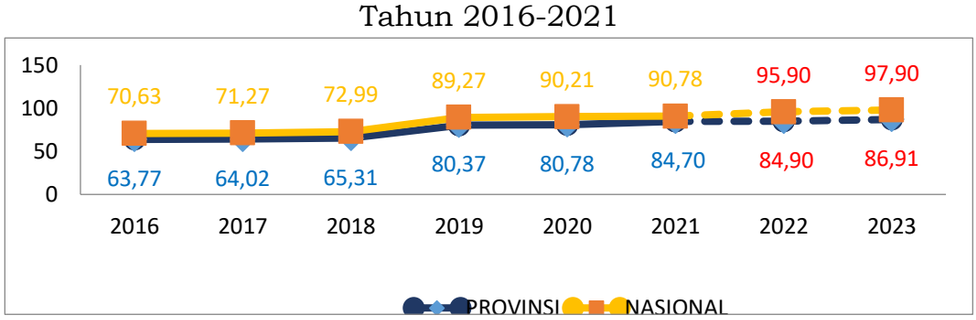

Sumber : BPS Sumsel, 2022

Tabel 2.35.
Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2021

No	WILAYAH	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ogan Komering Ulu	64,15	64,20	61,03	83,05	78,98	81,78
2	Ogan Komering Ilir	60,44	64,50	60,54	72,45	84,23	79,02
3	Muara Enim	70,43	60,47	64,78	85,74	82,15	89,48
4	Lahat	54,85	43,89	44,96	67,89	67,44	81,67
5	Musi Rawas	59,49	57,14	59,82	80,42	77,08	83,15
6	Musi Banyuasin	62,15	66,19	73,56	80,75	84,72	79,37
7	Banyuasin	66,29	73,09	75,14	75,45	70,38	76,97
8	OKU Selatan	29,28	38,31	45,92	66,35	67,75	77,12
9	OKU Timur	59,57	61,61	61,14	93,57	89,91	93,32
10	Ogan Ilir	47,96	45,84	48,04	68,19	73,08	72,53
11	Empat Lawang	9,33	18,04	25,31	32,35	31,41	51,87
12	PALI	62,82	50,34	60,47	79,61	83,90	87,49
13	Muratara	50,69	39,09	53,90	72,21	73,24	80,33
14	Kota Palembang	90,34	92,28	89,72	93,92	92,40	97,43
15	Kota Prabumulih	70,93	64,55	70,20	95,82	96,40	93,77
16	Kota Pagar Alam	52,76	54,26	49,83	88,58	88,95	93,16
17	Kota Lubuklinggau	75,18	64,49	62,44	94,60	97,10	96,10
Sumatera Selatan		**63,77**	**64,02**	**65,31**	**80,37**	**80,78**	**84,70**

Sumber : BPS Sumsel, 2022

Gambar 2.64.
Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, 2021

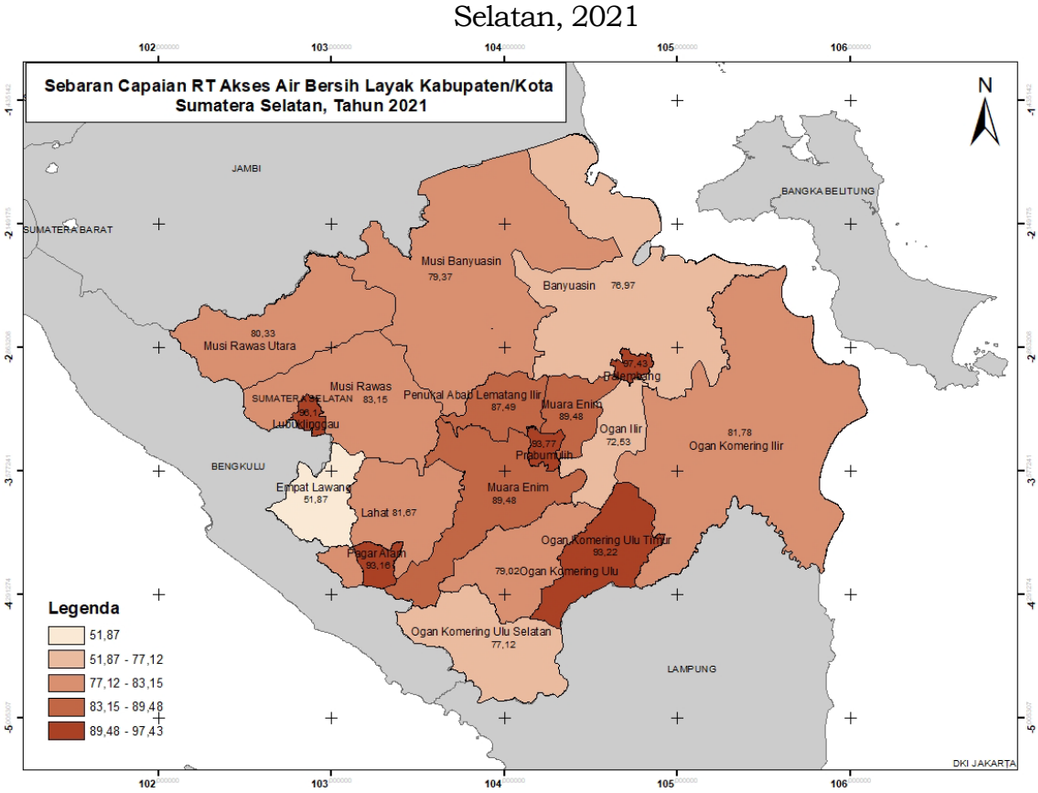

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2022—diolah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendorong dalam peningkatan Akses Air minum dan Sanitasi ada beberapa terobosan antara lain;

a. Melakukan pemetaan untuk daerah-daerah yang masih rendah aksesnya terhadap air minum dan sanitasi guna untuk memacu kabupaten/kota untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
b. Melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota melalui POKJA AMPL Provinsi dalam pembuatan regulasi agar seluruh stakeholder terlibat secara bersama-sama.
c. Melakukan Penilaian Anugerah AMPL Sriwijaya untuk memacu kabupaten/Kota berinovasi dalam akselerasi pembangunan Air Minum, Sanitasi dan penanganan kawasan kumuh, yang bertujuan; 1) mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan Akses air minum, sanitasi dan Kawasan Kumuh, 2) Menurunkan Presentasi rumah tidak layak huni, 3) Melaksanakan fungsi POKJA AMPL/Sanitasi Provinsi dalam aspek advokasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi, 4) Meningkat Pelibatan multistakeholder dalam pembangunan Air minum, sanitasi, Penanggulangan Kawasan kumuh, dan Perumahan, 5) Mendorong Inovasi daerah dalam Pembangunan Air Minum, sanitasi dan penanganan Kawasan Kumuh, 6) Mencari sumber-sumber pendanaan lainnya seperti CSR, BAZNAS.

Akses Kepemilikan Rumah

Untuk mendukung Program Sejuta Rumah (PSR). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas. Perumahan Berbasis Komunitas merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam hal ini adalah komunitas masyarakat yang memiliki pekerjaan tertentu. MBR yang tergabung dalam komunitas ini akan membeli lahan perumahan yang telah disediakan dan difasilitasi oleh komunitasnya, sedangkan untuk bahan bangunan rumah dan upah dibantu oleh pemerintah.

Berdasarkan Data Statistik kesejahteraan rakyat tahun 2021 BPS, Jumlah Kepala Keluarga (KK) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah pada tahun 2021 sebanyak 402.475 KK dan jumlah KK yang memiliki rumah sendiri pada tahun 2021 sebanyak 271.377 KK.

Tabel 2.36.
Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (*Backlog*)
di Provinsi Sumatera Selatan, 2021

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELUARGA	KEPEMILIKAN RUMAH/BANGUNAN TEMPAT TINGGAL			
		1	2	3	4
		MILIK SENDIRI (Unit)	KONTRAK/SEWA (Unit)	BEBAS SEWA (Unit)	DINAS, LAINNYA (Unit)
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KAB. OGAN KOMERING ULU	90,740	69,516	6,388	13,557	1,270
KAB. OGAN KOMERING ILIR	266,509	225,173	3,864	37,071	400
KAB. MUARA ENIM	156,691	130,132	7,098	18,474	987
KAB. LAHAT	105,432	86,001	2,636	16,542	253
KAB. MUSI RAWAS	105,001	93,261	672	7,434	3,644
KAB. MUSI BANYUASIN	162,619	136,064	9,936	15,953	667
KAB. BANYUASIN	215,234	195,023	7,490	10,826	1,894
KAB. OKUS SELATAN	98,342	85,410	2,714	10,218	0
KAB. OKU TIMUR	176,298	158,985	2,503	14,650	159
KAB. OGAN ILIR	106,013	85,457	2,279	17,322	954
KAB. EMPAT LAWANG	59,700	48,817	1,146	9,743	0
KAB. PALI	46,639	44,023	634	1,926	51
KAB. MUSI RAWAS UTARA	49,882	39,746	913	8,211	1,013
KOTA PALEMBANG	387,798	264,866	62,901	54,641	5,390
KOTA PAGARALAM	35,467	25,944	4,863	4,660	0
KOTA LUBUK LINGGAU	56,917	41,476	9,198	6,124	120
KOTA PRABUMULIH	47,116	34,027	5,861	6,728	495
TOTAL		**1,763,922**	**131,097**	**254,081**	**17,296**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Gambar 2.65.
Jumlah Kepala Keluarga MBR yang tidak memiliki Rumah
di Provinsi Sumatera Selatan, 2021

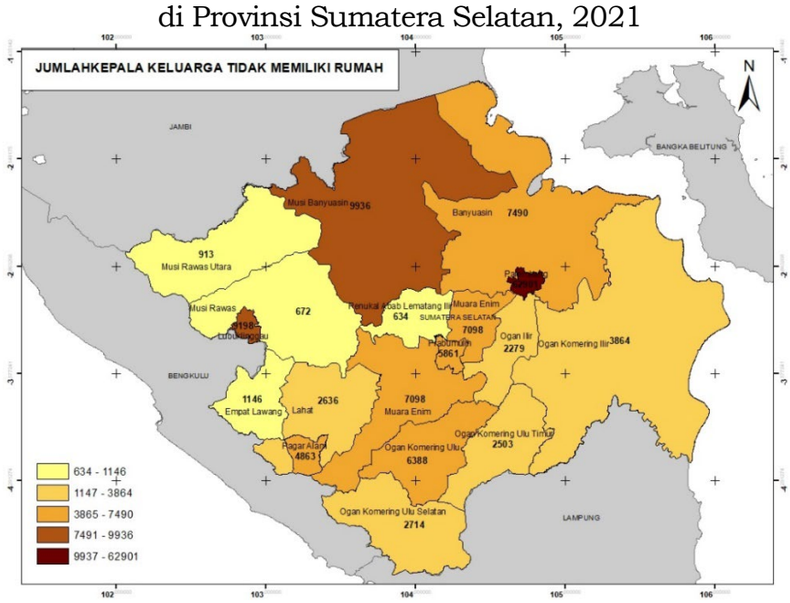

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2022—diolah

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas:

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum yaitu :

a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat yaitu :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Realisasi capaian jenis pelayanan dasar dalam pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan belum dapat terlaksana mengingat berbagai kendala dan permasalahan.

Tabel 2.37.
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota	100	n/a
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten / kota	100	n/a

Sumber : Laporan SPM Bidang Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2021

Tabel 2.38.
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Permukiman Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	n/a
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	n/a

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel 2021

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2021 untuk kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya program/kegiatan/sub kegiatan tersebut. Namun, untuk kegiatan non fisik sudah dianggarkan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Survei dan lnvestigasi Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi, sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP dan Sub Kegiatan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan rakyat antara lain:

1. SPAM Regional / Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota antara lain :
   - Jarak antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk

dibangunnya SPAM regional;

- Kondisi saat ini pembangunan SPAM Regional dirasakan belum efisien dan efktif mengingat masing-masing kab/kota memliki PDAM yang dapat mencakup pelayanan wilayahnya serta terdapat sungai/anak sungai yang melintas antar kab/kota yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat setempat;
- Pelayanan air minum di wilayah regional sebagian masih dapat dilayani lnstalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) yang sudah terbangun di masingmasing Kabupaten/Kota;
- Belum jelasnya SDM dan Manajemen dalam pengelolaan SPAM Regional; dan
- Diperlukan anggaran yang cukup besar utuk merealisasikan pembangunan SPAM Regional.

2. Air Limbah Domestik Regional lintas Kab/Kota antara lain :
   - Jarak antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya IPAL Regional;
   - Tersedianya lnstalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota;
   - Belum jelasnya SDM dan Manajemen dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Regional; dan
   - Diperlukan anggaran yang cukup besar utuk merealisasikan pembangunan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi antara lain adalah kondisi dan letak geografis Sumatera Selatan yang jarang terjadi bencana alam yang dampaknya lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota sehingga jika terjadi bencana jarang ditetapkan sebagai bencana provinsi.

4. Luas kawasan kumuh dengan sarana prasarana yang baik baru 1.047,78 ha. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 2.096,05 Ha dari total luas kawasan kumuh seluas 3.331,83 Ha;
5. Masih adanya rumah yang tidak layak huni sebesar 179.791 rumah tangga;

Solusi yang diharapkan untuk memecahkan permasalahan diatas antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan, permasalahan dan kendala dalam penerapan dan pencapaian 5PM;
2. Menyusun strategi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dalam rangka Pengembangan Air Minum Curah dan Air Limbah Domestik Regional lintas Kabupaten/Kota, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.

Melaksanakan penelitian dan kajian lebih mendalam serta melakukan identifikasi, fasilitasi, sosialiasi dan pendataan/survey pendahuluan terkait kegiatan-kegiatan dalam pencapaian SPM.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pada tahun 2021 terdapat 34.655 anggota Satlinmas yang aktif dan tersebar di 3.240 desa/kelurahan di 17 Kabupaten/Kota, sedangkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjadi sebanyak 28 gangguan dan sudah ditanggulangi sebanyak 100%. Jumlah gangguan ini menurun dari tahun 2020 yang sebesar 33 gangguan. Dengan terjaminnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka diharapkan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pada tahun 2021 dari 10 jenis Perda yang ditegakkan terdapat 190 kasus pelanggaran, jumlah ini menurun dari tahun 2020 yaitu

sebanyak 195 kasus. Dari jumlah tersebut, 100% kasus yang telah diselesaikan.

Dalam rangka mencegah terjadinya konflik baik antar masyarakat, antar suku maupun antar agama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala melakukan rapat-rapat koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Pimpinan Kecamatan se-Sumatera Selatan, Forum Komunitas Intelijen Daerah maupun Tim Kewaspadaan Dini dimana hasil rekomendasi dari rapat-rapat tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi. Selain itu Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa koordinasi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama, Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh-tokoh Pemuda dan Mahasiswa, penyuluhan bahaya Narkoba, peningkatan wawasan kebangsaan, Peningkatan Kesadaradan Bela Negara dan implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat terus digalakkan, sehingga pada tahun 2021 kasus-kasus yang berpotensi konflik tidak berkembang menjadi konflik (zero konflik).

Dari sisi Demokrasi, nilai Indeks Demokrasi Sumatera Selatan sejak 2010 hingga 2020 selalu mengalami fluktuasi namun pada tingkat demokrasi dengan kategori “sedang” dengan kisaran nilai indeks 67 – 80, tetapi nilai Indeks Demokrasi Sumatera Selatan selalu berada di atas rata-rata nilai Indeks Demokrasi Nasional. Jika dilihat capaian nilai indeks tahun 2020 sebesar 74,8 dan terjadi penurunan sebesar 4,16 point dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2019 walupun tetap berada diatas rata-rata Nasional. Namun pada tahun 2021 capaian nilai indeks demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan menjadi 78,63 dan diatas capaian Nasional 2021.

Gambar 2.66.

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2021

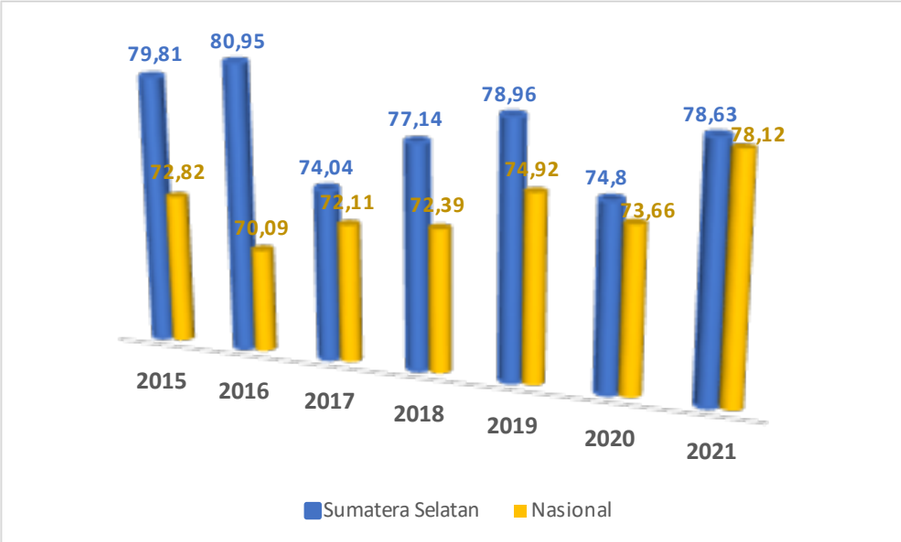

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Pada tahun 2020 ada 6 jenis Perda yang ditegakkan dan terdapat 195 kasus pelanggaran, jumlah ini menurun dari tahun 2019 yaitu sebanyak 200 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 192 kasus atau sebesar 98,46% yang diselesaikan, dan masih ada 3 kasus dalam proses penyelesaian. Proses penyelesaian dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkatan pelanggaran, proses BAP, pembinaan, penghimpunan data/bukti pelanggar dan koordinasi dengan intansi terkait.

Selain itu, dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 terdapat 33.987 anggota Satlinmas dan 12.968 Poskamling Linmas yang aktif dan tersebar 3.242 desa/kelurahan di 17 Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah gangguan tribun dan tranmas yang ditanggulangi sebanyak 30 gangguan. Dengan terjaminnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka diharapkan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pada tahun 2020, Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang menerima penghargaan "Karya Bhakti Peduli Satpol PP" dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Piagam penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri RI, Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., kepada Gubernur Sumsel

Herman Deru pada upacara peringatan HUT Satpol PP ke-77 dan Sat Linmas ke-58 di Eks Bandara Selaparang Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Gambar 2.67.
Pemberian Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

Terkait dengan kondisi kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh banyak Prestasi yang telah dicapai yaitu:

1. Penghargaan BPBD Provinsi kategori Akuntabilitas sebagai Juara I tahun 2014
2. Penghargaan dan ucapan terima kasih sebagai pembicara dalam Training Psychology First Aid, topik "Usir Traumatik Paska Bencana di UIN Raden Patah" tahun 2015.
3. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik Wilayah II (Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera) tahun 2016.
4. Penghargaan untuk Pelatihan Penguatan Kapasitas LPB PWM Sumsel dan Kaji Kebutuhan dalam Tanggap Darurat tahun 2016.
5. Sertifikat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas kerja bersama dalam aksi pengendaliaan kebakaran hutan dan lahan melalui operasi pencegahan, patroli terpadu, deteksi dini, pelaporan pemantauan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan semester I tahun 2016.

6. Penghargaan Pengelola Data Bencana dan Pusdalops Tingkat Provinsi 2016
7. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik 2 wilayah Barat Tahun 2017
8. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik I Wilayah 3 Tahun 2018

Gambar 2.68.
Piagam BNPB Tahun 2017 - 2018

Kerja keras Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait dalam menanggulangi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berbuah manis. Sumatera Selatan dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah tiga mengalahkan Kalimantan dan Jawa dalam Penganugerahan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Award di Bali, Kamis, 22 Februari 2018. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mewakili Gubernur Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan mendapatkan peringkat pertama karena dianggap berhasil menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan berhasil mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak 2015. kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 lalu di beberapa daerah di Sumsel menjadi pelajaran hebat Pemerintah Provinsi dan *stakelholder* terkait. Provinsi Sumatera Selatan sangat mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terlebih Sumsel resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Sumatera Selatan telah berkomitmen dalam penanggulangan bencana khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.69.
Penyerahan Piagam BNPB

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.

Tabel 2.39.
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Persentase penegakkan Perda	%	95	100
2		Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Sumatera Selatan	%	11	15
3		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel

Permasalahan yang dihadapi sehingga terdapat indikator SPM yang tidak tercapai diantaranya adalah dampak dari wabah Corona Virus Disease, serta belum maksimalnya Perangkat Daerah terkait untuk menjalankan perda yang dipangku. Selain itu, berdasarkan Permendagri nomor 26 tahun 2020 tanggal 2 juni 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, bahwa pembinaan dan pendataan pos kamling tidak lagi menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

6) Urusan Sosial

Panti Sosial

Sesuai amanat UU 23 tahun 2014, pengelolaan seluruh Panti milik Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi mulai tahun 2017, dimana semula berjumlah 4 panti menjadi 16 panti atau bertambah sebanyak 12 panti yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota. Namun hingga pada tahun 2020 jumlah panti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi telah berkurang menjadi 12 panti. Hal ini dikarenakan adanya penggabungan beberapa panti yang disebabkan oleh kepemilikan gedung panti masih milik kabupaten yang akan dipergunakan untuk keperluan kabupaten, kepemilikan tanah dan gedung panti milik yayasan / masyarakat sehingga panti tersebut diserahkan kembali, dan

jumlah klien salah satu panti tidak banyak sehingga untuk efektifitas maka digabung dengan panti lain yang masih dalam satu kategori panti.

Tabel 2.40.
Nama-Nama Panti Sosial di Provinsi Sumatera Selatan

PANTI SOSIAL					
NO	**2019**	**NO**	**2020**	**LOKASI**	**KETERANGAN**
I	**Panti Sosial Lanjut Usia**	**I**	**Panti Sosial Lanjut Usia**		
1	Panti Sosial Lanjut Usia Teratai	1	Panti Sosial Lanjut Usia Teratai	Palembang	
2	Panti Sosial Lanjut Usia Graha Lansia			Musi Banyuasin	Gedung panti milik Dinkes Kabupaten sehingga Digabung Dengan Panti Sosial Harapan Kita
3	Panti Sosial Lanjut Usia Bhakti Mulia	2	Panti Sosial Lanjut Usia Bhakti Mulia	Musi Rawas	
4	Panti Sosial Lanjut Usia Budi Luhur	3	Panti Sosial Lanjut Usia Budi Luhur	Lubuk Linggau	
5	Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita	4	Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita	Indralaya	
II	**Panti Sosial Anak**	**II**	**Panti Sosial Anak**		
6	Panti Sosial Anak Tunas Harapan	5	Panti Sosial Anak Tunas Harapan	OKI	
7	Panti Sosial Anak Budi Mulia	6	Panti Sosial Anak Budi Mulia	Musi Rawas	
8	Panti Sosial Anak Amal Bhakti	7	Panti Sosial Anak Amal Bhakti	Musi Banyuasin	
9	Panti Sosial Anak Mawar Putih			Ogan Ilir	Tanah dan Gedung panti milik yayasan/masyarakat sehingga diserahkan kembali ke Kabupaten
10	Panti Sosial Anak Nakal Nusantara			Palembang	Panti digabung dengan Panti Anak Berhadapan dengan Hukum
11	Panti Sosial Anak / Bina Remaja Indralaya	8	Panti Sosial Anak / Bina Remaja Indralaya	Indralaya	
III	**Panti Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum**	**III**	**Panti Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum**		
12	Panti Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum	9	Panti Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum	Indralaya	
IV	**Panti Sosial Rehabilitasi Gepeng dan ODGJ**	**IV**	**Panti Sosial Rehabilitasi Gepeng dan ODGJ**		
13	Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa	10	Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang	Palembang	

PANTI SOSIAL					
NO	2019	NO	2020	LOKASI	KETERANGAN
			Dengan Gangguan Jiwa		
V 14	**Panti Sosial Tuna Sosial** Panti Sosial Tuna Sosial	V 11	**Panti Sosial Tuna Sosial** Panti Sosial Tuna Sosial	Indralaya	
VI 15	**Panti Sosial Rehabilitasi Disabilitas Sensorik** Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik	VI 12	**Panti Sosial Rehabilitasi Disabilitas Sensorik** Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik	Palembang	
VII 16	**Panti Pusat** Panti Sosial / Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa	VII 13	**Panti Pusat** Panti Sosial / Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa	Palembang	Milik Kementerian Sosial RI
Total	**16 Panti Sosial**		**13 Panti Sosial**		

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Selain panti-panti yang semuanya telah dikelola oleh Pemerintah Provinsi, masih ada 1 Panti yang dikelola Pemerintah Pusat yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa sehingga total berjumlah 13 Panti milik Pemerintah di Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, uraian tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, 12 Panti yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tersebut dikelola oleh 6 UPTD yaitu : UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa; UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak membutuhkan perlindungan khusus, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan hukum, UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita.

Lokasi panti-panti sosial tersebut hanya berada di 6 Kabupaten/Kota dengan jumlah klien yang berbeda, dengan jumlah klien paling sedikit 25 orang dan jumlah klien paling banyak 180 orang.

Tabel 2.41.
Jumlah Klien Panti Sosial Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020

NO	NAMA PANTI SOSIAL	LOKASI	JUMLAH KLIEN (Orang)
I	**Panti Sosial Lanjut Usia**		
1	Panti Sosial Lanjut Usia Teratai	Palembang	60
2	Panti Sosial Lanjut Usia Bhakti Mulia	Musi Rawas	25
3	Panti Sosial Lanjut Usia Budi Luhur	Lubuk Linggau	35
4	Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita	Indralaya	80
II	**Panti Sosial Anak**		
5	Panti Sosial Anak Tunas Harapan	OKI	20
6	Panti Sosial Anak Budi Mulia	Musi Rawas	30
7	Panti Sosial Anak Amal Bhakti	Musi Banyuasin	30
8	Panti Sosial Anak / Bina Remaja Indralaya	Indralaya	50
III	**Panti Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum**		
9	Panti Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum	Indralaya	50
IV	**Panti Sosial Rehabilitasi Gepeng dan ODGJ**		
10	Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Palembang	180
V	**Panti Sosial Tuna Sosial**		
11	Panti Sosial Tuna Sosial	Indralaya	50
VI	**Panti Sosial Rehabilitasi Disabilitas Sensorik**		
12	Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik	Palembang	40
VII	**Panti Pusat**		
13	Panti Sosial / Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa	Palembang	Dalam Panti/Balai : 85 Luar Panti/Balai : 150
	Total		885

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumsel

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial khususnya layanan dasar tersebut tentunya diperlukan pedoman yang pelaksanaannya sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM). SPM Bidang Sosial diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, telah ditetapkan SPM bidang sosial di provinsi terdiri atas 5 (lima) layanan dasar yaitu 1). Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial, 2). Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial, 3). Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial, 4). Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dan 5). Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

Tabel 2.42.
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Realisasi 2021 (%)	% Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	70,00	70,00
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	75,00	75,00
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	71,88	71,88
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenu Kebutuhan Dasarnya Dalam Panti	100,00	67,86	67,86
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosi yang Terpenuhi Kebutu Dasarnya Pada Saat da Setelah Tanggap Darura Bencana Provinsi	100,00	90,00	90,00

Sumber : Laporan SPM Bidang Sosial, Dinas Sosial Prov. Sumsel 2022

Dalam penerapan SPM Bidang Sosial, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya 1). Sumber Daya Manusia yang terbatas baik secara jumlah maupun kualitas (kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 2). Penyediaan sarana dan prasarana sosial yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masih kurang jumlahnya dan 3). Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial mengakibatkan target penanganan juga belum maksimal.

Tentunya beberapa permasalahan tersebut diperlukan solusi yaitu penambahan dan penguatan kapasitas SDM kesejahteraan Sosial, perbaikan maupun renovasi/pemenuhan sarana prasarana sosial yang memadai sesuai dengan SOP dalam menunjang

pelayanan serta diperlukan juga peraturan yang menyebutkan secara jelas Persentase (%) alokasi anggaran untuk bidang kesejahteraan sosial khususnya untuk SPM.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No 19/HUK/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan memiliki jumlah berbasis rumah tangga sebanyak 786.629 RT dan berbasis keluarga sebanyak 820.315 KK serta berbasis individu sebanyak 2.972.709 jiwa. Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin dengan dilaksanakannya proses pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.

Tabel 2.43.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
Tahun 2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH RATA-RATA KELUARGA /RUTA	JUMLAH RATA-RATA INDIVIDU/ RUTA
1	LAHAT	39,304	41,261	146,499	1,04	3,41
2	BANYUASIN	91,780	96,509	356,822	1,05	3,60
3	LUBUKLINGGAU	18,813	19,648	72,133	1,03	3,31
4	MUARA ENIM	66,434	69,937	252,101	1,04	3,57
5	MUSI RAWAS	44,659	46,269	153,606	1,03	3,26
6	MUSI BANYUASIN	53,288	54,129	195,889	1,02	3,47
7	MURATARA	17,933	18,657	63,908	1,05	3,40
8	OKU	23,916	24,642	88,951	1,03	3,55
9	OKUS	44,250	45,943	162,838	1,04	3,56
10	OKUT	65,811	67,817	227,008	1,05	3,64
11	OKI	86,371	89,969	316,840	1,04	3,66
12	PAGAR ALAM	12,249	12,743	43,976	1,04	3,47
13	PALI	19,152	20,010	73,867	1,04	3,59
14	PALEMBANG	114,492	119,959	486,422	1,06	4,15
15	PRABUMULIH	13,495	14,161	52,873	1,05	3,76
16	OGAN ILIR	51,952	54,692	194,533	1,05	3,74
17	EMPAT LAWANG	22,730	23,969	84,443	1,06	3,59
	TOTAL	**786,629**	**820,315**	**2,972,709**	**17.72**	**60.73**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Januari 2020 (data termutakhir)

Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos RI**.** Mekanisme verifikasi dan validasi data tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Verifikasi dan validasi data sangat penting untuk mewujudkan data yang akurat, termutakhirkan (up to date) dan terintegrasi dalam satu data. Dengan demikian akan terwujud ketepatan sasaran penerima manfaat program penyelengaraan kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

7) Urusan Tenaga Kerja

7.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sumsel mencapai 4,48 persen, berkurang sebesar 2,17 persen dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,51% sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di tahun 2021, Sumsel berhasil menurunkan angka TPT menjadi 4,98%. Angka TPT berhasil diturunkan kembali menjadi 4,74% di tahun 2022. Hal tersebut seiring dengan capain TPT nasional di tahun 2022 yang juga mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2011-2022 capaian TPT Sumsel lebih rendah dibandingkan capaian TPT nasional.

Gambar 2.70.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan
Tahun 2010-2022

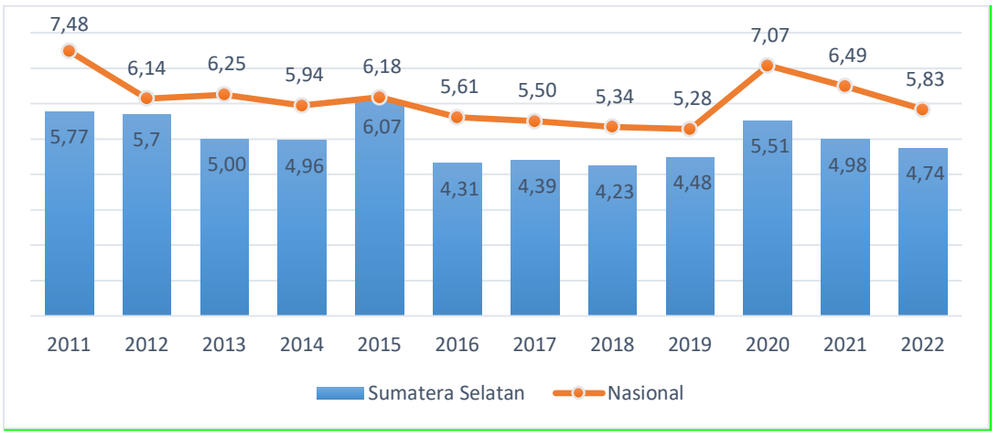

Sumber: BPS, 2022

Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2022 sebanyak 208,6 ribu orang atau berkurang sebanyak 21,3 ribu orang dari Februari 2021 sebesar 229,9 ribu orang.

Dampak Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Sumsel. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi ini. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan Angkatan Kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Tabel 2.44.
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja
Provinsi Sumatera Selatan Februari 2022

Komponen	Februari 2021 (ribu orang)	Agustus 2021 (ribu orang)	Februari 2022 (ribu orang)
Pengangguran karena Covid-19	27,8	41,8	22,8
Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19	16,0	23,2	8,9
Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19	20,5	24,2	7,6
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	326,1	316,7	195,3
Total	390,5	405,9	234,6
Penduduk Usia Kerja (PUK)	6354,6	6396,6	6353,4
Persentase terhadap PUK	6,14	6,35	3,69

Sumber: BPS Sumsel, 2022

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Februari 2022 sebanyak 234,6 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 171,3 ribu orang atau sebesar 42,20 persen dibanding Agustus 2021. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 22,8 ribu orang pengangguran karena Covid-19, 8,9 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 7,6 ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan 195,3 ribu orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Ke-empat komponen tersebut mengalami penurunan dibanding Agustus 2021. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebesar 121,4 ribu orang.

7.2. Kondisi Angkatan Kerja

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2022 terdiri atas 4,19 juta orang penduduk yang bekerja dan 208,6 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2021, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 40,1 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 18,8 ribu orang sedangkan pengangguran juga mengalami penurunan sebanyak 21,3 ribu orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Februari 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 26,7 ribu

orang. Penduduk bekerja berkurang sebesar 11,4 ribu orang dan pengangguran bertambah sebesar 38,1 ribu orang.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 mengalami penurunan sebanyak 40,1 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2021. Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun menjadi 69,33 persen pada Februari 2022 dibandingkan Februari 2021 (69,95 persen). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi pengurangan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 84,50 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 53,63 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi Februari 2021, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan.

7.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 42,93 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 10,96 persen. Kontribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Februari 2020 maupun Februari 2021. Dibandingkan dengan Februari 2020, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (0,03 persen poin), SMP (1,63 persen poin), dan Diploma (0,23 persen poin).

Gambar 2.71.
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan

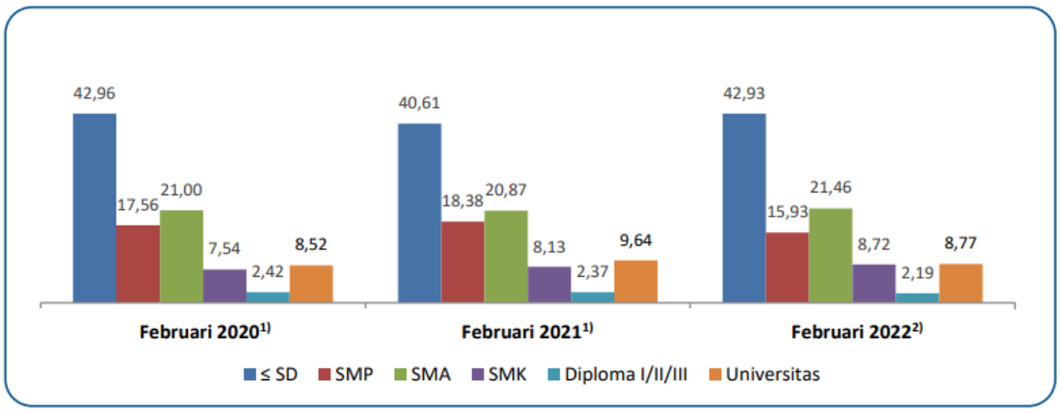

Sumber: BPS Sumsel, 2022

Bila dibanding Februari 2021 kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja juga turun pada pendidikan SMP (1,63 persen poin) dan Diploma (0,23 persen poin). Peningkatan kontribusi yang cukup besar terdapat pada penduduk bekerja dengan pendidikan SD sebesar 2,32 persen, SMA dengan peningkatan sebesar 0,59 persen dan SMK sebesar 0,59 persen.

Selain itu kurangnya keterampilan pencari kerja juga menyebabkan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor formal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/ pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Gambar 2.72.
Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal
Provinsi Sumatera Selatan

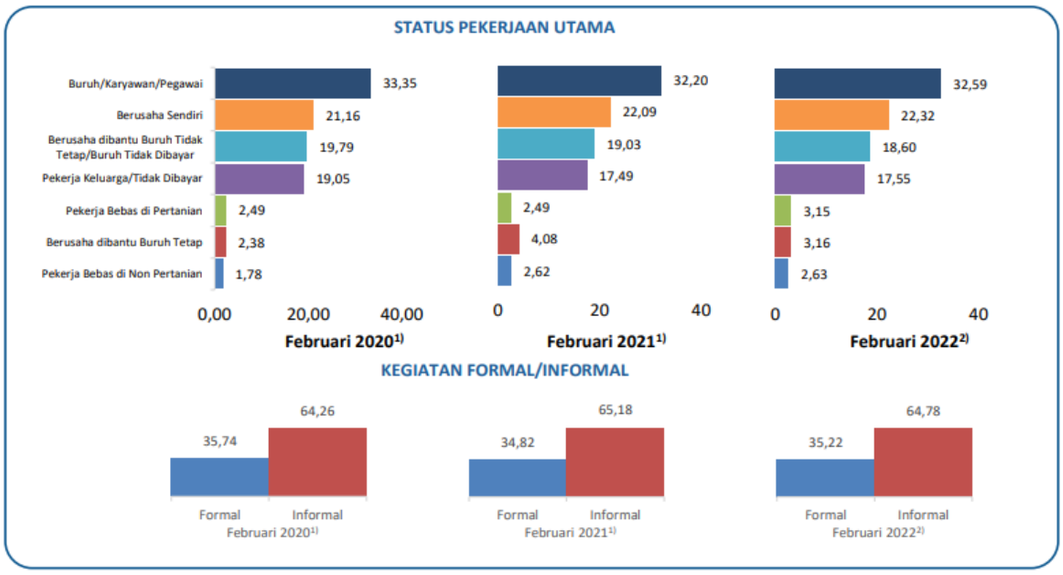

Sumber: BPS Sumsel, 2022

Pada Februari 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 2,72 juta orang (64,78 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 1,48 juta orang (35,22 persen). Penduduk bekerja di kegiatan formal pada Februari 2022 mengalami peningkatan 0,4 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021, dan mengalami penurunan 0,52 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2020.

Selain itu jumlah pekerja tidak penuh (penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu) juga masih cukup tinggi sebesar 40,01%.

7.4. Tingginya Jumlah Pengangguran Terdidik

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pengangguran di Sumatera Selatan didominasi oleh pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang hampir sama pada Februari 2022, Februari 2021, dan Februari 2020. Pada Februari 2022, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 13,44 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah

mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,62 persen.

Dibandingkan Februari 2021, TPT hampir semua kategori mengalami penurunan kecuali untuk tamatan SD yaitu naik sebesar 0,43 persen poin dan SMA yang naik sebesar 0,07 persen poin. Namun jika dibanding Februari 2020 hampir semua kategori mengalami peningkatan kecuali tamatan SMP dan Perguruan Tinggi yang turun masing-masing sebesar 0,73 persen poin dan 0,09 persen poin.

Beberapa penyebab yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terdidik adalah terbatasnya lapangan kerja yang tidak diminati oleh tenaga kerja terdidik. Dengan pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor tersebut sangat terbatas sehingga mereka terpaksa menganggur. Tingginya angka pengangguran terdidik lebih disebabkan faktor eksternal pendidikan misalnya budaya priyayi, atau pola pikir masyarakat yang menganggap pekerjaan formal lebih bonafit dibandingkan pekerjaan informal.

Gambar 2.73.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

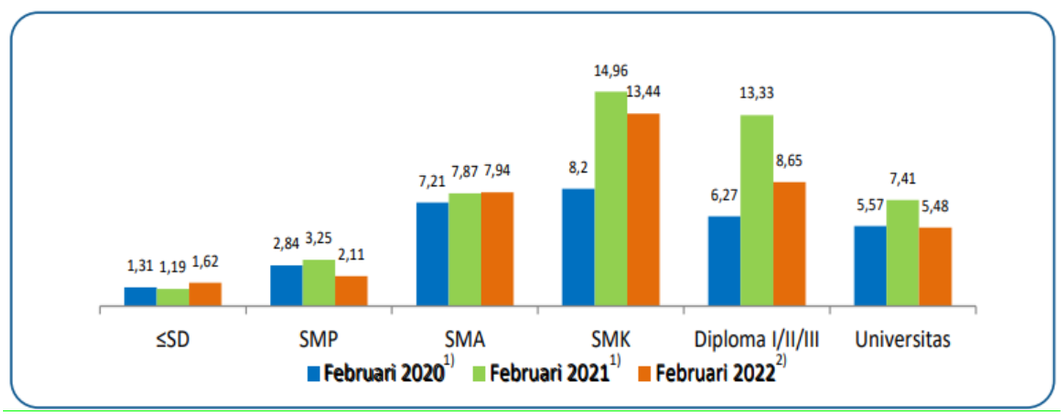

Sumber: BPS Sumsel, Agustus 2021

Dalam mengatasi fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menurunkan angka pengangguran terdidik, antara lain

melalui pengembangan informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Dalam penyebarluasan informasi bursa kerja, pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya penyebarluasan informasi bursa kerja tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para pencari kerja. Kedepan, Balai Latihan Kerja harus diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan pasar.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendapat penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2020. Penghargaan APE ini dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Penghargaan APE merupakan penghargaan sekaligus bentuk pengakuan dari pemerintah atas komitmen dan peran Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan 3 (tiga) dimensi operasional pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yaitu pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak.

Gambar 2.74.
Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.45.

Rangkuman penghargaan APE yang diterima
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Nama Penghargaan	Kategori	Tahun
1	Penghargaan APE	Tingkat Pratama	2009
2	Penghargaan APE	Tingkat Pratama	2012
3	Penghargaan APE	Tingkat Pratama	2013
4	Penghargaan APE	Tingkat Pratama	2014
5	Penghargaan APE	Tingkat Madya	2015
6	Penghargaan APE	Tingkat Utama	2016
7	Penghargaan APE	Tingkat Pratama	2020

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mengikuti Penghargaan APE tersebut, dikarenakan untuk meraih kembali Predikat Utama sebagian besar Kabupaten/Kota juga harus meraih APE, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan fokus pada penguatan/pendampingan teknis kabupaten/kota untuk meraih APE.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikuti Penghargaan APE tersebut akan tetapi penyelenggaraan Penghargaan APE tersebut tidak bisa diselenggarakan dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia dan seluruh pelosok dunia, sehingga penyelenggaraannya diundur tahun 2021 untuk penghargaan tahun 2020.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian IPG Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 92,35%. Capaian tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Selatan berada di atas angka nasional yaitu sebesar 91,27% atau nomor 11 tertinggi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa *gap* pembangunan manusia perempuan dan laki-laki di Sumatera Selatan masih cukup besar, dimana prestasi pembangunan manusia perempuannya relatif lebih kecil dibandingkan laki-laki, terutama untuk komponen Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita.

Gambar 2.75.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015 – 2021

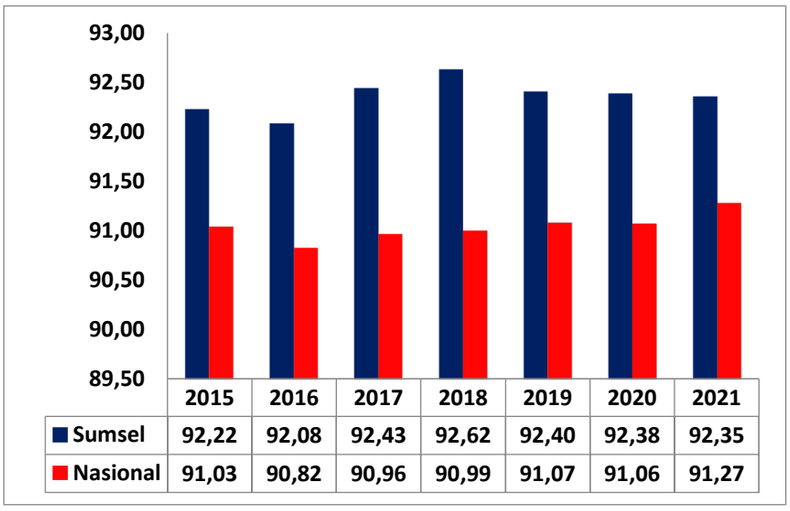

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumsel	92,22	92,08	92,43	92,62	92,40	92,38	92,35
Nasional	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tren capaian IDG Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan, dari 70,36% pada tahun 2015 menjadi 74,64% pada tahun 2020. Namun terjadi penurunan pada tahun 2021 yaitu 73,88%. Capaian tersebut juga sempat berada di atas capaian nasional, yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi lainnya di Pulau Sumatera, capaian Sumatera Selatan pada tahun 2021 merupakan capaian tertinggi diantara Provinsi lainnya.

Gambar 2.76.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015 – 2021

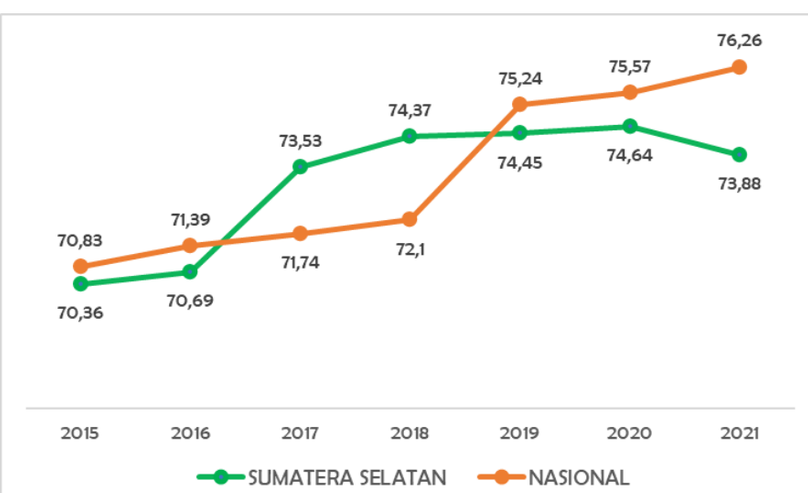

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

9) Urusan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan tercermin dari ketersesedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, kenyakinan dan budaya masyarakat. Untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi ketahanan pangan tercermin dari 3 pilar utamanya yaitu :

1. Aspek Ketersediaan Pangan
2. Aspek Keterjangkauan Pangan
3. Aspek Pemanfaatan Pangan

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan pangan strategis di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.46.

Neraca Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (ASEM)

No.	Komoditi	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus/Minus (Ton)
1	Beras	2.261.124	808.169	1.452.955
2	Jagung	387.712	6.962	380.750
3	Ubi Kayu	127.411	84.415	42.996
4	UbiJalar	30.970	23.497	7.473
5	GulaPasir	91.205	84.569	6.636
6	Kacang Tanah	1.489	870	619
7	Kacang Hijau	2.254	1.741	513
8	Kedelai	70.871	60.048	10.823
9	Sayur dan Buah	1.122.197	776.274	345.923
10	Daging Ruminansia	30.570	25.450	5.120
11	Daging Unggas	102.801	67.379	35.422
12	Telur Ayam	146.146	66.983	79.163
13	Susu	29.676	26.978	2.698
14	Ikan	296.505	235.493	61.012
15	Minyak Goreng/Sawit	94.110	82.978	11.132

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2022

Berdasarkan dari data ketersediaan dan kebutuhan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat diperoleh kesempilan sebagai berikut:

1. Kebutuhan 15 (lima belas) komoditi pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat terpenuhi, baik dengan produksi sendiri maupun impor.
2. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan komoditi pangan beras, jagung, ubi kayu, kacang tanah dan telur ayam dapat terpenuhi dari hasil produksi sendiri
3. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan komoditi pangan ubi jalar, gula pasir, kacang hijau, kedelai, daging ruminansia, daging unggas dan susu dilakukan melalui produksi sendiri ditambah dengan impor dari luar provinsi.
4. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah, serta ikan dilakukan melalui produksi sendiri, impor dan juga ekspor beberapa produk tertentu.
5. Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan komoditi minyak goring/sawit dilakukan melalui impor.

b. Aspek Keterjangkauan Pangan

Aspek keterjangkauan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.47.

Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Eceran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS TINGKAT ECERAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

NO	Komoditi	Harga Rata-Rata (Rp/kg)												Rata-rata	MIN	MAX	CV
		Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21*)				
1	Beras Premium	11.633	11.559	11.517	11.531	11.475	11.458	11.488	11.473	11.548	11.555	11.627	11.629	11.540	11.458	11.633	0,6
2	Beras Medium	10.483	10.411	10.321	10.243	10.275	10.290	10.260	10.212	10.268	10.278	10.353	10.375	10.313	10.212	10.483	0,8
3	Kedelai Biji Kering (Impor)	10.140	10.064	10.062	10.423	10.777	10.903	11.369	11.264	11.313	11.254	11.069	11.191	10.825	10.062	11.369	4,7
4	Bawang Merah	28.738	30.300	33.991	32.821	32.520	30.412	31.582	30.565	26.794	25.757	23.683	24.760	29.417	23.683	33.991	11,7
5	Bawang Putih Bonggol	24.038	24.684	25.931	26.247	26.817	26.442	27.200	26.777	25.437	25.574	25.224	25.676	25.879	24.038	27.200	4,0
6	Cabai Merah Keriting	61.717	54.921	51.383	44.999	32.962	27.574	32.472	27.155	22.610	26.101	44.260	45.942	39.111	22.610	61.717	32,7
7	Cabai Rawit Merah	68.648	73.665	82.853	71.220	51.302	43.261	51.706	40.260	33.641	36.305	41.609	61.294	54.443	33.641	82.853	30,3
8	Daging Sapi Murni	122.884	122.308	122.275	125.727	130.895	125.621	127.670	125.524	125.680	126.266	126.681	127.246	125.833	122.275	130.895	2,7
9	Daging Ayam Ras	32.171	30.727	31.088	35.055	34.962	34.943	29.728	28.881	31.280	31.952	31.919	33.178	32.152	28.881	35.055	6,5
10	Telur Ayam Ras	23.205	22.513	22.507	23.199	23.290	23.497	23.349	23.035	21.139	20.510	22.729	23.449	22.685	20.510	23.497	5,0
11	Gula Pasir Curah/Lokal	13.157	13.089	13.101	13.185	13.110	13.003	12.932	12.836	12.827	12.871	12.842	12.907	12.988	12.827	13.185	1,1
12	Minyak Goreng Kemasan	12675,66	12724,39	13.086	13.392	13.588	13.597	13.813	14.028	14.403	15.864	18.012	18.596	14.430	12.676	18.596	13,0
13	Tepung Terigu (Curah)	7.669	7.656	7.670	7.729	7.707	7.602	7.697	7.580	7.610	7.580	7.571	7.742	7.650	7.571	7.742	0,9
Rata-rata CV																	**8,8**

Ket : Sumber Data Panel Harga BKP 2021

**) Data sd 26 Desember 2021*

Berdasarkan hasil analisis, Perkembangan harga komoditi pangan strategis pada tahun 2021 tingkat Konsumen terpantau cukup stabil, terutama untuk komoditi: Beras Premium, Beras Medium, Kedelai biji

kering, Bawang Merah, Bawang Putih (Bonggol), Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi, Gula Pasir Lokal, dan Terigu Curah. Terkecuali untuk 3 (tiga) komoditi yaitu minyak goreng, cabe merah keriting dan cabe rawit merah. Tetapi secara rata-rata Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis (%)≤ 15 % yaitu 8,8 %.

Permasalahan pada pelaksanaan program Peningkatan Sistem Distribusi dan Harga Pangan secara umum adalah belum tersedianya data pasokan dan harga di distributor besar. Sedangkan data pasokan dan harga di distributor besar sangat mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

Dalam mendukung program Peningkatan Sistem Distribusi dan Harga Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan: Pemantauan Pasokan Dan Harga Pangan, Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan selain itu juga dilakukan kegiatan penunjang: Fasilitasi Distribusi Pangan, dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Pasar Mitra Tani (TTI/TTIC)

1. Fasilitasi Distribusi Pangan merupakan kegiatan memberdayakan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan/poktan) dalam menyalurkan bahan pangan pokok ke Pasar Mitra Tani dengan harga murah dan terjangkau bagi msyarakat.
2. Pengembangan Pasar Mitra Tani (TTI/TTIC) yang merupakan lembaga yang bertigas membantu kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan
3. Panel harga pangan yang telah berhasil mendukung tersedianya perkembangan stabilitas harga pangan pokok strategis.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek keterjangkauan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.48.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	KelompokPangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi		
		Ideal	Aktual	
			2020	2021*
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	2,5	1,3	1,7
3.	PanganHewani	24,0	22,9	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Bijiberminyak	1,0	0,3	0,3
6.	Kacang-kacangan	10,0	4,2	4,4
7.	Gula	2,5	2,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	30,0	24,9	26,2
9.	Lain-lain	-	-	-
Total		100	86,1	89,1

* Angka Sementara

Dari hasil perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebesar 86,1. Hal ini dapat diartikan bahwa mutu/kualitas konsumsi pangan masyarakat Sumatera Selatan be,lum dikatakan memenuhi standar beragam, bergizi dan seimbang (B2SA), pola konsumsi masyarakat masih didominasi pada padi-padian dan lemak.

Selain itu kondisi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan 2021 dapat dilihat dari peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021:

Gambar 2.77

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

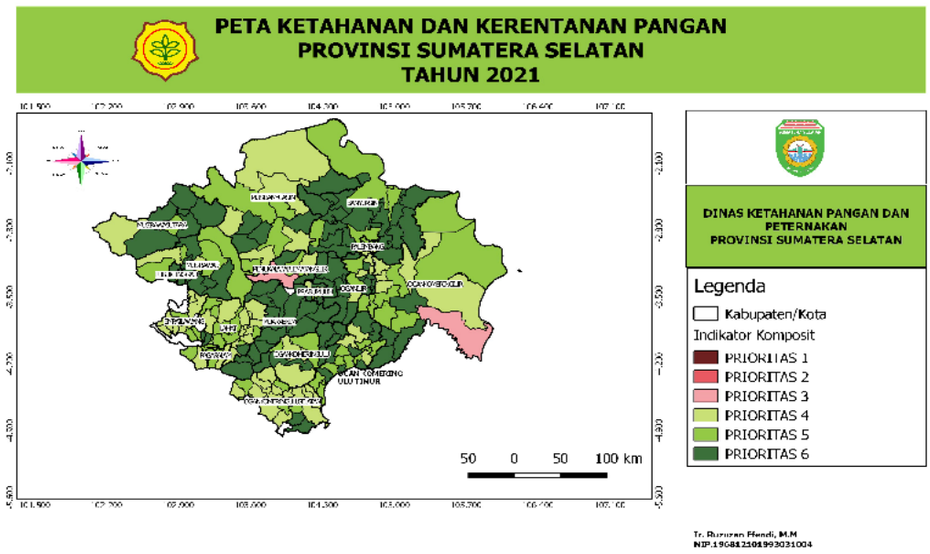

Berdasarkan analisa ketahanan pangan komposit, dari 237 kecamatan yang ada di Sumatera Selatan 29,96% atau 71 kecamatan masuk pada skala prioritas 6, selanjutnya 40,08 % atau 95 kecamatan masuk pada skala prioritas 5, dan 22,78% atau 54 kecamatan berada pada skala prioritas 4, dengan demikian dapat dikatakan 92,83% atau 220 kecamatan berada pada kondisi tahan pangan.

Sedangkan sisanya sebesar 7,17% atau sebanyak 17 kecamatan berada pada status rawan pangan dengan sebaran 5,06 % atau 11 kecamatan berada pada skala prioritas 3 dan 1,69% atau sebanyak 4 kecamatan berada pada skala prioritas 2. Hanya 0,42% wilayah yang masuk pada prioritas 1 yaitu kecamatan PendopoBarat di Kabupaten Empat Lawang dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan sebesar 41,09. Wilayah kecamatan dengan nilai indeks ketahanan pangan tertinggi adalah Kecamatan Madang Suku I di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan nilai Indeks ketahanan pangan sebesar 90,87.

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran Kecamatan Prioritas pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.49.

Sebaran Kecamatan Prioritas Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Kab/kota	Jumlah Prioritas						Jumlah Kecamatan
	1	2	3	4	5	6	
OKU				3	3	7	13
OKI			1	5	8	4	18
Muara Enim						22	22
Lahat				11	10	3	24
Musi Rawas				2	5	7	14
Musi Banyuasin				6	4	5	15
Banyuasin					4	17	21
OKUS				13	4	2	19
OKUT				3	10	7	20
OI				4	2	10	16
Empat Lawang				7	3		10
Pali			1	1	1	2	5
Muratara				1	1	5	8
Palembang				7	9	2	18
Prabumulih				3	1	2	6
Pagar Alam				1	4		5
Lubuk LInggau					2	6	8
Sumatera SElatan			2	67	71	102	241

Produksi Hasil Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. SUMSEl, 2022

Tabel 2.50.

Target dan Realisasi Produksi Peternakan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KIERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI	PERSEN
1	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pendapatan peternak	**PRODUKSI DAGING (Ton)***	***95.290***	***115.371***	***121,07***
		1. Sapi	22.595	13.430	59,44
		2. Kerbau	1.970	457	23,20
		3. Kambing	2.643	1.318	49,87
		4. Domba	1.031	93	9,02
		5. Babi	1.292	143	11,07
		6. Ayam Buras	11.057	7.711	69,74
		7. Ayam Ras Petelur	8.541	6.837	80,05
		8. Ayam Ras Pedaging	43.544	82.313	189,03
		9. Itik	2.617	3.069	117,27
		PRODUKSI SUSU (Liter)*	***147.259***		
		1. Sapi Perah	51.634	30.282	58,65
		2. Kerbau Perah	69.558	-	-
		3. Kambing PE.	26.067	-	-
		PRODUKSI TELUR (Ton)*	***104.552***		
		1. Ayam Buras	11.767	11.577	98,39
		2. Ayam Ras Petelur	81.906	134.569	164,30
		3. Itik	10.879	22.263	204,64

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. SUMSEl, 2022

Produksi daging pada tahun 2021 di targetkan sebesar 95.290 ton dan terealisasi sebesar 115.371 ton (121,07%), dari hasil realisasi yang diperoleh, produksi daging tercapai melebihi target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun capaian produksi daging sebesar 115.371 ton tersebut terdiri dari daging sapi sebesar 13.430 ton (59,44%), daging kerbau 457 ton (23,20%), daging kambing 1.318 ton (49,87%), daging domba 93 ton (9,02%), daging babi 143 ton (11,07%), daging ayam buras 7.711 ton (69,74%), daging ayam ras petelur 6.837 ton (80,05%), daging ayam ras pedaging 82.313 ton (189,03%) dan daging itik sebesar 3.069 ton (117,27%).

Untuk capaian total produksi daging ternak ini diperoleh melalui pengembangan perbibitan didaerah sentra antara lain berupa usaha penggemukan sapi potong dan SIKOMANDAN, jalinan kerjasama kemitraan dengan perusahaan unggas dan peningkatan skala usaha pemeliharaan ternak (Laporan

Perunggasan Nasional). Pencapaian produksi daging ini didukung potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memadai baik kualitas pelayanan petugas maupun kualitas peternak itu sendiri.

Produksi susu pada tahun 2021 di targetkan mencapai 104.552 liter dan terealisasi hanya mencapai 30.282 liter (20,56%). Adapun produksi susu sebanyak 30.282 liter tersebut hanya terdiri dari susu sapi perah, sedangkan susu kerbau perah dan susu kambing PE di sumatera selatan sudah tidak terdata lagi. Tidak trealisasinya Produksi Susu Kerbau Perah dan Kambing PE dikarenakan tidak adanya data susu Kerbau dan kambing dari Kabupaten/Kota, hal ini terjadi karena sedikitnya peminat atau yang mengkonsumsi susu Kerbau dan kambing PE, kebayakan hanya untuk konsumsi sendiri/rumah tangga. sehingga untuk produksi susu kerbau dan kambing tidak terdata. Penurunan Produksi Susu Sapi segar pada tahun 2021 mengakibatkan kebutuhan susu dalam provinsi tidak terpenuhi.

Produksi Telur pada tahun 2021 di targetkan 104.552 ton dan terealisasi mencapai 168.409 ton (161,08%). Adapun produksi telur sebanyak 168.409 ton tersebut terdiri dari telur ayam buras sebesar 11.577 ton (98,39%), telur ayam ras petelur 134.569 ton (164,30%) dan telur Itik sebesar 22.263 ton (204,64%).

Produksi Telur sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam provinsi. Dari hasil pengumpulan data diketahui ada peningkatan pada produksi Ayam Ras Petelur dan Itik. Dimana realisasi produksi telur Ayam Ras Petelur dan Itik melebihi target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Produksi Padi, Jagung, Kedelai

Untuk capaian produksi padi, jagung dan kedelai Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi padi, jagung dan kedelai belum mencapai target yang ditetapkan di RPJMD. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51.
Sandingan Target RPJMD Terhadap Realisasi Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2020 - 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produksi Padi	Ton	5.325.825	2.743.061	5.450.825	2.552.443*)
Produksi Jagung	Ton	1.136.025	927.757	1.164.426	951.679**)
Produksi Kedelai	Ton	15.084	1.065	15.234	392**)

*) Data Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2021
**) Data Angka Ramalan II (ARAM II) Tahun 2021

Berdasarkan Data Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja produksi padi tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan luas panen dan luas tanam. Luas panen padi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 turun seluas 59.284 Ha (10,75%), disebabkan karena adanya curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banyak petani yang tidak melakukan penanaman di IP 200 dan adanya alih fungsi tanam ke komoditi lain yaitu komoditi jagung sehingga penanaman jagung di tahun 2021 mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan target, capaian produksi padi tahun 2020 dan 2021 belum melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Tidak tercapainya target produksi tersebut dikarenakan banyak yang tidak melakukan penanaman di Indeks Pertanaman (IP) 200 karena curah hujan tinggi, adanya alih fungsi tanam ke komoditi lain seperti komoditi jagung, adanya pengurangan luas Lahan Baku Sawah (LBS), dan adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi menjadi Kerangka Sampel Area (KSA).

Terkait dengan adanya pengurangan luas lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, Dinas PUPR dalam kegiatan *Updating* Luas Baku

Lahan Sawah Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 03 September sampai dengan 15 Desember 2021 melalui rapat koordinasi pembaruan data dan informasi luas lahan baku sawah baik secara *offline* maupun via *zoom meeting*. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memvalidasi dan pemutakhiran data dan informasi luas lahan baku sawah tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penyusunan program strategis pertanian.

Melalui kegiatan updating luas lahan baku sawah tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lahan-lahan sawah existing yang belum termasuk di dalam ATR/ BPN dapat dimasukkan ke dalam luas lahan baku sawah sehingga keberadaan lahan-lahan sawah yang dimiliki oleh petani di Sumatera Selatan dapat dilindungi dan diakui keberadaannya. Berdasarkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah kabupaten/ kota, maka dari luas baku lahan sawah ATR/BPN seluas 470.602,37 menjadi seluas 593.945,33 ha. Hal ini menunjukkan bahwa terkoreksi adanya penambahan lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan seluas 69.075,29 ha pada tahun 2020 dan seluas 54.267,68 ha pada tahun 2021. Hasil penetapan lahan baku sawah tahun 2021 seluas 54.267,68 ha akan disampaikan melalui surat pengusulan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Kementerian/ Lembaga terkait (namun akan diputuskan lebih lanjut) untuk mendapatkan penetapan perubahan lahan baku sawah Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi juga sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan isntansi terkait melalui kegiatan optimalisasi peningkatan produksi dan produktivitas padi berbasis segmen Kerangka Sampel Area (KSA).

Capaian produksi jagung tahun 2021 berdasarkan ARAM II adalah 951.680 ton atau 2,58% lebih besar dari capaian Produksi Jagung Tahun 2020. Adanya peningkatan capaian produksi dikarenakan adanya peningkatan luas tanam dan luas panen di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021, banyak petani

yang lahannya beralih fungsi ke komoditi jagung sehingga terjadi peningkatan luas tanam di tahun 2021. Luas tanam ini diikuti juga dengan peningkatan luas panen.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian produksi jagung belum mencapai target. Salah satu penyebab dari rendahnya capaian itu yaitu penetapan target berdasarkan tahun dasar 2018 yang terlalu tinggi karena di tahun sebelumnya ada program/ kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung (UPSUS/ Upaya Khusus), sedangkan keadaan sebaliknya yang terjadi di tahun berikutnya. Selain itu, sebagian besar usahatani hanya mengandalkan swadaya petani jagung.

Capaian produksi kedelai tahun 2021 berdasarkan ARAM II adalah 393 ton atau jauh menurun 63,13% dibandingkan dengan Capaian Produksi Kedalai Tahun 2020. Adanya penurunan capaian produksi dikarenakan adanya penurunan luas tanam dan luas panen. Luas tanam kedelai di tahun 2021 sebesar 341 ha yang mengalami penurunan sebesar 53,17% dibandingkan dengan luas tanam kedelai di tahun 2020. Begitu juga dengan luas panen kedelai di tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar 61,63% dibandingkan dengan tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian produksi kedelai belum mencapai target. Tidak tercapainya target produksi 2021 disebabkan selain karena penetapan target yang terlalu besar, petani juga tidak bergairah untuk menanam kedelai karena benih tidak tersedia dan perlu didatangkan dari luar Sumatera Selatan, belum adanya jaminan harga, kualitas benih yang diuji coba di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah.

Terkait dengan pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dievaluasi, yaitu :

1. Masih rendahnya produktivitas padi
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian semakin berkurang
3. Luas Baku Lahan Sawah (LBS) masih belum optimal
4. Kepemilikan lahan pasang surut lebih dari 2 ha
5. Belum semua kelompok tani terdata di dalam aplikasi Simluhtan

6. Ketersediaan benih di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah
7. Serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih rendah
8. Baru Kabupaten OKU Timur dan Banyuasin yang sudah ada PERDA LP2B
9. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) belum optimal
10. Belum semua kelompok tani di dalam aplikasi Simluhtan terdata di dalam aplikasi e-RDKK

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan juga telah melakukan tindak lanjut dari program terobosan yang dilaksanakan di tahun 2021, diantaranya :

1. Dengan dukungan program/ kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 baik yang bersumber dana APBD maupun APBN, produktivitas padi Sumatera Selatan tahun 2021 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020.
2. Telah diangkatnya 1.000 orang tenaga PPEP di akhir tahun 2020 dan mulai ditempatkan di desa/ kelurahan yang menjadi wilayah binaan petugas pendamping peningkatan ekonomi pertanian (PPEP) di awal tahun 2021, dan ditambah pengangkatan kembali petugas PPEP sebanyak 400 orang di akhir tahun 2021 untuk memenuhi desa/ kelurahan yang belum ada penyuluh lapangannya sehingga dapat mewujudkan kondisi ideal 1 desa 1 penyuluh.
3. Tahun 2021 melalui SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 590/KPTS/DIS.PTPH/2021 tanggal 17September 2021 dibentuklah Tim Kelompok Kerja Pembaharuan Data dan Informasi Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2021, dengan hasil didapatkannya penambahan updating polygon sawah sebesar 54.267,68 ha di luar LS tahun 2019 dan hasil verifikasi tahun 2020 sehingga total LBS Sumatera Selatan menjadi 593.945,33 ha dan telah diusulkan kepada Kementerian ATR/ BPN agar dapat diupdate pada rilis LBS tahun 2023 yang akan datang.
4. Kebanyakan petani di daerah pasang surut mempunyai lahan usaha lebih dari 2 ha sehingga di dalam penngajuan pupuk bersubsisi hanya bisa dipenuhi untuk luasan 2 ha.

5. Berdasarkan data Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) tahun 2021 jumlah kelompok tani yang terdata sebanyak 34.789 kelompok dimana terjadi peningkatan sebanyak 1.882 kelompok dari tahun 2020. Hal ini ditujukan agar data yang ada valid karena saat sekarang semua bantuan yang dikeluarkan pemerintah harus melalui kelompok tani yang terdaftar di aplikasi Simluhtan.
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD BPSB TPH Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya kembali peningkatan ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat, yaitu dengan melakukan sosialisasi aktivasi Desa Mandiri Benih di Kabupaten Banyuasin dan OKU Selatan, serta dengan melakukan pendampingan calon penyedia E-Katalog yang saat ini dalam tahap penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian pada 3 (tiga) calon penyedia benih baru.
7. Naiknya realisasi kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian dari tahun ke tahun tidak lepas dari peran penyuluh lapangan, Petugas Dinas Pertanian Kabupaten, Petugas Dinas Pertanian Provinsi maupun petugas PPEP yang terus mensosialisasikan untuk tidak menggunakan jasa rentenir, pemerintah saat ini mencoba membantu petani untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan. Petani sudah dapat mengakses pinjaman KUR dengan aneka skemanya yang dibuat sangat ramah untuk petani di Sumatera Selatan. Untuk Sumatera Selatan KUR Pertanian dapat diakses di 4 perbankan besar yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Sumsel Babel dengan suku bungan 6 % per tahun.
8. Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari 17 kabupaten/ kota, 5 kabupaten (Banyuasin, Empat Lawang, Muaraenim, OKU Selatan dan Musi Rawas) sudah tersedia, 5 kabupaten/ kota (OKU Timur, OKI, Ogan Ilir, Musi Banyuasin dan Lubuklinggau) sedang dalam proses RTRW. Sedangkan 7 kabupaten/ kota lagi belum ada dukungan dana APBN maupun APBD (Prabumulih, Lahat, Muratara, Pali, Pagaralam, Palembang dan OKU). Secara administrasi, Dinas Pertanian TPH

Provinsi Sumatera Selatan sudah bersurat ke kabupaten/ kota untuk menetapkan LP2B.

9. Tahun 2021 telah dilakukan kolaborasi antara Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten serta Badan Pusat Statistik untuk mengevaluasi titik segmen KSA yang bukan padi dan menentukan lokasi pemindahan titik segmen KSA tersebut ke sub segmen baru yang ditanami padi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh BPS untuk Kabupaten OKU Timur, Banyuasin dan OKI.
10. Tahun 2021 telah dilakukan penambahan fitur pada aplikasi Simluhtan dimana data e-RDKK dapat terkoneksi langsung dengan data Simluhtan. Dengan adanya fitur baru ini diharapkan seluruh data petani di Simluhtan dapat langsung otomatis terdata dalam e-RDKK. Penyuluh menggerakkan kelompok tani untuk melengkapi kelengkapan dokumen dokumen yang di persyaratkan sehingga dapat terdata dalam e-RDKK

10) Urusan Pertanahan

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum salah satunya diperoleh melalui pembebasan/ganti rugi tanah. Pengadaan tanah tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terutama berkaitan dengan pengadaan tanah.

Pelaksanaan pembebasan lahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun capaian luas tanah bersertifikat di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52.
Capaian Persentase Luas tanah Bersertifikat
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2020

No	Tahun	Tanah Terdaftar		Tanah Belum Terdaftar	
		Bidang	Luas (Ha)	Bidang	Luas (Ha)
1	2012	20.472	148.097	3.750.108	3.041.872
2	2013	71.057	1.111.385	3.679.051	1.930.487
3	2014	53.150	66.640	3.657.005	1.863.846
4	2015	28.104	19.955	3.628.901	1.843.891
5	2016	20.373	623.052	3.608.528	1.220.838
6	2017	201.324	98.182	3.477.727	1.832.305
7	2018	117.789	50.153	3.359.938	1.782.152
8	2019	92.709	37.717	3.267.229	1.744.434
9	2020	53.965	29.010	3.213.264	1.715.425
Jumlah		658.943	2.184.191	31.641.751	16.975.250

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2020 (data termutakhir)
Ket. Lahan yang disertifikasi merupakan bukan kawasan hutan

Berdasarkan data diatas masih terdapat 31.641.751 bidang tanah yang belum terdaftar, dan untuk tanah yang terdaftar baru 2.184.191 bidang tananh, dapat dilihat selisih yang cukup jauh antara bidang tananh yang terdaftar dan tanah yangbelum terdaftar. Tidak hanya capaian bidang tanah yang terdaftar saja, tetapi juga masih adanya beberapa konflik lahan yang belum diselesaikan di Sumatera Selatan, 66 kasus pada 15 Kabupaten/Kota dan 2 kasus pada Provinsi Sumatera Selatan. Total keseluruhan terdapat 68 kasus yang harus diselelsaikan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Adapun keberhasilan yang diperoleh Provinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Terbaik Nasional. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Dinilai berdasarkan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yaitu Dokumen yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau

program yang ditetapkan dan diterapkan oleh Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Penghargaan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo pada saat Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Istana Bogor.

Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data yang ada pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai Pergub Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.53.
Persentase Penurunan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan (2019-2022)

Tahun	Target	Capaian
2019	4,95	4,39
2020	5,56	5,56
2021	6,18	11,61
2022	6,80	n/a

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

Dari tabel di atas terlihat bahwa walaupun capaian target sudah baik, namun nilai emisi Sumatera Selatan masih tergolong tinggi jika dikaitkan dengan revisi target penurunan nasional yang berubah dari 26% di tahun 2020 menjadi 29% di tahun 2030. Pada 4 (empat) sektor yaitu Lahan dan Gambut, Pertanian dan Perternakan, Energi dan Transportasi, serta Limbah, terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca, yang menimbulkan permasalahan baru bagi Lingkungan Hidup Sumatera Selatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 masih masuk di dalam kategori kurang yaitu berkisar antara 61,62 sampai dengan 69,7.

Gambar 2.78.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2021

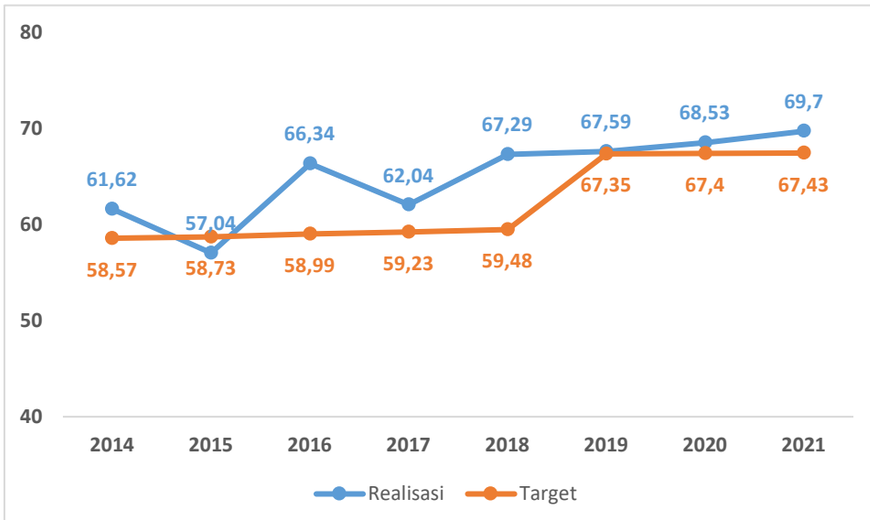

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Indeks kualitas udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx).

Indeks kualitas air (IKA) adalah perhitungan status mutu dengan metode Indeks Pencemararan, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), hutan merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Titik kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 mengalami pengurangan dari tahun 2020, yang semula sebesar 4.048 pada tahun 2020 menjadi 2.794 titik kebakaran (hotspot) di tahun 2021. Namun untuk luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 meningkat menjadi 683.336,25 Ha pada tahun sebelumnya hanya 94.633 Ha..

Tabel 2.54.

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan serta jumlah hotspot di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021

NO	Kabupaten	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)
1	Ogan Komering Ilir	4.229	195.419	16.008	377.333	151	213,31	201	1.639	726	19.408	8426	233.586	469	53.103	400	15
2	Banyuasin	436	19.050	1.626	141.126	52	82,95	110	826	199	5.812	1505	67.277	319	18.377	196	48.601
3	Musi Banyuasin	618	5.579	5.288	108.281	107	419,85	78	360	162	1.646	3035	na	417	9.353	365	11
4	Musi Rawas	478	24.346	673	37.666	139	156,5	117	123	134	1.776	608	11.021	511	3.772	286	na
5	Muara Enim	606	21.842	939	30.292	55	7	112	2.430	139	4.404	480	8.561	524	3.519	153	na
6	Musi Rawas Utara	na	na	602	14.501	102	47	99	na	61	192	795	60.561	301	2.394	163	na
7	Ogan Ilir	153	17.272	226	12.297	22	43,65	71	2.614	87	3.577	647	14.359	152	2.107	110	458.338,25
8	Penukal Abab Lematang Ilir	na	2.350	234	5.904	62	2,1	79	264	25	289	400	3.790	262	1.241	225	4,75
9	OKU Timur	57	5.224	301	3.991	16	na	59	883	51	79	388	12.035	87	626	114	153,34
10	Lahat	126	8.656	243	2.789	39	6	42	na	42	na	169	50	235	140	291	na
11	Ogan Komering Ulu/OKU	218	4.061	412	1.088	65	na	99	57	102	na	180	na	221	na	165	2

NO	Kabupaten	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)	hot spot	Luas (Ha)
12	Empat Lawang	81		119	914	27	na	44	na	67	na	212	31	222	na	92	na
13	Palembang	5	37	13	380	4	na	5	77	9	178	26	401	25	na	4	na
14	OKU Selatan	183	475	313	na	52	na	64	na	81	na	149	198	247	na	196	0,25
15	Pagaralam	12	na	8	na	2	na	2	na	4	na	16	na	11	na	6	na
16	Lubuk Linggau	7	na	18	na	7	na	15	na	2	na	14	na	21	na	18	na
17	Prabumulih	25	na	20	na	8	na	9	12	4	na	12	na	24	na	10	na
	Total	7.234	304.311	27.043	736.562	910	978,36	1.206	9.285	1.895	37.362	17.062	428.356	4.048	94.633	2.794	683.336,25

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2022

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan juga menjadi wewenang provinsi.

Sampai dengan 31 Desember 2021. Jumlah penduduk provinsi Sumatera Selatan sebanyak 8.565.814 jiwa dan yang sudah wajib KTP sebanyak 6.096.614 jiwa dan yang sudah berhasil memperoleh cetak KTPl sebanyak 5.740.763 atau 94,16% .

Di tingkat Kabupaten dan Kota, perekaman KTP yang sudah mencapai lebih dari 100 persen adalah Kabupaten Musi Rawas sebesar 105,5% dan Kota Prabumulih sebesar 104,25%. Sementara ada 2 kabupaten yang paling rendah pencapaian perekaman e-KTP-nya adalah Kabupaten Banyuasin sebesar 69,28% dan Kabupaten Empat Lawang 88,87%.

Kendala pencapaian perekaman dan cetak KTP di antaranya jaringan listrik, alat rekam yang rusak, Sarana dan prasarana terbatas, lokasi jauh dari jangkauan dan masih banyaknya masyarakat yang melakukan perekaman ganda dan serta masih banyaknya Blanko KTP yang rusak.

Tabel 2.55.

Cakupan KTP-El Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan

Per 31 Desember 2021

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk	JML Wajib KTP	Sudah Cetak	
					Jumlah	%
1	1601	OGAN KOMERING ULU	372.272	260.721	258.636	99,2
2	1602	OGAN KOMERING ILIR	740.346	513.115	510.983	99,58
3	1603	MUARA ENIM	615.720	425.598	423.951	99,61
4	1604	LAHAT	435.419	325.733	299.440	91,92
5	1605	MUSI RAWAS	410.210	290.200	306.173	105,5
6	1606	MUSI BANYUASIN	651.861	452.938	450.718	99,50
7	1607	BANYUASIN	824.551	574.647	398.167	69,28
8	1608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	655.703	479.412	447.203	93,28
9	1609	OGAN KOMERING ULU SELATAN	417.424	306.422	289.181	94,37
10	1610	OGAN ILIR	428.108	299.147	270.007	90.25
11	1611	EMPAT LAWANG	335.024	261.464	232.365	88,87
12	1612	PALI	200.855	134.660	133.455	99,1
13	1613	MUSI RAWAS UTARA	194.799	136.760	132.426	96,83
14	1671	PALEMBANG	1.704.538	1.226.254	1.181.479	96,34
15	1672	PAGAR ALAM	147.640	105.686	102.898	97,36
16	1673	LUBUKLINGGAU	232.739	164.079	157.954	96,26
17	1674	PRABUMULIH	198.605	139.778	145.727	104,25
		PROVINSI SUMATERA SELATAN	8.565.814	6.096.614	5.740.763	94,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel, 2022

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Saat ini di Sumatera Selatan, masih terdapat desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Berdasarkan Permendes & PDT Nomor 2 Tahun 2016, total desa dengan kategori tersebut mencapai 865 desa tertinggal dan 30 desa sangat tertinggal. Penetapan kategori serta jumlah desa berdasarkan statusnya dirilis oleh Kemendes PDT melalui "Indeks Desa Membangun" (IDM).

Indeks Desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Masing-masing indeks tersebut terdiri dari beberapa dimensi yang terdiri dari banyak indikator.

IDM mengklasifikasikan desa menjadi 5 status desa, yaitu :

- Desa Mandiri
- Desa Maju
- Desa Berkembang
- Desa Tertinggal
- Desa Sangat Tertinggal

Tabel 2.56.

Kategori Desa di Sumatera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Kategori					
				Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Tanpa Keterangan
1	Ogan Komering Ulu	12	143	1	48	81	12	1	
2	Ogan Komering Ilir	18	314		6	271	36	1	
3	Muara Enim	20	245			208	36	1	
4	Lahat	22	360	2	78	268	10	2	
5	Musi Rawas	14	186		1	137	48		
6	Musi Banyuasin	14	227		24	135	57	8	
7	Banyuasin	19	288		43	205	39	1	
8	OKU Selatan	19	252	4	79	152	17		
9	OKU Timur	20	305		6	249	49	1	
10	Ogan Ilir	16	227		26	190	11		
11	Empat Lawang	10	147		23	121	3		
12	Pali	5	65		17	46	2		
13	Muratara	7	82		6	68	8		
15	Kota Prabumulih	4	12			12			
Total		**200**	**2.853**	**7**	**357**	**2.143**	**328**	**15**	

Sumber : Indeks Desa Membangun Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari total jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 2.853 desa, sekitar 12,75% nya atau 364 desa masih merupakan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Jumlah tersebut sudah sangat berkurang dibandingkan dengan Indeks Desa Membangun Tahun 2020, meskipun demikian tetap diharapkan ada intervensi dari Pemerintah Daerah berupa Program/Kegiatan yang diharapkan dapat terus mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal atau meningkatkan statusnya menjadi desa maju dan mandiri.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mempunyai 4 (empat) ruang lingkup yang salah satunya adalah perlombaan desa dan kelurahan. Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan regional.

Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan mempunyai 2 (dua) rangkaian kegiatan pokok yaitu penilaian dan temu karya nasional. Penilaian perlombaan desa dan kelurahan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi beberapa aspek yaitu pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan dengan membandingkan data atau kondisi desa atau kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir, data profil Desa dan kelurahan serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau dokumen perencanaan kelurahan.

Sebagai bentuk motivasi, para juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional dan provinsi akan diundang pada acara temu karya nasional di ibukota negara dan diberikan penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat atas prestasi yang telah diraih.

Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan di tingkat provinsi dilaksanakan untuk menyaring desa dan kelurahan terbaik di setiap Kabupaten / Kota, pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan setiap tahun dan telah mendapatkan peringkat di tingkat regional (nasional) selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Di Tahun 2016 mendapatkan peringkat

2 (dua) untuk kategori desa perwakilan dari Kabupaten Musi Rawas dan kelurahan diwakili oleh kota Palembang, di tahun 2017 provinsi Sumatera Selatan mendapatkan juara tingkat II Tingkat Regional I untuk Kategori Kelurahan yang diwakili oleh Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan untuk Kategori Desa masuk nominasi 5 (lima) besar tingkat Regional I, untuk tahun 2018 hanya diadakan pekan inovasi desa dan kelurahan yang tergabung bersama kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna ke XX Tahun 2018 di Bali, namun juara desa dan kelurahan tingkat Provinsi tetap mendapatkan penghargaan berupa plakat, piagam dan trophy dari Kementerian Dalam Negeri. Juara Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2018 adalah Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Seletan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan atau Dinas Keluarga Berencana Kabupaten/Kota.

Gambar 2.79.
Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS)

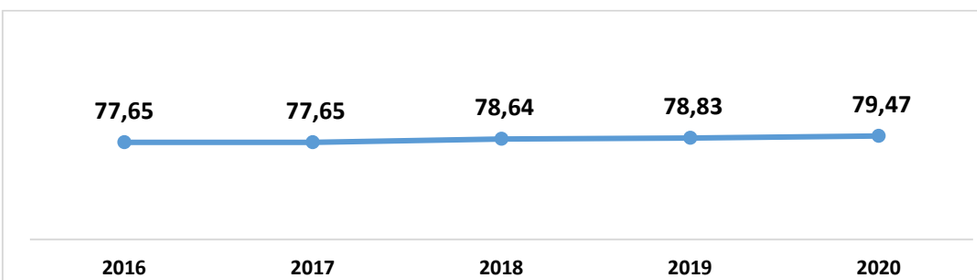

Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (data termutakhir)

Selama beberapa tahun terakhir angka pemakaian kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terus meningkat. Capaian pemakaian kontrasepsi bagi PUS tahun 2016 sebesar 77,65%, angka tersebut mengalami peningkatan walaupun capaian tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 yaitu 77,65%. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga Tahun 2020 terus meningkat berturut-turut menjadi 78,64% tahun 2018, sebesar 78,83% Tahun 2019 dan 79,47% di Tahun 2020.

Gambar 2.80.
Total Fertility Rate (TFR)

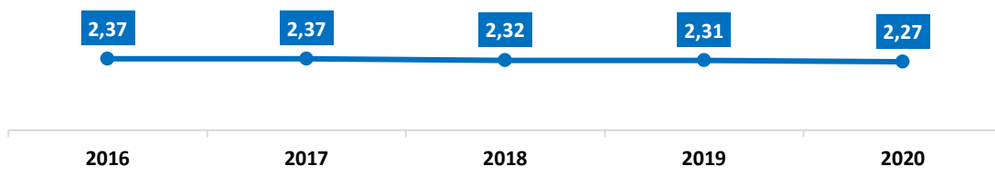

Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (data termutakhir)

Capaian Total angka kelahiran (*Total Fertility Rate*/TFR) selama lima tahun terakhir (Tahun 2016-2020) secara umum mengalami tren penurunan. Tahun 2016 sebesar 2,37% terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 2,27%.

Tabel 2.57.
Unmet Need KB di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (org)	Unmet Need KB(%)
1	2016	1.650.420	194.402	11,78
2	2017	1.685.705	202.742	12,03
3	2018	1.726.165	192.363	11,14
4	2019	1.778.618	197.893	11,13
5	2020	1.788.136	225.305	12,6
6	2021	1.740.923	n/a	n/a

Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan,2021

Perkembangan unmet need KB dari tahun 2016-2021 secara umum mengalami tren naik turun, untuk tahun 2016 dari jumlah orang yang mengalamai Unmet Need sebesar 11,78% (194.402 orang) dari Jumlah PUS 1.650.420. Pada tahun 2017 dari Jumlah PUS sebesar 1.685.705 orang mengalami unmet need sebesar 12,03% (202.742 orang). Pada tahun 2018 terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, Jumlah PUS 1.726.165 orang sehingga persentase unmet neednya 11.14% (192.363 orang), pada tahun 2019 menurun menjadi 11,13% (197.893 orang) dari Jumlah PUS yang terdata 1.778.618 orang dan tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,6% dari jumlah PUS sebanyak 1.788.136 orang dengan 225.305 orang yang mengalami unmet need.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmet need KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmet need KB nya tinggi, optimaliasasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitas pelaksanaan kampung KB.

15) Urusan Perhubungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong terciptanya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau melalui penyediaan fasilitas keamanan transportasi, tersedianya moda yang cukup dan ramah lingkungan serta penerapan aturan keselamatan transportasi bagi semua pengguna dan penyedia jasa transportasi dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Perilaku sebagian besar pemakai jalan di yang masih kurang memperdulikan keselamatan diri sendiri dan pemakai jalan lainnya harus ditingkatkan, budaya dan disiplin pengguna jalan dari sebagiaan pengemudi kendaraan belum berjalan baik. Ditambah lagi dengan masih adanya sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan, serta masih belum optimalnya keberfungsian jalan khusus angkutan tambang batu bara.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan maka masalah keselamatan transportasi jalan harus mendapat perhatian serius dan mendapat prioritas dalam pembangunan ataupun pengembangan sektor transportasi.

Transportasi Darat

Prasarana pendukung yang saat ini telah dimiliki oleh Sumatera Selatan adalah **36 terminal** angkutan umum yang terdiri dari terminal tipe A sebanyak 8 terminal atau sebesar **22,2 persen**, tipe B sebanyak 7 terminal atau sebesar **19,4 persen** dan tipe C sebanyak **21 terminal** atau sebesar 57,57 persen. Semakin banyak angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi dan angkutan antar provinsi yang beplat hitam (travel) berdampak terhadap semakin berkurangnya angkutan umum (berplat kuning) pada jurusan yang

sama dan pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkurangnya angkutan umum yang masuk ke terminal.

Tabel 2.58.
Data Terminal di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
1	Palembang	1. Karya Jaya	A		
		2. Alang-Alang Lebar	A		
		3. Plaju			C
		4. Jakabaring		B	
		5. Tangga Buntung			C
		6. Lemabang			C
		7. Sako			C
2	Prabumulih	1. Prabumulih			C
		2. Kota Prabumulih			C
3	Pagaralam	1. Nendagung			C
		2. Pagar Gading			C
4	Lubuk Linggau	1. Petanang		B	
		2. Muara			C
		3. Kalimantan			C
		4. Watas			C
		5. Satelit			C
5	Banyuasin	1. Betung	A		
6	Musi Banyuasin	1. Randik		B	
7	Ogan Ilir	1. Km 32 Indralaya		B	
8	Ogan Komering Ilir	1. Kayu Agung	A		
		2. Tanjung Raja			C
		3. Tulung Selapan			C
9	Ogan Komering Ulu	1. Baturaja	A		
10	OKU Timur	1. Kota Baru		B	
		2. Lubuk Harjo		B	
11	OKU Selatan	1. Muara Dua		B	
12	Muara Enim	1. Muara Enim	A		
		2. Simpang Kodim			C
		3. Bantingan			C
		4. Talang Ubi			C
13	Musi Rawas	1. Simpang Periuk	A		
		2. Lakitan			C
		3. Trawas			C
14	Lahat	1. Batay	A		
		2. Muara Siban			C
		3. Lembayung			C
15	Empat Lawang	-	-	-	-
16	PALI	-	-	-	-
17	Muratara	-	-	-	-
	Jumlah		8	7	21

Sumber: Statistik Dishub Sumsel, 2022 (data termutakhir)

Pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Di Sumatera Selatan jalur kereta api yang dimiliki adalah untuk rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau.

Dari 675,95 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagian Selatan sebagian besar (89%) merupakan *single track* dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur *double track*. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel 2.59.
Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (Km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Tanjung Karang	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuk Linggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
Total		675,95	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2022 (data mutakhir)

Tabel 2.60.
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	BARANG (TON)	26,956,638	10,276,778	12,761,827	14,934,008	18,678,576
2	PENUMPANG (ORANG)	1,928,654	1,097,656	918,429	302,896	185,193

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2022

Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan merupakan salah satu angkutan massal yang ada di Kota Palembang dan menjadi LRT Pertama yang ada di Indonesia. Manfaat dari LRT bagi Kota Palembang adalah peningkatan mutu pelayanan trasnportasi perkotaan Palembang melalui percepatan waktu tempuh, mengurai kemacetan, serta peningkatan keselamatan transportasi; mensukseskan pergelaran ASIAN Games 2018; gambaran peningkatan kelas dan wajah Kota Palembang; moda transportasi ramah lingkungan; dan menjadi potensi ekonomi untuk menarik kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Dalam hal ketersediaan stasiun, LRT Kota Palembang dengan jalurnya sepanjang 23,4 km terdapat 13 stasiun, yakni stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. Untuk Tarifnya, dapat dikatakan relatif murah dan cukup terjangkau, di mana untuk jarak jauh (dari Bandara SMB II ke Jakabaring) dikenakan sebesar Rp. 10.000,-, sedangkan untuk jarak dekat dikenakan sebesar Rp. 5.000,-. Sejak diremikan oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juli 2018 dan mulai operasional pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia, jumlah angkutan penumpang LRT dari bulan Juli hingga September 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 246.134 penumpang pada bulan Juli ke Agustus dari 16.182 menjadi 262.316 penumpang, namun dari bulan Agustus ke September mengalami penurunan sebanyak 86.097 penumpang menjadi 176.219 penumpang. Hal ini dipengaruhi adanya event olahraga internasional ASIAN Games 2018 pada pertengahan Agustus hingga awal September dan belum sepenuhnya stasiun beroperasi, sedangkan mulai dari bulan Oktober seluruh stasiun sejumlah 13 stasiun sudah beroperasi.

Tabel 2.61.
Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

NO.	STASIUN LRT	PENUMPANG		
		2019	2020	2021
1	Januari	146.954	313.502	102.219
2	Februari	109.053	243.181	91.648
3	Maret	153.979	160.475	117.297
4	April	194.345	14.759	112.398
5	Mei	150.941	12.586	147.850
6	Juni	322.628	21.924	159.542
7	Juli	277.801	31.470	102.550
8	Agustus	220.526	48.483	89.951
9	September	211.105	39.673	125.082
10	Oktober	225.546	46.806	178.417
11	November	244.722	52.462	173.679
12	Desember	361.559	68.171	197.598
	TOTAL	2.619.159	1.053.492	1.540.379

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2022

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam menjaga keberlangsungan Operasional LRT bagi peningkatan pelayanan angkutan umum berbasis massa ke masyarakat yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau dilakukan dengan strategi pengembangan LRT Sumatera Selatan dengan mengupayakan agar masyarakat kota Palembang mau beralih ke moda transportasi massal berbasis rel serta mengurangi beban subsidi APBN antara lain sebagai berikut:

1. Pengintegrasian layanan LRT dengan Damri dan *Bus Rapid Transit* (Trans Musi) dan angkutan Sungai (intermoda) menjadi satu jaringan layanan transportasi terpadu dimana LRT sebagai jaringan *backbone*nya yang akan di *supply* jaringan Transmusi dan Damri dari dan ke stasiun LRT melalui pengembangan integrasi moda *feeder* LRT.
2. Mengembangkan *Transit Oriented Development* (TOD) di beberapa stasiun LRT untuk menaikan kinerja *performance* pendapatan operator dan meningkatkan *load factor* penumpang.
3. Mengembangkan park and ride di beberapa stasiun LRT serta mengembangan skybridge sebagai transit joint development
4. Menciptakan *public policy* dengan *stated preference* agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum massal antara lain kebijakan pengaturan kendaraan genap ganjil, kawasan *three in one*.
5. Meningkatkan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat melalui media massa, penyebaran dan pecetakan spanduk, pamplet, leaflet untuk menggunakan fasilitas LRT.
6. Membuat Surat edaran atau peraturan gubenur untuk ASN satu hari dalam satu minggu untuk menggunakan angkutan umum.
7. Sejak tanggal 9 Januari 2019 telah terbentuk Balai Pengelola Kerata Api Ringan Sumatera Selatan. dibawah Kemenhub untuk pengelolaan sarana/aset LRT sehingga memberikan hasil seperti *Advertising*, *Transit Joint Development* dan rencana TOD untuk mengurangi subsidi operasional kedepan, di mana sata ini operasional dilakukan oleh PT. KAI.

Terkait dengan penganggaran, maka anggaran subsidi masih melalui APBN karena aset masih tercatat di Pemerintah Pusat, sehingga strategi penganggaran operasional LRT, yakni perlu adanya subsidi

karena masih perintis (UU 23 tahun 2007) dan Hak pengusahaan prasarana LRT melalui pengembangan TOD sebagai pendapatan *non fare box* diluar tiket penumpang seperti pendapatan *advertising*.

Transportasi Air

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke alur sungai terdapat 8 kabupaten, 62 ke camatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 persen dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.

Gambar 2.81.
Angkutan Sungai di Sungai Musi

Tabel 2.62.
Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	1	10
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komering	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing Jaya	4	29
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi Banyuasin	Bayung Lencir, Lalan	2	16
7	Lematang	Muara Enim	Abab, Rambang Dangku, Sungai Rotan, Tanah Abang, Muara Belida	5	23
8	Lilin	Banyuasin Musi	Tungkal Ilir Sungai Lilin	1 1	2 1

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
		Banyuasin			
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Mesuji	OKI	Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal	3	9
11	Musi	Banyuasin	Banyuasin I, Rantau Bayur	2	24
		Muara Enim	Penukal Utara	1	1
		Musi Banyuasin	Sanga Desa	1	3
		Palembang	Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I	4	10
12	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	12	65
13	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas	5	34
14	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
15	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
16	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27
	Total			**62**	**355**

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2022 (data mutakhir)

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar yaitu 87 persen, dermaga-dermaga sungai tersebut dalam kondisi baik, 3 persen dalam kondisi rusak dan sisanya 10 persen tidak diketahui kondisinya.

Tabel 2.63.
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1995
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2014
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1998
11	Rumah Buruk	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000
12	Pasar Kuto	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010
13	1 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000
14	Tangga Takat	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000
15	13 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000
16	Padatuan	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000
17	Padatuan 7 Ulu (a)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2009
18	Padatuan 7 Ulu (b)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2011
19	5 Ulu	S. Musi, Palembang	Beton	Baik	2012
20	4 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010
21	Sei Buaya	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008
22	Pegayut	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008
23	Ki Merogan	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	2000
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2008
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010
31	Masjid Jamik	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2009
33	Pemulutan(Pos Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	Kayu	Sedang	1990
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990
37	Lebong Hitam	S. Lebong Hitam, OKI	Ponton	Baik	1990
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komering, OKI	Beton	Baik	2007
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
49	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006
50	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005
59	Sembilang	S. Sembilang, Banyuasin	Ponton	Baik	2003/2004
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	1998
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	1998
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	Beton	Baik	1990
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009
69	Babat	S. Musi, Muba	Ponton	Baik	2004
70	Telang	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2004
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	Ponton	Baik	2000
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	Ponton	Baik	2001
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995
75	Simpang	S. Komering, OKU	Ponton	Baik	2000
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja,Lantai Kayu	Rusak	1994
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2008
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2011
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2000
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	Beton	Baik	2000
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	Beton	Baik	1998
86	Muara Enim	S.Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2000
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	Beton	Baik	2000
88	Gunung Megang	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2008
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	Beton	Baik	2011

Sumber : Statistik Dishubkominfo, 2022 (data mutakhir)

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari

sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melaui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi ke ambang luar relatif jauh ± 108 km (60 mil) yang menyebabkan tingginya biaya operasional kapal yang akan berlabuh.

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan. Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik. Dermaga Penyeberangan TAA menuju Bangka sudah beroperasi dengan jumlah penumpang terangkut di tahun 2017 sebanyak 114.684 orang penumpang dan kendaraan yang diangkut 73.107 unit. Realisasi angkutan penumpang tahun 2017 meningkat mencapai 127,43% dari rencana.

Tabel 2.64.
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - api

NO	URAIAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	JUMLAH TRIP	2,917	4,773	3,721	4,543	5,171
	BERANGKAT	1,469	2,281	1,203	2,269	2,615
	TIBA	1,448	2,492	2,518	2,274	2,556
2	JUMLAH PENUMPANG	100,431	152,459	99,189	287,969	67,525
	BERANGKAT	57,223	83,849	30,198	135,279	34,465
	TIBA	43,208	68,610	68,991	152,690	33,060
3	JUMLAH KENDARAAN	74,387	134,628	127,785	108,006	136,071
	BERANGKAT	40,935	62,765	54,616	55,364	70,465
	TIBA	33,452	71,863	73,169	52,642	65,606

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2022

Tabel 2.65.
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Gol II (Sepeda Motor)	21,437	36,480	27,066	17,881	14,849
	- Keberangkatan	11,887	17,710	8,049	7,389	7,905
	- Kedatangan	9,550	18,770	19,017	10,492	6,944
2	Gol IV (M.bus, Jeep dan sejenisnya)	25,916	50,671	46,213	36,605	45,781
	- Keberangkatan	14,198	22,394	17,708	18,139	24,965
	- Kedatangan	11,718	28,277	28,505	18,466	20,816
3	Gol V (truck, bus dan sejenisnya)	32,788	40,398	46,864	53,311	64,060
	- Keberangkatan	13,158	19,256	25,248	26,340	34,081
	- Kedatangan	11,282	21,142	21,616	26,971	29,979
4	Gol VI (truck Fuso)	2,328	4,463	5,889	5,725	9,401
	- Keberangkatan	1,532	2,829	3,038	2,999	5,209
	- Kedatangan	796	2,775	2,851	2,726	4,192
5	Gol VII (truck tronton)	159	1,019	1,024	706	1,437
	- Keberangkatan	96	478	458	403	700
	- Kedatangan	63	541	566	303	737

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2022

Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Darmaga Laut Regional Tanjung Api-Api ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Pada tahun 2019 darmaga tersebut sudah diresmikan dan mulai beroperasi sebagai pelabuhan Pengumpul, Kementerian Perhubungan menunjuk PT. Pelindo dan KSOP untuk mengelolanya.

Gambar 2.82.
Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Transportasi Udara

Angkutan udara di Sumatera Selatan terus dikembangkan dan direvitalisasi. Total 8 bandar udara yang ada hanya 3 yang beroperasi yaitu SMB II Palembang, Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaralam, sedangkan 5 bandara lainnya (bandara perintis) saat ini belum beroperasional. Direncanakan tahun 2018 mulai dilakukan revitalisasi Bandara OKU Selatan setelah penyerahan aset bandara dan selesainya perencanaan oleh Pemda OKU Selatan ke Kementerian Perhubungan. Selanjutnya akan dibangun oleh Pemerintah Pusat. Satu-satunya bandara terbesar di Sumatera Selatan adalah Bandara SMB II. Sepanjang tahun 2018 lalu Bandara SMB II Palembang telah berhasil memfasilitasi 5.126.443 orang penumpang datang atau berangkat mengunakan pesawat udara, baik rute domestik maupun internasional. Tren kenaikan keberangkatan penumpang domestik mengunakan fasilitas Bandara SMB I tahun 2013 s.d. 2018 rata-rata diatas 10% /tahun, dan meningkat terus tahun 2018 karena adanya Asian Games 2018.

Tabel 2.66.
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara SMB II Palembang

Datang/ berangkat	Trayek angkutan	Kondisi yang ada	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
BERANGKAT	Domestik	Pesawat	20,051	21,828	17,788	8,895	6,634
		Penumpang	2,238,545	2,426,360	1,832,673	697,787	529,255
	Internasional	Pesawat	757	956	859	0	30
		Penumpang	85,829	119,326	129,764	0	1,296
DATANG	Domestik	Pesawat	20,185	21,834	17,758	8,775	6,604
		Penumpang	2,181,212	2,471,844	1,876,797	735,522	520,403
	Internasional	Pesawat	762	942	860	0	30
		Penumpang	82,916	108,913	126,888	0	671
TOTAL		Pesawat	41,755	45,560	37,265	17,670	13,238
		Penumpang	4,588,502	5,126,443	3,966,122	1,433,309	1,967

Sumber: PT. Angkasa Pura II Palembang, 2022

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka upaya mendorong percepatan Penyelenggaraan Sumsel Smart Province, maka di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2017, dan Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh prestasi dalam bidang pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang didukung lapisan Masyarakat dari *Smart Nation*, Sebagai : "*Smart Society Smart Province*".

Gambar 2.83.
Penghargaan Smart Society Smart Province

Pada tahun 2021 Pengendalian Infrastruktur TIK dioptimalkan melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, monitoring dan pengendalian bandwith dan jaringan yang dilakukan pada masing-masing OPD yang telah tekoneksi dengan VPN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan total *bandwith* internet sebesar 600 Mbps.

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian di Tahun 2021 menerima penghargaan tingkat Nasional Top Digital Award tahun 2021 yang diraih Gubernur Sumsel H. Herman Deru adalah untuk kategori Top Leader on Digital Implementation 2021. Dan juga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) juga meraih penghargaan kategori Top Digital Implementation 2021 on Province Government dari It Works. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Penyelenggara Top Digital Awards 2021 sekaligus CEO PT Madani Solusi Internasional (Madani Group) dan Pemimpin Redaksi Majalah It Works.

Gambar 2.84.
Penghargaan tingkat Nasional Top Digital Awarddan kategori Top Digital Implementation 2021 on Province Government Tahun 2021

Kegiatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 676/Diskominfo/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Selatan

Dalam pelaksanaan penilaian SPBE yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan telah mendapat nilai indeks SPBE : **2,62** dalam Predikat **Baik** pada tahun 2021 dan diharapkan menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Gambar 2.85.
Nilai Indeks SPBE Sumatera Selatan

INDEKS SPBE – PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN **2,62** (Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

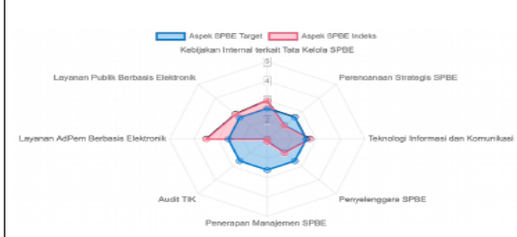

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,62
Domain Kebijakan SPBE	3,00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,30
Perencanaan Strategis SPBE	2,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,24
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83

Sumber : monev.spbe.go.id

Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang ada di OPD sangat diperlukan terutama dalam koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi

dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang Pengelolaa Informasi Publik melalui Komisi Informasi mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah dengan predikat Cukup Informatif. Penganugerahan diberikan Komisi Informasi Pusat dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada 348 Badan Publik di Indonesia.

Gambar 2.86.
Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021

Tabel 2.67.
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Sudah Ada PPID

No	Nama Instansi /PD	NOMOR SK PPID	Tanggal
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	267/KPTS/DPP-PA/2020	3 Agustus 2020
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	194/KPTS/DISPORA/2020	3 Februari 2020
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daera	106/KPTS/BAPPEDA/2019	26 Februari 2019
4	Dinas Kesehatan	840/Kes/III/2019	25 Februari 2019
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	037/KPTS/DLHP/B.I/2019	19 Februari 2019
6	Badan Kepegawaian Daerah	753/KPTS/BKD.SEKR/2019	1 Maret 2019
7	Dinas Perdagangan	005/KPTS/DISDAG/SET.1/I/2019	4 Februari 2019
8	Badan Ketahanan Pangan	800SK/BAN.KETPANG.368/I/2016	1 Maret 2016
9	Biro Kesejahtraan Rakyat	118/KPTS/KESRA/VI/2016	Maret 2016

No	Nama Instansi /PD	NOMOR SK PPID	Tanggal
10	Biro Otonomi dan Kerjasama	157/TU.II/2016	8 Agustus 2016
11	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	353/KPTS/III/2016	19 Januari 2016
12	Biro Administrasi Pembangunan Setda	0568/KPTS/P.PPID/TU/V/03 /2016	23 Maret 2016
13	Biro Pemerintah Setda	01/KPTS/PUM/2016	Maret 2016
14	Biro Perekonomian Setda	480/703/IV/2016	8 Agustus 2016
15	Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah	079/KPTS/IX/2016	8 Agustus 2016
16	Satuan Polisi Pamong Praja	1206/KPTS/SAT.POL.PP/201 6	
17	Rumah Sakit Ernaldi Bahar	800/1724/RS.ERBA/2016	Maret 2016
18	Komisi Penyiaran Indonesia	800/177/KPTS/SKPID-SS/2016	12 Agustus 2016
19	DPRD	112/KPTS/SETWAN/2016	28 Maret 2016
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	061/521/BAN.KBP/2016	1 Agustus 2016
21	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1109/BANDIKLAT/2016	29 Juni 2016
22	Badan Lingkungan Hidup	51/KPTS/Ban.LH/2016	27 Juli 2016
23	Badan Perpustakaan	814/67/BANPUSTAKA/VIII.2 016	1 Agustus 2016
24	Badan Kepegawaian Daerah	1632/KPTS/BKD.SEKR/2016	11 Agustus 2016
25	Badan Arsip Daerah	16/KPTS/BAN.ARDA/2016	20 Juli 2016
26	Badan Pendapatan Daerah	064/KPTS/BAPENDA/2020	24 Agustus 2020
27	Dinas Perkebunan	10/KPTS/800/2020	6 Februari 2020
28	Dinas Kehutanan	501/KPTS/VII/HUT/2016	25 Juli 2016
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1596/SK/NAKERTRANS/202 0	20 Juli 2020
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	481/KPTS/DISKOMINFO/202 0	27 Agustus 2020
31	Dinas Peternakan	524.1/64/KPTS/Sekret.Disna k/ 2016	26 Februari 2016
32	Dinas Pendidikan	067/1786/Set.1/Disdik.SS/2 016	Agustus 2016
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24/DISKOP.UKM/2016	26 Juli 2016
34	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	201/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/ 2016	11 Maret 2016
35	Dinas Pertambangan dan Energi	02.9/KPTS/DISPERTAMBEN/ 2016	20 Januari 2016

No	Nama Instansi /PD	NOMOR SK PPID	Tanggal
36	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal	010/SK/BP3MD/2016	8 Agustus 2016
37	Inspektorat	001/INSPEKTORAT/2015	5 Januari 2015
38	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi	04/KPTS/BALITBANGNOVDA. SEKR/2015	3 Januari 2015
39	Dinas Sosial	050/76/SK/I-1/2020	20 Juli 2020

Sumber : Diskominfo Prov.Sumsel

Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 39 Instansi unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk unit PPID.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Data perkembangan koperasi di Sumatera Selatan dari tahun 2014 sampai 2021 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah koperasi yang ada di Sumatera Selatan sebanyak 6.420 unit dengan jumlah anggota sebanyak 229.953 orang, simpanan Rp.1.971.585.087.348, volume usaha Rp.1.688.771.364.085, dan SHU sebesar Rp.14.570.982.081. Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif menjadi 3.846 atau tidak mencapai target RPJMD di karenakan adanya reformasi total sehingga kab/kota membentuk tim penyelesaian untuk membubarkan koperasi yang tidak aktif.

Tabel. 2.68.
Perkembangan Koperasi di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
Tahun 2014 – 2021

Kabupaten /Kota	Uraian	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Palembang	Jumlah Koperasi	Unit	1.054	1.073	1.080	1.080	1.080	1.049	1078	1,102
	Koperasi Aktif	Unit	798	812	819	819	819	623	656	682
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	256	261	261	261	261	426	422	420
Banyuasin	Jumlah Koperasi	Unit	363	363	363	415	415	433	445	480
	Koperasi Aktif	Unit	261	242	242	294	294	316	328	129
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	102	121	121	121	121	117	117	351

Kabupaten /Kota	Uraian	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Musi Banyuasin	Jumlah Koperasi	Unit	271	277	277	277	277	310	313	359
	Koperasi Aktif	Unit	259	265	265	265	265	299	302	348
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	12	12	12	12	12	11	11	11
Lubuk Linggau	Jumlah Koperasi	Unit	193	205	205	205	205	208	208	219
	Koperasi Aktif	Unit	116	102	102	102	102	109	109	122
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	77	103	103	103	103	99	99	97
Musi Rawas	Jumlah Koperasi	Unit	786	730	730	730	730	662	667	691
	Koperasi Aktif	Unit	636	599	559	599	599	516	521	545
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	150	131	121	131	131	146	146	146
Prabumulih	Jumlah Koperasi	Unit	155	168	168	168	168	132	132	146
	Koperasi Aktif	Unit	117	85	85	85	85	102	102	116
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	38	83	83	83	83	30	30	30
Muara Enim	Jumlah Koperasi	Unit	482	482	482	479	492	476	482	493
	Koperasi Aktif	Unit	299	319	331	315	333	281	287	298
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	183	163	151	164	159	195	195	195
Ogan Komering Ilir	Jumlah Koperasi	Unit	340	399	399	399	399	498	506	534
	Koperasi Aktif	Unit	269	267	267	267	267	411	420	449
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	71	132	132	132	132	87	86	85
Ogan Ilir	Jumlah Koperasi	Unit	198	204	204	204	217	227	227	184
	Koperasi Aktif	Unit	116	166	166	166	199	125	125	130
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	82	38	38	38	18	102	102	54
Ogan Komering Ulu	Jumlah Koperasi	Unit	362	371	371	377	377	377	382	392
	Koperasi Aktif	Unit	260	269	269	269	269	275	280	290
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	102	102	102	108	108	102	102	102
OKU Timur	Jumlah Koperasi	Unit	401	421	421	421	421	446	453	474
	Koperasi Aktif	Unit	259	402	402	402	402	167	174	197
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	142	19	19	19	19	279	279	277
OKU Selatan	Jumlah Koperasi	Unit	211	216	216	216	216	234	235	244
	Koperasi Aktif	Unit	171	129	129	129	129	42	38	47
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	40	87	87	87	87	192	197	197
Empat Lawang	Jumlah Koperasi	Unit	133	160	160	187	187	170	177	201
	Koperasi Aktif	Unit	75	79	79	124	124	82	89	113
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	58	81	81	63	63	88	88	88
Lahat	Jumlah Koperasi	Unit	392	392	392	392	392	429	432	461

Kabupaten /Kota	Uraian	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Koperasi Aktif	Unit	274	293	293	293	293	179	148	140
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	118	99	99	99	99	250	284	321
Pagar Alam	Jumlah Koperasi	Unit	111	111	115	109	113	127	128	133
	Koperasi Aktif	Unit	51	39	43	43	47	65	54	34
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	60	72	72	66	66	62	74	99
Musi Rawas Utara	Jumlah Koperasi	Unit	243	243	243	365	365	309	311	336
	Koperasi Aktif	Unit	243	243	243	260	260	66	68	94
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	-	-	-	105	105	243	243	242
Penukal Abab Lematang Ilir	Jumlah Koperasi	Unit	60	61	61	180	180	112	111	119
	Koperasi Aktif	Unit	42	42	42	156	156	98	97	103
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	18	19	19	24	24	14	14	16
Provinsi	Jumlah Koperasi	Unit	97	116	118	118	118	205	133	163
	Koperasi Aktif	Unit	90	109	111	111	111	124	48	83
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	7	7	7	7	7	81	85	80
TOTAL JUMLAH KOPERASI		**Unit**	**5.790**	**5.852**	**5.992**	**6.005**	**6.272**	**6.352**	**6.404**	**6,780**

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah UMKM Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2014 jumlah UMKM Sumsel sebanyak 2.002.836 unit meningkat menjadi 2.208.553 unit di tahun 2020, begitu juga dengan modal kerja dan investasi dari Rp. 9.362.706.000.000 di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 9.839.421.000.000 ditahun 2020, omzet usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013-2019 juga terus mengalami peningkatan dari Rp. 24.720.838.000.000 tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 31.426.812.000.000 ditahun 2020 begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 2.950.428 orang meningkat menjadi 3.082.040 orang ditahun 2020.

Tabel. 2.69.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah UMKM	Unit	2.022.868	2.071.416	2.102.478	2.103.268	2.108.604	2.208.553	2.208.553	2,319,780
	- Pengusaha Mikro Kecil	Unit	2.020.943	2.069.445	2.100.487	2.101.230	2.106.528	2.206.528	2.206.528	2,315,649
	- Pengusaha Menengah	Unit	1.925	1.971	1.991	2.038	2.076	2.025	2.025	3212

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Modal Kerja dan Investasi	Rp. Juta	9.44.970	9.588.674	9.689.308	9.731.551	9.830.871	9.839.421	9.839.421	10,001,594
	- Pengusaha Mikro Kecil	Rp. Juta	8.184.195	8.306.957	8.388.365	8.379.635	8.463.431	8.467.482	8.467.482	8,551,585
	- Pengusaha Menengah	Rp. Juta	1.262.775	1.281.717	1.300.943	1.351.916	1.367.440	1.372.421	1.372.421	2,360,243
3.	Omzet	Rp. Juta	24.968.050	25.276.145	25.528.906	25.531.333	30.467.638	31.426.812	31.426.812	31,961,421
	- Pengusaha Mikro Kecil	Rp. Juta	20.133.229	20.344.628	20.548.074	20.402.754	26.184.781	27.113.005	27.113.005	28,020,549
	- Pengusaha Menengah	Rp. Juta	4.834.821	4.931.517	4.980.832	5.128.579	4.312.857	4.313.812	4.313.812	4,740,485
4.	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	2.978.457	3.008.007	3.038.087	3.059.356	3.066.587	3.082.040	3.082.040	3,117,847
	- Pengusaha Mikro Kecil	Orang	2.952.545	2.981.185	3.010.997	3.031.704	3.042.461	3.054.117	3.054.117	3,088,430
	- Pengusaha Menengah	Orang	25.912	26.822	27.090	27.652	28.792	27,923	27,923	30,493

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, 2022

18) Urusan Penanaman Modal

Capaian nilai total realisasi Investasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp 34,66 Trilyun, meningkat sebesar 9% dibandingkan target realisasi PMA dan PMDN Renstra DPMPTSP Tahun 2021 sebesar Rp 28,27 Trilyun, Nilai ini juga sudah melebihi target Nasional sebesar Rp 32,2 Trilyun.

Tabel 2.70.
Perkembangan Investasi di Sumatera Selatan

No	INDIKATOR KINERJA	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Realisasi Investasi PMA (Triliun)	12,05	38,83	13,25	16,03	14,58	15,61	16,71	11,074	17,88	22,528	19,13	18,39
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Triliun)	9,184	8,53	10,10	9,76	11,11	7,46	7,99	16,921	8,55	15,825	9,14	16,27

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, 2022

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdayasaing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan Sumatera Selatan semakin mengalami kemajuan dalam berbagai dimensi pembangunan, ini terlihat dari semakin terakomodirnya sektor-sektor yang memungkinkan pemuda-pemuda Sumatera Selatan dapat berkembang untuk lebih maju, seperti adanya fasilitas sarana dan prasarana bagi pemuda, disamping itu juga melindungi pemuda dari pengaruh destruktif bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan. Peran pemuda juga didukung dengan adanya Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang diturunkan dengan Program-Program lainnya seperti Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda di Kantong Kemiskinan, dan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan IMTAQ dan IPTEK Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS.

Upaya peningkatan peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui fasilitasi kader kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalan pembentukan kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan akses permodalan.

Perkembangan kepemudaan selama tahun 2013 – 2021 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.71.
Perkembangan Kepemudaan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2021

No.	Uraian	Tahun								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Na	Na	Na	Na	25	31	34	26	Na
2	Jumlah Pemuda yang Berperan dalam Pembangunan	Na	Na	Na	Na	519	422	568	310	2.295
3	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	7	7	6	6	6	19	17	0	22
4	Jumlah Wirausaha Muda	60	40	40	40	-	40	40	0	52

Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga menggambarkan kapasitas dan kapabilitas tenaga-tenaga olahraga (atlet-atlet) yang berperan serta secara aktif berprestasi dalam kejuaraan dan perlombaan Internasional, ini juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap dan tercanggih serta berstandar Internasional, terbentang luas di kawasan *Jakabaring Sport City*, yang semuanya terkoneksi pada suatu wilayah sehingga Sumatera Selatan menjadi surganya pencinta olahraga dan terciptanya industri-industri olahraga, jasa services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial, dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan IPTEK olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Adanya semangat otonomi daerah (pengembangan olahraga sesuai dengan potensi dan karakter daerah) merupakan kekuatan bagi daerah untuk membangun dunia olahraga yang sesuai dengan potensi dan karakter daerah tersebut. Terselenggaranya event-event yang bertaraf Nasional bahkan Internasional merupakan bukti kepedulian Pemerintah terhadap perkembangan keolahragaan di Sumatera Selatan, yang paling fenomenal adalah terlaksananya gelaran ASIAN GAMES tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian hasil pembinaan Olahraga diketahui bahwa hasil yang dicapai oleh Kontingen Sumsel pada PON XVII 2008 di Kalimantan Timur, PON XVIII 2012 di Riau, PON XIX 2016 di Bandung kurang memuaskan. Namun, yang menjadi kebanggaan kita atlet yang memperkuat Sumsel adalah atlet Putra Daerah. Untuk itu, mengantisipasi PON XX 2020 di Papua, Sumsel akan mengoptimalkan pembinaan pada atlet muda berpotensi melalui pembinaan empat tahunan. Berikut perolehan Medali Sumsel pada PON disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.87.
Jumlah Perolehan Medali Sumsel pada PON

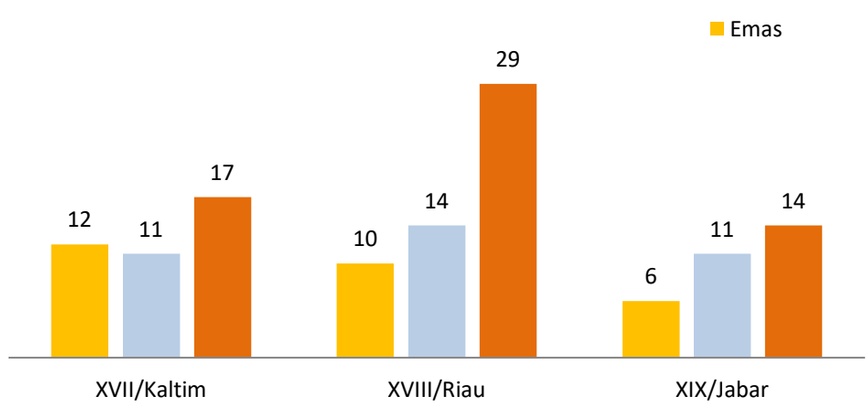

Perkembangan keolahragaan selama tahun 2013 – 2021 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.72.
Perkembangan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2021

No.	Uraian	Tahun								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	na	na	na	na	25 (APBD)	500 (APBN)	25	0	135
2	Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	93	133	173	na	98	112	19	54	42
3	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	78	79	731	94	298	232	232	260	250
4	Jumlah Atlet Berprestasi	28	36	38	50	50	30	22	0	35
5	Jumlah Prestasi Olahraga	16	18	22	44	39	4	15	0	12
6	Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan	na	na	na	na	29	11	25	0	54
7	Peringkat Sumatera Selatan pada PON	na	na	na	na	21	na	na	na	na

Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan, 2022

Dari kedua tabel di atas terkait perkembangan pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Selatan, khususnya jika dicermati pada capaian Tahun 2020 dan 2021, terlihat adanya penurunan capaian dari Tahun sebelumnya, hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor bencana tak terduga yang melanda dunia yaitu adanya covid-19 yang menjadi pandemi global dan sangat mempengaruhi berbagai sektor termasuk sektor pemuda dan olahraga. Dengan adanya pandemi covid-19, berbagai capaian indikator menurun karena banyak program dan kegiatan yang ditunda bahkan dialihkan dananya untuk penanganan covid-19.

20) Urusan Statistik

Urusan Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan terutama terkait ketersediaan Data statistik Sektoral; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik

di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi. Arah penyediaaan data harus dapat diakses semua lapisan Masyarakat dan Pemerintah secara terintegrasi dan selalu di update sesuai perkembangan untuk berbagai kebutuhan terutama bagi pembangunan di Daerah. Namun yang masih menjadi kendali bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah kurangnya sumber daya manusia urusan statistic yang handal, pengelolaan data kurang optimal dan berdampak pada pemanfaatan data statistic sebagai sumber dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik di tahun 2020 telah melaunching Sistem Informasi Satu Data Sumsel (SIMATA). Kegiatan ini memperkenalkan Sistem Informasi Satu Data Sumsel (SIMATA) yang dilauching pada tanggal 23 November 2020 dan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 31 Desember 2021 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 892/KPTS/Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.

21) Urusan Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, diantaranya Pembinaan dan Pengawasan menara Telekomunikasi, Bimbingan Teknis Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk serta Pemberian Bimbingan Teknik Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO), maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan Siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. Dalam rangka menjaga keamanan informasi maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

integrasi data dan keamanan informasi, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika melaunching Kegiatan CSRIT (Computer Security Insident Response Team). Pada Tanggal 22 November 2021 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 760/KPTS/Diskominfo/2021 tentang Pembentukan Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumselprov-CSIRT).

22) Urusan Kebudayaan

Pada Bidang Kebudayaan secara umum program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut antara lain:

6. Program peningkatan keragaman budaya
7. Program pengembangan nilai budaya
8. Program pengelolaan kekayaan budaya
9. Program permuseuman dan nilai-nilai budaya Sumsel

Dari program tersebut, jumlah sanggar seni yang berkembang di provinsi sumatera selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.88.
Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang

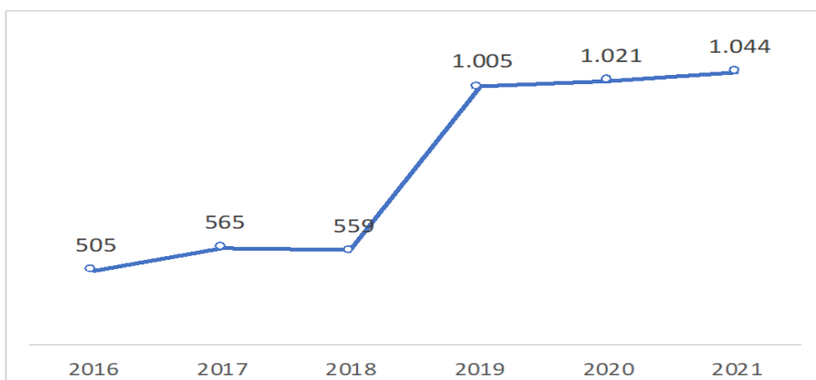

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel 2022

Jumlah sanggar seni di Sumatera Selatan tahun 2021 secara keseluruhan sebanyak 1.044 sanggar seni, jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2020 jumlah sanggar seni sebanyak 1.021 sanggar seni. Peningkatan sanggar seni yang paling pesat terjadi pada tahun 2019.

23) Urusan Perpustakaan

Perpustakaan Provinsi Sumsel saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik ditandai dengan peningkatan pelayanan dari tahun ke tahun, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan dengan tingkat capaian 84,00 indeks di Tahun 2021 mengalami penurunan 1.00 point dibandingkan capaian di Tahun 2020 yang mencapai 85.00 indeks.

Terkait dengan pengembangan dan pengelolaan di berbagai jenis perpustakaan di daerah kabupaten/Kota yang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan umumnya dikarenakan keterbatasan sumber daya perpustakaan seperti minimnya bahan bacaan, terbatasnya jumlah dan sebaran tenaga perpustakaan yang berkompetensi, minimnya sarana dan prasarana perpustakaan serta rendahnya pemahaman dan dukungan stakeholder akan pentingnya akreditasi. Kondisi ini juga berdampak pada minimnya jumlah perpustakaan terakreditasi yang s.d Tahun 2021 berjumlah 171 perpustakaan terdiri dari 10 Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, 18 Perpustakaan Perguruan Tinggi, 5 Perpustakaan Khusus, 44 Perpustakaan Sekolah SD/MI, 48 Perpustakaan Sekolah SMP/MTs, 43 Perpustakaan Sekolah SLTA/SMK dan 3 Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Untuk itu diperlukan dorongan dan dukungan baik dari Pemerintah Provinsi Sumsel maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi pemantik dengan memberikan dukungan regulasi dalam rangka penguatan lembaga perpustakaan, penguatan SDM Perpustakaan, Peningkatan Literasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi antar Lembaga.

Berdasarkan hasil survey Indeks Kegemaran Membaca yang dirilis oleh Perpusnas pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Indonesia berada di kategori sedang dengan nilai 59,24 meningkat 3,78 point dari tahun 2020 sebesar 55,74 indeks. Sedangkan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar 52,38 meningkat di tahun 2021 sebesar 55,84, adanya peningkatan pada durasi akses internet perhari masyarakat Sumsel yang rata–rata

mencapai 2 jam, 3 menit, namun masih di bawah angka nasional dan termasuk pada kategori sedang. Adapun lima komponen alat ukur Tingkat Kegemaran membaca terdiri dari frekwensi membaca (kali/minggu), durasi/lama waktu membaca (hari/jam), banyaknya bahan bacaan/buku yang tamat dibaca (dalam 3 bulan), frekwensi membaca akses internet (kali/per minggu) dan durasi akses internet (jam/per hari)

Untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumatera Selatan di tahun 2020 mencapai 12,63 indeks masih berada di bawah rata-rata nasional 12,93 indeks. Untuk Tahun 2021 meningkat 2.21 point mencapai 14,57 indeks berada di atas target nasional 13,54 indeks. Kondisi ini dipengaruhi oleh 7 parameter pengukur yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, perpustakaan ber SNP, keterlibatan masyarakat di kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan yang memenuhi standar di tengah-tengah masyarakat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomr 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat dan memperkuat peran perpustakaan umum dalam peningkatan literasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan budaya literasi melalui sejumlah program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat (Talkshow, Road Show, Seminar, Lomba dll), pengembangan bahan bacaan baik konvensional maupun digital, pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi daerah kewenangan provinsi, memperluas layanan silang layan dan layanan perpustakaan keliling, pendirian pojok baca di ruang-ruang publik, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, meningkatnya kerjasama di

dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan serta pengukuhan bapak/bunda literasi kabupaten/kota sebagai motor penggerak literasi di kabupaten/kota.

Selain itu Perpustakaan Provinsi saat ini juga sedang mengembangkan perpustakaan berbasis internet yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhannya dengan berubahnya fungsi perpustakaan yang saat ini menjadi pusat belajar dan kegiatan masyarakat melalui memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (inklusi sosial), Adapun jumlah perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.73.
Jumlah Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014-2021

Jenis Perpustakaan	Tahun							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perpustakaan Umum	840	1.009	1.214	1.441	1.442	1.481	847	879
Perpustakaan Sekolah	2.924	3.512	9.014	9.014	9.233	13.908	8.353	8.416
Perpustakaan Peruguruan Tinggi	84	101	121	121	128	132	94	171
Perpustakaan Khusus	118	141	765	765	780	783	783	46
Total	3.966	4.763	11.114	11.341	11.583	16.304	10.077	9.512

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah perpustakaan di Provinsi Sumsel hingga mencapai 9.512 di tahun 2021 dibandingkan jumlah perpustakaan di tahun 2020 yang mencapai 10.077. Penurunan jumlah perpustakaan ini terjadi di perpustakaan khusus baik itu perpustakaan rumah ibadah maupun perpustakaan instansi. Oleh karena itu standar nasional perpustakaan harus menjadi acuan di dalam pendirian sebuah perpustakaan baik dalam memenuhi standar koleksi, standar SDM, standar sarana prasarana, standar layanan dan standar penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan.

Sedangkan untuk perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan yang belum sesuai dengan standar perpustakaan nasional sebagai berikut :

Tabel 2.74.

Jumlah Perpustakaan yang belum sesuai dengan Standar Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2021

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	TAHUN							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perpustakaan Umum	462	555	684	684	675	679	661	553
2	Perpustakaan Sekolah	1.608	1.935	4.958	4.958	4.898	5.611	5.597	3.202
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi PTN/ PTS	46	56	67	67	67	65	64	109
4	Perpustakaan Khusus	65	78	529	529	529	521	521	6
TOTAL		2.181	2.624	6.238	6.238	6.169	6.875	6.843	3.870

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah perpustakaan yang belum memenuhi standar s.d tahun 2021 berjumlah 3.870 terdiri dari 553 perpustakaan umum, 3.202 perpustakaan sekolah, 109 perpustakaan perguruan tinggi PTN/PTS dan 6 perpustakaan khusus jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 6.843 perpustakaan. Penurunan jumlah perpustakaan yang tidak berstandar terjadi di Perpustakaan Sekolah dan perpustakaan khusus melalui pelibatan MKKS, lahirnya regulasi Gubernur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan serta sinergistas program pembinaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk itu pembinaan perpustakaan terus dilakukan setiap tahunnya dengan melibatkan tenaga fungsional pustakawan, namun dikarenakan jumlah perpustakaan binaan cukup banyak dan wilayah pembinaan sangat luas mencakup 17 kabupaten/kota, maka perlu dibangun kerjasama dengan berbagai stakeholder lainya.

Keberadaan sebuah perpustakaan sebagai pusat informasi tidak terlepas dari keberadaan bahan bacaan dengan jumlah yang beragan baik digital maupun konvensional. Pada tahun 2021 total buku yang dimiliki Perpustakaan Daerah Sumsel sebanyak 265.251 judul dan 839.989 eksemplar yang terdiri dari buku bahasa

Indonesia dan bahasa asing serta koleksi digital. Berikut koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel sebagai berikut :

Tabel 2.75.
Jumlah Buku Koleksi Umum dan Referensi di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2018-2021

Tahun	2018		2019			2020			2021		
	Bahasa Indonesia	Bahasa Asing	Bahasa Indonesia	Bahasa Asing	Total	Bahasa Indonesia	Bahasa Asing	Total	Bahasa Indonesia	Bahasa Asing	Total
Jumlah Judul Buku	228.957	32.117	229.152	32.117	261.269	229.812	21.117	261.929	233.134	32.117	265.251
Jumlah Eksemplar	742.097	86.388	742.682	86.388	829.070	748.600	86.388	834.988	753.601	86.388	839.989

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel 2.84 di atas menjelaskan bahwa pengembangan koleksi terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel setiap tahunnya baik melalui pengadaan, tukar menukar, hibah, sumbangan dan kerjasama mengingat kebutuhan masyarakat terhadap informasi terus meningkat. Selain itu koleksi perpustakaan juga diperkaya dengan koleksi deposit yang merupakan hasil Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, sebagaimana tergambar di bawah ini :

Tabel 2.76.
Jumlah Koleksi Deposit Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 2016-2021

No	Jenis Koleksi	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Judul				
1	Buku Tahun Berjalan	13.300	13.776	14.014	15.102	16.765	17.435
	Buku 2021	185	55	119	427	268	711
2	Non Buku	276	171	8.40	833	102	318
	Terbitan berseri majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, brosur, pamphlet, peta, laporan	78	35	659	384	1	106
	Pustaka Kelabu (Tesis/ Disertasi/ Skripsi)	198	136	181	449	101	212
5	Kaset CD/ VCD/ DVD	15	12	129	403	300	163
Total		13.776	14.014	15.102	16.765	17.435	18.627

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa koleksi deposit sampai dengan tahun 2021 berjumlah 18.627 judul terdiri dari buku tahun berjalan 17.435 judul, buku KCKR 711 judul, non buku atau terbitan berseri berupa majalah, surat kabar, bulletin, jurnal, brosur,

pamphlet, peta dan laporan sebanyak 318 judul, pustaka kelabu (tesis, skripsi, disertasi) 212 judul, kaset CD/VCD/DVD 163 judul.

Mengacu pada rasio ketercukupan koleksi yang ditetapkan oleh IFLA bahwa jumlah koleksi yang dimiliki oleh provinsi sebanyak 2 kali jumlah penduduk sumsel. Ini bearti bahwa Sumsel mengalami kekurangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan sebanyak 15.831.111 eks.

Tabel 2.77.
Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021

No	Sumber Daya Manusia Perpustakaan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pustakawan						
	Provinsi	35	32	32	28	27	33
	Kab/ kota	6	15	15	30	39	93
	Sekolah	5	3	3	2	2	3
	Perguruan Tinggi	27	28	28	28	62	39
	Khusus	Na	na	na	na	6	17
2.	Tenaga Teknis						
	Provinsi	53	56	56	54	45	57
	Kab/ kota	50	65	65	123	123	412
	Kecamatan, desa, kelurahan	-	-	-	-	-	840
	Sekolah	420	430	430	109	540	9490
	Perguruan Tinggi	55	59	59	79	79	381
	Khusus	Na	na	na	na	5	66

Sumber : Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Ketersediaan dan kualitas layanan perpustakaan tidak terlepas dari keberadaan pustakawan di berbagai jenis perpustakaan, di lihat dari tingkat ketercukupan tenaga perpustakaan untuk pustakawan di Sumatera Selatan masih sangat terbatas jumlahnya sebanyak 185 orang tersebar di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel sebanyak 33 orang, 93 orang berada di 15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, 3 orang di Perpustakaan Sekolah, 39 orang di Perpustakaan Perguruan Tinggi dan 17 orang di Perpustakaan Instansi/Kementerian, namun masih ada Dinas yang belum memiliki pustakawan yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. OKU Timur dan Kab. Musi Rawas Utara

Guna memenuhi keterbatasan tenaga fungsional pustakawan, maka keberadaan tenaga teknis pengelola perpustakaan diharapkan

dapat mengambil perannya di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, dimana jumlah tenaga teknis pengelola perpustakaan yang tersebar di berbagai jenis perpustakaan dan terdata 11.246 orang, yang sudah mengikuti pendidikan/pelatihan sebanyak 2.115 orang atau 18,80%

Sesuai dengan Standar Internasional Federation of Library Associations dan Institusions) 1 orang tenaga perpustakaan (pustakawan) melayani 2.500 orang penduduk.

24) Urusan Kearsipan

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kearsipan melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan dan pemeliharaan arsip dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dengan :

a. Melaksanakan dan mengikuti diklat-diklat arsiparis untuk tenaga-tenaga arsiparis seperti sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 50 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bimbingan Teknis SRIKANDI di Arsip Nasional Republik Indonesia, Pembinaan Kearsipan di 50 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota.
b. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran (Tabung Gas Co2) untuk melindungi arsip-arsip baik arsip statis maupun arsip inaktif di dalam depo penyimpanan dari bahaya kebakaran.
c. Melakukan penyemprotan bahan kimia (Fumigasi) arsip statis dan arsip inaktif di dalam lemari Roll O'peck, dalam Box Arsip dan di rak-rak besi di 4 (empat) Depo Arsip terlindung dari hama, jamur, serangga dll.
d. Melakukan Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip Statis dan foto yang bernilai sejarah sebanyak lebih kurang 5.000 lembar.
e. Melaksanakan Pameran Dokumentasi Arsip Sumatera Selatan Tempoe Doloe Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan di Atrium OPI Mall.
f. Melakukan penilaian dan pemusnahan Arsip In Aktif sebanyak 1.384 Berkas.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Sumatera

Selatan menjadi salah satu provinsi terbaik dalam Pengawasan Kearsipan pada tahun 2021 dengan nilai 78,50 dan dalam kategori "Sangat Baik".

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Total produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2021 sebesar 554.844 ton meningkat dibandungkan tahun 2020 yang sebesar 482.473 ton.

Tabel 2.78.
Produksi Ikan Tangkap dan Budidaya (ton)
Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021

Jenis Produksi	2019		2020		2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Ikan Tangkap (Ribu Ton)	197.000	197.078	204.000	125.336	212.000	144.136
Ikan Budidaya (Ribu Ton)	460.000	465.000	480.000	357.137	500.000	410.708

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2022

Sedangkan konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 42,84 kg/kapita/tahun naik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 42.71 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat didukung oleh meningkatnya produksi perikanan, serta didukung oleh promosi dan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Salah satu jenis ikan unggulan produksi Sumatera Selatan adalah ikan patin.

Gambar 2.89.
Foto Ikan Patin, salah satu Komoditas Unggulan Sumatera Selatan

Tabel 2.79.
Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2021

Konsumsi Ikan (Kg/kapita/th)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	39.02	39.20	40.04	40.50	42.00	42.71	42.84

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2022

Namun untuk produksi benur udang dan nener bandeng masih sangat kecil jumlahnya, salah satu penyebabnya adalah Kebutuhan benur udang dan nener bandeng yang digunakan untuk budidaya perikanan payau semuanya didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah produksi benur udang dan nener bandeng dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.80
Produksi Benur dan Nener (Ribu)
Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021

Jenis Produksi	2019		2020		2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Produksi benih udang windu (benur) (ekor)	5.000	2.000	10.000	2.000	15.000	2.000
Produksi benih bandeng (nener) (ekor)	3.000	200	7.000	0	11.000	n/a

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2022

Disamping produksi ikan dan benih ada beberapa masalah yang cukup krusial pada sektor perikanan Sumatera Selatan, antara lain Risiko pelanggaran hukum seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, di wilayah peraian Sumatera Selatan. Luasnya perairan Sumatera Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengamanan wilayah laut dari tindakan pelanggaran hukum selain itu, terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan zona ruang laut juga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pada sektor perikanan dan perairan.

2) Urusan Pariwisata

Sumatera Selatan kaya akan potensi wisata, selain wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan; Sumatera Selatan mengembangkan wisata olahraga yang potensi ini belum dilirik oleh Provinsi lain. Wisata olahraga ini berpusat di Jakabaring Sport City. Untuk mendukung wisata ini di Kota Palembang sudah dikembangkan paket wisata yang dapat dilihat pada peta dibawah:

Gambar 2.90.
Peta Promosi Wisata Religi di Sumatera Selatan

Saat ini Sumatera Selatan juga menggiatkan pengembangan wisata religi. Tempat-tempat wisata religi di Sumatera Selatan yang ada dan akan dikembangkan adalah sebagai berikut: Masjid Agung pada mulanya disebut Masjid Sultan. Perletakan batu pertama pada tahun 1738, dan peresmiannya pada hari tanggal 28 Jumadil Awal

115 H atau 26 Mei 1748. Masjid Agung didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin I yang dikenal pula dengan Jayo Wikramo (tahun 1724-1758). Masjid Agung Palembang bagian dari peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam, dan menjadi salah satu masjid tertua di Kota Palembang.

a. **Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin**

Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur yakni Indonesia, China dan Eropa. Bentuk arsitektur Eropa terlihat dari pintu masuk di gedung baru masjid yang besar dan tinggi. Sedangkan arsitektur China dilihat dari masjid utama yang atapnya seperti kelenteng.Masjid ini berada di utara Istana Kesultanan Palembang, di belakang Benteng Kuto Besak yang berdekatan dengan aliran sungai Musi. Secara administratif, berada di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat Kota Palembang. Bentuk masjid yang ada sekarang adalah hasil renovasi tahun 2000 dan selesai tahun 2003.

Gambar 2.91.
Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin

b. Pulau Kemaro

Pulau Kemaro terletak di tengah Sungai Musi, sekitar 6 KM dari Jembatan Ampera. Saat ini Pulau Kemaro adalah salah satu tempat wisata di Palembang yang paling terkenal. Di Pulau Kemaro terdapat sebuah vihara yang banyak didatangi oleh umat Buddha untuk berdoa dan berziarah. Di sini juga dapat ditemukan sebuah makam yang merupakan makam dari seorang putri Palembang. Putri ini

mempunyai cerita tersendiri, yaitu dia menikah dengan anak raja dari China dengan mas kawin berupa 9 guci emas, namun pada akhirnya pasangan tersebut menerjunkan diri ke sungai dan tenggelam. Di Pulau Kemaro terdapat beberapa hal menarik, misalnya pagoda berlantai 9 yang dibangun pada tahun 2006, dan pohon cinta. Masyarakat setempat percaya bahwa bila sepasang kekasih mengukir namanya di pohon cinta ini, maka hubungan cinta mereka akan berlanjut sampai dengan pernikahan.

Gambar 2.92.
Pulau Kemaro

c. Museum Al Quran Raksasa

Al Quran Raksasa adalah hasil karya seni anak bangsa bernama Sofwatillah Mohzaib. Pria satu ini memang dikenal punya minat yang besar terhadap seni kaligrafi. Bahkan wakil rakyat di DPR RI ini menjadi salah satu tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap Masjid Agung Palembang. Suatu hari, Opat sapaan akrabnya, baru saja terlelap tidur setelah selesai mengukir kaligrafi ornamen bagian pintu Masjid Agung Palembang. Dalam tidurnya ia bermimpi. Mimpi tersebut mengisyaratkan dirinya untuk membuat alquran terbesar di dunia. Dengan berbagai pertimbangan, disertai niat dan tekat yang bulat, ia pun mewujudkan mimpinya itu dengan mengawalinya dari surat Alfatiha. Lalu kemudian satu keping potongan Alquran tersebut dipamerkannya di masjid tersebut, dengan harapan ada donatur yang bersedia untuk mendukung niatnya. Dari isyarat melalui mimpi, mulai mengagas pembuatan Alquran Raksasa ini.

Gagasan pembuatan Alquran itu tercetus pada tahun 2002 silam, setelah Opat merampungkan pemasangan kaligrafi pintu dan ornamen Masjid Agung Palembang. Dari sana juga inspirasi membuat mushaf Alquran dengan ornamen khas Palembang. Satu keping mushaf Alquraan surat Alfatiha ditunjukkan kepada salah seorang toko masyarakat Palembang. Tentu saja dengan harapan untuk mengajak dermawan dan relasinya men*support* pembuatan alquran tersebut. Tepat pada 1 Muharram 1423 atau 15 Maret 2002 Alquran tersebut dipamerkan di bazar pada peringatan Tahun Baru Islam. Namun resmi diluncurkan pada 14 Mei 2009 di Masjid Agung Palembang. Di kota yang pernah menjadi pusat peradaban Kerajaan Sriwijaya ini juga terdapat banyak objek wisata bernilai tinggi. Salah satunya adalah Museum Al Quran Raksasa yang berlokasi di Jalan M Amin Fauzi, Soak Bujang, RT 03, RW 01, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Ornamen interior di Museum Al Quran Raksasa di Palembang. Bukan tanpa alasan, objek wisata religi ini disebut Alquran Wisata religi muslim. Sebab, Al Quran tersebut dipahat di permukaan kayu tembesu berukuran panjang 177 centimeter dengan lebar 140 centimeter dan ketebalan 2,5 centimeter.

Gambar 2.93.
Museum Al Quran Raksasa

Alquran Al-Akbar atau yang juga sering disebut Alquran Raksasa ini terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat/diukir ala khas Palembang dalam lembar kayu dan menghabiskan kurang lebih 40 meter kubik kayu trembesi dengan biaya tidak kurang Rp 2 miliar, dimana masing-masing lembar ukuran halamannya 177 x 140 x 2,5 sentimeter dan tebal keseluruhannya termasuk sampul mencapai 9 meter. Alquran yang terdiri dari 630 halaman ini juga dilengkapi dengan tajwid serta doa

khataman bagi pemula. Setiap lembar terpahat ayat suci Alquran pada warna dasar kayu coklat dengan huruf Arab timbul warna kuning dengan ukiran motif kembang di bagian tepi ornamen khas Palembang yang sangat indah di pandang dan enak dibaca.

Proses pembuatannya sendiri memakan waktu relatif lama, sekitar tujuh tahunan. Alquran Raksasa ini terbesar dan pertama di dunia dalam bentuk Alquran 30 juz yang di buat pada media dari kayu jenis trembesi. Alquran terbesar ini sebelum resmi dipublikasikan, sengaja di pajang seluruh ayat-ayat suci di dalam ruang pamer Masjid Agung Palembang selama tiga tahun untuk mendapat koreksi dari seluruh umat.Pada akhir 2011, Alquran ini dinilai layak untuk dipublikasikan dan pada Senin, 30 Januari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama seluruh delegasi konferensi parlemen Organisasi Konferensi Islam (OKI) meresmikan penggunaan Alquran yang disebut sebagai Alquran terbesar yang dicetak di atas lembaran kayu trembesi. Sejumlah asset yang dimiliki Sumsel seperti Alquran raksasa yang hanya ada satu-satunya di dunia juga menjadi unggulan dalam menarik wisatawan. Selain itu asrama haji yang dilengkapi Ka'bah dan lintasan sa'i ukuran sebenarnya, *mock up* pesawat dan hotel syariah dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Mahakarya asli Wong Kito itu, tidak hanya menjadi alternatif tujuan wisata warga lokal. Bahkan turis dari mancanegara, terutama dari negara-negara Arab banyak yang sengaja berkunjung untuk membuktikan sendiri karya seni yang tiada duanya itu.

d. Kampung Arab Al-Munawar

Perkampungan yang terletak di kawasan 13 Ulu di tepian Sungai Musi dan Sungai Ketemenggungan. Di kompleks ini, terdapat paling kurang delapan rumah yang usianya diperkirakan lebih dari satu abad. Salah satunya, rumah permukiman Arab pertama di Kampung 13 Ulu, Habib Abdurrahman Al Munawar.

Gambar 2.94.
Rumah di Kampung Arab Al-Munawar

Keseluruhan rumah berkonstruksi panggung dengan menggunakan bahan kayu unglen dan sebagian lagi menggunakan batu secara keseluruhan. Sebagian dari rumah itu berarsitektur limas seperti rumah Habib Abdurrahman dan sebagian lagi telah mendapat sentuhan Timur Tengah dan Eropa.

Di kampung ini, juga terdapat rumah Kapten Arab. Seperti halnya sukubangsa Cina dan India, pada tahun 1825, Pemerintah Belanda di Palembang melakukan pendekatan. Dari tiap sukubangsa itu, diangkatlah pemimpin kaum dengan pangkat Kapten. Kapten terakhir di Kampung Al Munawar ini bernama Ahmad Al Munawar yang wafat pada tahun 1970.

e. Komplek Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membangun enam rumah ibadah di kawasan *venue* Asian Games di Kompleks Jakabaring *Sport City (JSC*) Palembang. enam rumah ibadah yang dibangun tersebut adalah Masjid, Gereja Katolik, Gereja Protestan, Pura, Vihara, dan Kelenteng di dalam satu lokasi. Selain untuk memudahkan para pemeluk agama tersebut dalam beribadah, lokasi tempat ibadah yang dibangun secara berdekatan juga menunjukkan bahwa masyarakat di Sumatera Selatan merupakan masyarakat yang rukun antar umat beragama, hal inilah yang menyebabkan

Sumatera Selatan sebagai kawasan *zero conflict* antar suku, agama, ras, dan golongan.

Gambar 2.95.
Enam Rumah Ibadah Terpadu di Jakabaring

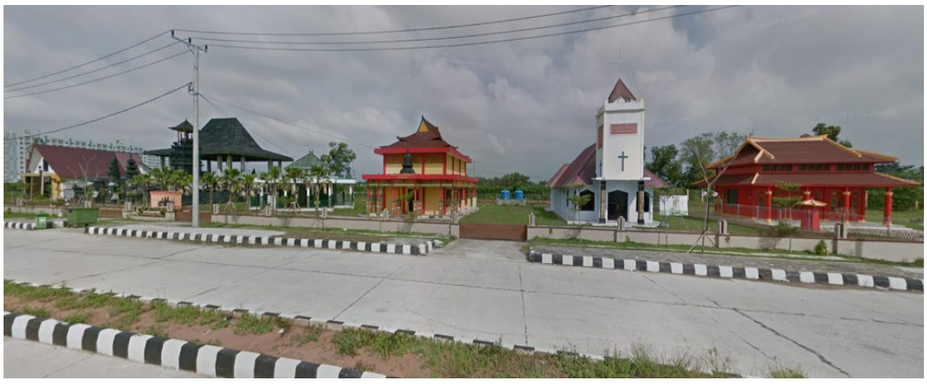

f. Replika Sarana Prasarana Ibadah Umroh (Asrama Haji)

Asrama haji Palembang saat ini sudah berfungsi menjadi tempat untuk mempersiapkan segala urusan perjalanan bagi jama'ah calon haji maupun umroh serta tempat wisata religi bagi masyarakat karena di area tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk pelatihan persiapan dalam menunaikan rukun Islam kelima.

Asrama haji tersebut dilengkapi replika Kabah, lintasan Sa'i dan fasilitas lainnya, selain itu di area asrama haji Palembang juga nantinya akan dilengkapi dengan unta, hotel syariah dan fasilitas lainnya seperti yang ada di tanah suci. Saat ini asrama haji Palembang telah dilengkapi miniatur pesawat supaya masyarakat yang akan pergi haji/umroh dapat mengetahui tata cara naik pesawat serta melaksanakan ibadah di dalam pesawat selama perjalanan tersebut. Nantinya calon jamaah haji/umroh yang akan menunaikan rukun Islam kelima ataupun umroh manasiknya dapat dilaksanakan di asrama haji Palembang. Dalam waktu dekat ini akan dibangun hotel syariah sehingga kawasan tersebut benar-benar menjadi tempat wisata relegi terutama bagi umat Muslim. Dengan lengkapnya fasilitas untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut bukan saja untuk memudahkan calon jamaah pergi haji/umroh tetapi juga asrama haji Palembang bisa menjadi tempat wisata keagamaan bagi umat Islam.

g. **Dukungan SDM Pariwisata melalui SMK Pariwisata dan Politeknik Pariwisata**

Untuk Mewujudkan promosi dan pemasaran tersebut harus didukung oleh Sumberdaya Manusia yang handal. SDM Pariwisata yanga ada di Sumatera Selatan antara lain :

- Jumlah pemandu wisata yang terdaftar di HPI 70 orang, pemandu wisata yang aktif 10 orang, pemandu wisata yang menjadi profesi 6 orang, pemandu wisata yang berserifikat 30 orang (15 orang dari HPI), sedangkan pemandu wisata yang aktif berbahasa inggris aktif sebanyak 4 orang.
- Tenaga kerja Pariwisata Sumatera Selatan 40.954 orang (hotel, restoran dan objek wisata), yang bersertifikat 3.000 orang, sedangkan rencana sertifikasi dari Kementerian Pariwisata tahun 2015 sebanyak 200 orang (150 orang untuk industri dan 50 orang untuk pramuwisata).

Gambar 2.96.
Politeknik Pariwisata Palembang

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Selatan pada tahun 2021 sebanyak 2.015 orang, pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 10.119 orang. Jumlah wisman yang datang ke Sumatera Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Sedangkan jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 2.002.749 orang dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.810.342 orang. Dari data tersebut menunjukan

terjadi kesamaan peningkatan antara kunjungan wisatawan mancanegara dengan kunjungan wisatawan nusantara di Sumatera Selatan.

Gambar 2.97.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Sumsel Tahun 2016-2021 (Ribu Orang)

Kunjungan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wisman	64.257	67.740	70.917	78.186	10.119	2.015
Wisnus	7.118.516	7.474.444	8.632.957	9.064.605	2.002.749	2.810.342

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel

Strategi yang dikembangkan Pemerintah Sumatera Selatan untuk meningkatkan jumlah wisman dan wisnus, yaitu dengan memperkenalkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi Olah Raga dengan mengunggulkan konsep *Sport Tourism* dengan memanfaatkan sarana olah raga berkelas internasional yang ada di Jakabaring *Sport City*. Yang kedua dengan mengembangkan wisata religi, dengan memanfaatkan potensi sejarah peninggalan kesultanan islam seperti masjid Agung, kampung Arab Al Munawar, kawah tengkurep dan juga kelenteng dan pulau kemaro.

3) Urusan Pertanian

Penghargaan yang diraih Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021, yaitu Provinsi Sumatera Selatan meraih peringkat IV Provinsi dengan peningkatan produksi padi tertinggi sebesar 5,6% setelah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Selain itu, adanya penambahan pengangkatan Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (P2EP) sebanyak 400 orang di tahun 2021 setelah sebelumnya 1.000 orang di tahun 2020.

Capaian pada urusan pertanian Provinsi Sumatera Selatan antara lain pada produksi padi, jagung, dan kedelai.

Produksi Padi

Gambar 2.98.

Target dan Realisasi Produksi Padi Tahun 2018-2021 (Ton)

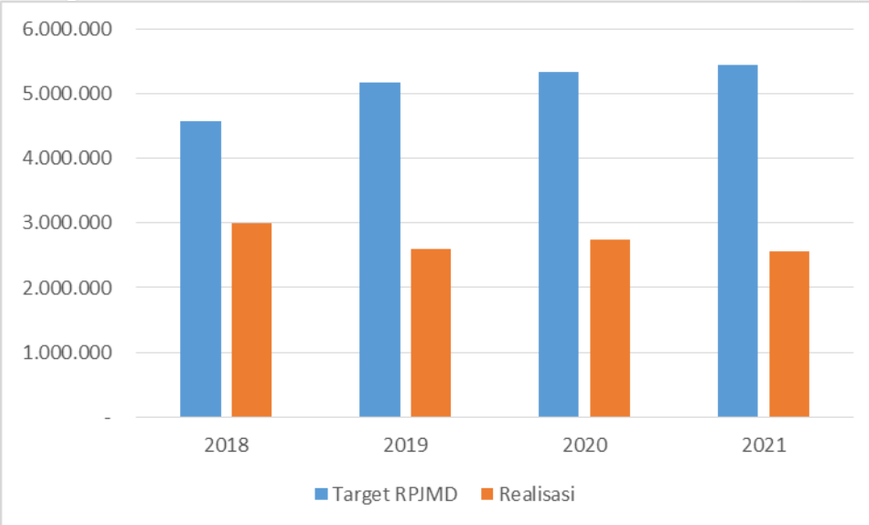

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, 2022

Berdasarkan Data Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja produksi padi tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Tidak tercapainya target produksi tersebut dikarenakan banyak yang tidak melakukan penanaman di Indeks Pertanaman (IP) 200 karena curah hujan tinggi, adanya alih fungsi tanam ke komoditi lain seperti komoditi jagung, adanya pengurangan luas Lahan Baku Sawah (LBS), dan adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi menjadi Kerangka Sampel Area (KSA).

Terkait dengan adanya pengurangan luas lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, Dinas PUPR dalam kegiatan *Updating* Luas Baku Lahan Sawah Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 03 September sampai dengan 15 Desember 2021 melalui rapat koordinasi pembaruan data dan informasi luas lahan baku sawah baik secara *offline* maupun via *zoom meeting*. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memvalidasi dan pemutakhiran data dan informasi luas lahan

baku sawah tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penyusunan program strategis pertanian.

Melalui kegiatan updating luas lahan baku sawah tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lahan-lahan sawah existing yang belum termasuk di dalam ATR/ BPN dapat dimasukkan ke dalam luas lahan baku sawah sehingga keberadaan lahan-lahan sawah yang dimiliki oleh petani di Sumatera Selatan dapat dilindungi dan diakui keberadaannya. Berdasarkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah kabupaten/ kota, maka dari luas baku lahan sawah ATR/BPN seluas 470.602,37 menjadi seluas 593.945,33 ha. Hal ini menunjukkan bahwa terkoreksi adanya penambahan lahan baku sawah di Provinsi Sumatera Selatan seluas 69.075,29 ha pada tahun 2020 dan seluas 54.267,68 ha pada tahun 2021. Hasil penetapan lahan baku sawah tahun 2021 seluas 54.267,68 ha akan disampaikan melalui surat pengusulan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Kementerian/ Lembaga terkait (namun akan diputuskan lebih lanjut) untuk mendapatkan penetapan perubahan lahan baku sawah Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan adanya perubahan metode pendekatan penghitungan produksi juga sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan isntansi terkait melalui kegiatan optimalisasi peningkatan produksi dan produktivitas padi berbasis segmen Kerangka Sampel Area (KSA).

Terkait dengan pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu menjadi fokus, yaitu :

1. Terkait dengan pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dievaluasi, yaitu :
2. Produktivitas padi dan kedelai masih di bawah rata-rata angka nasional.
3. Produktivitas Hortikultura untuk komoditi utama nasional dan unggulan daerah rata-rata masih di bawah angka nasional;

4. Belum Optimalnya Produktivitas Perkebunan rakyat.
5. Tanaman perkebunan yang banyak memasuki fase tua sehingga perlu diremajakan;
6. Kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar belum terbentuk di setiap desa;
7. Rendahnya harga komoditas di tingkat petani;

Produksi Jagung

Capaian produksi jagung tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan angka ramalan (ARAM II) tidak mencapai target, sedangkan capaian di tahun 2018 melebihi target. Salah satu penyebab dari rendahnya capaian itu yaitu penetapan target berdasarkan tahun dasar 2018 yang terlalu tinggi karena di tahun sebelumnya ada program/ kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung (UPSUS/ Upaya Khusus), sedangkan keadaan sebaliknya yang terjadi di tahun berikutnya. Selain itu, sebagian besar usahatani hanya mengandalkan swadaya petani jagung dan alokasi bantuan komoditi jagung di tahun 2021 dari Pemerintah.

Gambar 2.99.
Target dan Realisasi Produksi Jagung Tahun 2018-2021 (Ton)

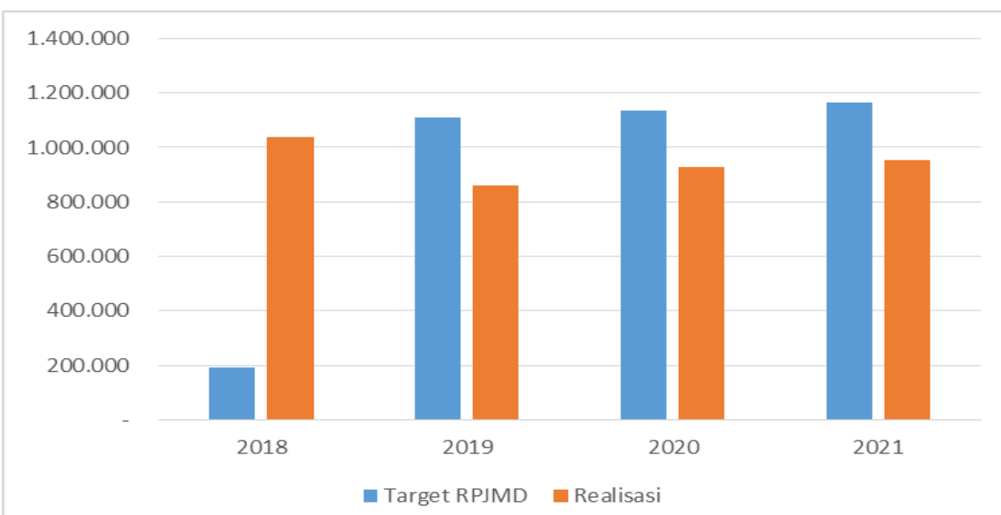

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, 2022

Produksi Kedelai

Capaian kinerja produksi kedelai berdasarkan Data Angka Ramalan II (ARAM II) Kedelai Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun, di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, capaian produksi kedelai mengalami penurunan drastis. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, capaian tahun 2021 jauh tidak melampaui target, berbeda dengan tahun 2018 yang sudah melampaui target. Tidak tercapainya target produksi disebabkan selain karena penetapan target yang terlalu besar, petani juga tidak bergairah untuk menanam kedelai karena benih tidak tersedia dan perlu didatangkan dari luar Sumatera Selatan, belum adanya jaminan harga, kualitas benih yang diuji coba di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah. Grafik perbandingan capaian dan target produksi kedelai tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.100.
Target dan Realisasi Produksi Kedelai Tahun 2018-2021 (Ton)

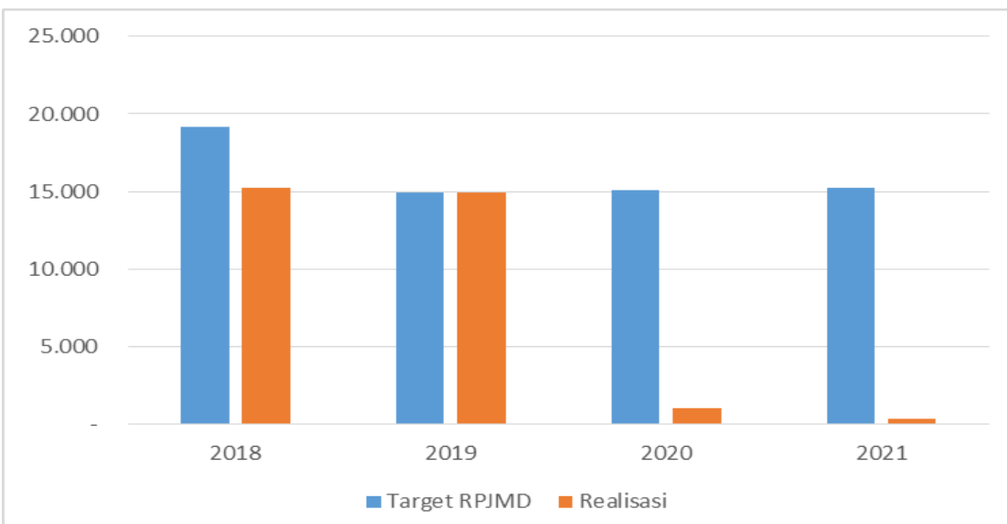

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, 2022

4) Urusan Kehutanan

Pembangunan kehutanan harus sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan, walaupun dalam kenyataannya terdapat *trade off* antara pembangunan yang berorientasi terhadap pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan terutama kehutanan. Luas lahan

kritis merupakan salah satu indikator dari pembangunan kehutanan.

Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai pengatur media pengatur tata air, unsur produksi pertanian, maupun unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Lahan kritis juga merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami proses kerusakan fisik, biologi atau kimia yang pada akhirnya bisa membahayakan fungsi hidrologi, produksi, orologi, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi di sekelilingnya.

Luas lahan kritis Provinsi Sumatera Selatan ±733.756 ha (sumber: BPDAS 2018). Luas Kawasan Rehabilitasi pada tahun 2020 seluas ±963 Ha bekerjasama dengan Pemegang ijin IPPKH dan Ditjen PDASKHL KLHK.

Tabel 2.81.
Data Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

NO	UPTD KPH	TINGKAT KEKRITISAN LAHAN (HA)		TOTAL (HA)
		Kritis	Sangat Kritis	
1	UPTD KPH Wil I Meranti	20,638.43	1.06	20,639.49
2	UPTD KPH Wil II Lalan-Mendis	15,527.25	0	15,527.25
3	UPTD KPH Wil III Palembang-Banyuasin	166.95	0	166.95
4	UPTD KPH Wil IV Sungai Lumpur-Riding	17,439.50	0	17,439.50
5	UPTD KPH Wil V Lempuing-Mesuji	3,981.06	0	3,981.06
6	UPTD KPH Wil VI Bukit Nanti - Martapura	64,657.89	5,438.62	70,096.51
7	UPTD KPH Wil VII Mekakau-Saka	115,236.03	39,144.76	154,380.79
8	UPTD KPH Wil VIII Semendo	61,850.51	8,287.87	70,138.37
9	UPTD KPH Wil IX Suban Jeriji	33,719.85	783.97	34,503.82
10	UPTD KPH Wil X Dempo	17,816.84	2,223.92	20,040.76
11	UPTD KPH Wil XI Kikim-Pasemah	128,624.36	35,058.62	163,682.99
12	UPTD KPH Wil XII Benakat	5,253.22	0	5,253.22
13	UPTD KPH Wil XIII Lakitan-Bukit Cogong	29,405.73	1,997.06	31,402.79
14	UPTD KPH Wil XIV Rawas	57,794.81	2,081.08	59,875.90
15	Kawasan Konservasi	39,604.70	27,021.90	66,626.61
TOTAL		**611,717.13**	**122,038.87**	**733,756**

Sumber: Surat Keputusan MenLHK Nomor: SK.306/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, tanggal 6 Juli 2018 (data mutakhir)

Tabel 2.82.
Data Perkembangan Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan

TAHUN	KRITIS (Ha)	SANGAT KRITIS (Ha)
2011	985.147,72	246.206,58
2013	299.172,00	13.692,00
2014	181.488,95	12.084,38
2015	187.482,80	12.828,63

TAHUN	KRITIS (Ha)	SANGAT KRITIS (Ha)
2016	182.160,92	12.814,98
2017	182.160,92	12.814,96
2018	611.766,87	121.989,12
2019	611.766,87	121.989,12
2020	611.766,87	121.989,12

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), 2021 (data mutakhir)

Rehabilitasi lahan adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang dilokasikan pada kerangka daerah aliran sungai. Kegiatan Rehabilitasi ini menempati posisi untuk mengisi kekosongan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya lahan dan hutan, sehingga terjadi deforestasi serta degredasi fungsi hutan dan lahan.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan reboisasi dan penghijauan pada umumnya dilakukan pada tanah kritis dan areal bekas penebangan liar atau pembalakan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan bibit dalam jumlah besar dan berkualitas baik.

Tabel 2.83.
Lahan Kritis Yang Direhabilitas di Provinsi Sumatera Selatan

No	Pelaksana	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemegang Kewajiban IPPKH	UPTD KPH Wil.IV Sungai Lumpur-Riding, UPTD KPH Wil. V Lempuing-Mesuji, UPTD KPH Wil. VI Bukit Nanti- Martapura, UTPD KPH Wil. VII Mekakau Saka, UPTD KPH Wil. VIII Semendo dan Kebun Raya Sriwijaya	863	2020

No	Pelaksana	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
2	Kementerian LHK/Baklai PDASHL Musi	UPTD KPH Wil.IV Sungai Lumpur-Riding dan UPTD KPH Wil. III Palembang-Banyuasin	100	2020

Sumber: Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dishut, 2021 (Data mutakhir)

Jika dilihat dari data diatas terdapat ketimpangan antara jumlah lahan kritis yang ada dengan jumlah lahan kritis yang direhabilitasi. Tidak hanya itu, ada beberapa masalah yang cukup menjadi perhatian pada sektor kehutanan yaitu :

1. Belum optimalnya fungsi kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan sehingga rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keamekaragaman hayati masih kurang.
2. Adanya konflik/permasalahan lahan dan permukiman masyarakat dalam kawasan hutan, luasan penyelesaian konflik lahan dan permukiman dalam kawasan hutan yang masih rendah.

Hal-hal tersebut menjadi fokus bagi Dinas Kehutanan dalam melaksanakan pembangunan pada sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan agar permasalahan diatas dapat teratasi.

5) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Bila dilihat dari kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Selatan dari Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 72,35 triliun turun menjadi Rp. 69,76 triliun namun pada tahun 2017-2019 kembali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi pada tahun 2020 kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB kembali turun menjadi Rp 83.80 triliun, dimana penurunan ini cukup signifikan dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian meningkat menjadi Rp 97.95 triliun, Pada tahun 2021 sektor Pertambangan dan Penggalian yang paling besar kontribusinya terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian adalah

Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas dan panas Bumi yaitu sebesar Rp. 37.89 triliun, Sub Sektor Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar Rp. 32.80 triliun dan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar Rp. 27.29 triliun.

Tabel 2.84.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B. Pertambangan dan Penggalian	72.348,62	69.757,68	73.673,20	84.939,77	92.166,09	83.796,10	97.933,56
1. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	32.011,41	29.107,72	29.363,87	34.118,38	38.755,10	32.291,80	37.886,47
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	20.495,11	19.379,67	21.363,26	25.651,14	27.803,16	24.970,98	32.764,28
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	19.842,09	21.270,28	22.946,07	25.170,25	26.973,95	26.533,32	27.282,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel 2022

Disamping kontribusi PDRB yang cukup besar, sektor pertambangan juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
2. Belum maksimalnya pengelolaan pertambangan minerba. Nilai PNBP pertambangan yang masih rendah.
3. Belum maksimalnya penerimaan daerah sektor ESDM, baik dari Nilai PNBP minyak bumi maupun PNBP gas bumi.

Capaian sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada kurun waktu 2014-2019 sangat baik. Jumlah produksi hasil tambang batubara Sumatera Selatan selama kurun waktu 2014-2019 mengalami peningkatan dari 24,63 juta ton tahun 2014 meningkat

menjadi 54,83 juta ton ditahun 2019. Dengan target peningkatan produksi batubara yang akan semakin meningkat di tahun-tahun kedepan maka fungsi pengawasan dan peran dari Inspektur Pertambangan perlu untuk lebih ditingkatkan. Rasio elektrifikasi juga mengalami peningkatan dari 73,86 persen tahun 2014 meningkat menjadi 96,86 persen ditahun 2019, begitu juga dengan rasio desa berlistrik dari 92,96 persen tahun 2014 meningkat menjadi 98,12 persen di tahun 2019, jumlah pasokan listrik mengalami peningkatan dari 1.246,73 MW pada tahun 2015 naik menjadi 2.065,19 MW pada tahun 2017-2019, persentase desa dengan akses listrik meningkat dari 92,90 tahun 2014 menjadi 98,12 persen ditahun 2019.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2014-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Hasil Tambang Batubara	Juta Ton	24,63	24,37	24,37	39,60	49,49	54,83	49,04	65,79
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	73,86	80,88	83,82	87,61	92,64	96,86	98,71	99,27
3	Rasio Desa Berlistrik	Persen	92,96	94,28	94,96	97,13	97,75	98,12	98,64	98,98
4	Jumlah Pasokan Listrik	(MW)	-	1.246,73	2.051,19	2.065,19	2.065,19	2.065,19	2.065,19	2.068,86
5	Persentase Desa Dengan Akses Listrik	Persen	92,90	94,28	95,00	97,13	97,75	98,12	98,64	98,98
PRODUKSI ENERGI LISTRIK		**GWH**						**8.216,91**		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel 2021 (data mutakhir)

6) Urusan Perdagangan

Kondisi neraca perdagangan di Sumatera Selatan periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 cukup fluktuaktif, bahkan nilai ekspor Sumatera Selatan sempat turun secara drastis dari tahun 2018 s.d 2020 dikarenakan penurunan harga komoditas di pasar dunia, walaupun secara volume barang yang dikirimkan tetap tinggi namun jumlah uang yang diterima turun. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat penurunan nilai ekspor dikarenakan dikarenakan dampak situasi pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian di negara tujuan utama ekspor Sumsel.

Gambar 2.101.
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2021, (000 US$)

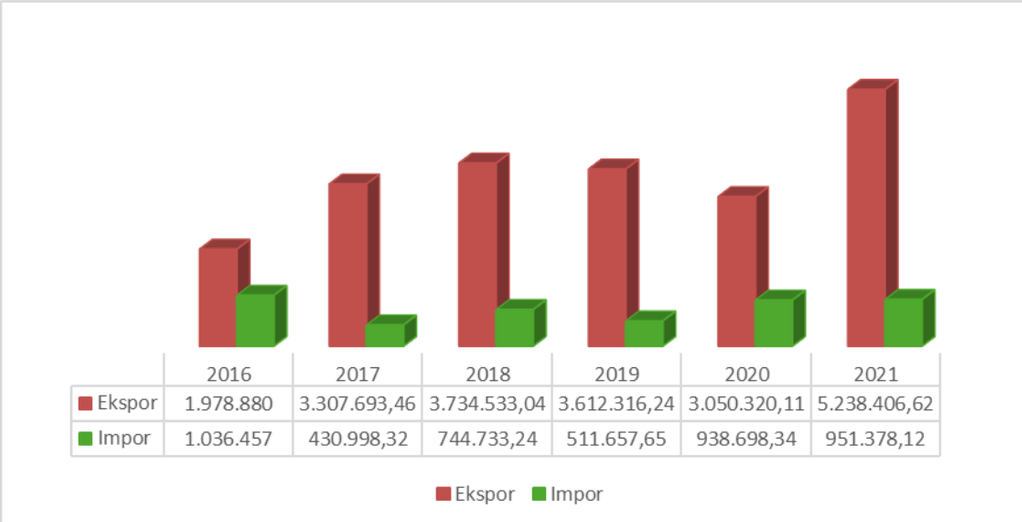

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ekspor	1.978.880	3.307.693,46	3.734.533,04	3.612.316,24	3.050.320,11	5.238.406,62
Impor	1.036.457	430.998,32	744.733,24	511.657,65	938.698,34	951.378,12

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Komponen ekspor dan impor memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada peningkatan capaian pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2013-2021, lebih dari separuh nilai ekspor Sumatera Selatan disumbang oleh produk-produk mentah dan setengah jadi, yaitu karet, bubur kayu/pulp dan batubara. Namun di tahun 2021 nilai ekspor Kembali meningkat cukup pesat, dimana kondisi daerah mulai pulih dari dampak *covid*-19. Hal ini juga memberikan dampak yang positif bagi nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai ekspor nonmigas Sumatera Selatan pada periode Januari - Desember 2021 didominasi oleh komoditas karet remah sebesar US$ 1.577,23 juta, diikuti oleh batu bara yang mencapai nilai sebesar US$ 1.547,14 juta, dan bubur kayu/pulp sebesar US$ 1.210,29 juta.

Tabel 2.86.
Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2021

Jenis Komoditi Ekspor	Nilai FOB (Juta US$)	
	2020	2021
Karet Remah	1 114,13	1 577,23
Bubur Kayu/Pulp	1 082,16	1 210,29
Batubara	579,69	1.547,14
Kertas Tisu	127,53	95,66
Minyak Kelapa Sawit dan Fraksinya	137,50	212,85
Panel Kayu Lainnya	66,50	72,32
Pupuk	90,78	100,78
Karet Buatan	64,58	21,24
Bungkil dan Residu	16,31	22,41
Kimia dasar organic dari hasil pertanian	6,92	24,74
Produk Farmasi	18,70	18,35
Buah-buahan Tahunan	28,77	37,80

Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Sumatera Selatan Tahun 2021, diolah

Selama periode 2019-2020, 10 (sepuluh) negera tujuan utama ekspor Sumsel adalah Malaysia, Vietnam, Kamboja, Jerman, Latvia, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan India. Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 baru dirilis pada September 2022, sehingga capaian nilai ekspor masih menggunakan data capaian 2020.

Tabel 2.87.
Negara Tujuan Utama Ekspor Komoditas Sumatera Selatan

Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor menurut Negara Tujuan (US ($))		
	2019	2020	2021
Malaysia	422 479 912,00	321 913 453,00	299 796 265,00
United States	352 552 907,00	275 205 383,00	467 062 961,00
Cina	1 281 561 664,00	1 166 202 388,00	2 079 880 107,00
India	266 149 321,00	219 300 834,00	237 790 315,00
Japan	67 416 126,00	48 995 789,00	109 836 623,00
Korea, Republic of	165 524 500,00	146 441 628,00	131 539 830,00
Brazil	41 269 247,00	31 633 897,00	33 673 000,00
Germany, Fed.Rep.of	57 604 307,00	60 737 676,00	81 861 833,00
Thailand	66 416 022,00	55 279 127,00	106 341 807,00
Bangladesh	19 719 075,00	16 387 100,00	26 194 825,00
Lainnya	871 623 163,00	708 222 834,00	1 111 154 920,00
Jumlah	3 612 316 243,00	3 050 320 109,00	4 685 132 486,00

Sumber : BPS Sumatera Selatan

Ekspor Sumatera Selatan 2021 mengalami peningkatan sebesar 65,10 persen dibandingkan 2020. Peningkatan nilai ekspor terjadi pada 8 (delapan) negara tujuan utama yaitu Unites State,

Cina, India, Japan, Brazil, Germany, Fed. Rep. of, Thailand, Bangladesh, dan Negara Lainnya. Sementara itu, dua negara tujuan utama lainnya yaitu Malaysia dan Latvia mengalami penurunan nilai ekspor.

Tabel 2.88.
Nilai Impor beberapa komoditi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018-2021

No.	Deskripsi	NILAI CIF (Juta US$)			
		2018	2019	2020	2021
1	Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik	388,13	140,06	450,17	414,91
2	Pupuk	98,17	88,36	93,71	114,48
3	Benda-benda dari Besi dan Baja	14,69	61,51	33,26	23,65
4	Bubur Kayu/Pulp	5,38	32,26	11,78	23,47
5	Besi dan Baja	12,67	19,34	33,26	18,45
6	Plastik dan Barang Plastik	15,65	17,46	14,38	20,58
7	Mesin/Peralatan Listrik	41,45	14,97	166,57	76,91
8	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	-	-	32,95	63,04
9	Bahan Kimia Anorganik	25,39	14,28	16,64	17,81
10	Karet dan barang dari karet	-	-	11,03	34,53
Total 10 Gol Barang Utama		**629,92**	**415,40**	**839,35**	**807,83**
11	Lainnya	84,24	65,30	76,13	90,09
Total Impor Non Migas		**714,16**	**480,70**	**915,49**	**897,92**

Sumber : BPS Prov. Sumsel (data mutakhir)

Nilai impor non migas beberapa komoditi utama pada tahun 2021 secara umum mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2020. Dilihat dari peranan terhadap total impor nonmigas selama periode Januari-Desember 2021 mesin/pesawat mekanik memberikan peranan terbesar yaitu 414,91 Juta US$, dan diikuti Pupuk yang meningkat dari tahun 2020 menjadi sebesar 114,48 Juta US$. Peranan impor sepuluh golongan barang utama mencapai 89,96 persen dari total impor nonmigas, sedikit mengalami kontaksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 92,10 persen.

7) Urusan Perindustrian

Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2021 merupakan sektor penyumbang PDRB (ADHB) tertinggi kedua yaitu sebesar 19,72% atau Rp. 97.928 Milyar. Kontribusi tertinggi pada Sektor Industri Pengolahan adalah subsektor Industri Makanan dan Minuman yaitu

sebesar Rp. 71.742,04 Milyar (14,61%) dan subsektor Industri Logam Dasar sebesar Rp. 9.536,09 Milyar (1,19%).

Sentra IKM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2021 lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang bergerak di bidang Pangan, Sandang Kulit dari Karet, Kimia dan Bahan Bangunan (KKB), Industri Logam dan Jasa serta Kerajinan dan Umum. Industri-industri ini sudah cukup lama berkembang dan dari awal memang berbasis sumberdaya lokal dan sesuai dengan keterampilan tradisional turun menurun masyarakat setempat. Berbagai kegiatan dan pemberdayaan terhadap industri kecil skala rumah tangga telah lama dilakukan tidak hanya oleh Dinas Perindustrian dan jajarannya, melainkan juga oleh OPD yang terkait dengan produksi bahan bakunya, terutama untuk komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Produksi pangan olahan, pakan dan industri kecil primer lainnya cukup banyak yang telah dibantu dan diberdayakan oleh OPD hulunya.

Tabel 2.89.

Jumlah Industri Kecil Formal di Sumatera Selatan Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PANGAN			SANDANG DAN KULIT DARI KARET			KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN (KBB)			LOGAM DAN JASA			KERAJINAN DAN UMUM (KRAUM)			JUMLAH TOTAL PER KAB/ KOTA		
		UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)	UU	TK (Org)	INVESTASI (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PALEMBANG	616	4.517	15.501.609	299	3.246	8.509.460	527	3.752	12.647.252	549	3280	14.278.705	125	1.751	2.143.512	2.116	16.546	53.080.538
2	OGAN ILIR	216	1.895	7.236.500	86	1.383	1.803.100	156	630	6.744.055	120	1.476	4.630.350	47	255	1.858.600	625	5.639	22.272.605
3	OKI	238	795	4.865.700	6	18	270.000	180	985	3.427.360	37	155	692.400	10	48	108.500	471	2.001	9.363.960
4	BANYUASIN	137	1378	5.202.750	7	32	136.000	370	3.969	14.087.570	40	264	2.016.511	10	53	260.000	564	5.696	21.702.831
5	MUBA	264	941	5.600.800	105	291	1.896.150	570	2.443	18.358.066	656	1.343	15.097.740	23	56	500.000	1.618	5.074	41.452.756
6	PRABUMULIH	172	509	4.437.500	53	298	1.059.000	173	681	4.545.500	122	429	6.045.500	23	61	541.000	543	1.978	16.628.500
7	MUARA ENIM	537	1.475	9.067.240	89	240	1.460.000	267	1.277	12.003.811	431	542	7.116.046	62	209	2.127.352	1.386	3.743	31.774.449
8	OKU	109	489	1.849.605	11	68	304.967	316	1.572	9.014.310	111	431	2.765.255	25	107	456.364	572	2.667	14.390.501
9	OKU TIMUR	1.243	3.772	66.764.350	4	9	217.000	185	1.114	8.315.000	115	286	6.069.500	2	10	22.500	1.549	5.191	81.388.350
10	OKU SELATAN	419	1.082	11.395.000	12	56	354.050	103	520	4.481.000	78	215	2.423.000	3	11	54.000	615	1.884	18.707.050
11	LAHAT	278	994	10.900.000	27	88	760.000	186	1.370	9.166.000	143	577	5.093.000	8	76	281.000	642	3.105	26.200.000
12	PAGAR ALAM	655	1.856	17.307.071	94	209	2.660.700	127	355	3.141.447	288	675	8.054.460	68	157	2.095.600	1.232	3.252	33.259.278
13	EMPAT LAWANG	79	372	3.389.255	1	10	80.000	32	201	620.000	18	49	563.000	6	15	30.000	136	647	4.682.255
14	MUSI RAWAS	237	785	6.016.575	6	23	209.000	170	962	4.465.640	79	439	2.203.100	22	241	690.000	514	2.450	13.584.315
15	LUBUK LINGGA	238	1.041	9.322.205	40	162	2.791.325	183	969	5.572.330	192	722	5.855.712	49	184	1.310.506	702	3.078	24.852.078
16	PALI	106	281	2.633.370	5	25	180.000	32	158	891.212	41	151	1.131.012	11	28	332.000	195	643	5.167.594
17	MURATARA	25	112	579.200	104	208	1.985.676	51	195	1.006.111	27	89	753.710	41	84	537.900	248	688	4.862.597
	JUMLAH	5.569	22.294	182.068.730	949	6.366	24.676.428	3.628	21.153	118.486.664	3.047	11.123	84.789.001	535	3.346	13.348.834	13.728	64.282	423.369.657

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHK pertumbuhan lapangan usaha sektor Industri Pengolahan secara keseluruhan sebesar 0,69 persen, sub sektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional merupakan sub sektor yang tumbuh tertinggi pertama yaitu sebesar 3,81 persen disusul sub sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan

dan Sejenisnya sebesar 2,23 persen, sub sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi sebesar 1,60 persen. Sub sektor industry Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 1,57 persen.

Berdasarkan analisa potensi, industri sandang yang mempunyai banyak ragam (songket, jumputan dan tajung) mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan sentuhan pembinaan pada IKM dan pengrajin-pengrajin serta promosi yang baik dengan didukung even-even olahraga berskala internasional dan even pariwisata yang masif maka akan menaikkan angka pertumbuhannya.

Tabel 2.90.
Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen) Tahun 2016-2021

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Pengolahan		**18,94**	**19,56**	**19,52**	**19,35**	**19,72**	**19,52**
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	4,75	4,52	4,20	3,96	3,81	0
2	Industri Makanan dan Minuman	7,71	8,67	9,24	9,51	9,89	14,61
3	Pengolahan Tembakau	0	0	0	0	0	0,27
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0	0	0,05
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,19	0,17	0,17	0,20	0,20	0,22
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,30	1,28	1,26	1,30	1,37	0,29
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,67	1,52	1,40	1,33	1,39	0,53
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,62	2,73	2,60	2,42	2,42	1,19
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
11	Industri Logam Dasar	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	1,66
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,17
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0	0	0	0	0	0,06
14	Industri Alat Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
15	Industri Furnitur	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,09
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,01
Industri Pengolahan		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Sumsel Tahun

8) Urusan Transmigrasi

Penempatan transmigran di Sumatera Selatan telah berlangsung selama 80 tahun bila dihitung dari pertama kali Belanda/Kolonial melaksanakan kolonisasi, yaitu pada tahun 1937 hingga tahun 2017. Transmigran yang telah ditempatkan hingga tahun 2021 telah mencapai 993.906 jiwa yang terdiri dari 178.429 KK dan 734.012 jiwa dari Penempatan Transmigrasi Asal (PTA) dan sebesar 57.498 KK dan 259.894 jiwa dari Penempatan Transmigrasi Setempat.

Tabel 2.91.
Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2021

No	Kabupaten	Penempatan Transmigrasi Asal		Penempatan Transmigrasi Setempat		Jumlah	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Musi Banyuasin	24.872	107.464	13.908	61.565	38.780	169.029
2	Banyuasin	45.989	188.087	9.978	47.160	55.967	235.247
3	Musi Rawas	19.490	77.836	5.881	27.355	25.371	105.191
4	Lahat	6.313	26.538	2.831	12.103	9.144	38.641
5	Empat Lawang	517	2.151	198	904	715	3.055
6	Muara Enim	6.403	24.540	5.000	24.577	11.403	49.117
7	OKI	26.182	104.894	12.324	55.560	38.506	160.454
8	OKU	6.016	25.461	2.986	13.385	9.002	38.846
9	OKU Selatan	-	-	300	1.208	300	1.208
10	OKU Timur	42.017	174.889	3.272	12.629	45.289	187.518
11	Ogan Ilir	630	2.152	820	3.448	1.450	5.600
		178.429	734.012	57.498	259.894	235.927	993.906

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel, 2022

Adapun kawasan transmigrasi yang tercatat di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 10 kawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Rencana Kawasan Transmigrasi yang Telah Ditetapkan
Di Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA KAWASAN TRANSMIGRASI	KABUPATEN	NO PENETAPAN	LUAS KAWASAN (Ha)	JUMLAH KECAMATAN/ DESA
1.	Belitang	Ogan Komering Ulu Timur	No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016 No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	109.617,61	13/151
2.	Telang	Banyuasin	No. 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	83.136,19	4/30
3.	Karang Agung Ilir	Banyuasin	No. 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	55.480,57	1/11
4.	Kikim	Lahat	No. 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	165.549,48	6/92
5.	Parit Rambutan	Ogan Ilir	No. 104 Tahun 2017 Tanggal 3 November 2017	19.281,76	3/16
6.	Simpang Rimau	Musi Rawas	No. 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017	145.636,11	2/44
7.	PETATA (Penukal Abab, Penukal Utara Dan Talang Ubi)	Penukal Abab Lematang Ilir	No. 71 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018	66.693,56	4/40
8.	Muara Kuang	Ogan Ilir	No. 115 Tahun 2018 Tanggal 5 Desember 2018	27.400	1/15
9.	Air Balui - Jud Nganti	Musi Banyuasin	No. 87 Tahun 2019 Tanggal 16 Agustus 2019	51.450	1/18
10.	Tulung Selapan	Ogan Komering Ilir	Masih dalam proses di Kementerian Desa, PDT DAN Transmigrasi	21.650	1/?

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel, 2022

Selain dukungan anggaran pemerintah provinsi yang masih minim, masih ada beberapa permasalahan yang krusial yang terjadi perihal masalah pertahanan dalam penyelengaraan transmigrasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan antara lain kurangnya infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan permukiman di kawasan transmigrasi dan permasalahan sengketa pertanahan terkait transmigrasi. Sampai dengan tahun 2021, masih ada permasalahan sengketa pertanahan di 5 Kabupaten terdiri dari permasalahan tumpang tindih dengan HGU perusahaan di Kabupaten Lahat, Banyuasin dan Musi Banyuasin serta permasalahan tumpang tindih dengan kawasan hutan di Kabupaten OKI, Musi Banyuasin dan Musi Rawas. Hingga saat ini telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan di lahan kawasan transmigrasi baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota terkait dan Provinsi melalui upaya mediasi dan tinjauan ke lapangan.

Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi yang berkekuatan hukum /berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Agraria/Badan Pertanahan Nasional belum seluruhnya diterima oleh warga transmigrasi, hal ini menjadi beban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Transmigran setiap tahun sangat rendah dikarenakan keterbatasan anggaran, sampai tahun 2021 beban tunggakan penerbitan SHM atas tanah transmigran dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.93.
Beban Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

NO.	KABUPATEN	JUMLAH UPT	TARGET (PSL)	REALISASI (PSL)	SISA (PSL)	KET
1	MUSI BANYUASIN	84	106,751	102,872	3,679	-
2	BANYUASIN	131	169,966	168,986	980	-
3	OGAN KOMERING ILIR	97	99,748	98,095	1,653	-
4	MUSI RAWAS	68	49,859	47,430	2,429	-
5	OGAN KOMERING ULU	22	28,730	28,411	419	-
6	OKU TIMUR	138	144,595	142,727	1,868	-
7	LAHAT	39	31,202	29,206	1,996	-
8	MUARA ENIM	34	25,680	25,680	-	-
9	OGAN ILIR	9	5,050	4,411	639	-
10	OKU SELATAN	4	1,680	-	1,680	-
11	EMPAT LAWANG	4	1,279	1,246	33	-
12	PALI	3	1,378	766	612	-
13	PRABUMULIH	2	1,680	1,680	-	-
14	MUSI RAWAS UTARA	17	12,936	11,513	1,423	-
15.	LUBUK LINGGAU	1	300	300	-	-
	JUMLAH TOTAL	**653**	**680,834**	**663,323**	**17,411**	**-**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Sumatera Selatan Tahun 2022

C. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Era reformasi telah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan melalui otonomi daerah, tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mencapai prestasi, khususnya dalam pelayanan publik, termasuk di bidang perencanaan.

Untuk memastikan mutu pelayanan yang dihasilkan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2015

menggunakan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan standar yang diakui secara internasional dan memiliki sertifikasi. Standar ini merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan mutu dalam menerapkan ***Total Quality Control*** yang mampu menjawab perkembangan globalisasi dimana tujuan akhirnya adalah mencapai efektifitas dan efisiensi organisasi. Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang didapat BAPPEDA mulai tahun 2015 sampai dengan 2017 bukanlah suatu yang didapat dalam sekejap, namun hasil dari usaha perbaikan oleh semua pejabat maupun personil di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Sertifikasi ISO 9001:2008 yang didapat BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk pengakuan dari pihak independen terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

Gambar 2.102.
Sertifikat ISO yang diterima Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan

kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik. Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan.

Penganugerahan Pangripta Nusantara kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terbaik bertujuan mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; serta sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.

Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS sejak tahun 2011. Prestasi Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011 : Provinsi Terbaik I (Penilaian RPJMD)
2. Tahun 2012 : Provinsi Terbaik III
3. Tahun 2013 : Provinsi Terbaik I APN Pratama Kelompok B
4. Tahun 2014 : Provinsi Terbaik II APN Utama Kelompok B
5. Tahun 2017 : Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik III
6. Tahun 2018 : Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik II
7. Tahun 2019 : Kategori Provinsi dengan Perecanaan dan Pencapaian Terbaik III

2) Urusan Keuangan

Pada urusan keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan yang menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Dengan demikian Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil memperoleh predikat WTP tersebut lima tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2019. Selain pemerintah provinsi, 17 pemerintah

kabupaten/kota di Sumatera Selatan juga mendapatkan opini WTP pada tahun 2019 ini (100%). Opini WTP ini merupakan penghargaan Tertinggi Akuntabilitas Keuangan dari Kementerian Keuangan RI.

3) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Kepegawaian

Pada tahun 2021 Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Struktural yaitu terlaksananya pengisian jabatan melalui Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), target sebanyak 56 JPTP realisasi sebanyak 50 JPTP atau 89,28%. Untuk Mutasi Dan Promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, target sebanyak 100% realisasi sebanyak 94,81%. Dengan rincian target nomenklatur sebanyak 1.331 jabatan dan realisasi yang terisi sebanyak 1.262 jabatan. Untuk pemangku jabatan fungsional tertentu yang terisi pada instansi target sebanyak 10.797 orang realisasi sebanyak 11.319 orang atau 104,84%

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2021 Untuk urusan Pendidikan dan Pelatihan, capaian kinerja BPSDMD Prov. Sumsel ada 2 (dua) Indikator kinerja OPD yang tercantum dalam Target capaian RPJMD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, kedua target tersebut merupakan target kumulatif dari tahun sebelumnya dan untuk tahun 2021 realisasi target capaian RPJMD BPSDMD Prov. Sumsel yaitu sebagai berikut:

1. Untuk indikator pertama yaitu Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial, dari target 87% terealisasi sebesar 90% sehingga persentase capaian mencapai 103%.
2. Untuk indikator kedua yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, dari target 55% terealisasi sebesar 55% sehingga capaiannya mencapai 100%. Hal ini juga dikarenakan adanya kegiatan kediklatan dengan menggunakan sumber dana APBD dan BLUD.

Tabel 2.94.
Capaian Target Indikator Kinerja OPD Urusan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi	Sumber Dana
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	Persen	87%	90%	BLUD
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintah	Persen	55%	55%	APBD dan BLUD

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

4) Urusan Pengawasan

Salah satu alat ukur akuntabilitas adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, predikat SAKIP Provinsi Sumatera Selatan yang diterima terus meningkat dan dapat mencapai Kategori A. Tetapi pada Tahun 2018 terjadi sedikit penurunan Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan. Hingga pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan tetap berupaya berkomitmen dan memperbaiki Capaian Nilai SAKIP agar dapat Kembali mencapai Kategori A.

Tabel 2.95.
Nilai LKJIP (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021

Tahun	Nilai Angka	Kategori	Predikat
2013	68,20	B	Baik
2014	70,66	B	Baik
2015	75,11	BB	Sangat Baik
2016	76,19	BB	Sangat Baik
2017	80,01	A	Memuaskan
2018	78,71	BB	Memuaskan
2019	78,84	BB	Memuaskan
2020	78,98	BB	Memuaskan
2021	79,76	BB	Memuaskan

Sumber : LKPJ Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel, 2022

Secara spesifik, peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (cascading) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal. Dimana 3 (tiga) hal tersebut harus dijadikan prinsip bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai Predikat A pada SAKIP Provinsi.

5) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kebutuhan akan lembaga Litbang IPTEK adalah sejalan dengan konstruksi pembangunan Sumatera Selatan yang dirancang berbasis Iptek. Keberadaan Balitbangda dan Perguruan Tinggi, diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi dan inovasi yang dapat digunakan untuk mendukung Perangkat Daerah Provinsi Sumsel dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan – kebutuhan pelaku usaha/dunia usaha. Berdasarkan data Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh sejumlah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Akademisi, Pelaku Usaha serta masyarakat umum berjumlah 370 Inovasi. Disamping itu Balitbangda, Perguruan Tinggi dan lembaga litbang lainnya diharapkan dapat menjadi leading sektor dalam pengembangan iptek dan inovasi di Sumatera Selatan. Salah satunya dengan cara pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pada Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan sebagai Provinsi Terinovatif peringkat Pertama Tingkat Nasional dengan skor Indeks Inovasi Daerah 79.510.

Hasil-hasil riset dan pengembangan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ekonomi. Untuk itu diperlukan diseminasi atau sosialisasi terhadap inovasi-inovasi yang telah dihasilkan oleh para inovator. Pada tahun 2021 Balitbangda telah menginisiasi satu program acara yaitu Podcast *"One Day One Innovation"* guna untuk menyebarluaskan dan menginformasikan Inovasi-Inovasi yang ada di Sumatera Selatan.

Sejak pertengahan tahun 2019, Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan telah memberlakukan Retribusi Jasa Pengalengan Produk melalui Inkubator Teknologi di Balitbangda Prov. Sumsel. Pendapatan Retribusi Jasa Pengalengan Produk pada tahun 2021 mencapai Rp. 3.600.000.

a. Kebun Raya Siwijaya

Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan berlokasi di Jalan Patra Tani, Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Diresmikan pada tanggal 27 Juli 2018. Gubernur Sumsel meresmikan Kebun raya yang perencanaan pembangunannya telah dimulai sejak 2010 lalu turut menggandeng LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai rekan dalam pelestarian lingkungan.

Kebun Raya Sriwijaya dibangun diatas lahan seluah 100 hektar yang berupa lahan gambut basah. Kebun Raya Sriwijaya merupakan kebun raya pertama di Indonesia yang berlokasi di lahan gambut, sekaligus kebun raya terluas yang ada di Indonesia. Kebun Raya sriwijaya dibangun dengan dukungan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.485/Menhut-II/2012 tentang penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian dan pengembangan serta pendidikan lingkungan.

Untuk meningkatkan pelayanan Kebun Raya Sriwijaya Prov. Sumsel telah melakukan peningkatan dan penambahan sarana prasarana /fasilitasi yang ada baik dibidang penelitian, edukasi, dan wisata di Kebun Raya Sriwijaya Prov. Sumsel antara lain yaitu Rumah Pewarna Alami, Taman Tematik, Spot Foto, Perbaikan Sarana & Prasarana Penunjang Lainnya.

Sejak pertengahan tahun 2019, Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan telah memberlakukan Retribusi Pelayanan di UPTB Kebun Raya Sriwijaya. Retribusi ini diperuntukan untuk beberapa fasilitas dan pelayanan yang ada di Kebun Raya Sriwijaya. Pendapatan Retribusi Kebun Raya Sriwijaya pada tahun 2021 mencapai Rp. 12.021.000.

Gambar 2.103.
Kebun Raya Sriwijaya

b. Science Techno Park (STP) Sumsel

Science Techno Park (STP) Sumatera Selatan merupakan revitalisasi *Agrotecnopark* (ATP) Palembang. *Science Techno Park (*STP) dikembangkan pada lokasi ATP I yang terletak di Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir seluas 100 hektar dan ATP 3 terletak di Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim seluas 14 hektar.

Science Techno Park (STP) diharapkan dapat menjadi Kawasan Peternakan Terpadu Berbasis Inovasi Teknologi, yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan industri peternakan yang berdaya saing.

Gambar 2.104.
Kebun Raya Sriwijaya I

Gambar 2.105.
Pabrik Pakan Ternak

Sejak pertengahan tahun 2019, UPTB *Science Techno Park* Provinsi Sumatera Selatan telah memberlakukan Retribusi Pelayanan di UPTB *Science Techno Park* Provinsi Sumatera Selatan. Retribusi ini diperuntukan untuk beberapa fasilitas dan pelayanan yang ada di UPTB STP. Pendapatan Retribusi STP pada tahun 2021 mencapai Rp. 28.620.000.

6) Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pelayanan publik dan Aspirasi Masyarakat meliputi kegiatan; persiapan, pencatatan, dan mengatur penyampaian aspirasi langsung (Demonstrasi), tertulis, dan melalui media cetak dan elektronik kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.96.
Kegiatan Demo/Unjuk Rasa, Audiensi dan Aspirasi Tertulis
2014-2021

No	Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1.	Aspirasi tertulis	128	173	192	35	124	102	102	56	912
2.	Demo/ Unjuk rasa	26	33	25	24	22	25	25	38	218
3.	Audiensi	40	43	48	80	49	20	24	89	393

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain memberikan Pelayanan Administrasif dalam hal ini memfasilitasi Rapat-Rapat Anggota DPRD berupa Pelayanan Persidangan berikut rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014 s.d 2021 yang telah difasilitasi oleh Sekeratriat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.97.
Rapat-Rapat Komisi dan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2021

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rapat internal (kali pertemuan)	87	183	150	145	146	27	134	127
2.	Rapat Dengar Pendapat	3	49	16	25	9	27	10	41
3.	Rapat Kerja	75	227	117	124	41	0	89	103
4.	Rapat lintas Komisi	0	0	0	50	0	0	0	0
5.	Kunker Dalam Provinsi (dalam hari)	26	21	56	68	58	15	170	261
6.	Kunker Luar Provinsi (dalam hari)	85	152	112	128	143	17	118	99
7.	Rapat pansus	11	0	42	50	37	3	4	8
8.	Kunker Khusus	-	-	-	-	1	0	1	0
9.	Kunker Pansus	-	18	45	52	19	9	36	33

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (data mutakhir)

Tabel 2.98.
Rapat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2021

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Badan Musyawarah	8	9	9	11	13	9	7	9
2.	Badan Anggaran	10	8	9	9	11	12	7	9
3.	Badan Kehormatan	1	9	5	4	2	2	1	1
4.	Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi	6	11	7	10	7	5	5	17
5.	Rapat Pimpinan	30	30	31	51	21	44	15	11

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel 2.99.
Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2021

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rapat paripurna/Paripurna Istimewa	30	30	31	51	48	39	43	44

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2021 (data mutakhir)

Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu

Persentase risalah rapat yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan selama tahun 2014-2021 diperoleh berdasarkan hasil Rapat-Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang telah dirangkum dalam bentuk risalah, selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat. Pencapaian

indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Realisasi capaian indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu selama tahun 2014 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.100.

Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu Tahun 2014 – 2021

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase risalah rapat yang tepat waktu.	%	97,30	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Selama tahun 2014 s.d 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi penyelesaian sejumlah produk hukum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.101.

Fasilitasi Penyelesaian Produk Hukum Tahun 2014 – 2021

No	Produk Hukum	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peraturan Daerah	21	11	18	21	8	8	12	13
2.	Keputusan DPRD	15	10	11	22	50	16	16	19
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	7	11	7	9	6	4	7	8
4.	Keputusan Bersama	13	11	10	14	10	3	8	8
	Jumlah	56	43	46	61	74	31	43	48

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2022 rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.102.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Total Konsumsi Rumah Tangga	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (TW 1)
1. ADHB (*Triliun Rp*)	208,21	222,49	240,98	257,28	277,77	296,90	296,56	307,66	80,38
2. ADHK (*Triliun Rp*)	156,43	163,30	170,53	175,67	183,42	190,64	186,94	190,56	49,17
3. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	67,95	67,06	68,10	67,19	66,23	65,45	64,69	62,58	62,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Nilai Tukar Petani

Sebagian besar masyarakat Provinsi Sumatera Selatan adalah petani sehingga memerlukan perhatian agar Nilai Tukar Petani dapat terus meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator pengukur kemampuan tukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya dan untuk keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

Gambar 2.106.

Nilai Tukar Petani Tahun 2015-2021

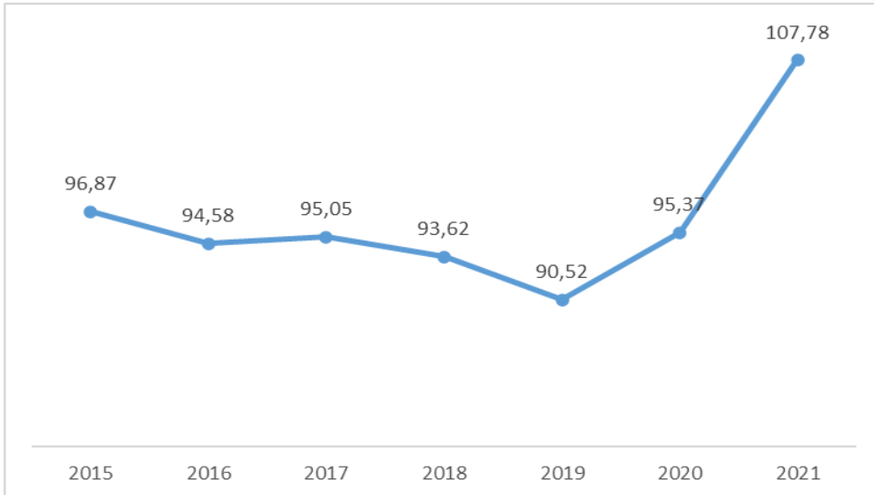

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari tahun 2015-2020 perkembangan NTP Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 tercatat sebesar 107,78 atau naik sebesar 13,01 persen dibanding NTP tahun sebelumnya. NTP<100 berarti petani mengalami defisit, kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021 dipengaruhi oleh naiknya NTP pada Sub sektor Perkebunan 21,46 persen, Sub sektor Peternakan 1,01 persen dan Sub Sektor Nelayan dan Pembudidaya Ikan 2,85 persen. Sedangkan NTP pada subsektor Tanaman pangan dan Hortikultura mengalami penurunan.

NTP Umum Bila dilihat trennya pada 2015-2021 mengalami fluktuatif penurunan dari tahun 2015 sebesar 96,87 turun menjadi 90,52 di tahun 2019, kembali meningkat menjadi 95,37 di tahun 2020 dan ditahun 2021 sebesar 107,78 atau sebesar 13,01 persen.Perkembangan Nilai Tukar Petani per sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103.
Perkembangan Nilai Tukar Petani

Tahun	NTP Umum	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perke-bunan	Peter-nakan	Peri-kanan
2015	96,87	98,62	109,04	91,24	104,26	98,58
2016	94,58	100,08	111,99	84,9	104,75	97,91
2017	95,05	99,76	107,24	87,57	104,26	97,62
2018	93,62	99,72	105,32	84,37	105,02	100,05
2019	90,52	100,38	104,59	77,09	107,49	99,27
2020	95,37	98,28	91,59	94,25	101,94	97,47
2021	107,78	90,30	89,13	114,48	102,97	100,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pengeluaran per Kapita Non Makanan

Pengeluaran per kapita kelompok non makanan mengalami tren penurunan dalam kurun waktu 2018-2021. Selama tiga tahun terakhir, persentase pengeluaran per kapita non makanan lebih kecil daripada persentase pengeluaran per kapita untuk kelompok makanan. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan non makanan tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104.
Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan Tahun 2018-2021

No	Pengeluaran Non Makanan	2018	2019	2020	2021
1.	Total Pengeluaran Per Kapita Sebulan Non Makanan	466.781	459.890	486.894	517.375
2.	Total pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan	970.078	958.819	1.022.030	579.031
3.	Rasio	48,12	47,96	47,64	89, 35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan pergerakan dan aktivitas orang, barang dan jasa. Salah satu infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas manusia maupun aktivitas perekonomian adalah jalan. Keberadaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung

pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk menjamin aksesibilitas antar wilayah.

Total panjang jalan sampai dengan tahun 2021 sebesar 18.769,44 km, dengan komposisi Jalan Nasional sepanjang 1.600,18 km (8,53%), Jalan Provinsi sepanjang 1.513,66 Km (8.06%) dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 15.655,58 Km (83,41%).

Tabel 2.105.
Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Nasional (Km)	%	Panjang Jalan Provinsi (Km)	%	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	%	Total Panjang Jalan (Km)	%
OKU	131,00	10,19	123,02	9,57	1.031,13	80,23	1.285,15	100
OKI	109,60	4,92	79,10	3,55	2.037,11	91,52	2.225,81	100
Muara Enim	178,37	10,98	171,21	10,54	1.275,32	78,49	1.624,91	100
Lahat	166,27	10,37	98,28	6,13	1.339,15	83,50	1.603,71	100
Musi Rawas	161,06	10,62	45,30	2,99	1.309,71	86,39	1.516,07	100
Musi Banyuasin	310,59	21,81	39,85	2,80	1.073,77	75,39	1.424,21	100
Banyuasin	118,96	8,71	48,51	3,55	1.198,60	87,74	1.366,07	100
OKU Selatan	0,00	0,00	191,23	21,26	708,13	78,74	899,36	100
OKU Timur	7,30	0,64	205,75	17,96	932,57	81,40	1.145,62	100
Ogan Ilir	64,15	5,85	156,75	14,29	876,00	79,86	1.096,90	100
Empat Lawang	35,38	3,11	117,56	10,33	984,60	86,56	1.137,54	100
Muratara	57,90	9,78	33,75	5,70	500,24	84,52	591,89	100
PALI	0,00	0,00	108,30	18,31	483,31	81,69	591,61	100
Palembang	96,20	11,50	58,93	7,04	681,75	81,46	836,88	100
Prabumulih	84,13	17,25	11,34	2,33	392,13	80,42	487,60	100
Pagar Alam	58,82	9,54	9,58	1,55	548,25	88,91	616,65	100
Lubuk Linggau	20,45	6,40	15,20	4,76	283,81	88,84	319,46	100
Sumatera Selatan	1.600,18	8,53	1.513,66	8,06	15.655,58	83,41	18.769,44	100

Sumber: BBPJN III, Dinas PU Bina Marga Sumsel dan Data DAK Kab/Kota, 2022

Dilihat dari kondisi kemantapan jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2017-2021 dapat dikatakan bahwa kondisi jalan mantap mengalami kenaikan yaitu mencapai 93,94% (atau sepanjang 1.421.920 km) di tahun 2021, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 92,02% dan tahun 2019 yang sebesar 79,17%, meskipun sempat mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu dari 74,2% menjadi 61,22%. Dengan demikian, pada tahun 2021 masih ada jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang belum dalam kondisi mantap sebesar 6,06% dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang sepanjang 91,74 Km.

Rumah Tangga Bersanitasi

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan fasilitas terhadap akses sanitasi layak oleh rumah

tangga penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Pemerintah Sumatera Selatan harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, guna mencapai target RPJMD Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 92,96 persen dan target RPJMN tahun 2024 sebesar 90 persen. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Air Limbah Domestik Regional lintas Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi yaitu jarak antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya IPAL Regional dan tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota. meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota.

Gambar 2.107.
Capaian Pembangunan Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2021

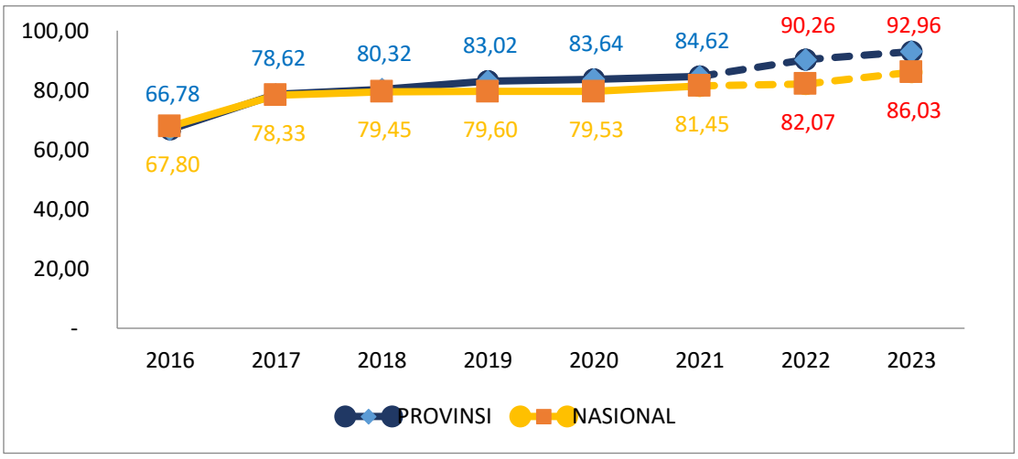

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2022

Secara keseluruhan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk sudah cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar 66,7 persen dan meningkat menjadi 84,62 persen di tahun 2021.

Tabel 2.106.
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Tahun 2016 – 2021

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ogan Komering Ulu	74,46	91,41	90,48	93,15	92,10	90,48
2	Ogan Komering Ilir	55,41	68,19	65,94	74,78	73,71	74,39
3	Muara Enim	72,08	91,68	90,75	91,47	94,75	92,95
4	Lahat	53,47	68,65	75,89	81,14	85,79	82,85
5	Musi Rawas	61,98	63,42	74,43	71,70	74,33	67,04
6	Musi Banyuasin	64,35	58,91	72,70	73,14	76,57	80,41
7	Banyuasin	57,32	73,35	66,08	66,34	76,70	72,16
8	OKU Selatan	44,32	60,54	72,53	73,41	71,13	76,74
9	OKU Timur	72,39	82,75	81,03	89,09	84,17	87,40
10	Ogan Ilir	73,27	74,86	71,68	82,26	94,56	90,41
11	Empat Lawang	20,68	67,13	82,70	81,39	49,99	75,32
12	PALI	45,34	33,80	98,07	94,91	97,43	97,31
13	Muratara	81,40	88,42	95,24	87,23	89,61	90,37
14	Kota Palembang	54,42	92,01	91,77	95,04	93,19	96,15
15	Kota Prabumulih	53,76	74,57	96,87	95,63	95,97	98,13
16	Kota Pagar Alam	89,39	94,79	63,30	59,18	44,39	54,04
17	Kota Lubuk Linggau	92,08	98,54	90,84	92,03	90,35	91,21
Sumatera Selatan		66,78	78,62	80,32	83,02	83,64	84,62

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Berdasarkan kabupaten dan kota, persentase rumah tangga tertinggi dengan akses sanitasi layak pada tahun 2021 terdapat di Kota Prabumulih sebesar 98,13 persen. Sedangkan persentase rumah tangga terendah dengan akses sanitasi layak adalah Kota Pagar Alam sebesar 54,04 persen.

Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih

Salah satu aspek perumahan yang juga sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia adalah air bersih. Akses rumah tangga ke sumber air bersih yang layak di Sumatera Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun pada periode tahun 2016-2021. Pada tahun 2016 sebesar 63,77 persen dan meningkat menjadi 84,70 persen tahun 2021. Akses terhadap air bersih harus terus ditingkatkan karena angka tersebut masih jauh di bawah capaian nasional yaitu 90,21 persen pada tahun 2021.

Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan persentase daerah dengan sumber air bersih terbesar terdapat di Kota Palembang sebesar 97,43 persen sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air bersih terkecil terdapat di Kabupaten Empat Lawang yaitu 51,87 persen. Rendahnya persentase pengguna air bersih di Kabupaten Empat Lawang menjadi perhatian utama pemerintah karena masih banyaknya penduduk yang tidak atau belum mendapatkan akses terhadap air bersih karena air bersih merupakan salah satu kunci kesehatan masyarakat. Target RPJMN tahun 2024 adalah akses terhadap air bersih dapat mencapai 100 persen. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAM Regional/ Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yaitu jaringan air bersih perpipaan yang melintasi dua Kabupaten/Kota dimana untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu jarak antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya SPAM Regional.

Tabel 2.107.
Persentase Akses Air Bersih di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2021

No	WILAYAH	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ogan Komering Ulu	64,15	64,20	61,03	83,05	78,98	81,78
2	Ogan Komering Ilir	60,44	64,50	60,54	72,45	84,23	79,02
3	Muara Enim	70,43	60,47	64,78	85,74	82,15	89,48
4	Lahat	54,85	43,89	44,96	67,89	67,44	81,67
5	Musi Rawas	59,49	57,14	59,82	80,42	77,08	83,15
6	Musi Banyuasin	62,15	66,19	73,56	80,75	84,72	79,37
7	Banyuasin	66,29	73,09	75,14	75,45	70,38	76,97
8	OKU Selatan	29,28	38,31	45,92	66,35	67,75	77,12
9	OKU Timur	59,57	61,61	61,14	93,57	89,91	93,32
10	Ogan Ilir	47,96	45,84	48,04	68,19	73,08	72,53
11	Empat Lawang	9,33	18,04	25,31	32,35	31,41	51,87
12	PALI	62,82	50,34	60,47	79,61	83,90	87,49
13	Muratara	50,69	39,09	53,90	72,21	73,24	80,333
14	Kota Palembang	90,34	92,28	89,72	93,92	92,40	97,43
15	Kota Prabumulih	70,93	64,55	70,20	95,82	96,40	93,77
16	Kota Pagar Alam	52,76	54,26	49,83	88,58	88,95	93,16
17	Kota Lubuklinggau	75,18	64,49	62,44	94,60	97,10	96,10
Sumatera Selatan		63,77	64,02	65,31	80,37	80,78	84,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2022

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas

Tabel 2.108.
Tingkat Kriminalitas di Sumatera Selatan Tahun 2015-2020

Indikator	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*)	20.575	20.368	15.728	13.558	12.861	12.189
Jumlah Kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*)	9.261	5.051	10.514	10.144	8.902	9.356
Persentase Penyelesaian Kejahatan (*Clearance Rate*)	45,01	53,60	66,85	74,82	69,22	76,76
Resiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*)	259	250	190	164	156	147
Jumlah kasus narkoba	1.207	1.443	1.640	1.768	1.621	2.554
Jumlah kasus pembunuhan	224	161	132	147	-	77
Jumlah kejahatan seksual	201	264	211	220	-	169
Jumlah kasus penganiayaan	2.629	2.734	2.528	2.043	-	1.708
Jumlah kasus pencurian	10.771	8.587	8.958	5.398	-	723
Jumlah kasus penipuan	3.086	2.939	2.828	1.127	-	1.989

Sumber : Statistik Kriminal, BPS RI 2021 (data mutakhir)

Selama periode 2015-2020 jumlah tindak kriminalitas di Sumatera Selatan cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2020 sebanyak 12.189 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12.861 kasus. Selain itu, resiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*) juga mengalami penurunan, dari 156 pada tahun 2019 turun menjadi 147 pada tahun 2020. Untuk data tahun 2021 akan rilis pada bulan Desember 2022 mendatang.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

Berdasarkan data, penduduk Sumatera Selatan tidak banyak yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi penduduk lulusan SMA ke atas yang angkanya masih dibawah 25 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada persentase penduduk lulusan SD.

Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2.109.
Tingkat Pendidikan Penduduk di Sumatera Selatan
Tahun 2015-2021

Ijazah yang dimiliki	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Tidak Mempunyai Ijazah	17,75	16,18	15,17	17,59	16,33	15,32	13,63
SD/Sederajat	30,64	34,77	32,78	28,12	28,14	27,00	27,87
SLTP/Sederajat	21,69	17,46	21,68	20,99	21,39	20,83	21,18
SLTA/ Sederajat	19,61	20,91	20,94	22,96	22,79	25,32	29,15
Perguruan Tinggi	7,17	7,31	6,34	7,25	8,06	8,16	8,16

Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2022

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tabel 2.110.
Tingkat Ketergantungan Penduduk di Sumatera Selatan
Tahun 2014-2020

Indikator	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)	50,60	50,53	50,22	49,66	49,35	49,22	48,93
Persentase Penduduk Kelompok Umur 0-14	27,79	29,44	29,17	28,73	28,47	27,10	26,68
Persentase Penduduk Kelompok Umur 15-64	68,44	66,43	66,57	66,82	66,96	67,62	67,99
Persentase Penduduk Kelompok Umur +65	3,78	4,13	4,26	4,46	4,57	5,27	5,33

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS RI (data mutakhir)

2.1.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*)

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar tata kelola pelaksanaan.

Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun Tahun 2018-2023. Gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan per Pilar berdasarkan Laporan RAD SDGs tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut.

Pilar I (Pembangunan Sosial)

Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 (lima) tujuan (goal), yaitu Goal 1: Tanpa Kemiskinan, Goal 2: Tanpa Kelaparan, Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Goal 4: Pendidikan Berkualitas, Goal 5: Kesetaraan Gender.

Capaian Sumatera Selatan pada pilar Pembangunan Sosial dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.111.
Capaian TPB Pilar I

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persen	12,66	9,9-10,78	12,36	●
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS; Dinas Kesehatan	Persen	80	90.00	85.2	▶
1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	Persen	n.a	64.00	-	▼
1.3.1 (c)	Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	Orang	330	275	-	▼
1.3.1 (d)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	KPM			-	▼
1.3.1 (e)	Persentase Masyarakat Miskin Menerima Rastra / BPNT	BPS	Persen	20,92	65.70	-	▼
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yangtepat, termasuk keuangan mikro.							
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. (40% Terbawah)	BPS	Persen	66	71.27	82,92	●
1.4.1.(b)	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. (40% Terbawah)	Dinas Kesehatan	Persen	62,7	52.80	71.3	●
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (40% Terbawah)	BPS	Persen	71,38	73.82	70,88	▶
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (40% Terbawah)	BPS	Persen	73,85	60.87	79,02	●
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (40% Terbawah)	BPS	Persen	66,54	62.14	68,58	●
1.4.1.(i)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/sederajat. (40% Terbawah)	BPS	Persen	60,45	57.09	57,95	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran. (40% Terbawah)	BPS	Persen	87,98	85.22	87,99	●
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (40% Terbawah)	BPS	Persen	98,64	100.00	98,87	●
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000.	BPBD	Jiwa	-	PM	5.788	●
1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Kab/Kota	17	17	17	●
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial / BPBD	Orang	PM	1000	6215	●
1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial / BPBD	Orang	PM	50	PM	●
1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas Pendidikan / BPBD	Kab/Kota	PM	8	PM	●
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	Indeks Resiko	139,24	118.11	137.31	●
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	2	●
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA	Rupiah	170M	1.882T	70.048.608.059	▶
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA	Rupiah (Fungsi Pendidikan)	3.457.560	3,314,721	-	▼
			Rupiah (Fungsi Kesehatan)	709.757	996,26	-	
			Rupiah (Fungsi Perlindungan Sosial)	-	116,440	-	
1.c Peningkatan Aset masyarakat miskin							
1.c.1	Kepemilikan Aset (emas,perahu,motor)	BDT	Rumah Tangga	PM	PM	-	▼
1.c.2	Rumah tangga layak huni penduduk miskin	BDT	Rumah Tangga	PM	PM	-	▼
1.d Peningkatan Daya Beli masyarakat miskin							
1.d.1	Pengeluaran konsumsi per kapita per tahun	BPS	Rupiah (Ribu)	12.434 (Mar 2020)	11,134	13,157	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
				11.894 (Sept 2020)			
1.d.2	Besaran garis Kemiskinan	BPS	Rupiah (Ribu)	439.041 (Mar 2020) 441.259 (Sept 2020)	451,368	457.455 (Mar 2021) Dan 463.251 (Sept 2021)	●
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.	PSG 2017; RISKESDAS 2018	Persen	16,3	16.6	15.7	▼
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari.	BPS	Persen	6,75	4.11	-	▼
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	PSG 2017; RISKESDAS 2018	Persen	28,98	28	24.8	▼
2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	PSG 2017; RISKESDAS 2018	Persen	29,8	8.85	20.8	▼
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	PSG 2017; RISKESDAS 2018	Persen	3,2	7.4	7.6	●
				7,4	4.2	-	
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	11,1	19	7.85	▼
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	BPS; Dinas Kesehatan	Persen	52,71	66	59.17	●
2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang di indikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	86,2	97,8	86,1	▶
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nsaional, regional dan internasiona, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimn yg telah disepakati secara internasional							
2.5.1*	Jumlah varietas unggulan tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Varietas / Bibit	n.a	2	2	●
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Jumlah Kematian IBU (AKI)	Dinas Kesehatan	Kasus	128	114	131	●
3.1.2*	Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS; Dinas Kesehatan	Persen	95,30	97	93.87	▶
3.1.2(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	88,83	92.00	94	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Jumlah Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kasus	44	44	31	●
3.2.2*	Jumlah Kematian Neonatal (AKN)	Dinas Kesehatan	Kasus	454	530	411	●
3.2.2 (a)	Jumlah Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Orang	536	438	502	▶
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persen	91,4	95	88.9	▼
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	Persen	0,33	0,2	0.24	●
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Persen	112/100.000 penduduk	341/100.000 penduduk	162/100.000 penduduk	●
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	API per 1000	0,08	<0,25	0.0000034	●
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/ Kota	9	10	11	●
3.3.4 (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	●
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Juta orang (Filariasis)	370,392	0	108	●
			Orang (Kusta)	392	0	223	
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Kab/ Kota	17	17	17	●
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Kab/ Kota	17	17	17	●
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	21,8	12,1	25	▼
3.4.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas Yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kab/ Kota	17	17	17	●
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	1090	450	1282	●
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	40	133	25	▶
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	1987	190	828	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.	BNNP Sumatera Selatan	Orang	11	11	11	●
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNNP Sumatera Selatan	Persen	5*	1,3	1,95*	●
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BNNP Sumatera Selatan; BPS	Liter / Kapita	0,07	PM	-	▼
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Persen	51,6 (Hasil Estimasi menggunakan baseline data SKAP 2019 dan Statistik Rutin BKKBN)	38.33	-	▼
3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Persen	79,47 (Statistik Rutin BKKBN 2020)	69.45	-	▼
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Persen	11,3 (Hasil Estimasi menggunakan data SKAP 2019 dan Statistik Rutin BKKBN)	22.87	-	▼
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ ASFR).	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Kelahiran per 1000 perempuan 15 - 19 Tahun	26,0 (Hasil Estimasi menggunakan baseline data SKAP 2019)	24	-	▼
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	SDKI 2017; BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah anak per WUS (15 - 49 tahun)	2,27 (Hasil Estimasi menggunakan trend data ASFR baseline data SKAP 2019)	2,3	-	▼
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1 (a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	BPS	Persen	5,36	11.00	3,32	●
3.8.2*	Persentase penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan; BPJS	Persen	100	100	100	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan; BPJS	Persen	80,00	90.00	85.2	●
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Persen	30,56	PM	30,65	▼
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Persen	86	PM	84	●
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	Persen	60,7	PM	62,8	●
4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	Persen	40,6	PM	42,04	●
4.1.1 (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Kemendikbud	Persen	75,59	81.50	35,89	▼
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS	Persen	111,58	PM	111,39	▼
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	BPS	Persen	88,78	PM	89,44	●
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	BPS	Persen	90,42	88.24	82,30	▼
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Tahun	8,68	8.79	8,78	▶
4.1.1 (h)	Persentase Harapan Lama Sekolah	BPS	Tahun	12,45	12.98	12,54	▶
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	BPS	Persen	26,24	PM	24,24	▼
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	BPS	Persen	81,73	88.24	82,30	▶
4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	Persen	26,41	34.00	26,32	▼
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS	% remaja (15-24)	83,31	69.25	90,45	●
			% remaja (15-59)	54,52	38.40	62,59	

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak- anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.						
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	BPS	%	99,11	101.65	99,66	▶
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat		%	101,56	101.40	101,86	
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/sederajat		%	102,06	105.5	110,89	
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi		%	109,65	118.00	107,98	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Persen	98,75	98.86	98,78	▶
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15 -59 tahun.	BPS	Persen	99,94	100.00	99,95	▶
				99,57	99.63	99,65	
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.	Kemendikbud	Persen	12,2	PM	1,6	▼
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.			39,7	PM	31,3	
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.			37	PM	30,5	
	Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik.			40,3	98.90	34,8	
	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.			29,1	94.80	24,2	
	Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik.			34,5	91.20	27,3	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPPA	Dokumen	62 (Perda, Pergub, Edaran Terkait PPPA)	54	66	●
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPPA	Persen	0,006 (Jumlah KTA Perempuan 165 Jumlah Anak 2.852.014)	Menurun	0.006	●
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin	SUSENAS BPS; DPPPA	% (sebelum umur 18 tahun)	13,44 (Susenas, BPS)	Menurun	12.24	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
	atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		% (sebelum umur 15 tahun)	0,71	Menurun	0,00	●
5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	SDKI BKKBN & BPS	Tahun	20,1 (Hasil Estimasi Menggunakan baseline Data Trend Susenas 2016 - 2019)	>20	-	▼
5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	SDKI BKKBN & BPS; SP dan SUPAS BPS	Kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 Tahun	26,0 (Hasil Estimasi menggunakan baseline data SKAP 2019)	24.00	-	▼
5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.	BPS	Persen	81,73	88.24	-	▼
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	KPU, Sekretariat DPD, BKN	Persen	21,62 (DPRD PROV)	Meningkat	21.33	▶
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKN, SAKERNAS BPS	Persen	30,50 (BPS)	28,75	31,15 (BPS)	●
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.							
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	SDKI BKKBN dan BPS	Persen	Data belum tersedia karena sumber data hanya melalui SDKI (SDKI baru akan dilaksanakan tahun 2022)	38.33	-	▼
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	SDKI BKKBN dan BPS	Persen	12,6 (Hasil Estimasi menggunakan baseline data trend unmeet need SKAP 2016 - 2019)	7.70	-	▼
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	SDKI BKKBN dan BPS	Persen	Data belum tersedia karena sumber data hanya melalui SDKI (SDKI baru akan	98.7	-	▼

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
				dilaksanakan tahun 2022)			
5.6.2*	Perda yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Kemenkumham, BKKBN, DPPPA, Dinkes	Dokumen	0 (Sumber website peraturan.go.id yang dikelola Kemkumham RI)	1,00	-	▼
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS	Persen	60,68	64.00	64,53	●

Pilar II (Pembangunan Ekonomi)

Pilar Pembangunan Ekonomi terdiri dari 5 (lima) goal, yaitu Goal 7. Energi Bersih dan Terjangkau, Goal 8. Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Goal 9. Industri Inovasi dan Infrastuktur, Goal 10. Berkurangnya Kesenjangan, dan Goal 17. Kemitraan Untuk mencapai Tujuan.

Capaian Sumatera Selatan pada pilar Pembangunan Ekonomi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.112.
Capaian TPB Pilar II

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	DESDM	Persen	98.71	97,19%	99,27	●
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita.	DESDM	Kwh	630.25	1.725	657,65	▶
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	DESDM	Persen	92.97	92,08	94,16	●
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	DESDM	Persen	20.82	20,00%	23,14	●
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas Energi Primer.	DESDM	SBM (Setara barrel minyak)	240.58	PM	235.08	●
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persen	-1,24	6,61	2,28	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
8.1.1 (a)	PDRB per kapita. (ribu rupiah)	BPS	Rp	53.505	57.077	57.487	●
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	Persen	-2,03	5	1,39	▶
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	Persen	49,42	43	48,20	▶
8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	Persen	39.44	47,65	34,74	▶
8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	Persen	79.26	76,00	83,87	▶
8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	15.072	14.104,65	15.873	●
8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok	BPS	Persen	5.48 (laki-laki) 5.54 (Perempuan)	PM	4,84 (laki-laki) 5.2 (perempuan)	▶
8.5.2 (a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	Persen	12,98	8,56	10,93	▶
8.5.2 (b)	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	Persen	5,51	3,87	4,98	●
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	Persen	25,55	16,43	25,38	▼
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perusahan	11,17	39%	43,35%	●
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS	Persen	5,97	5	5.89	●
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	2.297	82.095	1.282	▶
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	sedang konfirma si ke BPS pusat	9.517.835	n.a	▼
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DISBUDPAR	Jumlah	57.189	PM	56.583	▶
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi.	Dinas PUBM	km	90,02	74	93,94	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Dinas PUBM	km	33,5	9,00	9,00	●
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Perhubungan	km	80	58.2	80	●
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	unit	4 (PGA, LLG, MUBA, PLG)	6 (PGA, LLG, MUBA, PLG, Lahat, PALI)	4 (PGA, LLG, MUBA, PLG)	▶
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga Penyeberangan	Dinas Perhubungan	unit	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA, dan Laut Regional TAA)	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	●
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	lokasi	2 (Pelabuhan Laut Regional TAA dan Pelabuhan Boom Baru)	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru dan Pelabuhan Tanjung Carat)	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru dan Pelabuhan Tanjung Carat))	●
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita.	BPS	Persen	18,79	21.96	19,46	▶
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	Persen	0,69	572,00	2,30	▶
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	BPS	Persen	data belum tersedia	8,78	n.a	▼
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retroit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Persen	PM	1	1	●
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	PM	27	-	▼
9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS	Persen	60,68	64	64,53	●
9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS	Persen	46,00	28	56,89	●
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	Indeks	0,339 (Mar 2020) 0,338 (Sept 2020)	0,353	0,340	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persen	12,66 (Mar 2020) 12,98 (Sept 2020	9,9-10,78	12,84 (Mar 2021) dan 12,79 (Sept 2021)	●
10.1.1 .(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	BPS	Kabupaten	data tidak tersedia	1	Data tidak tersedia	▼
10.1.1 (c)	Jumlah desa tertinggal.	IDM	Desa	n.a	1450	357	▶
10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri	IDM	Desa	n.a	18	15	▶
10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BDT	Persen	-	6.9	-	▼
10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BDT	Persen	37,75	13.7	39,5 (Musi Rawas Utara)	▼
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia.	BPS	Indeks	80,32	93.47	Belum rilis	▶
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan, BPS	Formal (%)	data tidak tersedia	64.00	n.a	▼
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.							
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerja sama ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penambahan Dokumen	14	15	59	●
10.7.2(b)	Jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Fasilitas TKLN	12	10	12	●
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BPS	Persen	8,20	1,94	7,88	●
17.7.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BPKAD	Persen	PM	0,72	0,72	●
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD	Persen	PM	36.90	52.77	●
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.							
17.3.1.(a)	Rata-rata Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	BNP2TKI dn BI	Persen	PM	2,52	-	▼
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serta optik nasional yang menghubungkan	Kominfo	Persen	90	100	-	▼

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
	ibu kota kabupaten/kota (IKK)						
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (pixed broadband) di perkotaan dan di perdesaan	Kominfo	Persen	90	24	-	▼
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS	Persen	46,00	28	56,89	●
17.8.1 (a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Kominfo	Persen	n.a	70	-	▼
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas.	BPS	Persen	-9,57	5,8	51,58	●
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Persen	99,91	PM	99,31	●
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Persen	100	PM	95,83	●
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	77.202	PM	74.756	●
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	BPS	Persen	100	PM	100	●
17.19.2-(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	Persen	100	PM	100	●

Pilar III (Pembangunan Lingkungan)

Pilar Pembangunan lingkungan terdiri dari goal 6. Air Bersih dan Sanitasi layak, goal 11. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, goal 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab, goal 13. Penanganan perubahan iklim, goal 14.Ekosistem kelautan, dan goal 15. Ekosistem daratan.

Capaian Sumatera Selatan pada pilar Pembangunan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.113.
Capaian TPB Pilar III

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor, BPS	Persen	80,78	78.83	84,70	●
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persen	-	PM	-	▼
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor, BPS	Persen	67,4	PM	75,28	●
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor, BPS	Persen	76,94	88.00	77,29	▶
6.2.1 (c).	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa / Kelurahan	2.676	2.797	2.854	●
6.2.1. (d)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS).	Dinas Kesehatan	Desa / Kelurahan	1.478	1.343	1.724	●
6.2.1. (e)	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kab / Kota	-	6	-	▼
6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persen	-	PM	-	▼
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kab / Kota	-	11	-	▼
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persen	-	4.41	-	▼
6.3.2 (a)	Kualitas air danau.	DLHP	Danau Prioritas	1	1	1 (Danau Ranau)	●
6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLHP	Persen Sungai Kelas II	n.a	30	50	●
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BPDAS dan Dinas Kehutanan	RPDAST	1 DAS (DAS Musi)	1 DAS (DAS Musi)	1 DAS (DAS Musi)	●
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	PSDA, BMKG	Stasiun	PM	2	53 (stasiun hidrologi, 28 stasiun klimatologi)	●
6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DLHP	Unit (Onlimo)	PM	1	2	●
6.5.1 (d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara/Lintas Provinsi/Lintas Kabupaten	DLHP		PM	19	3	▶
6.5.1 (g)	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	DLHP	Lembaga	PM	3	3	●
6.5.1 (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	DLHP	DAS	3 DAS (Musi, Lalan, Lumpur)	6	4	●
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	DLHP	Danau	1	1	1 (Danau Ranau)	●
6.6.1 (b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	DLHP	Danau	1	1	1 (Danau Ranau)	●
6.6.1 (c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	DLHP	Danau	1	3	3 (Danau Ranau, Danau Suji, Danau Rayo)	●
6.6.1 (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	DLHP	ha	14.200 Ha	200.000	-	▼
6.6.1 (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	DLHP	DAS	3 DAS (Musi, Lalan, Lumpur)	6	4	▶
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.							
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	Persen	55	PM	57,86	●
11.1.1 .(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	DISPERKIM	Kawasan Perkotaan Metropolitan	1 Kawasan	1 Kawasan	n.a	▼
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	DISPERKIM	Kota Sedang & Kota Baru	3 (Kota Sedang) dan 1 (Kota Baru)	3 (Kota Sedang) dan 1 (Kota Baru)	n.a	▼
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, eningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
11.2.1 .(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	Persen	30,23	33	33	●
11.2.1 .(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Dinas Perhubungan	Kota Besar	2	2	2	●
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.1 .(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	DISPERKIM	Kota Sedang	1 Kota (Indralaya)	1 Kota	n.a	▼
11.3.1 .(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	DISPERKIM	Metropolitan Baru	1 Metropolitan	1 metropolitan	-	▼
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1 .(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DISPERKIM	Kota Pusaka	1 Kota	3 Kota	-	▼
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal hilang dan terkena dampak bencana per 100.000.	BPBD	Jiwa	0.01563	Menurun	Korban mendertita 19.507 & 11 jiwa meninggal	▶
11.5.1 .(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB).	BPBD	Indeks	134, 57	125,65	137,11	▶
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Desa Tangguh	3 (OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin)	2	2	●
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Sistem Peringatan Dini	1 (di Lahat)	1	1	●
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1 .(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Persen	26,53	80	26,90	▶
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Kota Hijau	3 Kota (Muba, Banyuasin, Palembang)	1 Kota	1 Kota	●
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	Persen	100	100	100	●
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	1	●
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
12.4.1. (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Peserta Proper	123	130	130	●
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhdap pembangunan berklanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1 .(a)	Julmlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Fasilitas Publik	91,16	14	n.a	▼
13.1 Pada tahun 2030, memperkuat kapisitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Sumsel	Dokumen	1	1	1	●
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Sumsel	Jiwa	20.526	Menurun	20.546	▶
13.1.3	Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan	Dinas Kehutanan Prov Sumsel	Titik Hotspot	4048	555	925	●
13.1.4	Penurunan luas kebakaran hutan	Dinas Kehutanan Prov Sumel	Ha	145,96	7.388,42	2.108	▶
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1. (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dokumen	5	11	11	●
13.2.2	Jumlah Penurunan emisi GRK sektor lahan dan gambut	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan & Dinas Kehutanan	Ton CO2 eq/tahun	563.967	4.355.678	17.940.450	●
13.2.3	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Indeks	96,86	96,25	86,28	▼
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.							
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Rapergub Pelaksanaan Perda RZWP-3- K	Zonasi Rinci	Integrasi RZWP-3- K Prov. SS ke RTRW	●
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	WPP	1 WPP Laut (WPP 711) 1 WPP Perairan Darat (WPP 438)	Optimalisasi 1 WPP, 1 Prop	1 WPP Laut (WPP 711) 1 WPP Perairan Darat (WPP 438)	●
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.							
14.5.1 *	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ha	976,03 Ha	1,980 Ha	976,03 Ha	▶

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.							
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	40	70	50	▶
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.							
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	-	4	-	▼
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1. Permen KP Nomor 14 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, 2. Permen KP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 14 Tahun 2011, 3. Permen KP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan, 4. Permen KP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	1	1. Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang usaha Perikanan Tangkap, 2. Permen KP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 14 Tahun 2011, 3. Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan API dan ABPI di WPP NRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, 4. Permen KP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Lokasi	0	1	0	▼
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Orang	0	11.300 org	0	▼
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Kehutanan	Persen	11,17	9.77	16.53	●
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan	Persen	8,01	2,21	7,03	●
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas Kehutanan	ha	-	1085,8 Ha	-	▼
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas Kehutanan	ha	60.435	1.895	60.380,33	●
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dinas Kehutanan	KK	-	2 KK	-	▼
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas Kehutanan	Unit	PM	-	-	▼
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan	Persen	8,01%	0,03	7,03	●
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.							
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Persen	Harimau Sumatera (19); Gajah Sumatera (212)	Harimau Sumatera (8); Gajah Sumatera (123)	-	▼
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.							
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dinas Kehutanan	Peraturan	1	-	-	▼
		Dinas Kehutanan	Peraturan	-	PM	-	
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.							
15.7.1.(a)	Jumlah penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Kehutanan	Kasus	0	3	3	●

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Spesies	PM	1	-	▼
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.							
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan, Dinas Kehutanan	Dokumen	3	3	Bidang OKKPD : Registrasi PSAT/Sertifikasi Prima (25 Sertifikat/tahun) Bidang Keswan dan Kesmavet : SKPAH (surat Keterangan Produk Pangan Asal Hewan) produk berupa telur dan daging; pengeluaran/pemasukan melalui jalan darat (22 surat keterangan /bulan), UPTD RS Hewan : SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dan Rekomendasi Hewan : pengeluaran/pemasukan hewan melalui udara (bandara) (22 surat keterangan /bulan)	●
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.							
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan	Persen	>100	5	0 (tidak sampai P21 karena penerapan terhadap penegakan hukum)	●

Pilar IV (Tata Kelola Pelaksanaan)

Pilar Tata Kelola Pelaksanaan hanya terdiri dari 1 (satu) goal yaitu Goal 16. Menciptakan Perdamaian, menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh.

Capaian Sumatera Selatan pada pilar Tata Kelola Pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.114.
Capaian TPB Pilar IV

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	BPS, Kepolisian	Kasus	Meningkat (2019 : 136)	Menurun	-	●
16.1.3 (b)	Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan	BPS	Persen	Menurun (2019 : 169)	Menurun	-	●
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	Persen	Meningkat (2020 : 70,82)	Menurun	Belum diolah dari mikro data	▶
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DPPPA	Persen	Menurun (2019 : 0,007)	Menurun	0.010	▶
16.3 Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	DPPPA	Persen	Meningka t (2019 : 5,59)	Menurun	1,55	▶
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.	Biro Hukum	Persen	n.a	12	n.a	▼
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	Persen	n.a	100,00	88,17	▶
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi; Kabupaten/Kota).	BPK	Persen	Provinsi : 100% Kab/Kota: 94,11%	Provinsi : 100% Kab/Kota : 100%	Provinsi : 100%, Kab/Kota : 94,11%	●
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Biro Organisasi	Nilai	BB (78,98)	A (83-85)	BB (79,76)	▶

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
	(Provinsi/Kabupaten/ Kota).						
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	n.a	100	n.a	▼
16.6.1.(d)	Persebtase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi baik kementrian/ lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kot a)	BPS	Persen	-	PM	-	▼
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/Lembag a dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Ombudsman RI	Persen	n.a. (Rilis Nov 2021)	Provinsi : 90% Kab/Kota : 90%	-	▼
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DPPPA	Persen	21,62 (DPRD)	21,33 (DPRD)	21,33	●
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	Persen	18,51 (10 dari 54 orang eselon II)	20	16,36 (9 orang dari 55 orang Eselon II)	▶
16.7.2 (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	Indeks	n.a. (Belum Rilis)	72	n.a. (Belum Rilis)	▶
16.7.2 (b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	Indeks	n.a. (Belum Rilis)	93.47	n.a. (Belum Rilis)	▶
16.7.2 (c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS	Indeks	n.a. (Belum Rilis)	84.41	n.a. (Belum Rilis)	▶
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	Persen	PM	PM	79,01	●
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	Persen	79,36	90,00	90,05 (BPS 2021)	●
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kominfo	Nilai Keterbu kaan Informa si Publik Pempro v Sumsel	69	87	-	▼
16.10.2 (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi	Kominfo	Persen	60	80	-	▼
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat	Kominfo	Persen	7	8	-	▼

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target SDGs	Capaian SDGs	Status
	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.						
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan							
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Kemenkumham	Lembaga	PM	PM	-	▼
16.b Menggalakan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.	Biro Hukum	Kebijakan Dokumen	n.a. (belum rilis)	0	-	●

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi realisasi baik kinerja maupun keuangan untuk masing-masing Perangkat Daerah. Hal itu perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum hasil evaluasi realisasi fisik maupun keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik.

Pelaksanaan program RKPD sampai dengan tahun 2021 dan realisasi RPJMD provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing Urusan secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Secara umum, indikator program telah mencapai target, bahkan ada yang melampaui target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target, baik yang telah mendekati 100% maupun yang masih relatif jauh dari target.

Hasil evaluasi menunjukkan dari total 556 indikator program, 51 indikator program (9,17%) capaiannya telah melampaui target

(>100%), 108 indikator program (19,42%) tercapai, 157 indikator program (28,24%) belum mencapai 100%, dan 240 indikator program (43,17%) datanya belum tersedia.

Secara detil capaian indikator program RKPD sampai tahun 2021 dan realisasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.115 berikut:

Tabel 2.115

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
1			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**			0	-											
1	**1**		**Pendidikan**			**0**	**-**											
1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	8.160.823	100%	2.576.225	100,0%	2.463.073	1	96%	99,99	2.463.073	100	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (APK SM)	%	90%	2.571.786	88,24%	786.202	98,47	746.901	100	95%	98,47	746.901	109	29%	Dinas Pendidikan
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum			0	377	0	377	-	216		57%	-	216	n/a	57%	Dinas Pendidikan
				Jumlah Pengembangan Kurikulum	Kurikulum	3	-	3		3		1		3		1	n/a	
				Persentase Jenjang sekolah kewenangan Provinsi yang kurikulumnya di selaraskan dengan muatan lokal	%	100%	-	100%		100%		1		100%		1	n/a	
1	**2**		**Kesehatan**															
1	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			0%	-											
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	642.308	100%	244.693	99,87	233.561	100	95%	99,87	233.561	100	36%	Dinas Kesehatan
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	139.754	100%	71.386		62.965	0	88%		62.965	0	45%	RS Ernaldi Bahar
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		-	931.416	100%	263.083	94,05	203.472	94	77%	94,05	203.472	n/a	22%	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100%	48.788	90%	5.490		3.955	0	72%		3.955	0	8%	RS Ernaldi Bahar
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	%	40,0	62.547	37,5%	40.767	70,49	13.163	100	32%	70,49	13.163	2	21%	Dinas Kesehatan
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki Izin Edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan	%	85	4.421	75%	200	100	51	100	26%	100	51	1	1%	Dinas Kesehatan
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	80%	34.551	70%	1.444	78,33	920	100	64%	78,33	920	98	3%	Dinas Kesehatan
1	**3**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				-											
1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			0%	-											
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	92.430	100%	29.344	100	26.627	100	91%	100	26.627	100	29%	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	210.518	100%	90.829	100	75.303	100	83%	100	75.303	100	36%	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase kawasan bebas bencana banjir dan longsor		0%	405.232	**99,11%**	134.974	93,27	113.032	94	84%	93,27	113.032	n/a	28%	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sistem Penyediaan Air MInum (SPAM) yang dikelola dan dikembangkan		0,00%	13.766	92,65%	6.116	100	5.682	108	93%	100	5.682	n/a	41%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sistem air limbah yang dikelola dan dikembangkan	%	0,00%	3.300	100%	2.000	100	1.923	100	96%	100	1.923	n/a	58%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah memenuhi NSPK	%	77,74	60.000	64,25%	66.512	97,19	56.800	100	85%	97,19	56.800	1	95%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	9	Program Penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang dilengkapi sarana dan prasarana Utilitas yang baik	Kawasan	20,00	2.500	15,00	66.510	93,98	56.800	6	85%	93,98	56.800	5	2272%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	Program Penyelenggaran Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	85%	3.591.767	90%	1.436.967	96,72	1.172.583	100	82%	96,72	1.172.583	114	33%	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			0	9.630		2.130		1.880		88%		1.880		20%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan yang disiapkan	orang			30 orang		30 orang		n/a	n/a	30 orang				
				Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi yang dilaksanakan	orang			160 orang		160 orang		n/a	n/a	160 orang				
				Jumlah Sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang difasilitasi	orang			40 orang		40 orang		n/a	n/a	40 orang				
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	70%	21.235	60%	5.885	100,00	2.612	100	44%	100,00	2.612	143	12%	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
1	**4**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**															
1	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	32.397	100%	26.652	99,16	25.039	99	94%	99,16	25.039	99	77%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang dikembangkan	%	0,000%	2.500		1.310	100	1.171	n/a	89%	100	1.171		47%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	11	28.000	100%	21.311	100	20.391	100	96%	100	20.391	9	73%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan permukiman yang sudah dilengkapi PSU	%	31	68.500	100%	25.953	100	24.617	100	95%	100	24.617	3	36%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**5**		**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			**0**	-											
1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			0%	-											
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	65.986	100%	33.596	100	32.923	100	98%	100	32.923	100	50%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	60.987	100%	17.501	100	15.480	100	88%	100	15.480	100	25%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum		0%	10.371	100%	4.120	100	4.013	100	97%	100	4.013		39%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana			0%	58.827		11.130	100	10.117	n/a	91%	100	10.117		17%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	0%	3.676	100%	420	100	420	100	100%	100	420		11%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**6**		**Sosial**															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
1	6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	88.839	100%	21.495	95,10	18.877	95	88%	95,10	18.877	95	21%	Dinas Sosial
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di berdayakan	%	8,5	7.548	100%	988	100	988	100	100%	100	988	12	13%	Dinas Sosial
1	6	3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya melalui Pelayanan dan Rehabilitasi dalam Panti		0%	47.923	100%	8.437	98,80	8.264	99	98%	98,80	8.264		17%	Dinas Sosial
1	6	4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Korban Bencana dan kelompok rentan yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	KK	5101	31.256	100%	3.256	100	3.111	100	96%	100	3.111	0	10%	Dinas Sosial
1	6	5	Program Penanganan Bencana	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat provinsi	%	100%	4.074	100%	550	11,57	536	12	97%	11,57	536	12	13%	Dinas Sosial
1	6	6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Sumsel	%	100%	637	100%	29		27	n/a	93%		27	0	4%	Dinas Sosial
			Layanan Urusan Wajib Non Dasar			0	-											
2	**7**		**Tenaga Kerja**			**0**	-											
2	7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	90.342	100%	27.185	99,91	25.956	100	95%	99,91	25.956	100	29%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			0,00%	825		375	100	364	n/a	97%	100	364		44%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	25%	1.360	20%	60	20	59	100	99%	20	59	80	4%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	Program Hubungan Industrial			0%	1.224		222		215	n/a	97%		215		18%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	%	67%	695	65,5%	95	100	66	100	69%	100	66	149	9%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**8**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			**0**	-											
2	8	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	32.115	100%	8.864	100	8.264	100	93%	100	8.264	100	26%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	0,00%	7.504	100%	2.154	100	1.729	100	80%	100	1.729		23%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	%	0,00%	3.651	100%	551	100	298	100	54%	100	298		8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan peningkatan Ketahanan Keluarga		0,00%	1.200	100%	100	100	71	100	71%	100	71		6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keterisian data terpilah pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)		0,00%	1.485	100%	135	100	133	100	98%	100	133		9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan upaya peningkatan pemenuhan hak anak		0%	3.576	100%	426	100	231	100	54%	100	231		6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak		-	4.297	100%	897	100	459	100	51%	100	459		11%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**9**		**Pangan**			**0**	-											
2	9	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	39.636	100%	19.359	99,24	18.126	99	94%	99,24	18.126	99	46%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%	0	13.560	100%	660	94,86	628	95	95%	94,86	628		5%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Kelompok Miskin Yang dibantu	KK	401	1.300	100%	200	99,53	199	100	100%	99,53	199	0	15%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan			-	6.750		350	90,08	315	n/a	90%	90,08	315		5%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**10**		**Pertanahan**															
2	10	2	Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Peningkatan Pengawasan Internal	%	100	1.175	100%	175	100	160	100	92%	100	160	1	14%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	10	3	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Surat Keputusan Penetapan Tanah Lokasi	%	100	1.175	100%	100	100	87	100	87%	100	87	1	7%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Peningkatan Pengawasan Internal	%	8	2.750	100%	400	100	330	100	83%	100	330	13	12%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Konflik Lahan yang Terselesaikan	%	27.735	35.172	100%	3.760	100	3.270	100	87%	100	3.270	0	9%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**		**Lingkungan Hidup**															
2	11	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	107.210	100%	39.489	42,28	34.892	42	88%	42,28	34.892	42	33%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,55	2.700	70,79	900	-	-	n/a	n/a	-	-	0	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terbangunnya taman kehati Provinsi Sumatera Selatan	Taman	0,00	32.767		2.464	100	2.339	n/a	95%	100	2.339		7%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			1	1.950	1	150	1	148	1	99%	1	148	1	8%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah Kab/Kota	%	6%	400	-	-			n/a	n/a			0	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	11	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			-	5.695		2.495	20,69	671	n/a	27%	20,69	671		12%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi	Masyarakat Hukum Adat	2	300	2	100	2	67	1	67%	2	67	1	22%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,55	2.870	70,79	720		683	0	95%		683	0	24%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,55	2.435	70,79	850		441	0	52%		441	0	18%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**12**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															
2	12	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	29.122	100%	8.039	51,65	6.633	52	83%	51,65	6.633	52	23%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Program Pencatatan Sipil	%	100%	612	100%	130	50	81	50	62%	50	81	50	13%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	12	5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	19,23	351	11,54	303	0,29	250	n/a	82%	0,29	250	0	71%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**13**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**															
2	**13**		**Pemberdayaan Masyarakat Desa**															
2	13	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	36.112	100%	10.612	91,58	9.719	92	92%	91,58	9.719	92	27%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	2	Program Penataan Desa	Persentase Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Desa	%	95%	22.941	95%	2.896	95,30	276	100	10%	95,30	276	100	1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	%	95%	9.279	95%	2.979	98,34	25.221	100	847%	98,34	25.221	104	272%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	95%	6.426	95%	1.896	99,21	422	100	22%	99,21	422	104	7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		0,00%	-	100%	4.337	91,89	3.985	92	92%	91,89	3.985			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**15**		**Perhubungan**															
2	15	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	%	90%	84.166	80%	28.166	97,87	25.706	100	91%	97,87	25.706	109	31%	Dinas Perhubungan
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan	%	14,23%	102.079	100%	4.079	95,10	3.943	95	97%	95,10	3.943	668	4%	Dinas Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	persentase trip perjalanan kapal	%	3.856	191.825	100%	2.825	100	2.053	100	73%	100	2.053	0	1%	Dinas Perhubungan
2	15	5	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah penumpang kereta api per tahun meningkat	Orang	1.517.236	12.625	2.126.341	625	2.126.341	539	1	86%	2.126.341	539	1	4%	Dinas Perhubungan
2	**16**		**Komunikasi dan Informatika**															
2	16	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	53.223	100%	15.560	98,48	14.136	98	91%	98,48	14.136	98	27%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100%	38.067	80%	12.784	99,28	11.938	100	93%	99,28	11.938	99	31%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase pengembangan infastruktur TIK		0%	45.906	100%	12.372	100	11.521	100	93%	100	11.521		25%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**17**		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**															
2	17	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	41.851	100%	11.211	100	10.598	100	95%	100	10.598	100	25%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	60	500	20	100	20	99	1	99%	20	99	0	20%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	5	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian			-	4.879		1.079		1.058	n/a	98%		1.058		22%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	17	6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			0%	6.800		308		271	n/a	88%		271		4%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			-	4.600		900		811	n/a	90%		811		18%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru	UKM	350		210		210		1	n/a	210		1		
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Prosentase kenaikan omset UMKM	persen	30	5.483	10%	2.283	10	2.253	100	99%	10	2.253	0	41%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**18**		**Penanaman Modal**															
2	18	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	81.973	99,95	22.325	99,69	20.633	1	92%	99,69	20.633	100	25%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tersedianya peta digital dan dokumen kajian peta potensi dan peluang investasi	Dokumen	8	5.660	3	1.390	3	1.358	1	98%	3	1.358	0	24%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Investasi	%	15%	3.792	12%	1.022	-	789	n/a	77%	-	789	0	21%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	%	100%	2.692	100%	507	100	468	100	92%	100	468	100	17%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tercapainya nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Trilyun	100	1.883	100	533	100	512	1	96%	100	512	1	27%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan nilai investasi PM	%	100%	840	100%	220	100	219	100	99%	100	219	100	26%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	**19**		**Kepemudaan dan Olahraga**			**0**	-											
2	19	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	70.442	100%	21.282	100	19.992	100	94%	100	19.992	100	28%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			0%	35.985		7.493	n/a	6.781	n/a	90%	n/a	6.781		19%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan			0%	168.886		58.146	94,66	55.797	n/a	96%	94,66	55.797		33%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Aktifitas Kepramukaan	%	100%	18.913	100%	5.814	100	5.722	100	98%	100	5.722	100	30%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**20**		**Statistik**															
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statisktik Sektoral	persentase penyelenggaraan statistik		0%	2.020	100%	607	100	321	100	53%	100	321		16%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**		**Persandian**															
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100%	565	80%	129	100	122	125	95%	100	122	100	22%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**22**		**Kebudayaan**															
2	22	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	37.936	98%	22.941	98,29	21.687	100	95%	98,29	21.687	98	57%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	0	18.700	100%	5.400	100	4.757	100	88%	100	4.757		25%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	13	2.150	100%	300	100	277	100	92%	100	277	8	13%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	-	1.850	100%	275	100	238	100	87%	100	238		13%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
2	22	6	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum	Orang	102.892	9.645	71.452	4.370	n/a	4.199	n/a	96%	n/a	4.199		44%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**23**		**Perpustakaan**			**0**	-											
2	23	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	174.759	100%	18.903	97,12	17.445	97	92%	97,12	17.445	97	10%	Dinas Perpustakaan
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakasan yangterkelola sesuai Standar	%	63,50	19.046	100%	2.546	100	2.473	100	97%	100	2.473	2	13%	Dinas Perpustakaan
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Naional yang Terhimpun	%	13,50	600	12,43	150	99,70	145	8	97%	99,70	145	7	24%	Dinas Perpustakaan
2	**24**		**Kearsipan**															
2	24	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	41.737	100%	11.984	100	10.981	100	92%	100	10.981	100	26%	Dinas Kearsipan
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Arsip		0%	7.239	100%	1.371	100	1.168	100	85%	100	1.168		16%	Dinas Kearsipan
2	24	3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		0%	1.459	100%	199	100	104	100	52%	100	104		7%	Dinas Kearsipan
3			**Layanan Urusan Pilihan**															
3	**25**		**Kelautan dan Perikanan**															
3	25	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	30.334	100%	19.082	99,63	18.213	100	95%	99,63	18.213	100	60%	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi	Ha	1.617	6.104	1.000	480	100	377	0	79%	100	377	0	6%	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			0	16.951		9.344	n/a	8.997	n/a	96%	n/a	8.997		53%	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
3	25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			-	41.333		1.330	n/a	1.210	n/a	91%	n/a	1.210		3%	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing	Orang	280,00	6.914	220,00	1.290	n/a	1.232	n/a	95%	n/a	1.232		18%	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			0	14.450		1.509	n/a	1.434	n/a	95%	n/a	1.434		10%	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**26**		**Pariwisata**															
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	14	2.620	100%	1.820	76,22	1.888	76	104%	76,22	1.888	5	72%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata	%	0	24.935	100%	5.935	100	5.857	100	99%	100	5.857		23%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	855	1.975	100%	875	100	556	100	63%	100	556	0	28%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**27**		**Pertanian**															
3	27	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			0%	-											
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	164.872	100%	46.962	100	43.437	100	92%	100	43.437	100	26%	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	50.755,00	100%	16.147,00	100,00	12.357,52	100	77%	100,00	12.357,52	100	24%	Dinas Perkebunan
3	27	2	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian															
				Luas Pengembangan Tanaman Pangan :		0%	64.391		1.401		1.279	n/a	91%		1.279		2%	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
				Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan	%	0,20%	136.646,00	0,17%	1.800,00	0,17%	1.535,27	1	85%	0,17%	1.535,27	1	1%	Dinas Perkebunan
				persentase Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	%		5.180 - - -	100	3.525	98,38	3.380	1	96%	98,38	3.380		65%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian			0%	-											
				Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam :		0%	31.727		2.868		2.390	n/a	83%		2.390		8%	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Prasarana Perkebunan Yang Dimanfaatkan	Unit	83%	9.000,00	66%	900,00	n/a	888,37	n/a	99%	n/a	888,37		10%	Dinas Perkebunan
3	27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak	%	5%	18.270	5%	570	4,9%	569	1	100%	4,9%	569	1	3%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	27	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian															
				Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		0%	3.600		-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha	Ha	3.000	7.270	100Ha	170	100Ha	165	100%	97%	100Ha	165		2%	Dinas Perkebunan
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah kebun plasma kelapa sawit yang terbina	Ha	240	6.470	20.000	70	20.000	62	100%	88%	20.000	62	83	1%	Dinas Perkebunan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
						0	109.970		27.422		25.641	n/a	94%		25.641		23%	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Meningkatnya Kelompok Petani Yang Mendapatkan Penyuluhan	Kelompok	40	8.850	-	930	n/a	5,6	n/a	1%	n/a	5,6		0%	Dinas Perkebunan
				Persentase pelaksanaan program penyuluhan pertanian	%	100%	2.570	100%	570	98,65	562	99	99%	98,65	562	99	22%	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**28**		**Kehutanan**															
3	28	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	154.726	100%	43.681	98,14	42.145	98	96%	98,14	42.145	98	27%	Dinas Kehutanan
3	28	3	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Pengelolaan Hutan		0,00%	30.402	100%	5.391	98,19	5.025	98	93%	98,19	5.025		17%	Dinas Kehutanan
3	28	4	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	0,44	625	0,44	175	n/a	172	n/a	98%	n/a	172		27%	Dinas Kehutanan
3	28	5	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	Persentase	22,5	7.093	5	477	78,08	351	n/a	74%	78,08	351	3	5%	Dinas Kehutanan
3	28	6	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0,17	467	100%	100	100	100	100	100%	100	100	588	21%	Dinas Kehutanan
3	**29**		**Energi dan Sumber Daya Mineral**															
3	29	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	76.159	100%	23.520	100	21.973	100	93%	100	21.973	100	29%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
3	29	2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Sumur Bor Air Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis dan Diperolehnya Data Teknis Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah	%	70	5.848	50%	478	100	474	100	99%	100	474	1	8%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Meningkatkan Permohonan WIUP	%	100	9.140	80%	1.340	94,66	1.038	100	77%	94,66	1.038	1	11%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	5	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT	%	17,43%	2.365	13,82%	515	100	341	724	66%	100	341	574	14%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	6	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa Berlistrik	%	100	15.401	100%	701	100	638	100	91%	100	638	1	4%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**30**		**Perdagangan**															
3	30	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	41.736	100%	13.203	100	12.674	100	96%	100	12.674	100	30%	Dinas Perdagangan
3	30	2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Terdaftar Perizinannya	%	55%	680	100%	50	100	49	100	99%	100	49	182	7%	Dinas Perdagangan
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	Unit	850	1.075	450	550	450	545	1	99%	450	545	1	51%	Dinas Perdagangan
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5%	1.585	≤10%	325	n/a	307	n/a	94%	n/a	307		19%	Dinas Perdagangan
3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	%	2,4 - 5%	3.085	100%	250	100	247	100	99%	100	247		8%	Dinas Perdagangan
3	30	6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penyelesaian Permasalahan Perselisihan Konsumen		0%	7.127	100%	1.205	100	1.088	100	90%	100	1.088		15%	Dinas Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
3	30	7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	%	100%	1.940	100%	50	100	50	100	100%	100	50	100	3%	Dinas Perdagangan
3	**31**		**Perindustrian**															
3	31	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	35.575	100%	9.378	100	8.946	100	95%	100	8.946	100	25%	Dinas Perindustrian
3	31	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian perencanaan dan pembangunan industri sesuai sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi	%	100%	23.552	100%	5.152	100	5.118	100	99%	100	5.118	100	22%	Dinas Perindustrian
3	31	3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	2.015	100%	115	100	113	100	98%	100	113	100	6%	Dinas Perindustrian
3	31	4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah dokumen inisiasi pembentukan kawasan industri di Sumsel	buku dan laporan	230	2.415	10 buku & 1 Laporan	115	10 buku & 1 Laporan	115	n/a	100%	10 buku & 1 Laporan	115		5%	Dinas Perindustrian
3	**32**		**Transmigrasi**															
3	32	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Tranmsigrasi Sumsel		-	380	n/a	80	n/a	64	n/a	80%	n/a	64		17%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**															
4	**1**		**Sekretariat Daerah**															
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	1.024.669	100%	307.332	98,49	278.836	98	91%	98,49	278.836	98	27%	Sekretariat Daerah
4	1	2	Program Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	%	100%	4.984	100%	844	100	810	100	96%	100	810	100	16%	Sekretariat Daerah
4	1	3	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	100%	150.832	100%	142.882	100	142.811	100	100%	100	142.811	100	95%	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
4	1	4	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	%	100%	148.980	100%	*36.743*	64,45	17.557	64	48%	64,45	17.557	64	12%	Sekretariat Daerah
4	1	5	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	%	100%	6.196	100%	2.122	100	1.981	100	93%	100	1.981	100	32%	Sekretariat Daerah
4	1	6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang difasilitasi	%	*100%*	19.549	*100%*	*2.539*	100	2.040	100	80%	100	2.040	100	10%	Sekretariat Daerah
4	1	7	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaaan Barang dan Jasa	Persentase kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa	%	*100%*	14.146	*100%*	*4.104*	100	4.347	100	106%	100	4.347	100	31%	Sekretariat Daerah
4	1	8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	%	*100%*	3.575	*100%*	*925*	94,59	801	95	87%	94,59	801	95	22%	Sekretariat Daerah
4	**2**		**Sekretariat DPRD**															
4	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlayani	%	100%	454.670	100%	198.204	92,00	165.493	92	83%	92,00	165.493	92	36%	Sekretariat DPRD
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	%	100%	430.034	100%	107.993	99,83	104.926	100	97%	99,83	104.926	100	24%	Sekretariat DPRD
5			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**															
5	**1**		**Perencanaan Pembangunan**															
5	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	32.784	100%	22.208	100	20.714	100	93%	100	20.714	100	63%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			0%	6.705		3.957		3.557	n/a	90%		3.557		53%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
				Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	%	90%	-	88%		88%		1		88%		1		
				Ketepatan penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum	Tepat waktu	Tepat Waktu	-	Tepat waktu		Tepat waktu				Tepat waktu				
5	1	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD	%	83%	4.873	80%	4.342	80	3.795	100	87%	80	3.795	96	78%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**2**		**Keuangan**															
5	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			0%	-											
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	697.831	100%	204.550	99,38	175.077	99	86%	99,38	175.077	99	25%	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	417.354	100%	97.553	99,21	69.624	99	71%	99,21	69.624	99	17%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai Deviasi (%)	-5% s.d 0%	10.424.235	-5% s.d 0%	3.407.797	84,24	2.869.290	n/a	84%	84,24	2.869.290		28%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlayani	%	100%	814	100%	150	45	56	45	37%	45	56	45	7%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Management Aset (1.Tersedianya daftar aset tetap, 2.Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap, 3.Ada proses inventarisasi aset tetap, 4.Nilai Aset tercantum dalam laporan anggaran)	%	100%	28.449	100%	6.593	97,57	4.240	98	64%	97,57	4.240	98	15%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengembangan Pendapatan Daerah yang tercapai	nilai deviasi	-5% s/d 5%	43.364	-5% s/d 5%	11.297	75,76	8.017	n/a	71%	75,76	8.017		18%	Badan Pendapatan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
5	**3**		**Kepegawaian**															
5	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	54.075	100%	16.115	99,94	15.350	100	95%	99,94	15.350	100	28%	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	%	0%	11.195	100%	2.152	87,82	1.826	88	85%	87,82	1.826		16%	Badan Kepegawaian Daerah
5	**4**		**Pendidikan dan Pelatihan**															
5	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	103.305	100%	39.165	100	37.000	100	94%	100	37.000	100	36%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Tercapainya program pengembangan sumber daya manusia	%	0%	22.695	100%	2.519	100	2.034	100	81%	100	2.034		9%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**5**		**Penelitian dan Pengembangan**															
5	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	55.202	100%	16.735	100	15.344	100	92%	100	15.344	100	28%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	%	100%	20.134	100%	5.799	100	5.372	100	93%	100	5.372	100	27%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**7**		**Pengelolaan Penghubung**															
5	7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	45.913	100%	15.749	100	14.852	100	94%	100	14.852	100	32%	Badan Penghubung
5	7	2	Program Pengelolaan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	%	100%	1.869	100%	451	100	360	100	80%	100	360	100	19%	Badan Penghubung
6			**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**															
6	**1**		**Inspektorat Daerah**			**0**	-											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
6	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	16.869	100%	5.167	97,68	22.979	98	445%	97,68	22.979	98	136%	Inspektorat
6	1	2	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	%	90%	21.785	90%	6.889	82,08	4.830	91	70%	82,08	4.830	91	22%	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	%	90%	7.725	90%	2.504	81,74	1.215	91	49%	81,74	1.215	91	16%	Inspektorat
8			**Urusan Pemerintahan Umum**															
8	**1**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**															
8	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	32.220	100%	9.020	93,44	8.428	93	93%	93,44	8.428	93	26%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila	%	78,5%	8.820	75%	790	92,52	731	123	93%	92,52	731	118	8%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	%	80%	25.153	79%	12.338	68,34	5.310	87	43%	68,34	5.310	85	21%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Berkinerja	%	5%	18.433	3%	3.583	9,81	351	327	10%	9,81	351	196	2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100%	5.120	100%	500	95,80	479	96	96%	95,80	479	96	9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Capaian RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	Kinerja	Rp Juta	
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		**(8) = (7) / (6) x 100%**		**(9) = (5) + (7)**		**(10) = (9) / (5) x 100%**		*13*
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	%	100%	-	100%	563	100	557	100	99%	100	557	100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116.

Identifikasi Masalah berdasarkan Misi dan Sasaran RPJMD

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
Misi I: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan	Maju Kesejahteraan masyarakat	- Rendahnya pertumbuhan modal koperasi; - Persentase pertumbuhan UMKM masih rendah; - Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Sosial; - Banyaknya bantuan sosial belum tepat sasaran antara lain disebabkan karena Basis Data Terpadu (BDT) belum terupdate secara berkelanjutan. - Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi sebesar 5,83% dan tingginya persentase pekerja tidak penuh (penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu) sebesar 40,01%; - Tingginya Pengangguran Terdidik (lulusan SMA/SMK dan S1) dimana pencari kerja terididik cenderung memilih milih pekerjaan khususnya pada sektor formal saja, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi sebesar 13,44% - Belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja.	Angka kemiskinan masih tinggi	Percepatan penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting
	Maju ekonomi	• Share PDRB ADHB		

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
	kerakyatan	sektor pertanian yang merupakan sektor utama (menyerap tenaga kerja terbesar) trennya cenderung turun dari tahun ke tahun; • Rendahnya volume ekspor produk kelautan dan perikanan;		
	Maju Investasi, Industri dan Perdagangan	- Masih rendahnya laju pertumbuhan hilirisasi berbasis komoditi unggulan; - Masih rendahnya persentase pertumbuhan ekspor - Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum tersusun; - Pelayanan PTSP (5 hari) masih di bawah target nasional (3 hari).	Peningkatan investasi, industri, dan perdagangan belum optimal Peningkatan investasi, industri, dan perdagangan belum optimal	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan didukung Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata
	Maju Akses Energi	- Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; - Belum maksimalnya pengelolaan pertambangan minerba. Nilai PNBP pertambangan yang masih rendah. - Belum maksimalnya penerimaan daerah sektor ESDM, baik dari Nilai PNBP minyak bumi maupun PNBP gas bumi.		
	Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan	- Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditi tanaman pangan ke non pertanian; - Produktivitas padi dan kedelai masih di bawah rata-rata angka nasional. - Produktivitas Hortikultura untuk komoditi-komoditi utama nasional dan unggulan daerah rata-rata masih di	Peningkatan produktivitas pertanian belur optimal	

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
		bawah angka nasional; - Belum Optimalnya Produktivitas Perkebunan rakyat. - Tanaman perkebunan yang banyak memasuki fase tua sehingga perlu diremajakan; - Kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar belum terbentuk di setiap desa; - Rendahnya harga komoditas di tingkat petani; - Kecamatan rawan pangan masih cukup tinggi. - Arus Supply demand hasil ternak (daging, susu dan telur) masih berfluktuasi. - Masih rendahnya konsumsi ikan /perkapita/tahun Sumsel. - Kebutuhan benur udang dan nener bandeng untuk budidaya perikanan payau semuanya didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan; -		
MISI II: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas	Maju Pendidikan Berkualitas	- Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan : Pada Tahun 2021, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan masih rendah yaitu sebesar 8,30 dan masih di bawah capaian nasional sebesar 8,54. - Angka Harapan Lama Sekolah belum tercapai : Pada tahun 2021, angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,54 dan	Akses Pendidikan Berkualitas Belum Optimal	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
		masih di bawah capaian nasional sebesar 13,08. - Masih rendah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK : Pada tahun 2021 APM SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 60,53 dan masih dibawah capaian nasional sebesar 61,65; Masih terbatasnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dari tingkat SMA/SMK sampai Perguruan Tinggi terutama di daerah terpencil. - Budaya baca masyarakat Sumatera Selatan tahun 2021 berada di kategori sedang yaitu 52,38%, masih di bawah nasional yang sebesar 55,74%. - Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan.		
	Maju Respons Gender	Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat dari pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,27 persen (urutan ke-11 dari 34 Provinsi) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 73,88 persen (masih di bawah nasional)	Kesetaraan dan keadilan gender yang belum optimal	
	Maju kesehatan masyarakat	- Masih rendahnya angka harapan hidup Sumsel. Pada Tahun 2021 sebesar 69,98 tahun, sedangkan nasional sebesar 73,5 tahun. Rata-rata Harapan hidup kabupaten/kota dibawah usia harapan hidup Provinsi; - Angka stunting pada balita masih	Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas Belum Optimal	Percepatan penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
		tinggi sebesar 24,8%. - Tingginya Kematian bayi; 502 kasus (2021) - Masih tingginya persentase Case Detection Rate Penyakit TBC sebesar 40% (2021). - Meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS pada tahun 2020 yang berjumlah masing-masing 420 kasus HIV dan 151 kasus AIDS. - Masih rendahnya penduduk yang telah memiliki Jaminan Kesehatan, baru sebesar 85,2% dari target 90%. - Masih perlu peningkatan akses sanitasi (83,64%) dan air bersih (80,78%) - Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk) masih tinggi, yaitu sebesar 0,12%. - Masih kurang dan belum meratanya penempatan dokter (baru mencapai 20 orang per 100.000 penduduk); - Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.		
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan	Mau Pelayanan Publik Berkualitas	• Persentase penerbitan e-KTP di kabupaten/kota belum 100%. • Capaian Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan kontrasepsi KB mengalami penurunan di tahun 2020	Stabilitas Keamanan Harus Terus Dijaga terkait Pilpres dan Pemilu dan Perlunya Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.		menjadi 78,83%. • Masih banyaknya PUS yang ber-KB-nya tidak penuhi (unmeed need).		
	Maju Pembangunan Yang Trasnparan dan Akuntabel	• Belum optimalnya penggunaan aplikasi sistem perencanaan dengan sistem penganggaran. • Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota) dan non pemerintah (KPBU, CSR, dll). • Nilai kemandirian keuangan daerah terus mengalami penurunan walaupun masih diatas 50 %. • Belum optimalnya penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). • Masih rendahnya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu masih berpredikat BB. • Hasil – hasil Penelitian belum dimanfaatkan dengan optimal; • Belum optimalnya pemanfaatan data statistic sebagai sumber dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan • Kurangnya SDM urusan Statistik yang handal • Gedung tempat penyimpanan arsip yang belum		

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
		standar nasional; • Minimnya tenaga SDM kearsipan yang terlatih dalam pengelolaan arsip; • Kurangnya sarana dan prasaran obat-obatan untuk pengamanan arsip. •		
	Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan masih sebesar 55%		Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi
MISI IV: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah	Maju Kualitas Lingkungan Hidup	• Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 masih masuk di dalam kategori kurang yaitu berkisar antara 61,62 sampai dengan 69,70. IKLH pada Tahun 2021 sebesar 69,70. • Masih meningkatnya emisi gas rumah kaca di 4 sektor meliputi Lahan dan Gambut, Pertanian dan Perternakan, Energi dan Transportasi, dan limbah. • Luas penanaman per tahun tidak sebanding dengan jumlah lahan kritis yang ada, persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis baru 0,16% • Belum optimalnya fungsi kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan sehingga rasio kawasan lindung untuk menjaga	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Peningkatan Infrastruktur ya merata, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
		kelestarian keamekaragaman hayati masih kurang. • Adanya konflik/permasalahan lahan dan permukiman masyarakat dalam kawasan hutan, luasan penyelesaian konflik lahan dan permukiman dalam kawasan hutan yang masih rendah. • Masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak 31.641.751 bidang tanah yang jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar sebesar 658.943 bidang tanah. • Masih adanya konflik lahan yang belum diselesaikan, dimana jumlah konflik pertanahan masih sebanyak 68 kasus yang terjadi di 15 kabupaten/kota sebanyak 66 kasus dan 2 kasus di Provinsi Sumatera Selatan.		
	Maju Infrastuktur dan Konektivitas	• Sampai dengan tahun 2021 kondisi jalan mantap Prov Sumsel sebesar 93,94%, jalan tidak mantap masih 6,06%, dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang 91,73 km. • Kerusakan jaringan irigasi permukaan sampai dengan	Perlunya peningkatan infrastuktur da konektivitas	

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
		Tahun 2021 masih tinggi yang terdiri dari kondisi rusak ringan sebesar 13,65 %, rusak sedang sebesar 6,93 % dan rusak berat sebesar 1,69 %. • Kerusakan jaringan irigasi rawa sampai dengan Tahun 2021 masih tinggi yang terdiri dari kondisi rusak berat 76,85%. • Persentase penanganan kawasan bebas banjir dan longsor masih perlu ditingkatkan, untuk sampai dengan Tahun 2021 penangan kawasan bebas banjir dan longsor sebesar 56,15 % atau dengan luas kawasan yang sudah ditanggulangi seluas 36.844 Ha • Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota. Persentase kesesuaian pemanfaaatan ruang baru 80,00%. • Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 2.096,05 Ha dari total luas kawasan kumuh seluas 3.331,83 Ha; • Akses rumah tangga yang terlayani sanitasi layak karena capaian penyediaan		

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
		infrastruktur sanitasi termasuk sarana prasarananya masih dibawah angka nasional yaitu sebesar 84,62% pada tahun 2021; • Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani air minum layak karena capaiannya masih jauh di bawah realisasi nasional yaitu 84,70% pada tahun 2021; • Masih adanya rumah yang tidak layak huni sebesar 179.791 rumah tangga; • Masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah pada tahun 2021 sebanyak 402.475 KK. • Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi dan informatika yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai ke pelosok desa yang ada di wilayah Sumatera Selatan; • Kurangnya dukungan SDM IT • Terjadinya pendangkalan alur sungai sebagai dampak sedimentasi • Belum		

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
		menurunnya angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan. • Belum optimalnya fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Regional Tanjung Api-Api; • Belum optimalnya Fungsi Layanan Kereta Api mahasiswa Unsri di Indralaya. • Belum optimalnya penumpang menggunakan layanan angkutan umum Light Rail Transit (LRT) Palembang. • Kurangnya SDM urusan Persandian yang handal • Belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai • Masih terdapat desa di Sumatera Selatan yang masuk ke kategori tertinggal dan sangat tertinggal.		
MISI V: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	• Masih tingginya kejadian bencana yaitu 148 kejadian pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi banjir, kebakaran, tanah longsor dan puting beliung; • Masih kurangnya sistem peringatan dini; • Masih terdapat lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan terutama pada kawasan	Peningkatan stabilitas keamanan belum optimal	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Polhukhankam

Misi RPJMD	Sasaran	Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
berorientasi pariwisata religius		gambut (hotspot); • Masih terdapat lokasi rawan bencana terkait banjir, kebakaran, tanah longsor, dan angin puting beliung. • Terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan zona ruang laut. • Tingginya Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan. • Masih adanya sengketa pertanahan dan legalitas di kawasan transmigrasi. • Kurangnya infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan permukiman di kawasan transmigrasi. •		
	Maju Seni Budaya dan Pariwisata	• Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersertifikasi secara nasional masih rendah. • Menurunnya kunjungan wisman maupun wisnus secara signifikan.	Pemulihan pariwisata	Pemulihan Ekonomi pasca pandemi melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata
	Maju Pemuda dan Olahraga	• Peringkat Sumsel pada PON 2016 berada di posisi 21. • Jumlah pelatih yang bersertifikat masih rendah. • Jumlah dan kualitas pembinaan cabor masih rendah. • Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah.	Pemanfaatan dan Pengembangan Pasca Asian Games	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian RPJMD dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan maka permasalahan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan urusan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.117.
Resume Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

NO	URUSAN		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		
1	Pendidikan	a	Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan - Pada Tahun 2021, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan masih rendah yaitu sebesar 8,30 dan masih di bawah capaian nasional sebesar 8,54.
		b	Angka Harapan Lama Sekolah belum tercapai - Pada tahun 2021, angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,54 dan masih di bawah capaian nasional sebesar 13,08.
		c	Masih rendah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK - Pada tahun 2021 APM SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 60,53 dan masih dibawah capaian nasional sebesar 61,65 - Masih terbatasnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dari tingkat SMA/SMK sampai Perguruan Tinggi terutama di daerah terpencil.
2	Kesehatan		
		a	Masih rendahnya angka harapan hidup Sumsel. Pada Tahun 2021 sebesar 69,98 tahun, sedangkan nasional sebesar 73,5 tahun. Rata-rata Harapan hidup kabupaten/kota dibawah usia harapan hidup Provinsi;
		b	Angka stunting pada balita masih tinggi sebesar 24,8%.
		c	Tingginya Kematian bayi; 502 kasus (2021)
		d	Masih tingginya persentase Case Detection Rate Penyakit TBC sebesar 40% (2021).
		e	Meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS pada tahun 2020 yang berjumlah masing-masing 420 kasus HIV dan 151 kasus AIDS.
		f	Masih rendahnya penduduk yang telah memiliki Jaminan Kesehatan, baru sebesar 85,2% dari target 90%.
		g	Masih perlu peningkatan akses sanitasi (83,64%) dan air bersih (80,78%)
		h	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk) masih tinggi, yaitu sebesar 0,12%.
		i	Masih kurang dan belum meratanya penempatan dokter (baru mencapai 20 orang per 100.000 penduduk);
		j	Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		a	Sampai dengan tahun 2021 kondisi jalan mantap Prov Sumsel sebesar 93,94%, jalan tidak mantap masih 6,06%, dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang 91,73 km.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	
		b	Kerusakan jaringan irigasi permukaan sampai dengan Tahun 2021 masih tinggi yang terdiri dari kondisi rusak ringan sebesar 13,65 %, rusak sedang sebesar 6,93 % dan rusak berat sebesar 1,69 %.
		c	Kerusakan jaringan irigasi rawa sampai dengan Tahun 2021 masih tinggi yang terdiri dari kondisi rusak berat 76,85%.
		d	Persentase penanganan kawasan bebas banjir dan longsor masih perlu ditingkatkan, untuk sampai dengan Tahun 2021 penangan kawasan bebas banjir dan longsor sebesar 56,15 % atau dengan luas kawasan yang sudah ditanggulangi seluas 36.844 Ha
		e	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota. Persentase kesesuaian pemanfaaatan ruang baru 80,00%.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		a	Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 2.096,05 Ha dari total luas kawasan kumuh seluas 3.331,83 Ha;
		b	Akses rumah tangga yang terlayani sanitasi layak karena capaian penyediaan infrastruktur sanitasi termasuk sarana prasarananya masih dibawah angka nasional yaitu sebesar 84,62% pada tahun 2021;
		c	Masih kurangnya akses rumah tangga yang terlayani air minum layak karena capaiannya masih jauh di bawah realisasi nasional yaitu 84,70% pada tahun 2021;
		d	Masih adanya rumah yang tidak layak huni sebesar 179.791 rumah tangga;
		e	Masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah pada tahun 2021 sebanyak 402.475 KK.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
		a	Masih tingginya kejadian bencana yaitu 148 kejadian pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi banjir, kebakaran, tanah longsor dan puting beliung;
		b	Masih kurangnya sistem peringatan dini;
		d	Masih terdapat lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan terutama pada kawasan gambut (hotspot);
		e	Masih terdapat lokasi rawan bencana terkait banjir, kebakaran, tanah longsor, dan angin puting beliung.
6	Sosial		
		a	Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Sosial;
		b	Banyaknya bantuan sosial belum tepat sasaran antara lain disebabkan karena Basis Data Terpadu (BDT) belum terupdate secara berkelanjutan.
II	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**		
1	Tenaga Kerja		
		a	Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi sebesar 5,83% dan tingginya persentase pekerja tidak penuh (penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu) sebesar 40,01%;
		b	Tingginya Pengangguran Terdidik (lulusan SMA/SMK dan S1) dimana pencari kerja terididik cenderung memilih milih pekerjaan khususnya pada sektor formal saja, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi sebesar 13,44%
		c	Belum terlindunginya tenaga kerja dari ancaman PHK dan belum terjaminnya hak dan kewajiban pekerja.

NO	URUSAN		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		a	Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat dari pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,27 persen (urutan ke-11 dari 34 Provinsi) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 73,88 persen (masih di bawah nasional);
3	Pangan		
		a	Kecamatan rawan pangan masih cukup tinggi.
		b	Arus Supply demand hasil ternak (daging, susu dan telur) masih berfluktuasi.
4	Pertanahan		
		a	Masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar sebanyak 31.641.751 bidang tanah yang jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar sebesar 658.943 bidang tanah.
		b	Masih adanya konflik lahan yang belum diselesaikan, dimana jumlah konflik pertanahan masih sebanyak 68 kasus yang terjadi di 15 kabupaten/kota sebanyak 66 kasus dan 2 kasus di Provinsi Sumatera Selatan.
5	Lingkungan Hidup		
		a	Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 masih masuk di dalam kategori kurang yaitu berkisar antara 61,62 sampai dengan 69,70. IKLH pada Tahun 2021 sebesar 69,70.
		b	Masih meningkatnya emisi gas rumah kaca di 4 sektor meliputi Lahan dan Gambut, Pertanian dan Perternakan, Energi dan Transportasi, dan limbah.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		a	Persentase penerbitan e-KTP di kabupaten/kota belum 100%.
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		a	Masih terdapat desa di Sumatera Selatan yang masuk ke kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		a	Capaian Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan kontrasepsi KB mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 78,83%.
		b	Masih banyaknya PUS yang ber-KB-nya tidak penuhi (unmeed need).
9	Perhubungan		
		a	Terjadinya pendangkalan alur sungai sebagai dampak sedimentasi
		b	Belum menurunnya angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan.
		c	Belum optimalnya fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Regional Tanjung Api-Api;
		d	Belum optimalnya Fungsi Layanan Kereta Api mahasiswa Unsri di Indralaya.
		e	Belum optimalnya penumpang menggunakan layanan angkutan umum Light Rail Transit (LRT) Palembang.
10	Komunikasi dan Informasi		
		a	Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi dan informatika yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai ke pelosok desa yang ada di wilayah Sumatera Selatan;
		b	Kurangnya dukungan SDM IT

NO	URUSAN		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		a	Rendahnya pertumbuhan modal koperasi.
		b	Persentase pertumbuhan UMKM masih rendah.
12	Penanaman Modal		
		a	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum tersusun.
		b	Pelayanan PTSP (5 hari) masih di bawah target nasional (3 hari).
13	Kepemudaan dan Olahraga		
		a	Peringkat Sumsel pada PON 2016 berada di posisi 21.
		b	Jumlah pelatih yang bersertifikat masih rendah.
		c	Jumlah dan kualitas pembinaan cabor masih rendah.
		d	Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah.
14	Statistik		
		a	Belum optimalnya pemanfaatan data statistic sebagai sumber dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan
		b	Kurangnya SDM urusan Statistik yang handal
15	Persandian		
		a	Kurangnya SDM urusan Persandian yang handal
		b	Belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai
16	Kebudayaan		
		a	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersertifikasi secara nasional masih rendah.
17	Perpustakaan		
		a	Budaya baca masyarakat Sumatera Selatan tahun 2021 berada di kategori sedang yaitu 52,38%, masih di bawah nasional yang sebesar 55,74%.
		b	Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan.
18	Kearsipan		
		a	Gedung tempat penyimpanan arsip yang belum standar nasional;
		b	Minimnya tenaga SDM kearsipan yang terlatih dalam pengelolaan arsip;
		c	Kurangnya sarana dan prasaran obat-obatan untuk pengamanan arsip.
III	**Urusan Pemerintah Pilihan**		
1	Kelautan dan Perikanan		
		a	Masih rendahnya konsumsi ikan /perkapita/tahun Sumsel.
		b	Kebutuhan benur udang dan nener bandeng untuk budidaya perikanan payau semuanya didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan;
		c	Rendahnya volume ekspor produk kelautan dan perikanan;
		d	Terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan zona ruang laut.
		e	Tingginya Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan.
2	Pariwisata		
		a	Menurunnya kunjungan wisman maupun wisnus secara signifikan.

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	
3	Pertanian		
		a	Share PDRB ADHB sektor pertanian yang merupakan sektor utama (menyerap tenaga kerja terbesar) trennya cenderung turun dari tahun ke tahun;
		b	Terjadinya alih fungsi lahan dari komoditi tanaman pangan ke non pertanian;
		c	Produktivitas padi dan kedelai masih di bawah rata-rata angka nasional.
		d	Produktivitas Hortikultura untuk komoditi-komoditi utama nasional dan unggulan daerah rata-rata masih di bawah angka nasional;
		e	Belum Optimalnya Produktivitas Perkebunan rakyat.
		f	Tanaman perkebunan yang banyak memasuki fase tua sehingga perlu diremajakan;
		g	Kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar belum terbentuk di setiap desa;
		h	Rendahnya harga komoditas di tingkat petani;
4	Kehutanan		
		a	Luas penanaman per tahun tidak sebanding dengan jumlah lahan kritis yang ada, persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis baru 0,16%
		b	Belum optimalnya fungsi kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan sehingga rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keamekaragaman hayati masih kurang.
		c	Adanya konflik/permasalahan lahan dan permukiman masyarakat dalam kawasan hutan, luasan penyelesaian konflik lahan dan permukiman dalam kawasan hutan yang masih rendah.
5	Energi dan Sumber Daya Mineral		
		a	Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
		b	Belum maksimalnya pengelolaan pertambangan minerba. Nilai PNBP pertambangan yang masih rendah.
		c	Belum maksimalnya penerimaan daerah sektor ESDM, baik dari Nilai PNBP minyak bumi maupun PNBP gas bumi.
6	Perdagangan		
		a	Masih rendahnya persentase pertumbuhan ekspor
7	Perindustrian		
		a	Masih rendahnya laju pertumbuhan hilirisasi berbasis komoditi unggulan
8	Transmigrasi		
		a	Masih adanya sengketa pertanahan dan legalitas di kawasan transmigrasi.
		b	Kurangnya infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan permukiman di kawasan transmigrasi.
IV	**Urusan Penunjang Pemerintahan**		
1	Perencanaan Pembangunan		
		a	Belum optimalnya penggunaan aplikasi sistem perencanaan dengan sistem penganggaran.
		b	Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota) dan non pemerintah (KPBU, CSR, dll).
2	Keuangan		
		a	Nilai kemandirian keuangan daerah terus mengalami penurunan walaupun masih diatas 50 %.
		b	Belum optimalnya penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

NO	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		
		a	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan masih sebesar 55%
4	Pengawasan		
		a	Masih rendahnya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu masih berpredikat BB.
5	Penelitian dan Pengembangan		
		a	Hasil Penelitian masih belum dimanfaatkan dengan optimal;

Berdasarkan permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD pada tabel di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan isu yang dapat menjadi isu strategis, yaitu :

1) Percepatan penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting
2) Peningkatan Ekonomi Kerakyatan didukung Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata
3) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi
4) Peningkatan Infrastruktur, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
5) Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan

2.3.3. Isu Strategis

Penetapan isu strategis didasarkan pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2021, Arah Kebijakan Nasional (RKP 2023), Arah Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 serta Arahan Spasial Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2016-2036 yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka Isu strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting
2) Pemulihan Ekonomi pasca pandemi melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata
3) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi
4) Peningkatan Infrastruktur yang merata, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana
5) Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Polhukhankam

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dan prospek perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2023.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 diselaraskan dengan:

1). Arahan Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
2). Arahan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.
3). Arahan Tata Ruang, yaitu Arahan Kawasan Strategis dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036.
4). Arahan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019- 2023.
5). Kebijakan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang:
   a. Berkualitas,
   b. Berkesinambungan,
   c. Berkelanjutan,
   d. Berkeadilan,
   e. Inklusif,
   f. Berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
   g. Mengedepankan penurunan jumlah penduduk miskin,
   h. Pengelolaan inflasi,
   i. Pengelolaan Sektor UKM dan UMKM,
   j. Perluasan lapangan kerja,dan
   k. Peningkatan pertumbuhan investasi.

Kerangka ekonomi daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2023

serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesenjangan.

3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional

3.1.1.1. Perekonomian Nasional Tahun 2021

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi yang berlangsung sejak triwulan I 2021 terus berlanjut meski sempat tertahan oleh merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia membaik dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada 2022, disertai dengan nilai tukar yang stabil dan inflasi yang terkendali. Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional menjadi kunci dalam mendorong proses pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas. Sinergi akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan Covid-19, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level, dengan pembukaan sektor prioritas menjadi game changer tidak hanya dalam pengendalian penyebaran varian Delta, namun juga dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Perbaikan kondisi ekonomi tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sehubungan dengan semakin terkendalinya penyebaran Covid-19 dan adanya akselerasi vaksinasi. Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor juga menunjang prakiraan tersebut. Untuk itu, sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional perlu terus diperkuat untuk mendukung berlanjutnya proses pemulihan ekonomi ke depan. Perbaikan tersebut didukung oleh pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Kinerja ekspor yang baik menjaga kinerja NPI di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar Rupiah pada 2021 secara keseluruhan terjaga stabil sesuai dengan fundamental. Stabilitas tersebut ditopang oleh kecukupan pasokan valas yang berasal dari residen dan nonresiden, serta ketersediaan instrumen lindung nilai. Inflasi tetap rendah hingga akhir tahun 2021 dipengaruhi oleh tertahannya permintaan domestik. Selain itu, memadainya pasokan untuk merespons permintaan, serta sinergi kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga kestabilan harga juga berkontribusi kepada tetap terkendalinya pergerakan harga. Stabilitas sistem keuangan, kinerja perbankan, dan pertumbuhan kredit semakin menguat sejalan dengan terkendalinya penyebaran Covid-19. Selain itu, dengan kinerja ekonomi yang semakin baik serta didukung program digitalisasi sistem pembayaran, transaksi sistem pembayaran diprakirakan terus meningkat.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,46 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6,81 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,55 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,39 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,84 persen dan 4,65 persen.

Gambar 3.1

Pertuumbuhan PDB Lapangan Usaha Tahun 2019- 2021 (persen)

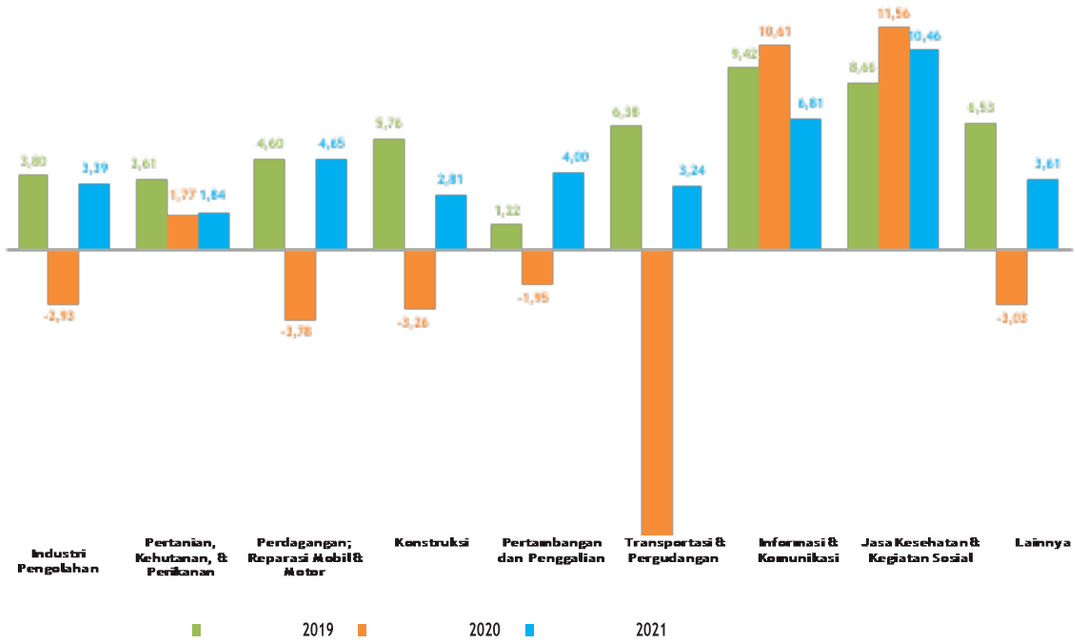

Sumber: BRS Sumsel, 2022

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,28 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,97 persen; Konstruksi sebesar 10,44 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,98 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,92 persen.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2021, Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 4,17 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,80 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,02 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,59 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 23,31 persen.

Gambar 3.2

Pertuumbuhan PDB menurut Pengeluaran 2019- 2021 (persen)

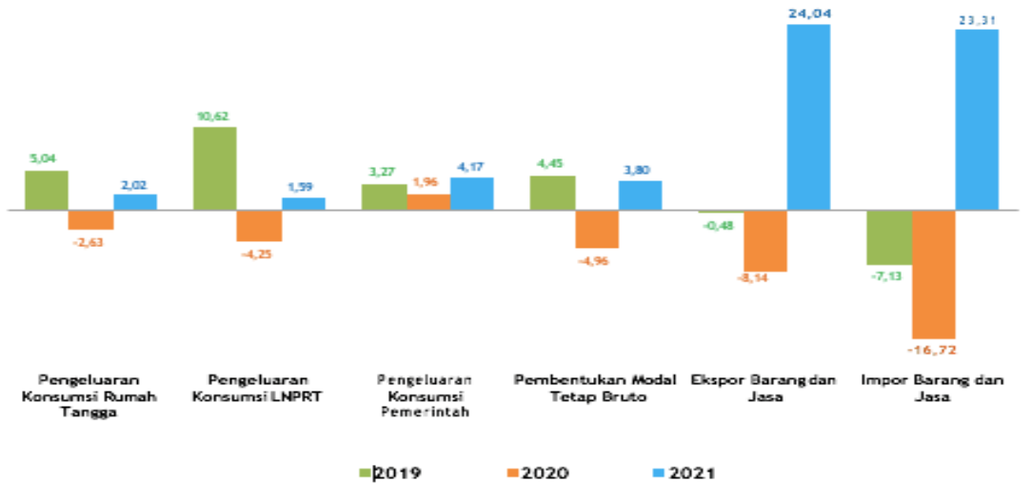

Sumber: BRS Sumsel, 2022

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,42 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 30,81 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,56 persen; Komponen PK-P sebesar 9,14 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,22 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,65 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,86 persen.

Inflasi 2021 tercatat rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi 2020 sebesar 1,68% (yoy), meskipun berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar 1,56% (yoy) sedikit menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi yang terjaga, serta pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Inflasi volatile food terkendali sebesar 3,20% (yoy), didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi kelompok administered prices meningkat dari tahun lalu menjadi sebesar 1,79% (yoy), antara lain sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan cukai tembakau.

Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang melanjutkan peningkatan. ISSK tetap rendah dan terjaga di zona normal-stabil sepanjang tahun 2021. Ketahanan permodalan bank tetap tinggi tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) sebesar 25,59% pada

November 2021. Rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah terjaga pada posisi 3,19% (gross) dan 0,98% (nett) pada November 2021, seiring ekonomi yang terus mengalami perbaikan dan didukung perpanjangan implementasi kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK. Likuiditas perbankan sangat longgar, tercermin dari rasio AL/DPK yang tinggi sebesar 35,12% pada Desember 2021, sehingga mendukung kinerja positif fungsi intermediasi perbankan. Pertumbuhan kredit terus melanjutkan peningkatan positif sepanjang tahun 2021, hingga tumbuh 5,24% pada Desember 2021. seiring dengan perbaikan kondisi permintaan dan penawaran. Pertumbuhan kredit UMKM meningkat pada 2021, seiring dengan berlanjutnya perbaikan di sektor riil dan dunia usaha, khususnya UMKM. Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja terus menunjukkan kinerja positif, tumbuh 4,67% dan 6,32%. Di sektor konsumsi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terus mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,13% (yoy) pada Desember 2021 sejalan dengan kebijakan terpadu KSSK untuk mendorong sektor properti.

Berdasarkan pengalaman pada tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia. Pertama, sinergi untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor prioritas perlu terus diperkuat untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor ekspor maupun untuk memenuhi kenaikan permintaan domestik termasuk UMKM. Kedua, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah bank sentral lain, sinergi untuk penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan untuk mempercepat reformasi struktural di sektor riil, keberlanjutan stimulus fiskal yang didukung sebagian pendanaannya dari Bank Indonesia, serta sinergi KSSK untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha perlu terus dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, inovasi perlu diperkuat, baik dalam sinergi kebijakan ekonomi nasional, maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi ekonomi dan keuangan nasional melalui digitalisasi sistem pembayaran serta program-program pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Inovasi kebijakan dan program juga diperlukan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan hijau, baik untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional maupun untuk menyikapi semakin tingginya tuntutan dari negara-negara maju.

3.1.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2022

Perekonomian Indonesia diprakirakan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Akselerasi perekonomian nasional di 2022 didukung oleh peningkatan mobilitas seiring dengan penyebaran Covid-19 yang lebih terkendali dan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor prioritas yang semakin luas disertai optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu KSSK, serta stimulus kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan seperti akselerasi digitalisasi pembayaran. (e-commerce).

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong fenomena terjadinya "pent up demand" pada konsumsi masyarakat

yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Tabel 3.1

Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, yoy)

Uraian	2021[1]		2022		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN[2]	*Outlook* Pertumbuhan[3]	Sumber Pertumbuhan[3]
Pertumbuhan PDB	**3,7**	**3,7**	**5,4–5,7**	**5,2–5,5**	**5,2–5,5**
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	2,0	1,1	5,2–5,4	5,0–5,2	2,7–2,8
Konsumsi Pemerintah	4,2	0,3	4,5–4,6	2,2–3,0	0,2–0,2[4]
Investasi (PMTB)	3,8	1,2	5,8–6,2	5,4–6,3	1,7–2,0
Ekspor Barang dan Jasa	24,0	4,7	3,9–4,2	5,4–5,7	1,3–1,3[4]
Impor Barang dan Jasa	23,3	(3,4)	4,4–4,6	7,5–8,2	(1,4)–(1,5)

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2022; 2) RPJMN 2020–2024; dan 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022; 4) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua angka di belakang koma.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan meningkat pada kisaran 5,2–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 5,0-5,2 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 5,4-5,7 persen. Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,3 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh sebesar 2,2-3,0 persen, didorong oleh masih berlanjutnya program stimulus fiskal pemerintah, serta program vaksinasi yang diprediksi mencapai 99 persen total populasi penduduk dewasa Indonesia pada Maret 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia,

otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akmamin, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diprakirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Tabel 3.2

Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha

Tahun 2021–2022 (Persen, yoy)

Uraian	2021[1)]		2022		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN[2)]	*Outlook* Pertumbuhan[3)]	Sumber Pertumbuhan[3)]
Pertumbuhan PDB	**3,7**	**3,7**	**5,4–5,7**	**5,2–5,5**	**5,2–5,5**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	0,2	3,7–3,8	3,7–3,9[b)]	0,5–0,5[a)]
Pertambangan dan Penggalian	4,0	0,3	1,9–1,9	2,8–3,5[b)]	0,2–0,3
Industri Pengolahan	3,4	0,7	5,2–5,5	5,3–5,7	1,1–1,2
Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	0,1	5,2–5,2	5,5–5,8	0,1–0,1[a)]
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0	0,0	4,3–4,4	5,2–5,4[b)]	0,0–0,0[a)]
Konstruksi	2,8	0,3	5,8–6,1	6,1–6,3[b)]	0,6–0,6[a)]
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,7	0,6	5,6–6,0	4,9–5,1[b)]	0,6–0,7
Transportasi dan Pergudangan	3,2	0,1	7,1–7,4	6,5–7,0[b)]	0,2–0,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,9	0,1	6,1–6,3	4,9–5,3[b)]	0,1–0,1[a)]

Informasi dan Komunikasi	6,8	0,4	7,7–8,8	7,5–8,0[b)]	0,5–0,5[a)]
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	0,1	6,4–6,9	3,2–3,6[b)]	0,1–0,2
Real Estate	2,8	0,1	5,0–5,0	4,0–4,6[b)]	0,1–0,1[a)]
Jasa Perusahaan	0,7	0,0	8,4–8,4	4,0–4,4[b)]	0,1–0,1[a)]
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	(0,3)	(0,0)	4,8–5,1	1,9–2,2[b)]	0,1–0,1[a)]
Jasa Pendidikan	0,1	0,0	5,2–5,2	2,9–3,5[b)]	0,1–0,1[a)]
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,5	0,1	7,6–8,0	8,2–8,7[b)]	0,1–0,1[a)]
Jasa Lainnya	2,1	0,0	9,3–9,5	5,4–5,7[b)]	0,1–0,1[a)]

Sumber: 1) BPS, 2022; 2) RPJMN Tahun 2020–2024; 3) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; b) Terdapat penyesuaian angka *outlook* pertumbuhan 2022 dari sasaran pertumbuhan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi PDB 2021.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

3.1.1.3. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diprakirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diprakirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami terkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan learning loss dan earnings penalty. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN 2020– 2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diprakirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat base effect). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diprakirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diprakirakan tidak setinggi di tahun 2021; dan

(d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-demand beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income countries.

Tabel 3.3
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

Uraian	2021	2022 *Outlook*	2023 RPJMN	2023 Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (%, *yoy*)	3,7	5,2–5,5	5,7–6,0	5,3–5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3 ± 1
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US$ miliar)	144,9	151,6–152,4[c)]	146,8	158,9–160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5–7,4[c)]	6,8	7,5–7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)–(0,5)[c)]	(1,9)	(0,4)–(0,6)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4[a)]	10,5–11,7	10,2–10,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,6)	(2,6)[a)]	0,2–0,0	(0,7)–(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(4,9)[a)]	(1,6)–(1,7)	(2,9)–(2,8)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	43,8[a)]	28,9–29,6	41,7–42,4
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4–6,3	7,2–7,8	6,4-7,1
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	1294,1	1.250–1.350
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5–6,3	4,0–4,6	5,3–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	7,0–7,5	7,5–8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	0,374–0,377	0,375–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67–72,69[c)]	74,77[c)]	73,31–73,49
Penurunan Emisi GRK	23,55	26,87	26,80	27,02

Uraian	2021	2022	2023	
		Outlook	RPJMN	Sasaran
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	104	103–105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69[b)]	104–106	106	106–107

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas, b) Capaian Rata-Rata Tahun 2021 (BPS), dan

c) Terdapat penyesuaian angka outlook 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi angka 2021.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diprakirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31– 73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan masal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(a) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

(b) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

(c) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.2.1. Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2021

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,58 persen dan pertumbuhan terjadi pada 14 (empat belas) lapangan usaha, dan masih di bawah Nasional yang terkontraksi sebesar 3,69%.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional
Tahun 2014-2021

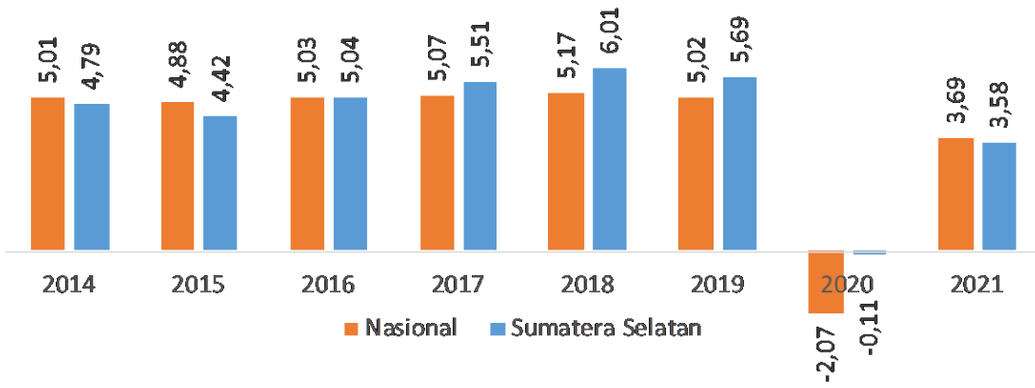

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diantaranya Jasa Pendidikan sebesar 6,57 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,04 persen; dan Real Estate sebesar 5,81 persen. Adapun Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga tumbuh sebesar 2,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan ada beberapa lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi antara lain Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,69 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,86 persen. Konstruksi yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen.

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha,
2017-2021

KATEGORI	Lapangan Usaha	Pertumbuhan					Distribusi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	2,33	3,34	1,75	2,91	15,80	14,84	14,48	15,22	15,12
B	Pertambangan dan Penggalian	5,40	9,09	8,11	-4,08	5,35	19,24	20,17	20,33	18,35	19,92
C	Industri Pengolahan	6,55	5,40	4,82	0,72	2,30	19,56	19,51	19,37	19,81	19,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,30	8,85	10,29	14,67	5,76	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,13	7,96	7,46	4,83	-4,69	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
F	Konstruksi	8,92	5,59	3,34	-0,01	-0,02	13,24	12,99	12,55	12,50	12,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,69	8,09	8,22	-1,34	5,79	12,43	12,95	13,54	13,65	13,52
H	Transportasi dan Pergudangan	8,37	7,36	8,30	-5,91	-1,86	2,31	2,37	2,48	2,34	2,14

KATEGORI	Lapangan Usaha	Pertumbuhan					Distribusi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,15	13,15	15,34	-7,21	4,43	1,64	1,76	1,97	1,88	1,83
J	Informasi dan Komunikasi	8,43	7,73	8,15	12,79	6,04	2,78	2,85	2,91	3,27	3,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	1,78	-1,44	1,64	4,19	2,63	2,54	2,36	2,38	2,39
L	Real Estate	7,33	7,95	8,03	2,24	5,81	3,03	3,08	3,19	3,33	3,31
M,N	Jasa Perusahaan	7,93	9,51	9,57	-2,08	0,60	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,40	2,70	1,09	4,17	3,88	3,16	2,85	2,67	2,89	2,79
P	Jasa Pendidikan	0,21	2,72	4,73	-1,50	6,57	2,47	2,36	2,35	2,40	2,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,19	2,56	9,57	10,14	5,63	0,62	0,59	0,62	0,71	0,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,41	9,06	7,77	5,23	0,93	0,73	0,76	0,79	0,85	0,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		**5,04**	**6,01**	**5,69**	**-0,11**	**3,58**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2022

Pada tahun 2021, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah: 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,92%; 2) Industri Pengolahan sebesar 19,46%; 3) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 15,12%; 4) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,52% dan 5) Konstruksi sebesar 12,00%.

Struktur PDRB Provinsi Sumatra Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sumatra Selatan yaitu sebesar 62,56 persen, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 32,36 persen, komponen eskpor luar negeri sebesar 19,30 persen, komponen PK-P sebesar 8,92 persen, dan komponen omponen PK-LNPRT sebesar 1,42 persen, dan komponon impor luar negeri sebagai factor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 3,84 persen.

Grafik 3.2

Struktur PDRB Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2021

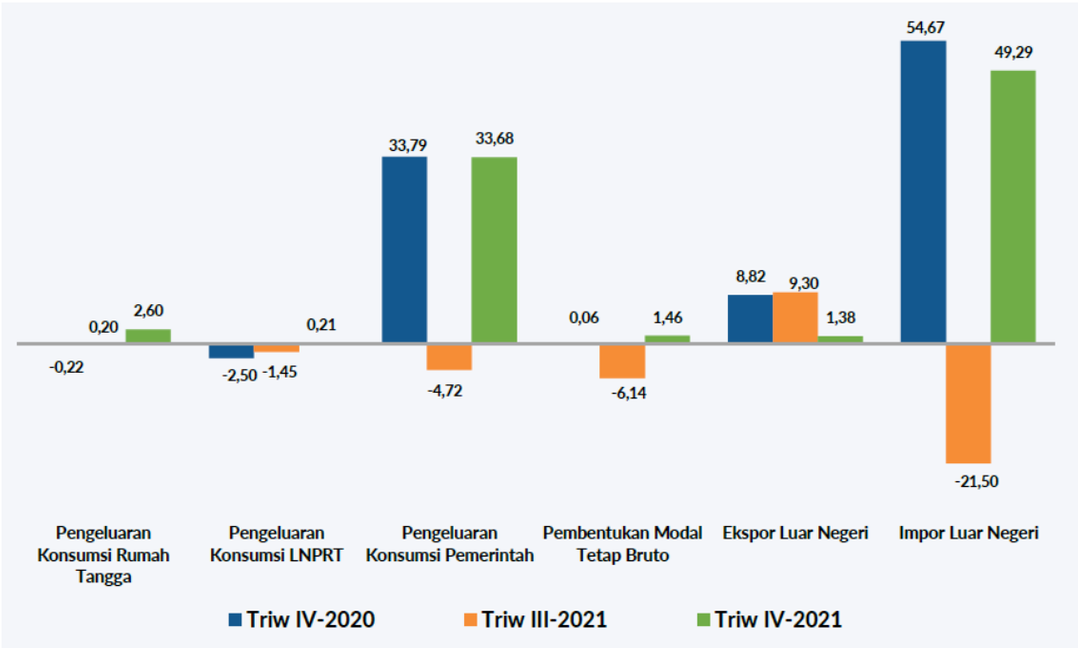

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan yangberarti. Perekonomian Sumatra Selatan masihdidominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatra Selatanyaitu sebesar 62,56 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 32,36 persen; KomponenEkspor Luar Negeri sebesar 19,30 persen; Komponen PK-P sebesar 8,92 persen; danKomponen Komponen PK-LNPRT sebesar 1,42 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 3,84 persen.

Grafik 3.3

Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan Tahun 2021 Menurut Pengeluaran (%)

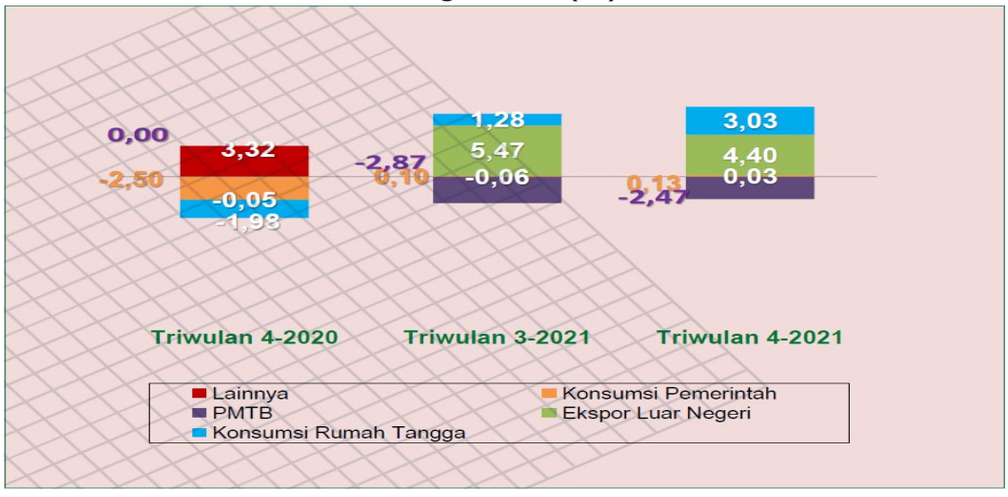

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsumsi rumah tangga mengalami perbaikan baik secara triwulan maupun tahunan. Kinerja konsumsi rumah tangga secara triwulan tercatat tumbuh sebesar 2,60% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,20% (qtq). Sejalan dengan hal tersebut, kinerja konsumsi rumah tangga secara tahunan juga mengalami pertumbuhan menjadi 5,10% (yoy) dari 2,21% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja konsumsi RT disebabkan oleh masuknya Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan periode liburan akhir tahun yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Hal ini terkonfirmasi dari peningkatan mobilitas masyarakat di tempat umum berdasarkan pantauan Google Mobility Report. Peningkatan kinerja konsumsi juga dipicu oleh meningkatnya confidence masyarakat di tengah proses vaksinasi yang terus berlanjut di triwulan IV 2021 dan pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta kebijakan bepergian yang diterapkan oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tahun 2021 meningkat. Akselerasi proses vaksinasi yang diikuti oleh kasus pandemic COVID-19 yang tidak setinggi tahun sebelumnya menyebabkan peningkatan aktivitas masyarakat ke tempat umum maupun aktivitas bepergian menggunakan transportasi. Selanjutnya, beberapa stimulus yang diberikan pemerintah seperti, program kartu sembako senilai Rp. 200.000 per bulan, program bantuan social (bansos) tunai senilai Rp. 200.000, manfaat kartu pra kerja, insentif PPnBM, bantuan kuota internet bagi pelajar, bansos beras 15 kg per bulan dan pemberian DP 0% untuk kredit dan rumah, juga mendorong peningkatan konsumsi RT lebih lanjut.

Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2021, kinerja konsumsi pemerintah tercatat sebesar 1,60% (yoy), sedikit menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,69% (yoy). Namun, kinerja konsumsi pemerintah secara triwulanan tercatat mengalami perbaikan dengan realisasi sebesar 33,68% (qtq) dibandingkan triwulan III 2021 yang terkontraksi sebesar -4,72% (qtq). Penurunan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan disebabkan oleh penurunan seluruh komponen belanja kecuali belanja transfer. Penurunan konsumsi pemerintah juga terkonfirmasi dari kenaikan dana simpanan pemerintah daerah di perbankan sebesar 15,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -34,27% (yoy). Namun demikian, laju penurunan konsumsi yang lebih dalam tertahan oleh belanja non operasional untuk berbagai program penangan pandemic COVID-19 seperti pelaksanaan vaksinasi, pengadaan alat uji medis, testing dan tracing. Selanjutnya, dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi penerimaan dan pendapatan daerah, Bank Indonesia juga terus mendorong pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diharapkan dapat mendukung digitalisasi ekonomi keuangan di daerah yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perluasan merchant QRIS terutama UMKM.

Konsumsi pemerintah pada keseluruhan tahun 2021 tercatat menurun sebesar 6,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,31% (yoy). Pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut sampai akhir tahun 2021 menyebabkan dilakukannya pembatasan aktivitas dan kegiatan oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan menurunnya kegiatan belanja

pemerintah baik belanja modal untuk pembangunan infrasturktur maupun belanja operasional untuk kegiatan dinas dan perjalanan dinas. Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi juga berdampak pada menurunnya pendapatan pemerintah.

Pertumbuhan investasi pada keseluruhan tahun 2021 menurun dengan tingkat penurunan yang cukup dalam sebesar -3,14% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 1,25% (yoy). Penyebaran pandemic COVID-19 memberikan tekanan terhadap permintaan yang menyebabkan pelaku usaha menunda ekspansi usahanya serta rencana investasi terutama dari LU industry pengolahan, LU penyediaan listrik, gas dan air, serta LU transportasi, gudang dan telekomunikasi yang telah direncanakan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, menurunnya belanja modal untuk proyek pembangunan infrastruktur dari pemerintah menahan kinerja investasi untuk tumbuh lebih tinggi.

Kinerja Investasi di triwulan IV 2021 tercatat mengalami kontraksi. Kinerja investasi pada triwulan IV 2021 masih berada pada zona kontraksi sebesar -6,60% (yoy). Namun, secara triwulanan, kinerja investasi tercatat membaik dengan pertumbuhan sebesar 1,46% (qtq), meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -6,14% (qtq). Kinerja investasi yang masih terkontraksi sejalan dengan penurunan realisasi belanja modal pemerintah sebesar 0,15% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terbatasnya kinerja investasi juga terkonfirmasi dari penurunan nilai dan jumlah proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Selatan.

Grafik 3.4

Perkembangan PMDN dan PMA Wilayah Sumatera Selatan

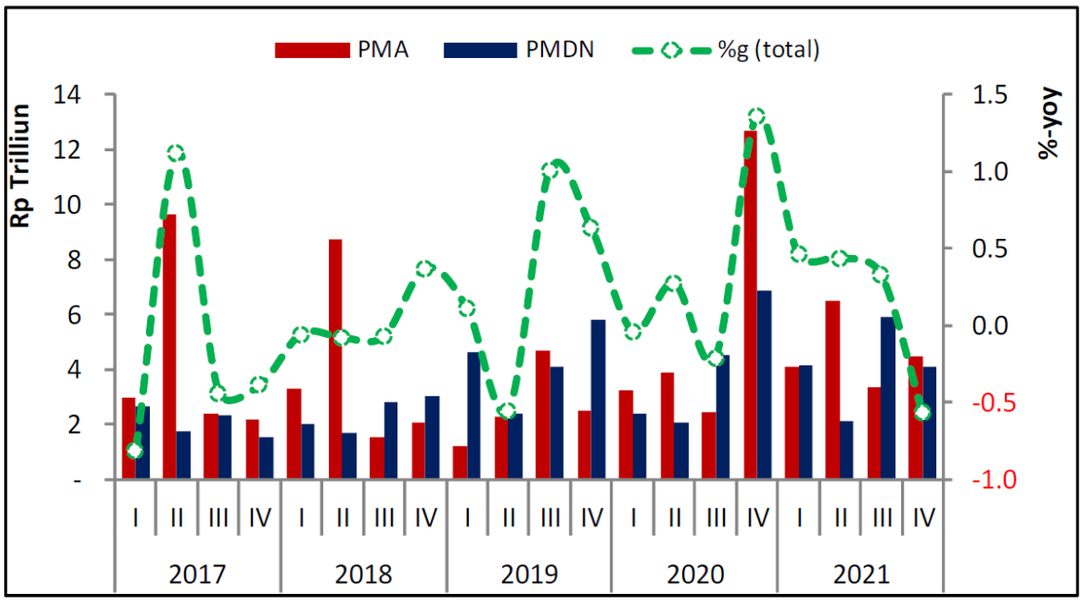

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2022

Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2021 masih tumbuh positif, meski melambat. Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan IV 2021 tercatat masih tumbuh tinggi sebesar 23,10% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 32,13% (yoy). Perlambatan kinerja ekspor terutama disebabkan adanya normalisasi permintaan komoditas karet Sumatera Selatan pada triwulan IV 2021 seiring meningkatnya permintaan kepada Negara competitor seperti Thailand dan Malaysia yang memiliki kualitas karet yang lebih baik.

Dari sisi produksi, penurunan permintaan karet juga disebabkan adanya kegiatan replanting untuk peremajaan dan periode penyakit gugur daun yang menyebabkan produktivitas karet pada triwulan IV 2021 menurun. Penurunan kinerja ekspor terkonfirmasi dari penurunan nilai dan volume ekspor pada triwulan IV 2021 secara keseluruhan. Hasil likert scale dari kegiatan survey yang dilakukan kepada pelaku usaha pada triwulan IV 2021 juga tercatat mengalami penurunan 0,50 pada triwulan III 2021 menjadi 0,33.

Grafik 3.5

Perkembangan Ekspor Sumatera Selatan (Juta US$)

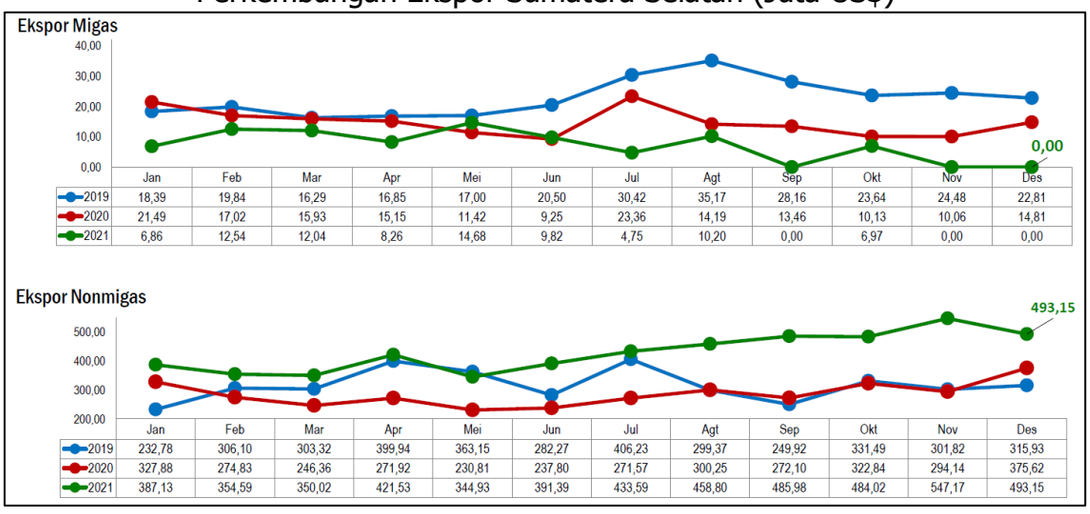

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2019	18,39	19,84	16,29	16,85	17,00	20,50	30,42	35,17	28,16	23,64	24,48	22,81
2020	21,49	17,02	15,93	15,15	11,42	9,25	23,36	14,19	13,46	10,13	10,06	14,81
2021	6,86	12,54	12,04	8,26	14,68	9,82	4,75	10,20	0,00	6,97	0,00	0,00

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2019	232,78	306,10	303,32	399,94	363,15	282,27	406,23	299,37	249,92	331,49	301,82	315,93
2020	327,88	274,83	246,36	271,92	230,81	237,80	271,57	300,25	272,10	322,84	294,14	375,62
2021	387,13	354,59	350,02	421,53	344,93	391,39	433,59	458,80	485,98	484,02	547,17	493,15

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Ekspor Sumatera Selatan pada Desember 2021 turun 9,87 persen dibanding November 2021, yaitu dari US$547,17 juta menjadi US$493,15 juta. Sementara jika dibanding Desember 2020, naik 26,31 persen. Penurunan ekspor Desember 2021 dibanding November 2021 disebabkan oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar US$54,02 juta, yaitu dari US$547,17 juta menjadi US$493,15 juta, sementara itu untuk ekspor migas sama dengan bulan sebelumnya tidak ada ekspor yang tercatat.

Penurunan ekspor nonmigas disebabkan oleh turunnya ekspor bahan bakar mineral (batubara dan lignit) 16,33 persen menjadi US$194,54 juta, serta bubur pulp dari kayu turun 10,78 persen menjadi US$117,87 juta. Secara kumulatif, nilai ekspor Sumatera Selatan periode Januari– Desember 2021 mencapai US$5.238,41 juta atau naik 45,41 persen dibanding periode yang sama tahun 2020, demikian juga ekspor kumulatif nonmigas mencapai US$5.152,30 juta atau naik 50,38 persen.

Tabel 3.5

Ringkasan Ekspor Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021 (Juta US$)

Uraian	Nilai FOB (juta US$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan–Des. 2021 (%)
	Des. 2020r	Jan–Des. 2020r	Nov. 2021	Des. 2021	Jan–Des. 2021	Des'21 thd Des'20 *(y-on-y)*	Des'21 thd Nov'21 *(m-to-m)*	Jan–Des'21 thd Jan–Des'20 *(c-to-c)*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	390,43	3 602,40	547,17	493,15	5 238,40	26,31	-9,87	45,41	100,00
Migas	14,81	176,27	0,00	0,00	86,11	-100,00	-	-51,15	1,64
- Minyak mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil minyak	14,81	176,27	0,00	0,00	86,11	-100,00	-	-51,15	1,64
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	375,62	3 426,13	547,17	493,15	5 152,30	31,29	-9,87	50,38	98,36

Keterangan: r Angka Revisi

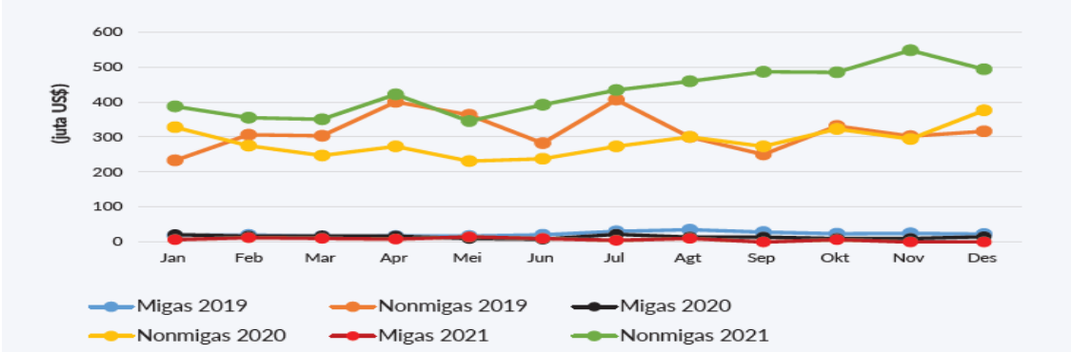

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Penurunan terbesar ekspor nonmigas Desember 2021 terhadap November 2021 terjadi pada bahan bakar mineral (batubara dan lignit) US$37,96 juta (16,33 persen), sedangkan Peningkatan terbesar terjadi pada bahan kimia anorganik US$5,94 juta (416,62 persen). Penurunan dan kenaikan komoditas lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Komoditas lainnya yang juga menurun nilai ekspornya adalah pulp dari kayu US$14,24 juta (10,78 persen); karet dan barang dari karet US$5,60 juta (3,88 persen), berbagai produk kimia US$3,04 juta (100,00 persen), kertas/karton US$2,23 juta (22,11 persen) dan buah-buahan US$1,89 juta (45,73 persen). Sementara komoditas yang meningkat selain bahan kimia anorganik adalah kayu, barang dari kayu US$ 3,91 juta (57,66 persen); serta lemak dan minyak hewan/nabati US$3,10 juta (56,04 persen).

Selama Januari–Desember 2021, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) di atas memberikan kontribusi 98,56 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut naik 51,25 persen terhadap periode yang sama tahun 2020.

Tabel 3.6

Ekspor Nonmigas Golongan Barang Utama Sumatera Selatan 2021 (Juta US$)

Golongan Barang (HS 2 Dijit)	Nilai FOB (juta US$)		Perubahan *m to m*		Nilai FOB (juta US$)		Perubahan *c to c* (%)	Peran thd total ekspor Nonmigas Jan–Des 2021 (%)
	Nov. 2021	Des. 2021	Nilai	(%)	Jan–Des 2020[r]	Jan–Des 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Bahan Bakar Mineral (27)	232,50	194,54	-37,96	-16,33	601,08	1.717,06	185,66	33,33
2. Karet dan Barang dari Karet (40)	144,36	138,76	-5,60	-3,88	1.192,12	1.599,86	34,20	31,05
3. *Pulp* dari Kayu (47)	132,11	117,87	-14,24	-10,78	1.082,16	1.210,29	11,84	23,49
4. Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (15)	5,54	8,64	3,10	56,04	146,90	209,66	42,72	4,07
5. Kertas/Karton dan Barang daripadanya (48)	10,10	7,87	-2,23	-22,11	127,53	95,66	-24,99	1,86
6. Kayu dan Barang dari Kayu (44)	6,78	10,69	3,91	57,66	79,52	81,99	3,11	1,59
7. Pupuk (31)	0,00	0,00	0,00	-	77,21	62,64	-18,87	1,22
8. Bahan Kimia Anorganik (28)	1,43	7,37	5,94	416,62	13,57	38,14	180,99	0,74
9. Buah-Buahan (08)	4,13	2,24	-1,89	-45,73	30,18	37,67	24,81	0,73
10. Berbagai Produk Kimia (38)	3,04	0,00	-3,04	-100,00	7,02	24,94	255,50	0,48
Total 10 Golongan Barang	**539,99**	**487,98**	**-52,00**	**-9,63**	**3.357,29**	**5.077,92**	**51,25**	**98,56**
Lainnya	**7,18**	**5,17**	**-2,02**	**-28,08**	**68,84**	**74,38**	**8,05**	**1,44**
Total Ekspor Nonmigas	**547,17**	**493,15**	**-54,02**	**-9,87**	**3.426,13**	**5.152,30**	**50,38**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan utama ekspor Sumatera Selatan pada Desember 2021 ditujukan ke Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat masing-masing mencapai US$200,46 juta; US$31,34 juta; dan US$31,12 juta. Nilai ekspor ke beberapa negara tujuan lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Total ekspor Desember 2021 ke 10 negara utama mencapai US$379,31 juta atau turun US$95,32 juta (20,08 persen) dibanding November 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya nilai ekspor ke beberapa negara tujuan utama seperti Tiongkok turun US$80,19 juta (28,57 persen), Amerika Serikat turun US$35,92 juta (53,58 persen), Korea Selatan turun US$6,21 juta (24,24 persen), Vietnam turun US$ 5,57 juta (26,86 persen), Jerman turun US$5,40 juta (80,32 persen), dan Malaysia turun US$1,51 juta (6,50 persen). Sedangkan beberapa negara yang mengalami peningkatan diantaranya Thailand naik US$22,81 juta (640,67 persen), India naik US$12,75 juta (87,66 persen), Slovenia naik US$2,69 juta (108,64 persen) dan Jepang naik US$ 1,22 juta (4,05 persen). Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa pada Desember 2021 mencapai US$74,65 juta dan US$24,66 juta, atau ke ASEAN naik 21,25 persen sedangkan ke Uni Eropa turun 11,90 persen dibanding November 2021.

Grafik 3.6

Pangsa Ekspor Sumatera Selatan Menurut Negara Tujuan Tahun 2021 (Juta US$)

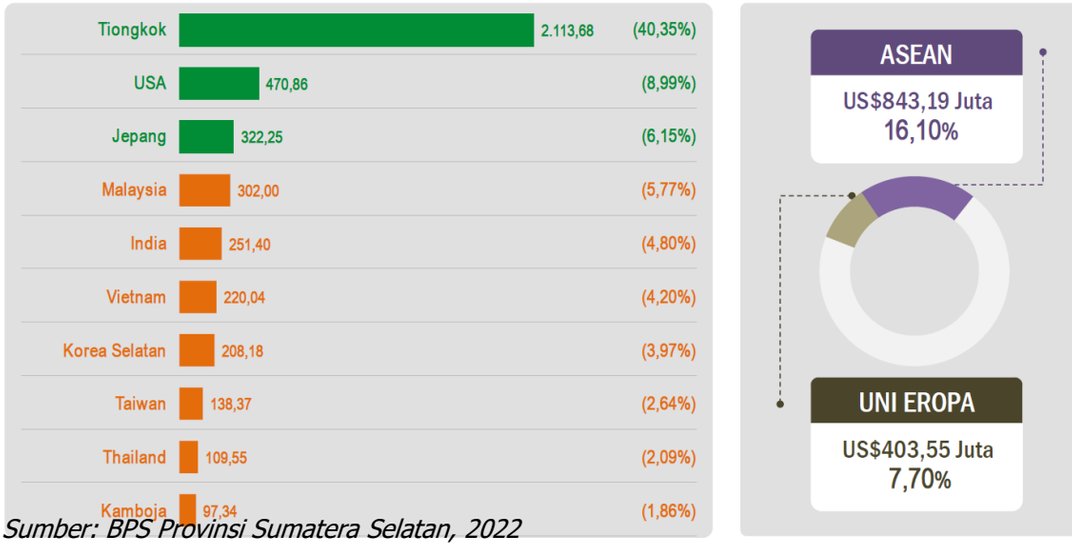

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Selama Januari–Desember 2021, ekspor produk pertambangan meningkat 185,66 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 yang disumbang oleh meningkatnya ekspor batubara dan lignit, ekspor produk pertanian meningkat 18,31 persen yang disebabkan oleh meningkatnya ekspor kelapa, demikian juga ekspor sektor industri pengolahan naik 21,65 persen yang terutama disumbang oleh meningkatnya ekspor karet remah dan minyak kelapan sawit.

Grafik 3.7.

Struktur Ekspor Provinsi Sumatera Selatan Menurut Sektor Tahun 2020-2021

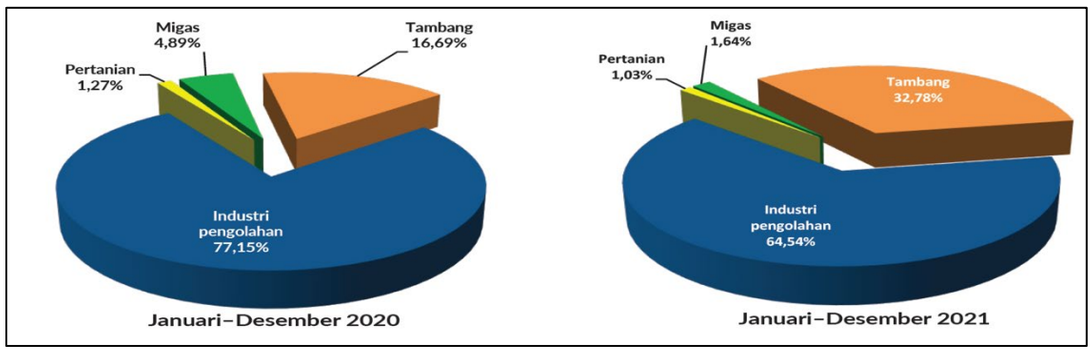

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Impor luar negeri tercatat mengalami penurunan. Komponen impor luar negeri pada periode laporan terkontraksi sebesar -32,85% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya dengan kontraksi sebesar -30,43% (yoy). Penurunan nilai impor dipengaruhi oleh penurunan impor peralatan industry, bubur kertas dan kertas bekas, serta komoditas impor lainnya. Secara khusus, penurunan impor

peralatan industri disebabkan oleh penyebaran pandemic COVID-19 yang masih berlanjut menyebabkan sektor swasta/ korporasi besar masih sedikit menahan realisasi investasi. Ditinjau dari negara asalnya, impor di triwulan IV 2021 paling tinggi berasal dari Tiongkok dengan pangsa sebesar 56,38%, selanjutnya disusul oleh ASEAN (17,69%), Eropa (5,63%), Jepang (1,79%), India (1,40%) dan Amerika Serikat (1,19%).

Grafik 3.8.

Perkembangan Impor Sumatera Selatan (Juta US$)

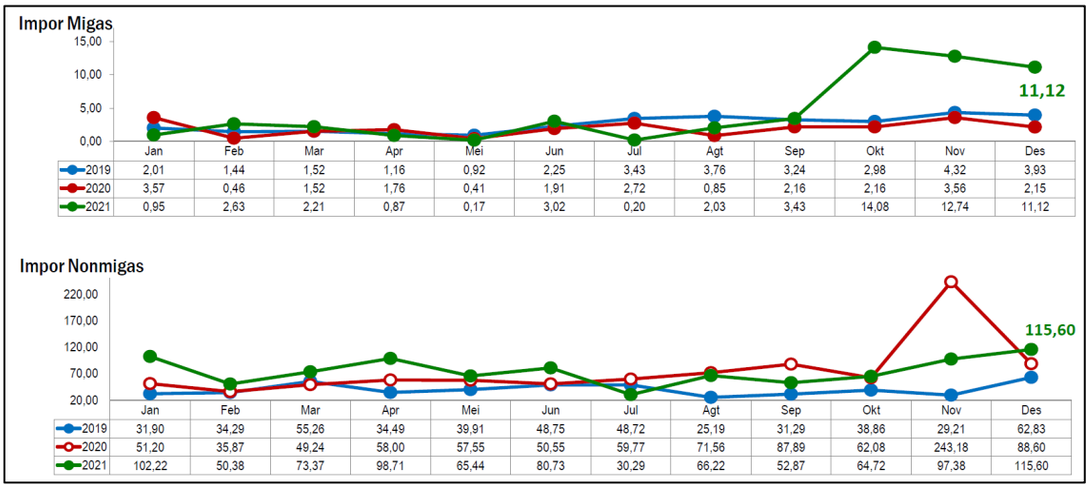

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2019	2,01	1,44	1,52	1,16	0,92	2,25	3,43	3,76	3,24	2,98	4,32	3,93
2020	3,57	0,46	1,52	1,76	0,41	1,91	2,72	0,85	2,16	2,16	3,56	2,15
2021	0,95	2,63	2,21	0,87	0,17	3,02	0,20	2,03	3,43	14,08	12,74	11,12

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2019	31,90	34,29	55,26	34,49	39,91	48,75	48,72	25,19	31,29	38,86	29,21	62,83
2020	51,20	35,87	49,24	58,00	57,55	50,55	59,77	71,56	87,89	62,08	243,18	88,60
2021	102,22	50,38	73,37	98,71	65,44	80,73	30,29	66,22	52,87	64,72	97,38	115,60

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Nilai impor Sumatera Selatan Desember 2021 mencapai US$126,72 juta atau naik US$16,60 juta (15,08 persen) dibandingkan November 2021. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya impor nonmigas sebesar US$18,22 juta (18,71 persen) dan migas turun sebesar US$1,62 juta (12,68 persen). Kenaikan nilai impor nonmigas disebabkan oleh bertambahnya nilai impor beberapa komoditas utama, terutama karet dan barang dari karet yang naik US$19,61 juta (422,05 persen).

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari-Desember 2021 mengalami peningkatan US$12,68 juta (1,35 persen). Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya impor migas US$30,24 juta (130,28 persen), yang mereduksi penurunan impor nonmigas sebesar US$17,57 juta (1,92 persen).

Tabel 3.7

Ringkasan Impor Provinsi Sumatera Selatan 2020-20221 (Juta US$)

Uraian	Nilai CIF (Juta US$)					Perubahan (%)			Peran Jan-Des 2021 (%)
	Des. 2020r	Nov. 2021	Des. 2021	Jan-Des 2020r	Jan-Des 2021	*y-on-y*	*m-to-m*	*c-to-c*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	**90,75**	**110,12**	**126,72**	**938,70**	**951,38**	**39,64**	**15,08**	**1,35**	**100,00**
Migas	**2,15**	**12,74**	**11,12**	**23,21**	**53,46**	**417,04**	**- 12,68**	**130,28**	**5,62**
- Minyak Mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Minyak	2,15	12,74	11,12	23,21	53,46	417,04	- 12,68	130,28	5,62
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	**88,60**	**97,38**	**115,60**	**915,49**	**897,92**	**30,48**	**18,71**	**-1,92**	**94,38**

Keterangan: r Angka Revisi

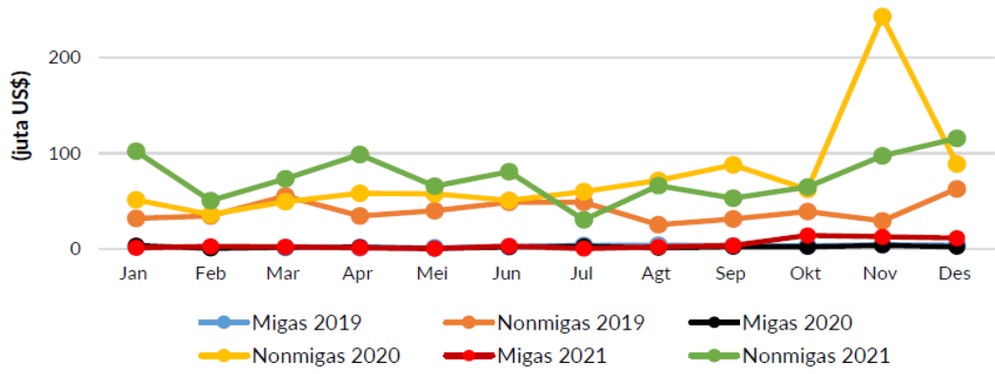

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan,2022

Nilai impor nonmigas Sumatera Selatan Desember 2021 yang mencapai US$115,60 juta, didominasi oleh golongan mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya US$47,11 juta (46,21 persen). Dilihat dari perkembangannya terhadap November 2021, peningkatan terbesar dialami oleh komoditas karet dan barang dari karet senilai US$19,61 juta (422,05 persen), diikuti oleh pupuk US$6,55 juta (57,63 persen), kereta api, trem dan bagiannya US$2,31 juta (45,55 persen), besi dan baja US$584,75 ribu (33,32 persen), dan pulp dari kayu US$280,59 ribu (10,30 persen).

Mesin peralatan mekanis dan bagiannya merupakan golongan barang yang mengalami penurunan terbesar, yaitu US$12,20 juta (20,57 persen), diikuti oleh bahan kimia anorganik US$2,69 juta (95,65 persen), plastik dan barang dari plastik US$269,51 ribu (12,57 persen), serta barang dari besi dan baja US$137,94 ribu (17,26 persen).

Tabel 3.8

Impor Non Migas Menurut Golongan Barang Sumatera Selatan (Juta US$)

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai CIF (Juta US$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Des 2021 (%)
	Des. 2020r	Nov. 2021	Des. 2021	Jan-Des 2020r	Jan-Des 2021	*y-on-y*	*m-to-m*	*c-to-c*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Mesin dan Peralatan Mekanis serta Bagiannya (84)	21,27	59,30	47,11	450,17	414,91	121,45	-20,57	-7,83	46,21
2. Pupuk (31)	12,31	11,37	17,93	93,71	114,48	45,70	57,63	22,16	12,75
3. Mesin dan Perlengkapan Elektrik Serta Bagiannya (85)	28,93	0,76	0,95	166,57	76,91	-96,70	25,08	-53,83	8,57
4. Kereta Api, Trem dan Bagiannya (86)	6,67	5,06	7,37	32,95	63,04	10,54	45,55	91,31	7,02
5. Karet dan Barang dari Karet (40)	0,19	4,65	24,25	11,03	34,53	12 381,62	422,05	213,07	3,85
6. Barang dari Besi dan Baja (73)	7,98	0,80	0,66	33,26	23,65	-91,72	-17,26	-28,88	2,63
7. *Pulp* dari Kayu (47)	0,74	2,72	3,01	11,78	23,47	308,36	10,30	99,26	2,61
8. Plastik dan Barang dari Plastik (39)	1,03	2,14	1,87	14,38	20,58	82,14	-12,57	43,12	2,29
9. Besi dan Baja (72)	1,09	1,75	2,34	8,86	18,45	113,69	33,32	108,23	2,05
10. Bahan Kimia Anorganik (28)	1,28	2,82	0,12	16,64	17,81	-90,44	-95,65	7,05	1,98
Total 10 Golongan Barang	81,49	91,39	105,61	839,35	807,83	29,60	15,57	-3,76	89,97
Barang Lainnya	7,10	5,99	9,98	76,13	90,09	40,50	66,51	18,33	10,03
Total Impor Nonmigas	88,60	97,38	115,60	915,49	897,92	30,48	18,71	-1,92	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Total nilai impor nonmigas dari 10 negara utama pada Desember 2021 mencapai US$104,92 juta atau naik US$12,60 juta (13,64 persen) dibandingkan November 2021. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya nilai impor dari beberapa negara utama seperti dari Pantai gading naik US$19,70 juta (6.329,12 persen), Jerman naik US$1,18 juta (1.649,18 persen), Jordania naik US$653,39 ribu (24,44 persen), Jepang naik US$364,80 ribu (21,00 persen), dan Kanada naik US$238,89 ribu (8,63 persen).

Dilihat dari peranannya terhadap total impor nonmigas Januari-Desember 2021, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh Tiongkok US$577,61 juta (60,71 persen), diikuti oleh Singapura US$44,95 juta (4,73 persen), dan Malaysia US$39,03 juta (4,10 persen). Kontribusi yang cukup tinggi juga berasal dari kelompok negara ASEAN US$164,22 juta (17,26 persen) dan Uni Eropa US$38,72 juta (4,07 persen).

Grafik 3.9

Pangsa Impor Non Migas Sumatera Selatan Tahun 2020 (Juta US$)

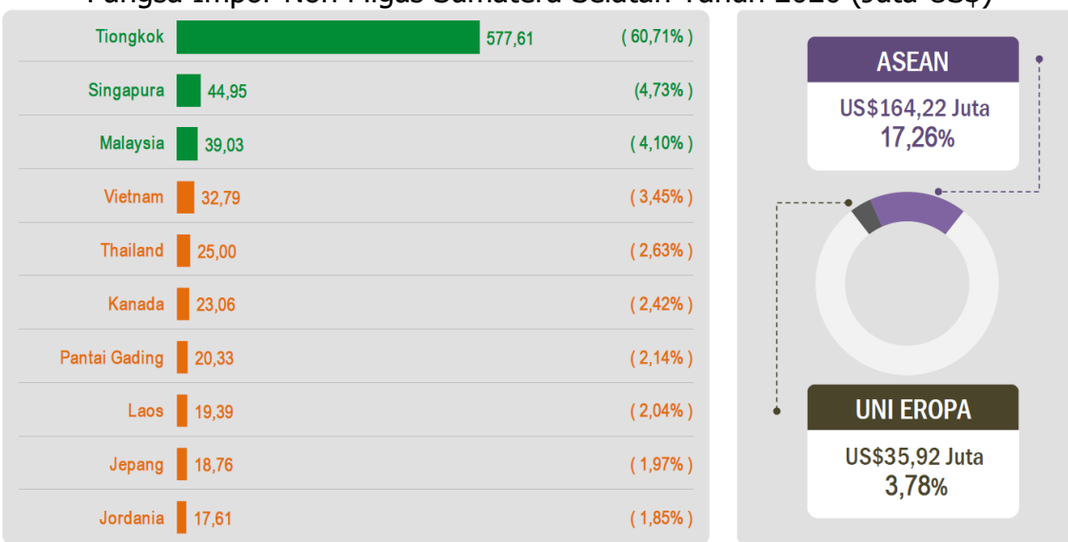

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Dibandingkan bulan sebelumnya, nilai impor golongan penggunaan bahan baku/penolong dan barang modal selama Desember 2021 mengalami peningkatan masing-masing sebesar US$11,53 juta (18,57 persen), dan US$5,36 juta (11,32 persen). Sementara itu impor golongan barang konsumsi turun US$285,51 (40,22 persen). Pada periode Januari-Desember 2021 golongan penggunaan barang konsumsi mengalami peningkatan sebesar US$4,34 juta (71,67persen), bahan baku/penolong naik US$159,14 juta (44,01 persen), dan barang modal mengalami penurunan sebesar US$150,81 juta (26,41 persen) dibanding periode yang sama tahun 2020.

Grafik 3.10.

Persentase Nilai Impor Sumatera Selatan menurut Golongan Penggunaan Barang 2020-2021

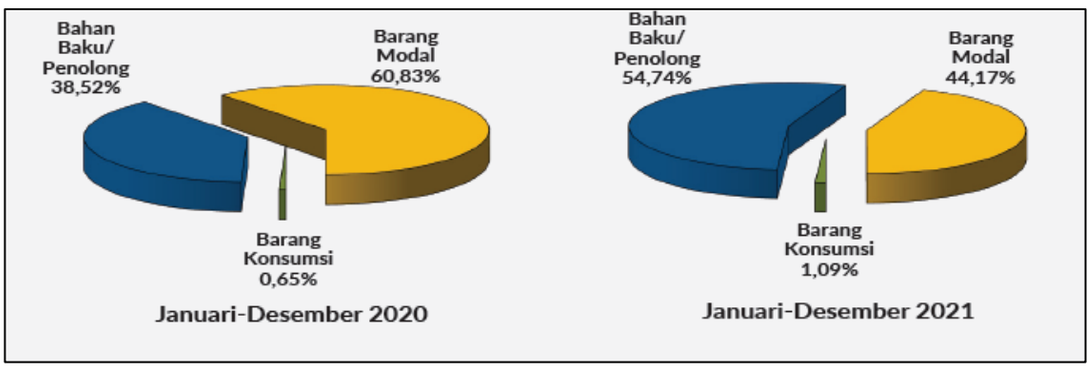

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Tabel 3.9
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Sumatera Selatan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2021

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2014-2021							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Pertambangan dan Penggalian (23,93%)	Pertambangan dan Penggalian (21,81%)	Industri Pengolahan (19,94%)	Industri Pengolahan (19,56%)	Pertambangan dan Penggalian (20,17%)	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92)%
II	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,76%)	Industri Pengolahan (18,36%)	Pertambangan dan Penggalian (19,71%)	Pertambangan dan Penggalian (19,24%)	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35)%	Industri Pengolahan (19,46%)
III	Industri Pengolahan (17,35%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (17,13%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (16,70%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,80%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,12%)
IV	Konstruksi (13,40%)	Konstruksi (12,58%)	Konstruksi (13,10%)	Konstruksi (13,24%)	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)
V	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,07%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,58%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,68%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,43%)	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2014-2021, dimana dari tahun 2015 sampai dengan 2020 posisi tertinggi bergantian berada di sektor pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan, pada tahun 2020 peringkat teratas terkait kontribusi sektor lapangan usaha yaitu di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,92%, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,46%, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,12%, peringkat ke 4 dan ke 5 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,52% dan sektor konstruksi sebesar 12,00%.

Meningkatnya sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2021 dipengaruhi oleh kenaikan volume produksi batubara serta perbaikan harga komoditas batubara global yang masih berlanjut. Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertambangan dan penggalian sebesar 19,92%, industri pengolahan sebesar 19,46% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 15,12%.

Tabel 3.10

PDRB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2021 (Miliar Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Triliun Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	60.507,65	62.231,17	65.661,81	69.501,21	74.311,31
B. Pertambangan dan Penggalian	73.673,20	84.604,26	92.166,26	83.796,10	97.933,56
C. Industri Pengolaham	74.900,28	81.822,06	87.834,52	90.477,24	95.639,57
D. Pengadaan Listrik dan Gas	493,32	536,90	575,06	673,04	727,68
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	444,86	501,98	557,98	606,00	594,96
F. Konstruksi	50.682,61	54.494,83	56.906,62	57.092,35	58.982,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.577,22	54.322,42	61.412,85	62.324,46	66.480,85
H. Transportasi dan Pergudangan	8.854,64	9.947,75	11.223,42	10.664,00	10.512,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.263,42	7.396,58	8.937,50	8.594,71	9.008,09
J. Informasi dan Komunikasi	10.627,82	11.943,21	13.177,44	14.936,51	15.852,29
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10.081,69	10.640,92	10.716,05	10.878,28	11.728,23
L. Real Estat	11.596,64	12.901,15	14.462,11	15.202,63	16.294,01
M,N. Jasa Perusahaan	459,95	529,79	615,14	616,52	623,07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12.098,34	11.959,46	12.100,89	13.198,71	13.722,16
P. Jasa Pendidikan	9.463,37	9.899,24	10.636,67	10.941,94	11.734,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.365,74	2.479,31	2.820,44	3.254,87	3.473,37
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.794,96	3.178,14	3.598,13	3.889,29	3.947,37
Produk Domestik Regional Bruto	**382.885,70**	**419.392,16**	**453.402,71**	**456.647,86**	**491.566,45**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2017-2021, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2017 nilai PDRB ADHB dengan migas sebesar 382.885,70 Miliar Rupiah meningkat menjadi 491.566,45 Miliar Rupiah tahun 2021.

Tabel 3.11

PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	ADHB Per Kategori (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	257.277,12	277.771,06	296.904,98	296.555,35	307.655,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.688,64	6.358,15	7.240,99	6.748,58	7.130,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29.902,58	32.460,27	36.686,87	32.465,00	34.555,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146.998,04	157.634,55	160.152,72	163.051,12	163.215,57
5. Perubahan Inventori	189,64	-972,55	-731,37	-1.972,33	80,65
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	-57.170,31	-53.859,32	-46.851,48	-40.199,85	-21.071,13
Produk Domestik Regional Bruto	**382.885,70**	**419.392,16**	**453.402,71**	**456.647,86**	**491.566,45**

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2022

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2012-2020 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2017 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 257.277,12 miliar rupiah pada tahun 2021 meningkat menjadi 307.655,30 miliar. Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2017 sebesar 146.998,04 miliar rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 163.215,57 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.12

PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	ADHK Per Kategori (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	175.670,78	183.420,98	190.641,45	186.943,08	190.560,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.202,88	4.563,10	5.009,23	4.710,91	4.806,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.167,19	21.604,63	22.801,46	19.869,06	20.444,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	107.287,54	111.301,18	113.186,34	114.605,19	111.007,10
5. Perubahan Inventori	**313,21**	**-227,60**	**-319,38**	**-1.331,43**	**54,85**
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	**-26.070,58**	**-22.178,22**	**-15.854,35**	**-9.667,59**	**-466,25**
Produk Domestik Regional Bruto	**281.571,01**	**298.484,07**	**315.464,75**	**315.129,22**	**326.407,93**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2017-2021 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2017 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 175.670,78 miliar rupiah pada tahun 2021 meningkat menjadi 190.560,72 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2017 sebesar 107.287,54 miliar rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 111.007,10, komponen ini terus mengalami peningkatan tiap tahunya.

Laju Inflasi

Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2021 mengalami Inflasi sebesar 0,42 persen, Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Desember 2021 sama dengan Inflasi Tahunan "Year on Year" (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,82 persen. Komoditas dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Desember 2021 di Sumatera Selatan antara lain: minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit yang mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan rata-rata harga bulan November 2021. Berdasarkan kelompok pengeluaran, diuraikan sebagai berikut:

1. **Makanan, Minuman, dan Tembakau**, pada bulan Desember 2021 kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi sebesar 1,24 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,37 persen. Komoditas dominan menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini, adalah minyak goreng naik harganya rata-rata sebesar 9,43 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,14 persen, daging ayam ras naik harganya rata-rata sebesar 4,51 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,08 persen, dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 8,82 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,07 persen. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga signifkan pada kelompok ini, yaitu tomat turun harganya rata-rata sebesar sebesar 14,74 persen menyumbang andil inflasi sebesar -0,04 persen.
2. **Pakaian dan Alas Kaki**, pada bulan Desember 2021 kelompok pengeluaran ini tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen. Perubahan harga tipis komoditas pada kelompok ini tidak memberikan andil inflai secara signifikan.
3. **Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,06 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,01 persen. Komoditas dominan menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini, adalah semen mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 1,75 persen, menyumbang andil inflasi sebesar 0,01 persen. Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga , yaitu cat tembok, seng, multiroof/ genteng metal dan besi beton namun tidak memberikan andil inflasi secara signifikan.
4. **Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,13 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,01 persen. Komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok

ini adalah sabun detergent bubuk/cair, sabun cair/cuci piring, dan kipas angin, mengalami kenaikan harga tipis, yang secara kumulatif memberikan andil inflasi sebesar 0,01 persen.

5. **Kesehatan**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen. Komoditas menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini diantaranya obat batuk mengalami kenaikan harga tipis tetapi tidak memberikan andil inflasi secara signifikan.
6. **Transportasi**, pada bulan Desember 2021 kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi sebesar 0,16 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,02 persen. Komoditas dominan menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini, adalah angkutan udara mengalami kenaikan harga sebesar 1,73 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,01 persen, angkutan antar kota mengalami kenaikan harga sebesar 1,77 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,01 persen. Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga pada kelompok ini adalah mobil dan tarif kereta api mengalami kenaikan harga namun tidak memberikan andil inflasi secara signifikan.
7. **Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,04 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,00 persen. Komoditas penyebab terjadinya deflasi pada kelompok ini adalah biaya administrasi transfer uang mengalami penurunan harga sebesar 9,23 persen namun tidak menyumbang andil inflasi secara signifikan.
8. **Rekreasi, Olahraga, dan Budaya**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen
9. **Pendidikan**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen.
10. **Penyediaan Makanan, Minuman/Restoran**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,20 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,02 persen. Komoditas dominan menyebabkan terjadinya inflasi pada kelompok ini, adalah mie siap saji mengalami kenaikan harga sebesar 1,83 persen menyumbang andil inflasi sebesar 0,01 persen, dan ikan goreng, kopi siap saji, soto, nasi dengan lauk, sate mengalami kenaikan harga tipis menyumbang andil inflasi secara kumulatif sebesar 0,01 persen.
11. **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**, pada bulan Desember 2021 kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,05 persen, menyumbang andil inflasi umum sebesar 0,00 persen. Komoditas yang menyebabkan deflasi pada kelompok ini pada bulan Desember 2021, yaitu emas perhiasan mengalami penurunan harga rata-rata sebesar 0,37 persen dan tidak menyumbang andil inflasi secara signifikan.

Gambar 3.3
Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera, 2021 (%)

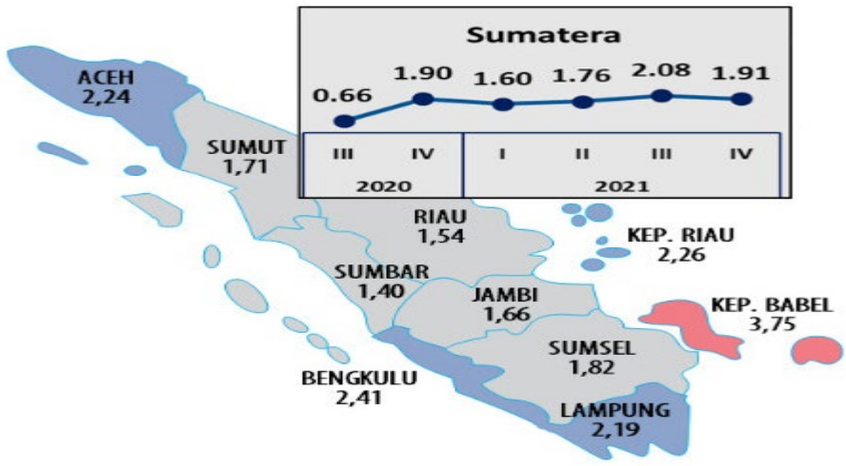

Sumber: Laporan Nusantara Februari 2022, Bank Indonesia (Diolah)

Jika melihat perbandingan inflasi pada tahun 2021 di Pulau Sumatera, inflasi Provinsi Sumatera Selatan (1,82%) masih relatif terkendali dan berada di bawah inflasi nasional (1,87% yoy). Selain itu, secara urutan di Pulau Sumatera, inflasi Sumsel berada pada urutan kelima terendah setelah Provinsi Sumatera Utara (1,71%).

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,48 persen (*yoy*), khusus tahun 2014 kenaikan inflasi Sumsel meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di pertengahan triwulan IV 2014. Pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,10 persen hingga tahun 2021 sebesar 1,82 persen.

Gambar 3.4
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2011-2021

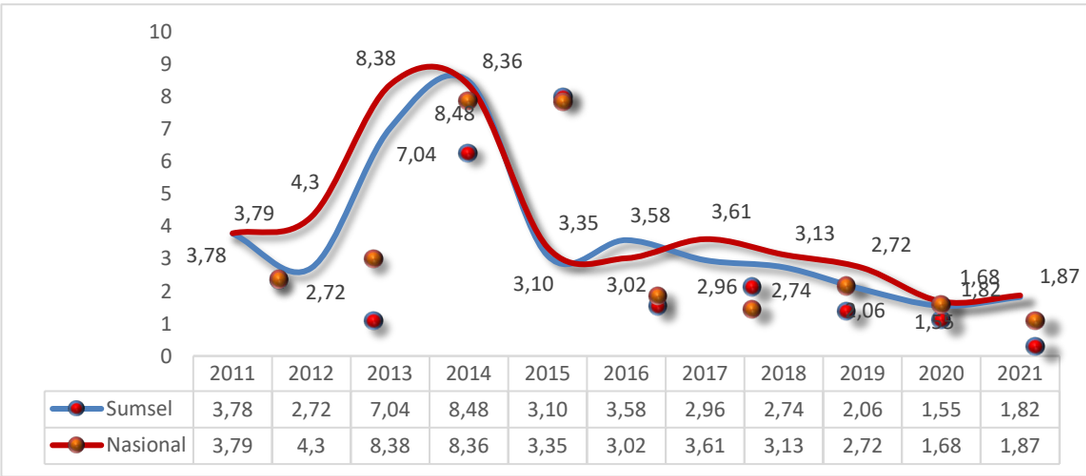

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumsel	3,78	2,72	7,04	8,48	3,10	3,58	2,96	2,74	2,06	1,55	1,82
Nasional	3,79	4,3	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Gini Ratio

Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2015-2021 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun terakhir atau pada periode September 2020-September 2021 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 0,338 keadaan September 2020 menjadi 0,340 keadaan September 2021 atau naik 0,002 poin, tetapi terjadi penurunan untuk periode Maret 2021-September 2021 sebesar 0,001 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 3.5

Gini Ratio Sumatera Selatan, 2015-2021

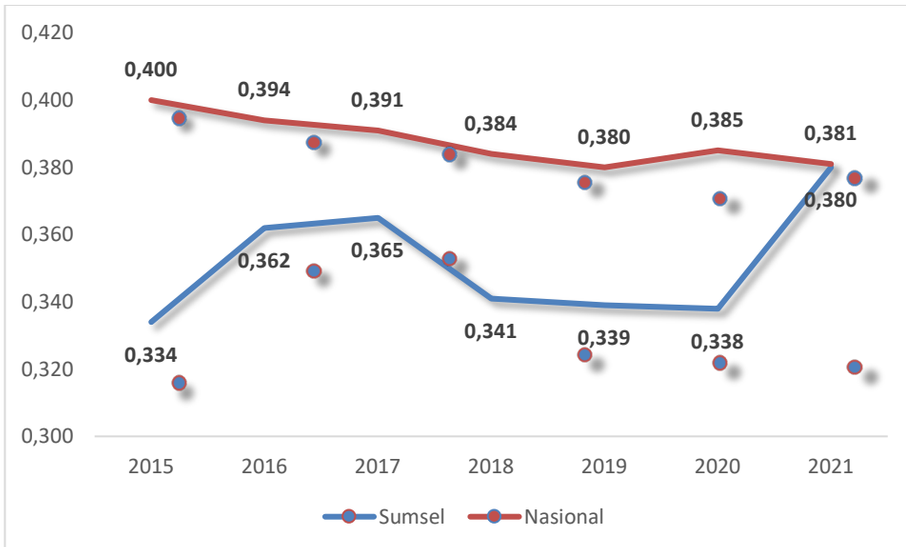

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Ditinjau dari wilayahnya, Gini Ratio di daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan. Gini ratio perkotaan pada September 2021 sebesar 0,363 sedangkan di perdesaan sebesar 0,314. Gini ratio di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan pada periode 2016-2021 mengalami fluktuasi, namun dalam satu tahun terakhir atau periode September 2020-September 2021 Gini Ratio daerah perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami peningkatan. Tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan searah dengan kondisi nasional, yang diperkirakan juga terkait dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di daerah perkotaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2021 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sumsel mencapai 4,48 persen, berkurang sebesar 2,17 persen dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,51% sebagai dampak

dari pandemi Covid-19. Di tahun 2021, Sumsel berhasil menurunkan angka TPT menjadi 4,98%. Hal tersebut seiring dengan capain TPT nasional di tahun 2021 yang juga mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2011-2021 capaian TPT Sumsel lebih rendah dibandingkan capaian TPT nasional.

Grafik 3.11

Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Selatan

Tahun 2011 – 2021, Persen (%)

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan,2022

Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2021 sebanyak 219,2 ribu orang atau berkurang sebanyak 19,2 ribu orang dari Agustus 2020 sebesar 238,4 ribu orang.

Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada September 2021 mencapai 12,79% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada September 2021 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2020 yang sebesar 12,98%. Penurunan ini searah dengan kondisi yang terjadi secara nasional. Hal ini merupakan salah satu dampak dari mulai pulihnya aktivitas ekonomi akibat pelonggaran pembatasan kegiatan karena kasus COVID-19 yang perlahan-lahan mereda. Secara Umum, tren pertumbuhan penduduk miskin di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan yang diikuti oleh kenaikan nominal garis kemiskinan.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial- Ekonomi; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema pembiayaan yang inovatif,

ekspansif dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan berada pada kisaran 11,59 – 12,66 persen di tahun 2023.

Grafik 3.12

Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan

Tahun 2009 – 2021 Persen (%)

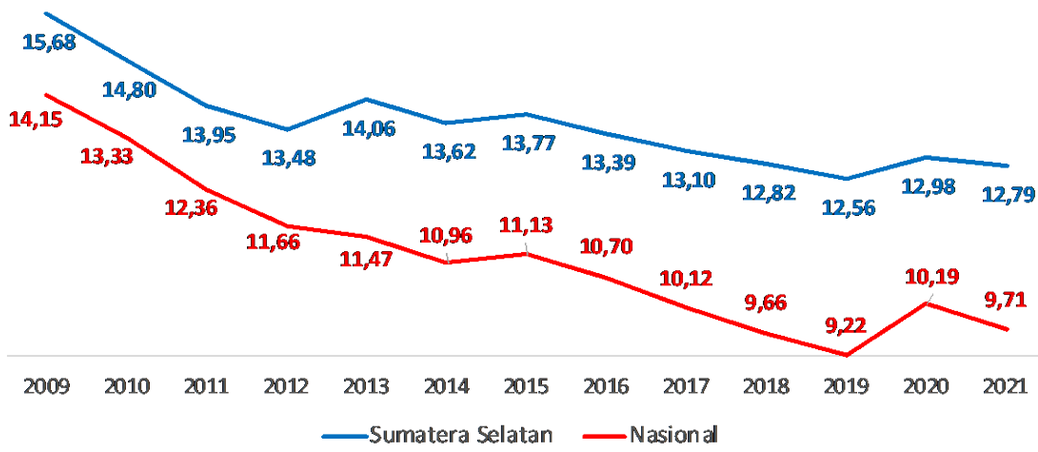

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

3.1.2.2. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2023

Kinerja perekonomian daerah yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi COVID-19 harus dilakukan.

Kondisi perekonomian daerah diperkirakan relatif baik pada tahun 2023. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 5,8-6,5 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan dunia yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pasca pandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas

produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan akan ditopang oleh seluruh sektor lapangan usaha terutama sector infromasi dan akomodasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dimana di tahun 2020 masyarakat banyak melakukan kegiatan melalui media daring sehigga meningkatnya penggunaan jasa internet, serta jasa kesehatan ditandai dengan meningkatnya kasus-kasus yang terkonfirmasi positif di Sumatera Selatan.

Tabel 3.13

Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

KATEGORI	SEKTOR/ SUB SEKTOR	PROYEKSI PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,6 - 3,0
B	*Pertambangan dan Penggalian*	5,7 - 6,5
C	*Industri Pengolahan*	3,0 - 3,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,0 - 13,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	5,3 - 5,8
F	Konstruksi	1,0 - 1,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepe	4,0 - 4,6
H	Transportasi dan Pergudangan	2,5 - 3,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,5 - 2,0
J	Informasi dan Komunikasi	12,5 - 13,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,5 - 2,0
L	Real Estate	3,5 - 4,5
M,N	Jasa Perusahaan	3,0 - 4,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,5 - 5,1
P	Jasa Pendidikan	2,0 -2,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,0 - 7,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,2 - 6,2

Sumber: FGD Proyeksi Ekonomi Makro Sumsel (BAPPEDA, BPS, BI DAN AKEDEMISI), 2022

Selain itu perlu juga diperhatikan beberapa tantangan dalam pemulihan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Potensi re-eskalasi Covid-19 serta kemungkinan akan munculnya varian baru (resiko ketidakpastian)
2. Dinamika ekonomi global berpotensi menekan kinerja ekspor
3. Ketidakpastian dunia usaha (adanya Undang-Undang Ciptakerja)
4. Sektor pertanian (kelp sawit, karet, kopi, lada), sector pertambangan (batubara)
5. Sektor jasa (jasa Pendidikan dan Kesehatan) akan Kembali pada new normal, sector telekomunikasi akan tumbuh melambat
6. Fenomena kelas pendapatan menengah yang mulai membelanjakan uang akibat pola konsumsi masyarakat yang sudah mulaipulih serta invetasi dipredikasi akan mengalami peningkatan
7. Adanya isu *green economy* dan *sustainable development*

Beberapa strategi dan arah kebijakan untuk mencapai meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Sektor Unggulan

Strategi	Arah Kebijakan
Pengembangan Sektor pertanian, perkebunan, perikanan	✓ Melakukan replanting terhadap tanaman perkebunan (sawit & karet) ✓ Pengembangan sistem irigasi di daerah rawa ✓ Pengembangan kawasan agropolitan ✓ Penataan kelembagaan petani ✓ Percepatan pembentukan food estate
Optimaliasi pengelolaan Pertambangan & Galian	✓ Meningkatkan standar mutu pengolahan hasil tambang ✓ Percepatan produksi PLTU mulut tambang
Pengembangan industri pengolahan	✓ Melakukan diversifikasi dan hilirisasi produk dengan penerapan inovasi ✓ Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk hasil pertanian ✓ Fasilitasi kemudahan perijinan investasi industri pengolahan ✓ Melakukan labelisasi produk unggulan UMKM
Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	✓ Pengembangan kawasan agropolitan dan Minapolitan di ✓ Pecepatan pembangunan pelabuhan perikanan di Muara Sungsang ✓ Percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan pelabuhan Tanjung Carat untuk kegiatan ekspor
Meningkatan aksestabilitas, konektivitas dan mutu infrastruktur di kawasan ekonomi	✓ Percepatan pembukaan akses jalan ke di wilayah yang terisolir di Pantai Timur OKI

Sumber: FGD Proyeksi Ekonomi Makro Sumsel (BAPPEDA, BPS, BI DAN AKEDEMISI), 2022

Tabel 3.15

Strategi Dan Arah Kebijakan Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan konsumsi Rumah Tangga	✓ Menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus fiscal: - Updating data penerima BLT, PKH dan program social safety nett lainnya bagi kalangan kurang mampu - Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong daya beli mayarakat perdesaan. - Memperkuat system kesehatan bagi masyarakat terutama kalangan menegah atas.
Peningkatan Investasi	✓ Efisiensi belanja daerah (operasional) untuk peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur (Jalan, jembatan, irigasi, dan kawasan pertumbuhan ekonomi), kawasan strategis
Peningkatan konsumsi Pemerintah	✓ Efektivitas penyaluran dana KUR (sektor pertanian, perdagangan, ✓ Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk hasil pertanian ✓ Fasilitasi kemudahan perijinan investasi industri pengolahan ✓ Melakukan labelisasi produk unggulan UMKM
Mendorong ekspor	✓ Peningkatan daya saying produk unggulan ✓ Refocusing Produk dari bahan mentah ke produk olahan

Dengan berbagai strategi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan di targetkan **pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2023 pada kisaran 5,8-6,5 %**.

Inflasi pada tahun 2023 diharapkan tetap terjaga pada kisaran 2-4% dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis.

Dengan masih terdampaknya pandemi Covid-19 di Indonesia kondisi **tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menjadi 3,06 – 4,22% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 11,59-12,66%.** Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Strategi menurunkan beban pengeluaran melalui kebijakan optimalisasi bantuan sosial baik tunai maupun non tunai dan penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan social serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Strategi peningkatan pendapatan melalui kebijakan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses administrasi kependudukan, akses permodalan usaha, keperantaraan usaha, kemitraan, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui reforma agraria dan perhutanan sosial.

Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,350 melalui stretegi penguatan ekonomi pada kelompok menengah bawah dan kelompok 40 persen terbawah. Kebijakan yang dilakukan adalah melalui peningkatan jumlah pekerja pada sektor formal dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan Pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan kesempatan kerja yang baik mencetak tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Indeks Williamson pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,563.

Tabel 3.16

Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan

Indikator	2019		2020		2021		2022	2023 (Proyeksi)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 - 5,9	5,71	5,5 - 6,0	3,4 - 3,8	4,6 - 6,2	3,58	5,6 - 6,3	5,8 - 6,5
PDRB ADHB (Rp. Trilyun)	422,17	455,23	480	471,29	498,75	491,56	466,97	542,3
PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	37,03	37,26	38,2	38,07	39,76	38,17	38,33	39,53
Inflasi (%/Tahun)	3,5 ± 1	2,06	2 - 4	1,56	2 - 4	1,82	2 - 4	2 - 4
Tingkat Kemiskinan (%)	12,51 - 12,71	12,56	10,00 - 11,65	12,98	9,9 - 10,78	12,79	11,94 - 12,77	11,59 - 12,66
Tingkat Pengangguran (%)	3,72 - 4,72	4,48	4,01	5,51	3,87	4,98	3,45 - 4,47	3,06 - 4,22

Indikator	2019		2020		2021		2022	2023 (Proyeksi)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Gini Ratio	0,355	0,339	0,354	0,355	0,353	0,38	0,352	0,35
Indeks Pembangunan Manusia	70,07	70,02	71,08	70,01	71,75	71,75	72,42	73,09
Indeks Williamson	0,700	0,733	0,655	0,746	0,562	0,753	0,560	0,750

Sumber : Data BPS, Bank Indonesia
*Keterangan : *Proyeksi BAPPEDA Prov. Sumsel, Bank Indonesia, 2022*

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Tahun 2023 akan menjadi akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, untuk menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Akselerasi percepatan pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat dan dapat meningkatkan pendanaan dan keuangan daerah.

Secara umum, kerangka pendanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sejumlah Rp. 10.427.358.893.000,00 mengalami peningkatan bila dibanding APBD Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp.9.902.571.031.458,00 atau bertambah sejumlah Rp. 524.787.861.542,00 atau 5,29 persen. Dilihat dari realiasi Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp.9.611.291.244.667,17 dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.9.278.520.060.062,03 masih dalam kategori sesuai dengan capaian realiasi tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi sektor keuangan diharapkan akan menunjukkan perbaikan sejalan dengan kemajuan penanganan Covid-19 termasuk program vaksinasi yang berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan pemerintah yaitu terbentuk herd immunity di masyarakat, serta berbagai stimulus pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, mendukung optimisme dan sentimen positif pada pasar serta pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan peningkatan sektor pendapatan daerah

maka proyeksi pendapatan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 10.427.358.893.000,00.

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi obyek PAD adalah: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang Sah. Penetapan Target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempertahankan penerimaan PAD, antara lain:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah:

1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2) Memperkuat proses pemungutan pajak daerah melalui penyusunan produk hukum, penyesuaian tarif pajak serta peningkatan sumber daya aparatur;
3) Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal;
4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda Prov. Sumsel melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap;
5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB;
6) Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja
7) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan;
8) Pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara online dan pengembangan/upgrade aplikasi samsat dan non samsat;

9) Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya;

10) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah;

11) Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah;

12) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru;

13) Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern;

14) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), antara lain:

- ✓ Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- ✓ Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
- ✓ Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif;
- ✓ Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
- ✓ Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- ✓ Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;

b. Retribusi Daerah:

1) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;

2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;

3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;

4) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retrubusi daerah.

5) Pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap OPD pemungut retribusi terkait penerapan perda tentang retribusi sesuai peraturan.

6) Peningkatan pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi dan meningkatkan mutu pelaksana retribusi.

7) Mereview Peraturan Daerah mengenai Retribusi terkait penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian,

8) Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;

9) Menggali objek pemungutan retribusi baru;

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;

2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah melalui :

- ✓ Melakukan penyehatan internal perusahaan baik dengan cara perampingan jumlah tenaga kerja dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan, serta melakukan efisiensi pengeluaran rutin perusahaan;
- ✓ Memperluas cakupan pelayanan perusahaan dengan membuka kantor cabang di Kabupaten/Kota yang potensial;

- ✓ Memperluas cakupan bidang usaha dari perusahaan, antara lain BPR Sriwijaya juga berpotensi untuk melakukan pembiayaan disektor pertanian atau agrobisnis dan PDPDE berpotensi untuk memperluas usaha di sektor hulu migas;
- ✓ Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Bussiness Plan) perusahaan untuk jangka menengah;
- ✓ Memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian;
- ✓ Menambah stimulan pembiayaan untuk perusahaan yang baru berdiri atau stimulan untuk perusahaan yang memiliki rencana pengembangan usaha yang layak secara ekonomi dan finansial;
- ✓ Mendorong BUMD untuk melakukan kerjasama usaha dengan investor baik dalam maupun luar negeri.

d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam mengali pendapatan asli daerah.
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
4) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
    a. Membenahi sistem administrasi menjadi sistem online dan tersentral pusat kontrolnya.
    b. Memaksimalkan pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

II. Pendapatan Transfer

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1) Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;

2) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;

3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui berbagai upaya untuk mempertahankan penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD tersebut, maka diharapkan target PAD Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai. Dilihat dari data capaian realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp.3.375.100.984.842,03 dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.3.865.463.033.085,17, maka proyeksi PAD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sejumlah Rp.5.303.117.558.633,00 mengalami peningkatan bila dibanding APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 5.006.440.725.860,00 atau bertambah sejumlah Rp.296.676.832.587,00 atau -5,92 persen. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah dialokasikan sejumlah Rp. 4.139.362.000.000,00 mengalami peningkatan bila dibanding APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 3.680.900.000.000,00 atau bertambah sejumlah Rp. 458.462.000.000,00 atau 12,45 persen.
2) Pendapatan Retribusi Daerah dialokasikan sejumlah Rp. 9.227.594.873,00 mengalami penurunan bila dibanding APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.11.669.359.773,00 atau berkurang Rp.2.441.764.900,00 atau -20,92%.
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dialokasikan sejumlah Rp.125.853.918.957,00 mengalami peningkatan bida dibanding APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.98.652.509.792,00 atau bertambah Rp.27.201.409.165,00 atau 27,57%.
4) Lain-lain PAD yang Sah dialokasikan sejumlah Rp.1.028.674.044.803,00 mengalami penurunan bila dibanding APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.215.218.856.295,00 atau berkurang sejumlah Rp.186.544.811.678,00 atau -15,35 persen.

Pendapatan Transfer

Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 serta dukungan terhadap PN dalam RKP Tahun 2023. Oleh karena itu, arah kebijakan TKD didasarkan pada tema RKP Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 7 PN dan 8 arah kebijakan. Memperhatikan hal tersebut, arah kebijakan umum TKD tahun 2023 disusun sebagai berikut:

a) Mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif, efisien dan berbasis kinerja;

b) Mendorong pemerataan layanan khususnya pemenuhan SPM;

c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan, penganggaran hingga pemanfaatan TKD;

d) Meningkatkan kualitas pemanfaatan TKD untuk belanja infrastruktur publik dan dukungan pencapaian prioritas nasional;

e) Mendorong sinergi pemanfaatan TKD dengan sumber pendanaan lainnya.

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sejumlah Rp.5.120.701.334.367,00. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

A.1 Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Pendapatan dari DBH-Pajak/Bukan Pajak dialokasikan sejumlah Rp.1.728.433.862.000,00 mengalami peningkatan bila dibanding APBD tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.1.423.060.984.000,00 atau bertambah Rp.305.372.878.000,00 atau 21,45%.

2) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sejumlah Rp.1.563.041.287.000,00. Arah Kebijakan DAU di Tahun 2023 meliputi, sebagai berikut:

   a) menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;
   b) mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
   c) menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah; dan
   d) mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sejumlah Rp.1.090.784.420.000,00.

   Berdasarkan RKP maka Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2023 antara lain:

   a) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta mendukung tematik tertentu sesuai dengan prioritas nasional;
   b) mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan capaian prioritas nasional berbasis pada capaian target kinerja;
   c) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome yang optimal;
   d) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus;
   e) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan;
   f) memperkuat sinergi pemanfaatan dan efisiensi belanja DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung baik APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

   Adapun arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

   a) melanjutkan penyediaan dan pemerataan operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan sesuai target prioritas nasional;
   b) memperkuat dukungan pendanaan bagi pencapaian prioritas nasional;
   c) meningkatkan sinergi pendanaan DAK Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya.

A.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 untuk sementara belum dialokasikan.

B. Kurang Salur DBH SDH dan Pajak

Kurang Salur DBH SDH dan Pajak Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sejumlah Rp.738.441.765.367,00.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan mempertahankan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana perimbangan;
b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
d. Mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sejumlah Rp. 3.540.000.000,00 mengalami penurunan bila dibanding APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 39.157.844.412,00 atau berkurang sejumlah Rp.35.617.844.412,00 atau -90,95 persen.

Adapun upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMD yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa pemberian dana hibah. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dimaksud pada saatnya dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusinya pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.17

Realiasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 – 2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**9.278.520.060.062,03**	**9.611.291.244.667,17**	**9.902.571.031.458,00**	**10.427.358.893.000,00**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3.375.100.984.842,03**	**3.865.463.033.085,17**	**5.006.440.726.046,00**	**5.303.117.558.633,00**
A.	Pendapatan Pajak Daerah	3.081.800.984.699,61	3.523.785.342.246,24	3.680.900.000.000,00	4.139.362.000.000,00
B.	Pendapatan Retribusi Daerah	8.234.552.913,00	9.313.749.306,00	11.669.359.773,00	9.227.594.873,00
C.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82.836.132.369,66	65.714.183.659,07	98.652.509.792,00	125.853.918.957,00
D.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	202.229.314.859,76	266.649.757.873,86	1.215.218.856.481,00	1.028.674.044.803,00
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.835.674.693.538,00**	**5.712.683.072.712,00**	**4.856.972.461.000,00**	**5.120.701.334.367,00**
A.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**5.835.674.693.538,00**	**5.712.683.072.712,00**	**4.107.012.461.000,00**	**4.382.259.569.000,00**
A.1	**Dana Perimbangan**	**5.835.674.693.538,00**	**5.712.683.072.712,00**	**4.076.886.691.000,00**	**4.382.259.569.000,00**
A.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	619.042.908.415,00		726.544.342.000,00	766.764.573.000,00
A.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	1.314.226.460.685,00		696.516.642.000,00	961.669.289.000,00
A.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.568.602.615.000,00		1.563.041.287.000,00	1.563.041.287.000,00
A.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.333.802.709.438,00		1.090.784.420.000,00	1.090.784.420.000,00
A.2	**Dana Insentif Daerah**			**30.125.770.000,00**	**-**
B.	**Kurang Salur DBH SDH dan Pajak**			**749.960.000.000,00**	**738.441.765.367,00**
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**67.744.381.682,00**	**33.145.138.870,00**	**39.157.844.412,00**	**3.540.000.000,00**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	26.967.232.682,00	28.268.138.866,00	39.157.844.412,00	3.540.000.000,00
1.3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.221.649.000,00		-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	555.500.000,00	4.877.000.004,00		

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2022 (data diolah)

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan jenis belanja. Pandemi COVID-19 masih membayangi pembangunan didaerah, namun dengan kondisi yang mulai mereda. Oleh karena itu, pada tahun 2023 pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan fokus mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Realisasi belanja APBD tahun 2020 sebesar Rp.9.517.763.493.965,89 dan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp.10.060.730.260.979,40, maka untuk tahun 2023 proyeksi belanja sejumlah Rp.10.129.577.633.012,00. Dimana kebutuhan belanja ini diarahkan untuk pembiayaan dan pemenuhan pembangunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

Arah kebijakan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Pemenuhan Belanja untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi**

Tahun 2023 merupakan tahun lanjutan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika COVID-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian COVID-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing dalam rangka pemulihan perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup penguatan sektor primer yang meliputi sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, penguatan serta perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu juga dukungan terhadap penguatan UMKM yang menjadi salah satu sokoguru perekonomian juga menjadi salah satu fokus dalam perekonomian Sumatera Selatan dengan didukung pelaksanaan event-event yang mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat. Salah satu yang tidak kalah penting ditahun 2023 kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor baik ke luar negeri maupun antar daerah di dalam negeri juga akan membawa udara segar bagi proses pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Dengan demikian pemenuhan belanja pada tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor primer, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata dan investasi. Peningkatan dan perluasan program untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat, serta memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

Untuk mendukung kebijakan tersebut diatas maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.18

Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**6.015.000.000**		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			**400.000.000**		
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	200.000.000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencaker yang ditempatkan	80 Persen			
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	200.000.000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			**315.000.000**		
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP dan UMK				
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Dokumen	315.000.000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			**800.000.000**		
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			800.000.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA			**2.000.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	350 Unit Usaha	2.000.000.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			**2.500.000.000**		
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			2.500.000.000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**3.205.000.000**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan**
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			**250.000.000**		
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi					

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	jenis bantuan/pelatihan Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	2 kali 0 Unit	250.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			**1.805.000.000**		
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok SPR/kelompok peternak yang dibina dan diberi bantuan	8 SPR	100.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan IB	50000 akseptor	55.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi					
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah sarana dan prasarana UPTD	2 unit	750.000.000	Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah lahan HPT	15 hektar	100.000.000	Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah komoditi ternak yang dikembangkan di daerah pengentasan kemiskinan	4000 komoditi	500.000.000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang,	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Penataan Prasarana Pertanian					
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibantu/dibina	2 kelompok	75.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah plasma nutfah peternakan yang dilestarikan	200 ekor	100.000.000	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					
Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah pedagang, peternak dan panitia masjid hari raya qurban	170 orang	125.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			**1.150.000.000**		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah petani yang diberdayakan	4000 petani	1.150.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			**1.200.000.000**		**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			**1.200.000.000**		
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			450.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			150.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan			300.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			150.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			150.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**1.280.000.000**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tercapainya persentase pertumbuhan investasi Penanaman Modal	7 %	**300.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tingkat capaian penetapan fasilitas / insentif penanaman modal daerah	100 persen			
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah regulasi / kebijakan yang ditetapkan	0 Dokumen 1 dokumen	300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	675 perizin dan non perizinan	**980.000.000**		
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang cepat, terintegerasi dan transparan	675 perizinan			
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP pelaku usaha yang memahami aplikasi perizinan Pelaku usaha yang menggunakan peta digital sebaran perizinan dan non perizinan	675 izin dan non izin 100 pelaku usaha 300 pelaku usaha	605.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	66 orang	375.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**10.000.000.000**		**Dinas Sosial**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.000.000.000		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1000 KK	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Sosial
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	30 Orang	700.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	0 Orang 1700 kk	9.200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**14.650.294.480**		**Dinas Pemuda dan Olahraga**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**5.350.294.480**		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan	10 Orang	171.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
	Kapasitas Daya Saingnya				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Kreativitas Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang 200 Orang 10 Orang	1.479.294.480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Jumlah Peserta Olahraga Cheerleaders dalam 1 Tahun Jumlah Peserta Olahraga Massal dalam 1 Tahun Jumlah Peserta Olahraga Street Soccer dalam 1 Tahun	1000 Orang 500 Orang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah cabang olahraga di SONS yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Cabor POPNAS yang mendapatkan peralatan Jumlah Cabor yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Infrastruktur Olahraga/ Venue Kab/Kota se Sumatera Selatan yang di Standarisasi Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Club/ Badan/ Organisasi yang mendapatkan peralatan olahraga	12 Cabor 40 Cabor 2 Cabor 17 Kab/Kota 5 club/masyarakat 1 Venue 0 Unit 8 Paket	3.700.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
	Jumlah Peralatan Olahraga untuk Stadion Bumi Sriwijaya Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Saran dan Prasarana Untuk PPLP				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**9.300.000.000**		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi Jumlah peserta Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (FORPROV) Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Atletik Gubernur Cup Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Balap Sepeda Gubernur Cup Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Bulu Tangkis Gubernur Cup Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Senam Gubernur Cup Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Tenis Meja Gubernur Cup Jumlah Peserta Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Nasional (PEPAPERNAS) Jumlah peserta Turnamen	0 Dokumen 1000 Orang 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 2000 Orang 48 Tim	9.300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
	Sepakbola Piala OPD				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**136.465.000.000**		**Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			**88.395.000.000**		
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	11 Laporan	83.500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	1.000.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	52 Sertifikat	1.805.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	5 Laporan	1.840.000.000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	2 Dokumen	250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			**11.050.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Penataan Prasarana Pertanian		4 Dokumen		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	150.000.000		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	10.600.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan	150.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			**37.020.000.000**		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1025 Ha	400.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500 Ha	200.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	617.000.000	Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Bunga Mayang, Peracak	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1400 Kelompok	34.478.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	175 Unit	900.000.000		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	0 Laporan	425.000.000		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**13.065.000.000**		**Dinas Perkebunan**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			**5.850.000.000**		
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan 0 Laporan	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perkebunan
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikasi Benih	2000 sertifikat	250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua	Dinas Perkebunan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
				Kecamatan, Semua Kelurahan	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2 Laporan	5.500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			**50.000.000**		
Penataan Prasarana Pertanian					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	0 Laporan 4 Laporan	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			**750.000.000**		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	250 Ha	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perkebunan
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikukltura, dan perkebunan	75000 Ha	250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			**100.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi Jumlah Izin Usaha	12 Laporan 0 Laporan	100.000.000	Kab. Lahat, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua	Dinas Perkebunan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
				Kecamatan, Semua Kelurahan	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			**6.315.000.000**		
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1000 kelompok	6.240.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perkebunan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang dibentukdan beroperasi	2 unit	75.000.000	Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perkebunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**11.308.784.600**		**Dinas Kelautan dan Perikanan**
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			**200.000.000**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	200.000.000	Kab. Ogan Komering Ilir, Tulung Selapan, Tulung Selapan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			**2.600.000.000**		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	300.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	200 Unit	2.000.000.000	Kab. Banyuasin, Banyuasin II, Sungsang IV	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil					

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	100 Rekomendasi	300.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			**6.538.784.600**		
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	500.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya di food estate Jumlah Bantuan sarana dan prasarana budidaya di kegiatan ketahan pangan (Bibit Ikan) Jumlah Bantuan sarana dan prasarana budidaya di kegiatan ketahan pangan (Pakan) Jumlah Bantuan sarana dan prasarana budidaya di kegiatan ketahan pangan (Waring)	300 ekor 350 ekor 7 Kg 120 Unit	938.784.600		Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	4.500.000.000	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Air Satan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	600.000.000	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Air Satan	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			**770.000.000**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	10 Dokumen	500.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	9 Kelompok	270.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			**1.200.000.000**		
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	200.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	27 Unit Usaha	300.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	0 Unit Usaha	500.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 dokumen	200.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**3.230.000.000**		**Dinas Perdagangan**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			**760.000.000**		
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	100.000.000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Dinas Perdagangan
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	220.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	Dinas Perdagangan
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	330.000.000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perdagangan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	110.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			**885.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					
Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	600.000.000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Dinas Perdagangan
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	200.000.000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perdagangan
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	60 Pelaku Usaha	85.000.000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			**365.000.000**		
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					
Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 Komoditi	165.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perdagangan
Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Dokumen	200.000.000	Kota Palembang, Ilir Barat I,	Dinas Perdagangan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
				Demang Lebar Daun	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			**1.220.000.000**		
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					
Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	5 UMKM	300.000.000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30 UMKM	770.000.000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger	1 Laporan	150.000.000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH			**1.595.000.000**		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**1.595.000.000**		
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Pelaksanaan Percepatan Akses keuangan Daerah pada Koperasi Syariah di Pondok Pesantren, Jumlah Dokumen Data Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan, Jumlah dokumen data pelaksanaan CSR PKBL untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan Jumlah Pelaksanaan Percepatan Akses Leuangan Daerah pada Koperasi Syariah di Pondok Pesantren, Jumlah Dokumen Data Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan, Jumlah dokumen data pelaksanaan CSR PKBL untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan Jumlah Pelaksanaan Percepatan Akses Leuangan Daerah pada Koperasi Syariah di Pondok Pesantren, Jumlah Dokumen DataKoordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan, Jumlah dokumen data pelaksanaan CSR PKBL untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan	5 Koperasi Syariah 10 buku laporan 35 buku laporan	770.000.000		Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen data penyaluran KUR oleh Bank Penyalur kepada UMKM	10 buku laporan	440.000.000		Sekretariat Daerah
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			*Stakeholders*
		Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pengembangan investasi promosi produk dan budaya sumsel	4 pameran	660,000,000		Sekretariat Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi di SumselJumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi di Sumsel	1 Dokumen	385.000.000		Sekretariat Daerah
			202.014.079.080		

2. Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib

Terkait dengan pemenuhan Belanja Mengikat adalah untuk memenuhi belanja yang dibutuhkan secara terus menerus baik yang didasarkan dengan Peraturan Daerah Tahun Jamak maupun belanja yang diperlukan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan. Sedangkan yang terkait dengan Belanja Wajib adalah memenuhi belanja untuk menjamin pemenuhan pendanaan kegiatan pelayanan dasar.

3. Pemenuhan Belanja Prioritas RKPD dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD

Pengalokasian belanja berdasarkan *money follow program* bukan *money follow function*. Dalam hal ini diarahkan untuk membiayai 4 prioritas daerah RKPD 2023 yang dijabarkan ke dalam program prioritas daerah seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.19

Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023

No.	PRIORITAS DAERAH RKPD 2023
1.	***Meningkatkan Kesejahteraan Sosial***
2.	***Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi***
3.	***Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang***
4.	***Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah***

No.	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1.1	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
1.2	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.3	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin
1.4	Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan
1.5	Peningkatan Penguatan Sistem Kesehatan
1.6	Peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar
2.1	Peningkatan Produksi Sektor Unggulan
2.2	Peningkatan Sektor Industri Pengolahan Daerah Berbasis Sektor Unggulan
2.3	Pengendalian Inflasi Daerah
2.4	Peningkatan Pertumbuhan Dan Pengembangan Koperasi Dan Umkm Daerah
2.5	Peningkatan Industri Pariwisata
2.6	Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
3.1	Peningkatan Infrastruktur Konektivitas
3.2	Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air
3.3	Penurunan Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan
3.4	Meningkatnya Komunikasi. Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana
3.5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
4.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah
4.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.3	Peningkatan Kapabilitas Birokrasi

4. Optimalisasi Belanja Daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019)

Belanja pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Untuk komponen Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, besarnya penganggaran diperuntukkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp. 2.767.226.342.825,00.

Belanja Hibah dimana kegiatan terkait dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023 dialokasikan sejumlah Rp. 361.024.635.600,00.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sejumlah Rp.16.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer dimana terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran

2023 dialokasikan sejumlah Rp. 1.940.590.766.667,00. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sejumlah Rp. 1.544.936.267.453,00.

Uraian anggaran dan proyeksi belanja daerah tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 – 2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
2	**BELANJA DAERAH**	**9.517.763.493.965,89**	**10.060.730.260.979,40**	**9.766.471.031.458,00**	**10.129.577.633.012,00**
1.	**BELANJA OPERASI**	**5.038.670.309.775,65**	**5.365.031.503.749,49**	**5.008.939.321.622,00**	**5.370.929.396.563,00**
A.	*Belanja Pegawai*	*1.771.524.397.218,00*	*1.923.290.549.742,00*	2.605.363.817.438,00	2.767.226.342.825,00
B.	*Belanja Barang dan Jasa*	*1.392.760.537.519,30*	*1.811.885.209.417,49*	1.997.737.680.721,00	2.226.678.418.138,00
C.	*Belanja Bunga*		*382.096.916,00*	16.500.000.000,00	16.000.000.000,00
D.	*Belanja Subsidi*				
E.	*Belanja Hibah*	*1.873.445.636.520,56*	*1.629.473.647.674,00*	389.337.823.463,00	361.024.635.600,00
F.	*Belanja Bantuan Sosial*		-		-
	Belanja Biaya Provinsi Pengelolaan Pinjaman	*939.738.517,79*			
2.	**BELANJA MODAL**	**1.664.700.767.363,54**	**1.836.834.114.021,94**	**1.445.742.037.574,00**	**1.257.121.202.329,00**
A.	*Belanja Tanah*		*70.853.405.527,00*	8.403.511.169,00	
B.	*Belanja Peralatan dan Mesin*		*288.834.883.969,24*	314.832.972.271,00	
C.	*Belanja Bangunan dan Gedung*		*289.050.835.757,28*	374.675.426.771,00	
D.	*Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan*		*1.107.398.086.860,42*	663.622.420.120,00	
E.	*Belanja Aset Tetap Lainnya*		*80.696.901.908,00*	83.288.206.243,00	
F.	*Belanja Modal Aset Lainnya*			919.501.000,00	
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**197.104.066.604,97**	**14.055.098.162,00**	**16.000.000.000,00**	**16.000.000.000,00**
4.	**BELANJA TRANSFER**	**2.617.288.350.221,73**	**2.844.809.545.045,96**	**3.295.789.672.262,00**	**3.485.527.034.120,00**
A.	*Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota*	*1.455.636.933.603,00*	*1.579.375.912.863,60*	*1.777.650.000.000,00*	*1.940.590.766.667,00*
B.	*Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa*	*1.161.651.416.618,73*	*1.265.433.632.182,36*	*1.518.139.672.262,00*	*1.544.936.267.453,00*

Sumber: TAPD (data diolah), 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp. 133.218.740.012,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp.431.000.000.000,00.

Tabel 3.21

Realiasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
3	**PEMBIAYAAN**	**589.092.782.358,42**	**701.159.551.422,81**	**588.500.000.000,00**	**564.218.740.012,00**
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	474.977.880.806,42	615.159.551.422,81	226.200.000.000,00	133.218.740.012,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	114.114.901.552,00	86.000.000.000,00	362.300.000.000,00	431.000.000.000,00

Sumber: TAPD (data diolah), 2022

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan didukung juga dari program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, selain dari APBD Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.

3.3.1. APBD Kabupaten/Kota

Total APBD 17 Kabupaten/Kota sangat signifikan bila dibandingkan dengan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Optimalisasi pemanfaatan APBD 17 Kabupaten/Kota amatlah penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Arah kebijakan pembangunan daerah terkait optimalisasi APBD di 17 Kabupaten/Kota adalah sinkronisasi dan sinergi RKPD provinsi dengan RKPD 17 kabupaten/kota. Dengan demikan, target-target makro pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dapat dikawal pencapaiannya melalui tahapan evaluasi RKPD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Sebaliknya, pencapaian target-target RPJMD Kabupaten/Kota juga dapat didukung dana APBD Provinsi karena RKPD Kabupaten/Kota telah sinkron dengan RKPD Provinsi. Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom yang berhak dan mempunyai wewenang untuk menyusun RKPD masing-masing sesuai dengan RPJMD masing-masing. Namun demikian, tersedia tahapan untuk sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota dengan RKPD Provinsi melalui mekanisme yang telah diatur Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu tahapan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota oleh Provinsi.

Realisasi APBD 17 Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22

Realisasi Belanja Kab/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2019 dan 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Belanja (Rp)	
		2019	2020
1	Ogan Komering Ulu	1.554.158.811,04	1.490.566.527,35
2	Ogan Komering Ilir	2.156.638.765,59	2.398.524.591,87
3	Muara enim	2.930.636.527,25	2.019.912.535,87
4	Lahat	1.466.506.516,46	1.821.413.388,17
5	Musi Rawas	1.550.507.411,68	1.800.644.785,26
6	Musi Banyuasin	3.614.947.007,83	2.923.048.401,51
7	Banyuasin	1.994.350.795,62	2.047.785.039,44
8	OKU Selatan	1.425.248.550,47	1.337.273.694,05
9	OKU Timur	1.630.478.947,97	1.900.180.287,90
10	Ogan Ilir	1.518.721.496,80	1.350.970.193,38
11	Empat Lawang	860.303.010,60	862.668.311,75
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1.465.274.633,89	880.808.605,35
13	Musi Rawas Utara	921.657.113,04	917.760.731,11
14	Palembang	3.968.520.772,17	3.220.957.279,64
15	Prabumulih	1.176.099.242,46	1.053.411.752,10
16	Pagar Alam	810.513.323,49	790.690.455,82
17	Lubuk Linggau	944.086.823,72	974.277.297,73

Sumber: Sumsel Dalam Angka 2021

APBD 17 Kabupaten/Kota tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
APBD 17 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021
di Provinsi Sumatera Selatan

NO	KAB/ KOTA	APBD KABUPATEN/KOTA (Rp.)		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Musi Banyuasin	2.890.854.156.502,00	3.465.512.719.200,00	3.261.494.190.000,00
2	Banyuasin	2.649.014.856.215,71	2.512.467.393.088,36	2.808.583.001.678,00
3	Musi Rawas Utara	1.064.185.495.590,00	1.130.213.916.754,00	1.061.176.899.097,00
4	Muara enim	2.651.840.865.992,92	2.674.872.911.890,40	2.562.723.622.559,00
5	Ogan Komering Ilir	2.420.908.565.504,00	2.646.937.247.333,00	2.710.500.006.408,00
6	Lubuk Linggau	1.103.119.422.773,46	1.025.633.466.103,00	1.161.890.120.295,00
7	Musi Rawas	1.906.547.269.695,00	1.715.134.483.922,07	1.842.420.446.761,00
8	Prabumulih	959.939.807.977,00	1.031.921.334.138,00	916.529.554.266,00
9	Pali	1.679.334.090.921,60	1.665.836.575.387,94	1.448.659.524.760,00
10	Empat Lawang	1.087.443.528.630,00	1.106.392.038.227,00	1.171.588.020.695,00
11	Ogan Komering Ulu	1.540.807.155.681,00	1.598.161.792.865,00	1.430.678.151.986,00
12	Pagar Alam	813.606.985.747,00	743.302.017.206,00	711.541.456.951,00
13	OKU Timur	2.005.651.420.697,00	1.887.415.279.971,00	1.735.599.140.580,00
14	Lahat	2.053.712.558.910,93	2.043.838.726.704,00	1.979.922.135.817,00
15	OKU Selatan	1.346.671.201.207,09	1.478.199.319.826,57	1.321.893.123.138,00
16	Ogan Ilir	1.575.721.503.821,19	1.676.863.867.622,39	1.470.870.387.142,00
17	Palembang	4.659.095.271.465,09	4.693.621.118.000,00	4.329.487.605.453,00

Sumber: BPKAD Prov. Sumsel,2021

3.3.2. APBN

3.3.2.1. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Terdapat beberapa jenis APBN yang dialokasikan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan kepada Perangkat Daerah Provinsi, APBN Tugas Pembantuan dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun oleh Perangkat Daerah Provinsi. Besaran APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi.

Untuk memantau realisasi APBN dan permasalahan yang mungkin timbul dan dapat menghambat realisasi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menciptakan inovasi aplikasi online e-monev yang diupdate tiap bulan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.3.2.2. APBN pada Proyek Infrastruktur di K/L

Proyek infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dengan menggunakan dana APBN diantaranya yaitu:

Tabel 3.24

Rincian Kegiatan Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No. Urut Prioritas	Kegiatan / Pekerjaan Infrastruktur	Lokasi	Sasaran		Rencana Alokasi (Rp. Ribu) Tahun 2023
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA					**350.051.826**
Kegiatan Wajib/Lanjutan					**302.338.826**
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Jalan Strategis (ProPN) / Preservasi Jalan Ruas Betung - Bts. Kota Palembang (SBSN MYC)	BANYU ASIN	15,66	Km	105.659.308
2	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan / Pembangunan FO KA Bantaian (Usulan SBSN Baru)	MUARA ENIM	390	M	50.000.000
3	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan / Pembangunan FO KA Gelumbang (Usulan SBSN Baru)	MUARA ENIM	480	M	61.182.700
4	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Jalan Strategis (ProPN) / Preservasi Jalan Ruas Bts. Prov. Jambi - Peninggalan (SBSN MYC)	MUSI BANYUASIN	12,6	Km	85.496.818
Kegiatan Baru 2023					**47.713.000**
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pelebaran Jalan Menambah Lajur / Pelebaran Menambah Lajur Jalan Sp. Inderalaya - Meranjat	OGAN ILIR	1,6	Km	19.000.000
2	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pelebaran Jalan Menambah Lajur / Pelebaran Jalan Menambah Lajur Ruas Jend. Sudirman (Prabumulih)	KOTA PRABUMULIH	0,64	Km	7.713.000
3	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Jembatan / Pembangunan Jembatan Gantung 1 Sumatera Selatan	MUSI BANYUASIN	42	M	7.000.000
4	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Jembatan / Pembangunan Jembatan Gantung 2 Sumatera Selatan	LAHAT	42	M	7.000.000
5	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Jembatan / Pembangunan Jembatan Gantung 3 Sumatera Selatan	OGAN ILIR	42	M	7.000.000

No. Urut Prioritas	Kegiatan / Pekerjaan Infrastruktur	Lokasi	Sasaran		Rencana Alokasi (Rp. Ribu) Tahun 2023
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA					264.118.984
Kegiatan Wajib/Lanjutan					140.318.984
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan / Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah / Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah / Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sumatera Selatan 1	KOTA PALEMBANG	1	Unit	30.000.000
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan / Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah / Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah / Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sumatera Selatan 1	KOTA PALEMBANG	1	Unit	979.680
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan / Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah / Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah / Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi Sumatera Selatan 1	KOTA PALEMBANG	1	Unit	21.250.000
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan / Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah / Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah / Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi Sumatera Selatan 1	KOTA PALEMBANG	1	Unit	780.810
5	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota / Pembangunan Jaringan IPAL Kota Palembang Paket B2A	KOTA PALEMBANG	1	KK	87.308.494
Kegiatan Baru 2023					123.800.000
1	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota / Pembangunan TPA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	20.000,00	KK	30.000.000
2	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota / Pembangunan TPA Sementul Kabupaten Banyuasin	BANYU ASIN	7.000,00	KK	53.800.000
3	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota / Pembangunan TPA Kabupaten Musi Rawas Utara	MUSI RAWAS UTARA	20.000,00	KK	30.000.000
4	Penyelenggaraan Pemukiman dan Bangunan Gedung / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Pemugaran Pemukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kawasan Jakabaring Kota Palembang	KOTA PALEMBANG	39,97	Hektar	10.000.000

No. Urut Prioritas	Kegiatan / Pekerjaan Infrastruktur	Lokasi	Sasaran		Rencana Alokasi (Rp. Ribu) Tahun 2023
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN					**232.694.638**
Kegiatan Wajib/Lanjutan					**2.800.000**
1	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / OM Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman / Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun MBR/Pekerja / Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Pekerja Kota Palembang	KOTA PALEMBANG	1	Tower	1.800.000
2	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / OM Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman / Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun ASN/TNI/POLRI / Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun ASN Banyuasin	BANYU ASIN	1	Tower	1.000.000
Kegiatan Baru 2023					**229.894.638**
1	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI / Pembangunan Rumah Susun Pegawai RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	KOTA PALEMBANG	44	Unit	34.420.000
2	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI / Pembangunan Rumah Susun Pemerintah Kota Pagaralam	KOTA PAGAR ALAM	44	Unit	34.420.000
3	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Khusus / Pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten OKU Selatan	OGAN KOMERING ULU SELATAN	50	Unit	8.194.638
4	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / PSU Rumah Umum / Pembangunan PSU Rumah Umum		3.150,00	Unit	44.100.000
5	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya / Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat Miskin		5.438,00	Unit	108.760.000

No. Urut Prioritas	Kegiatan / Pekerjaan Infrastruktur	Lokasi	Sasaran		Rencana Alokasi (Rp. Ribu) Tahun 2023
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR					**2.171.480.792**
Kegiatan Wajib/Lanjutan					**2.109.480.792**
1	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Kanal banjir yang dibangun / [baseline] Pembangunan Kanal Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang	KOTA PALEMBANG	8	Km	50.000.000
2	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Bidang Pengendalian Bencana / Polder / kolam retensi yang dibangun / [baseline] Pembangunan Kolam Retensi Simpang Bandara Kota Palembang	KOTA PALEMBANG	1	Unit	55.000.000
3	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Tidak Ada RO / [baseline] Pembangunan D.I Lematang 3000 Ha (Lanjutan)	KOTA PAGAR ALAM	13,55	Km	199.444.420
4	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Tidak Ada RO / [baseline] Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro - Sekanak Kota Palembang	KOTA PALEMBANG	3	Km	50.000.000
5	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya / Prasarana Bidang SDA dan Irigasi / Tidak Ada RO / [baseline] Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan	OGAN KOMERING ULU SELATAN	1	Unit	1.755.036.372
Kegiatan Baru 2023					**62.000.000**
1	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Tidak Ada RO / [baseline] Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku SPAM Universitas Sriwijaya Kab. Ogan Ilir	OGAN ILIR	20	Liter/detik	25.000.000
2	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Bidang Pengendalian Bencana / Polder / kolam retensi yang dibangun / [baseline] Pembangunan Kolam Retensi Kancil Putih Kota Palembang	KOTA PALEMBANG	1	Unit	7.000.000
3	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Tidak Ada RO / [baseline] Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Komering Kab. OKI	OGAN KOMERING ILIR	0,2	Km	30.000.000

Sumber: Hasil Pembahasan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan dan Direktorat Sumber Daya Air bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan April 2022

3.3.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.30 berikut ini.

Tabel 3.25
Rekapitulasi Pendanaan KPBU di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

No	Nama Proyek Infrastruktur	Alokasi Dana Pembangunan (Rp. Triliun) 2023	Jumlah	Instansi Pelaksana
	Jumlah Alokasi Dana KPBU	**4.350,00**	**4.350,00**	
1	- Tol Kayu Agung – Palembang – Betung (Sesi III)	4.350,00	4.350,00	PT. SRIMP serta Konsorsium Waskita Karya

Sumber: Kementerian PU PR Bina Marga, Tahun 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menggambarkan proses dan substansi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan disusun. Hal-hal apa saja yang terkait dan berpengaruh pada perencanaan di Sumatera Selatan. Selain itu dinarasikan pula bagaimana implementasi dan keterkaitan Prioritas Nasional dalam RKP yang diterjemahkan dalam RKPD, termasuk bagaimana penentuan isu strategis, terkait dengan permasalahan daerah serta kebijakan dan sasaran serta target yang akan diambil.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2023. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017: "*Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD*". Oleh karena itu, penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, RKP 2022 dan Program Strategis Nasional Tahun 2022.

Namun demikian penyusunan RKPD tahun 2023 juga tetap mempertimbangkan dokumen *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian secara teknokratis RKPD ini sudah dapat mengakomodir apa yang diharapkan dari dokumen perencanaan tersebut.

Sebagaimana proses penyusunan perencanaan tahun-tahun sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 juga mempedomani capaian pembangunan, khususnya apa yang sudah diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa capaian yang belum tercapai secara optimal, serta isu strategis yang akan dihadapi di tahun 2023 juga menjadi perhatian.

Isu-isu yang bersifat lokal, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan konektivitas, infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan petani, kedaulatan pangan, serta kelanjutan proyek strategis nasional dan integrasi pendanaan pembangunan menjadi perhatian khusus di Sumatera Selatan. Hal ini karena selain isu tersebut menjadi atensi publik, bukan hanya di Sumatera Selatan dan nasional, juga karena masih terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, merupakan implementasi dari tahun kelima atau tahun terakhir Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD untuk periode ini, sangat penting karena merupakan langkah strategis dalam pencapaian target-target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2023, RKPD Provinsi Sumatera Selatan mengacu tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Sumatera Selatan, adapun Sasaran Makro dan target yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Sasaran dan Target Makro Pembangunan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,5
		Inflasi	%	2 - 4
		Rasio Gini	Rasio	0,350
		Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	13.044
		PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Ribu	62.067
2	Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,83
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	%	10,2-10,4
		Nilai Investasi PMA	Rp. Triliun	21,90
		Nilai Investasi PMDN	Rp. Triliun	10,47
		Neraca Perdagangan	US$ juta	2.953

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	4,99-5,62
		Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,2
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	104,5
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	%	94,35
4	Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,59-12,66
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,06-4,22
5	Meningkatnya Akses Energi	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	%	100
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,09
		Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,980
7	Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,95
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,40
8	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,90
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,00
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70
9	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
10	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Nilai	A (85-86)
		Opini BPK	Opini	WTP
11	Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	Indeks Integritas Daerah	Indeks	69
12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,55
13	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	86,91
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	92,96
		Rasio kemantapan jalan	%	85,00
		Presentase Akses Internet	%	90
14	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	%	100
15	Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	8.903
		Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	904.503
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang	Sertifikat	44

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		ditetapkan		
16	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	85
		Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Orang	31

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, perlu dilakukan perumusan penentuan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, telaah RKP Tahun 2023, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah.

Gambar 4.1
Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk menentukan program, kegiatan, sasaran, indikator dan target maka dalam penyusunan Prioritas Daerah RKPD tahun 2023, Pemerintah Provinsi melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan arahan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, RKP tahun 2023, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yaitu **"Sumsel Maju Untuk Semua"** dengan beberapa Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang
4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Isu Strategis	PRIORITAS DAERAH RKPD 2023
Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrim dan Stunting	PD1 : Meningkatkan kesejahteraan sosial
Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi	
Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM dan Pariwisata	PD2 : Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Peningkatan infrastruktur yang merata, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana	PD3 : Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang
Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Polhukhankam	PD4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Penetapan Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, disusun dengan mempertimbangkan dan menelaah:

4.2.1. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

4.2.1.1. Telaah Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel Maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan

anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu:

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun pada RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi I

MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tujuan 1: Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif Berbasis Inovasi Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1.1 Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (*Maju Ekonomi Kerakyatan*)	Menggali Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Melalui Sektor Pariwisata dan Industri Pengolahan	▪ Mempercepat berfungsinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Selatan. ▪ Pengembangan Destinasi Wisata potensial. ▪ Membangun Infrastruktur dalam mempercepat Pembangunan Perekonomian Rakyat. ▪ Penyediaan Bank Data, Informasi, Potensi dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Secara Komprehensif, *Realtime* dan *Online*.	▪ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ▪ Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian ▪ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ▪ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) ▪ Program Pengembangan UMKM ▪ Program Perekonomian dan Pembangunan
	Mengoptimalkan Ekonomi Produktif Berbasis Kearifan Lokal	▪ Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia agar dapat Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing yang Lebih Baik. ▪ Pengembangan Kerjasama melalui Program *Technopreneur*. ▪ Meningkatkan Keterampilan, Wawasan, dan Pengetahuan Usaha Mikro untuk Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk. ▪ Mendorong Pelaku Usaha Mikro untuk Meningkatkan Standard dan Kualitas Produk. ▪ Membuka Wawasan para Usaha Mikro agar mendapat Akses Pembiayaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). ▪ Menambah Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro mengetahui kelengkapan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan modal dari perbankan.	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Efektivitas Penggunaan Anggaran Pemerintah	▪ Mengefektifkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah. ▪ Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR). ▪ Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan. ▪ Pengembangan Kerjasama Unsur Akademisi, Bisnis, Government dalam Perumusan Kebijakan.	
1.2 Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (*Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan*)	Mendorong Tersedianya Infrastruktur Mendukung Iklim Investasi.	▪ Mendorong Percepatan Infrastruktur Pendukung beroperasinya KEK Tanjung Api-Api dan Kawasan Industri Lainnya. ▪ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik.	▪ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ▪ Program Promosi Penanaman Modal ▪ Program Pelayanan Penanaman Modal ▪ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ▪ Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ▪ Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan ▪ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ▪ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ▪ Program Pengembangan Ekspor ▪ Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ▪ Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ▪ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Memfasilitasi Pembangunan Industri Sektor Hilir dari Potensi Ekonomi Masyarakat agar dapat Memberikan Kesempatan Kerja Seluas-Luasnya serta Tingkat Pendapatan Pekerja Lebih Besar dan Lebih Merata.	▪ Mengoptimalkan Proses Perizinan untuk Investasi. ▪ Mendorong Kondisi yang Kondusif bagi Investasi. ▪ Peningkatan Citra Daerah sebagai Tujuan Investasi yang Menguntungkan Melalui Peningkatan Popularitas dalam berbagai Aspek. ▪ Pengemasan Potensi dan Peluang Investasi Wilayah menjadi Menarik. ▪ Menyusun dan Menyajikan Peluang Kegiatan Penanaman Modal yang Lebih Konkret. ▪ Pengembangan Mekanisme Promosi Investasi yang Lebih Efisien dan Efektif yang antara lain Melalui Penyelarasan Kegiatan Promosi *Tourism, Trade, And Investment* (TTI) dengan OPD terkait serta Peningkatan Penggunaan Media Elektronik yang Meliputi Radio, Televisi, Media Online dan Media Sosial. ▪ Pelaksanaan Gelar Promosi Investasi Daerah untuk Mendorong Investor *Awareness And Willingness*. ▪ Fasilitasi Keikutsertaan UKM untuk Promosi dalam Rangka *Matchmaking* dengan Perusahaan Skala Besar serta Pembinaan Kemitraan Usaha dengan Strategi Naik Kelas/Aliansi. ▪ Kerjasama dengan Pusat Promosi Terpadu di Negara-Negara Tertentu. ▪ Peningkatan Pertemuan Bisnis	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah Pusat Maupun Daerah. ▪ Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sektor Jasa dan IKM.	▪ Program Pengendalian Izin Usaha Industri ▪ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Memperkuat daya saing ekspor dan mengendalikan impor untuk meningkatkan neraca perdagangan.	▪ Revitalisasi Pasar Tradisional Menuju Pasar Tradisional Modern. ▪ Meningkatkan Daya Saing Produk Industri Kecil dan Menengah. ▪ Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil dan Menengah. ▪ Memfasilitasi Standarisasi Produk Industri Kecil dan Menengah.	
1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (*Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan*)	Peningkatan Kesejahteraan Petani	▪ Pengembangan Kawasan Komoditas/Sektor Unggulan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. ▪ Meningkatkan Akses Petani Terhadap Saprodi Berkualitas dan Terjangkau. ▪ Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa. ▪ Menjamin Ketersediaan Air di Lahan Irigasi dan Non Irigasi. ▪ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Prasarana di dan Keluar Sentra Produksi Komoditi Pangan. ▪ Mencetak Sawah Baru untuk Meningkatkan Produksi Padi dalam Rangka Meningkatkan Sumsel Lumbung Pangan. ▪ Peremajaan Tanaman yang Sudah Tua atau Kurang Produktif. ▪ Intensifikasi dan Ekstensifikasi. ▪ Peningkatan Sarana Panen. ▪ Peningkatan Kemampuan SDM Petani dalam Budidaya Tanaman. ▪ Penanggulangan OPT. ▪ Meningkatkan Harga Jual Komoditas.	▪ Program Pengelolaan Sumber Daya Air ▪ Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ▪ Program Penanganan Kerawanan Pangan ▪ Program Pengawasan Keamanan Pangan ▪ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ▪ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ▪ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ▪ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ▪ Program Penyediaan dan Pengembangan
	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan	▪ Mengupayakan Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan dapat dilaksanakan agar Nilai Jual Nelayan Lebih Tinggi. ▪ Mengupayakan Pembudidaya Ikan dapat Memproduksi Pakan Sendiri dengan Mempergunakan Bahan Baku Lokal.	
	Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Peningkatan	▪ Meningkatkan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Hutan. ▪ Monitoring Dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan. ▪ Pemantapan Ketersediaan Pangan,	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	Ketahanan dan Keamanan Pangan	▪ Peningkatan Distribusi dan Harga Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan Serta Ketersediaan Pangan. ▪ Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat. ▪ Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Mutu Pangan Segar. ▪ Peningkatan Produksi Hasil Ternak. ▪ Penanggulangan Penyakit Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). ▪ Pemasaran dan Penerapan Teknologi Hasil Ternak.	sarana pertanian ▪ Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian ▪ Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat ▪ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian ▪ Program Perizinan Usaha Pertanian ▪ Program Penyuluhan Pertanian
	Peningkatan Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Litbang Dan Inovasi.	▪ Riset Berbasis Kebutuhan. ▪ Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti. ▪ Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis. ▪ Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi. ▪ Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi.	
1.4 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran (*Maju Kesejahteraan Masyarakat*)	Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial melalui peningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif	▪ Mengembangkan Industri Pengolahan (Manufaktur) untuk Hilirisasi SDA Unggulan dengan Memprioritaskan Penggunaan Sebesar-Besarnya Tenaga Kerja Lokal dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (*Resources*)/ Bahan Baku Lokal. ▪ Peningkatan Akses Angkatan Kerja Kepada Sumber Daya Produktif melalui Peningkatan Keterampilan Pekerja. ▪ Pengembangan Program Kemitraan Antara Pemerintah Provinsi dengan Dunia Industri untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. ▪ Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Bagi Pekerja Rentan agar dapat Memasuki Pasar Kerja. ▪ Meningkatkan Aset Masyarakat Miskin Melalui Bedah Rumah dan Pemanfaatan Pekarangan. ▪ Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar Berupa Air Bersih, Sanitasi, Bedah Rumah,	▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ▪ Program Pengembangan Perumahan ▪ Program Kawasan Permukiman ▪ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) ▪ Program Pemberdayaan Sosial ▪ Program Rehabilitasi Sosial ▪ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ▪ Program Penanganan Bencana ▪ Program Penanganan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Sarana Prasarana Kawasan Kumuh, Sarana Perdagangan untuk Orang Miskin, Sarana Industri Untuk Orang Miskin, dan Pemanfaatan Pekarangan (Benih dan Pupuk), Peningkatan Pemberdayaan SDA Lokal, ▪ Meningkatkan *Lifeskill* Pemuda melalui Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin.	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ▪ Program Perencanaan Tenaga Kerja ▪ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ▪ Program Penempatan Tenaga Kerja ▪ Program Hubungan Industrial ▪ Program Pengawasan Ketenagakerjaan ▪ Program Penataan Desa ▪ Program Peningkatan Kerjasama Desa ▪ Program Administrasi Pemerintahan Desa ▪ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok	▪ Mengefektifkan Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Meningkatkan Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota dalam satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). ▪ Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR). ▪ Intervensi Pemerintah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan dalam Daerah Khususnya Beras, antara lain: Adanya Kebijakan Pemda yang Mengatur tentang Gapoktan yang Ada. ▪ Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam Provinsi dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Beberapa Komoditi Pangan.	
	Menurunkan Daerah Rawan Pangan	▪ Pengembangan Desa Mandiri Pangan. ▪ Penanganan Daerah Rawan Pangan. ▪ Kawasan Rumah Pangan Lestari. ▪ Pengembangan Ternak di Daerah Pengentasan Kemiskinan.	
	Mengoptimalkan Peran Koordinasi dan Konsultasi Kemiskinan	▪ Meningkatkan Peran Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. ▪ Mengembangankan Program dan Inovasi Penanggulangan Kemiskinan.	
1.5 Meningkatnya Akses Energi (*Maju Akses Energi*)	Mengoptimalkan pengembangan energi berkelanjutan.	▪ Melaksanakan Pengkajian dan Evaluasi Daerah yang tidak dilalui oleh Jaringan Listrik PLN dengan Meningkatkan Potensi Lokal Berbasis EBT. ▪ Melakukan Koordinasi secara Komprehensif bersama Kabupaten/Kota Penghasil Gas untuk Menggalakkan Pemanfaatan Gas Rumah Tangga. ▪ Memfasilitasi Proses Pengolahan dan Distribusi Kegiatan Pertambangan yang Berada dalam	▪ Program Pengelolaan Aspek Kegeologian ▪ Program Pengelolaan Mineral dan Batubara ▪ Program Pengelolaan Energi Terbarukan ▪ Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Koridor Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. ▪ Mendorong Perusahaan Energi dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Rangka Meminimalkan Kerusakan Lingkungan. ▪ Penataan Pola Hubungan Ekonomi Antar Investor di Sektor Pertanian, Jasa, Pertambangan, dengan Masyarakat Lokal yang Mengedepankan Pendekatan Dialogis dan Partisipatif. ▪ Pembangunan Industri Keenergian Kreatif yang berbasiskan Batubara di Tingkat Masyarakat Lokal. ▪ Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Daerah agar Mampu Terlibat dalam Kegiatan Pertambangan dan Energi.	

Tabel 4.4.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi II

MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Baik Laki-Laki Maupun Perempuan, yang Sehat, Berpendidikan, Profesional, dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keimanan, Ketaqwaan, Kejujuran, dan Integritas.

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (*Maju Kesehatan Masyarakat*)	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter mandiri, poskesdes, polindes, apotik)	▪ Revitalisasi Sarana dan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Sanitasi). ▪ Meningkatkan Kapasitas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). ▪ Riset Berbasis Kebutuhan.	▪ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ▪ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ▪ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman ▪ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Meningkatkan upaya promotif dan preventif.	▪ Meningkatkan Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit. ▪ Membangun Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Secara Partisipatif. ▪ Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan. ▪ Peningkatan Ketersediaan, Distribusi serta Konsumsi dan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Keamanan Pangan. ▪ Meningkatkan Kualitas Kabupaten/Kota Sehat.	
	Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.	▪ Meningkatkan Mutu Posyandu. ▪ Meningkatkan Akses Balita dan Ibu Hamil Terhadap Makanan Bergizi, Berimbang Dan Beragam. ▪ Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Berbasis Kewilayahan. ▪ Meningkatkan Cakupan *Ante Natal Care* (ANC) Sesuai Standar (10 T).	
2.2 Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (*Maju Akses Pendidikan Berkualitas*)	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau.	▪ Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Setiap Jenjang. ▪ Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah. ▪ Memotivasi Anak Usia Sekolah untuk Bersekolah. ▪ Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan. ▪ Meningkatkan Pemenuhan, Distribusi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ▪ Meningkatkan Keterjangkauan Biaya Pendidikan. ▪ Mengefektifkan Keterlibatan Lembaga Pendidikan Berbasiskan Keagamaan untuk Pengembangan Potensi Lokal.	▪ Program Pengelolaan Pendidikan ▪ Program Pengembangan Kurikulum ▪ Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan ▪ Program Pengendalian Perizinan Pendidikan ▪ Program Pembinaan Perpustakaan ▪ Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	Revitalisasi SMK	▪ Penyediaan Guru Produktif. ▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana (Alat Praktek). ▪ Pengembangan Kurikulum (*Link and Match* dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri). ▪ Pembentukan Lembaga-Lembaga Keterampilan/Pelatihan yang Terfokus pada Pengembangan Potensi Lokal.	
	Meningkatkan akses layanan perpustakaan terhadap masyarakat.	▪ Meningkatkan Jumlah Ketersediaan dan Kemerataan Bahan Bacaan di Berbagai Jenis Perpustakaan. ▪ Memudahan Akses Terhadap Bahan Bacaan. ▪ Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. ▪ Meningkatkan Pemerataan dan Pemanfaatan Akses Layanan Perpustakaan di Masyarakat. ▪ Memfasilitasi Layanan Informasi Berbasis Internet di Seluruh	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Perpustakaan Desa/Kelurahan. ▪ Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan di Masyarakat. ▪ Penyebaran Pusat - Pusat Informasi di Ruang - Ruang Publik. ▪ Meningkatkan Jumlah dan Sebaran Tenaga Perpustakaan. ▪ Meningkatkan Fungsi Pembinaan Dalam Rangka Penguatan Sumber Daya Perpustakaan (SDM, Bahan Bacaan, Sarpras, Anggaran). ▪ Meningkatkan Promosi Penggunaan Perpustakaan.	
	Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi bidang pendidikan.	▪ Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang Dan Inovasi Bidang Pendidikan.	

Tujuan 3: Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
3.1 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (*Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak*)	▪ Meningkatkan Implementasi Kebijakan Responsif Gender dan Anak.	▪ Penyusunan, Reviu, Harmonisasi Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Terpilah.	▪ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ▪ Program Perlindungan Perempuan ▪ Program Peningkatan Kualitas Keluarga ▪ Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak ▪ Program Pemenuhan Hak Anak ▪ Program Perlindungan Khusus Anak
	▪ Meningkatkan sinergi pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	▪ Penyusunan, Review, Harmonisasi Kebijakan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Terpilah. ▪ Peningkatan Pemahaman, Komitmen, serta Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Tentang Pembangunan Responsif Gender, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak. ▪ Peningkatan Kelembagaan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak. ▪ Peningkatan Kapasitas Sumber	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Daya Manusia pada berbagai Lembaga Terkait Pembangunan Gender, Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Data Gender dan Anak Serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. ▪ Peningkatan Pembangunan Kualitas Keluarga. ▪ Pembinaan Kepada Organisasi Perempuan serta Lembaga Layanan Perempuan dan Anak. ▪ Peningkatan Motivasi, Pengetahuan dan Ketrampilan Perempuan untuk Berkiprah dalam Berbagai Sektor Pembangunan. ▪ Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan Khususnya Calon Legislatif (Caleg), Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Organisasi Perempuan. ▪ Peningkatan Kerjasama dengan berbagai Stakeholders Melalui Perjanjian Kerjasama, MoU, dan Keterlibatan Stakeholders Terkait. ▪ Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	
	▪ Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.	▪ Pelatihan Keterampilan, Manajemen Usaha dan Bantuan Alat untuk Para Perempuan yang Membutuhkan.	
	▪ Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).	▪ Peningkatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG). ▪ Pendampingan Teknis Kepada Pokja PUG Kab/Kota dan *Focal Point* OPD Provinsi. ▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Paham PUG. ▪ Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Terpilah pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).	
	▪ Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	▪ Penguatan Kelembagaan KLA. ▪ Pendampingan Teknis Kepada Kabupaten/Kota Menuju Provinsi Layak Anak (Provila). ▪ Pelaksanaan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator KLA. ▪ Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan ▪ Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Anak pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	▪ Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui pengoptimalan usaha pencegahan dan penanganan	▪ Pendidikan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO. ▪ Sosialisasi, Advokasi, Desiminasi terkait Pemenuhan Hak Perempuan pada Berbagai Situasi (Tenaga Kerja, Lansia, Perempuan Termarginalkan/Minoritas, termasuk Dalam Situasi Bencana) ▪ Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sesuai SOP. ▪ Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak. ▪ Sistem Pelayanan yang Komprehensif bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. ▪ Peningkatan Koordinasi Jejaring Lembaga yang Menangani Kasus Perempuan dan Anak. ▪ Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). ▪ Peningkatan Ketersediaan, dan Pemanfaatan Data Kekerasan Perempuan dan Anak (Simfoni).	

Tabel 4.5.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi III

MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dengan Mengedepankan Transparansi Dan Akuntabilitas Yang Didukung Aparatur Pemerintahan Yang Jujur, Berintegritas, Profesional, Dan Responsif.

Tujuan 4: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
4.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (*Maju Pelayanan Publik Berkualitas*)	▪ Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif (mengakomodir kelompok masyarakat berkebutuhan khusus).	▪ Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Publik. ▪ Mendorong Pengutamaan Kepentingan Publik oleh Pelayanan Publik dengan Pelayanan Birokrasi yang Berbasis *Information and Technology* (IT). ▪ Revitalisasi Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pelayanan Publik. ▪ Menempatkan Petugas Pelayanan yang Kompeten	▪ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ▪ Program Pendaftaran Penduduk ▪ Program Pencatatan Sipil ▪ Program Pengelolaan Profil Kependudukan ▪ Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		(*Right Man in The Right Place*) dan Menciptakan Perilaku Pelaksana/Petugas dengan Memberikan Pelayanan secara Sopan, Ramah serta saling Menghargai dan Menghormati. ▪ Membangun Jaringan Interkoneksi Layanan Publik yang Bersifat Lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di Akses oleh Publik Secara *Online* 24 Jam/Hari, 7 Hari/Minggu.	Kependudukan ▪ Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ▪ Program Penelitian dan Pengembangan ▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	▪ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	▪ Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan. ▪ Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Menuju *Cyber Province* ▪ Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). ▪ Peningkatan Pengelolaan Satu Data Pembangunan. ▪ Membangun Hubungan Administrasi Pemerintah yang Lebih Harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai Bagian dari Proses Reformasi Birokrasi. ▪ Memfasilitasi Forum Kepala Daerah se-Sumatera Selatan dengan Menjadwalkan Pertemuan Rutin dalam Jangka Waktu Tertentu. ▪ Melakukan Kunjungan ke Semua Daerah Secara Berkala untuk Penyerapan Aspirasi dan Mendorong Keunggululan Potensi Masyarakat.	
	▪ Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi.	▪ Riset Berbasis Kebutuhan. ▪ Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti. ▪ Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis. ▪ Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi. ▪ Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi.	
4.2 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (*Maju*	▪ Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,	▪ Optimalisasi Penganggaran, Perbendaharaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pelaporan yang Baik.	▪ Program Penyelenggaraan Statisktik Sektoral ▪ Program Penyelenggaraan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	pengendalian, dan evaluasi program pembangunan Daerah.	▪ Implementasi Aplikasi yang Mengintegrasikan Perencanaan dengan Penganggaran yaitu E-Sumsel. ▪ Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi ▪ Program Pengelolaan Arsip ▪ Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ▪ Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaaan Barang dan Jasa ▪ Program Kebijakan Administrasi Pembangunan ▪ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ▪ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembnagunan Daerah ▪ Program Pengelolaan Keuangan Daerah ▪ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	▪ Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan .	▪ Melibatkan Institusi Pendidikan Tinggi di Daerah sebagai *Think Tank* Pembangunan Daerah. ▪ Menjadikan Lembaga Pers dan Media Massa sebagai Mitra Pembangunan Daerah. ▪ Melibatkan Unsur LSM/Ormas dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan oleh Lembaga Pemerintahan. ▪ Menempatkan Posisi Semua Stakeholder (Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam Satu Kepentingan Pembangunan Sumatera Selatan Maju. ▪ Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Berbagai Sumber Pendanaan yang Ada. ▪ Mengundangkan Peraturan Daerah yang Menekankan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Setempat.	
4.3 Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (*Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas*)	▪ Meningkatkan integritas ASN.	▪ Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah di Semua Bidang. ▪ Mengoptimalkan Pengawasan Melekat. ▪ Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Kinerja Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). ▪ Meningkatkan Tunjangan ASN Berbasis Kinerja.	▪ Program Penataan Organisasi ▪ Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah ▪ Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi ▪ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ▪ Program Kepegawaian Daerah ▪ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ▪ Program Pengelolaan Penghubung ▪ Penyelenggaraan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
			Pengawasan ▪ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tabel 4.6.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi IV

MISI IV : Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur, Termasuk Infrastruktur Dasar Guna Percepatan Pembangunan Wilayah Pedalaman Dan Perbatasan, Untuk Memperlancar Arus Barang Dan Mobilitas Penduduk, Serta Mewujudkan Daya Saing Daerah Dengan Mempertimbangkan Pemerataan Dan Keseimbangan Daerah.

Tujuan 5: Terwujudnya pemerataan pembangunan berkelanjutan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (*Maju Kualitas Lingkungan Hidup*)	▪ Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup meliputi Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Hutan.	▪ Pemantauan Kualitas Air dan Udara. ▪ Meningkatkan Program Perhutanan Sosial. ▪ Meningkatkan Program Pengamanan Hutan. ▪ Meningkatkan Kegiatan Identifikasi Permasalahan dalam Kawasan Hutan. ▪ Pengendalian Kebakaran Hutan.	▪ Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional ▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ▪ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ▪ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ▪ Program Penanggulangan Bencana ▪ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran ▪ Program Perencanaan Lingkungan Hidup ▪ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ▪ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ▪ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
	▪ Menurunkan emisi GRK di 6 sektor.	▪ Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM. ▪ Revitalisasi Karet dan Sawit yang Berkelanjutan. ▪ Meningkatkan Kemampuan Masyarakat untuk Mengelola dan Mendaur Ulang Sampah Menjadi Sumber Ekonomi Baru. ▪ Mengembangkan Energi Baru Terbarukan Berbasis Potensi Daerah. ▪ Rehabilitasi Lahan. ▪ Penggunaan Bibit Pertanian yang Ramah Lingkungan.	
	▪ Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup	▪ Peningkatan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dan ▪ Peningkatan Upaya Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut. ▪ Peningkatan Konservasi	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Sumber Daya Air.	Beracun (Limbah B3)
	▪ Meningkatkan mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah	▪ Meningkatkan Sistem *Early Warning* dan Sistem Penanganan Bencana. ▪ Meningkatkan System Monitoring dan Informasi Bencana. ▪ Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air disemua Sektor dan Memastikan Keberlangsungan Pengambilan dan Pasokan Air Baku untuk Mengatasi Kelangkaan Air. ▪ Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana. ▪ Meningkatkan Kecepatan Penanganan Bencana.	▪ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ▪ Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH ▪ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ▪ Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ▪ Program Pengelolaan persampahan ▪ Program Pengelolaan Hutan ▪ Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ▪ Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ▪ Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	▪ Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	▪ Perwujudan Harmonisasi dalam Pemanfaatan, Penataan dan Pengendalian Ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi ▪ Peningkatan Kinerja Perencanaan Ruang. ▪ Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Ruang. ▪ Peningkatan Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	
5.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (*Maju Infrastruktur dan Konektivitas*)	▪ Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang,	▪ Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat ▪ Meningkatkan Aksesibilitas Darat, Sungai, Udara, dan Laut. ▪ Menciptakan Pembangunan yang Selaras dengan Kondisi Kewilayahan yang didukung Tersedianya Infrastruktur yang dapat Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah. ▪ Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang	▪ Program Penataan Bangunan Gedung ▪ Program Penataan bangunan dan lingkungannya ▪ Program Penyelenggaran Jalan ▪ Program Pengembangan Jasa Konstruksi ▪ Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Mendukung Industri Pertambangan Batubara. ▪ Pengembangan Sistem Teknologi Baru dalam Efektifitas Sistem Tranportasi Batubara.	▪ Program Pengelolaan Izin Lokasi ▪ Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ▪ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ▪ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan ▪ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ▪ Program Pengelolaan Pelayaran ▪ Program Pengelolaan Perkeretaapian ▪ Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ▪ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ▪ Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi ▪ Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ▪ Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	▪ Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	▪ Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum. ▪ Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik. ▪ Peningkatan Cakupan Layanan Persampahan. ▪ Peningkatan Ketersediaan Drainase Perkotaan, dan ▪ Pengembangan Lingkungan Permukiman Sehat. ▪ Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
	▪ Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara	▪ Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. ▪ Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung/Rumah Negara.	

Tabel 4.7.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan serta Program pada Misi V

MISI V : Meningkatkan Kehidupan Beragama, Seni, Dan Budaya Untuk Membangun Karakter Kehidupan Sosial Yang Agamis & Berbudaya, Dengan Ditopang Fisik Yang Sehat Melalui Kegiatan Olahraga, Sedangkan Pengembangan Pariwisata Berorientasi Pariwisata Religius.

Tujuan 6: Terwujudnya masyarakat madani

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
6.1 Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas (*Maju Stabilitas Keamanan,*	▪ Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	▪ Meningkatkan Kemampuan Aparat Hukum (Penegak Perda/Satpol PP dan PPNS) Melalui Pelatihan dan Pembekalan Aparat Penegak Perda (Satpol PP dan PPNS) untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Penegak Perda). ▪ Menertibkan Administrasi Maupun Teknis dalam Pelaksanaan Penegakan Perda.	▪ Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ▪ Program Kesejahteraan Rakyat ▪ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Ketertiban dan Kehidupan Beragama)		▪ Mengoptimalkan Pencegahan untuk Mengurangi Pelanggaran Perda dengan Melakukan Sosialisasi, Pembinaan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum. ▪ Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Baik Internal Maupun Eksternal. ▪ Optimalisi Peranan Tim Penegakan Perda Bersama Tim Terkait. ▪ Meningkatkan Penanganan Bencana (Tanggap Darurat). ▪ Meningkatkan Upaya Penyelesaian Sengketa Lahan.	▪ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ▪ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ▪ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya ▪ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	▪ Mengoptimalkan Upaya Pencegahan Konflik Sosial.	▪ Meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Masyarakat dan Parpol. ▪ Memfasilitasi Semua Aktifitas Lembaga Kebudayaan dan Keagamaan untuk Berpartisipasi dalam Membangun Penguatan Toleransi dalam Kehidupan bermasyarakat. ▪ Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air. ▪ Mengoptimalkan Pengembangan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.	
	▪ Mendorong penguatan pengetahuan, sikap, dan praktek keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani dan religius.	▪ Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama. ▪ Memfasilitasi Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan. ▪ Mewujudkan Satu Desa Satu Rumah Tahfidz. ▪ Mendorong Penguatan Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Keagamaan Masyarakat agar Terbentuk Masyarakat Madani dan Religius.	

Tujuan 7: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah melalui seni, budaya, dan religi

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
7.1 Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (*Maju Seni,*	▪ Meningkatkan daya saing pariwisata untuk	▪ Mengembangkan Obyek Daya Tarik Wisata Religi, *Sport Tourism* dan Wisata Alam Potensial. ▪ Peningkatan Aksesibilitas	▪ Program Pengembangan Kebudayaan ▪ Program

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Budaya, dan Pariwisata)	meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.	Khususnya Infrastruktur Jalan Menuju Objek dan Daya Tarik Wisata dan Jaringan Internet, Peningkatan Amenitas Higienes dan Sanitasi. ▪ Peningkatan Atraksi/Daya Tarik Wisata. ▪ Pengembangan Pemasaran (*Branding, Advertising Dan Selling*). ▪ Pengembangan Kapasitas SDM, Diklat dan Sertifikasi Profesi serta Usaha Pariwisata.	Pengembangan Kesenian Tradisional ▪ Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ▪ Program Pengelolaan Permuseuman ▪ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ▪ Program Pemasaran Pariwisata ▪ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	▪ Peningkatan Aset Budaya Lokal	▪ Mengefektifkan Program Sriwijaya 2020. ▪ Revitalisasi Museum dan Aset Budaya Lokal. ▪ Reinventing Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal dalam Membangun Identitas Kultural Masyarakat. ▪ Mendorong Memajukan Bahasa Lokal sebagai Kekayaan Khas Budaya Sumatera Selatan. ▪ Membangun Akses Ruang-Ruang Kreatif, Seni dan Budaya yang Mampu Menciptakan Ruang Publik yang Berbudaya di Seluruh Wilayah Sumsel. ▪ Menjamin Kebebasan untuk Mengembangkan dan Mengekspresikan Seni Budaya Masing-Masing di Daerah Sumatera Selatan. ▪ Mendorong Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal Kedalam Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah-Sekolah sebagai Proses Pengembangan Budaya Lokal yang dapat Berkontribusi dalam Membangun Karakter Bangsa. ▪ Meningkatkan Kemampuan Peserta Melalui Pembinaan oleh Pelatih Qasidah.	
	▪ Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi.	▪ Riset Berbasis Kebutuhan. ▪ Meningkatkan Kualitas SDM Peneliti. ▪ Melakukan Koordinasi dengan Pembuat Kebijakan dan Pelaku Bisnis. ▪ Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi. ▪ Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi.	

Tujuan 8: Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
8.1 Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (*Maju Pemuda dan Olahraga*)	▪ Meningkatnya Prestasi Atlit.	▪ Memanfaatkan Fasilitas Olahraga dan Pembinaan yang Berkelanjutan. ▪ Meningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Keolahragaan melalui Pelatihan maupun Kursus. ▪ Pemassalan Olahraga dikalangan Masyakarat.	▪ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ▪ Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan ▪ Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	▪ Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan (Akademis, Seni, Budaya, Olahraga dan Wirausaha Muda)	▪ Mendorong Program-Program Kepemudaaan Yang Kreatif Dan Inovatif Di Berbagai Bidang. ▪ Mengembangan Sistem Penghargaan Terhadap Capaian Prestasi Pemuda Di Bidang Seni, Olahraga, Budaya, Dan Akademis. ▪ Meningkatkan Jumlah Kabupaten/Kota Layak Pemuda.	

Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan atau Tema Pembangunan Tahunan pada periode Tahun 2019-2023, antara lain yaitu sebagai berikut:

Sebagai dasar penyusunan RKPD, arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu

"Sumatera Selatan Maju Untuk Semua". Arah Kebijakan Pembangunan tersebut perlu dijabarkan menjadi Tema dan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Tabel 4.8.
Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap arah kebijakan RPJMD tahun 2023

Arah Kebijakan Tahun 2023 (RPJMD)	Tema RKPD Tahun 2023	Prioritas RKPD Tahun 2023
Sumatera Selatan Maju untuk Semua	Sumatera Selatan Maju untuk Semua	1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
		2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
		3. Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang
		4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah
➢ Peningkatan Akses Angkatan Kerja Kepada Sumber Daya Produktif melalui Peningkatan Keterampilan Pekerja. ➢ Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar Berupa Air Bersih, Sanitasi, Bedah Rumah, Sarana Prasarana Kawasan Kumuh, Sarana Perdagangan untuk Orang Miskin, Sarana Industri Untuk Orang Miskin, dan Pemanfaatan Pekarangan (Benih dan Pupuk), Peningkatan Pemberdayaan SDA Lokal, ➢ Mendorong Budaya Lokal dan Pengetahuan Lokal Kedalam Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah-Sekolah sebagai Proses Pengembangan Budaya Lokal yang dapat Berkontribusi dalam Membangun Karakter Bangsa. ➢ Mendorong Program-Program Kepemudaaan Yang Kreatif Dan Inovatif Di Berbagai Bidang.		Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
➢ Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia agar dapat		Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Arah Kebijakan Tahun 2023 (RPJMD)	Tema RKPD Tahun 2023	Prioritas RKPD Tahun 2023
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing yang Lebih Baik. ➢ Meningkatkan Keterampilan, Wawasan, dan Pengetahuan Usaha Mikro untuk Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk. ➢ Mengefektifkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). ➢ Mengoptimalkan Proses Perizinan untuk Investasi. ➢ Mendorong Kondisi yang Kondusif bagi Investasi. ➢ Pelaksanaan Gelar Promosi Investasi Daerah untuk Mendorong Investor Awareness And Willingness. ➢ Fasilitasi Keikutsertaan UKM untuk Promosi dalam Rangka Matchmaking dengan Perusahaan Skala Besar serta Pembinaan Kemitraan Usaha dengan Strategi Naik Kelas/Aliansi. ➢ Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sektor Jasa dan IKM. ➢ Meningkatkan Daya Saing Produk Industri Kecil dan Menengah. ➢ Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam Provinsi dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Beberapa Komoditi Pangan. ➢ Pengembangan Desa Mandiri Pangan. ➢ Revitalisasi Karet dan Sawit yang Berkelanjutan.		
➢ Mendorong Percepatan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri ➢ Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana. ➢ Peningkatan Kinerja Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang ➢ Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat ➢ Meningkatkan Program Perhutanan Sosial. ➢ Pengendalian Kebakaran		Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang

Arah Kebijakan Tahun 2023 (RPJMD)	Tema RKPD Tahun 2023	Prioritas RKPD Tahun 2023
Hutan. ➢ Mengembangkan Energi Baru Terbarukan Berbasis Potensi Daerah. ➢ Peningkatan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, dan ➢ Meningkatkan System Monitoring dan Informasi Bencana. ➢ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik.		
➢ Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM. ➢ Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah untuk Pembangunan. ➢ Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Berbagai Sumber Pendanaan yang Ada. ➢ Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah di Semua Bidang. ➢ Mengoptimalkan Pengawasan Melekat. ➢ Meningkatkan Tunjangan ASN Berbasis Kinerja. ➢ Mengoptimalkan Pencegahan untuk Mengurangi Pelanggaran Perda dengan Melakukan Sosialisasi, Pembinaan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum. ➢ Meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Masyarakat dan Parpol. ➢ Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air.		Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Prioritas Pembangunan

Penjabaran visi, misi dan tujuan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
5. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan

6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani
7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya
8. Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Prioritas pembangunan tersebut perlu disandingkan dengan prioritas RKPD Tahun 2023 agar prioritas pembangunan Sumatera Selatan pada tahun 2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang telah disusun berdasarkan visi dan misi kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan. Sandingan Prioritas RPJMD Tahun 2019-2023 dan Prioritas RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.

Sandingan Prioritas RPJMD Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2023

Prioritas RPJMD Tahun 2019-2023	Prioritas RKPD Tahun 2023
➢ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ➢ Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender ➢ Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani ➢ Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
➢ Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
➢ Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan ➢ Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya	Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang
➢ Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Stabilitas

4.2.1.2. Telaah RKP Tahun 2023

Tema Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan Arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat Pandemi COVID-19. Krisis kesehatan akibat Pandemi COVID-19 yang telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial - ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada

tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.2.
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Pembangunan

Terdapat dua sasaran pembangunan tahun 2023: (1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan empat indikator, yaitu (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan dua indikator, yaitu (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Adapun target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.3.

Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023

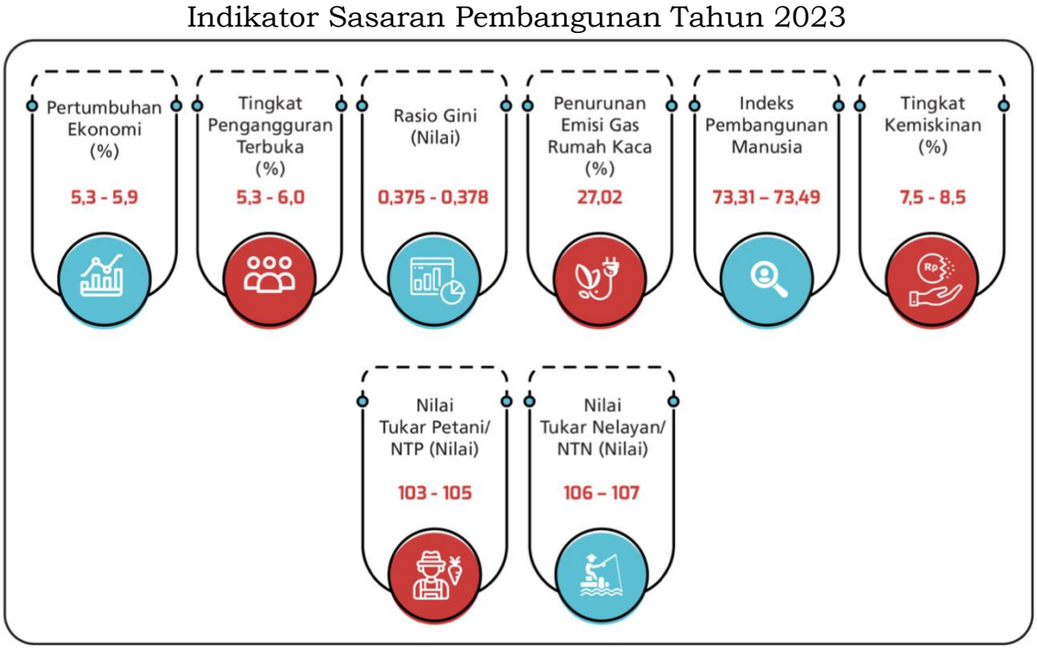

Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Gambar 4.4.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

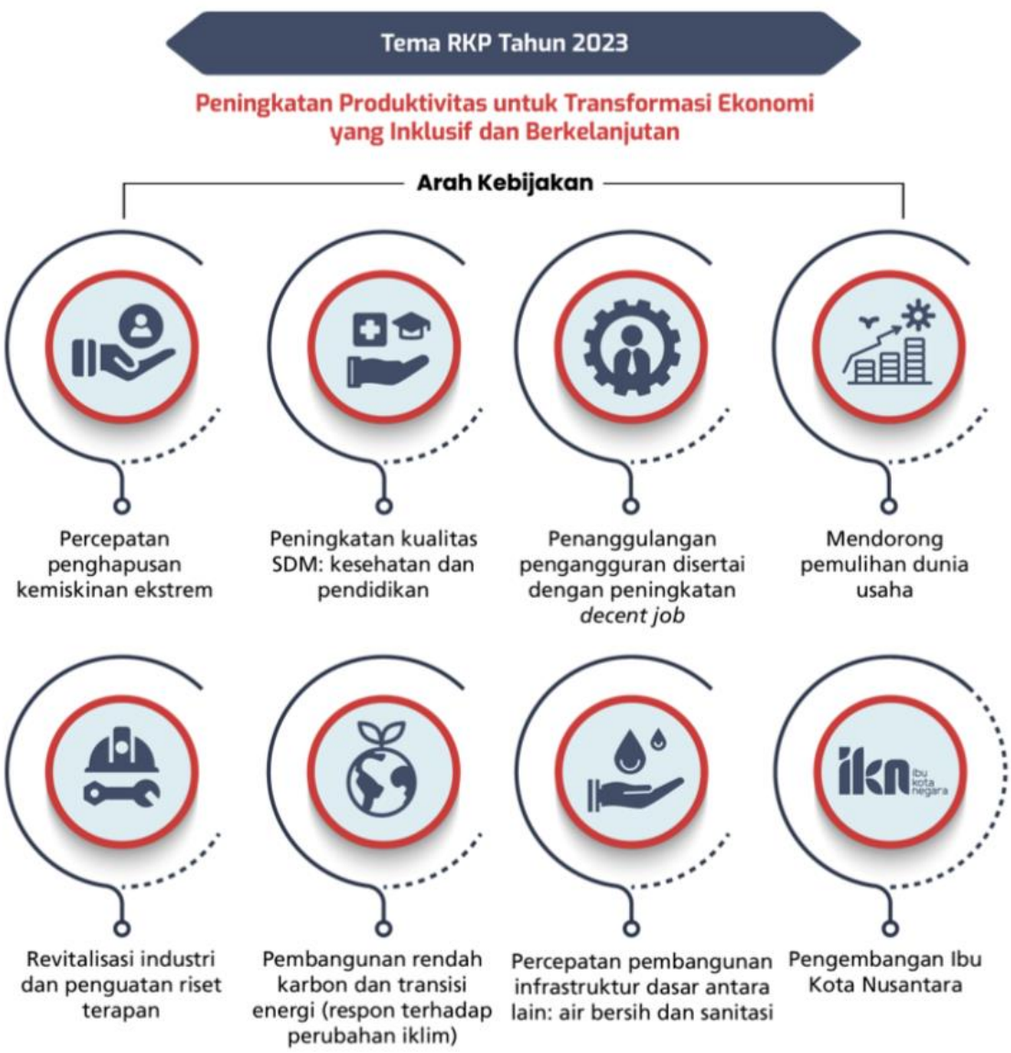

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada gambar berikut.

Gambar 4.5.
Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2023 ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 4.6
Prioritas Nasional Tahun 2023

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

   (1) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;

   (2) meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

   Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

(1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Rregional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

(2) terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

(1) terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

(2) meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;

(3) terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi stunting, (b) insiden tuberculosis, (c) angka kematian ibu, (4) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (d) persentase merokok usia 10–18 tahun, (e) meningkatkan nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (f) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, serta (g) harapan lama sekolah;

(4) meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

(5) meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

(6) meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

(1) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;

(2) meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

(3) meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;

(4) menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;

(5) meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;

(6) meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

(1) meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, persen), (c) luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen), dan (d) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010);

(2) meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);

(3) (3)meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);

(4) meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi dan (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita);

(5) meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

(1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

(2) berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

(3) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK dan (b) peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan dalam energi nasional.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

   Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

   (1) terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

   (2) optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;

   (3) meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;

   (4) meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota);

   (5) terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN di atas, terdapat 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung

pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Gambar 4.7.

Highlight Major Project RKP Tahun 2023

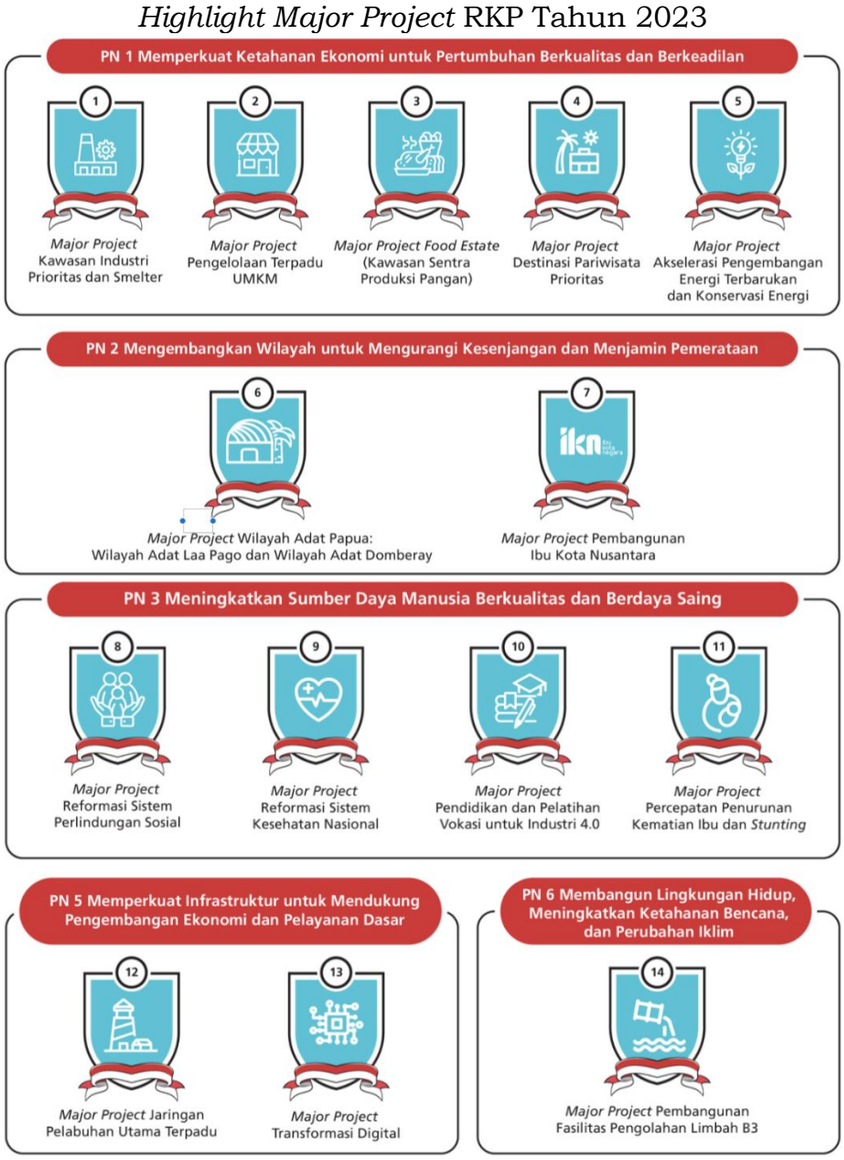

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Proses perencanaan MP diperkuat dengan penerapan mekanisme *Clearing House* (CH) yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya *output* MP dan memastikan bahwa *output* tersebut bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (*not only sent but delivered*). Penajaman yang dilakukan antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan *cascading, executive summary*, dan *info memo* MP; serta (3) intensifikasi pelibatan *stakeholder* dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral *meeting*) guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian output MP pada tahun 2024.

Arah Kebijakan Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Dalam menyesuaikan besaran target kinerja di setiap bidang urusan, Perangkat Daerah memperhatikan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2022 serta menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dengan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10.
Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL (RKP)	PRIORITAS DAERAH (RKPD)
➢ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing ➢ Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	➢ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
➢ Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	➢ Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
➢ Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayaan Dasar	➢ Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang
➢ Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubaham Iklim	
➢ Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ➢ Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	➢ Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Adapun sandingan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11.
Sandingan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2023

Sasaran PN RKP 2022	RKPD Tahun 2023	
	Sasaran Pembangunan	**Indikator**
Sasaran PN 1:		
1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi
		Inflasi
		Rasio Gini
		Pengeluaran Per Kapita
		PDRB Per Kapita (ADHB)
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran
		Nilai Investasi PMA
		Nilai Investasi PMDN
		Neraca Perdagangan
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Sasaran PN RKP 2022	RKPD Tahun 2023	
	Sasaran Pembangunan	**Indikator**
		Nilai Tukar Petani
		Nilai Tukar Nelayan
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
	Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran PN 2:		
1. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia	Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi
	Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan	Angka Kemiskinan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran PN 3:		
1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	Nilai SAKIP
		Opini BPK
	Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	Indeks Integritas Daerah
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan	Angka Kemiskinan
3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
	Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah
		Angka Harapan Lama Sekolah
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)
5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan	Angka Kemiskinan
6. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran PN 4:		
1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (*Zero Conflict*)

Sasaran PN RKP 2022	RKPD Tahun 2023	
	Sasaran Pembangunan	**Indikator**
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara
		Jumlah Wisatawan Nusantara
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (*Zero Conflict*)
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat		
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa		
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah
		Angka Harapan Lama Sekolah
Sasaran PN 5:		
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar		Rasio kemantapan jalan
		Presentase Akses Internet
3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan		
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Meningkatnya Akses Energi	Persentase Desa yang Teraliri Listrik
5. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Persentase Akses Internet
Sasaran PN 6:		
1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran PN RKP 2022	RKPD Tahun 2023	
	Sasaran Pembangunan	**Indikator**
2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim		
3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*		
Sasaran PN 7:		
1. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (*Zero Conflict*)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya, selain mendukung Sasaran Prioritas Nasional, seluruh program daerah di dalam RKPD Tahun 2023 diharapkan berkontribusi dalam mendukung Kegiatan Prioritas Nasional tahun 2023. Adapun sandingan keterkaitan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Daerah RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12.
Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Nasional
Tahun 2022

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
1.1.1. Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa yang teraliri listrik
1.1.2. Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
1.1.3. Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Meningkatkan Permohonan WIUP
1.1.4. Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
	Program Pengelolaan	Persentase Desa yang teraliri

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
	Ketenagalistrikan	listrik
1.1.5. Pengembangan Industri Pendukung EBT	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
1.2.1. Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	Program Pengelolaan Hutan	Permasalahan Kawasan Hutan Berkurang
1.2.2. Pengelolaan hutan berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan	Permasalahan Kawasan Hutan Berkurang
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	-Meningkatknya Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan -Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial
1.2.3. Penyediaan Air untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	-Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaman Wilayah Sungai yang ditanggulangi -Persentase luas irigasi yang baik
1.2.4. Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	-Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaman Wilayah Sungai yang ditanggulangi -Persentase luas irigasi yang baik
1.2.5. Pemeliharaan, Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya temasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	-Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaman Wilayah Sungai yang ditanggulangi -Persentase luas irigasi yang baik
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Sumur Bor Air Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis dan Diperolehnya Data Teknis Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi
1.2.6. Pengembangan Waduk Multiguna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	-Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaman Wilayah Sungai yang ditanggulangi -Persentase luas irigasi yang baik
1.3.1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Bersertifikat -Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Beredar Aman dan Bermutu (Komoditi Sayur dan Buah)
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak
1.3.2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-Skor Pola Pangan Harapan -Cadangan Pangan Daerah -Ketersediaan Energi -Ketersediaan Protein
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan	Persentase pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya untuk kedaulatan dan kemandirian

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
	Kemandirian Pangan	pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-Produksi Daging -Produksi Susu -Produksi Telur
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan
1.3.3. Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan program penyuluhan pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Pengembangan Tanaman Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tertatanya prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
1.3.4. Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian dan Digitalisasi Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan program penyuluhan pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam
1.3.5. Peningkatan Tata Kelola Sistem pangan Nasional	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-Skor Pola Pangan Harapan -Cadangan Pangan Daerah -Ketersediaan Energi -Ketersediaan Protein
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan
1.4.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-Jumlah Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan -Jumlah Sampel yang Teruji -Konsumsi Ikan -Produk Olahan Kelautan dan Perikanan -Volume Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
1.4.2. Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
terhadap Pengelolaan Sumber Daya		Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-Jumlah Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan -Jumlah Sampel yang Teruji -Konsumsi Ikan -Produk Olahan Kelautan dan Perikanan -Volume Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
1.4.3. Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing
1.5.1. Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya
	Program Pemberdayaan UMKM	Meningkatnya Kenaikan Wirausaha Baru
1.5.2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
1.5.3. Peningkatan Kapasitas, Jangkauan dan Inovasi Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi binaan provinsi yang dilatih manajemen dan kelembagaan koperasinya
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapat pendidikan dan Latihan perkoperasian
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
1.5.4. Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	Program Pemberdayaan UMKM	Meningkatnya Kenaikan Wirausaha Baru
1.5.5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di berdayakan
1.6.1. Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir 1.6.2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter, kawasan industri terutama di luar Jawa	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan rencana pembangunan industri provinsi
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
1.6.3. Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.6.4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya
	Program Pengembangan	Tersedianya Sumber Daya

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
dan Digital	Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Manusia yang Kompeten
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian perencanaan dan pembangunan industri sesuai sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan Sistem Informasi Industri
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase akses internet 2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
1.6.5. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tercapainya persentase pertumbuhan investasi Penanaman Modal
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Diserap
	Program Hubungan Industrial	-Persentase pekerja yang mendapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja -Persentase perusahaan yang menerapkan Tata Kelola kerja yang layak
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Terfasilitasi dibidang Ketenagakerjaan
1.6.6. Pengembangan Industri Halal	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian perencanaan dan pembangunan industri sesuai sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Religi yang dikembangkan
1.7.1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor
1.7.2. Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor
1.7.3. Pengelolaan impor	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengelolaan tertib usaha (importir)
1.7.4. Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaaan Pemerintah yang Efektif	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaaan Barang dan Jasa	Persentase kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
1.7.5. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor
1.7.6. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi	Program Pemasaran Pariwisata	-Jumlah wisatawan mancanegara -Jumlah wisatawan nusantara
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
Branding dan Produk Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tersedianya sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompeten
1.8.1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
1.8.2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Industri yang tersedia informasinya pada SIINAS
1.8.3. Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tersedianya informasi Neraca Bahan Makanan
1.8.4. Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian perencanaan dan pembangunan industri sesuai sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten
1.8.5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan Sistem Informasi Industri
PN 2: Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
2.1.1. Pengembangan Kawasan Strategis	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	-Jumlah Dokumen Pendukung Pembangunan Infrastruktur Drainase Regional dan Daerah Strategis Provnisi yang tersusun -Persentase Pelayanan Rumah Tanggan SIstem Drainase Regional dan Kawasan Strategis Provinsi
2.1.2. Pengembangan sektor unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tertatanya prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura
2.1.3. Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan
2.1.4. Pengembangan	Program Pengembangan	Jumlah Infrastruktur yang

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	Kawasan Transimigrasi	dibangun dikawasan transmigrasi
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya
	Program Penataan Desa	Persentase Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-Persentase Kader PKK Aktif
		- Jumlah Desa Tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan
		- Jumlah Desa sangat tertinggal di Sumatera Selatan yang diberdayakan
2.1.5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD -Persentase Penerimaan Dana Transfer
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian PAD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
3.1.1. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun
	Program Pencatatan Sipil	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun
3.1.2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun
3.1.3. Pendampingan dan Layanan Terpadu	Program Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun
3.1.4. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan
3.2.1. Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Warga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat pendapatannya
3.2.2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi, perlindungan sosial dan Pemenuhan kebutuhan Dasarnya
3.2.3. Perlindungan sosial adaptif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Warga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat pendapatannya

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
	Program Penanganan Bencana	Prosentase korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat provinsi
3.2.4. Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan
3.3.1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Kematian Ibu Maternal - Jumlah Kematian Bayi - Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan - Persentase Stunting pada anak balita - Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi - Rasio daya tampung rumah sakit rujukan -Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
3.3.2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat		
3.3.3. Peningkatan Pengendalian Penyakit		
3.3.4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber - PHBS
3.3.5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Kematian Ibu Maternal - Jumlah Kematian Bayi - Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan - Persentase Stunting pada anak balita - Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi - Rasio daya tampung rumah sakit rujukan -Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	- Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki Izin Edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Persentase fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar
3.4.1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	- Persentase peningkatan SPM Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	- Meningkatnya pengembangan kurikulum
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Pendidik, Tenaga Kependidikan Minimal Berkualifikasi S1
3.4.2. Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	- Persentase peningkatan SPM Pendidikan
3.4.3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik, Tenaga Kependidikan Minimal Berkualifikasi S1
3.4.4. Penjamin Mutu Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	- Persentase peningkatan SPM Pendidikan

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
3.4.5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase peningkatan SPM Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya pengembangan kurikulum
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik, Tenaga Kependidikan Minimal Berkualifikasi S1
3.5.1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
3.5.2. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
3.5.3. Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-Jumlah organisasi pemuda yang aktif -Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan -Jumlah wirausaha muda -Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
3.6.1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan pendapatan KK miskin yang dibantu
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di berdayakan
3.6.2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di berdayakan
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Warga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar nya dan meningkat pendapatanya
	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kemitraan usaha tani
3.6.3. Reforma Agraria	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-Meningkatknya Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan -Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial
3.6.4. Perhutanan Sosial		
3.7.1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan ditempatkan
	Program Hubungan Industrial	-Persentase pekerja yang mendapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja -Persentase perusahaan yang

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
		menerapkan Tata Kelola kerja yang layak
3.7.2. Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	-Jumlah atlet berprestasi -Jumlah medali atlet muda Sumsel -Jumlah pelatih yang bersertifikat -Jumlah pembinaan atlet muda -Jumlah pembinaan cabang olahraga -Jumlah Prestasi Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
4.1.1. Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong dan Budi Pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik
	Program Pengelolaan Pendidikan	Menigkatnya Indeks Pembangunan Manusia
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya pengembangan kurikulum
4.1.2. Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Responsif	Program Penataan Organisasi	Persentase peningkatan penataan organisasi
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang bekinerja
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Prov Sumsel
		- Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan
		-Persentase Penegakan
		- Persentase Perda dan Perkada yang di tegakan
		- Persentase Satlinmas yang Aktif
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Persentase Penurunan Daerah Rawan Kebakaran
		-Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran
4.1.3. Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Kasus yang berpotensi konflik sosial
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
4.1.4. Pembangunan dan Pembudayaan Sistem	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	Ekonomi, Sosial dan Budaya	Wawasan Kebangsaan
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila
4.1.5. Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila
4.2.1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	-Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan -Jumlah warisan budaya tak benda (WBTB) yang ditetapkan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum
4.2.2. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan rakyat	Program Pengembangan Kebudayaan	-Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan -Jumlah warisan budaya tak benda (WBTB) yang ditetapkan
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila
4.2.3. Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Program Pengembangan Kebudayaan	-Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan -Jumlah warisan budaya tak benda (WBTB) yang ditetapkan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	- Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan - Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pergelaran Seni
	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum
4.2.4. Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	-Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan -Jumlah warisan budaya tak benda (WBTB) yang ditetapkan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	- Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan - Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pergelaran Seni
	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum
4.3.1. Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat -Persentase peningkatan pelestarian dan perawatan bahan

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
		pustaka
4.3.2. Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah serta Sastra	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-Persentase peningkatan pelestarian dan perawatan bahan pustaka -Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
4.3.3. Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas dan Daya Cipta	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Dokumen/Arsip Daerah
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
4.3.4. Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	Program Pengelolaan Pendidikan (SubKegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa)	Peningkatan pembinaan siswa yang mengikuti lomba kreatifitas dan inovasi siswa
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
5.1.1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan permukiman yang sudah dilengkapi PSU
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah di wilayah provinsi yang tersertifikasi
5.1.2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
5.1.3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	-Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaman Wilayah Sungai yang ditanggulangi -Persentase luas irigasi yang baik
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Sumur Bor Air Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis dan Diperolehnya Data Teknis Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
5.1.4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan
5.1.5. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	-Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaman Wilayah Sungai yang ditanggulangi -Persentase luas irigasi yang baik

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
5.2.1. Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan
5.2.2. Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah trip perjalanan kapal
5.2.3. Konektivitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: Indeks Kualitas Udara
5.2.4. Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan
	Program Pengelolaan Perkerataapian	Persentase peningkatan umlah penumpang kereta api per tahun
5.3.1. Transportasi Perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan
	Program Pengelolaan Perkerataapian	Persentase peningkatan umlah penumpang kereta api per tahun
5.3.2. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase akses internet 2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
	Program Penyelenggaraa Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah
5.3.3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
5.3.4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan permukiman yang sudah dilengkapi PSU
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah di wilayah provinsi yang tersertifikasi
5.4.1. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa yang teraliri listrik
5.4.2. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa yang teraliri listrik
5.4.3. Kecukupan	Program Pengelolaan	Persentase Meningkatnya

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa yang teraliri listrik
5.5.1. Penuntasan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase akses internet 2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
	Program Penyelenggaraa Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah
5.5.2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase akses internet 2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
	Program Penyelenggaraa Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah
5.5.3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase akses internet 2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
	Program Penyelenggaraa Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
6.1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6.1.2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6.1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terbangunnya Taman Kehati Provinsi Sumatera Selatan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten/kota
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1) IKLH; 2) Persentase penurunan emisi GRK
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi -Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	IKLH
	Program Perencanaan	IKLH

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
	Lingkungan Hidup	
6.1.4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terinventarisasi
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-Meningkatknya Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan -Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi -Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
6.2.1. Penanggulangan Bencana	Program penanggulangan bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi saat tanggap darurat
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6.2.2. Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Persentase Penurunan Emisi GRK
	Program Pengelolaan Hutan	Permasalahan Kawasan Hutan Berkurang
6.3.1. Pembangunan Energi Berkelanjutan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
6.3.2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terbangunnya Taman Kehati Provinsi Sumatera Selatan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Persentase Penurunan Emisi GRK
6.3.3. Pengelolaan limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Persentase Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak - Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten/kota
6.3.4. Pengembangan Industri Hijau	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Pengembangan Tanaman Pangan
6.3.5. Rendah karbon pesisir	Program Pengelolaan	Luas Kawasan Konservasi

Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah	indikator Program Daerah
dan laut	Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	

4.2.1.3. Telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036

Salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan mengacu pada arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dapat diprioritaskan. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi adalah melaksanakan:

a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
e. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
f. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Detail terhadap Kawasan Strategis Provinsi.

Di samping itu penetapan kawasan strategis provinsi berfungsi:

a. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan;
c. Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

a. Kawasan Strategis dengan Kategori Kepentingan Ekonomi, meliputi:
    1. Kawasan Perkotaan Lubuklinggau;
    2. Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
    3. Kawasan Terpadu Tanjung Api Api;
    4. Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih;
    5. Kawasan Koridor Lahat - Muara Enim;
    6. Kawasan Koridor Baturaja-Martapura;
    7. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau;
    8. Kawasan Agropolitan Musi Rawas;
    9. Kawasan Agropolitan OKI;
    10. Kawasan Agropolitan OKU Timur;
    11. Kawasan Koridor Lubuklinggau - Muara Beliti;
    12. Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang
    13. Kawasan Minapolitan yang berlokasi di Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Banyuasin, OKU Selatan, Musi Banyuasin, Musi Rawas; dan
    14. Kawasan Pengembangan Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan (OKI dan Banyuasin).
b. Kawasan Strategis yang memiliki Nilai Strategis Sosial Budaya, meliputi :
    a. Kawasan Megalith Kota Pagar Alam;
    b. Kawasan Megalith Kabupaten Lahat; dan
    c. Kawasan Candi Bumi Ayu Kabupaten PALI.
c. Kawasan Strategis yang memiliki Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi :
    1. Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan;

2. Kawasan Hutan Rawa Gambut Muba, Banyuasin, OKI, Ogan Ilir, Muara Enim; dan
3. Kawasan Kebun Raya Sriwijaya

d. Kawasan Strategis yang memiliki Fungsi Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi, meliputi:
   1. Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai (OKU, Muara Enim dan Empat Lawang), dan Rantau Dedap (Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Pagaralam); dan
   2. Kawasan Panas Bumi Ulu Danau (OKU Selatan).

e. Kawasan Strategis yang Memiliki Fungsi Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggal : Kawasan Tulung Selapan-Cengal Kabupaten OKI.

Kawasan tersebut diatas menjadi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan.

4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagaimana telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu, 17 tujuan tersebut antara lain yaitu:

a. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
b. Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
c. Tujuan 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

d. Tujuan 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
e. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
f. Tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
g. Tujuan 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
h. Tujuan 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif danpekerjaan yang layak bagi semua
i. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan danmembantu perkembangan inovasi
j. Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
k. Tujuan 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
l. Tujuan 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
m. Tujuan 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya*
n. Tujuan 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untukpembangunan yang berkelanjutan
o. Tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan,mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
p. Tujuan 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua level
q. Tujuan 17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi melalui upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tetap berwawasan lingkungan (Green Growth South Sumatra). Beberapa Isu Strategis dan Upaya Tindaklanjut Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan melalui Rencana Aksi Daerah SDG's Tahun 2016-2018 antara lain terlampir pada tabel berikut.

Tabel 4.13.
Isu Strategis dan Upaya Tindaklanjut Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
Pilar Sosial		
Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk kemiskinan	• Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur • Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. • Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	• Perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pengurangan beban dan kegiatan ekonomi produktif; • Integrasi Jamkesda dengan JKN menuju universal health coverage; dan • Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan sanitasi
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	• Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. • Prevelansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita.	• Melakukan intervensi penurunan stunting terintegrasi antara gizi spesifik dan gizi sensitif secara holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS) pada sasaran prioritas di lokasi fokus pencegahan dan penurunan stunting.
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	• Angka kematian ibu; • Angka kematian bayi; • Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup; • Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B;	• Meningkatkan Mutu Posyandu; • Meningkatkan Akses Balita dan Ibu Hamil Terhadap Makanan Bergizi, berimbang dan beragam; • Revitalisasi Gerakan

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
	• Obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun; dan • Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Sayang Ibu (GSI) berbasis kewilayahan; dan • Meningkatkan Cakupan Ante Natal Care (ANC) Sesuai Standar (10 T).
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	• Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat; • Rata rata lama sekolah; • Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik; dan • Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	• Meningkatkan Kualitas Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di Setiap Jenjang; • Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah; • Memotivasi Anak Usia Sekolah untuk Bersekolah; • Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; dan • Meningkatkan Pemenuhan, Distribusi, Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan.
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	• Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial; • Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi); dan • Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	• Peningkatan Kelembagaan Terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Data Gender dan Anak.
Pilar Ekonomi		
Tujuan 7 menjamin akses energi terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	• Rasio elektrifikasi; • Konsumsi listrik per kapita; dan • Rasio penggunaan gas rumah tangga.	• Emisi GRK sektor energi tahun 2017 197.483.207 ton CO2eq, melalui aksi mitigasi maka penurunan emisi GRK tahun 2030 hanya sebesar 0.60 persen
Tujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak	• Target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per kapita; • Peningkatan tenaga kerja formal; • Tingkat Pengganggguran Terbuka; • Tingkat setengah pengangguran; • Upah rata rata per jam	• Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata; • Mengembangkan industri pengolahan

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
bagi semua	pekerja; dan • Pekerja informal sektor non-pertanian,	(manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal;
Tujuan 9 membangun infrastruktur yang Tangguh, mempromosikan industry yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	• Kondisi mantap jalan Provinsi; • Panjang pembangunan jalan tol; • Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita; dan • Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	• Peningkatan dukungan pendanaan di sector jalan dan jembatan; • Fasilitasi pemerintah daerah dalam pembebasan lahan; • Mendorong Pemerintah Pusat dalam percepatan pembangunan Tol untuk segman yang belum; • Pengembangan Kawasan industri dan KEK; dan • Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan Mall pelayanan publik.
Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara	• rata- rata pertumbuhan ekonomi tertinggal; dan • persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	• Perlu adanya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Tujuan 17 menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	• Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	• Memaksimalkan PAD dari sumber pajak dengan kemudahan dan peningkatan pelayanan; • Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari BUMD.
Pilar Lingkungan		
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	• Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; • Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; dan • Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	• Meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk pelayanan air minum layak.
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	• Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama; • Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI); dan	• Perlu meningkatkan Indeks Tutupan Lahan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan lahan yang terjadi tahun 2015.

Pilar/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai	Upaya Tindak Lanjut
	• Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	• Sudah Tercapai	
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya	• Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	• Melakukan mitigasi di 4 sektor sehingga target penurunan emisi GRK tahun 2030 mencapai 11.96%.
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber daya laut, samudera dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan	• Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); • Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	• Perlu segera ditetapkan RZWP3K sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang laut dan pesisir.
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, engurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	• Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas; • Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	• Penanganan pemanfaatan/ eksploitasi berlebihan dan peredaran /perdagangan tumbuhan dan satwaliar; • Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi; dan • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hokum keanekaragaman hayati.
Pilar Hukum dan Tata Kelola		
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang kokoh	• Indeks Kebebasan Sipil; • Indeks Hak-hak Politik; • Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	• Penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan; dan • Kemudahan akses penduduk terhadap informasi publik.

4.2.1.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Rekomendasi kebijakan dari DPRD yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD diarahkan untuk sejalan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran provinsi. Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut termuat di dalam Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 yang keterkaitannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023
➢ Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan ➢ Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan ➢ Kurangnya perlindungan dan jaminan sosial	PD1: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
➢ Kurangnya bibit perikanan ➢ Kurang optimalnya pemberdayaan UMKM ➢ Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata ➢ Jaringan Irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak ➢ Kurangnya sarana pertanian ➢ Kurangnya sarana peternakan	PD2: Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
➢ Kurangnya akses infrastruktur jalan ➢ Kurangnya akses infrastruktur jembatan ➢ Kurangnya akses air minum/air bersih ➢ Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman ➢ Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ➢ Kurangnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik ➢ Tingginya potensi bencana longsor ➢ Penyempitan badan sungai dan sedimentasi tinggi ➢ Tingginya potensi genangan di jalan yang rawan banjir ➢ Kurangnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Persampahan Regional ➢ Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan ➢ Kurangnya pembinaan dan pengembangan Olahraga ➢ Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi	PD3: Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang
➢ Kurangnya sarana dan prasarana Keagamaan	PD5: Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

4.2.1.6. Telaah Isu Strategis Daerah

Mempertimbangkan permasalahan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan tahun 2021 serta perkembangan isu terkini yang akan dihadapi sebagaimana tercantum pada Bab II buku RKPD ini maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting
2. Peningkatan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi
4. Peningkatan Infrastruktur yang Merata, Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Polhukhankam

Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2023 dilaksanakan melalui program/kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan kriteria :

1. Memenuhi kriteria Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial;
2. Mendukung dan sinergi dengan target sasaran dalam Perubahan RPJMD 2019-2023
3. Menjawab isu-isu strategis yang faktual dan mendasar serta mengatasi masalah-masalah sebagaimana yang direkomendasikan;
4. Merupakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Sesuai dengan ketersediaan dan prioritas anggaran

Pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) masing-masing Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dikawal pencapaian kinerjanya agar pendekatan money follow program dan program follow result dengan suatu cascading keselarasan kinerja yang dikenal dengan integrated development plan (IDP). IDP masing-masing Prioritas Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

PRIORITAS DAERAH I

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja :
Persentase satuan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU: 31%

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Persampahan (Rp. 20.000.000)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Rp. 1.950.000.000)
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (Rp. 400.000.000)
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Rp. 300.000.000)
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (Rp. 4.500.000.000)
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi (Rp. 4.725.000.000)
7. Program Pengembangan Perumahan (Rp. 2.600.000.000)
8. Program Kawasan Permukiman (Rp. 16.600.000.000)
9. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi. Kualifikasi. Klasifikasi. Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Rp. 1.000.000.000)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 28.688.281.000)
11. Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota /Pembangunan Jaringan IPAL Kota Palembang Paket B2 (Rp. 87.308.494.000)(APBN)
12. Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota / Pembangunan TPA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Rp. 30.000.000.000)(APBN)
13. Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota / Pembangunan TPA Sementul Kabupaten Banyuasin (Rp. 53.800.000.000)(APBN)
14. Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota / Pembangunan TPA Kabupaten Musi Rawas Utara (Rp. 30.000.000.000)(APBN)
15. Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Pemugaran Permukiman Kumuh / Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Jakabaring Kota Palembang (Rp. 10.000.000.000)(APBN)
16. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / OM Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman / Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun MBR/Pekerja , Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Pekerja Kota Palembang (Rp 1.800.000.000)(APBN)
17. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / OM Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman / Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun ASN/TNI/POLRI / Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun ASN Banyuasin (Rp. 1.000.000.000)(APBN)
18. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI / Pembangunan Rumah Susun Pegawai RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Rp. 34.420.000.000)(APBN)
19. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI / Pembangunan Rumah Susun Pemerintah Kota Pagaralam (Rp. 34.420.000.000)(APBN)
20. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman / Rumah Khusus / Pembangunan Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten OKU Selatan (Rp. 894.638.000)(APBN)
21. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dar Pemukiman / PSU Rumah Umum / Pembangunan PSU Rumah Umum (Rp 44.100.000.000)(APBN)
22. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni / Prasarana Bidang Perumahan dar Pemukiman / Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya / Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat Miskin (Rp. 108.760.000.000)(APBN)

Lokasi: Muratara, Musi Banyuasin, Lahat

OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : Direktorat Jenderal Cipta Karya, KEMENTERIAN PUPR, Direktorat Jenderal Perumahan, KEMENTERIAN PUPR, PDAM, DLHP, PERUMNAS,

Indikator Kinerja :
TPAK: 68.85%

Program Nomenklatur :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. 150.000.000)
2. Program Penempatan Tenaga Kerja (Rp. 650.000.000)
3. Program Hubungan Industrial (Rp. 501.500.000)
4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan (Rp. 300.000.000)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 32.222.134.000)

Lokasi: Banyuasin, Palembang, Muratara, Lubuk Linggau

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Kinerja :
IDG: 75

Program Nomenklatur :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Rp. 2.070.000.000)
2. Program Perlindungan Perempuan (Rp. 449.785.000)
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Rp. 530.000.000)
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Rp. 350.000.000)
5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) (Rp. 580.000.000)
6. Program Perlindungan Khusus Anak (Rp. 1.335.000.000)
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 10.720.965.000)

Lokasi: Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : Forum Anak Sumsel, Forum Disabilitas Sumsel

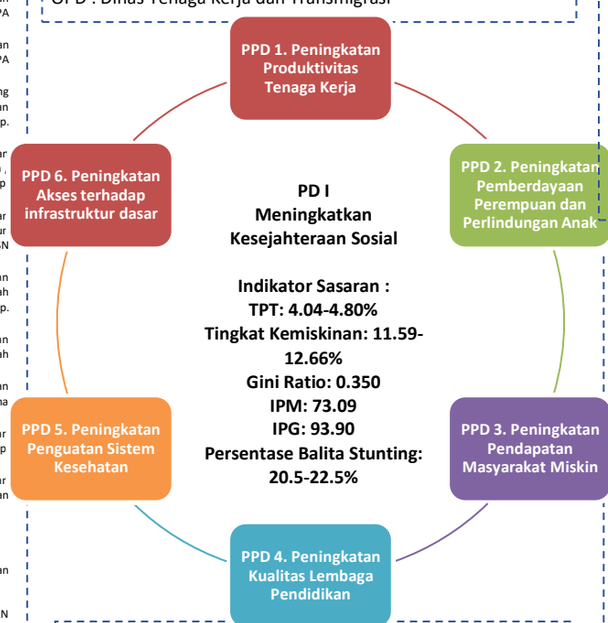

Indikator Kinerja :
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan: 95%

Program Nomenklatur :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 365.107.938.331)
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Rp. 1.255.262.000)
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (Rp. 348.054.500)
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Rp. 5.904.234.000)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 411.428.538.830)

Lokasi: Muratara, PALI, Empat Lawang, OKU Selatan

OPD : Dinas Kesehatan, RS. Ernaldi Bahar, RS. Mata, Rs. Paru-Paru, Rs. Gigi dan Mulut, RS. Siti Fatimah

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : PT. BPJS Sumsel

Indikator Kinerja :
Persentase sekolah menengah terakreditasi A: 23.76%

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Pendidikan (Rp. 832.615.443.600)
2. Program Pengembangan Kurikulum (Rp. 400.000.000)
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Rp. 200.000.000)
4. Program Pembinaan Perpustakaan (Rp. 1.618.539.002)
5. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (Rp. 75.000.000)
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Rp. 5.067.395.480)
7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (Rp. 38.819.208.920)
8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Rp. 5.000.000.000)
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 1.846.791.000.155)

Lokasi: Muratara, PALI, Empat Lawang, OKU Selatan

OPD : Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Dinas Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja :
Pengeluaran Per Kapita :
Rp. 13.044 Ribu

Program Nomenklatur :

1. Program Pemberdayaan Sosial (Rp. 780.000.000)
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Rp. 50.000.000)
3. Program Rehabilitasi Sosial (Rp. 8.359.860.000)
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Rp. 7.850.000.000)
5. Program Penanganan Bencana (Rp. 1.252.000.000)
6. Program Penataan Desa (Rp. 140.160.000)
7. Program Peningkatan Kerja Sama Desa (Rp. 1.125.000.000)
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa (Rp. 2.509.818.000)
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (Rp. 5.425.297.000)
10. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Rp. 40.000.000)
11. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Rp. 40.000.000)
12. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (Rp. 9.000.000.000)
13. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (Rp. 100.000.000)
14. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Rp. 50.000.000)
15. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Rp. 50.000.000)
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 38.521.553.000)

Lokasi: Muratara, Musi Banyuasin, Lahat

OPD : Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakaat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : TNP2K, Baznas

Prioritas Wilayah untuk Prioritas Daerah 1
(Meningkatkan Kesejahteraan Sosial)

Sebaran Kemiskinan

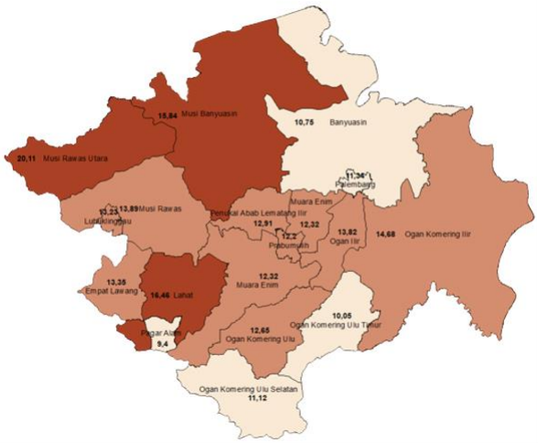

Tingkat Pengangguran Terbuka

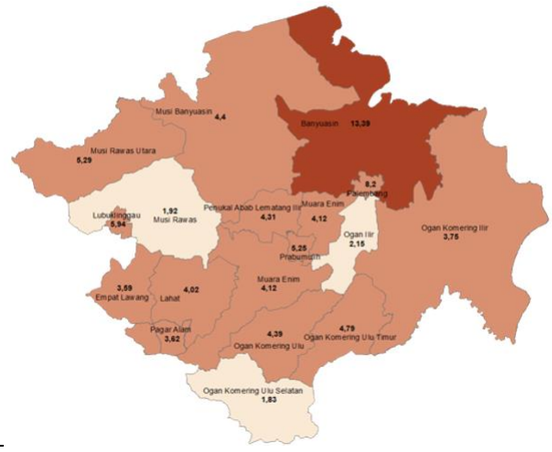

Indeks Gini

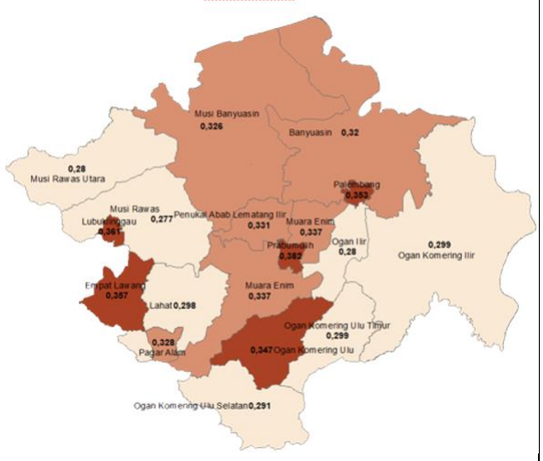

Indeks Pembangunan Manusia

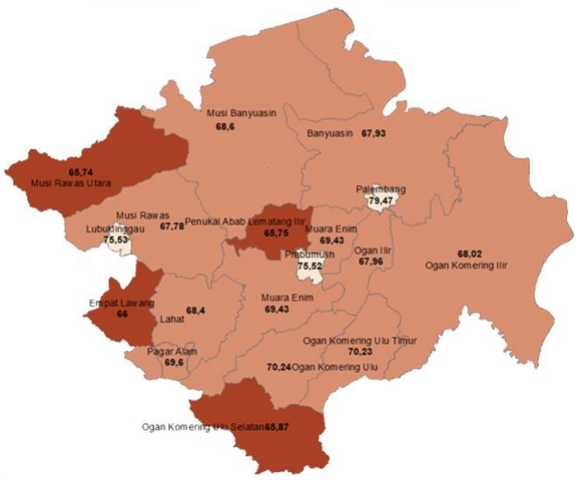

Peta IPG Tahun 2021

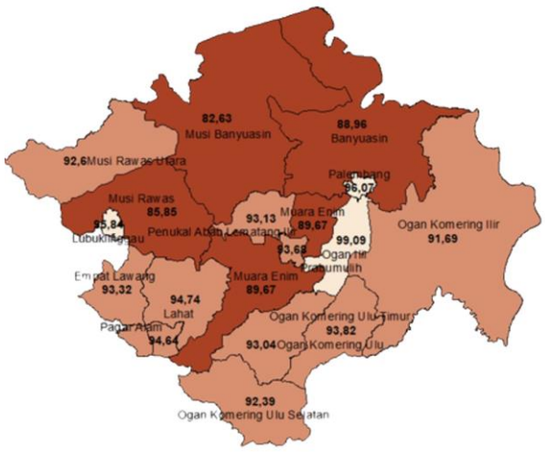

Prevalensi Stunting

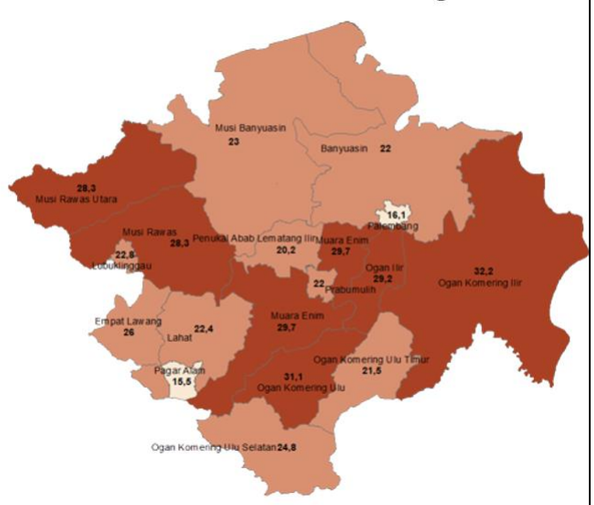

Keterangan :

Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III

PRIORITAS DAERAH II

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Indikator Kinerja :
1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian. Peternakan. Perburuan. dan Jasa Pertanian: 4.99-5.62%
2. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB: 21.21%

Program Nomenklatur :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Rp. 34.194.000.000)
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Rp. 8.131.689.425)
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Rp. 850.000.000)
4. Program Penyuluhan Pertanian (Rp. 45.992.738.400)
5. Program Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 650.000.000)
6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Rp. 3.250.000.000)
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Rp. 5.250.000.000)
8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Rp. 540.000.000)
9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Rp. 4.196.625.682.)
10. Program Perizinan Usaha Pertanian (Rp. 100.000.000)
11. Program Pendidikan Dan Pelatihan. Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan (Rp. 482.000.000)
12. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (Rp. 830.000.000)
13. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (Rp. 1.200.000.000)
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 169.567.664.975)
15. Program Pengelolaan Produksi dan usaha Pembudidayaan Ikan (Rp. 195.000.000)(APBN)
16. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak (Rp. 19.033.068.000)(APBN)

Lokasi: Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, OKU, OKUS, OKUT, OKI, Banyuasin, Ogan Ilir

OPD : Dinas Pertanian TPH, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan SDM

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, PT. Bukit Asam, PT. PUSRI, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Nelayan, Kelompok Peternakan

Indikator Kinerja :
Indeks Kepuasan Investor: 89.7

Program Nomenklatur :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Rp. 900.000.000)
2. Program Promosi Penanaman Modal (Rp. 750.000.000)
3. Program Pelayanan Penanaman Modal (Rp. 625.000.000)
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Rp. 850.000.000)
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Rp. 125.000.000)
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 22.425.932.540)
7. Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah (Rp. 155.113.000)(APBN)

Lokasi: 17 Kab/Kota

OPD : DPMPTSP

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Kemendagri, Investor

Indikator Kinerja :
Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB: 29.95%

Program Nomenklatur :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (Rp. 4.835.000.000)
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (Rp. 170.000.000)
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (Rp. 250.000.000)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 11.354.016.900)
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (Rp. 1.100.000.000)

Lokasi: OKI, Musi Banyuasin, Banyuasin, Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim

OPD : Dinas Perindustrian, Dinas Energi dan SDM

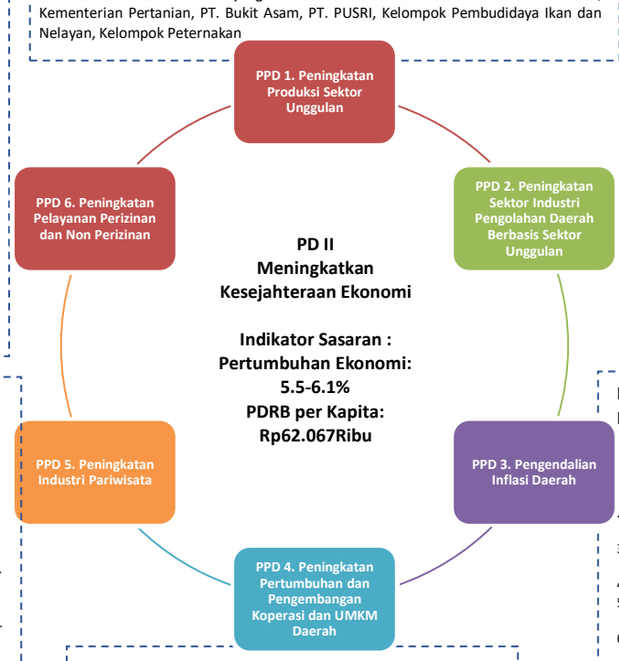

Indikator Kinerja :
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi: 5%

Program Nomenklatur :

1. Program Pengembangan Kebudayaan (Rp. 5.787.519.000)
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (Rp. 375.000.000)
3. Program Pembinaan Sejarah (Rp. 100.000.000)
4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (Rp. 225.000.000)
5. Program Pengelolaan Permuseuman (Rp. 5.150.000.000)
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Rp. 2.100.000.000)
7. Program Pemasaran Pariwisata (Rp. 6.970.000.000)
8. Program Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Haki (Rp. 200.000.000)
9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Rp. 550.000.000)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp.26.507.768.000)
11. Program Penataan Bangunan Gedung (Rp. 19.800.000.000)
12. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (Rp.17.200.000.000)
13. Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)(Rp. 62.000.000.000)
14. Bimtek pengelolaan pariwisata berkelanjutan (Rp.87.500.000) (APBN)
15. Bimtek Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif di Daerah (Rp.87.500.000) (APBN)
16. Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Rp.500.000.000) (APBN)
17. Pendukungan Event Daerah (Rp. 500.000.000) (APBN)
18. Workshop Pengembangan Ekosistem Ekraf (Rp.195.000.000) (APBN)

Lokasi: Palembang, Pagaralam, OKUS, Lubuk Linggau, Lahat

OPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Kementerian Pariwisata dan Ekraf, Pengelola Pariwisata, dan Komunitas

Indikator Kinerja :
Persentase peningkatan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha: 1%

Program Nomenklatur :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (Rp. 100.000.000)
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (Rp. 400.000.000)
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (Rp. 400.000.000)
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (Rp. 900.000.000)
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (Rp. 1.500.000.000)
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) (Rp. 600.000.000)
7. Program Pengembangan Umkm (Rp. 1.500.000.000)
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 16.046.997.800)
9. Program Kewirausahaan. Usaha Mikro. Kecil Menengah. Dan Koperasi (Rp. 141.208.000)(APBN)

Lokasi: Palembang, Lubuk Linggau, Prabumulih, OKI, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin

OPD : Dinas Koperasi & UKM

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah , Komunitas UMKM

Indikator Kinerja :
Inflasi: 2-4%

Program Nomenklatur :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan (Rp. 125.000.000)
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Rp. 300.000.000)
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Rp. 600.000.000)
4. Program Pengembangan Ekspor (Rp. 575.000.000)
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (Rp. 1.880.000.000)
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Rp. 475.000.000)
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (Rp. 250.000.000)
8. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Rp. 2.150.000.000)
9. Program Penanganan Kerawanan Pangan (Rp. 750.000.000)
10. Program Pengawasan Keamanan Pangan (Rp. 575.000.000)
11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Verteriner (Rp. 675.000.000)
12. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rp. 800.000.000)
13. Program Perlindungan Jaminan Sosial (Rp. 6.976.182.000)
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 39.608.492.600)

Lokasi: 17 Kab/Kota

OPD : Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Sosial,

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : Bank Indonesia, Perum Bulog

Prioritas Wilayah untuk Prioritas Daerah 2
(Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi)

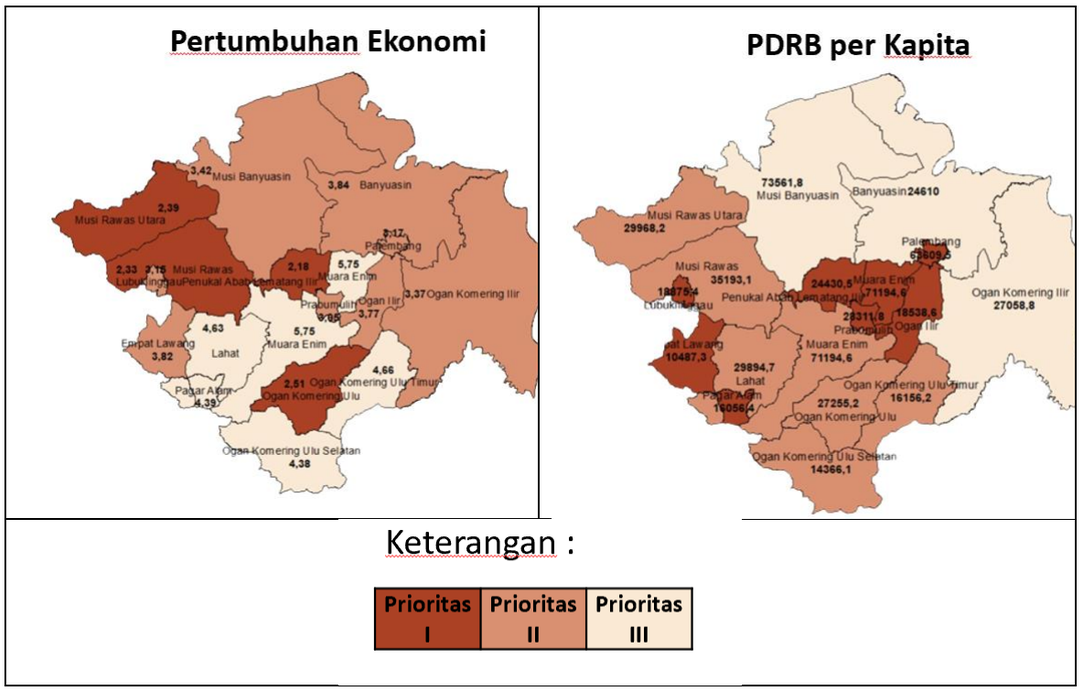

Keterangan :

Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III

PRIORITAS DAERAH III

Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang

Indikator Kinerja :
Rasio Kemantapan Jalan : 85%

Program Nomenklatur :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Rp. 5.538.601.600)
2. Program Pengelolaan Pelayaran (Rp. 5.250.000.000)
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian (Rp. 300.000.000)
4. Program Penyelenggaraan Jalan (Rp. 607.897.740.000)
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Rp. 6.100.000.000)
6. Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota (Rp. 1.544.936.267.453)
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 119.557.471.690)
8. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Jalan Strategis (ProPN) / Preservasi Jalan Ruas Betung - Bts. Kota Palembang (SBSN MYC) (Rp. 105.659.308.000) (APBN)
9. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan / Pembangunan FO KA Bantaian (Usulan SBSN Baru) (Rp. 50.000.000.000) (APBN)
10. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan / Pembangunan FO KA Gelumbang (Usulan SBSN Baru) (Rp. 61.182.700.000) (APBN)
11. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Jalan Strategis (ProPN) / Preservasi Jalan Ruas Bts. Prov. Jambi - Peninggalan (SBSN MYC) (Rp. 85.496.818.000) (APBN)
12. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pelebaran Jalan Menambah Lajur / Pelebaran Menambah Lajur Jalan Sp. Inderalaya – Meranjat (Rp. 19.000.000.000) (APBN)
13. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) / Pelebaran Jalan Menambah Lajur / Pelebaran Jalan Menambah Lajur Ruas Jend. Sudirman (Prabumulih) (Rp. 7.713.000.000) (APBN)
14. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Jembatan / Pembangunan Jembatan Gantung 1 Sumatera Selatan (Rp. 7.000.000.000) (APBN)
15. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Jembatan / Pembangunan Jembatan Gantung 2 Sumatera Selatan (Rp. 7.000.000.000) (APBN)
16. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional / Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan) / Pembangunan Jembatan / Pembangunan Jembatan Gantung 3 Sumatera Selatan (Rp. 7.000.000.000) (APBN)

Lokasi: 17 Kab/Kota

OPD : Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, BPKAD

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR , Dishub, Disnakertrans, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Perkebunan

Indikator Kinerja :
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak: 86.91%

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (Rp. 20.000.000)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 20.000.000)
3. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Kanal banjir yang dibangun / [baseline] Pembangunan Kanal Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang (Rp. 50.000.000.000)(APBN)
4. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Bidang Pengendalian Bencana / Polder / kolam retensi yang dibangun / [baseline] Pembangunan Kolam Retensi Simpang Bandara Kota Palembang (Rp. 55.000.000.000)(APBN)
5. Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Tidak Ada RO / [baseline] Pembangunan D.I Lematang 3000 Ha (Lanjutan) (Rp. 199.444.420.000)(APBN)
6. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Tidak Ada RO / [baseline] Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro - Sekanak Kota Palembang (Rp. 50.000.000.000)(APBN)
7. Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya / Prasarana Bidang SDA dan Irigasi / Tidak Ada RO / [baseline] Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan (Rp. 1.755.036.372.000)(APBN)
8. Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku /Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Tidak Ada RO /[baseline] Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku SPAM Universitas Sriwijaya Kab. Ogan Ilir (Rp. 25.000.000.000)(APBN)
9. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Bidang Pengendalian Bencana / Polder / kolam retensi yang dibangun / [baseline] Pembangunan Kolam Retensi Kancil Putih Kota Palembang (Rp. 7.000.000.000)(APBN)
10. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai / Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Tidak Ada RO / [baseline] Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Komering Kab. OKI (Rp. 30.000.000.000)(APBN)
11. Pemantauan, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut (Rp. 12.467.225.000)(APBN)

Lokasi: Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Pagaralam, Musi Banyuasin, Empat Lawang, Ogan Ilir

OPD : Dinas PSDA

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, BPBD, Dinsos, PSDA

Indikator Kinerja :
Persentase penurunan emisi GRK: 7.42%

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan (Rp. 600.000.000)
2. Program Pengelolaan Hutan (Rp. 2.429.340.000)
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (Rp. 300.000.000)
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Rp. 830.000.000)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Rp. 187.918.391)

Lokasi: Muara Enim, Prabumulih, Palembang

OPD : Dinas Energi dan SDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : ICRAF

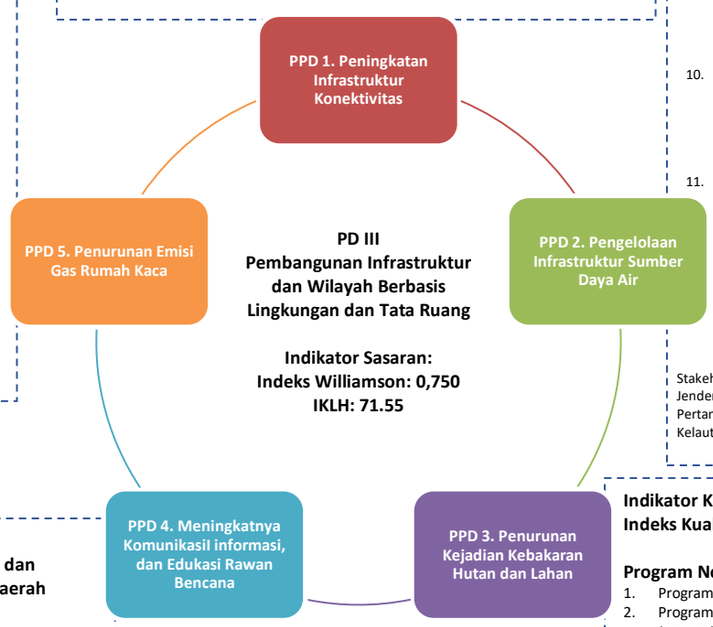

Indikator Kinerja :
Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah rawan bencana: 100%

Program Nomenklatur :

1. Program Penanggulangan Bencana (Rp. 6.200.000.000)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 20.971.175.096)

Lokasi: OKI, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muratara, Banyuasin, PALI

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : Kepolisian, TNI, Bhabinkamtibnas

Indikator Kinerja :
Indeks Kualitas Udara : 84.75

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Izin Lokasi (Rp. 20.000.000)
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (Rp. 20.000.000)
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (Rp. 20.000.000)
4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH (Rp. 20.000.000)
5. Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Rp. 20.000.000)
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Rp. 90.000.000)
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 31.880.809.914)

Lokasi: OKI, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muratara, Banyuasin, PALI

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : Kepolisian, TNI, Bhabinkamtibnas

Prioritas Wilayah untuk Prioritas Daerah 3 (Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang)

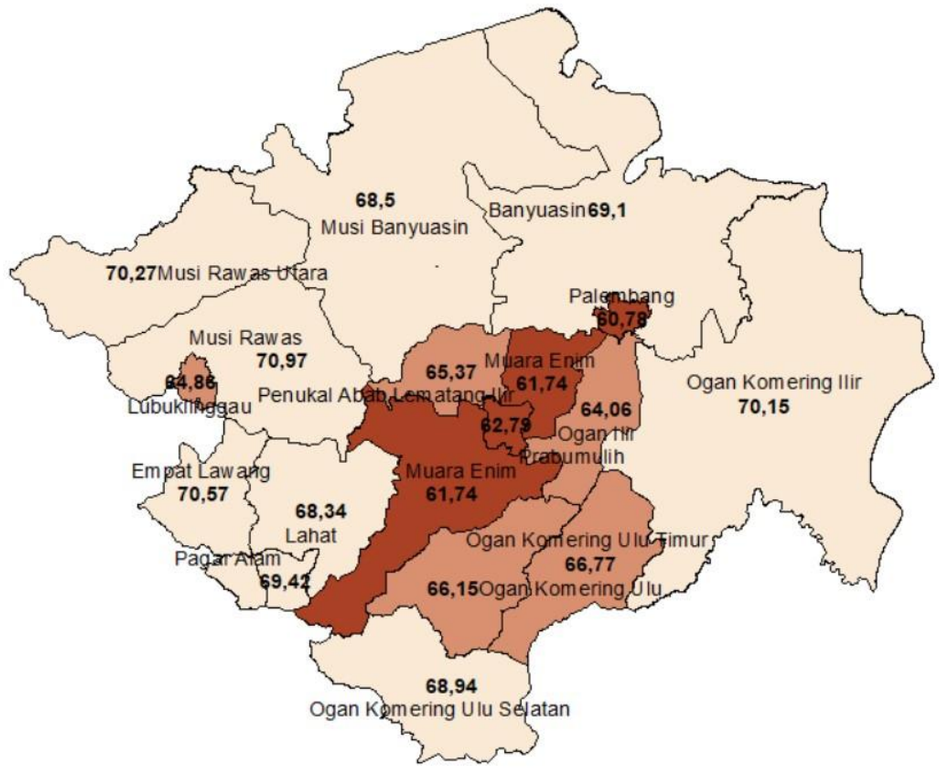

Keterangan :

Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III

PRIORITAS DAERAH IV

Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Indikator Kinerja :
1. Nilai SAKIP: A (85-86), 2. Opini BPK:WTP, 3. Indeks Integritas Daerah: 69

Program Nomenklatur :

1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Rp. 9.563.410.832)
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Rp. 1.984.238.734.367)
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Rp. 14.888.000.000)
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan (Rp. 5.701.008.000)
5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi (Rp. 1.607.125.600)
6. Program Pelayanan Penghubung (Rp. 425.000.000)
7. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rp. 5.970.000.000)
8. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Rp. 3.465.000.000)
9. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (Rp. 4.431.890.000)
10. Program Perekonomian Dan Pembangunan (Rp. 3.349.500.000)
11. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (Rp. 750.000.000)
12. Program Penataan Organisasi (Rp. 891.860.000)
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 694.874.088.502)

Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Badan Penghubung, Bappeda, Biro Otonomi, Biro Perekonomian, Biro Adm. Pembangunan, Biro Organisasi

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : PT. Jakabaring Sport City (JSC), Kemenkeu, PT. Bank Sumsel Babel, ICRAF, Bank Indonesia

Indikator Kinerja :
Indeks Profesionalitas ASN : 75

Program Nomenklatur :

1. Program Kepegawaian Daerah (Rp. 4.499.499.250)
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Rp. 1.800.000.000)
3. Program Pengelolaan Arsip (Rp. 625.000.000)
4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip (Rp. 175.000.000)
5. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik (Rp. 11.160.000.000)
6. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Rp. 5.866.331.420)
7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Rp. 350.000.000)
8. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Rp. 150.000.000)
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 87.776.329.564)

Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : BKD, BPSDMD, Dinas Kearsipan, Diskominfo,

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : BPS, Perguruan Tinggi

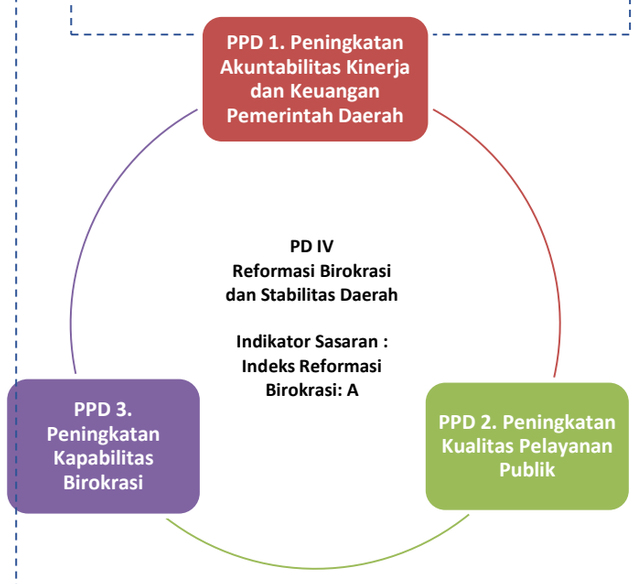

Indikator Kinerja :
Indeks Kepuasan Masyarakat: A

Program Nomenklatur :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Rp. 1.347.445.000)
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (Rp. 46.163.041.600)
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Rp. 750.000.000)
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya (2.486.591.581)
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Rp. 1.490.000.000)
6. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Rp. 2.915.571.800)
7. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Rp. 221.575.874.000)
8. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum (Rp. 2.707.380.000)
9. Program Kesejahteraan Rakyat (Rp. 19.300.000.000)
10. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa (Rp. 7.120.000.000)
11. Program Pendaftaran Penduduk (Rp. 100.000.000)
12. Program Pencatatan Sipil (Rp. 100.000.000)
13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Rp. 75.000.000)
14. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Rp. 26.000.000)
15. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Rp. 3.913.728.500)
16. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Rp. 615.000.000)
17. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (Rp. 112.000.000)
18. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 280.692.457.612)

Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : Badan Kesbangpol. Balitbangda, Sekretariat DPRD, Biro Hukum, Biro Kesra, Biro PBJ, Disdukcapil, Satpol PP, Dinsos, Biro Humas Protokol

Stakehholders di luar OPD yang terlibat : KPU, BAWASLU

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA

Arah kebijakan pembangunan di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan Kabupaten/Kota, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan/pengembangan wilayahnya diarahkan pada: 1) Memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, serta sebagai salah satu lumbung pangan dan lumbung energi nasional, dimana Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah di Sumatera sebagai penghasil terbesar komoditas kelapa sawit, karet dan penghasil utama batubara; 2) Mempercepat pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan wilayah dan pembangunan jaringan jaringan tol lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multimoda pelabuhan, bandara, dan jaringan non-tol untuk memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur wilayah Sumatera seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api; 3) Meningkatkan jaringan irigasi dan transportasi untuk mendukung produksi pangan beras dan palawija; 4) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah di Metropolitan Palembang, di mana pengembangan sistem transportasi perkotaan diarahkan pada terbentuknya sistem transportasi massal multi moda yang efisien dan terintegrasi di Metropolitan Palembang; dan 5) Meningkatkan Tanggap darurat bencana, mitigasi bencana, dan memperkuat kesiapsiagaaan bencana dengan mengembangkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat, serta memperkuat kerja sama dalam pengembangan pendidikan budaya sadar bencana.

Pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Pengembangan pusat-pusat kegiatan

di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi terdiri atas:

1. Satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kawasan Perkotaan Palembang yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, khususnya Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung);
2. Tujuh Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Prabumulih, Lubuklinggau, Muara Enim, Baturaja, Lahat. Sekayu, dan Kayu Agung yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota sehingga seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat terlayani secara cukup merata;
3. Empat Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), yaitu Indralaya, Sungsang, Pagar Alam, dan Martapura yang merupakan kawasan perkotaan yang dipromosikan dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW;
4. Empat Belas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Pangkalan Balai, Muara Beliti, Tebing Tinggi, Muara Dua, Martapura, Gumawang, Tugumulyo, Talang Ubi, Peninjauan, Muara Rupit, Sungai Lilin, Bayung Lencir, Tanjung Raja, Muara Lakitan dan Pengadonan. Kesepuluh PKL ini merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Selain itu, arah pembangunan wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga dapat dilihat pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) berada di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Kota Palembang, Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara), Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 16 proyek yang berada di Kabupaten/Kota, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) berada di 17 Kabupaten/Kota.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. KSP terdiri dari kawasan strategis dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi, memiliki nilai strategis sosial budaya, memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup, memiliki fungsi pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi, dan memiliki fungsi mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

a. Adapun KSP yang telah ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kawasan Terpadu Tanjung Api-Api dengan kriteria kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek Potensi ekonomi cepat tumbuh; Potensi sebagai pusat investasi dan pengembangan usaha; dan Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang

kegiatan ekonomi. Arahan penanganan Kawasan Terpadu Tanjung Api-Api adalah untuk pengembangan prasarana dan sarana terpadu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sriwijaya Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, serta pengembangan kerjasama pemerintah daerah, pemerintah dan swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana pendukung KEK Sriwijaya Tanjung Carat. Selain itu, KEK Sriwijaya Tanjung Carat telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penetapan Tanjung Api-Api sebagai KEK Sriwijaya Tanjung Carat seluas 2.170 Ha yang diusulkan oleh PT. Tri Patria. Saat ini sedang dalam proses revisi Peraturan Pemerintah tersebut dan sudah ditetapkan PSN Pelabuhan New Palembang Port sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Pembangunan Pelabuhan Baru di Tanjung Carat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Gambar 5. 1
Kawasan Tanjung Api-Api dan Rencana Perkembangan

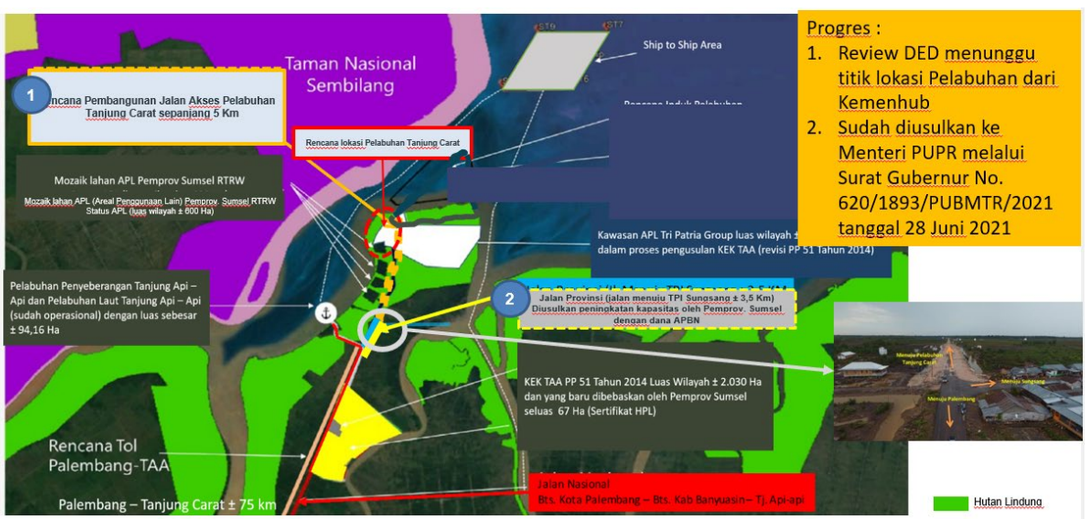

Sumber: Bappeda Prov. Sumsel, 2021

Selain itu, Kawasan Strategis Provinsi yang ada di tiap Kabupaten/Kota dan Proyek Strategis Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5. 2
Peta Arahan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036

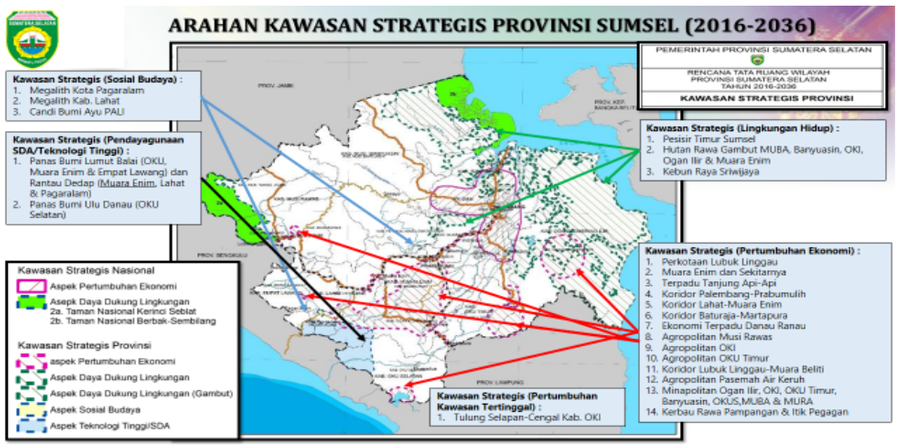

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW Prov. Sumsel, 2016

Gambar 5. 3
Peta Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Selatan

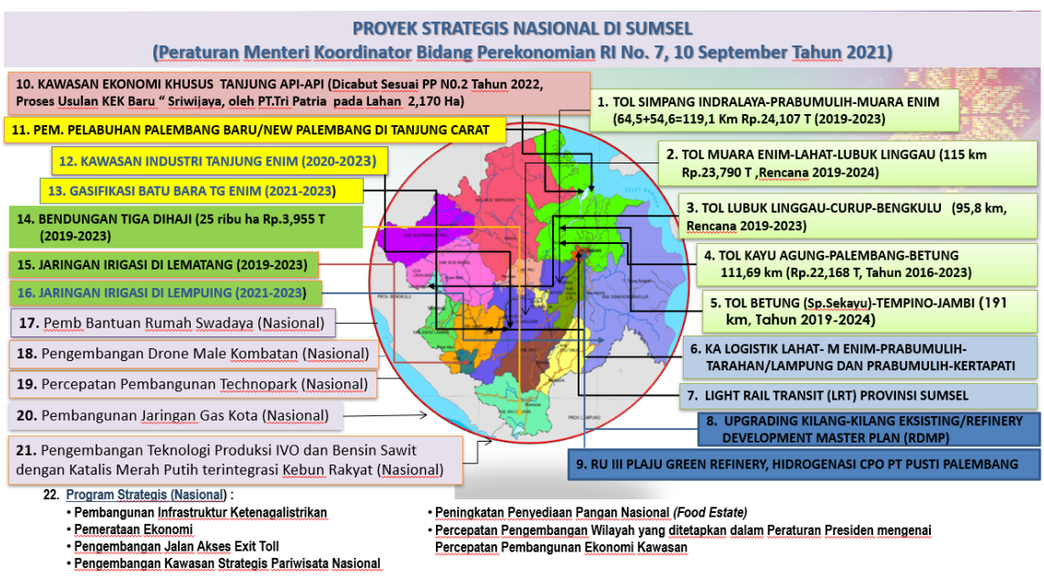

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021

Berlandaskan pengembangan pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan arahan prioritas pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota. Pengawalan dan pengendalian untuk implementasi arahan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dilakukan pada tahap evaluasi RKPD dan APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Provinsi sesuai amanat Undang-Undang. Sasaran utama pembangunan wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 adalah 1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; 2) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; 3) menciptakan kesempatan kerja; dan 4) meningkatkan pembangunan manusia. Untuk penjelasan secara lebih rinci mengenai arahan

prioritas pembangunan tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 1
Progres Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Selatan

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
1	Tol Palembang - Indralaya (21,93 km Rp.3,301 T)	Palembang, - Indralaya	100%
2	Tol Kayu Agung - Pematang Panggang (77 km, Rp10,085 T dilaksanakan 2016-2019)	Pematang Panggang, Kayu Agung Kab.OKI	100%
3	Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Swasta PT. Waskita Srwijaya tol Rp.17,35 T, 2016-2023)	Kayu Agung Kab.OKI, Kab.Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin	• Seksi Kayu Agung-Kramasan Operasional (42,5 Km) Diresmikan Presiden 26 Januari 2021 dan Seksi Kramasan (Palembang)-Musi Landas-Betung (69,19 Km) Progres lahan 78,8% Fisik 28 % (Progres Pembangunan Jalan 17,56%, Jembatan Musi 53,46%, Jembatan Keramasan 75,56%) dan Rencana Operasional Agustus 2023.
4	Tol Simpang Indralaya - Muara Enim (119 km Rp.24,107 T rencana 2019-2022)	Indralaya Kab.Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kab.Muara Enim	• **Seksi Indralaya-Prabumulih** (64,5 Km) Progres Lahan 92,92% Fisik 78,42% Target Operasional Desember 2022
5	Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau (125 km Rp.23,790 T ,rencana 2019-2023)	Kab.Muara Enim, Kab.Lahat,Kab.Musi Rawas dan,Kota Lubuk Linggau	• PPJT Nomor 02/PPJT/BPJT/2019 tanggal 19 April 2019 • Proses Penyelesaian *Feasibilty Study* 80% • Basic Design 20% • Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) 10% • **Seksi Prabu Mulih-Muara Enim** (54,6 Km) Progres Fisik 8,694% (Ditangguhkan Pelaksanaannya untuk mengejar Tol Ruas Betung-Jambi).

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
6	Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (rencana 2019-2023)	Kota Lubuk Linggau, Curup Bengkulu	• PPJT Nomor 02/PPJT/BPJT/2019 tanggal 19 April 2019 • Proses Penyelesaian *Feasibilty Study* 80% • Basic Design 30% • Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) 35% • Amdal 100% • Untuk ruas Lubuk Linggau - Bengkulu ada 3 seksi; Seksi I Lubuk Linggau-Kepahiang 54,5 Km Proses Penetapan Lokasi, Seksi II Kepahiang-Taba Penanjung 23,7 Km tahap proses persiapan dan seksi III Taba Penanjung-Bengkulu (17,6 Km) Progres Fisik 96,51 Target Operasional 2023.
7	Tol Betung, Sp.Sekayu-Tempino Jambi (rencana 2020-2024)	Betung Kab.Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin,Tempino dan Jambi	*Feasibilty Study sudah selesai,proses penyusunan Basic Desain dan* Amdal, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT),Proses Penetapan Lokasi/Trase 2019); Progres Persiapan Pengadaan Lahan dan Menunggu Proses PPJT.
8	*Light Rapid Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) (23 km,Rp.11,8 T, Pelaksanaan 2016-2018)	Palembang, Kabupaten Banyuasin	• Operasional 88 Kali Perjalanan/Hari Sehingga Opersional dan Peningkatan Pelayanan Diperlukan Dukungan Kementerian Perhubungan. • *Perlu Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)*
9	KEK Sriwijaya Tanjung Carat (Usulan KEK Baru)	Tanjung Api-Api Kab.Banyuasin	• Total luasan 2.237 Ha • Rencana Investasi (Perencanaan s/d Thn 2028) Pembangunan Kawasan: Rp 58,04 Triliun, Investasi Industri : Rp 9,05 Triliun. • Saat ini Proses Revisi sesuai arahan DN KEK ; Peta Zonasi, FS dan Business Plan, Perbaikan ijin, Revisi Rekomendasi Bupati sesuai Format Dewan Nasional KEK (Pengusul PT.Tri Patria). • Menunggu penetapan KEK

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
			Baru
10	KI Tanjung Enim	Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim	Nilai Proyek keseluruhan : Rp. 5.415.729.000.000, Sumber Pendanaan 70% loan, 30 % Equity - PTBA telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri berlaku Efektif pada Lahan Kawasan Industri 585,4 Ha di Tanjung Enim sejak tanggal 24 Mei 2021. - Kawasan Industri Tanjung Enim – BACBIE (*Bukit Asam Coal Based Industrial Estate*) dalam rangka mendukung pengembangan kompleks industri berbasis batubara pertama; Gasifikasi Batu Bara, PLTU Sumsel 8, Industri CPO dan Hilirisasi CPO.(sudah - Tanggal 24 Jan 2022 **Presiden** Joko Widodo melakukan ***groundbreaking*** proyek **Ga sifikasi batu bara** menjadi DME - KI Tanjung Enim dalam Proses Pengusulan menjadi KEK Oleh PT. Bukit Asam (Persero).
11	*Upgrading* Kilang Eksisting (2017-2022)	Plaju Palembang, Muara Enim	• Upgrading Kilang-kilang Eksisting/Green Refinery di Plaju; - Pekerjaan Dokumen *Basic Engineering Design Package* (BEDP) sudah selesai dan Dokumen *Front End Engineering Design* (FEED) sedang disusun mulai November 2020, Rencana Agustus 2021 Persiapan *Land Clearing*. - *Dokumen Refinery Development Master Plan* (RDMP) Masih menunggu *Re-Scalling* Direncanakan Selesai Akhir Januari 2021

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
			• Pembangunan Bahan Bakar Hijau-Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palembang, Sedang Tahap Pembangunan *Demo Plant.*
12	Bendungan Komering II (tiga dihaji) (25 ribu ha Rp.3,9 T pelaksanaan 2018-2022)	Kec.Tiga Dihaji Kab.OKU Selatan	• Progres Fisik Keseluruhan 32,58% (Paket I= 36%, Paket II= 31,68%, Paket III = 100% dan Paket IV= 38%). (Manfaat; Irigasi 25.423 Ha, Listrik 4 x 10 MW, Air Baku 100 M3/Detik
13	Irigasi Lematang (3000 ha Rp.273 milyar dilaksanakan 2015-2019)	Pagaralam	• Tahap I Pembangunan Bendung Selesai 100%, Tahap II Pembangunan Saluran Induk dan Saluran Skunder, Belum Lelang dan masih Evaluasi Metode Pelaksanaan dan Evaluasi Teknik Dirjen SDA.
14	*Double Track* KA Prabumulih-Kertapati (76,35 Rp.1,133 T dilaksanakan 2015-2019)	Prabumulih,Ogan Ilir, Palembang	• Kereta Api Logistik Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dalam Tahap Penyampaian Dokumen *REQUEST FOR PROPOSAL* (RFP) KPBU Oleh PT. KAI. • Kereta Api Logistik Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Kertapati/Palembang Double Track Sudah Selesai 100%.
15	Pelabuhan New Palembang Port di Tanjung Carat	Tanjung Carat, Kab. Banyuasin	• Proses Penetapan Lokasi Kemenhub dan Telah Ditetapkan Sebagai PSN, Rencana Badan Usaha Pengelola dan Dukungan Komitmen PJPK (Kemenhub), dan Lahan Rencana Lokasi Pelabuhan Proses Pelepasan KLHK sesuai Rekomendasi Tim Terpadu.
16	*Major Project Food Estate* atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (FE-KSPP) Sumatera Selatan	Total luasan *food estate* 1.081.297,38 Ha. Tersebar di 5 kabupaten di Sumatera Selatan.	- Penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi melalui kegiatan pendampingan, pengawalan pertanaman komoditi pangan dan hortikultura sesuai rekomendasi teknis, spesifik lokasi dan

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI	PROGRES FISIK
			berdasarkan kebutuhan petani mulai dari Hulu sampai ke Hilir yang dapat meningkatkan kemandirian petani. - Tanaman Pangan Padi dan Jagung yang berlokasi di Kabupaten OKU Timur, OKI, OKU Selatan, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim - Tanaman Holtikultura di Kabupaten; Muara Enim, OKU, Lahat, Kota Pagaralam, Kota Prabumulih, OKU Timur dan Kota Lubuk Linggau. - Optimalisasi lahan rawa dan intensifikasi lahan pertanian menuju 2 kali tanam pertahun
17	Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi	Tersebar di 13 kabupaten/kota di Sumatera Selatan	Jalan Eks Transmigrasi berada 12 Kabupaten dan 1 Kota dengan total panjang 4.565,36 Km dengan kondisinya sebagian besar Rusak Berat, jalan tersebut diperlukan sebagai jalan produksi/distribusi untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sumatera Selatan.
18	Pemberdayaan Masyarakat (Perhutanan Sosial)	Desa Lubuk Bintialo, Kec. Batanghari Leko	Upaya meningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan sosial.
19	Land4lives (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender)	Musi Banyuasin dan Banyuasin	Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak untuk Pembangunan Lingkungan berkelanjutan di Kawasan Gambut.

Sumber: Kementerian PUPR (BBPJN Sumsel, BBWSS VIII), Hutama Karya Trans Sumatera, Bappeda Prov. Sumsel, Dishub Prov. Sumsel, 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RKP tahun 2023 dan mewujudukan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera, terdapat beberapa kegiatan yang perlu menjadi perhatian Kabupaten/Kota agar dapat didukung pelaksanaannya, yaitu :

1. Pengembangan Kawasan perkotaan yang difokuskan di wilayah metropolitan (WM) Palembang, dan 2 kota besar yaitu Lubuklinggau dan Prabumulih

2. Revitalisasi 3 kawasan transmigrasi (Kawasan transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat).

3. Berdasarkan Perpres No. 63 tahun 2020 masih terdapat 1 daerah tertinggal di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara yang menjadi fokus intervensi daerah tertinggal di tahun 2023.

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) diharapkan dapat mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten OKU sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,51	5,5 – 6,1 %	4,00 %
2	Tingkat Kemiskinan	12,32	9,6 – 10,91 %	12,60 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,57	3,75 %	3,87 %
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,60	72,42	70,00

Sumber: Konfirmasi Bupati Ogan Komering Ulu, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis,2022

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memiliki 1 PKW (Baturaja), 2 PKL (Pengandonan dan Peninjauan), 2 KSP (Kawasan Koridor Perkotaan Baturaja-Martapura dan Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai), 11 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) (Kawasan Permukiman Ex Transmigrasi, Kawasan cepat tumbuh Koridor Baturaja-Lubuk Raja-Martapura, Kawasan Industri Semen Baturaja, Kawasan Minapolitan, Kawasan Permukiman Penduduk asli suku-suku, Kawasan Pertambangan Minyak Bumi, Kawasan Pertambangan Batubara, Potensi Kawasan Panas Bumi, Kawasan Air Terjun, Kawasan Hutan Lindung (Bukit Nanti) dan resapan air, Kawasan Perlindungan Setempat) diarahkan sebagai sentra perkebunan, peternakan dan pertambangan.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 79,99% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021 adalah 1) Industri Pengolahan sebesar 19,77%; 2) Perdagangan Besardan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,72%, 3) Pertanian, Kehutanan, an Perikanan sebesar 16,31%; 4) Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,77%, 5) Konstruksi 12,42%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2022 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 4,00% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 12,60% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,87%.
4) Peningkatan IPM menjadi 70,00.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 97,81%, akses air minum layak sebesar 64,15%, dan akses sanitasi layak sebesar 69,39%.
6) Pengembangan Kawasan Minapolitan.
7) Pengembangan destinasi wisata.
8) Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung dan resapan air, serta Sub-DAS.
9) Peningkatan akses energi melalui pengembangan Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai.
10) Pengembangan Kawasan Industri.
11) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 184,04 Km

Gambar 5. 4
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kab. Ogan Komering Ulu

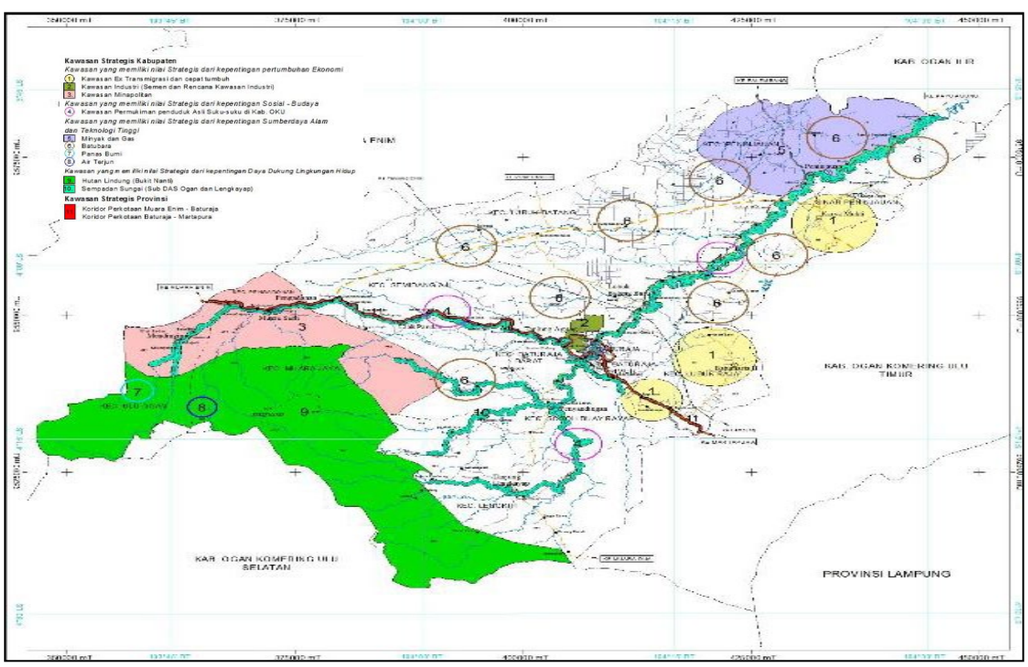

Sumber: Perda No. 22 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten OKU, 2012

2. Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten OKI sebagai berikut:

Tabel 5. 3
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,37	3,09	4,12
2	Tingkat Kemiskinan	14,68	14,68	14,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	3,30	2,98
4	Indeks Pembangunan Manusia	67,17	67,60	67,93

Sumber: Konfirmasi Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki 1 PKW (Kayuagung), 2 PKL (Tugumulyo dan Tulung Selapan), 2 KSP (Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pengembangan Kerbau Rawa Pampangan, dan Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk sekayu dan Kota Kayu Agung), serta Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan dan Kawasan Hutan Rawa Gambut), 7 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) (Kawasan penyangga Kota Palembang, Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Hutan Mangrove Pantai Timur, Kawasan Plasma Nutfah Kerbau Rawa Pampangan, Cagar Budaya Kota Lama Kayuagung), PSN (Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 85 Km, Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung sepanjang 112 Km merupakan bagian dari 8 ruas Trans Sumatera), serta sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi diarahkan sebagai sentra produksi pangan khususnya padi, palawija, hortikultura, ternak, dan perikanan budidaya serta mendapatkan sentuhan program-program penanggulangan kemiskinan.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017 adalah 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 56,36%; 2) Sektor Konstruksi sebesar 13,23%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,88%, 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,24%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 4,12% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 14,57% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses

terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).

3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,98%.
4) Peningkatan IPM menjadi 67,93.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 96,65%, akses air minum layak sebesar 74,39%, dan akses sanitasi layak sebesar 79,02%.
6) Percepatan pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung dan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung.
7) Peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
8) Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri.
9) Pengembangan Kawasan Kerbau Rawa Pampangan.
10) Pengelolaan Gambut seluas 1.030.601 Ha.
11) Pengembangan ekowisata Pulau Maspari.
12) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
13) Pengembangan Jalan Pantai Timur.
14) Penurunan *Stunting.*
15) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa dan Teknis.
16) Pengembangan Kawasan Industri Ogan Komering Ilir
17) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 551.510,45 Ha
18) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 601,54 Km

Gambar 5. 5
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

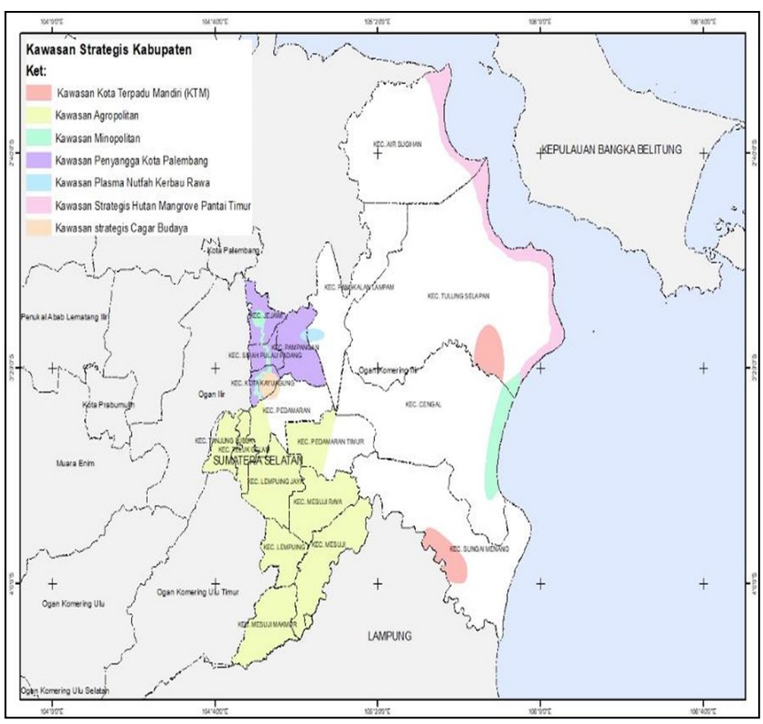

Sumber: Perda No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kab. OKI, 2013

3. Kabupaten Muara Enim

Pembangunan di Kabupaten Muara Enim diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 5. 4
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,75	6,29	6,37
2	Tingkat Kemiskinan	12,32	10,92	10,39
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03	4,49	3,77
4	Indeks Pembangunan Manusia	68,86	69,32	69,55

Sumber: Konfirmasi Bupati Muara Enim, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Muara Enim yang memiliki 1 PKW (Muara Enim), 4 KSP (Kawasan Muara Enim dan sekitarnya, Kawasan Koridor Lahat – Muara Enim, Kawasan Hutan Rawa Gambut, dan Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai), 7 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Agropolitan, Kawasan Koridor Jalan Arteri Kecamatan Muara Enim-Kecamatan Ujan Mas, Kawasan Ekowisata, Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam, Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, dan Kawasan Sempadan Sungai), 2 PSN (Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 110 km dan Jalan Tol Muara Enim – Lubuklinggau – Lahat sepanjang 125 km merupakan bagian dari Trans Sumatera) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra pertambangan. Namun demikian untuk perspektif jangka panjang, pengembangan daerah ini juga diarahkan pada sektor-sektor unggulan terbarukan dengan basis utama pertanian serta sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 92,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2020, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggaliam sebesar 51,69%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 16,13%; 3) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,01%; 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,62; 5) Sektor Konstruksi sebesar 5,64%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,75% melalui sektor unggulan.

2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 12,32% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,03%.
4) Peningkatan IPM menjadi 68,86.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan Provinsi Sumatera Selatan saat ini jalan mantap sebesar 67,43%, akses air minum layak sebesar 89,48%, dan akses sanitasi layak sebesar 92,95%.
6) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
7) Peningkatan Akses Energi.
8) Pengembangan Kawasan Industri berbasis batubara.
9) Peningkatan Produktivitas Perkebunan.
10) Pengembangan destinasi pariwisata.
11) Percepatan pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim dan Jalan Tol Muara Enim – Lubuklinggau – Lahat.
12) Pengembangan Jalan Khusus Batubara dan Jalur Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api.
13) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
14) Penurunan *Stunting*.
15) Pengembangan Pusat Kesehatan.
16) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 451,32 Km
17) Kawasan industri batu bara
18) Pengerjaan *Upgrading* Kilang Eksisting

Gambar 5. 6
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Muara Enim

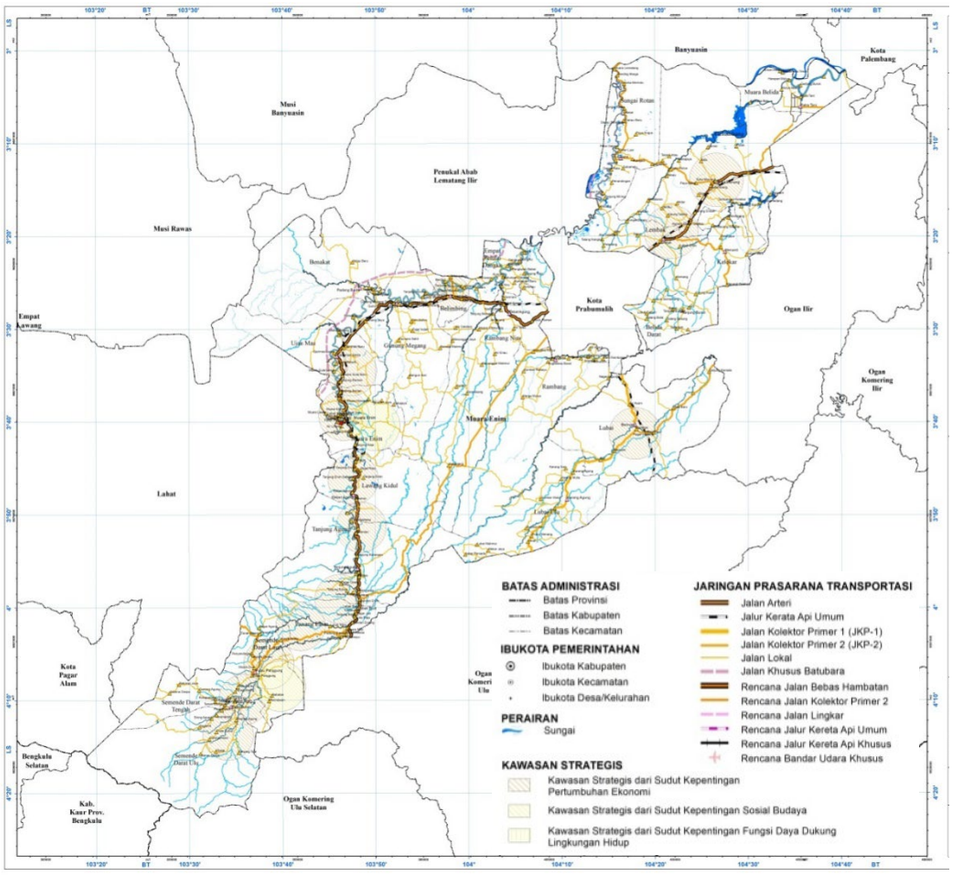

Sumber: Revisi RTRW Kab. Muara Enim, 2018

4. Kabupaten Lahat

Pembangunan di Kabupaten Lahat diharapkan untuk mendukung capaian makro provinsi sumatera selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupten Lahat sebagai berikut :

Tabel 5. 5
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,63	4,41	4,5
2	Tingkat Kemiskinan	16,46	15,5 – 15,20	15,2-14,8
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18	3,01	3,01
4	Indeks Pembangunan Manusia	67,44	69,42	69,42

Sumber: Konfirmasi Sekda Kabupaten Lahat, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Lahat yang memiliki 1 PKW (Lahat), 3 KSP (Kawasan Koridor Lahat –Muara Enim, Kawasan Megalith, Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai), 9 KSK (Kawasan Agropolitan,Kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp, Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kikim Selatan, Kawasan situs sejarah/megalitikum, Kawasan situs sejarah/kubur batu, Kawasan budaya sejarah, Kawasan hutan lindung , Kawasan hutan suaka alam dan cagar budaya, Kawasan Daerah Aliran sungai (DAS), dan 1 PSN (Jalan Tol Muara Enim-Lubuklinggau-Lahat sepanjang 125 Km) diarahkan sebagai sentra produksi hortikultura khususnya sayur-sayuran dan peternakan khususnya sapi. Sektor pertanian dan pertambangan berperan penting bagi perekonomian daerah dan merupakan sumber utama pertumbuhan.Sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi Kabupaten Lahat harus melakukan program-program penanggulangan kemiskinan.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 82,33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 35,74%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,30%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,45%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 8,91%; 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,97%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Lahat pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 4,41% melalui sektor unggulan.

2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 15,5-15,20% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,01%.
4) Peningkatan IPM menjadi 69,42.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 100%, akses air minum layak sebesar 87,67%, dan akses sanitasi layak sebesar 82,85%.
6) Peningkatan produktivitas pertanian melalui optimalisasi jaringan irigasi menuju kedaulatan pangan.
7) Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri.
8) Pelestarian Kawasan situs bersejarah dan budaya sejarah.
9) Pengembangan Pariwisata Megalith dan Pariwisata Alam.
10) Mempertahankan dan Melestarikan Kawasan Hutan Lindung, Suaka Alam dan Cagar Budaya, serta Daerah Aliran Sungai.
11) Percepatan pembangunan Jalan Tol Muara Enim-Lubuklinggau-Lahat.
12) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup (Galian C) dan Pasca Tambang.
13) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana longsor.
14) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 109,83 Km

Gambar 5. 7
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Lahat

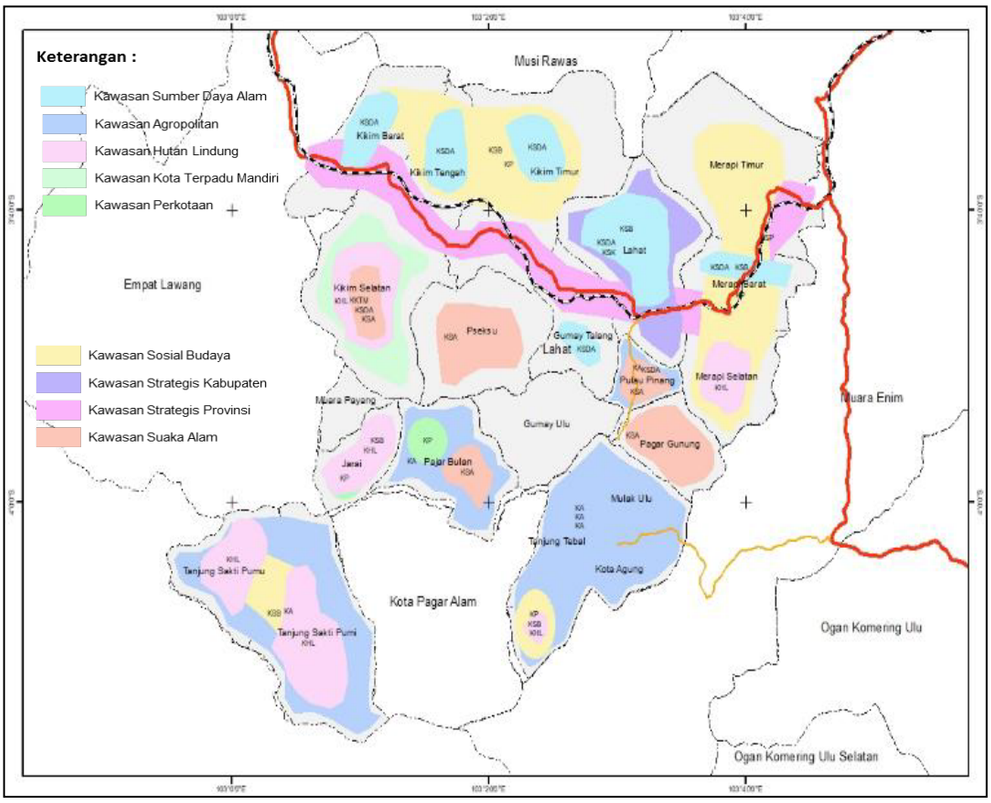

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Lahat, 2012

5. Kabupaten Musi Rawas

Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

Tabel 5. 6
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,33	4,5 – 5,5	4,5 – 5,5
2	Tingkat Kemiskinan	13,89	13,2	13,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,78	3,21	3,15
4	Indeks Pembangunan Manusia	67,0,1	67,5	68,1

Sumber: Konfirmasi Bappeda Kabupaten Musi Rawas, 2020, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas yang memiliki 2 PKL (Muara Beliti dan Muara Lakitan), 1 KSN (Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 3 KSP (Kawasan Koridor Lubuklinggau-Muara Beliti, Kawasan Agropolitan Muara Beliti, Kawasan Minapolitan Tugumulyo), dan 1 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) (Kawasan

Perkotaan Muara Beliti dan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) diarahkan sebagai sentra produksi perkebunan dan pertanian, khususnya komoditi karet, sapi, padi, dan buah-buahan. Di samping itu, Musi Rawas juga merupakan salah satu penghasil tambang. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan sebanyak 2 (dua) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 83,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, adalah 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 31.24%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,85%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 2,33% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 13,89% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,78%.
4) Peningkatan IPM menjadi 68,1.
5) Kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 100%, akses air bersih layak sebesar 83,15%, dan akses sanitasi layak sebesar 67,04%.
6) Peningkatan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi.
7) Peningkatan produktivitas perikanan.
8) Pengembangan Kawasan Perkotaan Muara Beliti, Kawasan Agropolitan Muara Beliti, dan Kawasan Minapolitan Tugumulyo.
9) Percepatan pembangunan Jalan Tol Musi Rawas-Lubuklinggau-Curup Bengkulu.
10) Pengembangan Perhutanan Sosial.
11) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 169,52 Km

Gambar 5. 8
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Musi Rawas

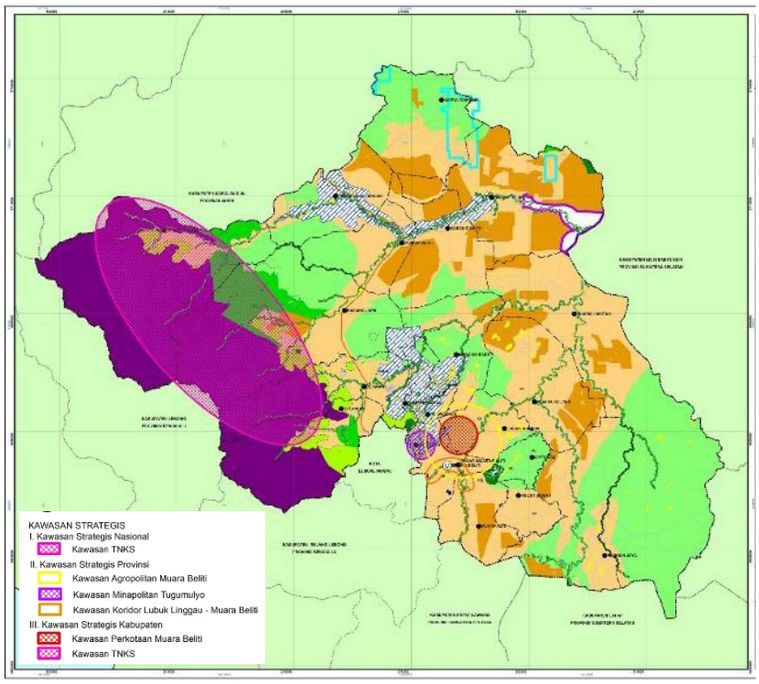

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas, 2013

6. Kabupaten Musi Banyuasin

Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

Tabel 5. 7
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,42	4,04-5,88	4,04-5,88
2	Tingkat Kemiskinan	15,84	10,55 - 09,61	10,55 - 09,61
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,99	3,68	3,49
4	Indeks Pembangunan Manusia	68,10	67,49	67,5

Sumber: Konfirmasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki 1 PKW (Sekayu) dan 2 PKL (Bayung Lencir dan Sungai Lilin), 3 KSP (Kawasan Minapolitan, Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk sekayu dan Kota Kayu Agung) dan Kawasan Hutan Rawa Gambut), 7 KSK (Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, Kawasan Strategis Agropolitan, Kawasan Strategis Minapolitan, Kawasan Strategis Pertambangan, Kawasan Strategis Perkebunan, Kawasan Strategis Buaya Senyulong dan Kawasan Strategis Rawa Gambut) diarahkan untuk memantapkan

perannya sebagai salah satu sentra utama pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perekonomian terbesar kedua setelah Palembang (diukur dari PDRB ADHB) dan diperkirakan semakin berkembang karena berada dalam Koridor Ekonomi Sumatera. Musi Banyuasin memiliki banyak komoditas unggulan, diantaranya pertambangan, karet, perikanan, palawija, padi, dan peternakan sapi. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang banyak juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 88,87% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 53,67%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,69%; 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,69%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 7,85%; 5) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,97%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 4,04 - 5,88% melalui sektor unggulan
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,55 - 09,61% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,49%.
4) Peningkatan IPM menjadi 67,5%.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 100,00%, akses air minum layak sebesar 79,37%, dan akses sanitasi layak sebesar 80,41%.
6) Peningkatan produktivitas perkebunan (karet dan sawit), kehutanan dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
7) Hilirisasi Karet.
8) Pelestarian Suaka Marga Satwa.
9) Peningkatan akses energi.
10) Pengelolaan Gambut seluas 358.938 ha.
11) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir serta longsor.
12) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 543,80 Km
13) Pemberdayaan Masyarakat (Perhutanan Sosial) di Desa Lubuk Bintialo, Kec. Batanghari Leko
14) Land4lives (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender)
15) Jalan tol Betung-Jambi

Gambar 5. 9
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

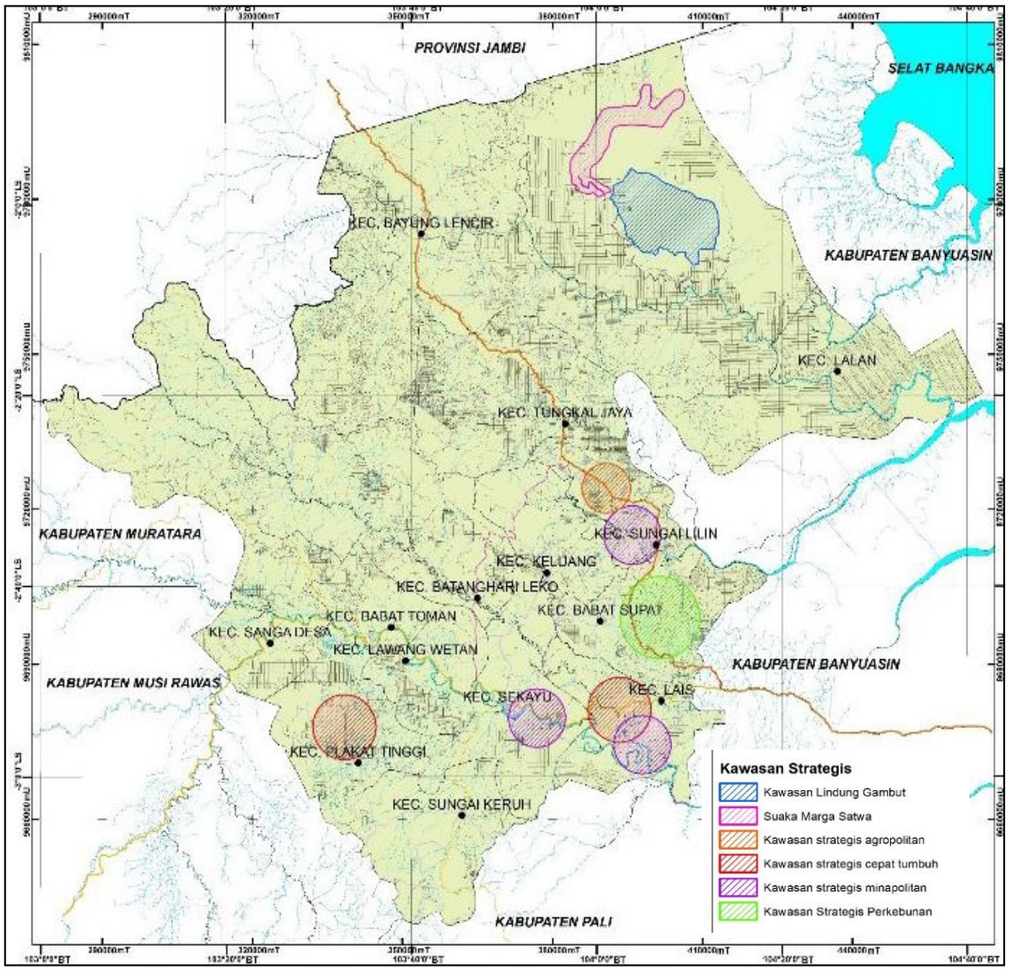

Sumber: Perda No. 8 Tahun 2016 tentang RTRW Kab. Muba, 2016

7. Kabupaten Banyuasin

Pembangunan di Kabupaten Banyuasin diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

Tabel 5. 8
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,84	5,08-5,88	4,04-5,88
2	Tingkat Kemiskinan	11,02	9,55	10,55 - 09,61
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,84	3,69	3.68
4	Indeks Pembangunan Manusia	66,13	70,72	67.49

Sumber: Konfirmasi Kabupaten Banyuasin, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang memiliki 1 PKWp (Sungsang/Tanjung Api Api) dan 1 PKL (Pangkalan Balai), 1 KSN(Taman Nasional Sembilang), 3 Proyek Strategis Nasional (PSN), meliputi Jalan Tol Palembang –Tanjung Api-Api sepanjang 70 Km, Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung sepanjang 111,69 Km, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api), 5 KSP (Kawasan Terpadu Tanjung Api-Api, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pengembangan Itik Pegagan, Kawasan Pesisir Timur, dan Kawasan Hutan Rawa Gambut), 9 KSK (Kawasan Pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang, Kawasan Strategis Pertanian, Kawasan Migas, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api/Tanjung Carat, Kawasan Minapolitan, Kawasan kampung Nelayan Sungsang, Kawasan Taman Nasional Sembilang, Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, dan Kawasan Agrocenter) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu sentra utama pertanian dan pertambangan. Kabupaten Banyuasin berperan penting dalam mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dengan komoditi unggulan padi, palawija, hortikultura sayur-sayuran, dan perikanan. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Kabupaten Banyuasin harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,92%; 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,68%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 2,61%; 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,29%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,08%-5,8% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,55% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,69%.
4) Peningkatan IPM menjadi 70,72.
5) Peningkatan infrastruktur, meliputi jalan mantap sebesar 94,66%, akses air minum layak sebesar 76,97%, dan akses sanitasi layak sebesar 72,16%.
6) Perluasan dan Percepatan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus Sriwijaya
7) Pengembangan Kawasan Industri Gasing.
8) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional.
9) Pengembangan Pelabuhan New Port Palembang.
10) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang.

11) Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan.
12) Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar, serta pengolahan dan pemasaran ikan di Sungsang
13) Pengembangan Destinasi Pariwisata (Ekowisata Taman Nasional Sembilang dan Desa Wisata Sungsang IV).
14) Pengembangan Kawasan Sembawa.
15) Pengelolaan gambut seluas 563.083 Ha dan Penanganan Hotspot.
16) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Banyuasin.
17) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
18) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa.
19) Pengembangan Pusat Kerbau Rawa.
20) Pelabuhan New Palembang Port di Tanjung Carat
21) KEK Pelabuhan Tanjung Carat
22) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 287.145,34 Ha
23) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 545,76 Km
24) Land4lives (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender)

Gambar 5. 10
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Banyuasin

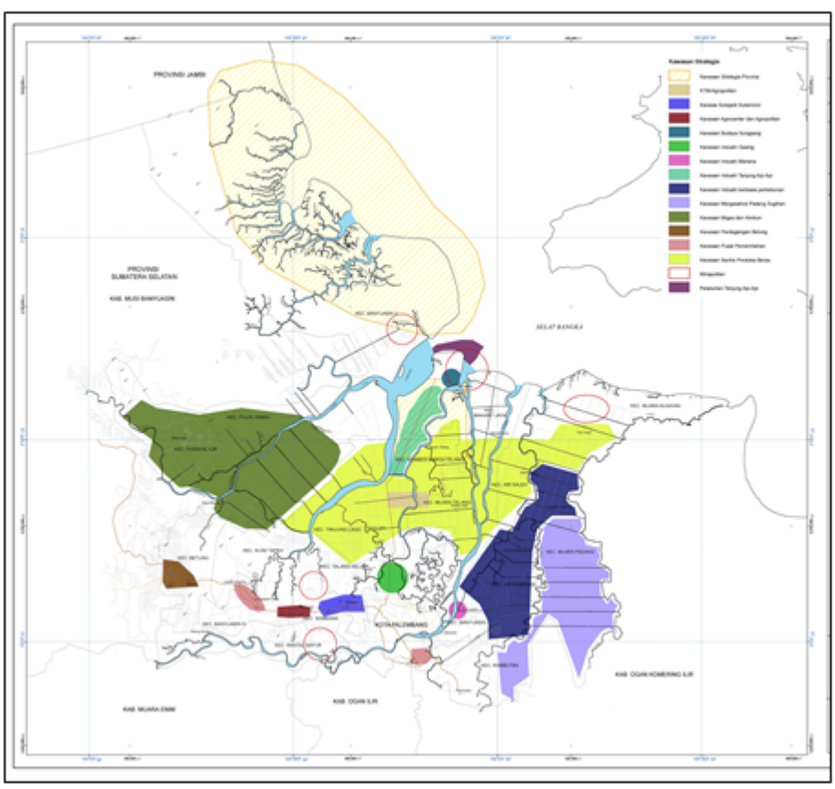

Sumber: Perda No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Banyuasin, 2012

8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

Tabel 5. 9
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten OKU Selatan

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,38	4,42 – 5,52%	5,00%
2	Tingkat Kemiskinan	11,12%	9,00%	8,87%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,23%	2,24%	2,19%
4	Indeks Pembangunan Manusia	65,34	67,23	67,67

Sumber: Konfirmasi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki 1 PKL (Muaradua), 1 PSN (Bendungan Tiga Dihaji); 3 KSP (Kawasan Minapolitan, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau, Kawasan Panas Bumi Ulu Danau), 17 KSK (Kawasan Pusat Kota Muaradua, Kawasan Agropolitan, Kawasan Koridor Muaradua – Banding Agung, Kawasan Panas Bumi Geothermal, Kawasan situs sejarah, Kawasan situs purbakala, Kawasan budaya sejarah, Kawasan benda sejarah, Tempat perlindungan keanekaragaman hayati, Kawasan lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, Kawasan rawan bencana alam, Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan, kawasan potensi batubara di Kecamatan Buay Pematang Ribu, Kawasan Perbatasan) diarahkan untuk memacu pertumbuhannya dan mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Percepatan pembangunan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif, yakni tanaman pangan padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, dan peternakan sapi serta pengembangan kawasan wisata Danau Ranau. Pengembangan sektoral ini perlu didukung dengan penguatan aksesibilitas wilayah dengan memperkuat konektivitas jaringan jalan dengan Jalur Lintas Tengah serta dengan Baturaja (Ogan Komering Ulu).

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 80,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2020 adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,09%; 2)

Perdagangan sebesar 22,50%; 3) Konstruksi sebesar 16,85%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,94%; 5) Sektor Real Estate sebesar 4,91%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 4,45% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,00% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,24%.
4) Peningkatan IPM menjadi 67,23.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi sebesar 99,16%, akses air minum layak sebesar 76,74%, akses sanitasi layak sebesar 77,12 %.
6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
7) Percepatan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji.
8) Revitalisasi Bandara Banding Agung.
9) Peningkatan Akses Energi baik panas bumi maupun batubara.
10) Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu dan Ekowisata Danau Ranau.
11) Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah.
12) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
13) Peningkatan kerjasama dengan kawasan perbatasan.
14) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta longsor.
15) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 62.991,3 Ha
16) Pengembangan Kawasan Danau Ranau (Event Grand Fondo)
17) Bandara Banding Agung

Gambar 5. 11
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten OKU Selatan

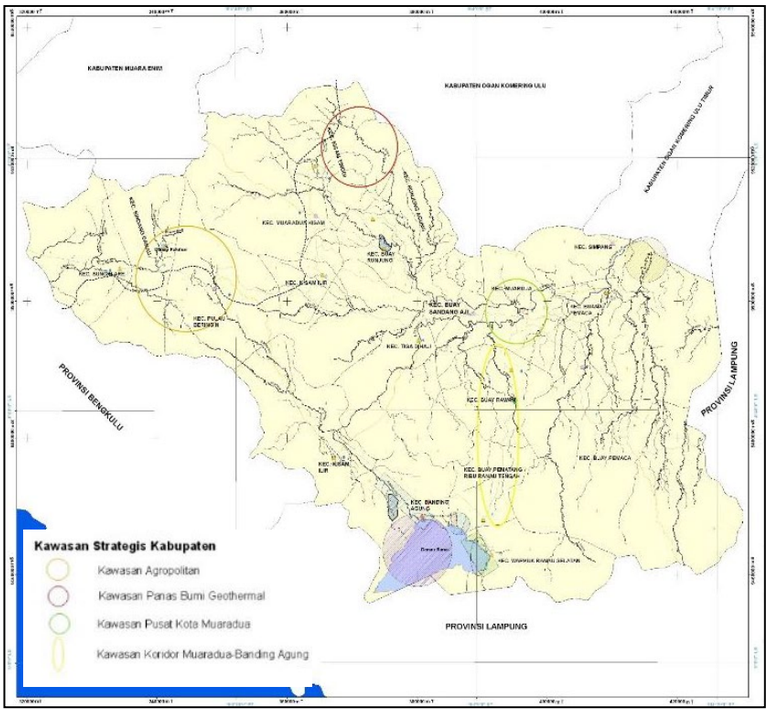

Sumber: Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. OKU Selatan, 2013

9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut:

Tabel 5. 10
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,66	1,41	5,0 - 5,5
2	Tingkat Kemiskinan	10,6	10,25	10,19
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,18	3,71	3,04
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,58	70,14	70,39

Sumber: Konfirmasi Bupati Ogan Komering Ulu Timur, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki 1 PKWp (Martapura) dan 1 PKL (Gumawang), 3 KSP (Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Koridor Baturaja-Martapura), 3 KSK (Kawasan Perkotaan Martapura, Kawasan Daerah Tertinggal Bantaran Sungai Komering (Rasuan), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Belitang)

diarahkan sebagai sentra produksi pangan, khususnya komoditi padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ternak sapi. Pertumbuhan komoditi-komoditi tersebut telah berkontribusi menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah di samping sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2017, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,09%; 2) Sektor Konstruksi sebesar 18,61%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,28%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,02%; 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,46%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,0 - 5,5 % melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,19% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,04%.
4) Peningkatan IPM menjadi 70,39%.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondsi saat ini jalan mantap sebesar 100,00%, akses air minum layak sebesar 93,32%, dan akses sanitasi layak sebesar 87,40%.
6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
7) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.
8) Pengembangan Daerah Irigasi Rawa.
9) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 109.585,68 Ha

Gambar 5. 12
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten OKU Timur

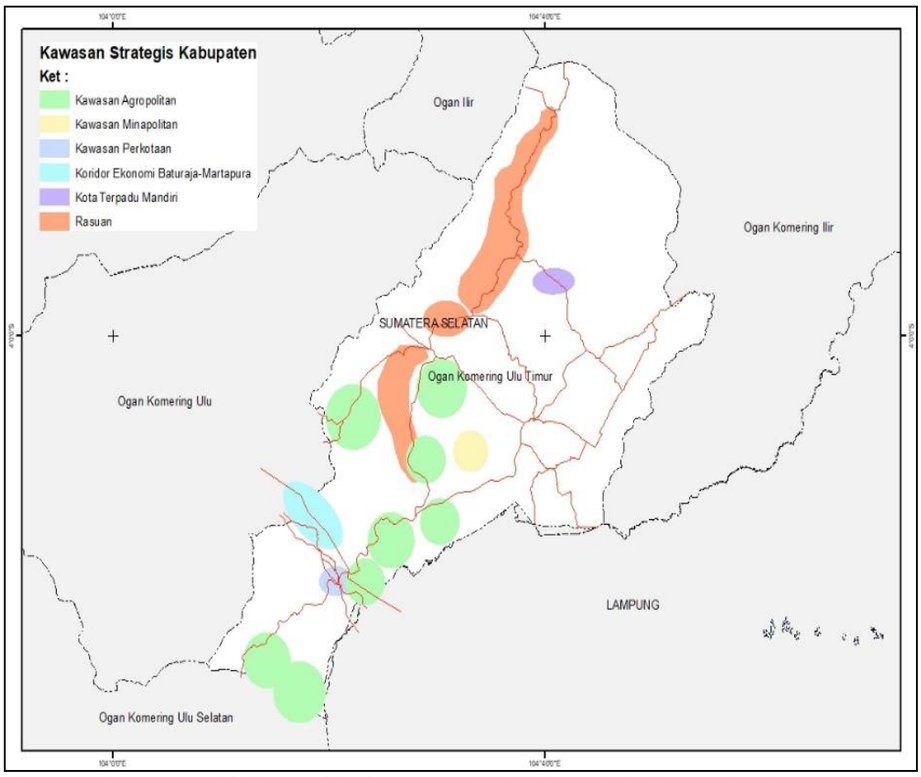

Sumber: Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. OKU Timur, 2012

10. Kabupaten Ogan Ilir

Pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

Tabel 5. 11
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,77	7,19-7,69	4,00
2	Tingkat Kemiskinan	13,36	12,24	13,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,07	4,11	2,95
4	Indeks Pembangunan Manusia	67,17	68,26	68,17

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2020

Pengembangan Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki 1 PKWp (Indralaya) dan 1 PKL (Tanjung Raja), 3 KSP (Kawasan Minapolitan Pemulutan Barat, Kebun Raya Sriwijaya dan Kawasan Hutan Rawa Gambut), 7 KSK (Kawasan Perkotaan Indralaya dan sekitarnya (PKW), Kawasan Koridor Kota Palembang-Indralaya, Kawasan Koridor Indralaya-Tanjung Raja, Kawasan Agropolitan Muara Kuang dan

Indralaya Utara, Kawasan Minapolitan Pemulutan Barat, Kawasan Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi (KTM) Parit Rambutan, Kawasan Kurang Berkembang Rambang Kuang dan Muara Kuang), 2 PSN (Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya (Palindra) sepanjang 22 Km dan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 110 km) diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai sentra produksi pangan dan daerah penyangga perkotaan Palembang dan Prabumulih. Komoditi unggulan daerah adalah hortikultura buahbuahan, sayur-sayuran, padi dan ternak sapi.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan sebanyak 6 (enam) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 164.99% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 100%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,56%; 3)Sektor Konstruksi sebesar 16,88%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,01%; 5)Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,99%; 6) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,55%. Hal ini menggambarkan besarnya pengaruh kegiatan di daerah tetangga Palembang dan Prabumulih.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 3,87% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 13,62%, yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,02.
4) Peningkatan IPM menjadi 67,57.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 100%, akses air minum layak sebesar 72,53%, dan akses sanitasi layak sebesar 90,41%.
6) Pengembangan Pusat Pendidikan.
7) Pengembangan Kebun Raya Sriwijaya dan *Science Techno Park*.
8) Percepatan Pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih-Muara Enim.
9) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Ogan Ilir.
10) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
11) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rambutan
12) Pengembangan Kawasan *Food Estate* seluas 70.064,61 Ha
13) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 69,70 Km

Gambar 5. 13
Peta Arahan Strategis Pembangunan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

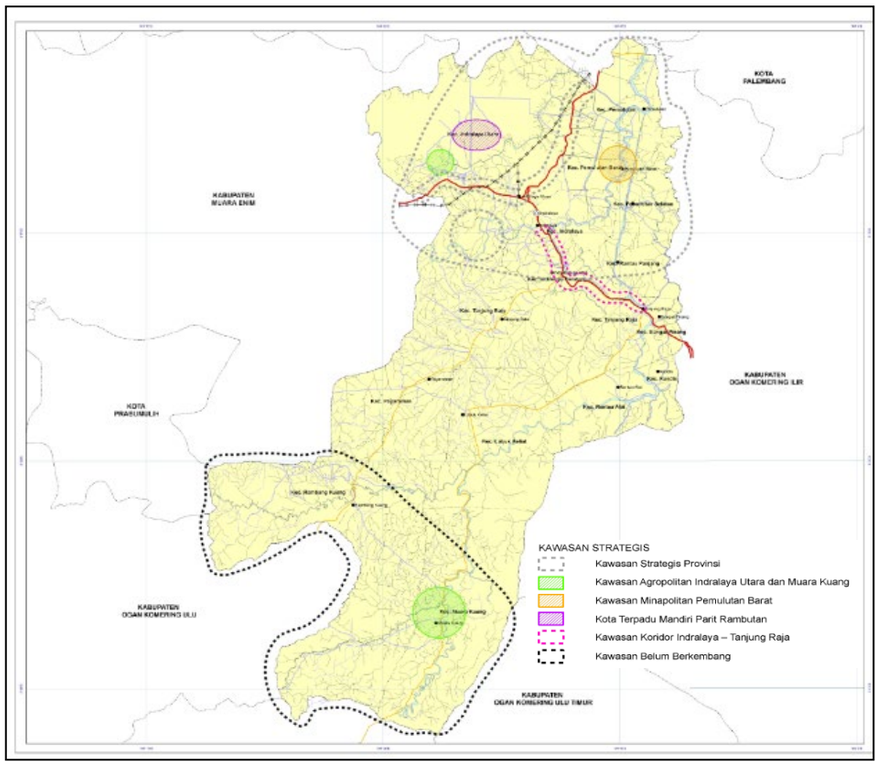

Sumber: Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Ogan Ilir, 2012

11. Kabupaten Empat Lawang

Pembangunan di Kabupaten Empat Lawang diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,82	3,61-4,71	3,61-4,71
2	Tingkat Kemiskinan	13,35	12,46	12,38
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,41	3,28	3,11
4	Indeks Pembangunan Manusia	65,39	66,48	66,89

Sumber: Konfirmasi Bupati Empaat LAwang, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Empat Lawang yang memiliki 1 PKL (Tebing Tinggi), 2 KSP (Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh dan Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai), 6 KSK (Kawasan Agropolitan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan dan Pemerintah, Kawasan Rencana Kota Baru di Tebing Tinggi dan Pendopo, Kawasan hutan lindung, dan Kawasan Daerah Aliran Sungai Musi)

diarahkan sebagai sentra produksi pertanian. Percepatan pertumbuhan pertanian dan peternakan sangat penting mengingat besarnya pangsa pertanian dalam struktur perekonomian daerah

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 81,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,10%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,38%; 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,36%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 11,14%; 5) Sektor Real Estat sebesar 4,94%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 3,82% melalui sektor unggulan
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 13,35% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,41%.
4) Peningkatan IPM menjadi 65,39.
5) Kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 98,80%, akses air minum layak sebesar 51,87%, dan akses sanitasi layak sebesar 75,34%.
6) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan (kopi, sawit, dan karet), dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
7) Pengembangan destinasi wisata.
8) Peningkatan akses energi.
9) Pengelolaan kawasan hutan lindung dan DAS Musi.
10) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Kecamatan Sikap Dalam.
11) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 50,54 Km

Gambar 5. 14
Peta Arahan Strategis Pembangunan Kabupaten Empat Lawang

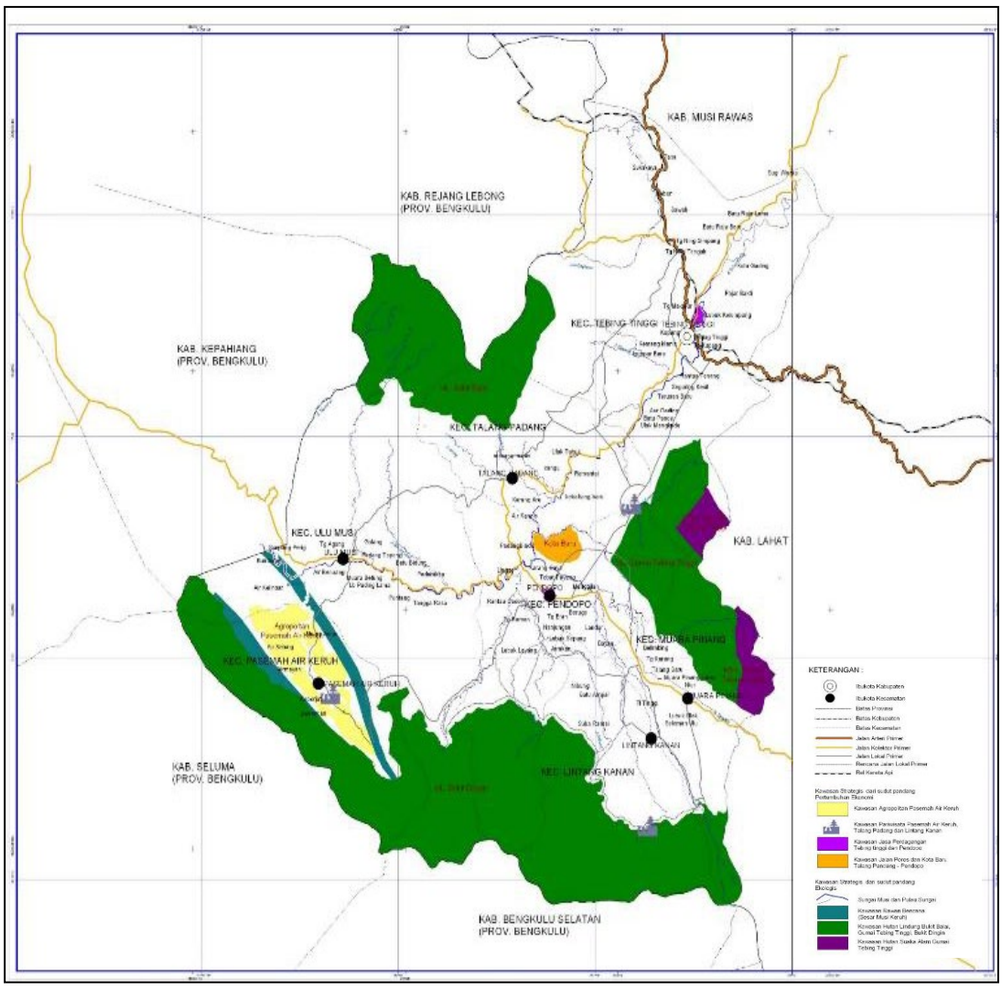

Sumber: Perda No. 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Empat Lawang, 2012

12. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:

Tabel 5. 13
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	0,28	5,5 -6,0	6,0 - 6,5
2	Tingkat Kemiskinan	12,91	11,80 - 11,85	11,10 - 11,15
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,61	3,33	3,11
4	Indeks Pembangunan Manusia	64,88	66,96	67,74

Sumber: Konfirmasi Sekda Kabupaten PALI, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai daerah otonomi baru yang memiliki 1 KSP (Kawasan Candi Bumi Ayu), 8 KSK (Kawasan Perkotaan Talang Ubi, Kawasan Strategis Agropolitan Talang Ubi, Kawasan Strategis Agropolitan Penukal Utara, Kawasan pelabuhan khusus batubara yang berada di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kawasan Koridor Abab – Talang Ubi, Kawasan Koridor Tanah Abang – Penukal Utara, Kawasan Strategis Daerah Penyangga Kawasan Industri *Pendopo Integrated Industrial Park* (PIIP), dan Kawasan Gambut dan Rawa diarahkan untuk mempersiapkan berbagai infrastuktur dan memantapkan perannya sebagai salah satu sentra perkebunan. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 89,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 41,89%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,73%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 14,85%; 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,98%; 5) Sektor Industri Pengolahan sebesar 2,40%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 6,0-6,5% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,10-11,15% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,11%.
4) Peningkatan IPM menjadi 67,74.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 100,00%, akses air minum layak sebesar 87,49%, dan akses sanitasi layak sebesar 97,31%.
6) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung kedaulatan pangan.
7) Pengelolaan Gambut dan Rawa dengan luasan gambut sebesar 30.305 ha dan Penanganan Hotspot.

8) Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Candi Bumi Ayu.
9) Pengembangan Kawasan Industri Talang Ubi.
10) Peningkatan Jalan PALI-Musi Banyuasin.
11) Pengembangan Jalan PALI-Musi Rawas.
12) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 7 Km

Gambar 5. 15
Peta Arahan Strategis Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

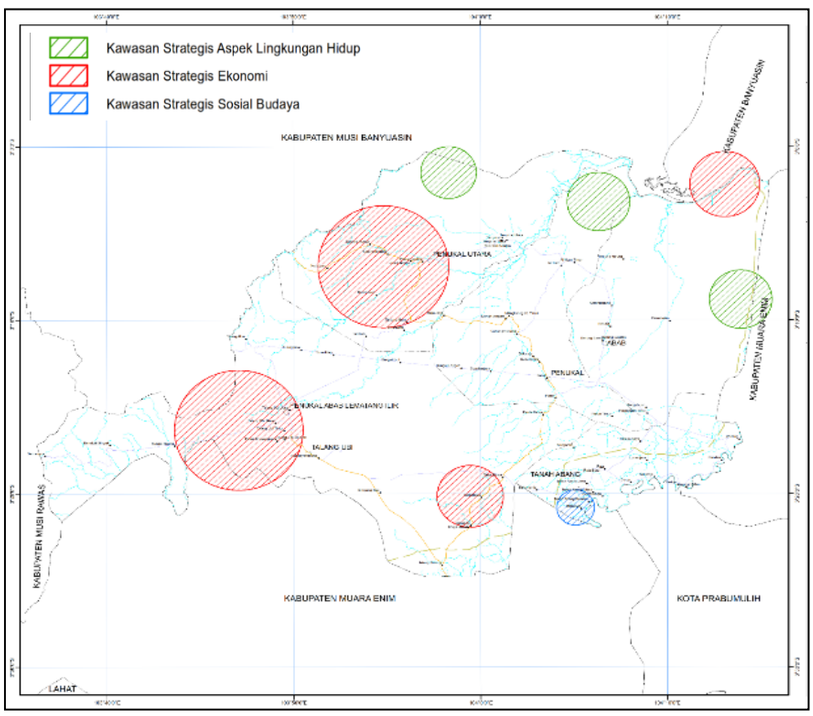

Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kab. PALI, 2018

13. Kabupaten Musi Rawas Utara

Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

Tabel 5. 14
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,39	5,88-6,38	4,00 - 4,25
2	Tingkat Kemiskinan	19,47	11,76	18,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,72	4,80	3,75
4	Indeks Pembangunan Manusia	64,93	65,00	66,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru memiliki 1 KSN (Kawasan Strategis Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 5 KSK (Kawasan Perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah, Kawasan Perikanan, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sekitar Danau Rayo) diarahkan untuk mempersiapkan berbagai infrastuktur dan memantapkan perannya sebagai salah satu sentra perkebunan dan pertambangan. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Kabupaten Musi Rawas Utara juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 83,69% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 46,39%; 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,60%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,61%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,51%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,88-6,38% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,76% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,8.
4) Peningkatan IPM menjadi 65,00.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 100%, akses air minum layak sebesar 80,33%, dan akses sanitasi layak sebesar 90,37%.
6) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.
7) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
8) Pengembangan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Danau Rayo untuk pengendalian bencana banjir.
9) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
10) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 188,42 Km
11) Pembangunan pasar

Gambar 5. 16
Peta Arahan Strategis Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara

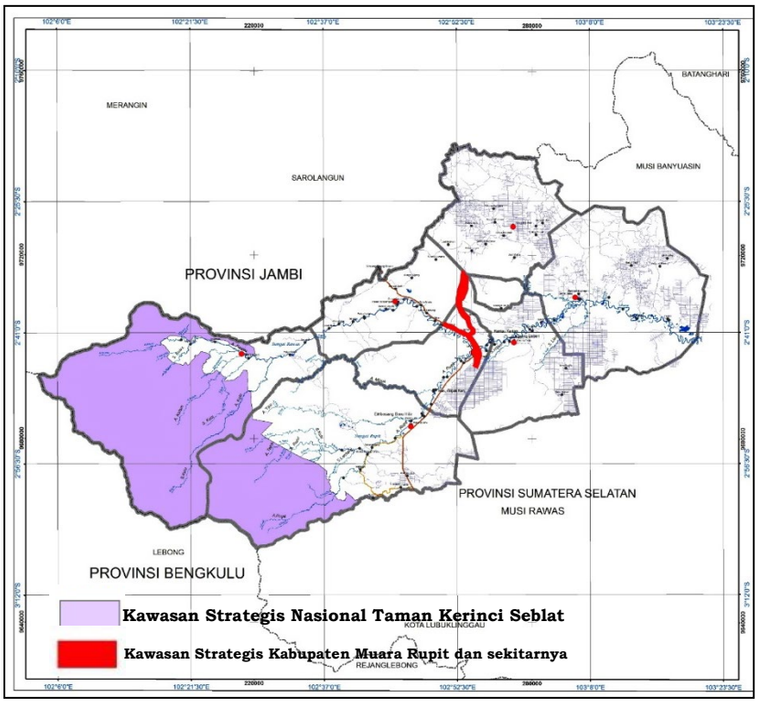

(a) Kawasan Strategis Nasional

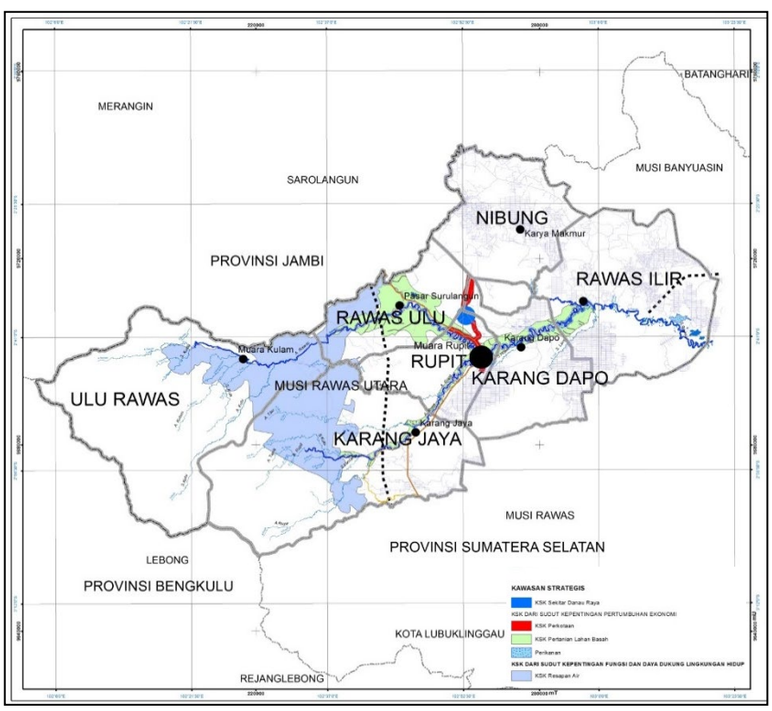

(b) Kawasan Strategis Kabupaten

Sumber: Perda No. 12 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara, 2018

14. Kota Palembang

Pembangunan di Kota Palembang diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Palembang sebagai berikut:

Tabel 5. 15
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,17	4,5	5,5
2	Tingkat Kemiskinan	11,34	10,35	9,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,11	7,94	7,84
4	Indeks Pembangunan Manusia	78,72	79,09	79,15

Sumber: Konfirmasi Walikota Kota Palembang, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kota Palembang dan sekitarnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) memiliki 1 PSN (*Light Rapid Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang), 1 KSP (Koridor Palembang-Prabumulih), 9 KSK (Kawasan Jakabaring, Kawasan Agropolitan Gandus-Pulokerto, Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Talang Kelapa, Kawasan Pusat Kota atau *Central Business District* (CBD), Kawasan Industri Keramasan Karya Jaya, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Karya Jaya, Kawasan Industri Sukarami, Kawasan Taman Purbakala Situs Sriwijaya Karang Anyar, dan Kawasan Tepian Sungai Musi).

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 6 (enam) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 79,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Industri Pengolahan sebesar 32,06%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,52%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 16,44%; 4) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,96%; 5) Sektor Sektor Real Estate sebesar 5,12%.

Pembangunan Kota Palembang akan menentukan sejauh mana wilayah Sumatera Selatan mendapatkan manfaat dari percepatan pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Kota Palembang juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kota Palembang pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 5,5% melalui sektor unggulan
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,95% yang difokuskan pada ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan) dan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 7,84.
4) Peningkatan IPM menjadi 79,15.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 100,00%, akses air minum layak sebesar 97,43%, akses sanitasi sebesar 96,15%.

6) Percepatan penyelesaian Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (IPALT).
7) Percepatan operasional Jembatan Musi IV dan Musi VI, serta Pengembangan Jalan Lingkar Dalam Musi IV-Jakabaring-Musi VI.
8) Optimalisasi pengelolaan *Light Rapid Transit* (LRT) dalam rangka penyiapan *Transit Oriented Development* (TOD).
9) Perluasan Trase *Light Rapid Transit* (LRT).
10) Pengendalian genangan air.
11) Penanganan kawasan kumuh seluas 2.581,84 Ha.
12) Pengurangan timbunan sampah.
13) Pengembangan destinasi wisata.
14) Pengembangan Kawasan Industri Non Polutan Gandus.
15) Pengembangan Kota Baru Palembang.
16) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Banyuasin dan Palembang-Ogan Ilir.
17) Perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kramasan
18) Fly Over Simpang Sekip dan Underpass Sudirman
19) Jalan Lingkar Luar Timur
20) Normalisasi Sungai Sekanak-Lambidaro
21) Akses Jalan Musi VI - KH. Wahid Khasyim – Pangeran Ratu Jakabaring

Gambar 5. 17
Peta Arahan Strategis Pembangunan Kota Palembang

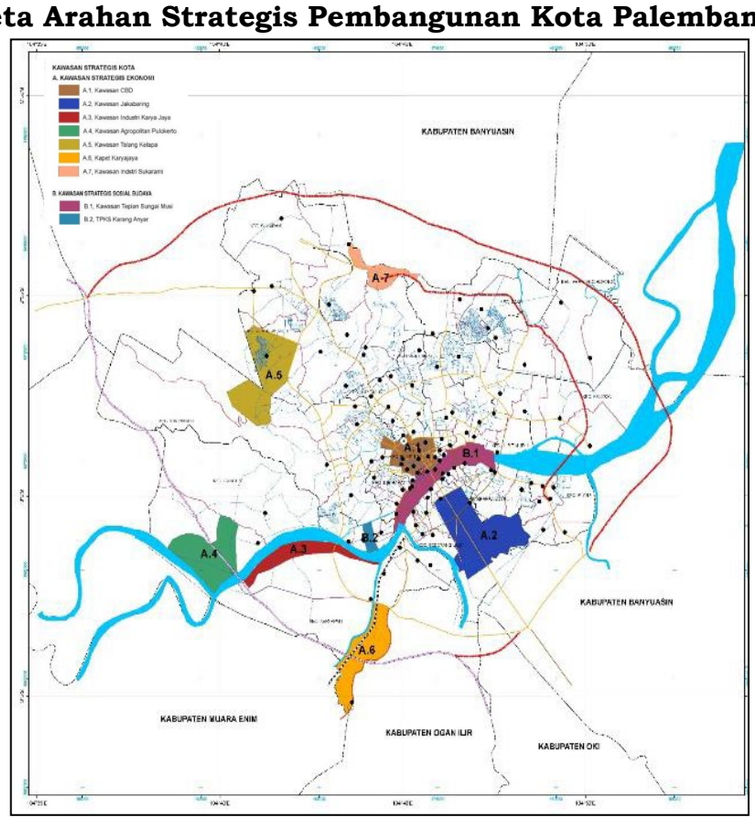

Sumber: Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang, 2012

15. Kota Prabumulih

Pembangunan di Kota Prabumulih diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Prabumulih sebagai berikut:

Tabel 5. 16
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,10	5,47	5,52
2	Tingkat Kemiskinan	12,2	9,42	8,92
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,86	5,71	5,46
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,67	74,45	74,50

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kota Prabumulih yang memiliki 1 PKW (Prabumulih), 1 KSP (Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih), 2 KSK (Kawasan Pusat Strategis Ekonomi dan Kawasan Strategis Sosial Budaya), dan 1 PSN (Kereta Api Prabumulih – Kertapati yang merupakan bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai salah satu pusat pelayanan jasa dan kegiatan di tingkat wilayah. Dalam kaitan pengembangan koridor internal Palembang-Lubuklinggau, posisi Kota Prabumulih strategis sebagai salah satu simpul transportasi dan perdagangan wilayah.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 7 (tujuh) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 70,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,58%; 2) Sektor Bangunan sebesar 17,54%; 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,53%; 4) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,81%; 5) Sektor Real Estate sebesar 8,00%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kota Prabumulih pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,52% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,92% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,46.
4) Peningkatan IPM menjadi 74,50.
5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini akses air minum layak sebesar 93,77%, dan akses sanitasi layak sebesar 98,13%.
6) Percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota *(Double Track).*

7) Peningkatan Produktivitas Perkebunan menuju kedaulatan pangan.
8) Pengembangan Perkotaan Prabumulih.
9) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi sepanjang 32,57 Km

Gambar 5. 18
Peta Arahan Strategis Pembangunan Kota Prabumulih

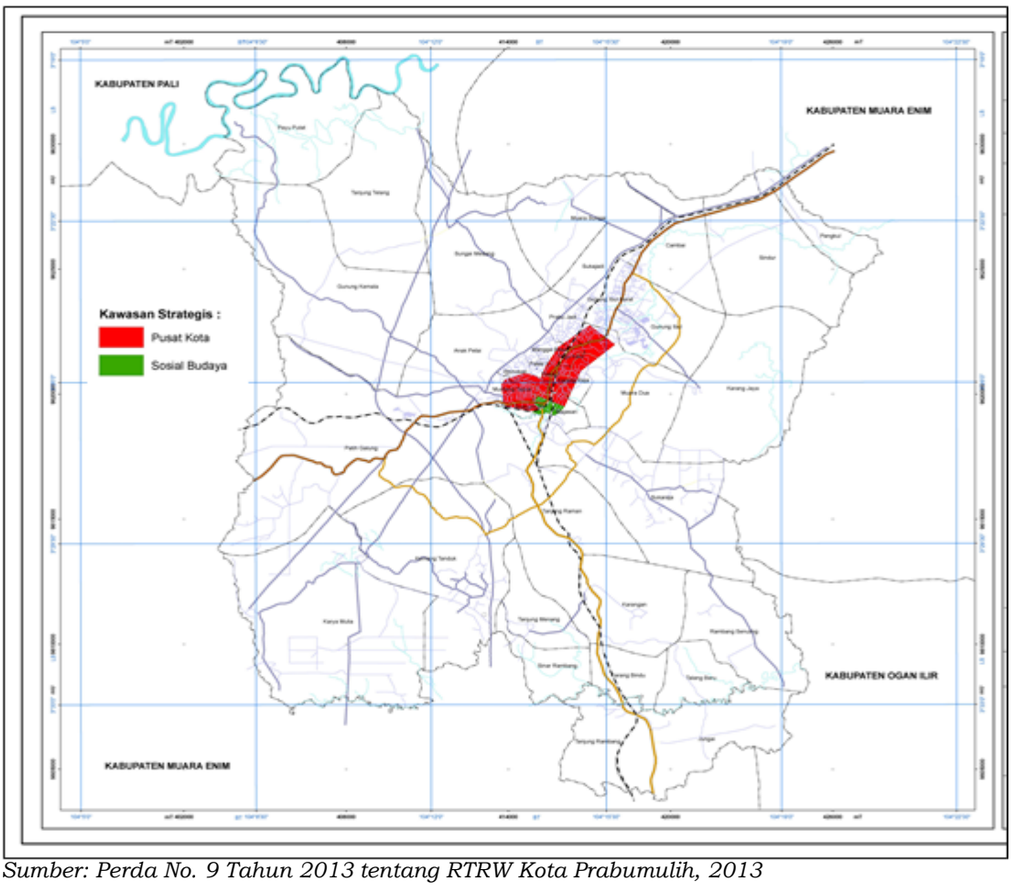

Sumber: Perda No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Prabumulih, 2013

16. Kota Pagar Alam

Pembangunan di Kota Pagar Alam diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Pagar Alam sebagai berikut:

Tabel 5. 17
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,39	5,38	5,5
2	Tingkat Kemiskinan	9,4	8,74	8,66
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,6	2,42	2,39
4	Indeks Pembangunan Manusia	68,68	70,23	70,91

Sumber: Konfirmasi Walikota Kota Pagar Alam, 2022, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kota Pagar Alam yang memiliki 1 (PKWp) Pagar Alam, 1 KSP (Kawasan Situs Purbakala Megalith), 9 KSK meliputi Kawasan sekitar bandara, Kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan Perkebunan Teh, Kawasan Perkebunan Kopi, Koridor Jalan Arteri sekunder, Situs purbakala Megalith, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan setempat, Kawasan rawan bencana letusan Gunung Berapi, dan 1 PSN (Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang) diarahkan sebagai kota jasa dan pariwisata dataran tinggi. Dikelilingi oleh bentang alam pegunungan dan daerah pertanian yang indah, potensi pengembangan pariwisata sangat menjanjikan.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 7 (tujuh) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 78,28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2020, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,64%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,43%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 16,60%; 4) Sektor Jasa Pendidikan sebesar 10,17%; 5) Sektor Real Estat sebesar 5,72%; 6) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,03%; 7) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,72%.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kota Pagar Alam pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 4,39% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,4% yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak) dan ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,6.
4) Peningkatan IPM menjadi 68,68.
5) Peningkatan infrastruktur akses air minum layak sebesar 93,16%, dan akses sanitasi layak sebesar 54,04%.
6) Pembangunan Jembatan Lematang Indah
7) Pengembangan pariwisata (KSPN)
8) Pengembangan destinasi wisata alam Gunung Dempo sebagai tujuan destinasi nasional.
9) Pelestarian Kawasan Bersejarah Situs Purbakala Megalith.
10) Peningkatan akses jalan menuju Kota Pagar Alam dan jalur transportasi udara (Bandara Atung Bungsu).
11) Peningkatan produktivitas hasil perkebunan dan hortikultura.
12) Penataan Kawasan Rawan Bencana sekitar Gunung Dempo.
13) Percepatan Pembangunan Daerah Irigasi Lematang.
14) Pengembangan Pusat Kesehatan Perkotaan.
15) Rencana lokasi Pembangunan IPDN di Kecamatan Dempo Selatan dengan luas 20 Ha.

Gambar 5. 19
Peta Arahan Strategis Pembangunan Kota Pagar Alam

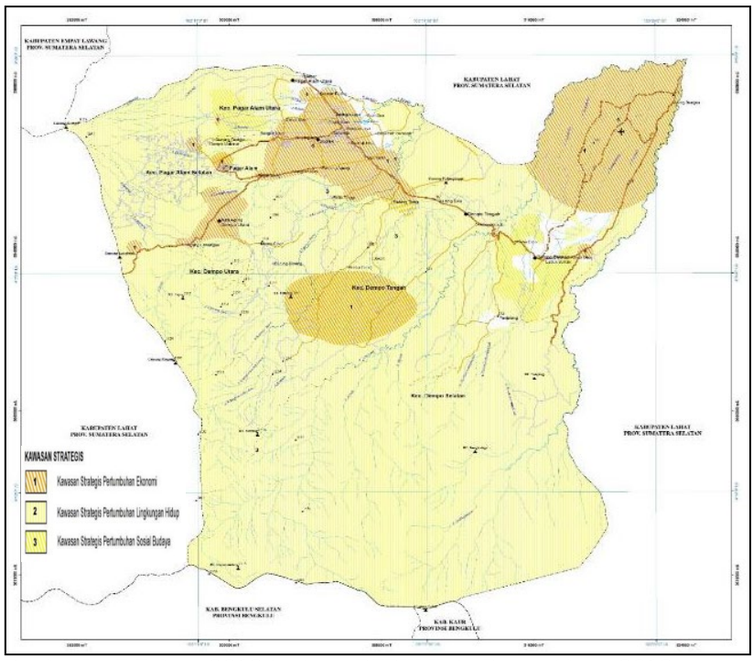

Sumber: Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pagar Alam, 2012

17. Kota Lubuklinggau

Pembangunan di Kota Lubuklinggau diharapkan untuk mendukung capaian makro Provinsi Sumatera Selatan. Capaian makro yang akan dicapai di Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

Tabel 5. 18
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuklinggau

No.	Indikator Makro	Capaian 2021	Target	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,15	6,50	6,60
2	Tingkat Kemiskinan	13,23	12,09	11,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,27	5,73	5,07
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,89	75,71	76,05

Sumber: Konfirmasi Walikota Lubuklinggau, 2022 BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Analisis, 2022

Pengembangan Kota Lubuklinggau yang memiliki 1 PKW (Lubuklinggau), 2 KSP (Kawasan Perkotaan Lubuklinggau dan Kawasan Koridor Lubuklinggau – Muara Beliti), 4 KSK (Kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan pertanian sawah irigasi teknis, Kawasan Strategis Pelestarian Rumah Adat Batu Urip dan Kawasan Strategis Pelestarian Rumah Adat Jukung), 1 KSN (Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan 2 (PSN) (Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu sepanjang 95 Km dan Jalan Tol Muara Enim – Lubuklinggau – Lahat sepanjang 125 Km)diarahkan sebagai pusat kota jasa dan industri pengolahan yang melayani wilayah bagian barat. Dengan posisinya yang strategis, Kota Lubuklinggau juga berpotensi melayani wilayah Bengkulu.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 8 (delapan) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 66,25% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2021, meliputi 1) Sektor Konstruksi sebesar 22,41%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,87%; 3) Sektor Real Estate sebesar 9,05%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,03%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,89%.

Gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dapat diketahui menggunakan analisis tipologi klassen. Tipologi ini membagi wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapapatan per kapita daerah. Tipologi klassen dibagi dalam empat tipe wilayah. Tipe I adalah daerah makmur, tipe II daerah tertekan dalam proses membangun, tipe III daerah makmur yang sedang menurun (potensial tertekan), dan tipe IV daerah tertekan.

Analisis perekonomian berdasarkan analisis tipologi klassen Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa Kota Lubuklinggau termasuk wilayah tipe II pada tahun 2019 dan tipe IV pada tahun 2020 (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2021). Tipe II merupakan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Tipe IV menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan perekonomian di Kota Lubuklinggau tahun 2019-2020.

Dengan demikian, prioritas pembangunan wilayah Kota Lubuklinggau pada tahun 2023 antara lain diarahkan pada:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 6,60% melalui sektor unggulan.
2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 11,81% yang difokuskan pada ketenagakerjaan (penyediaan lapangan pekerjaan) dan penyediaan infrastruktur dasar (akses terhadap sanitasi, air bersih, listrik dan rumah tinggal yang layak).
3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,07%.
4) Peningkatan IPM menjadi 76,05%.
5) Peningkatan infrastruktur, meliputi akses air minum layak sebesar 96,10%, dan akses sanitasi layak sebesar 91,21%.
6) Peningkatan produktivitas pertanian dalam kedaulatan pangan.
7) Pengembangan destinasi wisata.
8) Pengembangan Kawasan Industri Lubuklinggau.
9) Percepatan Pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau-Curup Bengkulu.
10) Pengembangan Pusat Pendidikan Perkotaan dan Kesehatan.

Gambar 5. 20
Peta Arahan Strategis Pembangunan Kota Lubuk Linggau

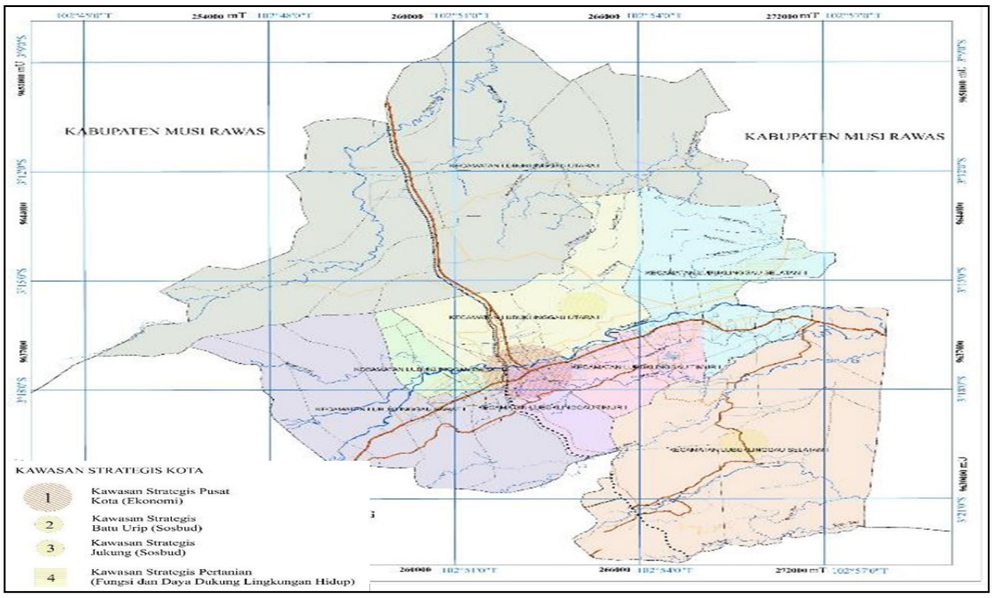

Sumber: Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Lubuklinggau, 2012

- **Analisis Ketimpangan Wilayah**

Dalam proses pembangunan suatu daerah, ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti akan timbul. Dalam mengatasi permasalahan ketimpangan daerah, perlu dilakukan pemetaan daerah berdasarkan karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dengan menggunakan analisis tipologi Klassen pendekatan sektoral/daerah. Pemetaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu kabupaten/kota.

Gambar 5. 21
Tipologi Klassen Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Laju Pertumbuhan			
Pendapatan Per Kapita		Tinggi	Rendah
	Tinggi	Kuadran I	Kuadran II
		Kab.Muara Enim, Kota Palembang	Kab. Musi Banyuasin
		Kuadran III	Kuadran IV
	Rendah	Kab. Musi Rawas, Kab. Panukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau	Kab.Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Lahat, Kab. Banyuasin, Kab. OKU Selatan, Kab. OKU Timur, Kab. Ogan Ilir, Kab. Empat Lawang, Kab. Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Berdasarkan data di atas, kabupaten/kota yang termasuk dalam klasifikasi kuadran I terdapat 1 Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang. Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran I merupakan daerah yang dikategorikan maju baik dari segi pembangunan dan kecepatan pertumbuhan. Selanjutnya, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam klasifikasi kuadran II. Daerah ini merupakan daerah yang maju namun mengalami pertumbuhan yang relatif rendah.

Selanjutnya, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuklinggau termasuk dalam kuadran III. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi namun pendapatannya masih di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran IV adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah serta ketimpangan pembangunan yang tinggi sehingga membuat perekonomian relatif tertinggal. Struktur perekonomian pada kabupaten/kota di kuadran IV sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selanjutnya, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting juga untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan secara nasional. Melalui analisis indeks ketimpangan Williamson, dapat memberikan gambaran tentang kondisi perkembangan pembangunan daerah dan disparitas pendapat yang dilihat dari PDRB per kapita antar kabupaten/kota.

Tabel 5. 19
Indeks Williamson Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks William (W)
2016	0,7051
2017	0,7091
2018	0,7157
2019	0,7197
2020	0,7167
Rata-rata	**0,7133**

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Keterangan:
a. Bila IW, < 0,3 maka ketimpangan ekonomi wilayah rendah
b. Bila IW, antara 0,3 - 0,5 maka ketimpangan ekonomi wilayah sedang
c. Bila IW, > 0,5 maka ketimpangan ekonowi wilayah tinggi

Indeks ketimpangan Williamson selama periode 2016-2020 di Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,7133. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan relatif tidak merata dan mengalami ketimpangan/disparitas

yang tinggi. Namun tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota sedikit menurun pada tahun 2020. Ketimpangan pendapatan juga terlihat dari data nominal rata-rata gaji/upah per bulan tahun 2020 yang diterima antar kabupaten/kota, khususnya di sektor pertanian, kehutanan. Rata-rata gaji/upah per bulan terendah untuk sektor informal adalah sebesar Rp833.495,12 di Kota Lubuklinggau dan tertinggi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp1.494.118,85. Selanjutnya di sektor formal, rata-rata gaji/upah per bulan terendah adalah sebesar Rp855.292,20 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan tertinggi sebesar Rp2.480.142,12 di Kota Palembang.

Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan menjaga konsistensi program yang tertuang dalam RTRW, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (Sitarung), dengan demikian diharapkan pembangunan akan lebih terarah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Sitarung atau Sistem Informasi Penataan Ruang dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem manajemen penataan ruang dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis website. Sitarung merupakan media analisis bagi penentuan arah perencanaan tata ruang berkelanjutan yang meliputi perencanan, pemanfaatan, dan pengendalian untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis provinsi. Selain itu, bermanfaat juga dalam memberikan arahan bagi penyusun indikasi program utama dalam RTRW provinsi dan sebagai arahan dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Sitarung bertujuan menghimpun seluruh data digital dokumen penting perencanaan berupa perda buku, album peta dan data-data spasial rencana tata ruang wilayah provinsi, serta peta-peta tematik pendukung analisis tata ruang dan peta-peta izin pemanfaatan ruang terkini.

Sitarung mampu melakukan fungsi analisis data dan pelaporan yang interaktif. Selain itu, dapat pula dilakukan overlay langsung dalam sistem sehingga dapat menghasilkan analisis dan proses penyelerasan kesesuaian dengan RTRW dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Berikut mekanisme dari sitarung.

Gambar 5. 22
Mekanisme Sistam Informasi Penataan Ruang (SITARUNG)

Sumber: sitarung.sumselprov.go.id

Adapun tampilan yang lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut.

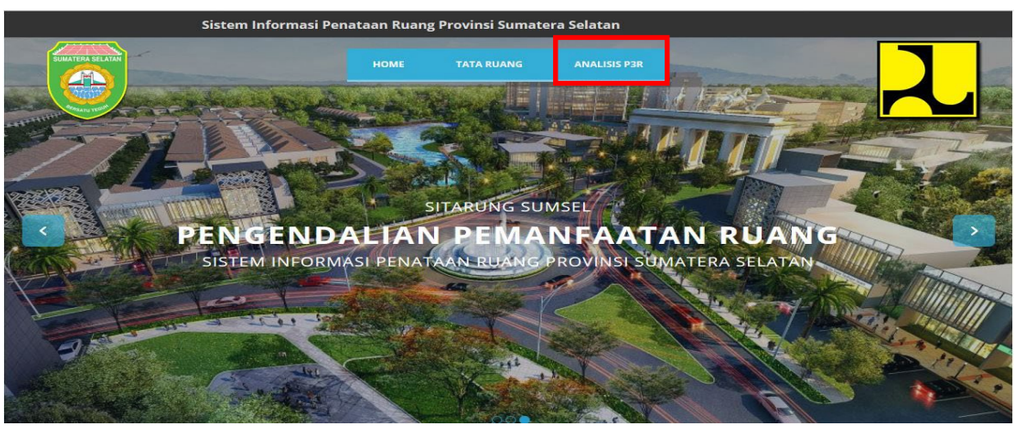

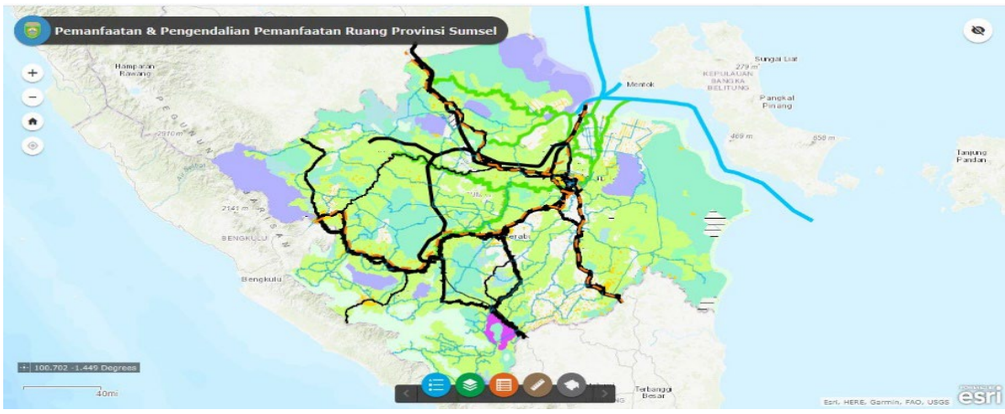
Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumsel
Esri, HERE, Garmin, FAO, USGS

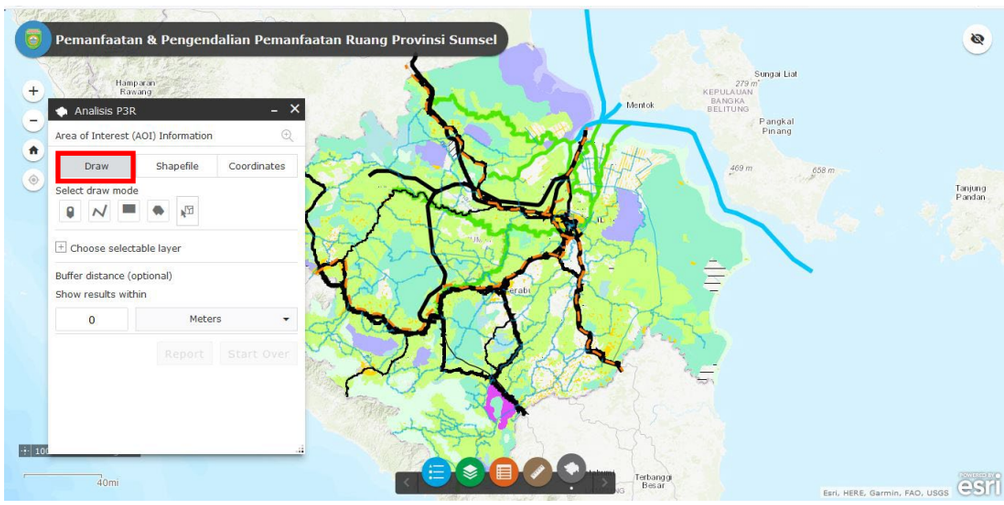
Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumsel
Analisis P3R
Area of Interest (AOI) Information
Draw
Shapefile
Coordinates
Select draw mode
Choose selectable layer
Buffer distance (optional)
Show results within
0
Meters
Report
Start Over
Esri, HERE, Garmin, FAO, USGS

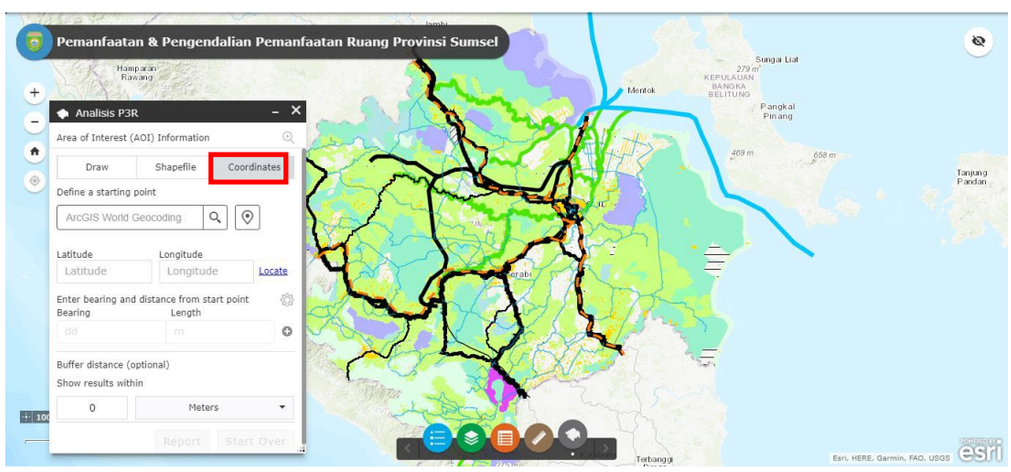
Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumsel
Analisis P3R
Area of Interest (AOI) Information
Draw
Shapefile
Coordinates
Define a starting point
ArcGIS World Geocoding
Latitude
Longitude
Locate
Enter bearing and distance from start point
Bearing
Length
Buffer distance (optional)
Show results within
0
Meters
Report
Start Over
Esri, HERE, Garmin, FAO, USGS

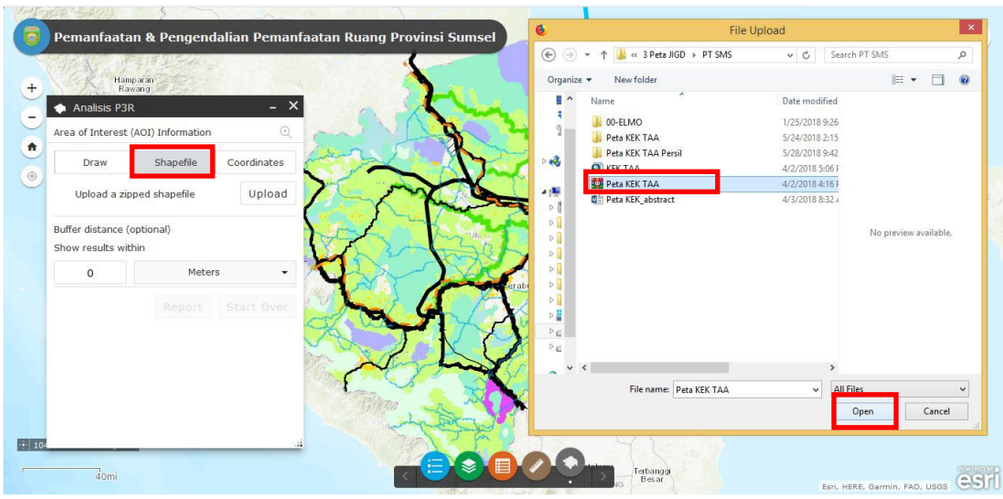
Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumsel
Analisis P3R
Area of Interest (AOI) Information
Draw
Shapefile
Coordinates
Upload a zipped shapefile
Upload
Buffer distance (optional)
Show results within
0
Meters
Report
Start Over
File Upload
Organize
New folder
Name
Date modified
00-ELMO
Peta KEK TAA
Peta KEK TAA Persil
Peta KEK_abstract
No preview available.
File name: Peta KEK TAA
All Files
Open
Cancel

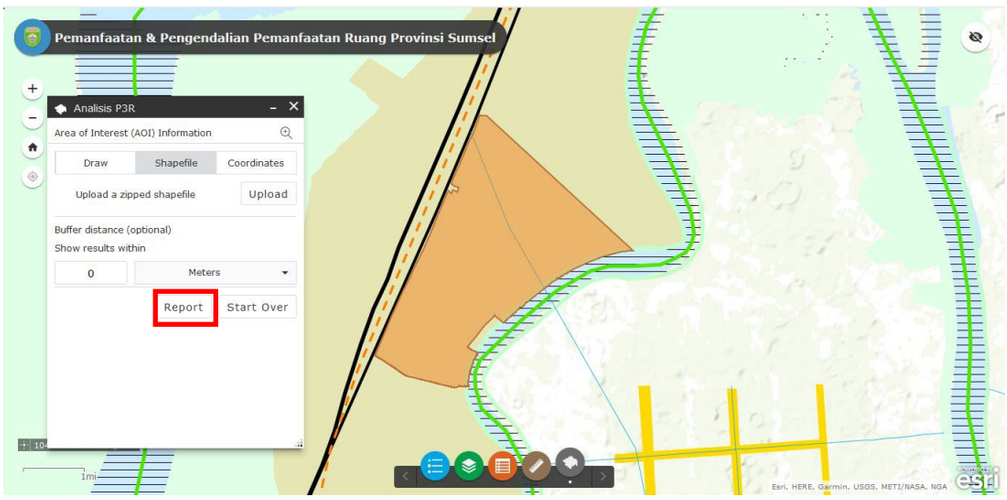
Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumsel
Analisis P3R
Area of Interest (AOI) Information
Draw
Shapefile
Coordinates
Upload a zipped shapefile
Upload
Buffer distance (optional)
Show results within
0
Meters
Report
Start Over

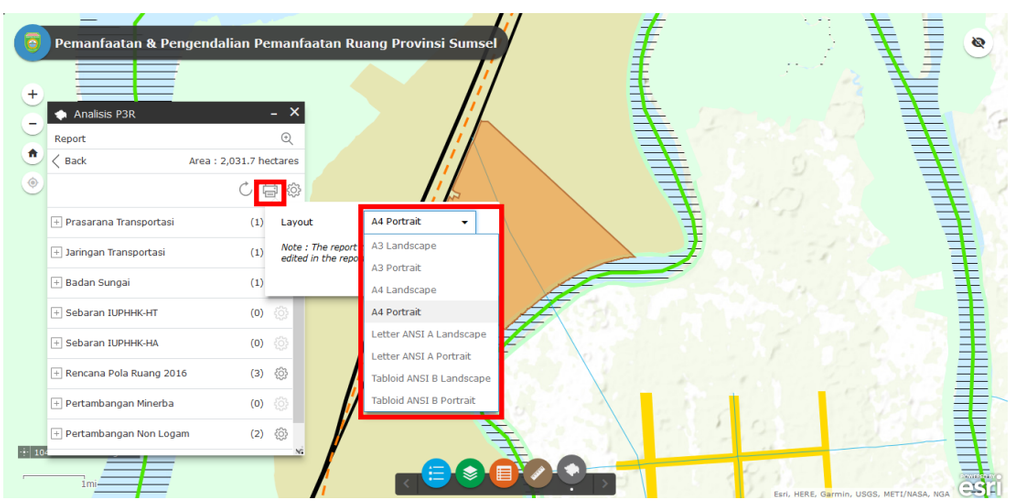
Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumsel
Analisis P3R
Report
Back
Area : 2,031.7 hectares
Prasarana Transportasi (1)
Jaringan Transportasi (1)
Badan Sungai (1)
Sebaran IUPHHK-HT (0)
Sebaran IUPHHK-HA (0)
Rencana Pola Ruang 2016 (3)
Pertambangan Minerba (0)
Pertambangan Non Logam (2)
Layout
A4 Portrait
A3 Landscape
A3 Portrait
A4 Landscape
A4 Portrait
Letter ANSI A Landscape
Letter ANSI A Portrait
Tabloid ANSI B Landscape
Tabloid ANSI B Portrait

Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Area of Interest (AOI) Information

Area : 2,091.7 hectares

May 28 2019 13:6:43 Indochina Time

Enter comments here

Summary

Name	Count	Area(hectares)	Length(km)
Prasarana Transportasi	1	N/A	N/A
Jaringan Transportasi	1	N/A	4.33
Badan Sungai	1	3.33	N/A
Sebaran LP/HK/HCV/T	0	0	N/A
Sebaran LP/HK/HCV/L	0	0	N/A
Rencana Pola Ruang 2019	3	2,091.70	N/A
Pertambangan Minerba	0	0	N/A
Pertambangan Non Legam	0	183.34	N/A
Penutupan Lahan Tahun 2017	0	2,091.60	N/A

Prasarana Transportasi

#	Prasarana Transportasi	Count
1	Terminal Khusus	1

Jaringan Transportasi

#	Jaringan Transportasi	Length(km)
1	Jalan Kolektor 2	4.33

Badan Sungai

#	Nama Sungai	Area(hectares)
1	S. Telang	3.33

Rencana Pola Ruang 2019

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Tema Pembangunan RKPD Tahun 2023 yaitu **"Sumsel Maju Untuk Semua"** yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang
4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah.

Berdasarkan tema dan Prioritas daerah tersebut, disusun program/kegiatan masing-masing perangkat daerah untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, dengan rekapitulasi per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.633.609.368.755
2	Dinas Kesehatan	214.772.866.200
	RSUD Siti Fatimah	379.371.319.331
	RS Mata	51.434.918.000
	RS Gigi dan Mulut	30.000.000.000
	RS Paru Paru	21.571.177.130
3	RS. Dr. Ernaldi Bahar	86.893.747.000
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	99.021.845.000
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	700.351.990.673
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	159.763.281.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	42.517.856.000
8	Dinas Sosial	43.682.646.000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.171.175.096
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.023.634.000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.035.750.000
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	39.906.000.000
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	42.488.728.305
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.129.228.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.443.042.000
16	Dinas Perhubungan	44.291.822.617

No	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.302.312.420
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.446.997.800
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.675.932.540
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	76.149.039.400
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	47.965.288.100
22	Dinas Perpustakaan	20.828.179.002
23	Dinas Kearsipan	14.314.353.900
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.199.704.300
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	125.112.941.825
26	Dinas Perkebunan	25.057.118.882
27	Dinas Kehutanan	57.578.578.978
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	29.485.714.497
29	Dinas Perdagangan	17.787.492.600
30	Dinas Perindustrian	16.609.016.900
31	Sekretariat Daerah	347.996.152.000
A	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6.331.325.000
B	Biro Hukum dan HAM	4.290.000.000
C	Biro Kesejahteraan Rakyat	21.494.270.000
D	Biro Perekonomian	4.325.000.000
E	Biro Administrasi Pembangunan	2.166.490.000
F	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.790.000.000
G	Biro Organisasi	2.518.000.000
H	Biro Umum dan Perlengkapan	253.118.009.000
I	Biro Humas dan Protokol	44.963.058.000
32	Sekretariat DPRD	373.488.974.600
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.673.154.000
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.662.518.171.652
35	Badan Pendapatan Daerah	265.359.432.102
36	Badan Kepegawaian Daerah	23.776.542.914
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	41.008.951.000
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.336.898.800
39	Badan Penghubung	14.937.260.000
40	Inspektorat	35.121.225.728
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.367.804.693
	Jumlah	**10.129.577.633.012**

Secara rinci, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Satuan, Pagu Indikatif dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dapat dilihat sebagaimana pada lampiran Tabel 6.2.

Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**2,633,609,368,755**							**3,226,155,001,100**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**1,800,393,925,155**						100 %	**2,195,492,296,900**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkata Daerah	%		%	100 %	**1,190,000,000**						100 %	**2,149,250,000**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	4 Dokumen	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	620,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	5 Laporan	1,176,750,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	420,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	2 Laporan	722,500,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Laporan Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**1,776,948,925,155**						1 Laporan	**2,142,516,446,900**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9800 Orang/ Bulan	1,469,493,209,155	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Pendidikan, PNS, ASN dan Non PNS	9800 Orang/ Bulan	1,802,067,571,500	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pelaksanaan tutor SKJ Jumlah penerima Gaji Honorer DINAS, Gaji TKPD dan Outshercing Jumlah penerima Gaji honorer pada sekolah SLB Jumlah penerima Gaji honorer pada sekolah SMA/SMK				4 Dokumen 44 Kali 64 orang 300 orang 574 orang	18,299,122,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Pendidikan, PNS, ASN dan Non PNS	4 Dokumen 44 Kali 64 orang 300 orang 574 orang	22,029,122,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pembayaran penerima kualifikasi guru Jumlah penerima Pembayaran BOS swasta Jumlah sekolah swasta penerima Pembayaran PSG				439 orang 491 Sekolah 717 Sekolah	288,291,594,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOS Reguler		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Pendidikan, PNS, ASN dan Non PNS	439 orang 491 Sekolah 717 Sekolah	317,614,753,400	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan, PNS, ASN dan Non PNS	2 Laporan	135,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	315,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Pendidikan, PNS, ASN dan Non PNS	0 Laporan	225,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	350,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan, PNS, ASN dan Non PNS	1 Dokumen	445,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersedianya laporan pengelolaan Aset pada Dinas Pendidikan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**600,000,000**						1 Laporan	**1,005,300,000**	
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	1 Dokumen	225,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	1 Laporan	265,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan rekonsiliasi aset				0 Laporan 1 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	0 Laporan 1 Laporan	235,500,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	1 Dokumen	279,800,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Tersusunya Laporan Pendapatan Pada Dinas Pendidikan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**50,000,000**						1 Laporan	**35,000,000**	
1	01	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	0 Laporan	35,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Prosentase Capaian Angka Partisipasi Kasar	%		%	89.12 %	**13,810,000,000**						89.12 %	**38,526,300,000**	
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan 1. Jumlah Guru mengikuti Uji Kompetensi 2. Jumlah siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek penilaian angka kredit Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek SAKIP Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan Pelatihan penyusunan tata naskah dinas Jumlah Guru Penggerak yang mendapatkan pelatihan Jumlah guru SMA, SMK dan SLB yang mengikuti PPG Jumlah guru SMK yang dilatih untuk menjadi kepala bengkel Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis IT Jumlah Guru yang mengikuti Pengembangan dan				10 orang 30 orang 3 Orang 50 orang 3 Orang 50 orang 500 orang 100 orang 20 orang 100 orang 100 orang 2 Lembaga 0 Orang 9365 orang 200 Orang 340 orang	13,810,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	PNS, ASN dan Non ASN	10 orang 30 orang 3 Orang 50 orang 3 Orang 50 orang 500 orang 100 orang 20 orang 100 orang 100 orang 2 Lembaga 0 Orang 9365 orang 200 Orang 340 orang	38,526,300,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Pemanfaatan TIK Pendidikan Jumlah lembaga LSP yang dibentuk Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan bantuan khusus Jumlah PTK SMA, SMK dan SLB yang mengikuti seleksi pemilihan PTK berprestasi tk. Nasional Meningkatnya jumlah asesor di Sumsel														
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**1,335,000,000**						100 %	**1,620,000,000**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket 0 Paket	175,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas dan UPTD	50 Paket 0 Paket	325,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	525,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas dan UPTD	3 Paket	600,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas dan UPTD	0 Paket	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Dinas dan UPTD		95,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rakor dan konsultasi dalam/luar daerah				0 Laporan 210 OK	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas dan UPTD	0 Laporan 210 OK	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	%		%	100 %	**650,000,000**						100 %	**900,000,000**	
1	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan praktik tekhnik perbengkelan yang tersedia dalam kondisi baik Jumlah Perlengkapan Kantor Balai Tekkom yang diadakan Jumlah Perlengkapan Kantor Dinas diadakan Jumlah Perlengkapan Kantor Graha teknologi yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 0 Unit	650,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas dan UPTD	4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 0 Unit	650,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	%		%	100 %	**2,920,000,000**						100 %	**2,800,000,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	70,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	2,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	4 Laporan	2,450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				200 unit 1 Laporan	450,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas, UPTD dan Lembaga Pendidikan	200 unit 1 Laporan	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	%		%	100 %	**2,590,000,000**						100 %	**5,540,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 unit 0 Unit	715,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas dan UPTD	15 unit 0 Unit	725,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1,875,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Dinas dan UPTD	3 Unit	4,815,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	%		%	100 %	**300,000,000**						100 %	**400,000,000**	
1	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi dan penyebaran informasi keg disdik prov sumsel Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				140 Kali 0 Laporan	300,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas dan UPTD	140 Kali 0 Laporan	400,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Menigkatnya Indeks Pembangunan Manusia Meningkatnya Persentase SPM Pendidikan Menurunnya jumlah orang miskin	% % Siswa		% % Siswa	70.24 % 100 % 300 Siswa	**832,615,443,600**						70.24 % 100 % 300 Siswa	**1,029,287,704,200**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan pendidikan SMA Sumsel Persentase SPM Pendidikan	Tahun %		Tahun %	8.79 Tahun 100 %	**429,535,309,000**						8.79 Tahun 100 %	**560,040,457,600**	
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Unit	9,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah rg Kelas SMA yg dibangun (APBD) Jumlah rg Kelas SMA yg dibangun (DAK) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang 10 Ruang 0 Ruang	5,620,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6 Ruang 10 Ruang 0 Ruang	8,860,125,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan ruang guru/ Kepala sekolah/tu (APBD)				0 Ruang 2 Ruang	1,600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Ruang 2 Ruang	3,200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan ruang laboratorium IPA				0 Ruang 5 rUANG	3,805,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Ruang 5 rUANG	5,122,553,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	2,043,512,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5 Ruang	2,043,512,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan asrama (DAK)				0 Unit 7 Sekolah	7,724,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Unit 7 Sekolah	8,496,708,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	17,031,062,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Unit	20,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah sekolah yang mendapat Rehabilitasi ruang kelas sekolah (APBD) Jumlah sekolah yang mendapat Rehabilitasi ruang kelas sekolah (DAK)				0 Ruang 12 Ruang 32 Ruang	2,970,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Ruang 12 Ruang 32 Ruang	9,000,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah sekolah yang mendapat Rehabilitasi ruang sedang/berat guru/kepala sekolah/tu (APBD) Jumlah sekolah yang mendapat Rehabilitasi ruang sedang/berat guru/kepala sekolah/tu (DAK)				0 Ruang 1 Ruang 1 Sekolah 3 Sekolah	839,027,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Ruang 1 Ruang 1 Sekolah 3 Sekolah	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah sekolah yang mendapat Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium IPA (APBD) Jumlah sekolah yang mendapat Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium IPA (DAK)				0 Ruang 1 Sekolah 3 Sekolah	504,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Ruang 1 Sekolah 3 Sekolah	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						204,855,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		204,855,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah toilet, ruang guru dan ruang TU yang direhab (DAK)				3 Sekolah	326,438,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 Sekolah	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Meubiler SMA yg diadakan				0 Paket 1000 unit	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Paket 1000 unit	4,000,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah alat tulis siswa yang diadakan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah sekolah SMA yang mendapat bantuan raport Jumlah siswa SMA yang mendapat pakaian seragam sekolah Jumlah siswa SMA yang mendapat pakaian seragam sekolah				50 Siswa 0 Paket 80000 Siswa 13250 siswa 87372 Siswa	2,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50 Siswa 0 Paket 80000 Siswa 13250 siswa 87372 Siswa	2,100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				201234 Peserta didik	116,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	201234 Peserta didik	123,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumalh siswa yang mengikuti lomba Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 siswa 0 Peserta Didik	1,075,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1000 siswa 0 Peserta Didik	2,150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	14,250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Satuan Pendidikan	15,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				350 Satuan Pendidikan	249,262,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	350 Satuan Pendidikan	327,000,829,100	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah laporan hasil transfer dana Bos SMA Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				3 Laporan 0 Orang	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Siswa, Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 Laporan 0 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Angka rata - rata lama sekolah	Tahun		Tahun	8.79 Tahun	**337,432,986,000**						8.79 Tahun	**404,374,615,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				12 Ruang 120 Ruang	35,400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12 Ruang 120 Ruang	40,640,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2,750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Ruang	5,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				0 Ruang	36,513,526,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium						5,031,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						2,920,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						3,096,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	6,074,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah ruang Kelas SMK yg dibangun				0 Ruang 12 Ruang 120 Ruang	3,710,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Ruang 12 Ruang 120 Ruang	58,100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	819,000,000				Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa						1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium						504,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1,038,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1,038,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	875,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Paket	1,750,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	1,905,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Paket	4,496,875,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	3,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Paket	4,486,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				192527 Peserta didik	104,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	192527 Peserta didik	109,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				401 Paket	1,303,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	401 Paket	2,606,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba Sciense, Seni dan Olahraga yang dipertandingkan tingkat SMK Jumlah siswa SMK yang mengikuti festival seni dan budaya bagi pelajar SMK Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah siswa yang mengikuti lomba cerdas cermat SMK Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas dan inovasi siswa				4 Cabang 251 siswa 0 Peserta Didik 135 Siswa 1000 Siswa	2,600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4 Cabang 251 siswa 0 Peserta Didik 135 Siswa 1000 Siswa	1,521,500,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				340 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	340 Orang	315,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah sekolah yang dibina untuk penyusunan dokumen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)- Pihak 1 (				0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan	2,537,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan	2,975,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				115 Satuan Pendidikan	121,206,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	115 Satuan Pendidikan	162,696,240,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				0 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	%		%	70.24 %	**65,647,148,600**						70.24 %	**64,872,631,600**	
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah Jumlah Sekolah yang mendapat pembangunan ruang kelas sekolah Jumlah Sekolah yang mendapat pembangunan ruang kelas sekolah				0 Ruang 3 Sekolah 6 Sekolah	1,893,133,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa	0 Ruang 3 Sekolah 6 Sekolah	4,986,266,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah, Siswa	0 Unit	400,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah yang mendapat Rehabilitasi ruang kelas sekolah				0 Ruang 3 Sekolah	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa	0 Ruang 3 Sekolah	757,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				3 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa	3 Unit	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa	5 Paket	385,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				523 Peserta Didik	397,514,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa	523 Peserta Didik	397,514,600	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20000 Peserta Didik	43,550,045,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa	20000 Peserta Didik	39,107,795,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 170 Orang 300 Orang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa	0 Orang 170 Orang 300 Orang	1,017,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	11,075,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Sekolah, Siswa	1 Satuan Pendidikan	10,875,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah siswa SLB yang mendapat bantuan operasional sekolah				523 Siswa	6,646,456,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa	523 Siswa	6,646,456,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Sekolah, Siswa		150,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**400,000,000**							**600,000,000**	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**						**400,000,000**							**600,000,000**	
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				50 Orang	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		50 Orang	600,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase PTK minimal Berkualifikasi S-1	%		%	99,11 %	**200,000,000**						99,11 %	**575,000,000**	
1	**01**	**04**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	Jumlah pelaksanaan pendataan pendidik dan tenaga kependidikan menengah dan khusus	Orang		Orang	150 Orang	**200,000,000**						150 Orang	**575,000,000**	
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Laporan	225,000,000	Dinas Pendidikan
										TOTAL	**2,633,609,368,755**							**3,226,155,001,100**	

Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**214,772,866,200**							**232,779,112,950**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terlaksana	Dokumen Laporan %		Dokumen Laporan %	3 Dokumen 3 Laporan 100 %	**86,487,551,700**						3 Dokumen 3 Laporan 100 %	**100,454,703,450**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**50,000,000**	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	50,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 Laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Orang/Bulan Laporan %		Orang/Bulan Laporan %	758 Orang/Bulan 1 Laporan 100 %	**39,812,903,000**						758 Orang/Bulan 1 Laporan 100 %	**66,080,000,000**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				758 Orang/ Bulan	38,787,903,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	758 Orang/ Bulan	65,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	850,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Laporan	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya kegiatan administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 100 %	**150,000,000**						1 Dokumen 100 %	**172,500,000**	
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	172,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	Dokumen Paket Dokumen Orang %		Dokumen Paket Dokumen Orang %	5 Dokumen 2 Paket 4 Dokumen 325 Orang 100 %	**1,781,905,000**						5 Dokumen 2 Paket 4 Dokumen 325 Orang 100 %	**2,604,840,750**	
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	629,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	5 Dokumen	629,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				325 Orang	1,152,905,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	325 Orang	1,325,840,750	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya kegiatan administrasi Umum	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 100 %	**3,793,963,500**						1 Dokumen 100 %	**3,985,108,500**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	247,487,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	3 Paket	247,487,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Paket	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	960,621,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	5 Paket	960,621,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	362,055,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	4 Paket	380,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	25,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	2 Dokumen	27,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Laporan	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	498,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	520,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit %		Unit %	5 Unit 100 %	**9,141,663,600**						5 Unit 100 %	**8,338,309,600**	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	3,741,663,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Unit	2,128,309,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gudang Umum yang dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 buah 1 Unit	5,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 buah 1 Unit	6,210,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan %		Laporan %	8 Laporan 100 %	**13,674,532,600**						8 Laporan 100 %	**13,850,232,600**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	31,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	31,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2,941,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	3,116,920,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	10,702,312,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 Laporan	10,702,312,600	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah	Unit Unit %		Unit Unit %	5 Unit 3 Unit 100 %	**15,663,584,000**						5 Unit 3 Unit 100 %	**2,773,712,000**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	1,994,512,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Unit	2,094,512,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	13,406,122,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Unit	416,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	262,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Unit	262,950,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**2,419,000,000**						1 Unit Kerja	**2,600,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,419,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit Kerja	2,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu Maternal Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akbiat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi Persentase Stunting pada anak balita Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	475 Orang 110 Orang 90 % 100 % 100 % 100 % 95 % 100 % 20,5 - 22,5 % 0,108 %		0 Orang 0 Orang 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	495 Orang 118 Orang 85 % 90 % 100 % 100 % 93 % 100 % 22 - 24,5 % 0,106 %	**120,777,764,000**						495 Orang 118 Orang 85 % 90 % 100 % 100 % 93 % 100 % 22 - 24,5 % 0,106 %	**124,767,155,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	berkurangnya Jumlah Kematian Ibu Maternal Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	orang Dokumen Paket		orang Dokumen Paket	110 orang 10 Dokumen 3 Paket	**19,112,369,000**						110 orang 10 Dokumen 3 Paket	**7,744,712,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	1 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	1,227,225,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	10 Dokumen	774,712,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				3 Paket	16,285,144,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	3 Paket	6,870,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	berkurangnya Jumlah Kematian Ibu Maternal Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	orang Dokumen Dokumen Dokumen Unit		orang Dokumen Dokumen Dokumen Unit	110 orang 19 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit	**98,845,569,500**						110 orang 19 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit	**114,202,617,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				8467432000 Orang	876,343,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	8467432000 Orang	876,343,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8467432000 Orang	403,610,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	8467432000 Orang	403,610,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				3 Dokumen	669,937,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	3 Dokumen	669,937,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	142,871,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	142,871,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				0 Dokumen	145,627,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	0 Dokumen	145,627,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	12,882,448,380		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	3 Dokumen	15,764,533,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	3,016,464,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	5 Dokumen	516,464,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	1,062,639,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	8 Dokumen	2,124,558,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	265,940,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	238,333,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				19 Dokumen	2,817,898,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	19 Dokumen	3,107,398,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				3 Dokumen	180,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	3 Dokumen	332,030,300	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				4 Dokumen	452,707,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	4 Dokumen	572,707,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				5 Dokumen	2,069,222,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	5 Dokumen	5,275,379,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				5 Dokumen	70,342,426,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	5 Dokumen	80,342,426,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	392,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	6 Dokumen	392,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				2 Dokumen	472,115,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	2 Dokumen	472,115,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				2 Dokumen	452,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	2 Dokumen	452,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				6 Dokumen	547,319,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	6 Dokumen	547,319,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	595,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Unit	595,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				3 Dokumen	518,999,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	3 Dokumen	518,999,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	0 Keluarga	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Terlaksananya kegiatan sistem informasi kesehatan	Dokumen %		Dokumen %	3 Dokumen 100 %	**533,540,000**						3 Dokumen 100 %	**533,540,000**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				3 Dokumen	533,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	3 Dokumen	533,540,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Unit Unit		Unit Unit	65 Unit 65 Unit	**2,286,285,500**						65 Unit 65 Unit	**2,286,285,500**	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				0 Unit 65 Unit	328,665,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	0 Unit 65 Unit	328,665,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				65 Unit	1,181,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	65 Unit	1,181,820,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pembinaan Jumlah Kab / Kota yang mengikuti Lokakarya Persentase Laboratorium yang mengikuti Workshop Persentase Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi PPI di RS				0 Unit 10 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 0 Labkesda 100 persen	775,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	0 Unit 10 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 17 Kabupaten / Kota 0 Labkesda 100 persen	775,800,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	40 %		0 %	38,5 %	**1,255,262,000**						38,5 %	**1,204,966,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi Terlaksananya kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Orang %		Orang %	150 Orang 100 %	**248,000,000**						150 Orang 100 %	**248,000,000**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	0 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				150 Orang	128,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	150 Orang	128,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	**1,007,262,000**						100 %	**956,966,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/kota yang dilakukan penilaian kebutuhan pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan Jabfung Adminkes Jumlah peserta Pelatihan Training Officer Course Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				17 Kabupaten / Kota 30 Orang 30 Orang 0 Orang	557,262,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	17 Kabupaten / Kota 30 Orang 30 Orang 0 Orang	557,262,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	399,704,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki Izin Edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan	85 %		0 %	80 %	**348,054,500**						80 %	**448,054,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik Tersedianya Sarana Penyalur Alkes yang memenuhi Syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	**348,054,500**						2 Dokumen 2 Dokumen	**448,054,500**	
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik				2 Dokumen	348,054,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	2 Dokumen	448,054,500	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	80 %		0 %	75 %	**5,904,234,000**						75 %	**5,904,234,000**	
1	**02**	**05**	1.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Tersedianya posyandu aktif Purnama dan Mandiri	Dokumen %		Dokumen %	14 Dokumen 90 %	**5,089,234,000**						14 Dokumen 90 %	**5,089,234,000**	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				14 Dokumen	5,089,234,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	14 Dokumen	5,089,234,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	1.02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	Tersedianya Desa siaga aktif purnama dan mandiri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**815,000,000**						1 Dokumen	**815,000,000**	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	815,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	815,000,000	Dinas Kesehatan
										TOTAL	**214,772,866,200**							**232,779,112,950**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**51,434,918,000**							**56,578,409,800**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	persen		persen	100 persen	**50,364,972,000**						100 persen	**55,401,469,200**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	persen		persen	100 persen	**16,279,921,000**						100 persen	**17,907,913,100**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan 100 Persen	16,279,921,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Pegawai RS. Khusus Mata	0 Orang/ Bulan 100 Persen	17,907,913,100	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	persen		persen	100 persen	**3,751,732,000**						100 persen	**4,126,905,200**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	837,602,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	RS. Khusus Mata	5 Laporan	921,362,200	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Honorarium 12 org, jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 unit dan Jasa Tenaga Kerja yang terbayarkan 55 org				68 Laporan	2,914,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	RS. Khusus Mata	68 Laporan	3,205,543,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	persen		persen	100 persen	**333,319,000**						100 persen	**366,650,900**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				100 Persen	333,319,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kendaraan Dinas	100 Persen	366,650,900	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	persen		persen	100 persen	**30,000,000,000**						100 persen	**33,000,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	30,000,000,000		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Penerima Pelayanan	100 Persen	33,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Siswa		Siswa	2500 Siswa	**1,069,946,000**						2500 Siswa	**1,176,940,600**	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen		Dokumen	2500 Dokumen	**1,069,946,000**						2500 Dokumen	**1,176,940,600**	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				2500 Dokumen	1,069,946,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	2500 Dokumen	1,176,940,600	Dinas Kesehatan
										TOTAL	**51,434,918,000**							**56,578,409,800**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**21,571,177,130**							**23,727,294,843**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20,144,455,130**							**22,157,900,643**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**50,000,000**							**55,000,000**	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11,431,302,000**							**12,574,432,200**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	11,125,542,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang/ Bulan	12,238,096,200	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						305,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					336,336,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**600,000,000**							**660,000,000**	
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					550,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,070,500,000**							**1,177,550,000**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					49,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					137,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						195,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					215,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					550,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**214,286,130**							**235,714,743**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	214,286,130		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	235,714,743	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5,990,887,000**							**6,589,975,700**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						513,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					564,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5,467,887,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6,014,675,700	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**427,480,000**							**469,228,000**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						30,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33,440,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						212,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					232,288,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					93,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**360,000,000**							**396,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	360,000,000		Pendapatan dari BLUD		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		0 Unit Kerja	396,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1,426,722,000**							**1,569,394,200**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**1,278,222,000**							**1,406,044,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						195,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			214,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan						60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			66,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan						123,222,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			135,544,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			880,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**148,500,000**							**163,350,000**	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						148,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			163,350,000	Dinas Kesehatan
										TOTAL	**21,571,177,130**							**23,727,294,843**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**30,000,000,000**							**32,852,514,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**27,900,000,000**							**30,412,514,000**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,000,000**							**10,600,000**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		4 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Dokumen	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**14,557,086,000**							**15,236,000,000**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/ Bulan	14,350,086,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		126 Orang/ Bulan	15,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				4 dokumen	202,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		4 dokumen	230,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				4 laporan	4,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		4 laporan	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**1,957,914,000**							**1,957,914,000**	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				60 orang	1,957,914,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		60 orang	1,957,914,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**670,000,000**							**804,000,000**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Paket	120,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Paket	360,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Paket	240,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Laporan	84,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**350,000,000**							**420,000,000**	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Unit	420,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,175,000,000**							**4,584,000,000**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	925,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		4 Laporan	1,084,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		2 Laporan	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**180,000,000**							**200,000,000**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		10 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**6,000,000,000**							**7,200,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	6,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Unit Kerja	7,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2,100,000,000**							**2,440,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**2,100,000,000**							**2,440,000,000**	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Paket	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Paket	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Paket	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Paket	1,920,000,000	Dinas Kesehatan
										TOTAL	**30,000,000,000**							**32,852,514,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**379,371,319,331**							**427,605,080,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**145,942,167,000**							**159,625,080,000**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**175,000,000**							**200,000,000**	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**34,262,057,000**							**35,605,080,000**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				240 Orang/ Bulan	33,656,977,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		240 Orang/ Bulan	35,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang menerima Honorarium Pelaksana Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan				16 Orang	505,080,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		16 Orang	505,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jangka Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Bulan	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		12 Bulan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**6,850,000,000**							**8,200,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Rumah Sakit yang pegawainya mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				0 Paket 1 Rumah Sakit	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		0 Paket 1 Rumah Sakit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Rumah Sakit yang pegawainya mendapatkan pendidikan dan pelatihan				0 Orang 1 Rumah Sakit	6,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		0 Orang 1 Rumah Sakit	7,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Rumah Sakit yang Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang 1 Rumah Sakit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		0 Orang 1 Rumah Sakit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**6,500,000,000**							**7,020,000,000**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Paket	3,520,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Paket	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	1,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		40 Laporan	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**5,000,000,000**							**5,000,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang terpenuhi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang terpenuhi Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Rumah Sakit 3 Unit 0 Unit	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Rumah Sakit 3 Unit 0 Unit	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**54,805,110,000**							**60,000,000,000**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa rekening komunikasi, sumberdaya air, listrik dan internet RSUD Siti Fatimah				19 Rekening	8,500,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		19 Rekening	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga honorer dan tenaga PTT di RSUD SIti Fatimah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				691 Orang 0 Laporan	46,305,110,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		691 Orang 0 Laporan	50,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,350,000,000**							**3,600,000,000**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jangka Waktu Kendaraan Dinas dan Operasional yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan 0 Unit	1,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		12 Bulan 0 Unit	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jangka Waktu Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Peralatan Rumah Tangga yang di lakukan Pemeliharaan Rutin Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan 0 Unit	1,750,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		12 Bulan 0 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**35,000,000,000**							**40,000,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	35,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit Kerja	40,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**233,429,152,331**							**267,980,000,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**228,829,152,331**							**261,980,000,000**	
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung/bangunan RSUD Siti Fatimah yang diselesaikan pembangunannya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Rumah Sakit 0 Unit	47,686,129,331	Kota Palembang, Sukarami, Suka Rami			Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Rumah Sakit 0 Unit	100,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Rumah Sakit yang tersedia Alat-Alat kesehatannya				0 Unit 1 Rumah Sakit	126,343,023,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		0 Unit 1 Rumah Sakit	100,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung rumah sakit yang tersedia meubelair Jumlah gedung rumah sakit yang tersedia Peralatan rumah tangga Jumlah IT yang disediakan untuk rumah sakit				1 Gedung Rumah Sakit 1 Gedung Rumah Sakit 1 Rumah Sakit	15,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Gedung Rumah Sakit 1 Gedung Rumah Sakit 1 Rumah Sakit	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Rumah Sakit yang tersedia bahan habis pakai linen				1 Rumah Sakit	1,800,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Rumah Sakit	1,980,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mediknya Terpelihara Sesuai Standar				1 Rumah Sakit	10,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Rumah Sakit	15,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jangka waktu sarana fasilitas rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala				12 Bulan	8,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		12 Bulan	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jangka waktu obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia untuk rumah sakit				12 Bulan	20,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		12 Bulan	25,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**4,600,000,000**							**6,000,000,000**	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah jangka waktu makanan dan minuman yang disediakan untuk pasien Rumah Sakit				12 Bulan	4,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		12 Bulan	6,000,000,000	Dinas Kesehatan
										TOTAL	**379,371,319,331**							**427,605,080,000**	

RS. Dr. Ernaldi Bahar

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**60,993,747,000**							**128,490,683,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**54,689,393,000**						100 %	**56,665,683,000**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya transparasi pelayanan publik Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	**50,707,393,000**						100 % 100 %	**46,273,683,000**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				400 orang	48,603,417,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Pegawai ASN dan Non ASN di RS Ernaldi Bahar	400 orang	44,303,663,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 dokumen	2,103,976,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Pegawai ASN dan Non ASN di RS Ernaldi Bahar	12 dokumen	1,970,020,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**200,000,000**						100 %	**2,200,000,000**	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 paket	200,000,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pegawai RS Ernaldi Bahar	1 paket	1,000,000,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	**3,782,000,000**						100 %	**3,392,000,000**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 dokumen	2,832,000,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Pegawai dan Pengguna Layanan RS Ernaldi Bahar	12 dokumen	2,292,000,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	950,000,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pegawai dan Pengguna Layanan RS Ernaldi Bahar	12 Laporan	1,100,000,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	90 %	**6,304,354,000**						90 %	**71,825,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	90 %	**6,304,354,000**						90 %	**71,825,000,000**	
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit				8 unit	4,950,000,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pengguna Layanan RS Ernaldi Bahar	8 unit	7,800,000,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang tersedia				8 unit	483,954,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pengguna Layanan RS Ernaldi Bahar	8 unit	50,000,000,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang tersedia				6 unit	870,400,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Pengguna Layanan RS Ernaldi Bahar	6 unit	5,000,000,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**25,900,000,000**							**26,455,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**25,900,000,000**							**26,455,000,000**	
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**25,900,000,000**							**26,455,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				1 unit kerja	25,900,000,000	Kota Palembang, Alang-alang Lebar, Alang-Alang Lebar	Pendapatan dari BLUD		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		1 unit kerja	26,455,000,000	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
										TOTAL	**86,893,747,000**							**154,945,683,000**	

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**99,021,845,000**							**124,057,582,700**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**34,570,199,000**						100 %	**34,655,522,100**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**600,000,000**						100 persen	**660,000,000**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0		165,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0		275,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0		220,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	%		%	100 %	**19,707,214,000**						100 %	**18,645,936,100**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	14,534,294,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	110 Orang/ Bulan	12,955,724,100	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5,172,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0		5,690,212,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	**1,150,000,000**						100 %	**1,265,000,000**	
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		825,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		440,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**3,360,000,000**						100 %	**3,696,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		165,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		550,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	550,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		220,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		11,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		550,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Tahun	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Tahun	880,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Dokumen	770,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintahan daerah	%		%	100 %	**6,019,725,000**						100 %	**5,192,000,000**	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	2,200,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Luas Lahan yang dibebaskan				0 Unit 1.7 Ha	2,219,725,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit 1.7 Ha	1,122,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Jenis 0 Unit	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Jenis 0 Unit	1,100,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase peningkatan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah	persen		persen	100 persen	**1,369,600,000**						100 persen	**1,506,560,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		880,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						569,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		626,560,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**2,363,660,000**						100 %	**3,690,026,000**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	1,863,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	32 Unit	2,040,026,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		110,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 gedung	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 gedung	440,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaman Wilayah Sungai yang ditanggulangi Persentase luas irigasi yang baik	100 % 56,07 %		0 % 0 %	78,08 % 51,57 %	**64,451,646,000**						78,08 % 51,57 %	**89,402,060,600**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Irigasi yang Baik	persen		persen	100 persen	**39,791,646,000**						100 persen	**63,376,060,600**	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				6 Dokumen	1,720,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	6 Dokumen	1,936,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai				14 Dokumen	1,510,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	14 Dokumen	2,362,250,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				5 Titik	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	5 Titik	1,100,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				300 M	3,000,000,000	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	300 M	5,060,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	3,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Unit	4,400,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya						2,500,000,000					0		2,750,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan				2 Unit	18,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	2 Unit	27,500,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				8 KM	4,000,000,000	Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	8 KM	12,150,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi						3,661,646,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0		4,027,810,600	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0		110,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Lembaga	110,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara				42 KM	1,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	42 KM	1,870,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Irigasi yang Baik	persen		persen	56.07 persen	**24,660,000,000**						56.07 persen	**26,026,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				0 Dokumen	5,460,000,000					0	0 Dokumen	4,906,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				9 KM	9,000,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	9 KM	9,900,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				10 KM	2,000,000,000	Kab. Ogan Ilir, Muara Kuang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	10 KM	2,200,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						7,200,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0		7,920,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						800,000,000	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0		880,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan				1 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Unit	220,000,000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
										TOTAL	**99,021,845,000**							**124,057,582,700**	

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**700,351,990,673**							**0**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**86,354,250,673**						100 %	**0**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**905,000,000**						4 Dokumen	**0**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen yang disusun				0 Dokumen 3 Dokumen	530,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	0 Dokumen 3 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	4 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**43,651,070,000**						100 %	**0**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				261 Orang	36,439,110,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	261 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	6,441,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				51 Orang	654,360,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	51 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	36,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisasis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	17 dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan				17 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	17 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	**5,334,620,000**						7 Dokumen	**0**	
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan 0 Laporan	610,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Laporan 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1,075,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	2 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan (12 Bulam)	307,260,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Laporan (12 Bulam)	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	112,600,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	229,760,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan kepegawaian	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**1,455,000,000**						5 Dokumen	**0**	
1	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	95,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Tahun	1,110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	30 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi Perangkat Daerah	Layanan		Layanan	10 Layanan	**3,135,000,000**						10 Layanan	**0**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	300,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	515,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	180,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	500,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	7 Unit	**6,000,000,000**						7 Unit	**0**	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	5,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	4 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan jasa Pemerintah Daerah	Layanan		Layanan	3 Layanan	**5,056,400,000**						3 Layanan	**0**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				11 Laporan	1,600,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	11 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	3,441,400,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	5 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**20,817,160,673**						100 %	**0**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	2,090,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	75 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Bulan	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan	5,130,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	13,497,160,673	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	7 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Rasio Kemantapan Jalan Rasio Kemantapan Jalan	85 % %		0 % %	80 % 85 %	**607,897,740,000**						80 % 85 %	**0**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Panjang jalan yang ditangani (Km)	Km		Km	171.16 Km	**607,897,740,000**						171.16 Km	**0**	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				9 Dokumen	8,331,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	9 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				0 M^2	11,407,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	0 M^2	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				2 Dokumen	1,066,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	3,466,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				15.19 KM	153,677,960,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	15.19 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				0.4 KM	3,010,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	0.4 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				8 KM	50,009,760,000	Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	8 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				34.75 KM	109,334,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	34.75 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				64.02 KM	120,003,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	64.02 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				2113.75 KM	60,531,720,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	2113.75 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				275 M	29,057,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	275 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				51.5 M	24,080,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	51.5 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				350 M	11,020,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	350 M	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				83 Dokumen	22,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	83 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70 % %		0 % %	65 % 70 %	**6,100,000,000**						65 % 70 %	**0**	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Jumlah Dokumen RTR KSP yang diPERDA kan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**2,600,000,000**						3 Dokumen	**0**	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi				1 Dokumen	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Jumlah Dokumen RTR KSP yang diPERDA kan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**2,500,000,000**						2 Dokumen	**0**	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**1,000,000,000**						2 Dokumen	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
										TOTAL	**700,351,990,673**							**0**	

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**48,875,000,000**							**53,762,500,000**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Jumlah Dokumen Air Minum Regional yang tersusun Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten / kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten / kota Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Dokumen 1,5 % Persen 0 %		Dokumen 0 % Persen 0 %	3 Dokumen 1 % 1,5 Persen 0 %	**1,950,000,000**						3 Dokumen 1 % 1,5 Persen 0 %	**2,145,000,000**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**1,950,000,000**						2 Dokumen	**2,145,000,000**	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM				3 Dokumen	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	3 Dokumen	1,650,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM				13 Kab/Kota	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	13 Kab/Kota	495,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Jumlah Dokumen Pendukung Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional yang tersusun Persentase Pelayanan Persampahan Regional Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Dokumen 1 % 0 %		Dokumen 0 % 0 %	2 Dokumen 0 % 0 %	**400,000,000**						2 Dokumen 0 % 0 %	**440,000,000**	
1	**03**	**04**	1.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang tersedia	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**400,000,000**						2 Dokumen	**440,000,000**	
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	440,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Jumlah Dokumen Sanitasi Regional yang tersusun Persentase Rumah Tanggan dengan Akses Sanitasi Layak Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Ragional Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Dokumen 0 % 1,5 % Persen		Dokumen 0 % 0 % Persen	3 Dokumen 0 % 1 % 1,5 Persen	**300,000,000**						3 Dokumen 0 % 1 % 1,5 Persen	**330,000,000**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Jumlah Dokumen Sanitasi Regional yang tersusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**300,000,000**						3 Dokumen	**330,000,000**	
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	330,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Jumlah Dokumen Pendukung Pembangunan Infrastruktur Drainase Regional dan Daerah Strategis Provnisi yang tersusun Persentase Pelayanan Rumah Tanggan SIstem Drainase Regional dan Kawasan Strategis Provinsi	Dokumen 7 %		Dokumen 0 %	2 Dokumen 5 %	**4,500,000,000**						2 Dokumen 5 %	**4,950,000,000**	
1	**03**	**06**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten / Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**4,500,000,000**						2 Dokumen	**4,950,000,000**	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan				5 Unit	4,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	5 Unit	4,400,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang dilengkapi sarana dan prasarana Utilitas yang baik Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah memenuhi NSPK	20,00 Kawasan Persen		0 Kawasan Persen	18,00 Kawasan 77,74 Persen	**19,800,000,000**						18,00 Kawasan 77,74 Persen	**21,780,000,000**	
1	**03**	**08**	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah terselenggara	Gedung		Gedung	2 Gedung	**19,800,000,000**						2 Gedung	**21,780,000,000**	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				2 Dokumen	7,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	2 Dokumen	8,250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				0 Unit 3 Gedung	12,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Unit 3 Gedung	13,200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	330,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang dilengkapi sarana dan prasarana Utilitas yang baik Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Utilitas yang Baik	20,00 Kawasan Kawasan		0 Kawasan Kawasan	18,00 Kawasan 20 Kawasan	**17,200,000,000**						18,00 Kawasan 20 Kawasan	**18,920,000,000**	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota yang terselenggara	Kawasan		Kawasan	20 Kawasan	**17,200,000,000**						20 Kawasan	**18,920,000,000**	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				5 Kawasan	13,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	5 Kawasan	14,300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota				0 Dokumen	3,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Dokumen	3,520,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Jumlah SDM Jasa Konstruksi Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikasi Pelatihan Ahli Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0 Orang Persen 180 Orang		0 Orang Persen 0 Orang	0 Orang 0,45 Persen 175 Orang	**4,725,000,000**						0 Orang 0,45 Persen 175 Orang	**5,197,500,000**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat	Orang		Orang	110 Orang	**2,700,000,000**						110 Orang	**2,970,000,000**	
1	03	11	1.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat		220,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				0 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Orang	220,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat		220,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat		1,045,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat		110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi				0 Orang	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Orang	440,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				0 Orang	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Orang	550,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				0 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Dokumen	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Persentase Data Cakupan Provinsi yang diupdate melalui sistem informasi jasa konstruksi	Persen		Persen	70 Persen	**1,125,000,000**						70 Persen	**1,237,500,000**	
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat		220,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat		110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI				0 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Orang	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Infromasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU				0 Dokumen	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Dokumen	357,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				0 Dokumen	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Dokumen	440,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**03**	**11**	1.03		**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	Persentase Kebijakan Jasa Konstruksi yang di implementasikan	Persen		Persen	75 Persen	**900,000,000**						75 Persen	**990,000,000**	
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan				0 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Dokumen	385,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi				0 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Laporan	220,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	11	1.03	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota				0 Laporan	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Laporan	385,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**110,888,281,000**							**121,977,109,100**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen 100 %		Persen 0 %	95 Persen 100 %	**28,688,281,000**						95 Persen 100 %	**31,557,109,100**	
1	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**900,000,000**						100 Persen	**990,000,000**	
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		SKPD Terkait	2 Dokumen	308,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Dokumen	16,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		16,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		16,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		16,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	3 Dokumen	154,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	420,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	2 Laporan	462,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun	Persen		Persen	100 Persen	**18,452,046,000**						100 Persen	**20,297,250,600**	
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/ Bulan	17,959,086,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	118 Orang/ Bulan	19,754,994,600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	402,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Dokumen	443,256,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Laporan	33,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Laporan	22,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	Persen		Persen	100 Persen	**300,000,000**						100 Persen	**330,000,000**	
1	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		66,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		22,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	6 Orang	242,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persen		Persen	100 Persen	**3,351,415,000**						100 Persen	**3,686,556,500**	
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		27,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		275,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	199,415,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Paket	219,356,500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		60,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		27,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	975,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Laporan	1,072,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1,822,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Dokumen	2,004,200,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Penunjang Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen		Persen	100 Persen	**1,250,000,000**						100 Persen	**1,375,000,000**	
1	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		1,100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit Sarpras Gedung	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	2 Unit Sarpras Gedung	275,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen		Persen	100 Persen	**3,894,820,000**						100 Persen	**4,284,302,000**	
1	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		19,800,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	0 Laporan	660,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		66,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,216,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	1 Laporan	3,538,502,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	**540,000,000**						100 Persen	**594,000,000**	
1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	515,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait	17 Unit	566,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	SKPD Terkait		27,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	80 % Persen 80 % Persen		0 % Persen 0 % Persen	50 % 80 Persen 50 % 80 Persen	**2,600,000,000**						50 % 80 Persen 50 % 80 Persen	**2,860,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**02**	1.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**500,000,000**						6 Dokumen	**550,000,000**	
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**	1.02		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah Laporan Sosialisasi yang Tersusun	Laporan		Laporan	6 Laporan	**850,000,000**						6 Laporan	**935,000,000**	
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				30 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	30 Orang	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan				30 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	30 Orang	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP				30 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	30 Orang	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				30 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	30 Orang	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun / Terehabilitasi	Unit		Unit	8 Unit	**1,150,000,000**						8 Unit	**1,265,000,000**	
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat		440,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat		110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)				0 Ha	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	0 Ha	220,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				6 Unit Rumah	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	6 Unit Rumah	220,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun				6 Unit Rumah	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	6 Unit Rumah	220,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				6 Unit Rumah	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	6 Unit Rumah	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**	1.04		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**100,000,000**						2 Dokumen	**110,000,000**	
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	0 % Persen		0 % Persen	8,5 % 11 Persen	**16,600,000,000**						8,5 % 11 Persen	**18,260,000,000**	
1	**04**	**03**	1.01		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Jumlah Dokumen/Laporan Penataan Kawasan Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**1,950,000,000**						5 Dokumen	**2,145,000,000**	
1	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.01	04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				4 Dokumen	1,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	4 Dokumen	1,210,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 Laporan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	2 Laporan	495,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**03**	1.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha yang ditingkatkan	Kawasan		Kawasan	8 Kawasan	**14,650,000,000**						8 Kawasan	**16,115,000,000**	
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	330,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				118 Unit Rumah	2,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	118 Unit Rumah	2,640,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.02	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar				1448 Ha	11,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1448 Ha	12,760,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase satuan permukiman yang sudah dilengkapi PSU Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	31 % Persen		0 % Persen	29 % 31 Persen	**62,000,000,000**						29 % 31 Persen	**68,200,000,000**	
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang terselenggara	Lokasi		Lokasi	5 Lokasi	**62,000,000,000**						5 Lokasi	**68,200,000,000**	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				17 Lokasi	61,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	17 Lokasi	67,100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	330,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah di wilayah provinsi yang tersertifikasi Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi	6,67 % Persen		0 % Persen	3,33 % 2 Persen	**1,000,000,000**						3,33 % 2 Persen	**1,100,000,000**	
1	**04**	**06**	1.01		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**	Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Laporan		Laporan	3 Laporan	**1,000,000,000**						3 Laporan	**1,100,000,000**	
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah				5 Laporan	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	5 Laporan	1,100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
										TOTAL	**159,763,281,000**							**175,739,609,100**	

Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**42,517,856,000**							**49,434,240,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**37,989,127,500**						100 %	**40,249,240,000**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun	persen		persen	100 persen	**215,000,000**						100 persen	**291,250,000**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Satpol PP	3 Dokumen	91,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Satpol PP	3 Laporan	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Satpol PP	1 Laporan	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	persen		persen	100 persen	**33,746,059,000**						100 persen	**35,065,990,000**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 orang/bulan	28,684,269,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	170 orang/bulan	30,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4,781,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Dokumen	4,781,790,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	95,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Dokumen	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	89,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Dokumen	89,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	95,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Dokumen	95,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	persen		persen	100 persen	**388,558,500**						100 persen	**365,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	84,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Paket	140,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				56 orang	304,158,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	56 orang	225,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	persen		persen	100 persen	**1,502,750,000**						100 persen	**1,749,000,000**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Paket	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	159,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	2 Paket	159,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	141,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Satpol PP	2 Paket	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Paket	90,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Laporan	70,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	998,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Laporan	1,200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	**280,000,000**						100 persen	**810,000,000**	
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 unit	700,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**514,760,000**						100 persen	**518,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Laporan	8,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Laporan	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	257,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 Laporan	260,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**1,342,000,000**						100 persen	**1,450,000,000**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 jenis	790,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	5 jenis	790,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 jenis	405,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	5 jenis	450,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 jenis	67,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	5 jenis	90,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	1 unit	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Satlinmas yang aktif	100 % 97 %		0 % 0 %	100 % 96 %	**3,913,728,500**						100 % 96 %	**3,955,000,000**	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	persen		persen	100 persen	**3,103,000,000**						100 persen	**2,600,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				200 Kasus	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	200 Kasus	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				11 Kasus	1,050,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	11 Kasus	1,100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen Aset	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Dokumen Aset	700,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	303,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				125 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	125 Orang	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	persen		persen	100 persen	**539,728,500**						100 persen	**905,000,000**	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	264,728,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	4 Laporan	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Laporan	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Laporan	480,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota	**271,000,000**						17 Kabupaten/Kota	**450,000,000**	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Satpol PP	1 Laporan	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah AktiJumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Akti				0 Dokumen 1 Dokumen	121,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satpol PP	0 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pendampingan Pelayanan Pemadam dan Penyelematan Kebakaran	50 %		0 %	25 %	**615,000,000**						25 %	**5,230,000,000**	
1	**05**	**04**	1.01		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran yang terselenggara	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota	**615,000,000**						17 Kabupaten/Kota	**4,150,000,000**	
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				1 dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 dokumen	160,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Laporan	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Laporan	310,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Dokumen	760,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				8 jenis	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	8 jenis	2,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
										TOTAL	**42,517,856,000**							**49,434,240,000**	

Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**43,682,646,000**							**66,317,439,800**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**25,278,786,000**						100 %	**32,388,739,800**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi perangkat daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	**289,723,000**						2 Laporan	**455,000,000**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangka daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Kab/Kota	3 Dokumen 0 Dokumen	260,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	139,723,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Kab/Kota	2 Laporan	195,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN dan Tenaga honorer yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang		Orang	160 Orang	**21,163,063,000**						160 Orang	**24,226,989,800**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/ Bulan	19,033,063,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Tenaga Honorer	145 Orang/ Bulan	21,431,989,800	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Tenaga Honorer	12 Dokumen	2,405,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Tenaga Honorer	0 Dokumen	325,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Tenaga Honorer	0 Dokumen	65,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalaian BMD	Laporan		Laporan	1 Laporan	**30,000,000**						1 Laporan	**39,000,000**	
1	06	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan 1 Laporan	30,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pengelola BMD	0 Laporan 1 Laporan	39,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan penunjang admisistrasi kepegawaian	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	**130,000,000**						6 Kegiatan	**702,000,000**	
1	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Honorer di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	20 Orang	260,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	ASN dan Honorer di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	200 Orang	39,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan kegiatan penunjang administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	10 Laporan	**1,321,000,000**						10 Laporan	**2,250,000,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						36,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor		46,800,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor	1 Paket	260,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor	1 Paket	260,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor	3 Paket	130,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor	12 Paket	117,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor	12 Dokumen	46,800,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor		157,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				48 Laporan	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor	48 Laporan	62,400,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor	1 Laporan	910,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perlengkapan dan Sarana Prasaranan Kantor	0 Dokumen	260,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1,200,000,000**							**1,885,000,000**	
1	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 unit 0 Unit	1,050,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		2 unit 0 Unit	1,365,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		20 Unit	260,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah yang tersedia	Laporan		Laporan	4 Laporan	**652,000,000**						4 Laporan	**1,011,400,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor Dinas Sosial	12 Laporan	31,200,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	640,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor Dinas Sosial	12 Laporan	871,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	**493,000,000**						5 Laporan	**1,819,350,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				45 Unit	430,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah / Sarana Prasarana Kantor	45 Unit	624,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 unit	24,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah / Sarana Prasarana Kantor	3 unit	93,600,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				172 unit 0 Unit	39,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah / Sarana Prasarana Kantor	172 unit 0 Unit	61,750,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di berdayakan	8,5 %		0 %	8,5 %	**780,000,000**						8,5 %	**2,600,000,000**	
1	**06**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**50,000,000**						1 Dokumen	**130,000,000**	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				17 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pengelola izin pengumpulan sumbangan	17 Dokumen 0 Dokumen	130,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang		Orang	2000 Orang	**730,000,000**						2000 Orang	**2,470,000,000**	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				2000 Orang 0 Orang	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	PSKS	2000 Orang 0 Orang	455,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				240 Orang 0 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	PSKS	240 Orang 0 Orang	390,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				500 KK 0 Keluarga	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	PSKS	500 KK 0 Keluarga	195,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				241 LKS 0 Lembaga	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	PSKS	241 LKS 0 Lembaga	1,430,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase Warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 %		0 %	100 %	**50,000,000**						100 %	**130,000,000**	
1	**06**	**03**	1.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang		Orang	50 Orang	**50,000,000**						50 Orang	**130,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang 0 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Warga negara migran	50 Orang 0 Orang	130,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %		0 %	100 %	**8,359,860,000**						100 %	**15,960,100,000**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah Dsabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Orang		Orang	40 Orang	**455,910,000**						40 Orang	**1,105,520,000**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				40 Orang 0 Orang	158,400,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Disabilitias Terlantar dalam panti	40 Orang 0 Orang	455,520,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				40 Orang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Disabilitias Terlantar dalam panti	40 Orang	65,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	JJumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				40 Orang 0 Orang	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Disabilitias Terlantar dalam panti	40 Orang 0 Orang	65,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	10,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Disabilitias Terlantar dalam panti	40 Orang	65,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 Orang 0 Orang	212,510,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Disabilitias Terlantar dalam panti	40 Orang 0 Orang	260,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	35,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Disabilitias Terlantar dalam panti	60 Orang	65,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Orang		Orang	130 Orang	**1,362,300,000**						130 Orang	**2,877,940,000**	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				130 Orang 0 Orang	858,800,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar	130 Orang 0 Orang	1,480,440,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				130 Orang 0 Orang	65,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar	130 Orang 0 Orang	169,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				130 Orang	75,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar	130 Orang	169,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				130 Orang 0 Orang	32,500,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar	130 Orang 0 Orang	84,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				130 Orang 0 Orang	291,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar	130 Orang 0 Orang	572,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				130 Orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar	130 Orang	143,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Orang		Orang	200 Orang	**2,391,000,000**						200 Orang	**5,098,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				200 Orang 0 Orang	1,752,000,000	Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia	200 Orang 0 Orang	2,277,600,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				200 Orang	77,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia	200 Orang	260,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				200 Orang 0 Orang	100,000,000	Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia	200 Orang 0 Orang	260,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				200 Orang	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia	200 Orang	65,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				200 Orang	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia	200 Orang	572,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				0 Orang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia	0 Orang	1,430,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				200 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia	200 Orang	130,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	1.04		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	Jumlah Gelandangan Pengemis dan ODGJ yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	Orang		Orang	180 Orang	**2,109,850,000**						180 Orang	**3,310,840,000**	
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				180 Orang 0 Orang	1,604,850,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan, Pengemis dan ODGJ	180 Orang 0 Orang	2,049,840,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				180 Orang 0 Orang	40,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan, Pengemis dan ODGJ	180 Orang 0 Orang	234,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				180 Orang	90,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan, Pengemis dan ODGJ	180 Orang	117,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				180 Orang 0 Orang	30,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan, Pengemis dan ODGJ	180 Orang 0 Orang	130,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				180 Orang 0 Orang	300,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan, Pengemis dan ODGJ	180 Orang 0 Orang	520,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				180 Orang	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan, Pengemis dan ODGJ	180 Orang	65,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	Jumlah ABH, WTS dan PMKS lainya yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Orang		Orang	600 Orang	**2,040,800,000**						600 Orang	**3,567,200,000**	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang 0 Orang	400,800,000	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Berhadapan dengan Hukum, Wanita tuna sosial dan PMKS Lainya	100 Orang 0 Orang	577,200,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang 0 Orang	60,000,000	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Berhadapan dengan Hukum, Wanita tuna sosial dan PMKS Lainya	100 Orang 0 Orang	130,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang 0 Orang	50,000,000	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Berhadapan dengan Hukum, Wanita tuna sosial dan PMKS Lainya	100 Orang 0 Orang	130,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang 0 Orang	25,000,000	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Berhadapan dengan Hukum, Wanita tuna sosial dan PMKS Lainya	100 Orang 0 Orang	65,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	630,000,000	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Berhadapan dengan Hukum, Wanita tuna sosial dan PMKS Lainya	100 Orang	260,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang 0 Orang	25,000,000	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Berhadapan dengan Hukum, Wanita tuna sosial dan PMKS Lainya	100 Orang 0 Orang	65,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				0 Dokumen	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Anak Berhadapan dengan Hukum, Wanita tuna sosial dan PMKS Lainya	0 Dokumen	1,950,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang		Orang	20 Orang	**7,850,000,000**						20 Orang	**13,130,000,000**	
1	**06**	**05**	1.01		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang		Orang	20 Orang	**50,000,000**						20 Orang	**130,000,000**	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang 0 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Adopsi anak	20 Orang 0 Orang	65,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan	Orang		Orang	1700 Orang	**7,800,000,000**						1700 Orang	**13,000,000,000**	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				1000 KK	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Warga miskin yang termasuk dalam DTKS	1000 KK	130,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				30 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Warga miskin yang termasuk dalam DTKS	30 Orang	910,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				0 Orang 1700 kk	7,450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Warga miskin yang termasuk dalam DTKS	0 Orang 1700 kk	11,960,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat provinsi	100 %		0 %	100 %	**1,252,000,000**						100 %	**1,885,000,000**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang		Orang	1500 Orang	**1,252,000,000**						1500 Orang	**1,885,000,000**	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				0 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencanan Alam dan Sosial	0 Orang	390,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				5000 Orang 0 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencanan Alam dan Sosial	5000 Orang 0 Orang	390,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1000 Orang 0 Unit	72,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencanan Alam dan Sosial	1000 Orang 0 Unit	130,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				1000 Orang 0 Orang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencanan Alam dan Sosial	1000 Orang 0 Orang	780,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				50 Orang 0 Orang	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Korban Bencanan Alam dan Sosial	50 Orang 0 Orang	195,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Sumsel	100 %		0 %	100 %	**112,000,000**						100 %	**223,600,000**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	Jumlah Laporan Pemeliharaan TMP	Laporan		Laporan	3 Laporan	**112,000,000**						3 Laporan	**223,600,000**	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				28 Buah 0 Makam	70,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Taman Makam Pahlawan	28 Buah 0 Makam	65,000,000	Dinas Sosial
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				0 Laporan	42,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Taman Makam Pahlawan	0 Laporan	93,600,000	Dinas Sosial
										TOTAL	**43,682,646,000**							**66,317,439,800**	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**27,171,175,096**							**29,640,011,640**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**20,971,175,096**						100 %	**22,592,511,640**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkat capaian kinerja dan keuangan	KAB/KOTA		KAB/KOTA	17 KAB/KOTA	**233,331,096**						17 KAB/KOTA	**268,330,760**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	213,331,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD DAN UPTB TRAUMA CENTER DAN PELAYANAN KESEHATAN	1 Dokumen	245,330,760	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen				2 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD DAN UPTB TRAUMA CENTER DAN PELAYANAN KESEHATAN	2 Dokumen	23,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Kantor	orang		orang	172 orang	**14,838,052,000**						172 orang	**17,063,759,800**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	11,371,352,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS dan Non PNS BPBD dan UPTB	0 Orang/ Bulan	13,077,054,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3,446,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS dan Non PNS BPBD dan UPTB		3,963,705,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS dan Non PNS BPBD dan UPTB		23,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kapasitas SDM	Orang		Orang	172 Orang	**350,000,000**						172 Orang	**247,250,000**	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan	0 Paket	17,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Peralatan	Paket		Paket	1 Paket	**1,982,792,000**						1 Paket	**911,121,080**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Truma Center dan Pelayanan Kesehatan		103,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	597,792,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Truma Center dan Pelayanan Kesehatan	0 Paket	68,746,080	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Truma Center dan Pelayanan Kesehatan		103,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Truma Center dan Pelayanan Kesehatan		230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Truma Center dan Pelayanan Kesehatan		92,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Truma Center dan Pelayanan Kesehatan		230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	725,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Truma Center dan Pelayanan Kesehatan	0 Laporan	83,375,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Paket		Paket	1 Paket	**517,000,000**						1 Paket	**594,550,000**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan		103,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						411,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan		473,340,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan		17,710,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Kelancaran Operasional Kantor	Paket Kegiatan		Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	**3,050,000,000**						1 Paket Kegiatan	**3,507,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan	0 Unit	977,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan		230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPBD dan UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan		2,300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Penurunan Jumlah Titik Hotspot Persentase Daerah Rawan Bencana yang Mempunyai Pelayanan Informasi Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	136,95 Indeks 157 Titik Hotspot 100 % 100 % 100 % 25 %		0 Indeks 0 Titik Hotspot 0 % 0 % 0 % 0 %	137 Indeks 167 Titik Hotspot 100 % 100 % 100 % 25 %	**6,200,000,000**						137 Indeks 167 Titik Hotspot 100 % 100 % 100 % 25 %	**7,047,500,000**	
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Masyarakat Terdampak Bencana	KAB/KOTA		KAB/KOTA	17 KAB/KOTA	**800,000,000**						17 KAB/KOTA	**924,750,000**	
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				0 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	177,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				0 Orang	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Orang	747,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Masyarakat Terdampak Bencana	KAB/KOTA		KAB/KOTA	17 KAB/KOTA	**2,250,000,000**						17 KAB/KOTA	**2,587,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi				0 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	115,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				0 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Orang	345,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				0 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	115,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana				0 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Unit	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				0 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	172,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0 Kawasan	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Kawasan	920,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana				0 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Orang	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi				0 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	172,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi				0 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Laporan	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi				0 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	57,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Masyarakat Terdampak Bencana	KAB/KOTA		KAB/KOTA	17 KAB/KOTA	**2,350,000,000**						17 KAB/KOTA	**2,637,500,000**	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						1,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan		1,375,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Laporan	57,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Orang	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Orang	1,150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan		55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Masyarakat Terdampak Bencana	KAB/KOTA		KAB/KOTA	17 KAB/KOTA	**800,000,000**						17 KAB/KOTA	**897,500,000**	
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	115,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				0 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	57,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				0 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	115,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan				0 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen	57,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan dan Hasil Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana				3 Kabupaten/Kota	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	3 Kabupaten/Kota	275,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0 Keluarga	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	0 Keluarga	57,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan		220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
										TOTAL	**27,171,175,096**							**29,640,011,640**	

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**33,823,634,000**							**35,135,306,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**32,222,134,000**						100 %	**32,383,806,000**	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**225,000,000**						100 Persen	**190,000,000**	
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	75,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota, Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota, Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota, Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota, Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota, Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota, Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	100,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab/Kota, Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**28,939,754,000**						100 Persen	**28,544,826,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang	27,451,014,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	200 Orang	27,103,966,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN				42 Orang	1,304,260,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	42 Orang	1,304,260,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD				18 Dokumen	174,480,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	18 Dokumen	126,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	18 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persen		Persen	100 Persen	**60,000,000**						100 Persen	**400,000,000**	
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	50,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	3 Orang	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan				1 Orang	10,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Orang	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**1,310,000,000**						100 Persen	**1,184,600,000**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	100,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Paket	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Paket	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan				1 Paket	120,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Paket	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	5 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Dokumen	150,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	450,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	200,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	74,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	**300,000,000**						100 Persen	**550,000,000**	
2	07	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	75,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Unit	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kntor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	2 Unit	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	**887,000,000**						100 Persen	**864,000,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Dibayar				1 Dokumen	623,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Dokumen	254,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor dan Pegawai Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Dokumen	254,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	**500,380,000**						100 Persen	**650,380,000**	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	200,380,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor Disnakertrans Prov. Sumsel	28 Unit	200,380,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	150,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor Disnakertrans Prov. Sumsel	10 Unit	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor Disnakertrans Prov. Sumsel	1 Unit	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi	Persen		Persen	0,16 Persen	**150,000,000**						0,16 Persen	**600,000,000**	
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	Persentase Peserta Pelatihan Kompetensi yang Ditempatkan	Persen		Persen	30 Persen	**150,000,000**						30 Persen	**500,000,000**	
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				250 LPK	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Sumsel	250 LPK	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	25 %		0 %	20 %	**650,000,000**						20 %	**850,000,000**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Persen		Persen	70 Persen	**200,000,000**						70 Persen	**300,000,000**	
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				30 Orang	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Sumsel	30 Orang	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Pencaker yang ditempatkan	Persen		Persen	80 Persen	**300,000,000**						80 Persen	**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar kerja online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu II, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat/Pencari Kerja di Sumsel	1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				200 Orang	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat/Pencari Kerja di Sumsel	200 Orang	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	Persentase PMI yang di tempatkan dan mendapatkan perlindungan	Persen		Persen	80 Persen	**70,000,000**						80 Persen	**50,000,000**	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	PMI dari Sumsel	20 Orang	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.05		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Perusahaan Pengguna TKA yang melakukan pembayaran retribusi daerah	Persen		Persen	80 Persen	**80,000,000**						80 Persen	**200,000,000**	
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				50 Orang	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	TKA dan Perusahaan Pengguna TKA di Sumsel	50 Orang	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase pekerja yang mendapat perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang menerapkan Tata Kelola kerja yang layak	0 % 40 %		0 % 0 %	0 % 38 %	**501,500,000**						0 % 38 %	**801,500,000**	
2	**07**	**05**	1.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PP dan PKB	Persen		Persen	38 Persen	**186,500,000**						38 Persen	**336,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit Dibina				1 LKS	186,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan di Sumsel	1 LKS	186,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**05**	1.03		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP dan UMK	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**315,000,000**						1 Dokumen	**315,000,000**	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP				1 Dokumen	315,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan dan Pekerja di Sumsel	1 Dokumen	315,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan	67 %		0 %	66 %	**300,000,000**						66 %	**300,000,000**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan	Perusahaan		Perusahaan	120 Perusahaan	**300,000,000**						120 Perusahaan	**300,000,000**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan(Termasuk Perusahaan Yang Memperkerjakan TKA)				120 Perusahaan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan di Sumsel	120 Perusahaan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				5 Kasus	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan di Sumsel	5 Kasus	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**200,000,000**							**700,000,000**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	100 %		0 %	0 %	**100,000,000**						0 %	**100,000,000**	
3	**32**	**02**	1.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelayanan Pertanahan Kawasan Transmigrasi	Persen		Persen	100 Persen	**100,000,000**						100 Persen	**100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi				2 Kasus	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kawasan dari masyarakat transmigrasi di Sumsel	2 Kasus	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	100 %		0 %	0 %	**50,000,000**						0 %	**300,000,000**	
3	**32**	**03**	1.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Meningkatnya Penataan Persebaran Penduduk Wilayah Transmigrasi	Persen		Persen	100 Persen	**50,000,000**						100 Persen	**300,000,000**	
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang mendapatkan Pelatihan				50 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Transmigran di Sumsel	50 Orang	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Jumlah Penghasilan Kepala Keluarga Transmigran yang setara 3000 kg beras per tahun Persentase Peningkatan Jumlah usaha ekonomi yang berkembang	3800 Kg 0 %		0 Kg 0 %	3800 Kg 0 %	**50,000,000**						3800 Kg 0 %	**300,000,000**	
3	**32**	**04**	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	Persentase meningkatan penataan persebaran penduduk wilayah transmigrasi	Persen		Persen	50 Persen	**50,000,000**						50 Persen	**300,000,000**	
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelmebagaan				1 Kabupaten	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Transmigran di Sumsel	1 Kabupaten	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
										TOTAL	**34,023,634,000**							**35,835,306,000**	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**16,035,750,000**							**21,395,000,000**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**10,720,965,000**						100 %	**12,995,000,000**	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**25,000,000**						100 Persen	**50,000,000**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	6 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	4 Laporan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	**8,623,827,000**						100 Persen	**8,275,000,000**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/Bulan	7,579,927,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	45 Orang/Bulan	7,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	783,900,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Dokumen	950,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	220,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	40,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	2 Laporan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	Persen		Persen	100 Persen	**150,000,000**						100 Persen	**530,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	10 Orang	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	15,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	50 Orang	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	6 Orang	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	**957,138,000**						100 Persen	**1,160,000,000**	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Paket	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Paket	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Paket	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	8 Paket	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	60,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	4 Paket	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,637,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Laporan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	423,501,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	2 Laporan	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	48,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**470,000,000**						100 Persen	**660,000,000**	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	260,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Laporan	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	150,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Laporan	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	**495,000,000**						100 Persen	**1,320,000,000**	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit Kendaraan Dinas	220,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	18 Unit Kendaraan Dinas	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	15,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	6 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Website	160,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Website	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	1 Gedung	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	61 %		0 %	60 %	**2,070,000,000**						60 %	**3,000,000,000**	
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang melaksanakan PPRG	Persen		Persen	75.38 Persen	**350,000,000**						75.38 Persen	**500,000,000**	
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi				66 Lembaga	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	66 Lembaga	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	Jumlah Jenis kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**500,000,000**						4 Jenis	**800,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota				10 Organisasi	400,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	10 Organisasi	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Jumlah lembaga layanan perempuan yang dilakukan penguatan dan pengembangan	Lembaga		Lembaga	45 Lembaga	**1,220,000,000**						45 Lembaga	**1,700,000,000**	
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				45 Lembaga	1,020,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	45 Lembaga	1,250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	100 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan	11 %		0 %	11,25 %	**449,785,000**						11,25 %	**1,500,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Jenis Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jenis		Jenis	1 Jenis	**30,900,000**						1 Jenis	**150,000,000**	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	30,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensi	Persen		Persen	100 Persen	**108,885,000**						100 Persen	**700,000,000**	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				100 Orang	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	100 Orang	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				30 Kasus	68,885,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	30 Kasus	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	Meningkatnya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya	Lembaga		Lembaga	25 Lembaga	**310,000,000**						25 Lembaga	**650,000,000**	
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumber daya lembaga layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas				18 Orang	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	18 Orang	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70 %		0 %	68 %	**530,000,000**						68 %	**600,000,000**	
2	**08**	**04**	1.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	JumlahMedia KIE Peningkatan Kualitas Keluarga	Media		Media	2 Media	**250,000,000**						2 Media	**300,000,000**	
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender(KG) dan Hak Anak	Jenis		Jenis	1 Jenis	**80,000,000**						1 Jenis	**100,000,000**	
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	100 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**	1.03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan keluarga	Kab/Kota		Kab/Kota	5 Kab/Kota	**200,000,000**						5 Kab/Kota	**200,000,000**	
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Layanan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Layanan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	61 %		0 %	60 %	**350,000,000**						60 %	**700,000,000**	
2	**08**	**05**	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Keterisian data terpila pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)Persentase Keterisian data terpila pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Persen		Persen	60.65 Persen	**350,000,000**						60.65 Persen	**700,000,000**	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Indeks Perlindungan ANak (IPA)	70 %		0 %	68 %	**580,000,000**						68 %	**650,000,000**	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi		Organisasi	17 Organisasi	**330,000,000**						17 Organisasi	**400,000,000**	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				17 Lembaga	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	17 Lembaga	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.	Persen		Persen	80 Persen	**250,000,000**						80 Persen	**250,000,000**	
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak	1.1 Nilai		0 Nilai	1.15 Nilai	**1,335,000,000**						1.15 Nilai	**1,950,000,000**	
2	**08**	**07**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Peserta Pencegahan kekerasan Anak	Persen		Persen	200 Persen	**100,000,000**						200 Persen	**300,000,000**	
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				17 Organisasi	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	17 Organisasi	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	1.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensi	Persen		Persen	100 Persen	**285,000,000**						100 Persen	**450,000,000**	
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan				50 Anak	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	50 Anak	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				30 Kasus	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	30 Kasus	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang bersinergi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**950,000,000**						3 Dokumen	**1,200,000,000**	
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	-	3 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										TOTAL	**16,035,750,000**							**21,395,000,000**	

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**29,501,000,000**							**83,374,000,000**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**25,776,000,000**						100 %	**74,119,000,000**	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	**945,000,000**						1 dokumen	**1,733,000,000**	
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	4 Dokumen	1,055,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	145,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	6 Laporan	158,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	520,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah tenaga jasa administrasi keuangan	orang		orang	11 orang	**19,005,000,000**						11 orang	**57,103,000,000**	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 orang	18,950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	115 orang	57,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	103,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang		orang	20 orang	**50,000,000**						20 orang	**310,000,000**	
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	20 Orang	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah jenis alat dan bahan kantor	jenis		jenis	19 jenis	**542,000,000**						19 jenis	**1,433,000,000**	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	16,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	8 Paket	46,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	34 Paket	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis alat dan bahan kebersihan kantor				19 jenis	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	19 jenis	62,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor				20 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	20 Paket	57,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2 Paket	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Dokumen	17,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	145 Laporan	1,060,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	jenis		jenis	7 jenis	**300,000,000**						7 jenis	**1,741,000,000**	
2	09	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				7 jenis	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	7 jenis	1,041,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah materai dan benda pos lainnya yang dibayarkan	lembar		lembar	500 lembar	**3,576,000,000**						500 lembar	**9,742,000,000**	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	14,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	4 Laporan	1,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3,020,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2 Laporan	8,228,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit		unit	462 unit	**1,358,000,000**						462 unit	**2,057,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				31 Unit	573,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	31 Unit	1,177,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2 Unit	310,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	5 Unit	570,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	persentase pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya	persen		persen	100 persen	**250,000,000**						100 persen	**2,125,000,000**	
2	**09**	**02**	1.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**	jumlah SDM pangan yang diberikan	SDM		SDM	8 SDM	**250,000,000**						8 SDM	**2,125,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				1 Unit	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Unit	2,125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Cadangan Pangan Daerah (Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat Ketersediaan Energi Ketersediaan Protein Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis (%) Rumus : CV = s/x̄ X 100% (ket: S= Standar Deviasi x̄ = Rata-rata) Skor Pola Pangan Harapan	852 Ton beras 2260 (kkal/kap/ hari) 80 (Gram/kap /hari) <=15 % 91,5 Skor		0 Ton beras 0 (kkal/kap/ hari) 0 (Gram/kap /hari) 0 % 0 Skor	843 Ton beras 2200 (kkal/kap/ hari) 79 (Gram/kap /hari) <=15 % 89,7 Skor	**2,150,000,000**						843 Ton beras 2200 (kkal/kap/ hari) 79 (Gram/kap /hari) <=15 % 89,7 Skor	**4,205,000,000**	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	jumlah komoditi pangan yang dipantau	komoditi		komoditi	15 komoditi	**575,000,000**						15 komoditi	**1,155,000,000**	
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	335,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	195,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				8 Unit	350,000,000	Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	8 Unit	625,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**03**	1.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	jumlah cadangan pangan daerah	ton		ton	852 ton	**250,000,000**						852 ton	**675,000,000**	
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi				3 Laporan	250,000,000				Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Laporan	675,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	jumlah menu yang dihasilkan	menu		menu	153 menu	**1,325,000,000**						153 menu	**2,375,000,000**	
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	1 Dokumen	650,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				2 Laporan	1,000,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2 Laporan	1,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	225,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Jumlah kelompok miskin yang dibantu	500 KK		0 KK	175 KK	**750,000,000**						175 KK	**1,450,000,000**	
2	**09**	**04**	1.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	jumlah lokasi rentan pangan prioritas 1,2,3	lokasi		lokasi	10 lokasi	**750,000,000**						10 lokasi	**1,450,000,000**	
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	750,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	1 Dokumen	1,450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Bersertifikat Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Beredar Aman dan Bermutu (Komoditi Sayur dan Buah)	288 Sertifikat/Registrasi 100 %		0 Sertifikat/Registrasi 0 %	263 Sertifikat/Registrasi 100 %	**575,000,000**						263 Sertifikat/Registrasi 100 %	**1,475,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	frekuensi pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah/kabupaten	kab/kota		kab/kota	17 kab/kota	**575,000,000**						17 kab/kota	**1,475,000,000**	
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina				1 Dokumen	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	575,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50 Sertifikat	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	50 Sertifikat	700,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**10,405,000,000**							**18,798,000,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Produksi Daging Produksi Susu Produksi Telur	105057 Ton 80098 Liter 115269 Ton		0 Ton 0 Liter 0 Ton	100054 Ton 72817 Liter 109780 Ton	**1,730,000,000**						100054 Ton 72817 Liter 109780 Ton	**5,780,000,000**	
3	**27**	**02**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	jumlah kelompok SPR	SPR		SPR	8 SPR	**130,000,000**						8 SPR	**630,000,000**	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Laporan	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	180,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	jumlah sarana dan prasarana UPTD	unit		unit	2 unit	**850,000,000**						2 unit	**4,250,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi				2 Laporan	750,000,000	Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2 Laporan	4,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar				5000 Ton	100,000,000	Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	5000 Ton	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**02**	1.07		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	jumlah komoditi ternak yang dikembangkan di daerah pengetasan kemiskinan	komoditi		komoditi	4000 komoditi	**750,000,000**						4000 komoditi	**900,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				3000 Ekor	750,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	3000 Ekor	900,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	jumlah prasarana peternakan	jenis		jenis	2 jenis	**1,750,000,000**						2 jenis	**4,843,000,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	jumlah jenis pelayanan kesehatan ternak	dokumen		dokumen	1 dokumen	**1,650,000,000**						1 dokumen	**4,668,000,000**	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Banyuasin, Rambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	3,068,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	600,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Unit	1,550,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**03**	1.02		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	jumlah plasma nutfah peternakan yang dilestarikan	jenis		jenis	200 jenis	**100,000,000**						200 jenis	**175,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 wilayah	100,000,000	Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 wilayah	175,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Ternak	5 %		0 %	5 %	**675,000,000**						5 %	**1,925,000,000**	
3	**27**	**04**	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	jumlah jenis penyakit yang memerlukan pencegahan dan pengendalian	jenis		jenis	25 jenis	**275,000,000**						25 jenis	**825,000,000**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	825,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	jumlah sample hasil surveilance	sample		sample	1900 sample	**275,000,000**						1900 sample	**825,000,000**	
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1900 Dokumen	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1900 Dokumen	825,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**04**	1.04		**Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	jumlah pedagang, peternakan dan panitia masjid hari raya qurban	orang		orang	170 orang	**125,000,000**						170 orang	**275,000,000**	
3	27	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan				50 Sertifikat	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	50 Sertifikat	275,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase pelaksanaan program penyuluhan pertanian	100 %		0 %	100 %	**6,250,000,000**						100 %	**6,250,000,000**	
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	jumlah pendamping peternakan	orang		orang	208 orang	**5,050,000,000**						208 orang	**5,100,000,000**	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pendamping peternakan				208 orang	5,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	208 orang	5,100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	**27**	**07**	1.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	jumlah petani yang diberdayakan	orang		orang	4000 orang	**1,200,000,000**						4000 orang	**1,150,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi				1 Unit	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Unit	1,150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
										TOTAL	**39,906,000,000**							**102,172,000,000**	

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**9,100,000,000**							**17,235,000,000**	
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	Persentase Peningkatan Pengawasan Internal Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	% %		% %	100 % 100 %	**20,000,000**						100 % 100 %	**700,000,000**	
2	**10**	**02**	1.01		**Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi	Perusahaan		Perusahaan	10 Perusahaan	**20,000,000**						10 Perusahaan	**700,000,000**	
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Jumlah izin lokasi dan HGU yang di evaluasi				0 10 Perusahaan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Perusahaan	0 10 Perusahaan	700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**10**	**03**			**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	Persentase Konflik lahan yang terselesaikan Persentase Surat Keputusan Penetapan Tanah Lokasi	% %		% %	100 % 100 %	**40,000,000**						100 % 100 %	**675,000,000**	
2	**10**	**03**	1.01		**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	Jumlah Dokumen Pertanahan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**40,000,000**						1 Dokumen	**675,000,000**	
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jumlah dokumen pertanahan				1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen	675,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Jumlah Konflik yang difasilitasi	Kasus		Kasus	8 Kasus	**40,000,000**						8 Kasus	**1,200,000,000**	
2	**10**	**04**	1.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terlaksananya mediasi sengketa pertanahan	Bidang		Bidang	100 Bidang	**40,000,000**						100 Bidang	**1,200,000,000**	
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksananya mediasi sengketa pertanahan				0 Dokumen 2 Kasus	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 2 Kasus	1,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Jumlah lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Luasan Jumlah Lahan yang diganti rugi	M2 M2		M2 M2	14660 M2 27735 M2	**9,000,000,000**						14660 M2 27735 M2	**14,660,000,000**	
2	**10**	**05**	1.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah Lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Luas Lahan yang diganti rugi Persentase Penyelesaian Masalah ganti rugi	M2 M2 %		M2 M2 %	27735 M2 27735 M2 100 %	**9,000,000,000**						27735 M2 27735 M2 100 %	**14,660,000,000**	
2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum				27735 M2	9,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang	27735 M2	14,310,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**15,888,728,305**							**38,840,772,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani Persentase Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah perovinsi yang terlaksana	% %		% %	100 % 100 %	**14,380,809,914**						100 % 100 %	**16,280,897,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen MONEV Perencanaan Bidang LH Jumlah Dokumen SAKIP Dinas Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis	Dokumen Dokumen % Kali		Dokumen Dokumen % Kali	1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Kali	**100,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Kali	**650,000,000**	
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monev Perencanaan DInas Jumlah Dokumen SAKIP Dinas Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis				1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan 1 Kali	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan 1 Kali	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indicator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang bekerja Jumlah Laporan Keuangan Tahunan Jumlah Senam Kantor yang terlaksana Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan dan Barang Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	OB Dokumen Kali OB OB %		OB Dokumen Kali OB OB %	69 OB 1 Dokumen 44 Kali 338 OB 144 OB 100 %	**12,864,192,000**						69 OB 1 Dokumen 44 Kali 338 OB 144 OB 100 %	**10,469,421,000**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang bekerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/Bulan 0 Orang/ Bulan	11,854,462,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	69 Orang/Bulan 0 Orang/ Bulan	9,361,981,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah senam kantor yang dilaksanakan Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran Jumlah tenaga pengelola keuangan dan barang				0 Dokumen 44 Kali 338 Orang/Bulan 144 Orang/Bulan	989,730,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 44 Kali 338 Orang/Bulan 144 Orang/Bulan	957,440,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Tahunan				0 Laporan 1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	0 Laporan 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	%		%	100 %	**710,000,000**						100 %	**1,808,376,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor				100 Unit	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	100 Unit	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1800 Item 0 Paket	70,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	1800 Item 0 Paket	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				70000 Lembar 0 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	70000 Lembar 0 Paket	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah surat kabar dan buku bacaan kantor				0 Dokumen 4380 Eksemplar	30,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 4380 Eksemplar	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah perjalanan dinas dalam, luar Provinsi dan luar negeri				0 Laporan 350 Orang/Hari	500,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	0 Laporan 350 Orang/Hari	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang dikelola Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Aplikasi 0 Dokumen	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	4 Aplikasi 0 Dokumen	700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	%		%	100 %	**249,000,000**						100 %	**872,500,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang terkirim				0 Laporan 700 Surat	5,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	0 Laporan 700 Surat	3,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet yang dibayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Kali 0 Laporan	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	72 Kali 0 Laporan	365,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tabung Kebakaran yang diisi				8 Tabung	4,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	8 Tabung	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah makanan dan minuman untuk rapat kantor Jumlah Pengelola Informasi dan Dokumentasi				1 Gedung 0 Laporan 150 Kali 0 Dokumen	220,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	1 Gedung 0 Laporan 150 Kali 0 Dokumen	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik	%		%	100 %	**457,617,914**						100 %	**535,000,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara				0 Unit 20 Unit	357,617,914	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	0 Unit 20 Unit	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara				0 Unit 25 Unit	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	DLHP Provinsi Sumatera Selatan	0 Unit 25 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	IKLH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks %		Indeks %	71.55 Indeks 100 %	**300,000,000**						71.55 Indeks 100 %	**1,000,000,000**	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	Jumlah Dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**300,000,000**						1 Dokumen	**700,000,000**	
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi GRK	Indeks %		Indeks %	71.55 Indeks 7.42 %	**830,000,000**						71.55 Indeks 7.42 %	**15,579,875,000**	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	IKA IKU Jumlah Alat Pemantau Mobile Online Jumlah Dokumen Emisi GRK Jumlah Lokasi Proklim Jumlah Unit Usaha Sektor Tambang Jumlah Usaha/Kegiatan Berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi	Indeks Indeks Unit Dokumen Desa Perusahaan Perusahaan		Indeks Indeks Unit Dokumen Desa Perusahaan Perusahaan	67.25 Indeks 84.75 Indeks 1 Unit 1 Dokumen 37 Desa 50 Perusahaan 50 Perusahaan	**330,000,000**						67.25 Indeks 84.75 Indeks 1 Unit 1 Dokumen 37 Desa 50 Perusahaan 50 Perusahaan	**3,495,000,000**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah unit usaha kegiatan sektor pertambangan				67.25 Indeks 84.75 Indeks 0 Dokumen 50 Perusahaan	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	67.25 Indeks 84.75 Indeks 0 Dokumen 50 Perusahaan	1,565,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Emisi GRK Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan Jumlah Lokasi Proklim Jumlah Usaha kegiatan Berbasis Lahan yang dievaluasi dan diverifikasi				1 Dokumen 0 Dokumen 37 Desa 50 Perusahaan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen 0 Dokumen 37 Desa 50 Perusahaan	1,430,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**03**	1.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Luas Lahan Akses Terbuka yang dipulihkan Luas Lahan Gambut yang direstorasi	Ha Ha		Ha Ha	2 Ha 7959 Ha	**500,000,000**						2 Ha 7959 Ha	**11,484,875,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi Luas lahan gambut yang direstorasi				0 Dokumen 1 Dokumen 60 Usaha Kegiatan 7959 Ha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 1 Dokumen 60 Usaha Kegiatan 7959 Ha	8,984,875,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Terbangunnya Taman Kehati Provinsi Sumatera Selatan	Taman		Taman	1 Taman	**20,000,000**						1 Taman	**900,000,000**	
2	**11**	**04**	1.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	Jumlah Taman Kehati	Taman		Taman	1 Taman	**20,000,000**						1 Taman	**900,000,000**	
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun Jumlah Taman Kehati				0 Dokumen 1 Taman	20,000,000	Kota Palembang, Jakabaring, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan	0 Dokumen 1 Taman	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten / kota	%		%	6 %	**20,000,000**						6 %	**200,000,000**	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Pengelolaan LB3	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**20,000,000**						1 Dokumen	**200,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah kabupaten / kota				0 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	% %		% %	15 % 36 %	**187,918,391**						15 % 36 %	**1,700,000,000**	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dievaluasi Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi Jumlah Kasus Lingkungan yang terselesaikan Jumlah Komisi Penilai Amdal yang dilakukan pembinaan	Perusahaan Perusahaan Kasus Lisensi		Perusahaan Perusahaan Kasus Lisensi	2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Kasus 2 Lisensi	**187,918,391**						2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Kasus 2 Lisensi	**1,700,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dievaluasi Jumlah izin lingkungan yang diawasi Jumlah Komisi Penilai AMDAL Kab/kota yg dilakukan pembinaan Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi				2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Lisensi 0 Laporan	167,918,391	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	2 Perusahaan 2 Perusahaan 2 Lisensi 0 Laporan	700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Kasus Lingkungan yang terselesaikan				0 Dokumen 100 Kasus	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 100 Kasus	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terinventarisasi	MHA		MHA	2 MHA	**20,000,000**						2 MHA	**100,000,000**	
2	**11**	**07**	1.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terinventarisasi	MHA		MHA	2 MHA	**20,000,000**						2 MHA	**100,000,000**	
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Jumlah Mayarakat Hukum Adat yang terinventarisasi				0 Dokumen 2 MHA	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 2 MHA	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		Indeks	71.55 Indeks	**20,000,000**						71.55 Indeks	**1,100,000,000**	
2	**11**	**08**	1.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Masyarakat yang mendukung pengelolaan LH Jumlah Pramuka yang dibina Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Orang Kegiatan Orang		Orang Kegiatan Orang	1100 Orang 3 Kegiatan 30 Orang	**20,000,000**						1100 Orang 3 Kegiatan 30 Orang	**1,100,000,000**	
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Pramuka yang dibina				0 Dokumen 3 Kegiatan	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 3 Kegiatan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		Indeks	71.55 Indeks	**90,000,000**						71.55 Indeks	**850,000,000**	
2	**11**	**09**	1.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Kota Sehat Adipura Jumlah Orang/Kelompok Jumlah Sekolah Adiwiyata	Kab/Kota Orang Sekolah		Kab/Kota Orang Sekolah	10 Kab/Kota 5 Orang 35 Sekolah	**90,000,000**						10 Kab/Kota 5 Orang 35 Sekolah	**850,000,000**	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kota Sehat Adipura Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah orang/kelompok Jumlah sekolah Adiwiyata				10 Kab/Kota 0 Entitas 5 Orang 35 Sekolah	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	10 Kab/Kota 0 Entitas 5 Orang 35 Sekolah	850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengurangan timbulan sampah rumah tangga	%		%	27 %	**20,000,000**						27 %	**1,130,000,000**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	Jumlah Dokumen Jumlah Motor Sampah Persentase Data Timbulan Sampah	Dokumen Unit %		Dokumen Unit %	1 Dokumen 3 Unit 75 %	**20,000,000**						1 Dokumen 3 Unit 75 %	**1,130,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Persentase data timbulan sampah				0 Dokumen 75 %	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Provinsi Sumatera Selatan	0 Dokumen 75 %	330,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**17,500,000,000**							**18,000,000,000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	% %		% %	100 % 100 %	**17,500,000,000**						100 % 100 %	**18,000,000,000**	
2	**11**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Item %		Item %	11 Item 100 %	**17,500,000,000**						11 Item 100 %	**18,000,000,000**	
2	11	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah sarana dan prasarana laboratorium				0 Unit Kerja 11 Item	17,500,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	UPTD Laboratorium Lingkungan DLHP Provinsi Sumatera Selatan	0 Unit Kerja 11 Item	18,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
										TOTAL	**42,488,728,305**							**74,075,772,000**	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERITAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**12**				**URUSAN PEMERITAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**10,129,228,000**							**11,351,500,000**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**9,828,228,000**						100 %	**10,976,500,000**	
2	**12**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tercetak	persen		persen	100 persen	**211,228,000**						100 persen	**255,000,000**	
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	20 Dokumen	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20 Dokumen	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	20 Dokumen	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	20 Dokumen	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	20 Dokumen	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				30 Dokumen	21,228,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	30 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	30 Laporan	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	persen		persen	100 persen	**5,878,673,000**						100 persen	**5,880,673,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang	5,760,043,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	35 Orang	5,760,043,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	108,630,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	108,630,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	7,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	3 Laporan	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**5,360,000**						100 persen	**5,360,000**	
2	12	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	5,360,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**273,140,000**						100 persen	**273,140,000**	
2	12	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	273,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	273,140,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**870,187,000**						100 persen	**910,187,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	25,272,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	4 Dokumen	25,272,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	2 Laporan	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	619,915,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	2 Laporan	619,915,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**665,000,000**						100 persen	**1,615,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	415,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	1,115,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	10 Unit	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	10 Unit	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**819,640,000**						100 persen	**821,140,000**	
2	12	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	2 Laporan	6,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	198,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	4 Laporan	199,600,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	615,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	3 Laporan	615,040,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,105,000,000**							**1,216,000,000**	
2	12	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	11,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	175,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	1,000,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	100 %		0 %	100 %	**100,000,000**						100 %	**125,000,000**	
2	**12**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**50,000,000**						100 persen	**65,000,000**	
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	65,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**50,000,000**						100 persen	**60,000,000**	
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	100 %		0 %	100 %	**100,000,000**						100 %	**120,000,000**	
2	**12**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**100,000,000**						100 persen	**120,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Pemanfaatan Data Kependudukan	19,23 %		0 %	19,23 %	**75,000,000**						19,23 %	**100,000,000**	
2	**12**	**04**	1.02		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**75,000,000**						100 persen	**100,000,000**	
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	100 %		0 %	100 %	**26,000,000**						100 %	**30,000,000**	
2	**12**	**05**	1.01		**Penyediaan Profil Kependudukan**	Prosentase Program Pengelolaan Profil Kependudukan	persen		persen	100 persen	**26,000,000**						100 persen	**30,000,000**	
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Kependudukan Provinsi				50 Dokumen	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	50 Dokumen	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain				50 Dokumen	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	50 Dokumen	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
										TOTAL	**10,129,228,000**							**11,351,500,000**	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**22,443,042,000**							**24,049,211,700**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13,242,767,000**							**13,914,243,000**	
2	**13**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**270,000,000**							**297,000,000**	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		2 Dokumen	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	44,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**8,950,090,000**							**9,156,822,000**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/ Bulan	6,590,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				37 Orang/ Bulan	6,590,130,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Honorarium TKS/TKPD dan Jasa tutor SKJ)				2 Dokumen	1,967,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		2 Dokumen	2,164,052,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, Admin/Operator SIPD, Admin/Operator Simda Barang)				1 Dokumen	292,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	292,640,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**104,500,000**							**114,950,000**	
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	104,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Orang	114,950,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,735,337,000**							**1,908,871,000**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	48,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	52,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	38,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Alat Tulis Kantor)				4 Paket	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	77,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	82,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		3 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ)				1 Laporan	116,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	127,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)				2 Laporan	1,371,337,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	1,508,471,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**677,840,000**							**781,000,000**	
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	167,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Unit	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Pengadaan Aplikasi E Surat, Pengadaan Aplikasi Sistem Pendataan Terintegrasi Lingkup Desa (SI PAHIT LIDA), Pengadaan Aplikasi Kamar Dagang Desa (KANDA)				3 Unit	510,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	561,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**342,000,000**							**376,300,000**	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	35,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		4 Laporan	209,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Jasa Cleaning Service)				1 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Laporan	132,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,163,000,000**							**1,279,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Asuransi kendaraan dinas operasional)				13 Unit	83,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Unit	91,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		28 Unit	715,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	82,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Pemeliharaan Website dan Aplikasi Pengelola Daftar Informasi Publik)				2 Unit	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	176,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	195,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	214,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**						**140,160,000**							**154,176,000**	
2	**13**	**02**	1.01		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**						**140,160,000**							**154,176,000**	
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Desa Persiapan)				1 Dokumen	140,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	154,176,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**1,125,000,000**							**1,237,500,000**	
2	**13**	**03**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**						**1,125,000,000**							**1,237,500,000**	
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				7 Dokumen	1,125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		7 Dokumen	1,237,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**2,509,818,000**							**2,827,966,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**						**2,509,818,000**							**2,827,966,000**	
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan ab/kota dan desa sample yang terfasilitasi penyaluran dana desa)				2 Dokumen	167,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	184,470,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	83,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	92,235,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Nominator pemenang lomba desa/kelurahan tingkat provinsi)				1 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Dokumen	385,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina (Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa) Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina (sosialisasi pencegahan karhutla)				2853 Orang 250 orang	1,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2853 Orang 250 orang	1,300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				1 Dokumen	93,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Dokumen	103,235,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	450,408,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		1 Dokumen	480,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	190,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	209,176,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	73,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	73,850,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**5,425,297,000**							**5,915,326,700**	
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**5,425,297,000**							**5,915,326,700**	
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (KPM Desa) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (nominator pemenang lomba PKK, KB Kes dan Lomba LBS)				500 Lembaga 6 Lembaga	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		500 Lembaga 6 Lembaga	440,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (pendataan daerah potensi desa wisata unggulan)				6 Dokumen 1 Dokumen	751,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Dokumen 1 Dokumen	827,002,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Nominator pemenang TTG, Nominator pemenang lomba posyantek, KP SPAM)				2 Laporan	525,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	525,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	495,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	3,298,477,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	3,628,324,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
										TOTAL	**22,443,042,000**							**24,049,211,700**	

Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERITAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**44,291,822,617**							**49,648,005,099**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**33,203,221,017**						100 %	**37,092,092,199**	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase konsistensi antara perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja	%		%	90 %	**430,000,000**						90 %	**577,500,000**	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	65,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Menciptakan perencanaan program yang efektif dan efisien	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	65,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Menciptakan perencanaan program yang efektif dan efisien	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	60,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Menciptakan perencanaan program yang efektif dan efisien	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	60,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Menciptakan perencanaan program yang efektif dan efisien	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	60,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Menciptakan perencanaan program yang efektif dan efisien	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	60,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Menciptakan perencanaan program yang efektif dan efisien	1 Laporan	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	60,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Menciptakan perencanaan program yang efektif dan efisien	1 Laporan	82,500,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelaporan kinerja keuangan kategori baik	%		%	90 %	**22,312,106,000**						90 %	**20,526,400,199**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1898 Orang/ Bulan	22,080,946,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN Dinas Perhubungan	1898 Orang/ Bulan	20,016,000,199	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	131,160,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran			Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN Dinas Perhubungan	1 Dokumen	345,400,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran			Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN Dinas Perhubungan	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran			Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN Dinas Perhubungan	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase meningkatnya penataan BMD semaikn baik	%		%	75 %	**65,500,000**						75 %	**72,050,000**	
2	15	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	65,500,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Penataan Barang Milik Daerah	1 Laporan	72,050,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase meningkatnya kompetensi pegawai	%		%	85 %	**500,000,000**						85 %	**220,000,000**	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	75,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Perhubungan	5 Orang	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	375,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Perhubungan	200 Orang	55,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Perhubungan	10 Orang	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase meningkatnya layanan umum PD semakin baik	%		%	80 %	**1,321,025,017**						80 %	**2,235,200,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	50 Paket	33,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	11 Paket	165,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	25 Paket	33,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	2 Paket	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	1 Dokumen	33,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	1 Paket	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	1 Laporan	110,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	781,025,017	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	1 Laporan	1,382,700,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kelancaran Adminsitrasi Dinas	1 Dokumen	258,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase meningkatnya penyelesaian tugas kantor	%		%	90 %	**7,692,590,000**						90 %	**9,245,742,000**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Mendukung Kelancaran Kerja Dinas	1 Laporan	5,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	821,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Mendukung Kelancaran Kerja Dinas	1 Laporan	903,485,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,866,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Mendukung Kelancaran Kerja Dinas	1 Laporan	8,336,757,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD yang terpelihara	%		%	90 %	**882,000,000**						90 %	**3,115,200,000**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	315,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Optimalisasi Pemanfaatan BMD	12 Unit	457,050,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	316,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Optimalisasi Pemanfaatan BMD	32 Unit	375,650,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Optimalisasi Pemanfaatan BMD	2 Unit	220,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Optimalisasi Pemanfaatan BMD	2 Unit	1,980,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				412 Unit	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Optimalisasi Pemanfaatan BMD	412 Unit	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**5,538,601,600**							**6,150,912,900**	
2	**15**	**02**	1.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**						**350,000,000**							**500,000,000**	
2	15	02	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		1 Laporan	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Persentase meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan	%		%	40 %	**475,000,000**						40 %	**480,912,900**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				2 Unit	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pengguna Transportasi Darat	2 Unit	480,912,900	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Jumlah Terminal Tipe B yang dikelola	Terminal		Terminal	7 Terminal	**250,000,000**						7 Terminal	**275,000,000**	
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan				4 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Pengguna Terminal	4 Unit	165,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Pengguna Terminal	2 Unit	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Persentase terlaksananya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	%		%	80 %	**900,000,000**						80 %	**990,000,000**	
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Jalan	1 Laporan	550,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Jalan	1 Laporan	440,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Persentase pelaksanaan audit inspeksi keselamatan jalan	%		%	80 %	**500,000,000**						80 %	**550,000,000**	
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Jalan	1 Laporan	330,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Jalan	1 Laporan	220,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.08		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Load faktor angkutan jalan	%		%	80 %	**2,563,601,600**						80 %	**2,750,000,000**	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				6 Unit	2,063,601,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Angkutan Umum	6 Unit	2,200,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Angkutan Umum	1 Laporan	550,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**500,000,000**							**550,000,000**	
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				25 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		25 Unit	220,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		1 Laporan	330,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Jumlah trip perjalanan kapal	3856 Trip		0 Trip	3815 Trip	**5,250,000,000**						3815 Trip	**6,075,000,000**	
2	**15**	**03**	1.06		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**	Persentase kepemilikan perizinan di sektor angkutan perairan dan pelabuhan	%		%	80 %	**250,000,000**						80 %	**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Jasa Angkutan Perairan	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.08		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	Persentase kesesuaian antara RIP, DKLr dan DLKp dengan potensi pelabuhan pengumpan regional	%		%	75 %	**400,000,000**						75 %	**440,000,000**	
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Usaha Pelabuhan	1 Dokumen	440,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Persentase realisasi pembangunan pelabuhan pengumpan regional terhadap RIPN	%		%	20 %	**3,900,000,000**						20 %	**4,400,000,000**	
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian				1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Usaha Pelabuhan	1 Unit	220,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	3,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Usaha Pelabuhan	1 Unit	3,410,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	700,000,000	Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Usaha Pelabuhan	1 Unit	770,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	1.10		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase realisasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau terhadap RIPN	%		%	35 %	**700,000,000**						35 %	**770,000,000**	
2	15	03	1.10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan				1 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Pengguna Jasa Angkutan Sungai / Danau	1 Laporan	385,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Jasa Angkutan Sungai / Danau	1 Laporan	385,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Jumlah penumpang kereta api per tahun meningkat	1517236 Orang		0 Orang	1264364 Orang	**300,000,000**						1264364 Orang	**330,000,000**	
2	**15**	**05**	1.03		**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase kesesuaian penetapan jaringan jalur kereta api	%		%	80 %	**100,000,000**						80 %	**110,000,000**	
2	15	05	1.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Operator Kereta Api	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**	1.06		**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	Persentase kesesuaian penetapan jaringan pelayanan kereta api terhadap jalur kereta api	%		%	80 %	**100,000,000**						80 %	**110,000,000**	
2	15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Transportasi	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**05**	1.07		**Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase meningkatnya perizinan kereta api khusus	%		%	70 %	**100,000,000**						70 %	**110,000,000**	
2	15	05	1.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna jasa Perkeretaapian Khusus	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perhubungan
										TOTAL	**44,291,822,617**							**49,648,005,099**	

Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**32,802,312,420**							**330,000,000**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**15,775,981,000**						100 %	**330,000,000**	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pelaporan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**195,000,000**						1 Dokumen	**0**	
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**9,500,291,000**						1 Tahun	**0**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang / Bulan 0 Orang/ Bulan	9,270,291,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	64 Orang / Bulan 0 Orang/ Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**50,000,000**						1 Tahun	**0**	
2	16	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**110,000,000**						1 Tahun	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,463,000,000**						1 Tahun	**0**	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	40,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	70,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan				1 paket	125,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				1 dokumen	70,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 dokumen	58,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 dokumen	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,822,690,000**						1 Tahun	**0**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	450,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,352,690,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan aset BMD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**635,000,000**						1 Tahun	**0**	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit 0 Unit	535,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	18 Unit 0 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				100 unit	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %		0 %	80 %	**11,160,000,000**						80 %	**0**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	%		%	80 %	**11,160,000,000**						80 %	**0**	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	6,420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	430,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Layanan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	100 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan Usulan Dana Hibah KPID Tahun 2023 Usulan Dana Hibah RAPI Daerah Sumsel Tahun 2023				0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	2,020,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Akses Internet Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90 % 70 %		0 % 0 %	87 % 50 %	**5,866,331,420**						87 % 50 %	**0**	
2	**16**	**03**	1.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	%		%	100 %	**145,000,000**						100 %	**0**	
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	145,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	Persentase Pengguna e-government	%		%	90 %	**5,721,331,420**						90 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan yang dikelola				2 Unit	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	2 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	3,486,331,420	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	0	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**350,000,000**							**0**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	**350,000,000**						100 % 100 %	**0**	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	Persentase data yang tersedia	%		%	100 %	**350,000,000**						100 %	**0**	
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**150,000,000**							**0**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	100 %		0 %	100 %	**150,000,000**						100 %	**0**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%		%	100 %	**150,000,000**						100 %	**0**	
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Daerah				48 Perangkat Daerah	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	48 Perangkat Daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
										TOTAL	**33,302,312,420**							**330,000,000**	

Dinas Koperasi dan UKM

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**21,446,997,800**							**26,693,737,800**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Meningkatnya perencanaan, penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Prosentase meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**16,046,997,800**						100 Persen 100 Persen	**16,743,737,800**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**550,100,000**						100 persen	**738,680,800**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Kali	330,100,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	3 Kali	330,100,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	6 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	12 Laporan	108,580,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah meningkat	persen		persen	100 persen	**11,165,057,000**						100 persen	**11,315,057,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	9,844,357,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	14 Bulan	9,844,357,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Bulan	946,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	13 Bulan	946,660,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Orang/Bulan	224,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	12 Orang/Bulan	224,040,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	1 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	4 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**130,000,000**						100 persen	**100,000,000**	
2	17	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0		100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**2,153,580,800**						100 persen	**2,560,000,000**	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Tahun	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,043,580,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Paket	1,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0		200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Paket	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0		20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0		150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	80 Laporan	1,100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	aset tidak berwujud tersedia Prosentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	**90,000,000**						100 persen 100 persen	**0**	
2	17	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Aplikasi	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	karyawan/ti Dinas koperasi dan UKM Prov.Sumsel	2 Aplikasi	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Meningkatnya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	**457,600,000**						100 persen	**630,000,000**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0		30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0		300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun	187,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Tahun	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	**1,500,660,000**						100 persen	**1,400,000,000**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	300,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	17 Unit	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Unit	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 paket	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0		1,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	- -	- persen		- persen	- - 100 persen	**100,000,000**						- - 100 persen	**150,000,000**	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terfasilitas izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	persen		persen	100 persen	**100,000,000**						100 persen	**150,000,000**	
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				20 Unit Usaha	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Koperasi	20 Unit Usaha	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	- -	- persen		- persen	- - 100 persen	**400,000,000**						- - 100 persen	**500,000,000**	
2	**17**	**03**	1.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Koperasi Binaan provinsi yang mengikuti pelatihan pemeriksaan dan pengawasan koperasi	persen		persen	100 persen	**400,000,000**						100 persen	**500,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				20 Unit Usaha	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	20 Unit Usaha	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	- 0	- persen		- persen	- - 100 persen	**400,000,000**						- - 100 persen	**500,000,000**	
2	**17**	**04**	1.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Koperasi Binaan provinsi yang mengikuti pelatihan KSP dan USP koperasi	persen		persen	100 persen	**400,000,000**						100 persen	**500,000,000**	
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi				20 Unit Usaha	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Koperasi	20 Unit Usaha	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	- -	- persen		- persen	- - 100 persen	**900,000,000**						- - 100 persen	**3,000,000,000**	
2	**17**	**05**	1.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah UKM dan Koperasi Binaan Provinsi yang dilatih	persen		persen	100 persen	**500,000,000**						100 persen	**2,200,000,000**	
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				175 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	KUKM	175 Orang	2,200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**	1.02		**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah UKM dan Koperasi Binaan Provinsi yang dilatih	persen		persen	100 persen	**400,000,000**						100 persen	**800,000,000**	
2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Meningkatnya kapasitas serta kompetensi SDM UKM				0 150 Orang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	KUKM	0 150 Orang	800,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Jumlah Koperasi binaan provinsi yang dilatih manajemen dan kelembagaan koperasinya	persen		persen	100 persen	**1,500,000,000**						100 persen	**1,300,000,000**	
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Koperasi binaan provinsi yang dilatih manajemen dan kelembagaan koperasinya	persen		persen	100 persen	**1,500,000,000**						100 persen	**1,300,000,000**	
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				20 Unit Usaha	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Koperasi	20 Unit Usaha	1,300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	- -	- persen		- persen	- - 100 persen	**600,000,000**						- - 100 persen	**2,000,000,000**	
2	**17**	**07**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah UMKM binaan provinsi yang mengikuti pelatihan	persen		persen	100 persen	**600,000,000**						100 persen	**2,000,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				350 Unit Usaha	600,000,000	Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	UMKM	350 Unit Usaha	2,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	- -	- persen		- persen	- - 100 persen	**1,500,000,000**						- - 100 persen	**2,500,000,000**	
2	**17**	**08**	1.01		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	Jumlah UMKM yang dibina	persen		persen	100 persen	**1,500,000,000**						100 persen	**2,500,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				30 Unit Usaha	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	UMKM	30 Unit Usaha	2,500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
										TOTAL	**21,446,997,800**							**26,693,737,800**	

Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**25,675,932,540**							**33,616,632,500**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai	persen		persen	100 persen	**22,425,932,540**						100 persen	**28,578,440,000**	
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	persen		persen	100 persen	**335,000,000**						100 persen	**355,000,000**	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP	2 Dokumen	220,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun				1 dokumen	25,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	kantor DPMPTSP	1 dokumen	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun				1 dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP	1 dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun				0 Dokumen 1 dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP	0 Dokumen 1 dokumen	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun				7 laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP	7 laporan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun				4 laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP	4 laporan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan administrasi keuangan yang terlaksana	persen		persen	100 persen	**19,958,790,000**						100 persen	**20,403,330,000**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan 100 persen	18,721,460,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	ASN DPMPTSP Prov. Sumsel	0 Orang/ Bulan 100 persen	19,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga pendukung Adm perkantoran yang terbayar jasanya setiap bulan selama 1 tahun				0 Dokumen 33 orang	1,119,690,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	ASN DPMPTSP Prov. Sumsel	0 Dokumen 33 orang	798,330,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan terbayarnya jasa 2 org pengelola adm keuangan Jumlah bulan terbayarnya jasa 2 org pengelola adm keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 orang 84 bulan 0 Dokumen	92,640,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	ASN DPMPTSP Prov. Sumsel	7 orang 84 bulan 0 Dokumen	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan 0 Laporan	10,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	ASN DPMPTSP Prov. Sumsel	1 laporan 0 Laporan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporang keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 laporan 0 Laporan	15,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	ASN DPMPTSP Prov. Sumsel	18 laporan 0 Laporan	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	persen		persen	100 persen	**50,000,000**						100 persen	**400,000,000**	
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal, diklat/kursus Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang 0 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	ASN DPMPTSP Prov. Sumsel	2 orang 0 Orang	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum yang tercapai	persen		persen	100 persen	**930,142,540**						100 persen	**1,433,000,000**	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 tahun	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	pegawai DPMPTSP	1 tahun	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				0 Paket 10 unit	150,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	pegawai DPMPTSP	0 Paket 10 unit	205,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi penyediaan makan dan minum untuk rapat/tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah pcs tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah unit tersedianya peralatan dan jumlah pcs bahan pembersih yang tersedia				1 tahun 0 Paket 1 tahun 200 buah	219,142,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	pegawai DPMPTSP	1 tahun 0 Paket 1 tahun 200 buah	228,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun 0 Paket	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	pegawai DPMPTSP	1 tahun 0 Paket	90,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2160 Dokumen	11,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	pegawai DPMPTSP	2160 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuansi koordinasi dan konsultansi yang diikuti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun 0 Laporan	420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	pegawai DPMPTSP	1 tahun 0 Laporan	850,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	persen		persen	100 persen	**662,000,000**						100 persen	**657,400,000**	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersediaJumlah surat yang diproses dan benda pos yang tersedia				400 dokumen/surat	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP Prov. Sumsel	400 dokumen/surat	12,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, PDAM, dan listrik yang dibayar				48 kwitansi rekening	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP Prov. Sumsel	48 kwitansi rekening	450,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi terbayarnya jasa tutor SKJ Frekwensi tersedianya jasa kebersihan gedung kantor				1 tahun 1 tahun	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP Prov. Sumsel	1 tahun 1 tahun	195,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	persen		persen	100 persen	**490,000,000**						100 persen	**4,394,710,000**	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dan tersedia operasionalnya 5R2; 10R4				0 Unit 1 tahun	330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP Prov. Sumsel	0 Unit 1 tahun	426,108,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah sarana jaringan yang dipelihara				1 tahun 0 Unit 2 jaringan	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	kantor DPMPTSP Prov. Sumsel	1 tahun 0 Unit 2 jaringan	160,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Tercapainya persentase pertumbuhan investasi Penanaman Modal	%		%	7 %	**900,000,000**						7 %	**1,365,000,000**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Tingkat capaian penetapan fasilitas / insentif penanaman modal daerah	persen		persen	100 persen	**150,000,000**						100 persen	**150,000,000**	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 dokumen regulasi	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Kab/ Kota di Sumatera Selatan	1 dokumen regulasi	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	tingkat capaian pembuatan pembuatan peta potensi investasi provinsi	persen		persen	100 persen	**750,000,000**						100 persen	**1,215,000,000**	
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				2 Dokumen	60,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	para pelaku usaha / UMKM	2 Dokumen	120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	jumlah Paket Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi tersedianya peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi				2 paket 0 Dokumen 3 Dokumen 2 dokumen kajian	690,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	para pelaku usaha / UMKM	2 paket 0 Dokumen 3 Dokumen 2 dokumen kajian	1,095,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	nilai realisasi investasi PMA dan PMDN Peningkatan Investasi	Angka 15 %		Angka 0 %	20,47 Angka 12 %	**750,000,000**						20,47 Angka 12 %	**1,603,192,500**	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	dokumen		dokumen	1 dokumen	**750,000,000**						1 dokumen	**1,603,192,500**	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen bahan promosi yang siap ditawarkan untuk pelaksanaan promosi PM yang menjadi kewenangan provinsi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen 0 Dokumen	326,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	investor	1 Dokumen 0 Dokumen	756,630,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen 0 Dokumen	423,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	investor	1 Dokumen 0 Dokumen	846,562,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	perizinan dan non perizinan 100 %		perizinan dan non perizinan 0 %	675 perizinan dan non perizinan 100 %	**625,000,000**						675 perizinan dan non perizinan 100 %	**1,145,000,000**	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	perizinan		perizinan	675 perizinan	**625,000,000**						675 perizinan	**1,145,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP pelaku usaha yang memahami aplikasi perizinan Pelaku usaha yang menggunakan peta digital sebaran perizinan dan non perizinan				0 Pelaku Usaha 675 izin dan non izin 100 pelaku usaha 300 pelaku usaha	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	para pelaku usaha	0 Pelaku Usaha 675 izin dan non izin 100 pelaku usaha 300 pelaku usaha	660,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan				150 orang	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	para pelaku usaha	150 orang	485,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Tercapainya nilai realisasi Invesasi PMA dan PMDN	triliyun rupiah		triliyun rupiah	30,26 triliyun rupiah	**850,000,000**						30,26 triliyun rupiah	**800,000,000**	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha	persen		persen	95 persen	**850,000,000**						95 persen	**800,000,000**	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah LKPM online perusahaan yang di pantau				0 Kegiatan usaha 1500 LKPM	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	para investor / pelaku usaha	0 Kegiatan usaha 1500 LKPM	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				180 Pelaku Usaha	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	para investor / pelaku usaha	180 Pelaku Usaha	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Perusahaan yang di awasi dengan mekanisme / Pelaksanaan BAP				0 Kegiatan usaha 60 BAP	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	para investor / pelaku usaha	0 Kegiatan usaha 60 BAP	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	tercapainya rasio tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal	angka		angka	1 angka	**125,000,000**						1 angka	**125,000,000**	
2	**18**	**06**	1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase capaian tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Npn Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	persen		persen	100 persen	**125,000,000**						100 persen	**125,000,000**	
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	DPMPTSP kab/kota	5 Dokumen	125,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
										TOTAL	**25,675,932,540**							**33,616,632,500**	

Dinas Pemuda & Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**76,149,039,400**							**88,963,134,900**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**27,262,435,000**						100 %	**21,841,181,000**	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Monev) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan LKPJ, LPPD, LKjIP, E-Monev, E-Sakip, E-Performace, E-RPJMD, Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, Laporan Manajeman Peta Risiko, Laporan SPIP dan Profil Pemuda dan Keolahragaan)	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 60 Laporan 12 Laporan	**465,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 60 Laporan 12 Laporan	**770,000,000**	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Monev)				0 Laporan 60 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	0 Laporan 60 Laporan	300,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan LKPJ, LPPD, LKjIP, E-Monev, E-Sakip, E-Performace, E-RPJMD, Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, Laporan Manajeman Peta Risiko, Laporan SPIP dan Profil Pemuda dan Keolahragaan)				0 Laporan 12 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	0 Laporan 12 Laporan	150,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indicator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan Orang/Bulan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan Orang/Bulan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 162 Orang/Bulan	**15,452,035,000**						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 162 Orang/Bulan	**14,076,181,000**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang	11,256,409,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	72 Orang	9,788,555,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				93 Dokumen	3,806,626,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	93 Dokumen	3,806,626,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	306,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	306,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Laporan	45,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan 1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	0 Laporan 1 Dokumen	45,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	0 Dokumen 1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Gedung Laporan Laporan		Gedung Laporan Laporan	1 Gedung 2 Laporan 2 Laporan	**120,000,000**						1 Gedung 2 Laporan 2 Laporan	**140,000,000**	
2	19	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	2 Laporan	10,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang Paket Orang		Orang Paket Orang	6 Orang 200 Paket 10 Orang	**80,000,000**						6 Orang 200 Paket 10 Orang	**290,000,000**	
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 10 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	0 Orang 10 Orang	50,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	30,000,000				Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	6 Orang	40,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indicator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Dokumen Laporan Laporan Jenis ATK Paket Jenis Bahan Cetak Paket Paket		Dokumen Dokumen Laporan Laporan Jenis ATK Paket Jenis Bahan Cetak Paket Paket	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 30 Jenis ATK 1 Paket 10 Jenis Bahan Cetak 1 Paket 30 Paket	**905,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 30 Jenis ATK 1 Paket 10 Jenis Bahan Cetak 1 Paket 30 Paket	**975,000,000**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Paket	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	30 Paket	50,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	30 Paket	140,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	10 Paket	50,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Paket 0 Paket	50,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan 1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	0 Laporan 1 Laporan	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Laporan	400,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	**5,000,000,000**						1 Unit	**3,000,000,000**	
2	19	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	3 Unit	2,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				6 Paket	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	6 Paket	1,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	**1,175,000,000**						1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	**1,240,000,000**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Laporan	25,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Laporan	400,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Laporan	815,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Venue Olahraga yang dipelihara	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	**4,065,400,000**						1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	**1,350,000,000**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Unit	300,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	0 Unit 1 Unit	50,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas Jumlah Venue Olahraga yang dipelihara				1 Unit 1 Venue	3,715,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kantor OPD	1 Unit 1 Venue	1,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	27 OKP 13012 Orang 200 Orang 100 %		0 OKP 0 Orang 0 Orang 0 %	25 OKP 2811 Orang 40 Orang 100 %	**5,067,395,480**						25 OKP 2811 Orang 40 Orang 100 %	**8,508,344,980**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aaksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi yang Menerima penghargaan Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang Terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Kreativitas Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemuda Peduli Lingkungan Asri	Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang		Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang	20 Orang 400 Orang 10 Orang 250 Orang 250 Orang 50 Orang 100 Orang 500 Orang 75 Orang 100 Orang 6 Orang 400 Orang	**4,592,395,480**					20 Orang 400 Orang 10 Orang 250 Orang 250 Orang 50 Orang 100 Orang 500 Orang 75 Orang 100 Orang 6 Orang 400 Orang	**7,308,344,980**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						dan Bersih (Pepelingasih) Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyuluhan IMTAQ/IPTEK Kepemudaan tentang Stunting Jumlah Peserta yang Mengikuti Perlombaan IPTEK/IMTAQ Kepemudaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan													
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	171,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	10 Orang	188,100,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Kreativitas Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang 200 Orang 10 Orang	926,440,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	100 Orang 200 Orang 10 Orang	1,479,294,480	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Peserta yang Mengikuti Jambore Paskibraka Jumlah Peserta yang Mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) Jumlah Peserta yang Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyuluhan IMTAQ/IPTEK Kepemudaan tentang Stunting Jumlah Peserta yang Mengikuti Perlombaan IPTEK/IMTAQ Kepemudaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)				0 Orang 400 Orang 400 Orang 20 Orang 250 Orang 100 Orang 500 Orang 75 Orang 100 Orang 6 Orang	1,175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	0 Orang 400 Orang 400 Orang 20 Orang 250 Orang 100 Orang 500 Orang 75 Orang 100 Orang 6 Orang	2,904,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang Terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				0 Orang 70 Orang	1,669,955,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	0 Orang 70 Orang	1,836,950,500	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				6 OKP	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	6 OKP	300,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan Jumlah Orang Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi yang Menerima penghargaan				0 Dokumen 40 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	0 Dokumen 40 Orang	400,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	1.01	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aaksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi				1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	1 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indicator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**02**	1.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Profil Organisasi Kepemudaan Jumlah Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan di Kab/Kota Jumlah Pemuda yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan bagi OKP Jumlah Penyelenggaraan Rapat-rapat bagi Organisasi Kepemudaan Jumlah Peserta Komunitas Pemuda yang Teridentifikasi di Sumatera Selatan Jumlah Peserta Lomba Lintas Alam Jumlah Peserta yang Mengikuti FGD Kepemudaan dan Kepramukaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Lokakarya Komunitas Pemuda Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop Organisasi Kepemudaan & Kepramukaan	Dokumen Kab/Kota Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang		Dokumen Kab/Kota Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang	1 Dokumen 17 Kab/Kota 100 Orang 100 Orang 200 Orang 200 Orang 100 Orang 150 Orang 100 Orang	**475,000,000**						1 Dokumen 17 Kab/Kota 100 Orang 100 Orang 200 Orang 200 Orang 100 Orang 150 Orang 100 Orang	**1,200,000,000**	
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi Jumlah Pemuda yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan bagi OKP Jumlah Peserta Komunitas Pemuda yang Teridentifikasi di Sumatera Selatan Jumlah Peserta Lomba Lintas Alam Jumlah Peserta yang Mengikuti Lokakarya Komunitas Pemuda				0 Dokumen 100 Orang 0 Orang 200 Orang 150 Orang	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	0 Dokumen 100 Orang 0 Orang 200 Orang 150 Orang	1,200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah atlet berprestasi Jumlah medali atlet muda Sumsel Jumlah pelatih yang bersertifikat Jumlah pembinaan atlet muda Jumlah pembinaan cabang olahraga Jumlah Prestasi Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	55 Orang 40 Medali Emas 25 Orang 267 Orang 42 Orang 20 Cabor 100 %		0 Orang 0 Medali Emas 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Cabor 0 %	50 Orang 37 Medali Emas 25 Orang 262 Orang 42 Orang 18 Cabor 100 %	**38,819,208,920**						50 Orang 37 Medali Emas 25 Orang 262 Orang 42 Orang 18 Cabor 100 %	**49,534,608,920**	
2	**19**	**03**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah Atlet PPLP yang difasilitasi Jumlah Atlet SONS yang difasilitasi Jumlah cabang olahraga di SONS yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Cabor POPNAS yang mendapatkan peralatan Jumlah Cabor yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Infrastruktur Olahraga/ Venue Kab/Kota se Sumatera Selatan yang di Standarisasi Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Club/ Badan/ Organisasi yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Peralatan Olahraga untuk Stadion Bumi Sriwijaya Jumlah Peserta Olahraga Cheerleaders dalam 1 Tahun Jumlah Peserta Olahraga Massal dalam 1 Tahun Jumlah Peserta Olahraga Street Soccer dalam 1 Tahun Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk PPLP	Orang Orang Cabor Cabor Cabor Kab/Kota Kelompok Masyarakat Venue Orang Orang Orang Paket		Orang Orang Cabor Cabor Cabor Kab/Kota Kelompok Masyarakat Venue Orang Orang Orang Paket	30 Orang 200 Orang 12 Cabor 40 Cabor 2 Cabor 17 Kab/Kota 5 Kelompok Masyarakat 1 Venue 500 Orang 1000 Orang 500 Orang 8 Paket	**7,750,000,000**						30 Orang 200 Orang 12 Cabor 40 Cabor 2 Cabor 17 Kab/Kota 5 Kelompok Masyarakat 1 Venue 500 Orang 1000 Orang 500 Orang 8 Paket	**5,200,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet PPLP yang difasilitasi Jumlah Atlet SONS yang di fasilitasi Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				30 Orang 200 Orang 1 Unit	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	30 Orang 200 Orang 1 Unit	900,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Jumlah Peserta Olahraga Cheerleaders dalam 1 Tahun Jumlah Peserta Olahraga Massal dalam 1 Tahun Jumlah Peserta Olahraga Street Soccer dalam 1 Tahun				0 Dokumen 0 Orang 1000 Orang 500 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	0 Dokumen 0 Orang 1000 Orang 500 Orang	600,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah cabang olahraga di SONS yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Cabor POPNAS yang mendapatkan peralatan Jumlah Cabor yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Infrastruktur Olahraga/ Venue Kab/Kota se Sumatera Selatan yang di Standarisasi Jumlah Masyarakat/ Kelompok/ Club/ Badan/ Organisasi yang mendapatkan peralatan olahraga Jumlah Peralatan Olahraga untuk Stadion Bumi Sriwijaya Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk PPLP				12 Cabor 40 Cabor 2 Cabor 17 Kab/Kota 5 club/masyarakat 1 Venue 0 Unit 8 Paket	6,650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	12 Cabor 40 Cabor 2 Cabor 17 Kab/Kota 5 club/masyarakat 1 Venue 0 Unit 8 Paket	3,700,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	Jumlah kontingen Sumatera Selatan pada FORNAS VII					**14,669,208,920**							**24,034,608,920**	
						Jumlah peserta Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (FORPROV)													
						Jumlah peserta Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (FORPROV)													
						Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Atletik Gubernur Cup	Orang		Orang	300 Orang							300 Orang		
						Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Balap Sepeda Gubernur Cup	Orang		Orang	1000 Orang							1000 Orang		
						Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Bulu Tangkis Gubernur Cup	Orang		Orang	2000 Orang							2000 Orang		
						Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Senam Gubernur Cup	Event		Event	1 Event							1 Event		
						Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Tenis Meja Gubernur Cup	Event		Event	1 Event							1 Event		
						Jumlah peserta Turnamen Sepakbola Piala OPD	Event		Event	1 Event							1 Event		
						Jumlah Peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional	Event		Event	1 Event							1 Event		
						Jumlah Peserta yang mengikuti Piala Dunia U-20 FIFA 2023	Event		Event	1 Event							1 Event		
						Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelengaraan Kejuaraan dalam Multin Event dan Single Event	Event		Event	1 Event							1 Event		
							Tim		Tim	48 Tim							48 Tim		
							Orang		Orang	30 Orang							30 Orang		
							Event		Event	1 Event							1 Event		
							Event		Event	1 Event							1 Event		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indicator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi Jumlah peserta Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (FORPROV) Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Atletik Gubernur Cup Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Balap Sepeda Gubernur Cup Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Bulu Tangkis Gubernur Cup Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Senam Gubernur Cup Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah Tenis Meja Gubernur Cup Jumlah Peserta Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Nasional (PEPAPERNAS) Jumlah peserta Turnamen Sepakbola Piala OPD				0 Dokumen 1000 Orang 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 2000 Orang 48 Tim	8,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	0 Dokumen 1000 Orang 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 2000 Orang 48 Tim	9,300,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah kontingen Sumatera Selatan pada FORNAS VII Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Jumlah Peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional Jumlah Peserta yang mengikuti Piala Dunia U-20 FIFA 2023 Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelengaraan Kejuaraan dalam Multin Event dan Single Event				300 Orang 0 Orang 30 Orang 1 Event 1 Event	6,369,208,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	300 Orang 0 Orang 30 Orang 1 Event 1 Event	14,734,608,920	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	Jumlah Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang Dibina Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang Orang		Orang Orang	100 Orang 18 Orang	**850,000,000**						100 Orang 18 Orang	**850,000,000**	
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Jumlah Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang Dibina Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Selatan				0 Orang 100 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	0 Orang 100 Orang	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan				18 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	18 Orang	350,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Hibah KONI Hibah NPCI Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Jumlah Peserta Pelatihan Gizi Olahraga Jumlah Peserta Pelatihan Industri Olahraga Jumlah Peserta Pelatihan Pelatih Fisik Cabor Jumlah Peserta Pelatihan Wasit Sepakbola	Tahun Tahun Dokumen Orang Orang Orang Orang		Tahun Tahun Dokumen Orang Orang Orang Orang	1 Tahun 1 Tahun 6 Dokumen 25 Orang 50 Orang 25 Orang 35 Orang	**15,550,000,000**						1 Tahun 1 Tahun 6 Dokumen 25 Orang 50 Orang 25 Orang 35 Orang	**19,450,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	HIBAH KONI HIBAH NPCI Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Peserta Pelatihan Gizi Olahraga Jumlah Peserta Pelatihan Industri Olahraga Jumlah Peserta Pelatihan Pelatih Fisik Cabor Jumlah Peserta Pelatihan Wasit Sepakbola				1 Tahun 1 Tahun 0 Dokumen 25 Orang 0 Orang 25 Orang 35 Orang	15,450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	1 Tahun 1 Tahun 0 Dokumen 25 Orang 0 Orang 25 Orang 35 Orang	19,200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen CSR Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				6 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	6 Dokumen 0 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Aktifitas Kepramukaan	100 %		0 %	100 %	**5,000,000,000**						100 %	**9,079,000,000**	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah Peserta yang Mengikuti Panca Lomba Kepramukaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Perkemahan Sabtu Minggu (PERSAMI) Jumlah Peserta yang Mengikuti RAKOR Kepramukaan bagi OPD Provinsi & Kabupaten/Kota	Orang Orang Orang		Orang Orang Orang	150 Orang 150 Orang 75 Orang	**5,000,000,000**						150 Orang 150 Orang 75 Orang	**9,079,000,000**	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				0 Organisasi	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Palembang	0 Organisasi	9,079,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
										TOTAL	**76,149,039,400**							**88,963,134,900**	

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**38,145,288,100**							**55,571,770,450**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**26,507,768,600**							**33,814,270,450**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**115,000,000**							**202,500,000**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		3 Dokumen	22,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	180,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,762,768,600**							**23,414,270,450**	
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	15,542,542,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	15,931,105,550	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5,210,226,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	7,468,164,900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	15,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**150,000,000**							**350,000,000**	
2	22	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Orang	350,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,475,000,000**							**3,225,000,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Paket	300,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Paket	300,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket	300,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	2,175,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**550,000,000**							**825,000,000**	
2	22	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	825,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,455,000,000**							**2,197,500,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	22,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	1,800,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	375,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,000,000,000**							**3,600,000,000**	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Unit	1,750,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	450,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Yang direhab Terpeliharanya Gedung Kantor DISBUDPAR Terpeliharanya Instalasi Listrik di Bukit Siguntang				1 Unit 2 Unit 1 Gedung 12 Bulan 1 Kegiatan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit 2 Unit 1 Gedung 12 Bulan 1 Kegiatan	900,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan Jumlah warisan budaya tak benda (WBTB) yang ditetapkan	700 OPK 44 Sertifikat		0 OPK 0 Sertifikat	650 OPK 40 Sertifikat	**5,787,519,500**						650 OPK 40 Sertifikat	**9,700,000,000**	
2	**22**	**02**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan Jumlah warisan budaya tak benda (WBTB) yang ditetapkan	OPK Sertivikat		OPK Sertivikat	650 OPK 40 Sertivikat	**3,912,519,500**						650 OPK 40 Sertivikat	**5,725,000,000**	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				700 Objek	3,812,519,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	700 Objek	5,575,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				44 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	44 Orang	150,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**02**	1.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**						**1,725,000,000**							**3,525,000,000**	
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	1,725,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Objek	3,525,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**150,000,000**							**450,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Objek	450,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah pergelaran seni	13 Kali		0 Kali	12 Kali	**375,000,000**						12 Kali	**1,612,500,000**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pergelaran seni	Kali		Kali	12 Kali	**375,000,000**						12 Kali	**1,612,500,000**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				100 Orang	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	100 Orang	112,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Seniman Sumsel Peningkatan Kapasitas Seniman Sumsel				5 Lembaga 12 Lembaga 6 Cabang Seni 10 Provinsi	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Lembaga 12 Lembaga 6 Cabang Seni 10 Provinsi	1,500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**100,000,000**							**800,000,000**	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**						**100,000,000**							**800,000,000**	
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				2 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	800,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	850 Cagar Budaya 12 SK Penetapan		0 Cagar Budaya 0 SK Penetapan	750 Cagar Budaya 10 SK Penetapan	**225,000,000**						750 Cagar Budaya 10 SK Penetapan	**720,000,000**	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya SK Penetapan		Cagar Budaya SK Penetapan	750 Cagar Budaya 10 SK Penetapan	**150,000,000**						750 Cagar Budaya 10 SK Penetapan	**570,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				850 Objek	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	850 Objek	495,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				12 Objek	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Objek	75,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**						**75,000,000**							**150,000,000**	
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Orang	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 Orang	150,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah kunjungan museum	102892 Orang		0 Orang	85743 Orang	**5,150,000,000**						85743 Orang	**8,925,000,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Jumlah Kunjungan Museum	Orang		Orang	85743 Orang	**5,150,000,000**						85743 Orang	**8,925,000,000**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				28 Unit	4,550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	28 Unit	7,425,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				7 Unit	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Unit	1,500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**9,820,000,000**							**23,135,000,000**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah destinasi wisata religi yang dikembangkan	14 Orang		0 Orang	11 Orang	**2,100,000,000**						11 Orang	**4,362,500,000**	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Jumlah destinasi wisata religi yang dikembangkan	Orang		Orang	11 Orang	**875,000,000**						11 Orang	**2,700,000,000**	
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1 Lokasi	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Lokasi	450,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1 Dokumen	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	1,875,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	3 Lokasi	300,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**						**700,000,000**							**875,000,000**	
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				2 Laporan	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	875,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**02**	1.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**						**525,000,000**							**787,500,000**	
3	26	02	1.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		2 Dokumen	525,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		1 Dokumen	112,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		1 Laporan	150,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah wisatawan nusantara	8903 Orang 904503 Orang		0 Orang 0 Orang	8479 Orang 861431 Orang	**6,970,000,000**						8479 Orang 861431 Orang	**17,347,500,000**	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah wisatawan nusantara	Orang Orang		Orang Orang	8479 Orang 861431 Orang	**6,970,000,000**						8479 Orang 861431 Orang	**17,347,500,000**	
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	1,145,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Dokumen	2,572,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Laporan	3,725,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	8 Laporan	9,150,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				6 Dokumen	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	6 Dokumen	5,325,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**200,000,000**							**300,000,000**	
3	**26**	**04**	1.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**						**200,000,000**							**300,000,000**	
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		1 Laporan	300,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten	855 Peserta		0 Peserta	855 Peserta	**550,000,000**						855 Peserta	**1,125,000,000**	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten	Peserta		Peserta	855 Peserta	**550,000,000**						855 Peserta	**1,125,000,000**	
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya				400 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	400 Orang	225,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan				100 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	100 Orang	450,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	50 Orang	225,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				250 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	250 Orang	225,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
										TOTAL	**47,965,288,100**							**78,706,770,450**	

Dinas Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERITAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**23**				**URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**20,828,179,002**							**40,890,862,000**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlayani	%		%	100 %	**19,134,640,000**						100 %	**35,105,362,000**	
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**35,000,000**						2 Dokumen	**275,000,000**	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	35,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Dokumen	225,000,000	Dinas Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN/TKS/TKPD yang Mendapat Honor/Insentif/Gaji	Orang		Orang	105 Orang	**16,818,940,000**						105 Orang	**16,726,362,000**	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	15,802,292,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN, TKS, TKPD, Pengelola Keuangan	73 Orang/ Bulan	15,802,292,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	993,648,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN, TKS, TKPD, Pengelola Keuangan	1 Dokumen	841,470,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	23,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN, TKS, TKPD, Pengelola Keuangan	1 Dokumen	57,600,000	Dinas Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lamanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	**599,000,000**						12 Bulan	**1,079,000,000**	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Paket	75,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Paket	200,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makanan dan Minuman)				2 Paket	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	2 Paket	310,000,000	Dinas Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan serta Paket Cerak Publikasi Perpustakaan				2 Paket	65,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	2 Paket	120,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	24,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	10 Dokumen	24,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Laporan	350,000,000	Dinas Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kendaraan, Mebel, Unit Gedung, Unit Sarana dan Prasarana Yang Disediakan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	**808,500,000**						4 Sub Kegiatan	**15,800,000,000**	
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	505,050,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Paket	300,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Jenis	303,450,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	8 Jenis	500,000,000	Dinas Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	**618,200,000**						12 Bulan	**585,000,000**	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	420,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Laporan	425,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum (Jasa Publikasi Media Cetak dan Media Online) Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan 0 Laporan	193,200,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	2 Laporan 0 Laporan	150,000,000	Dinas Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rehabilitasi Terhadap Kendaraan, Sarana Prasarana	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	**255,000,000**						4 Sub Kegiatan	**590,000,000**	
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	70,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Unit	125,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	150,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	15 Unit	200,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	35,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	4 Unit	90,000,000	Dinas Perpustakaan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Skala Nilai		Skala Nilai	63,50 Skala Nilai	**1,618,539,002**						63,50 Skala Nilai	**4,960,000,000**	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Pengembangan Kelembagaan, SDM, Koleksi, dan Budaya Baca	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	**781,387,002**						5 Sub Kegiatan	**2,660,000,000**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service				1 Pojok Baca	150,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	1 Pojok Baca	700,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan 40 Perpustakaan	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	0 Perpustakaan 40 Perpustakaan	360,000,000	Dinas Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				40 Orang	67,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	40 Orang	450,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				4928 Eksemplar	399,387,002	Kota Palembang, Ilir Barat I, Lorok Pakjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	4928 Eksemplar	900,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				2 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kantor OPD	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Perpustakaan
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Sosialisasi Budaya Baca	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**837,152,000**						1 Sub Kegiatan	**2,300,000,000**	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Lokus	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	1 Lokus	550,000,000	Dinas Perpustakaan
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				12 Perpustakaan	637,152,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat	12 Perpustakaan	1,750,000,000	Dinas Perpustakaan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks		Indeks	13,50 Indeks	**75,000,000**						13,50 Indeks	**825,500,000**	
2	**23**	**03**	1.03		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	Pelestarian dan Perawatan Bahan Pustaka	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	**75,000,000**						1 Sub Kegiatan	**185,500,000**	
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				850 Eksemplar	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	-	850 Eksemplar	185,500,000	Dinas Perpustakaan
										TOTAL	**20,828,179,002**							**40,890,862,000**	

Dinas Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**14,314,353,900**							**18,927,561,880**	
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**13,514,353,900**						100 %	**16,577,561,880**	
2	**24**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terususun Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun Jumlah DPA-SKPD yang tersusun Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang tersusun Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Buku Buku Buku Buku %		Buku Buku Buku Buku %	10 Buku 10 Buku 10 Buku 400 Buku 100 %	**58,920,441**						10 Buku 10 Buku 10 Buku 400 Buku 100 %	**58,920,441**	
2	24	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun				10 Buku	6,348,912	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	10 Buku	6,348,912	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun				10 Buku	6,511,250	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	10 Buku	6,511,250	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun				10 Buku	6,529,654	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	10 Buku	6,529,654	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Buku	6,180,625	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	10 Buku	6,180,625	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang tersusun				400 Buku	33,350,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	400 Buku	33,350,000	Dinas Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Gaji ASN dan Tunjangan yang tersedia Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan dan Barang Jumlah Tenaga Kebersihan, Sopir dan Keamanan Jumlah Tenaga Operator Komputer Jumlah TKPD Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan Orang Orang Orang Orang %		Bulan Orang Orang Orang Orang %	13 Bulan 10 Orang 8 Orang 10 Orang 5 Orang 100 %	**10,552,839,000**						13 Bulan 10 Orang 8 Orang 10 Orang 5 Orang 100 %	**10,714,630,000**	
2	24	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia				13 Bulan	9,838,209,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	13 Bulan	10,000,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Tenaga Operator Komputer Jumlah Tenaga Sopir Jumlah Tenaga TKPD				10 Orang 1 Orang 6 Orang 10 Orang 1 Orang 3 Orang	714,630,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	10 Orang 1 Orang 6 Orang 10 Orang 1 Orang 3 Orang	714,630,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang Orang Orang		Orang Orang Orang	120 Orang 20 Orang 150 Orang	**280,000,000**						120 Orang 20 Orang 150 Orang	**650,000,000**	
2	24	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat				20 Orang	115,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD, LKD Kab/kota, Ormas/Orpol	20 Orang	200,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				50 Orang	65,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD, LKD Kab/kota, Ormas/Orpol	50 Orang	200,000,000	Dinas Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek				50 Orang	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD, LKD Kab/kota, Ormas/Orpol	50 Orang	250,000,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia Jumlah Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan yang tersedia Jumlah Barang Cetakan Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia Jumlah Penggandaan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana	Buah Set Buah Jenis Porsi Lembar Jenis Kali		Buah Set Buah Jenis Porsi Lembar Jenis Kali	1500 Buah 38 Set 200 Buah 30 Jenis 2000 Porsi 100000 Lembar 30 Jenis 75 Kali	**824,356,396**						1500 Buah 38 Set 200 Buah 30 Jenis 2000 Porsi 100000 Lembar 30 Jenis 75 Kali	**1,598,086,439**	
2	24	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia				30 Jenis	95,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	30 Jenis	120,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia				30 Jenis ATK	115,229,807	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	30 Jenis ATK	200,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia				38 Set 2000 Porsi	207,290,689	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	38 Set 2000 Porsi	300,078,689	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan				200 Buah 100000 lembar	105,537,610	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	200 Buah 100000 lembar	303,007,750	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				1000 Surat Kahabar	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	1000 Surat Kahabar	25,000,000	Dinas Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara				0 Laporan 65 kali	291,298,290	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	0 Laporan 65 kali	650,000,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Mobil Jenis		Unit Mobil Jenis	1 Unit Mobil 11 Jenis	**108,384,002**						1 Unit Mobil 11 Jenis	**1,200,000,000**	
2	24	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Jenis 0 Unit	108,384,002	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	11 Jenis 0 Unit	325,000,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terlaksana Jumlah Tagihan Telepon, Internet, Air dan Listrik Jumlah Tersedianya Tutor SKJ	Kali Bulan Bulan		Kali Bulan Bulan	100 Kali 12 Bulan 11 Bulan	**615,700,000**						100 Kali 12 Bulan 11 Bulan	**780,925,000**	
2	24	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terlaksana				100 kali	15,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	100 kali	15,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air Jumlah Tagihan Internet Jumlah Tagihan Listrik Jumlah Tagihan telepon				3000 M/3 Air 12 Bulan Internet 180000 Kwh Listrik 12 Bulan	587,500,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	3000 M/3 Air 12 Bulan Internet 180000 Kwh Listrik 12 Bulan	752,725,000	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tersedianya tutor SKJ				11 Bulan	13,200,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	11 Bulan	13,200,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	1 Unit 14 Unit 60 Unit	**1,074,154,061**						1 Unit 14 Unit 60 Unit	**1,575,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan Pajak yang dibayar Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan Pajak yang dibayar				5 unit R2 9 Unit R4	475,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	5 unit R2 9 Unit R4	675,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara				20 Tabung 60 Unit	400,179,061	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	20 Tabung 60 Unit	450,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara				1 Gedung	198,975,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	1 Gedung	450,000,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang Mengelola Arsip secara Baku Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggung Jawaban Nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undan-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 % 100 %		0 % 0 %	85 % 100 %	**625,000,000**						85 % 100 %	**2,050,000,000**	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan Digunakan Jumlah Arsip Dinamis yang dipelihara dan disusutkan Jumlah OPD dan LKD Kab/Kota yang dimonitoring	Lembar Lembar Lembar		Lembar Lembar Lembar	1500 Lembar 1500 Lembar 1500 Lembar	**275,000,000**						1500 Lembar 1500 Lembar 1500 Lembar	**825,000,000**	
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan digunakan				1500 lembar	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	1500 lembar	225,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang dipelihara dan disusutkan				1500 lembar	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	1500 lembar	250,000,000	Dinas Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah LKD yang di Monitoring Jumlah OPD yang di Monitoring				17 Kab/Kota 49 OPD	175,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	17 Kab/Kota 49 OPD	350,000,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**02**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan diakses	Lembar		Lembar	1500 Lembar	**100,000,000**						1500 Lembar	**275,000,000**	
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip Statis yang di Akusisi, diolah, dipreservasi dan diakses				1500 lembar	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD, LKD Kab/Kota, Masyarakat	1500 lembar	275,000,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Jumlah Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan yang diberdayakan kapasitanya	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	500 Dokumen 500 Dokumen	**250,000,000**						500 Dokumen 500 Dokumen	**950,000,000**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Informasi yang tersedia Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Pengguna yang berkunjung ke Website				500 Berita/Dokumen 0 Pengguna 500 Orang	150,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD, LKD Kab/Kota, Ormas/Orpol, Masyarakat	500 Berita/Dokumen 0 Pengguna 500 Orang	500,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang diberdayakan Kapasitasnya Jumlah Unit Kearsipan/OPD yang diberdayakan Kapasitasnya				17 LKD Kab/Kota 49 OPD	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	OPD, LKD Kab/Kota, Ormas/Orpol, Masyarakat	17 LKD Kab/Kota 49 OPD	450,000,000	Dinas Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang Bersertifikat Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	80 Orang 100 %		0 Orang 0 %	70 Orang 100 %	**175,000,000**						70 Orang 100 %	**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**03**	1.01		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	Jumlah Arsip yang dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan memiliki retensi di bawah 10 tahun	Lembar Lembar		Lembar Lembar	1500 Lembar 1500 Lembar	**175,000,000**						1500 Lembar 1500 Lembar	**300,000,000**	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan memiliki retensi di bawah 10 tahun				1500 lembar	75,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	OPD dan LKD Kab/Kota	1500 lembar	150,000,000	Dinas Kearsipan
2	24	03	1.01	02	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun				1500 lembar	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	OPD dan LKD Kab/Kota	1500 lembar	150,000,000	Dinas Kearsipan
										TOTAL	**14,314,353,900**							**18,927,561,880**	

Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**33,199,704,300**							**43,373,054,630**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**22,709,704,300**						100 %	**28,268,054,630**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	**484,000,000**						5 Dokumen	**1,340,000,000**	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah data indeks DAK kabupaten/kota jumlah data statistik pengembagan kelautan dan perikanan jumlah dokumen hasil koordinasi dengan kab/kota Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen renja jumlah sdm yang terlatih dalam hal pembangunan perencanaan kelautan dan perikanan				17 data indeks 17 data 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 15 orang	367,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	17 data indeks 17 data 1 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 15 orang	1,007,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen lakip Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 dokumen 1 Laporan	17,000,000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 dokumen 1 Laporan	32,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah data pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan kab/kota Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 data 1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	17 data 1 Laporan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	**19,445,956,000**						3 Kegiatan	**22,720,500,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah aparatur yang telah di bayar gaji dan tunjangan asn				1 tahun	16,030,956,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 tahun	19,240,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	biaya operasional tenaga pendamping petugas teknis kelautan dan perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah petugas kebersihan, penjaga keamanan kantor yang tersedia jumlah tenaga pendamping petugas teknis kelautan dan perikanan jumlah tenaga untuk kegiatan administrasi keuangan jumlah tenaga untuk kegiatan data dan informasi operasional tenaga pendamping petugas teknis kelautan dan perikanan				1 kegiatan 0 Dokumen 1 kegiatam 1 kegiatan 22 orang 2 jenis 1 kegiatan	3,398,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 kegiatan 0 Dokumen 1 kegiatam 1 kegiatan 22 orang 2 jenis 1 kegiatan	3,448,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan tahunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 dokumen 12 Laporan	17,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 dokumen 12 Laporan	32,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**70,000,000**						1 Kegiatan	**130,000,000**	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD jumlah jaminan barang milik daerah				1 Dokumen 2 jenis	70,000,000				Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 Dokumen 2 jenis	130,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**150,000,000**						1 Kegiatan	**325,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan jumlah sdm yang telah terlatih dalam hal pendidikan dan kursus keterampilan				6 Orang 1 kegiatan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	6 Orang 1 kegiatan	325,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	**1,409,748,300**						7 Kegiatan	**2,410,554,630**	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				19 jenis	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	19 jenis	195,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 kegiatan	348,748,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 kegiatan	521,254,630	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia				1 Paket 40 jenis 28 jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 Paket 40 jenis 28 jenis	325,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	151,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 Paket	196,300,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 jenis	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	2 jenis	13,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 kali	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	8 kali	260,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 tahun	900,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**800,000,000**						2 Kegiatan	**992,000,000**	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah layanan komunikasi air dan listrik pada dinas dan 3 UPTD				1 Laporan 4 jenis	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	1 Laporan 4 jenis	732,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah gedung yang dibersihkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 jenis 1 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	10 jenis 1 Laporan	260,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**350,000,000**						1 Kegiatan	**350,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				19 unit 13 unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel	19 unit 13 unit	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Luas Kawasan Konservasi	1617 Ha		0 Ha	1500 Ha	**650,000,000**						1500 Ha	**1,094,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**500,000,000**						2 Kegiatan	**844,000,000**	
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Orang yang dibinda dalam rangka penurunan Illegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi	1 Dokumen	544,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				10 Ha	200,000,000	Kab. Banyuasin, Banyuasin II, Sungsang IV	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Orang yang dibinda dalam rangka penurunan Illegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi	10 Ha	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**150,000,000**						1 Kegiatan	**250,000,000**	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang	150,000,000	Kab. Ogan Komering Ilir, Tulung Selapan, Tulung Selapan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Orang yang dibinda dalam rangka penurunan Illegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi	60 Orang	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah kapal nelayan yang dilayani Jumlah masyarakat miskin yang dibantu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nilai Tukar Nelayan (NTN)	800,00 Kapal 242,00 Orang 228000 Ton 103,00 Nilai		0 Kapal 0 Orang 0 Ton 0 Nilai	700,00 Kapal 242,00 Orang 220000 Ton 103,00 Nilai	**3,250,000,000**						700,00 Kapal 242,00 Orang 220000 Ton 103,00 Nilai	**4,300,000,000**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**2,100,000,000**						2 Kegiatan	**2,500,000,000**	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat bidang penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				200 Unit	1,800,000,000	Kab. Banyuasin, Banyuasin II, Sungsang IV	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat bidang penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	200 Unit	2,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**03**	1.04		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil**	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**150,000,000**						1 Kegiatan	**300,000,000**	
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat bidang penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	50 Rekomendasi	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**1,000,000,000**						2 Kegiatan	**1,500,000,000**	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				1 Unit	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat bidang penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	200,000,000	Kab. Banyuasin, Banyuasin II, Sungsang IV	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat bidang penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	1 Layanan	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah masyarakat miskin yang dibantu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Produksi Benur dan Nener	266,00 Orang 545000 Ton 101,96 Nilai 44000000 Ekor		0 Orang 0 Ton 0 Nilai 0 Ekor	242,00 Orang 525000 Ton 101,46 Nilai 35000000 Ekor	**5,250,000,000**						242,00 Orang 525000 Ton 101,46 Nilai 35000000 Ekor	**7,510,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**100,000,000**						1 Kegiatan	**150,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				17 Rekomendasi	100,000,000	Kota Palembang, Seberang Ulu I, Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di laut	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	**1,950,000,000**						4 Kegiatan	**2,510,000,000**	
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Dokumen	260,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	800,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana budidaya di kegiatan ketahan pangan (Waring)				120 Unit	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut	120 Unit	850,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya				30 Orang	300,000,000					Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut	30 Orang	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	1.06		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**3,200,000,000**						2 Kegiatan	**4,850,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	3,000,000,000	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Air Satan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	4,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.06	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	200,000,000	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Air Satan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat dan Stakeholder Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing	280,00 Orang		0 Orang	260,00 Orang	**540,000,000**						260,00 Orang	**951,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**540,000,000**						2 Kegiatan	**951,000,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				10 Dokumen	270,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	10 Dokumen	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				9 Kelompok	270,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	9 Kelompok	351,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah Masyarakat Miskin yang Dibantu Jumlah Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan Jumlah Sampel yang Teruji Konsumsi Ikan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Volume Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	266 Orang 6 Sertifikat 125 Sampel 44,00 Kg/Kapita/Tahun 508228 Ton 2500 Ton		0 Orang 0 Sertifikat 0 Sampel 0 Kg/Kapita/Tahun 0 Ton 0 Ton	242 Orang 5 Sertifikat 120 Sampel 43,50 Kg/Kapita/Tahun 441937 Ton 2400 Ton	**800,000,000**						242 Orang 5 Sertifikat 120 Sampel 43,50 Kg/Kapita/Tahun 441937 Ton 2400 Ton	**1,250,000,000**	
3	**25**	**06**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Kegaitan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**100,000,000**						1 Kegiatan	**150,000,000**	
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Rekomendasi	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pemasaran	10 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	**550,000,000**						2 Kegiatan	**800,000,000**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				27 Unit Usaha	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Usaha Pengelolaan dan Pemasaran di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	27 Unit Usaha	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				15 Unit Usaha	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Usaha Pengelolaan dan Pemasaran di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	15 Unit Usaha	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	1.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**150,000,000**						1 Kegiatan	**300,000,000**	
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Masyarakat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
										TOTAL	**33,199,704,300**							**43,373,054,630**	

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**125,112,941,825**							**163,551,712,050**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**51,129,514,000**						100 %	**66,664,712,050**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Laporan Kinerja Tahunan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**825,000,000**						6 Dokumen	**1,475,000,000**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	275,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	325,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	4 Laporan	1,150,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	**44,709,514,000**						100 %	**57,491,817,000**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				325 Orang/ Bulan	41,647,934,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	325 Orang/ Bulan	53,870,577,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	3,061,580,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	5 Dokumen	3,621,240,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**175,000,000**						100 %	**359,970,000**	
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	166,370,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	193,600,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketaatan terhadap aturan dan Peningkatan Kapasitas Kepegawaian	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**200,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi Sumatera Selatan	10 Orang	200,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Umum	%		%	100 %	**2,205,000,000**						100 %	**2,361,300,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	73,200,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	250,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	2 Paket	350,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	100,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	55,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	66,550,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	1,150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	2 Laporan	1,021,550,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	500,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**650,000,000**						100 %	**750,000,000**	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	650,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	5 Unit	750,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	**1,005,000,000**						100 %	**1,649,621,550**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Laporan	8,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Laporan	1,641,621,550	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Layanan Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**1,460,000,000**						100 %	**2,377,003,500**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				253 Unit	900,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	253 Unit	2,192,003,500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				135 Unit	160,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	135 Unit	185,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	400,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aset Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	0	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	1. Luas Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Cabe e. Bawang Merah f. Bawang Putih g. Jeruk h. Alpukat i. Manggis	: Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha		: Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha	0 : 2000 Ha 375 Ha 67 Ha 32 Ha 12 Ha 35 Ha 35 Ha 4 Ha 5 Ha	**34,194,000,000**						0 : 2000 Ha 375 Ha 67 Ha 32 Ha 12 Ha 35 Ha 35 Ha 4 Ha 5 Ha	**42,860,000,000**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana TPH yang difasilitasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**30,606,000,000**						2 Dokumen	**35,395,000,000**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				5 Laporan	30,606,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	5 Laporan	35,395,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih TPH yang difasiltasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**3,588,000,000**						2 Dokumen	**7,465,000,000**	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih				16 Sertifikat	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	16 Sertifikat	2,965,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				4 Laporan	2,738,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	4 Laporan	3,100,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran				1 Dokumen	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	1,400,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	1. Peningkatan Luas Lahan Siap Tanam a. Padi b, Jagung c. Kedelai d. Cabe e. Bawang Merah	: Ha Ha Ha Ha Ha		: Ha Ha Ha Ha Ha	0 : 2127 Ha 1650 Ha 122 Ha 321 Ha 69 Ha	**5,946,689,425**						0 : 2127 Ha 1650 Ha 122 Ha 321 Ha 69 Ha	**13,999,000,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Jumlah Prasarana Pertanian TPH yang difasilitasi	Unit		Unit	1 Unit	**5,946,689,425**						1 Unit	**13,999,000,000**	
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	5,646,689,425	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	11,800,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				7 Unit	300,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	7 Unit	2,199,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	1. Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura	: Ha Ha		: Ha Ha	0 : 520 Ha 97 Ha	**500,000,000**						0 : 520 Ha 97 Ha	**1,100,000,000**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian TPH yang difasilitasi	Kali		Kali	12 Kali	**500,000,000**						12 Kali	**1,100,000,000**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2500 Ha	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2500 Ha	1,100,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya Jumlah kemitraan usaha tani	20 unit 90 unit 20 unit		0 unit 0 unit 0 unit	20 unit 90 unit 20 unit	**33,342,738,400**						20 unit 90 unit 20 unit	**38,928,000,000**	
3	**27**	**07**	1.01		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Ketenagaan Penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		Orang	235 Orang	**250,000,000**						235 Orang	**1,200,000,000**	
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi				19 Orang	250,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	19 Orang	1,200,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Penerapan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**32,942,738,400**						4 Dokumen	**36,378,000,000**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2 Dokumen	606,000,000	Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Bunga Mayang, Peracak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2 Dokumen	900,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				1400 Kelompok	32,336,738,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1400 Kelompok	35,478,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	**27**	**07**	1.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga		Lembaga	20 Lembaga	**150,000,000**						20 Lembaga	**1,350,000,000**	
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi				1 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Unit	1,350,000,000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
										TOTAL	**125,112,941,825**							**163,551,712,050**	

Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**25,057,118,882**							**29,805,000,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**15,305,493,200**						100 %	**16,895,000,000**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dana yang dibutuhkan	dokumen		dokumen	5 dokumen	**150,000,000**						5 dokumen	**300,000,000**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas perkebunan dan 2 UPTD	5 dokumen	250,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	**11,488,854,000**						1 Tahun	**11,500,000,000**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				792 orang/bulan	11,188,854,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	792 orang/bulan	11,200,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	12 dokumen	300,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pakaian Dinas dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Paket		Paket	1 Paket	**200,000,000**						1 Paket	**350,000,000**	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				10 ORANG	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	10 ORANG	200,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	Paket		Paket	1 Paket	**935,000,000**						1 Paket	**1,200,000,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangnan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	1 paket	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	1 paket	150,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	1 Paket	50,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	1 paket	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	1 paket	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				1200 dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	1200 dokumen	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				300 Laporan	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	300 Laporan	750,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah kendaraaan dinas operasional lapangan yang tersedia	Unit		Unit	2 Unit	**175,000,000**						2 Unit	**900,000,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	10 Unit	200,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,506,639,200**						1 Tahun	**1,595,000,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia				12 Laporan	375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	12 Laporan	375,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia				24 Laporan	1,111,639,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	24 Laporan	1,200,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	**850,000,000**						1 Tahun	**1,050,000,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				90 unit	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	90 unit	800,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				0 Unit 100 unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Dinas Perkebunan dan 2 UPTD	0 Unit 100 unit	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan	Persentase		Persentase	0,20 Persentase	**2,466,625,682**						0,20 Persentase	**5,500,000,000**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Jumlah Sarana Pertanian yang terawasi	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota	**850,000,000**						17 Kabupaten/Kota	**1,000,000,000**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian				4 Laporan	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Kelompok Petani	4 Laporan	1,000,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Jumlah Penangkar Yang Terbina dan Jumlah Luas Areal Yang Dikembangkan/Diremajakan	Ha		Ha	8868 Ha	**1,616,625,682**						8868 Ha	**4,500,000,000**	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikasi Benih				2000 sertifikasi	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Kelompok Petani	2000 sertifikasi	500,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				2 Laporan	1,366,625,682	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Kelompok Petani	2 Laporan	4,000,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Prasarana Perkebunan Yang Dimanfaatkan	83 unit		0 unit	66 unit	**435,000,000**						66 unit	**435,000,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Jumlah Prasarana Perkebunan yang Terfasilitasi	Paket		Paket	1 Paket	**435,000,000**						1 Paket	**435,000,000**	
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian				4 Laporan	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Kelompok Petani	4 Laporan	85,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 unit 0 Unit	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Kelompok Petani	1 unit 0 Unit	350,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha	3000 ha		0 ha	2950 ha	**350,000,000**						2950 ha	**400,000,000**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Jumlah Pelaku usaha yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Perusahaan		Perusahaan	200 Perusahaan	**350,000,000**						200 Perusahaan	**400,000,000**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				250 Ha	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Perusahaan dan Kelompok Petani	250 Ha	200,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikukltura, dan perkebunan				75000 Ha	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Perusahaan dan Kelompok Petani	75000 Ha	200,000,000	Dinas Perkebunan
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Meningtkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan	240 unit		0 unit	230 unit	**100,000,000**						230 unit	**100,000,000**	
3	**27**	**06**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha perkebunan yang terawasi	Perusahaan		Perusahaan	240 Perusahaan	**100,000,000**						240 Perusahaan	**100,000,000**	
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi serta termonitornya pelaksanaan RAD-KSB				12 Laporan	100,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Perusahaan	12 Laporan	100,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Meningkatnya Kelompok Petani Yang Mendapatkan Penyuluhan	40 Kelompok		0 Kelompok	40 Kelompok	**6,400,000,000**						40 Kelompok	**6,475,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Kelompok petani yang dilakukan pendampingan	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota	**6,400,000,000**						17 Kabupaten/Kota	**6,400,000,000**	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				1000 kelompok	6,400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Kelompok Petani	1000 kelompok	6,400,000,000	Dinas Perkebunan
										TOTAL	**25,057,118,882**							**29,805,000,000**	

Dinas Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**57,578,578,978**							**84,862,859,000**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	% 100 %		% 0 %	100 % 100 %	**54,667,238,978**						100 % 100 %	**59,205,749,000**	
3	**28**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	%		%	100 %	**150,000,000**						100 %	**359,358,000**	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	5 Dokumen	150,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	10 Laporan	209,358,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	%		%	100 %	**49,442,260,000**						100 %	**46,908,455,000**	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				310 Orang	49,342,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	310 Orang	46,258,455,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	100,000,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	%		%	100 %	**423,600,000**						100 %	**350,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	423,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	21 Orang	250,000,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	%		%	100 %	**1,863,000,000**						100 %	**4,622,573,000**	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	251,464,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	86,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	183,105,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	185,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	362,665,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	1 Paket	183,105,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	2 Dokumen	32,128,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	235,107,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	1,280,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	250 Laporan	2,929,687,000	Dinas Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**28**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**1,180,000,000**	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	20,000,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	%		%	100 %	**2,103,378,978**						100 %	**4,153,188,000**	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	20,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	480,978,978	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	1,770,018,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,600,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	12 Laporan	2,363,170,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	%		%	100 %	**670,000,000**						100 %	**1,382,175,000**	
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	570,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	22 Unit	720,105,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	60 Unit	122,070,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Permasalahan Kawasan Hutan Berkurang	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,429,340,000**						1 Tahun	**20,098,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan	Ha		Ha	12350 Ha	**65,000,000**						12350 Ha	**250,000,000**	
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Kawasan Hutan (Produksi dan Lindung)	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%		%	0.17 %	**65,000,000**						0.17 %	**1,750,000,000**	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				1 Ha	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Lembaga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya	1 Ha	1,350,000,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%		%	0.17 %	**2,299,340,000**						0.17 %	**11,198,000,000**	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				15 Laporan	2,299,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kawasan Hutan (Produksi dan Lindung)	15 Laporan	10,898,000,000	Dinas Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Meningkatknya Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	Tahun 22,5 Persentase		Tahun 0 Persentase	1 Tahun 5 Persentase	**482,000,000**						1 Tahun 5 Persentase	**5,059,110,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%		%	5 %	**482,000,000**						5 %	**5,059,110,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				14 KTH	432,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Masyarakat khususnya kelompok masyarakat setempat (di sekitar/dalam) kawasan hutan dalam kewenangan Provinsi Sumatera Selatan	14 KTH	4,459,110,000	Dinas Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Ha	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Masyarakat khususnya kelompok masyarakat setempat (di sekitar/dalam) kawasan hutan dalam kewenangan Provinsi Sumatera Selatan	100 Ha	450,000,000	Dinas Kehutanan
										TOTAL	**57,578,578,978**							**84,862,859,000**	

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**29,485,714,497**							**38,047,726,329**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pelaksanaan Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**25,755,714,497**						100 %	**29,177,950,006**	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji, tunjangan serta insentif bagi ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	**19,450,743,006**						12 Bulan	**17,476,870,006**	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				109 Orang/Bulan	18,023,433,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	109 Orang/Bulan	16,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga administrasi dan teknis kantor (31 orang) dan TKPD (10 orang)				0 Dokumen 41 Orang	1,098,630,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	0 Dokumen 41 Orang	1,098,630,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah aparatur pengelola keuangan (32 orang pengelola keuangan) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				32 Orang 1 Dokumen	328,680,006	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	32 Orang 1 Dokumen	378,240,006	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersedianya insentif pengelola Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**40,080,000**						12 Bulan	**40,080,000**	
3	29	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aparatur pengelola barang (6 orang pengelola BMD) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6 Orang 0 Dokumen	40,080,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	6 Orang 0 Dokumen	40,080,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Retribusi Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**689,410,500**						12 Bulan	**1,200,000,000**	
3	29	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Sertifikat Hasil Uji (SHU)				0 Dokumen 700 SHU	689,410,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 Dokumen 700 SHU	1,200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Kelengkapan Pakaian Dinas dan Meningkatnya Pengetahuan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	**150,000,000**						1 Tahun	**900,000,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tahun aparatur yang mengikuti bimtek/kursus/diklat				0 Orang 1 Tahun	150,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	0 Orang 1 Tahun	500,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Prasarana Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,894,480,991**						1 Tahun	**3,755,000,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah tahun penyediaan komponen dan alat listrik				0 Paket 1 Tahun	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	0 Paket 1 Tahun	220,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah tahun penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (laptop, printer, komputer, kamera, ac, dst)				0 Paket 1 Tahun	714,480,991	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	0 Paket 1 Tahun	1,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan kebutuhan ATK kantor/Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat/konsumsi SKJ Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	800,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	12 Bulan 0 Paket	800,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	12 Bulan 0 Paket	250,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah jenis bahan bacaan kantor				0 Dokumen 2 Jenis	30,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	0 Dokumen 2 Jenis	35,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan kebutuhan koordinasi dan konsultasi aparatur (Dalam Daerah dan Luar Daerah) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan 0 Laporan	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	12 Bulan 0 Laporan	1,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	**150,000,000**						1 Tahun	**2,325,000,000**	
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor untuk UPTD Regional II Jumlah Gedung Kantor untuk UPTD Regional V				1 Gedung 1 Gedung	150,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	1 Gedung 1 Gedung	75,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	**1,381,000,000**						12 Bulan	**1,381,000,000**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan surat menyurat kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Surat Keluar 0 Laporan	25,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	1000 Surat Keluar 0 Laporan	25,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan (telepon, internet, air dan listrik), Tambah Daya dan Perbaikan Jaringan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Jenis 0 Laporan	1,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	5 Jenis 0 Laporan	1,000,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dan jasa tutor SKJ) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Laporan	356,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur	12 Bulan 0 Laporan	356,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**1,000,000,000**						12 Bulan	**2,100,000,000**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis biaya operasional kendaraan dinas (20 Unit Mobil ; 10 unit motor) - STNK, BBM, suku cadang Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Jenis 0 Unit	650,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	4 Jenis 0 Unit	750,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan 0 Unit	350,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	12 Bulan 0 Unit	350,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Persentase Sumur Bor Air Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis dan Diperolehnya Data Teknis Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah	70 %		0 %	60 %	**830,000,000**						60 %	**1,737,000,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen terkait data zona konservai air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**100,000,000**						1 Dokumen	**375,000,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Data Potensi Air Tanah				0 Dokumen 1 Laporan	100,000,000	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 Dokumen 1 Laporan	375,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen terkait data zona konservai air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi Jumlah dokumen terkait izin pengeboran, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**530,000,000**						1 Dokumen 1 Dokumen	**862,000,000**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis (rekomtek) yang diterbitkan				0 60 Rekomtek	280,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 60 Rekomtek	412,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah sumur yang diawasi				0 70 Sampel Air	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 70 Sampel Air	450,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah laporan terkait nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Laporan		Laporan	1 Laporan	**200,000,000**						1 Laporan	**500,000,000**	
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan 0 Laporan	200,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Laporan 0 Laporan	500,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Meningkatkan Permohonan WIUP	100 %		0 %	90 %	**1,200,000,000**						90 %	**2,450,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Jumlah dokumen WIUP	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**250,000,000**						1 Dokumen	**400,000,000**	
3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen 0 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Dokumen 0 Dokumen	400,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	1.02		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**200,000,000**						1 Dokumen	**300,000,000**	
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Dokumen				0 1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Dokumen				0 1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**50,000,000**						1 Dokumen	**150,000,000**	
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Dokumen 0 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Dokumen 0 Laporan	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	1.04		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi WPR	Laporan		Laporan	1 Laporan	**100,000,000**						1 Laporan	**400,000,000**	
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				1 Dokumen 0 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Dokumen 0 Laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	Jumlah dokumen harga patokan mineral bukan logam	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**250,000,000**						1 Dokumen	**600,000,000**	
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah				1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Dokumen 0 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Dokumen 0 Laporan	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	1.08		**Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pengendalian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**150,000,000**						1 Dokumen	**200,000,000**	
3	29	03	1.08	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah Dokumen				0 1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 1 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	1.09		**Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pengendalian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**150,000,000**						1 Dokumen	**200,000,000**	
3	29	03	1.09	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan	Jumlah Dokumen				0 1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 1 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**	1.14		**Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**	Jumlah dokumen rekomendasi SIPB	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**50,000,000**						1 Dokumen	**200,000,000**	
3	29	03	1.14	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase Meningkatnya Pemanfaatan EBT	17,43 %		0 %	15,62 %	**600,000,000**						15,62 %	**1,382,776,323**	
3	**29**	**05**	1.02		**Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah izin pengendalian dan pengawasan	Izin		Izin	5 Izin	**50,000,000**						5 Izin	**50,000,000**	
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin SKT UJP EBT				0 5 Izin	50,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 5 Izin	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**	1.03		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**	Jumlah izin pengendalian dan pengawasan	Usaha		Usaha	5 Usaha	**50,000,000**						5 Usaha	**50,000,000**	
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun Jumlah Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati				0 Laporan 5 Usaha	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		0 Laporan 5 Usaha	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Jumlah dokumen Konservasi Energi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**500,000,000**						1 Dokumen	**1,282,776,323**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen				0 1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		0 1 Dokumen	500,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit Usaha Industri				0 20 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		0 20 Unit	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase Desa yang teraliri listrik	%		%	100 %	**1,100,000,000**						100 %	**3,300,000,000**	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**450,000,000**						1 Dokumen	**550,000,000**	
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomtek				0 25 Rekomtek	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 25 Rekomtek	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Perusahaan Pemegang IUPTLS yang di Bina dan Diawasi				0 Laporan 35 Perusahaan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	0 Laporan 35 Perusahaan	350,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**	1.04		**Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi**						**350,000,000**							**350,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi				1 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	350,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Jumlah dokumen Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**300,000,000**						1 Dokumen	**2,300,000,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stakeholder	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Laporan 0 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Stakeholder	1 Laporan 0 Laporan	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
										TOTAL	**29,485,714,497**							**38,047,726,329**	

Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**17,787,492,600**							**20,117,367,230**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**13,832,492,600**						100 %	**14,904,117,230**	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkatkan/Berkembang	%		%	100 %	**220,000,000**						100 %	**231,000,000**	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	105,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Laporan	21,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	105,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	%		%	100 %	**11,386,636,000**						100 %	**11,955,967,800**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang Bulan	10,038,096,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	840 Orang Bulan	10,540,000,800	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,109,740,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	1,165,227,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen 12 Dokumen	238,800,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	0 Dokumen 12 Dokumen	250,740,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Milik Daerah yang Terlayani	%		%	100 %	**22,680,000**						100 %	**23,814,000**	
3	30	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	22,680,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	12 Laporan	23,814,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya	%		%	100 %	**150,000,000**						100 %	**157,500,000**	
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	150,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	15 Orang	157,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	%		%	100 %	**881,176,600**						100 %	**925,235,430**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	25,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Paket	26,250,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	91,176,600	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2 Paket	95,735,430	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Paket	52,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3650 Dokumen	15,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3650 Dokumen	15,750,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Paket	52,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	400 Laporan	630,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	52,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik	%		%	100 %	**200,000,000**						100 %	**400,000,000**	
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	25 Unit	200,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	%		%	100 %	**342,000,000**						100 %	**359,100,000**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	12,600,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	250,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	262,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	80,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	84,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik yang Berfungsi Baik	%		%	100 %	**630,000,000**						100 %	**851,500,000**	
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				312 Unit per Tahun	350,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	312 Unit per Tahun	367,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	80,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	50 Unit	84,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Gedung	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Gedung	400,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Tertib Usaha	55 %		0 %	55 %	**125,000,000**						55 %	**131,250,000**	
3	**30**	**02**	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**	Jumlah pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	**50,000,000**						50 Pelaku Usaha	**52,500,000**	
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	52,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**02**	1.04		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu penerbitannya	%		%	100 %	**75,000,000**						100 %	**78,750,000**	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				6000 Dokumen	75,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	6000 Dokumen	78,750,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	750 unit		0 unit	200 unit	**300,000,000**						200 unit	**1,305,000,000**	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	Unit		Unit	3 Unit	**300,000,000**						3 Unit	**1,305,000,000**	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				3 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Unit	1,200,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	105,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	≤5% %		0 %	≤5% %	**600,000,000**						≤5% %	**633,000,000**	
3	**30**	**04**	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**						**100,000,000**							**105,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	105,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**04**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**						**400,000,000**							**423,000,000**	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	12 Laporan	157,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				6 Laporan	250,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	6 Laporan	265,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**04**	1.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	Persentase Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di Provinsi	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**105,000,000**	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	105,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,4 - 5 %		0 %	2,4 - 5 %	**575,000,000**						2,4 - 5 %	**603,750,000**	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan	Kali		Kali	5 Kali	**575,000,000**						5 Kali	**603,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	300,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	5 Pelaku Usaha	315,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				3 Pelaku Usaha	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Pelaku Usaha	210,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				60 Pelaku Usaha	75,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	60 Pelaku Usaha	78,750,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Persentase penanganan pengaduan konsumen	30 % 13,04 % 90 %		0 % 0 % 0 %	30 % 13,04 % 90 %	**1,880,000,000**						30 % 13,04 % 90 %	**2,029,000,000**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%		%	90 %	**1,100,000,000**						90 %	**1,210,000,000**	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah orang yang diedukasi				2 BPSK 100 Orang	1,100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	2 BPSK 100 Orang	1,210,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%		%	13.04 %	**450,000,000**						13.04 %	**472,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau				3 Komoditi	50,000,000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Komoditi	52,500,000	Dinas Perdagangan
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan				1 Dokumen	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	210,000,000	Dinas Perdagangan
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				1 Dokumen	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	210,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	%		%	30 %	**330,000,000**						30 %	**346,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1 Laporan	330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	346,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100 %		0 %	100 %	**475,000,000**						100 %	**511,250,000**	
3	**30**	**07**	1.01		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**	Jumlah UKM yang dibina untuk pemanfaatan Ecommerce	UMKM		UMKM	5 UMKM	**250,000,000**						5 UMKM	**275,000,000**	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri				10 UMKM	250,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	10 UMKM	275,000,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**07**	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk	UMKM		UMKM	30 UMKM	**150,000,000**						30 UMKM	**157,500,000**	
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				100 UMKM	150,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	100 UMKM	157,500,000	Dinas Perdagangan
3	**30**	**07**	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk	UMKM		UMKM	5 UMKM	**75,000,000**						5 UMKM	**78,750,000**	
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neger				1 Laporan	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Laporan	78,750,000	Dinas Perdagangan
										TOTAL	**17,787,492,600**							**20,117,367,230**	

Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**16,609,016,900**							**16,609,016,900**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**11,354,016,900**						100 %	**11,354,016,900**	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**230,000,000**						1 Dokumen	**230,000,000**	
3	31	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	110,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	30,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**8,090,571,000**						1 Dokumen	**8,090,571,000**	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	7,783,571,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	50 Orang/ Bulan	7,783,571,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	25,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	2 Laporan	25,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Laporan	12,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Pengamanan Batang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**40,000,000**						1 Dokumen	**40,000,000**	
3	31	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	paket		paket	60 paket	**70,000,000**						60 paket	**70,000,000**	
3	31	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 3 Orang	30,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	0 Orang 3 Orang	30,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	10 Orang	20,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	%		%	100 %	**909,000,000**						100 %	**909,000,000**	
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Paket	30,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	230,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Paket	230,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	54,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Paket	54,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Paket	60,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Paket	40,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	485,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun			Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Meningkatnya Investasi,Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi Industri, dan Perdagangan)	1 Laporan	485,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,425,287,100**							**1,425,287,100**	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Laporan	10,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	506,197,100	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Laporan	506,197,100	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	909,090,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun			Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Laporan	909,090,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**589,158,800**							**589,158,800**	
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	190,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat I, Demang Lebar Daun	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		12 Unit	190,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	60,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Unit	60,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	339,158,800	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Unit	339,158,800	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Penyusunan rencana pembangunan industri provinsi	%		%	100 %	**4,835,000,000**						100 %	**4,835,000,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri jumlah dokumen rencana pembangunan industri	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	**4,835,000,000**						1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	**4,835,000,000**	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	meningkatnya investasi industri, dan perdagangan (maju investasi industri dan perdagangan)	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	meningkatnya investasi industri, dan perdagangan (maju investasi industri dan perdagangan)	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	2,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	meningkatnya investasi industri, dan perdagangan (maju investasi industri dan perdagangan)	1 Dokumen	2,200,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	meningkatnya investasi industri, dan perdagangan (maju investasi industri dan perdagangan)	1 Dokumen	900,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	meningkatnya investasi industri, dan perdagangan (maju investasi industri dan perdagangan)	1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Perindustrian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	meningkatnya investasi industri, dan perdagangan (maju investasi industri dan perdagangan)	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**170,000,000**							**170,000,000**	
3	**31**	**03**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**						**170,000,000**							**170,000,000**	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan usaha dengan Resiko menegah tinggi dan tinggi melalui Sinas				1 Dokumen	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		1 Dokumen	85,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		1 Dokumen	85,000,000	Dinas Perindustrian
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Meningkatnya Investasi , Industri dan Perdagangan (Maju Investasi Industri , dan Perdagangan).	%		%	100 %	**250,000,000**						100 %	**250,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	Jumlah Dokumen Hasil Deseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Provinsi Melalui SINAS Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisa Data Industri , Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Sinas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SINAS	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen	**250,000,000**						1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen	**250,000,000**	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Meningkatnya Investasi , Industri dan Perdagangan (Maju Investasi Industri , dan Perdagangan).	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Meningkatnya Investasi , Industri dan Perdagangan (Maju Investasi Industri , dan Perdagangan).	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perindustrian
										TOTAL	**16,609,016,900**							**16,609,016,900**	

Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**6,331,325,000**							**8,025,810,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,899,435,000**							**1,745,810,000**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**156,840,000**							**156,840,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (KPA) umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (PPTK)				1 Orang 5 Orang	156,840,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Orang 5 Orang	156,840,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**64,125,000**							**42,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Pimp. TK III) Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Pimp. TK. IV)				1 Orang 2 Orang	64,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				1 Orang 2 Orang	42,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**520,000,000**							**570,000,000**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		30 Paket	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)				80 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				80 Laporan	550,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**350,000,000**							**149,000,000**	
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Aplikasi Elektronik Govement)				1 Unit	200,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		13 Unit	149,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**808,470,000**							**827,970,000**	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 Orang	808,470,000		Lain-lain PAD Yang Sah				29 Orang	827,970,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**4,431,890,000**							**6,280,000,000**	
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**						**1,621,890,000**							**2,180,000,000**	
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum (Pelaksanaan Panyaluran Dana Bantuan Kelurahan se-Sumatea Selatan) Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum (Pembinaan Kecamatan 75 Kecamatan) Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintah Umum (Pembinaan PATEN di Kematan se-Sumatera Selatan)				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	821,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	880,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (10 Pilar Permanen yang Terpasang) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (3 Lokasi Penanaman Rupa Bumi) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (3 Pembentukan Pemekaran Kecamatan) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan, Batas, dan rekontruksi Batas)				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	800,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**						**2,260,000,000**							**3,500,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD (1 Pj. Gubernur dan 8 Pj. Bupati/Walikota) Jumlah Dokumen Hasil Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD (Kunjungan Kerja DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota) Jumlah Dokumen Hasil Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD (Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Prov/Kab/Kota) Jumlah Dokumen Hasil Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD (Surat Izin Ke Luar Negeri Untuk Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD Prov/Kab/Kota) Jumlah dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Desk Pilkada				1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 dokumen	1,360,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Dokumen 50 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 1 dokumen	2,700,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (120 Buku LPPD) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (55 Buku RLPPD) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPJ) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (SPM)				1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan	900,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan	800,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	1.03		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**						**550,000,000**							**600,000,000**	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (6 Kali Rapat? Pertemuan APPSI) Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Draft MoU)				1 Dokumen 45 Dokumen	550,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Dokumen 45 Dokumen	600,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**4,290,000,000**							**4,803,130,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,582,620,000**							**2,069,080,000**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**124,080,000**							**124,080,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	124,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Dokumen	124,080,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**50,000,000**	
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				1 Orang	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				1 Orang	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**158,920,000**							**215,000,000**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Paket	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan 0 Laporan	138,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		35 Laporan 0 Laporan	185,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**355,000,000**							**380,000,000**	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	325,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Unit	330,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		2 Unit	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**919,620,000**							**1,300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	919,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan	1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**2,707,380,000**							**2,734,050,000**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**						**1,055,000,000**							**1,102,750,000**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				34 Dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		34 Dokumen	450,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				780 Dokumen	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				780 Dokumen	90,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				6 Dokumen	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				6 Dokumen	162,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				470 Dokumen	380,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				470 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**						**1,652,380,000**							**1,631,300,000**	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				53 Kasus	1,352,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		53 Kasus	1,331,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				1 Kasus	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				1 Kasus	300,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**21,494,270,000**							**33,517,968,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2,194,270,000**							**2,436,797,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**133,100,000**	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		4 Laporan	133,100,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**188,892,000**							**207,781,200**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Laporan	188,892,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	207,781,200	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**79,877,600**							**87,865,360**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 orang	79,877,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 orang	87,865,360	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**858,680,400**							**944,548,440**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Paket	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	66,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket 0 Paket	38,680,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket 0 Paket	42,548,440	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	760,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Laporan	836,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**250,000,000**							**275,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				15 Unit	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**716,820,000**							**788,502,000**	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				5 Laporan TKPD 19 Laporan Honorer	716,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Laporan TKPD 19 Laporan Honorer	788,502,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**19,300,000,000**							**31,081,171,000**	
4	**01**	**04**	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**						**18,540,000,000**							**29,288,820,000**	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan prasarana Spiritual yang dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				3 Unit 0 Unit	2,550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit 0 Unit	416,900,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				7 Lembaga 0 Lembaga	15,990,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Lembaga 0 Lembaga	28,871,920,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**						**370,000,000**							**1,114,960,000**	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi,Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi,Koordinasi,Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 0 Dokumen	468,710,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 0 Dokumen	481,250,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**04**	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**						**390,000,000**							**677,391,000**	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan , Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	347,391,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana, administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan				0 Dokumen 1 Dokumen	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen 1 Dokumen	165,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**4,325,000,000**							**4,970,722,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**975,500,000**							**927,870,000**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**161,700,000**							**177,870,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						161,700,000		Lain-lain PAD Yang Sah					177,870,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**407,000,000**							**326,700,000**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						110,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah					0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						297,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah					326,700,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**165,000,000**							**181,500,000**	
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						165,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah					181,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**241,800,000**							**241,800,000**	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						241,800,000		Lain-lain PAD Yang Sah					241,800,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**3,349,500,000**							**4,042,852,000**	
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**						**1,210,000,000**							**1,331,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Pelaksanaan Percepatan Akses Leuangan Daerah pada Koperasi Syariah di Pondok Pesantren, Jumlah Dokumen Data Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan, Jumlah dokumen data pelaksanaan CSR PKBL untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan Jumlah Pelaksanaan Percepatan Akses Leuangan Daerah pada Koperasi Syariah di Pondok Pesantren, Jumlah Dokumen Data Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan, Jumlah dokumen data pelaksanaan CSR PKBL untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan Jumlah Pelaksanaan Percepatan Akses Leuangan Daerah pada Koperasi Syariah di Pondok Pesantren, Jumlah Dokumen Data Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan, Jumlah dokumen data pelaksanaan CSR PKBL untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan				5 Koperasi Syariah 10 buku laporan 35 buku laporan	770,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		5 Koperasi Syariah 10 buku laporan 35 buku laporan	847,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen data penyaluran KUR oleh Bank Penyalur kepada UMKM				10 buku laporan	440,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		10 buku laporan	484,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**						**1,045,000,000**							**1,149,500,000**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pengembangan investasi promosi produk dan budaya sumsel				4 pameran	660,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		4 pameran	726,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Persentase Hasil Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi (BBM,LPG, Elektrifikasi) dan Pupuk Bersubsidi				0 Dokumen 1 Buku Laporan	385,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		0 Dokumen 1 Buku Laporan	423,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**						**1,094,500,000**							**1,562,352,000**	
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah dokumen data perkembangan 15 BUMD di Sumatera Selatan, Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD, Jumlah Raperda BUMD Jumlah dokumen data perkembangan 15 BUMD di Sumatera Selatan, Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD, Jumlah Raperda BUMD Jumlah dokumen data perkembangan 15 BUMD di Sumatera Selatan, Jumlah dokumen data dan informasi tentang BLUD, Jumlah Raperda BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen 2 raperda 17 buku laporan 0 Dokumen	1,094,500,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		1 Dokumen 2 raperda 17 buku laporan 0 Dokumen	1,562,352,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**2,166,490,000**							**2,732,700,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,416,490,000**							**1,982,700,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**100,000,000**	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**110,760,000**							**110,760,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	110,760,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Dokumen	110,760,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**300,000,000**							**300,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				3 Orang	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Orang	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**500,000,000**							**806,210,000**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah			160,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan	420,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**130,000,000**							**390,000,000**	
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		20 Unit	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**275,730,000**							**275,730,000**	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	275,730,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan	275,730,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**750,000,000**							**750,000,000**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**						**450,000,000**							**450,000,000**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	150,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	150,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	150,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**						**300,000,000**							**300,000,000**	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**8,790,000,000**							**11,000,000,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,670,000,000**							**2,500,000,000**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**250,000,000**							**300,000,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen 0 Dokumen	250,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				12 dokumen 0 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**200,000,000**							**200,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				15 orang	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				15 orang	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**320,000,000**							**600,000,000**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				24 Paket	20,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				24 Paket	50,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 laporan	300,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				30 laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**900,000,000**							**900,000,000**	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				13 laporan	900,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				13 laporan	900,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**7,120,000,000**							**8,500,000,000**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**						**4,850,000,000**							**5,600,000,000**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa				4 laporan	150,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				4 laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa				12 laporan	4,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				12 laporan	5,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 laporan 0 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				12 laporan 0 Laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**						**600,000,000**							**900,000,000**	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik				4 laporan	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				4 laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah laporan pengembangan Sistem Infromasi Pengadaan Barang dan Jasa				0 Laporan 4 laporan	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				0 Laporan 4 laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa				4 laporan	200,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				4 laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**						**1,670,000,000**							**2,000,000,000**	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang 37 orang	1,120,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				0 Orang 37 orang	1,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa				5 dokumen	250,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah				5 dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa				4 laporan	300,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah				4 laporan	500,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**2,518,000,000**							**4,013,140,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,626,140,000**							**2,838,140,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**30,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		2 Dokumen	30,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**176,680,000**							**176,680,000**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	176,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	176,680,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**220,000,000**							**275,000,000**	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	125,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**400,000,000**							**510,000,000**	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				2 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		2 Paket	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**188,000,000**							**1,215,000,000**	
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				10 Unit	188,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**551,460,000**							**551,460,000**	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				22 Laporan	551,460,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		22 Laporan	551,460,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**65,000,000**							**80,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Unit	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	25,000,000						1 Paket	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**891,860,000**							**1,175,000,000**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**						**310,000,000**							**400,000,000**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi				1 Dokumen	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	umlah Dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan Penataan Analisis Jabatan				2 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**						**581,860,000**							**775,000,000**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				2 Dokumen	171,860,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil evaluasi pelaksanaaan budaya kerja				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				1 Dokumen	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	125,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**253,118,009,000**							**253,759,494,500**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**253,118,009,000**							**253,759,494,500**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**350,000,000**							**363,800,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	33,800,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25 Dokumen	35,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Dokumen	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Dokumen	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	35,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Dokumen	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				25 Dokumen	35,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Dokumen	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	60,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	55,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	120,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	121,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**71,154,503,000**							**67,800,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 orang/bulan	70,054,503,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				420 orang/bulan	66,700,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,100,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**1,730,000,000**							**1,880,000,000**	
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,500,000,000	Kota Palembang, Ilir Barat II, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	1,650,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	130,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**585,900,000**							**2,275,900,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 5 Orang	185,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		0 Orang 5 Orang	185,900,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**41,507,750,000**							**37,805,616,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun	5,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	7,315,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	770,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	25,157,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	16,850,616,200	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1500 Laporan	9,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1500 Laporan	11,550,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	200,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah				2 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**27,100,000,000**							**30,037,200,000**	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	13,950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Unit	13,950,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	2,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	2,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Paket	2,530,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit	7,950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Unit	11,057,200,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**54,240,000,000**							**54,705,000,000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	145,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	8,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	28,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	29,160,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	16,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Laporan	16,900,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**37,834,613,000**							**36,138,074,300**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	1,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	1,430,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				210 Unit	8,984,613,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				210 Unit	9,783,074,300	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 1 Tahun	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit 1 Tahun	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	25,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	22,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				150 Unit	1,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Unit	1,925,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**						**7,165,243,000**							**9,058,904,000**	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	299,023,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Orang/Bulan	260,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	2,250,685,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	2,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	11,025,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang	11,025,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	4,604,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang/ Bulan	6,587,879,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**						**11,450,000,000**							**13,695,000,000**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan dalam 1 Tahun				0 Paket 12 Paket	8,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 12 Paket	9,460,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakandalam Tahun				0 Paket 12 Paket	1,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 12 Paket	2,475,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan dalam 1 tahun				0 Paket 12 Paket	1,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 12 Paket	1,760,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**44,963,058,000**							**51,316,451,700**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**44,963,058,000**							**51,316,451,700**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**50,000,000**							**50,000,000**	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**250,647,000**							**275,711,700**	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	250,647,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	275,711,700	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**443,400,000**							**497,740,000**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Jenis	343,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		3 Jenis	377,740,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Orang	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Orang	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**2,250,000,000**							**2,480,000,000**	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	2,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Kali	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200 Kali	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**800,000,000**							**1,600,000,000**	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		1 Unit	1,000,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah		10 Unit	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,577,000,000**							**1,577,000,000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	80,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,497,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1,497,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**50,000,000**							**60,000,000**	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**						**29,342,011,000**							**33,176,000,000**	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				5 Dokumen	2,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	3,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	3,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	23,442,011,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	26,676,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**						**10,200,000,000**							**11,600,000,000**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1500 acara	6,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1500 acara	7,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1000 tamu	3,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1000 tamu	4,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	600,000,000	Sekretariat Daerah
										TOTAL	**347,996,152,000**							**374,139,416,200**	

Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**373,488,974,600**							**383,018,197,400**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**151,913,100,600**						100 %	**153,489,879,000**	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang tersedia	%		%	100 %	**620,000,000**						100 %	**657,250,000**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	21,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	2,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 dokumen	7,875,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	2,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 dokumen	7,875,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	2,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 dokumen	5,250,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	2,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 dokumen	5,250,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 laporan	610,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 laporan	610,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**17,978,512,000**						100 %	**15,240,408,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 orang/bulan	13,905,302,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	100 orang/bulan	10,963,537,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				4 dokumen	4,065,710,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 dokumen	4,268,996,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				2 laporan	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 laporan	7,875,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	**1,060,000,000**						100 %	**1,113,000,000**	
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				3 laporan	1,060,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	3 laporan	1,113,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**552,000,000**						100 %	**709,500,000**	
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	552,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	55 Orang	552,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**24,320,200,000**						100 %	**22,835,960,000**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasil istrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				2 paket	400,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 paket	420,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				8 paket	10,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	8 paket	10,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				8 paket	3,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	8 paket	3,150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				3 paket	500,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	3 paket	525,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				4 paket	500,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 paket	525,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				14 dokumen	1,045,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	14 dokumen	1,055,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan				45 paket	655,200,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	45 paket	687,960,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				12 laporan	5,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 laporan	2,625,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 laporan	2,500,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 laporan	2,625,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				1 dokumen	60,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 dokumen	63,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				1 dokumen	660,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 dokumen	660,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang tersedia	%		%	100 %	**9,565,655,000**						100 %	**10,043,938,000**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 laporan	27,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 laporan	28,875,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 laporan	3,250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 laporan	3,412,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				16 laporan	6,288,155,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	16 laporan	6,602,563,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**22,617,319,600**						100 %	**23,748,186,000**	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				58 unit	3,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	58 unit	3,150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				23 unit	15,456,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	23 unit	16,229,535,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				200 unit	4,160,619,600	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	200 unit	4,368,651,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tersedia	%		%	100 %	**71,897,414,000**						100 %	**75,836,537,000**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD				75 orang/bulan	69,613,655,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	75 orang/bulan	73,094,338,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan				6 paket	1,721,259,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	6 paket	2,151,574,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengilkuti medical check up DPRD				75 orang	562,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	75 orang	590,625,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia	%		%	100 %	**3,302,000,000**						100 %	**3,305,100,000**	
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD				6 laporan	62,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	6 laporan	65,100,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan				384 paket	3,240,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	384 paket	3,240,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Administrasi DPRD yang Terlayani	100 %		0 %	100 %	**221,575,874,000**						100 %	**229,528,318,400**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Persentase terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	%		%	100 %	**850,000,000**						100 %	**892,500,000**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah				12 dokumen	160,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 dokumen	168,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Perda				6 dokumen	540,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	6 dokumen	567,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan				2 dokumen	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 dokumen	52,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun				1 dokumen	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 dokumen	105,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	%		%	100 %	**290,000,000**						100 %	**304,500,000**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS				2 dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 dokumen	21,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 dokumen	21,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD				2 dokumen	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 dokumen	105,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD				2 dokumen	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 dokumen	105,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD				2 dokumen	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 dokumen	52,500,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	%		%	100 %	**250,000,000**						100 %	**262,500,000**	
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 dokumen	150,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 dokumen	157,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 dokumen	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 dokumen	105,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya	%		%	100 %	**42,464,330,600**						100 %	**50,341,775,000**	
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	6,832,330,600		Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 Dokumen	13,306,175,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan				17 dokumen	30,715,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	17 dokumen	32,250,750,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli				55 orang	3,960,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	55 orang	3,780,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli Fraksi				9 orang	432,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	9 orang	453,600,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat				1 dokumen	525,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 dokumen	551,250,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%		%	100 %	**22,606,143,400**						100 %	**22,611,143,400**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun				1 dokumen	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 dokumen	105,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses				3 dokumen	22,506,143,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	3 dokumen	22,506,143,400	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**10,500,000**	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD				1 laporan	10,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 laporan	10,500,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	%		%	100 %	**155,105,400,000**						100 %	**155,105,400,000**	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						155,105,400,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0		155,105,400,000	Sekretariat DPRD
										TOTAL	**373,488,974,600**							**383,018,197,400**	

BAPPEDA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**01**				**PERENCANAAN**						**35,673,154,000**							**38,946,469,400**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**26,238,154,000**						100 %	**28,836,469,400**	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	%		%	85 %	**585,000,000**						85 %	**620,000,000**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok Renja; LKjIP; Sakip Bappeda; tenaga ahli yang diundang)				4 Dokumen	385,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Sumsel	4 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Sumsel	1 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Sumsel	1 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Sumsel	1 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Sumsel	1 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%		%	100 %	**18,928,154,000**						100 %	**20,795,969,400**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				149 orang	17,614,954,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Sumsel	149 orang	19,376,449,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (32 SPK tenaga honor administrasi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)				33 dokumen	963,200,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Sumsel	33 dokumen	1,059,520,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	250,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Bappeda Sumsel	5 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 laporan	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bappeda Sumsel	1 laporan	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%		%	100 %	**180,000,000**						100 %	**200,000,000**	
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (Polis asuransi)				1 dokumen polis	180,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 dokumen polis	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	%		%	85 %	**785,000,000**						85 %	**862,000,000**	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				8 orang	80,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	8 orang	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan dan perundang-undangan				10 orang	85,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	10 orang	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan (5 org Bimtek Kepegawaian dan aset; 100 org workshop JFP; 50 orang workshop Anjab&ABK; 34 org Karya tulis ilmiah; 130 orang workshop etika pegawai; 34 org worksop public speaking; 50 orang Workshop Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif; 10 org Bimtek Keuangan)				368 orang	620,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	368 orang	682,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%		%	100 %	**2,590,000,000**						100 %	**2,921,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				20 paket	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	20 paket	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				18 paket	750,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	18 paket	800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (60 alat tulis kantor; 50 makan minum rapat)				110 paket	400,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	110 paket	450,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	135,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	16 Paket	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				4 dokumen	45,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	4 dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				120 laporan	1,000,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	120 laporan	1,200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD (website;video progres capaian kinerja)				2 dokumen	160,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	2 dokumen	176,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%		%	100 %	**675,000,000**						100 %	**742,500,000**	
5	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (E-Monev; E-Office; SIP NIAN; SIPD; Sistem Informasi Penangggulangan kemiskinan)				5 aplikasi	675,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	5 aplikasi	742,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%		%	100 %	**1,565,000,000**						100 %	**1,670,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan jumlah pengiriman surat)				1 laporan	30,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 laporan	675,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 laporan	685,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)				1 laporan	110,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 laporan	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; jasa konsultan; spanduk dan dokumentasi)				1 laporan	750,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 laporan	825,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	%		%	85 %	**930,000,000**						85 %	**1,025,000,000**	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan&perlengkapan kantor)				126 unit	750,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	126 unit	825,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	180,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 unit	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Ketepatan Penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen	Tepat Waktu Tepat Waktu 90 %		0 Tepat Waktu 0 %	Tepat Waktu Tepat Waktu 88 %	**5,970,000,000**						Tepat Waktu Tepat Waktu 88 %	**6,527,000,000**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	bbbb Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	b %		b %	0 b 85 %	**3,415,000,000**						0 b 85 %	**3,731,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (aspek perencanaan SAKIP Provinsi)				2 Dokumen	420,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	2 Dokumen	462,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Forum SKPD; Kortekrenbang Regional; Rakortekrenbang Prov)				3 Berita Acara	870,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	3 Berita Acara	947,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				4 Berita Acara	650,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	4 Berita Acara	700,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dok RKPD; Perubahan RKPD; Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 2023-2026))				3 Dokumen	1,375,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	3 Dokumen	1,512,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	-	%		%	85 %	**275,000,000**						85 %	**302,500,000**	
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Database Bidang Infrastruktur; Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian)				2 Buku	275,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	2 Buku	302,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	%		%	85 %	**2,230,000,000**						85 %	**2,443,000,000**	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah laporan (SPIP)				0 Laporan 1 laporan	100,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	0 Laporan 1 laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 Kerja Sama	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (12 Lap. hasil pengendalian evaluasi dan perencanaan Provinsi, Kabupaten/Kota serta dokumen hasil pengendalian dan Evaluasi DAK; 1 lap evaluasi renja PD; 1 lap RAD SDG''s; 1 lap RAD Pangan Gizi; 1 lap Monev Infrastruktur)				16 Laporan	750,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	16 Laporan	825,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dok Fasilitasi Ranhir RKPD Kab/Kota; Hasil Penilaian PPD Kab/Kota; Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab/Kota; Hasil Evaluasi RPJPD; Jasa konsultasi Perencanaan RPJPD))				5 Dokumen	1,280,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	5 Dokumen	1,408,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	1.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	-	-		-	0 -	**50,000,000**						0 -	**50,000,000**	
5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	50,000,000	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di Akomodir dalam APBD	83 %		0 %	80 %	**3,465,000,000**						80 %	**3,583,000,000**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	bbbb Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	b %		b %	0 b 85 %	**1,195,000,000**						0 b 85 %	**1,220,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (lap. sinkronisasi prioritas bidang pemerintahan)				1 Laporan	275,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 Laporan	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (1 lap TKPK; 1 lap Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Prioritas Bid Kesos; 1 lap Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Prioritas Bidang Kesejahteraan Masyarakat; jasa Konsultan Perencanaan Bidang kemiskinan))				4 Laporan	920,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	4 Laporan	920,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	%		%	85 %	**820,000,000**						85 %	**863,000,000**	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (kerangka makro ekonomi daerah)				1 Dokumen	80,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	1 Dokumen	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan; lap integrasi dan sinkronisasi pendanaan pembangunan)				2 Laporan	330,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	2 Laporan	363,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (integrasi dan sinkronisasi prioritas SDA dan IPTEK; Jasa konsultan kajian potensi dan strategi pengembangan SDA Prov Sumsel))				2 Laporan	410,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	2 Laporan	410,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	%		%	85 %	**1,450,000,000**						85 %	**1,500,000,000**	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	150,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Prioritas Daerah 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	Bappeda Sumsel	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Perangkat Daerah	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	6 Perangkat Daerah	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 PD	150,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	6 PD	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	200,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	3 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(1 dok; 1 dok Pengembangan Wilayah)				2 Laporan	300,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	2 Laporan	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 PD	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	2 PD	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				2 PD	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	2 PD	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (1 Lap KSP; 1 Lap Peta yang telah KUGI; 1 lap Jasa Konsultan Masterplan mangroove))				3 Laporan	350,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Bappeda Sumsel	3 Laporan	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
										TOTAL	**35,673,154,000**							**38,946,469,400**	

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**3,662,518,171,652**							**4,028,653,062,817**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		%	100 %	**123,979,759,000**						100 %	**136,260,808,900**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**1,198,000,000**						100 %	**1,278,200,000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja dan revisi rentra yang disusun				0 Dokumen 2 Buku	115,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 2 Buku	126,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen 0 Dokumen	122,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 dokumen 0 Dokumen	134,750,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 1 dokumen	112,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 1 dokumen	123,750,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Penyusunan DPA-SKPD				0 Dokumen 1 dokumen	109,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 1 dokumen	119,900,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Penyusunan Perubahan DPA SKPD				0 Dokumen 1 Dok	98,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 1 Dok	107,800,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 buku 0 Laporan	136,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 buku 0 Laporan	148,250,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 laporan 0 Laporan	505,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	8 laporan 0 Laporan	517,250,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**105,843,539,000**						100 %	**116,350,566,900**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 ASN 0 Orang/ Bulan	101,562,669,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	11 ASN 0 Orang/ Bulan	111,718,935,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia (5 ASN dan 85 Non ASN) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 % 0 Dokumen	2,885,110,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 % 0 Dokumen	3,173,621,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK, dan 2 Orang Verifikator)				0 Dokumen 100 %	787,360,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 100 %	799,610,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Pelaksanaan SKPD yang terkordinasi				0 Dokumen 10 dokumen	65,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 10 dokumen	71,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi				0 Laporan 1 dokumen	150,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Laporan 1 dokumen	162,250,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksa dan Verifikasi Hibah (10 Laporan dan 17 Kab/Kota)				0 Dokumen 100 %	203,400,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 100 %	215,650,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 laporan 0 Laporan	140,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	3 laporan 0 Laporan	154,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 laporan	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 laporan	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	**645,000,000**						100 %	**709,500,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun				1 laporan	55,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 laporan	60,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin (15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2 Unit R4, 20 Unit R2)				100 %	215,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	236,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR				1 laporan	250,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 laporan	275,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun				1 Laporan	55,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 Laporan	60,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun				21 Unit Kendaraan Dinas	70,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	21 Unit Kendaraan Dinas	77,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**666,250,000**						100 %	**732,875,000**	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan				3 Laporan	411,250,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	3 Laporan	452,375,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				110 ASN	55,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	110 ASN	60,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti diklat				15 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	15 Orang	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**7,056,900,000**						100 %	**7,762,590,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32 Jenis	420,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	32 Jenis	462,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas)				100 %	900,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	990,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (10 jenis peralatan rumah tangga, 18 jenis perlengkapan rumah tangga)				100 %	1,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	1,100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum (10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih)				100 %	850,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	935,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan (40 jenis yang dicetak, 45.000 counter)				100 %	970,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	1,067,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan				7 Surat Kabar	52,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	7 Surat Kabar	57,750,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Jenis ATK 0 Paket	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	10 Jenis ATK 0 Paket	1,045,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu di ruang konsultasi				0 Laporan 10000 tamu	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Laporan 10000 tamu	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi (150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 % 0 Laporan	1,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 % 0 Laporan	1,100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Keterbukaan Informasi Publik (Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel)				0 Dokumen 100 %	466,400,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 100 %	513,040,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara				0 Dokumen 7 Aplikasi	248,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 7 Aplikasi	272,800,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,370,000,000**						100 %	**1,507,000,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim				0 Laporan 1000 Surat	40,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Laporan 1000 Surat	44,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik (4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet)				0 Laporan 100 %	1,330,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Laporan 100 %	1,463,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	**7,200,070,000**						100 %	**7,920,077,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi (21 R4 dan 20 R2) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				100 % 0 Unit	990,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 % 0 Unit	1,089,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi (21 R4 dan 20 R2)				0 Unit 100 %	349,250,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Unit 100 %	384,175,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 % 0 Unit	955,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 % 0 Unit	1,050,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang direhab (1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip)				0 Unit 100 %	4,905,820,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Unit 100 %	5,396,402,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%		%	100 %	**3,528,975,001,820**						100 %	**3,881,872,502,002**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%		%	100 %	**3,490,000,000**						100 %	**3,839,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen 0 Dokumen	360,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	2 Dokumen 0 Dokumen	396,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	360,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	2 Dokumen	396,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD (100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA)				100 %	1,030,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	1,133,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda Perubahan dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBDP (100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA)				100 %	1,030,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	1,133,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda yang dihasilkan				1 Dokumen	710,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 Dokumen	781,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	100 %	**1,170,000,000**						100 %	**1,287,000,000**	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana				17 SK	435,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	17 SK	478,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana				17 SK	435,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	17 SK	478,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 Dokumen	330,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%		%	100 %	**5,632,687,700**						100 %	**6,195,956,470**	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah				12 Laporan	510,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	12 Laporan	561,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi (SMI)				100 %	4,326,187,700	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	4,758,806,470	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik (3 Laporan/Jenis Dana Transfer)				100 %	271,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	298,100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Laporan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai				0 Dokumen 1 Laporan	205,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 1 Laporan	226,050,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D				0 Dokumen 41 OPD	320,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 41 OPD	352,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%		%	100 %	**1,155,280,000**						100 %	**1,270,808,000**	
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Laporan rekonsiliasi				0 Dokumen 2 Buku	310,550,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 2 Buku	341,605,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan 0 Laporan	365,200,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 Laporan 0 Laporan	401,720,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				0 Dokumen 1 Raperda	479,530,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Dokumen 1 Raperda	527,483,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	**3,517,527,034,120**						100 %	**3,869,279,737,532**	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah xJumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman (SMI)				0 Laporan 100 %	16,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	0 Laporan 100 %	17,600,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				17 kab/kota 0 Laporan	1,544,936,267,453	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	17 kab/kota 0 Laporan	1,699,429,894,198	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				17 kab/kota 0 Laporan	16,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	17 kab/kota 0 Laporan	17,600,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				17 kab/kota 0 Laporan	1,940,590,766,667	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	17 kab/kota 0 Laporan	2,134,649,843,334	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Management Aset (1.Tersedianya daftar aset tetap, 2.Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap, 3.Ada proses inventarisasi aset tetap, 4.Nilai Aset tercantum dalam laporan anggaran)	%		%	100 %	**9,563,410,832**						100 %	**10,519,751,915**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**9,563,410,832**						100 %	**10,519,751,915**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen 0 Dokumen	1,089,250,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 Dokumen 0 Dokumen	1,198,175,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				41 Laporan 0 Dokumen	95,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	41 Laporan 0 Dokumen	104,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah, Penetapan Status, Mutasi, SK Penghapusan Aset				100 %	580,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	638,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan				41 OPD	2,825,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	41 OPD	3,107,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah				20 Laporan	360,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	20 Laporan	396,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terinventarisasi (Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD)				100 %	2,775,660,832	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	3,053,226,915	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama (8 SK MOU (Kerjasama) Penjanjian Kerjasama)				100 %	1,293,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	1,422,850,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran (1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran)				100 %	225,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	100 %	247,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	320,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD	1 Laporan	352,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
										TOTAL	**3,662,518,171,652**							**4,028,653,062,817**	

Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**265,359,432,102**							**283,455,608,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**250,271,432,102**						100 %	**266,329,808,000**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**65,000,000**						1 Dokumen	**275,000,000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Bapenda	1 Dokumen	165,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda	1 Laporan	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	450 Orang	**190,771,874,000**						450 Orang	**195,390,000,000**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				450 Orang	190,517,874,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Bapenda	450 Orang	195,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Laporan	54,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Bapenda	30 Laporan	60,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Bapenda	1 Laporan	330,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**25,000,000**						1 Dokumen	**50,000,000**	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Laporan	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**175,000,000**						1 Dokumen	**220,000,000**	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Dokumen	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Dokumen	82,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Dokumen	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Laporan	27,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	1 Paket	**552,000,000**						1 Paket	**907,500,000**	
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen 1 Dokumen	52,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda	0 Dokumen 1 Dokumen	137,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda	35 Orang	770,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	30 Paket	**6,792,278,102**						30 Paket	**11,660,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket 0 Paket	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	30 Paket 0 Paket	770,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Jenis Paket	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	2 Jenis Paket	3,300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Jenis Paket	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	4 Jenis Paket	6,600,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Jenis Dokumen	42,278,102	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	3 Jenis Dokumen	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Jenis Laporan	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	2 Jenis Laporan	770,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Dokumen	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Roda 4 Unit Roda 2		Unit Roda 4 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4 30 Unit Roda 2	**30,400,000,000**						4 Unit Roda 4 30 Unit Roda 2	**32,890,000,000**	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Jenis	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	3 Jenis	2,750,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Gedung Kantor	8,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Gedung Kantor	8,250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Gedung	12,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Gedung	13,200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Gedung	7,900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Gedung	8,690,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	1 Laporan	**18,770,280,000**						1 Laporan	**20,515,308,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Laporan	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Laporan	2,530,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Laporan	220,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	16,550,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	13 Laporan	17,655,308,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	83 Unit	**2,720,000,000**						83 Unit	**4,422,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	2,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda	83 Unit	3,300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Jenis	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda	2 Jenis	880,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi				0 Unit 2 Unit	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Bapenda	0 Unit 2 Unit	242,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Penerimaan Dana Transfer	100 %		0 %	100 %	**200,000,000**						100 %	**382,800,000**	
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan		Laporan	3 Laporan	**200,000,000**						3 Laporan	**382,800,000**	
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				3 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	3 Laporan	382,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-5% s.d 5% Nilai Deviasi (%)		0 Nilai Deviasi (%)	-5% s.d 5% Nilai Deviasi (%)	**14,888,000,000**						-5% s.d 5% Nilai Deviasi (%)	**16,743,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**14,888,000,000**						1 Dokumen	**16,743,000,000**	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Dokumen	550,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen 0 Laporan	308,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Dokumen 0 Laporan	380,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	3 Laporan	550,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Jenis	7,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	5 Jenis	8,250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Dokumen	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	2 Dokumen	1,550,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	2 Dokumen	220,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Dokumen	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti				2 Laporan	980,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	2 Laporan	1,078,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				12 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	12 Dokumen	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak				29 dokumen	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	29 dokumen	1,085,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Dokumen	110,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen 0 Laporan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	2 Dokumen 0 Laporan	330,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah				29 Laporan	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	29 Laporan	2,200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Masyarakat, Aparatur Bapenda dan Mitra Kerja	1 Laporan	220,000,000	Badan Pendapatan Daerah
										TOTAL	**265,359,432,102**							**283,455,608,000**	

Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**23,776,542,914**							**26,618,087,205**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**19,277,043,664**						100 %	**21,457,810,930**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersedianya data evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**110,000,000**	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	2 Dokumen	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	3 Laporan	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN/tenaga administrasi hono0rarium serta honorarium penatausahaan pengujian	%		%	100 %	**16,015,303,664**						100 %	**15,350,106,930**	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang	14,814,027,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	80 Orang	14,028,702,600	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				1 dokumen	542,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 dokumen	597,168,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				1 dokumen	658,396,664		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 dokumen	724,236,330	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	**275,000,000**						100 %	**764,500,000**	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidian dan pelatihan				3 Orang	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	3 Orang	82,500,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	100 Orang	220,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan dan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**878,740,000**						100 %	**1,351,504,000**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 Paket	16,500,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				1 Paket	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 Paket	44,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 Paket	220,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 Paket	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 Paket	275,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				1 Dokumen	10,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 Dokumen	11,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Laporan	363,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 Laporan	400,004,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**870,000,000**						100 %	**1,124,000,000**	
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				30 Unit	870,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	30 Unit	574,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan peralatan penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	**698,000,000**						100 %	**737,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Laporan	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 Laporan	22,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 laporan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 laporan	440,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 Laporan	278,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	1 Laporan	275,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	%		%	100 %	**440,000,000**						100 %	**2,020,700,000**	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				24 Unit	390,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	24 Unit	315,700,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				10 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN BKD Prov. Sumsel	10 Unit	55,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10 % 100 % 100 %		0 % 0 % 0 %	9 % 100 % 100 %	**4,499,499,250**						9 % 100 % 100 %	**5,160,276,275**	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%		%	100 %	**1,762,641,000**						100 %	**2,149,732,200**	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiataan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK				5 Dokumen	475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	5 Dokumen	522,500,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan pemberhentian ASN				1 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	1 Dokumen	165,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi				1 Lembaga	718,339,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	1 Lembaga	1,001,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	327,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	1 Dokumen	360,492,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian				1 Dokumen	91,582,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	1 Dokumen	100,740,200	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase terisinya jabatan, rotasi dan mutasi	%		%	100 %	**1,425,563,000**						100 %	**1,568,119,300**	
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN				1 Laporan	160,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	1 Laporan	176,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN				1 Dokumen	1,265,563,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	1 Dokumen	1,392,119,300	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase pengembangan kompetensi ASN	%		%	100 %	**814,520,000**						100 %	**895,972,000**	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola				1 Dokumen	517,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	1 Dokumen	569,492,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan sertifikasi jabatan ASN				347 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	347 Orang	110,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fungsional ASN yang dibina				500 Orang	196,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	500 Orang	216,480,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%		%	100 %	**496,775,250**						100 %	**546,452,775**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				1 Dokumen	107,910,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	1 Dokumen	118,701,275	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan				500 Orang	34,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	500 Orang	37,950,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan				14000 Orang	354,365,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	ASN di lingkungan Prov. Sumsel	14000 Orang	389,801,500	Badan Kepegawaian Daerah
										TOTAL	**23,776,542,914**							**26,618,087,205**	

Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**28,008,951,000**							**28,139,588,000**	
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**26,208,951,000**						100 Persen	**26,339,588,000**	
5	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya kegiatan Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**274,063,000**						100 Persen	**330,000,000**	
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	54,063,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BPSDMD Prov Sumsel	1 Dokumen	60,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BPSDMD Prov Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BPSDMD Prov Sumsel	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BPSDMD Prov Sumsel	1 dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BPSDMD Prov Sumsel	20 Laporan	120,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**18,075,888,000**						100 Persen	**18,075,888,000**	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	16,717,918,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	90 Orang/ Bulan	16,717,918,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	1,198,010,000					BPSDMD Provinsi Sumsel	36 Dokumen	1,198,010,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	159,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	12 Dokumen	159,960,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**100,000,000**						100 Persen	**100,000,000**	
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	3 Orang	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**857,000,000**						100 Persen	**891,700,000**	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	4 Paket	137,500,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (alat tulis)				1 Paket	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	1 Paket	93,500,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	2 Paket	77,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 jenis	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	7 jenis	13,200,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	12 Laporan	60,500,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	390,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	120 Laporan	390,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	1 Dokumen	120,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**3,262,000,000**						100 Persen	**3,262,000,000**	
5	04	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	1,062,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	9 Unit	1,062,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Gedung/Paket	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	4 Gedung/Paket	2,000,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				1 paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	1 paket	200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**1,965,000,000**						100 Persen	**1,965,000,000**	
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko yang dibutuhkan dalam 1 tahun				1500 Materai	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	1500 Materai	15,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik, internet yang dibayar				48 rekening	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	48 rekening	1,200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (pembayaran jasa kebersihan kantor)				12 Laporan	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	12 Laporan	750,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**1,675,000,000**						100 Persen	**1,715,000,000**	
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 kendaraan	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	16 kendaraan	190,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	12 bulan	85,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 gedung	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	3 gedung	1,000,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPSDMD Provinsi Sumsel	12 Bulan	220,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (jaringan listrik)				1 paket	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	BPSDMD Provinsi Sumsel	1 paket	220,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase tercapainya program pengembangan sumber daya manusia	Persen		Persen	100 Persen	**1,800,000,000**						100 Persen	**1,800,000,000**	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen		Persen	100 Persen	**600,000,000**						100 Persen	**600,000,000**	
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				160 Orang	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumsel	160 Orang	600,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	**1,200,000,000**						100 Persen	**1,200,000,000**	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi (sertifikasi barang dan jasa)				40 Orang	183,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumsel	40 Orang	183,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				3 Laporan	417,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumsel	3 Laporan	417,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				130 Orang	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumsel	130 Orang	600,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**13,000,000,000**							**13,000,000,000**	
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Peresentase Pemenuhan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	**13,000,000,000**						100 Persen	**13,000,000,000**	
5	**04**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase terlaksanakan kegiatan pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	**13,000,000,000**						100 Persen	**13,000,000,000**	
5	04	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				1 unit kerja	13,000,000,000		Pendapatan dari BLUD			BPSDMD Provinsi Sumsel dan Aparatur Sipil Negara	1 unit kerja	13,000,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
										TOTAL	**41,008,951,000**							**41,139,588,000**	

Badan Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**20,336,898,800**							**0**	
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Meningkatnya Tata Kelola dan Penyelenggaraan urusan	%		%	100 %	**17,421,327,000**						100 %	**0**	
5	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Capaian Kinerja	%		%	100 %	**25,000,000**						100 %	**0**	
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen	25,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	3 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase meningkatnya pelayanan perkantoran dan administrasi keuangan	%		%	100 %	**14,179,827,000**						100 %	**0**	
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/ Bulan	11,559,132,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur ASN Balitbangda dan OPD Terkait	76 Orang/ Bulan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	2,496,630,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur ASN Balitbangda dan OPD Terkait	3 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	124,065,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur ASN Balitbangda dan OPD Terkait	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	**25,000,000**						100 %	**0**	
5	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	25,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**100,000,000**						100 %	**0**	
5	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				150 Orang	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	150 Orang	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Sekretariat Perangkat Daerah	%		%	100 %	**760,000,000**						100 %	**0**	
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	3 Paket	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	2 Paket	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				3 Paket	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	3 Paket	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	55,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	1 Paket	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	2 Paket	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				25 Dokumen	5,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	25 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	425,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	2 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**50,000,000**						100 %	**0**	
5	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				6 unit	50,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	6 unit	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	**606,500,000**						100 %	**0**	
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	1 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	600,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	1 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,675,000,000**						100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 unit	250,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	7 unit	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 unit	200,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	20 unit	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				0 Unit 35 unit	150,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	0 Unit 35 unit	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Gedung	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	1 Gedung	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				12 unit	1,000,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Balitbangda dan OPD Terkait	12 unit	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	**2,915,571,800**						100 %	**0**	
5	**05**	**02**	1.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah Hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Hasil Litbang		Hasil Litbang	8 Hasil Litbang	**475,000,000**						8 Hasil Litbang	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				2 Laporan	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	50,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	125,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	1 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Semua Kelurahan Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				3 rekomendasi	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 rekomendasi	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**	1.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan	Hasil Litbang		Hasil Litbang	2 Hasil Litbang	**275,000,000**						2 Hasil Litbang	**0**	
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	75,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Lahat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pagar Alam, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	0	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lubuk Linggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Empat Lawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Hasil Litbang		Hasil Litbang	5 Hasil Litbang	**575,000,000**						5 Hasil Litbang	**0**	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	350,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Ogan Ilir, Indralaya Utara, Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Hasil Litbang Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Hasil Litbang		Hasil Litbang	16 Hasil Litbang	**1,590,571,800**						16 Hasil Litbang	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				3 Dokumen	350,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	0	3 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif				4 Laporan	600,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ogan Ilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	4 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				8 Laporan	640,571,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	0	8 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
										TOTAL	**20,336,898,800**							**0**	

Badan Penghubung

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**14,937,260,000**							**16,430,986,000**	
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**14,512,260,000**						100 %	**15,963,486,000**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	%		%	100 %	**3,000,000**						100 %	**3,300,000**	
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Laporan	3,300,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	**10,148,325,000**						100 %	**11,163,157,500**	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/ Bulan	7,680,715,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Orang/ Bulan	8,448,786,500	Badan Penghubung
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37 Dokumen	2,217,410,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	37 Dokumen	2,439,151,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	250,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 Dokumen	275,220,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terlayani	%		%	100 %	**38,280,000**						100 %	**42,108,000**	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	3,300,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	35,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	38,808,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%		%	100 %	**1,236,655,000**						100 %	**1,360,320,500**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	110,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				65 Paket	150,000,000					0	65 Paket	165,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	8,250,000	Badan Penghubung

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	110,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	26,400,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	205,155,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Paket	225,670,500	Badan Penghubung
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	150 Laporan	715,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**1,286,000,000**						100 %	**1,414,600,000**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	36,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	39,600,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				14 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 Laporan	275,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	1,100,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**1,800,000,000**						100 %	**1,980,000,000**	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	150,000,000					0	25 Unit	165,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Unit	1,650,000,000	Badan Penghubung
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Sarpras	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Sarpras	165,000,000	Badan Penghubung
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Persentase Pelayanan Penghubung	%		%	100 %	**425,000,000**						100 %	**467,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**07**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	Persentase Pelayanan Penghubung	%		%	100 %	**425,000,000**						100 %	**467,500,000**	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				12 Laporan	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	82,500,000	Badan Penghubung
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				12 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	110,000,000	Badan Penghubung
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	275,000,000	Badan Penghubung
										TOTAL	**14,937,260,000**							**16,430,986,000**	

Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**						**35,121,225,000**							**40,740,187,300**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**27,813,091,400**						100 %	**31,156,070,000**	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan		Laporan	3 Laporan	**50,000,000**						3 Laporan	**85,560,000**	
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Pegawai	2 Laporan	85,560,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	%		%	95 %	**21,823,313,000**						95 %	**22,230,740,000**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1470 Orang/ Bulan	20,792,573,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai	1470 Orang/ Bulan	21,200,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	716,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai	12 dokumen	716,820,000	Inspektorat
6	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	313,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai	12 dokumen	313,920,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasi barang milik daerah yang dipelihara	%		%	95 %	**18,000,000**						95 %	**18,000,000**	
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	1 Laporan	18,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	%		%	90 %	**2,082,117,000**						90 %	**2,282,117,000**	
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				47 orang	1,715,573,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai	47 orang	1,715,573,000	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				73 Orang	366,544,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai	73 Orang	366,544,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum yang tercapai	%		%	90 %	**1,873,750,000**						90 %	**2,198,020,000**	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan				2 Paket	70,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	2 Paket	66,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	2 Paket	220,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 paket	80,000,000		Pendapatan Pajak Daerah			Pegawai	2 paket	90,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	4 paket	198,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				21 dokumen	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	21 dokumen	50,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	1,158,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	87 Laporan	1,274,020,000	Inspektorat
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai	2 dokumen	300,000,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit		unit	1 unit	**240,911,400**						1 unit	**1,728,500,600**	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 unit	240,911,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 4 : Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	Pegawai	6 unit	640,911,400	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang yang tersedia	%		%	100 %	**855,000,000**						100 %	**1,107,980,000**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai	12 Laporan	14,520,000	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	410,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai	12 Laporan	498,960,000	Inspektorat
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	435,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			pegawai	12 Laporan	594,500,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	%		%	95 %	**870,000,000**						95 %	**1,505,152,400**	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai	17 Unit	477,272,400	Inspektorat
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 unit	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai	90 unit	150,000,000	Inspektorat
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai	1 unit	777,880,000	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	90 %		0 %	90 %	**5,701,008,000**						90 %	**7,593,750,800**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	jumlah laporan hasil pengawasan internal	Laporan		Laporan	236 Laporan	**3,445,977,000**						236 Laporan	**4,968,960,800**	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah				115 laporan	914,571,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	115 laporan	1,292,421,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah				83 Laporan	969,496,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	83 Laporan	1,223,838,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan kinerja				2 Laporan	142,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	2 Laporan	200,378,000	Inspektorat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Laporan	280,670,000	Inspektorat
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota				50 Laporan	750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	50 Laporan	1,349,878,800	Inspektorat
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP umlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				0 Dokumen 4 dokumen	479,910,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	0 Dokumen 4 dokumen	621,775,000	Inspektorat
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan		Laporan	100 Laporan	**2,255,031,000**						100 Laporan	**2,624,790,000**	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	n Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				17 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	17 Laporan	350,000,000	Inspektorat
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	umlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				85 Laporan	2,105,031,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	85 Laporan	2,274,790,000	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang DIlaksanakan	90 %		0 %	90 %	**1,607,125,600**						90 %	**1,990,366,500**	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah laporan hasil perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**126,180,000**						1 Laporan	**280,090,000**	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 rekomendasi	126,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	2 rekomendasi	280,090,000	Inspektorat
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah laporang pendampingan/asistensi	Laporan		Laporan	6 Laporan	**1,480,945,600**						6 Laporan	**1,710,276,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				39 Perangkat Daerah	469,190,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	345,765,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				41 Perangkat Daerah	465,455,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	552,965,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 kegiatan	305,585,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	12 kegiatan	425,980,000	Inspektorat
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5 Perangkat Daerah	240,715,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	385,566,500	Inspektorat
										TOTAL	**35,121,225,000**							**40,740,187,300**	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**65,367,804,693**							**81,312,577,680**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	**13,130,726,512**						100 %	**17,674,122,355**	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	7 dokumen	**180,000,000**						7 dokumen	**516,131,999**	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	150,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	308,122,214	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	30,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	79,166,680	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**8,309,580,000**						100 %	**7,980,038,400**	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/Bulan	7,116,740,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	44 Orang/Bulan	7,459,742,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1,139,760,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	392,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	9,700,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	35,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	42,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				0 Laporan 1 Laporan	8,380,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Laporan 1 Laporan	25,896,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**205,539,512**						100 %	**541,055,414**	
8	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendapatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	105,539,512	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	126,647,414	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	8 Orang	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,213,347,000**						100 %	**1,544,208,000**	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Paket	72,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	260,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Paket	312,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Paket	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	42,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	641,507,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	840,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	131,840,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	158,208,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	jenis		jenis	25 jenis	**161,500,000**						25 jenis	**1,968,000,000**	
8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				82 Unit	161,500,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	82 Unit	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,385,760,000**						100 %	**1,662,912,000**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	24,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	340,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	408,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,025,760,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	1,230,912,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah	%		%	100 %	**1,675,000,000**						100 %	**3,461,776,542**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang DIpelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	1,275,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	34 Unit	1,530,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DIpelihara/Direhabilitasi				25 Unit	400,000,000	Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	25 Unit	480,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila	78,5 %		0 %	76,5 %	**1,347,445,000**						76,5 %	**3,369,933,094**	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	dokumen		dokumen	6 dokumen	**1,347,445,000**						6 dokumen	**3,369,933,094**	
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	602,772,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	86,501,824	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	814,824,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				250 Orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	250 Orang	420,106,320	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	100 Orang	342,300,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	312,220,676	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	565,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	1.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Dokumen	198,722,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	624,430,774	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	80 %		0 %	79 %	**46,163,041,600**						79 %	**51,224,000,000**	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	dokumen		dokumen	7 dokumen	**46,163,041,600**						7 dokumen	**51,224,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Dokumen	420,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	150 Orang	180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				550 Orang	45,513,041,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	550 Orang	50,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	324,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas yang berkinerja	5 %		0 %	4 %	**750,000,000**						4 %	**1,615,929,748**	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	dokumen		dokumen	3 dokumen	**750,000,000**						3 dokumen	**1,615,929,748**	
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	240,216,894	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				200 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	200 Orang	404,768,880	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	610,820,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100 %		0 %	100 %	**2,486,591,581**						100 %	**4,057,467,143**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	dokumen		dokumen	3 dokumen	**2,486,591,581**						3 dokumen	**4,057,467,143**	
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	146,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	192,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				600 Orang	640,591,581	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	600 Orang	1,800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				600 Orang	1,350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	600 Orang	1,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	445,467,143	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Kabupaten/Kota tanpa konflik (zero conflict) Persentase Penurunan Kasus yang berpotensi konflik sosial	100 % 80 %		0 % 0 %	100 % 80 %	**1,490,000,000**						100 % 80 %	**3,371,125,340**	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen		dokumen	6 dokumen	**1,490,000,000**						6 dokumen	**3,371,125,340**	
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	290,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 Dokumen	585,677,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	200 Orang	699,923,912	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	360,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	1,163,887,920	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
										TOTAL	**65,367,804,693**							**81,312,577,680**	

Selanjutnya, total pagu anggaran untuk Prioritas Daerah dan untuk masing-masing Prioritas Daerah serta masing-masing Program Prioritas Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.3.
Pagu Anggaran per Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah
Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	Program Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	3.700.566.967.818	1. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	33.823.634.000	1. Disnakertrans
			2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.035.750.000	1. DPPPA
			3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin	75.293.688.000	1. Dinas Sosial
					2. DPMPD
					3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			4. Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan	2.730.586.587.157	1. Dinas pendidikan
					2. Dinas Perpustakaan
					3. Dispora
			5. Peningkatan Penguatan Sistem Kesehatan	784.044.027.661	1. Dinas Kesehatan
					2. RS. Ernaldi Bahar
					3. RS. Mata
					4. RS. Paru-Paru
					5. RS. Gigi dan Mulut
					6. RS. Siti Fatimah
			6. Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	60.783.281.000	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
					2. Disperkim
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi	542.771.628.422	1. Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	275.234.718.482	1. Dinas Pertanian TPH
					2. Dinas Perkebunan
					3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
					4. Dinas Kelautan dan Perikanan
					5. Dinas Kehutanan
					6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			2. Peningkatan Sektor Industri Pengolahan Daerah Berbasis Sektor Unggulan	17.709.016.900	1. Dinas Perindustrian
					2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	Program Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
			3. Pengendalian Inflasi Daerah	55.739.674.600	1. Dinas Perdagangan 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Sosial
			4. Peningkatan Pertumbuhan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM Daerah	21.446.997.800	1. Dinas Koperasi dan UKM
			5. Peningkatan Industri Pariwisata	146.965.288.100	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Disperkim
			6. Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	25.675.932.540	1. DPMPTSP
3.	Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang	2.452.191.169.144	1. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas	2.289.580.080.743	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas PU BM 3. BPKAD
			2. Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	99.021.845.000	1. Dinas PSDA
			3. Penurunan Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan	32.070.809.914	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
			4. Meningkatnya Komunikasi. Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana	27.171.175.096	1. BPBD
			5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	4.347.258.391	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
4.	Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	3.434.047.867.628	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	2.730.155.617.301	1. BPKAD 2. Bapenda 3. Inspektorat 4. Badan Peghubung 5. Bappeda 6. Biro Otonomi 7. Biro Perekonomian 8. Biro Adm. Pembagunan 9. Biro Organisasi 10. Biro Umum dan Perlengkapan
			2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	591.490.090.093	1. Badan Kesbangpol 2. Balitbangda 3. Sekretariat DPRD 4. Biro Hukum 5. Biro Kesra 6. Biro PBJ

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	Program Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
					7. Disdukcapil
					8. Satpol PP
					9. Dinsos
					10. Balitbangda
					11. Biro Humas dan Protokol
			3. Peningkatan Kapabilitas Birokrasi	112.402.160.234	1. BKD
					2. BPSDMD
					3. Dinas Kearsipan
					4. Diskominfo
Total		**10.129.577.633.012**		**10.129.577.633.012**	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk memberikan kepastian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan maka perlu ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan 2023.

Untuk itu, sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya maka dapat dijelaskan beberapa indikator kinerja pembangunan Sumatera Selatan yang akan dicapai pada tahun 2023 yaitu:

1. Indikator Makro Pembangunan

Tabel 7.1
Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,09
2	Angka Kemiskinan	%	11,59 – 12,66
3	Angka Pengangguran*	%	4,04 – 4,80
4	Pertumbuhan Ekonomi*	%	5,5 – 6,1
5	Pendapatan per Kapita (ADHB)	Rp.Ribu	62.067
6	Rasio Gini	Rasio	0,350

** Mempedomani Hasil Rakortekrenbang Tahun 2022 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan RKP Tahun 2023*

2. Indikator Kinerja Utama

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,5
		Inflasi	%	2 - 4
		Rasio Gini	Rasio	0,350
		Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	13.044
		PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Ribu	62.067

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
2	Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,83
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	%	10,2-10,4
		Nilai Investasi PMA	Rp. Triliun	21,9
		Nilai Investasi PMDN	Rp. Triliun	10,47
		Neraca Perdagangan	US$ juta	2.953
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	4,99-5,62
		Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,2
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	104,5
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	%	94,35
4	Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,59-12,66
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,06 - 4,22
5	Meningkatnya Akses Energi	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Rasio	100,00
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,09
		Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,98
7	Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,95
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,4
8	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,90
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	70

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
9	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A
10	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Nilai	A (85-86)
		Opini BPK	Opini	WTP
11	Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	Indeks Integritas Daerah	Indeks	69
12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,55
13	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	86,91
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	92,96
		Rasio kemantapan jalan	%	85
		Presentase Akses Internet	%	90
14	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	%	100
15	Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	8.903
		Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	904.503
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Sertifikat	44

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
16	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	85
		Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya dan Olahraga)	Orang	31

3. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 2023

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**		
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,5
2	Inflasi	%	2 - 4
3	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. Ribu	62.067
4	Rasio Gini	Rasio	0,35
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,09
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,4
7	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,95
8	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,98
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,85
10	Angka setengah menganggur	%	10
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,06 – 4,22
12	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	%	100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
14	Nilai SAKIP	Nilai	A (85-86)
15	Opini BPK	Opini	WTP
16	Meningkatnya Peringkat MTQ	Peringkat	20 besar
17	Meningkatnya Peringkat STQ	Peringkat	15 besar
18	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,5
19	Produksi peternakan :		
	- Daging	Ton	105.057
	- Susu	Liter	80.098
	- Telur	Ton	115.269
20	Jumlah KK Rawan Pangan yang dibantu	KK	225
21	Jumlah KK Miskin yang dibantu	KK	4.100

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
22	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	21,21
23	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	13,75-14,00
24	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	29,95
25	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,83
26	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	%	10,2-10,4
27	Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian	%	5,82
II	**Aspek Daya Saing**		
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	13.044
III	**Aspek Pelayanan Umum**		
III.1	**Layanan Urusan Wajib Dasar**		
1	**Urusan Pendidikan**		
1.1	APK Sekolah Menengah	%	90,88
1.2	APM Sekolah Menengah	%	63,98
1.3	APS Sekolah Menengah	%	81,17
1.4	APTS Sekolah Menengah	%	0,31
1.5	Persentase Sekolah SLB yang terakreditasi:		
	A	%	12,9
	B	%	61,29
	C	%	25,81
	D	%	0
1.6	Persentase Pendidik Tenaga Kependidikan minimal Berkualifikasi S-1	%	100
1.7	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah:		
	SMA	Rasio	1:26
	SMK	Rasio	1:50
1.8	Persentase sekolah menengah terakreditasi:		
	A	%	23,76
	B	%	37,42
	C	%	16,13
	D	%	22,69

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.9	Lulusan SMK yang terserap kerja	%	64,5
1.10	Persentase Kelulusan Sekolah Menengah	%	100
1.11	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah	%	100
1.12	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus	%	100
1.13	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	-	90,88
1.14	Jumlah LSP yang terbentuk	LSP	38
2	**Urusan Kesehatan**		
2.1	Persentase balita stunting	%	20,5 - 22,5
2.2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	80
2.3	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	95
2.4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	90
2.5	Jumlah Kematian Bayi	Orang	475
2.6	Jumlah Kematian Ibu Maternal	Orang	110
2.7	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
2.8	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
3.1	Rasio kemantapan jalan	%	85
3.2	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	%	80
3.3	Luas Daerah Irigasi permukaan yang terairi	Ha	32.855

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
3.4	Luas Daerah Irigasi Rawa yang terairi	Ha	13.000
3.5	Luas daerah irigasi secara partisipatif yang terairi	Ha	5.200
3.6	Volume Ketersediaan air baku	M3	65.000
3.7	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	100
3.8	Luas Kawasan Bebas Bencana Longsor	Ha	11.000
3.9	Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	56,07
3.10	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	%	1,5
3.11	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	1,5
3.12	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	0,45
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
4.1	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	11
4.2	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	86,91
4.3	Persentase RT dengan akses sanitasi layak	%	92,96
4.4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	80

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
4.5	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	80
4.6	Persentase satuan permukiman yang sudah dilengkapi PSU	%	31
4.7	Persentase Pengembang Perumahan dengan kualifikasi menengah di wilayah provinsi yang tersertifikasi	%	2
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		
5.1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95
5.2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
5.3	Persentase Satlinmas yang Aktif	%	97
5.4	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	50
5.5	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	136,95
6	**Urusan Sosial**		
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	56,6
6.2	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100
6.3	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	8,5
6.4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
6.5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
6.6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
6.7	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
III.2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**		
1	**Urusan Tenaga Kerja**		
1.1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan TPAK diatas Provinsi	Kab/Kota	12
1.2	Jumlah Kabupaten/Kota dengan TPT diatas Provinsi	Kab/Kota	12
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
2.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70
2.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Nilai	1,1
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Nilai	11
2.4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	61
3	**Urusan Pangan**		
3.1	Ketersediaan Energi untuk dikonsumsi	Kkal/Kap/ hari	2.260
3.2	Ketersediaan Protein untuk dikonsumsi	Gram/kap/ hari	80
3.3	Koefisien Varian (CV) Harga Pangan Strategis	%	≤ 15
3.4	Persentase Cadangan Pangan	%	22,72
4	**Urusan Pertanahan**		
4.1	Persentase konflik lahan yang terselesaikan	%	13

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
4.2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	90
4.3	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	90
5	**Urusan Lingkungan Hidup**		
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,55
5.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	67,25
5.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,75
5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	41,71
5.5	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	69,4
5.6	Persentase penurunan emisi GRK	%	7,42
5.7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	15
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	100
6.2	Rasio bayi ber akta kelahiran	Rasio	100
6.3	Rasio pasangan ber akta Nikah	Rasio	95
6.4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100
6.5	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100
6.6	Pemanfaatan data kependudukan	%	19,23
7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
7.1	Indeks Desa Membangun Sumatera Selatan	Indeks	0,5997

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
7.2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	12,51
7.3	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0,53
8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
8.1	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	%	80
9	**Urusan Perhubungan**		
9.1	Load Faktor Penumpang Kereta Api	%	48
9.2	Load Faktor Penumpang Kapal Laut	%	45
9.3	Load Faktor Penumpang Bus AKDP	%	69
9.4	Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	Unit	1
9.5	Jumlah terminal tipe B	Unit	7
9.6	Load Faktor Angkutan Barang Darat	%	68
9.7	Load Faktor Angkutan Barang Laut	%	54
9.8	Load Faktor Angkutan Barang Kereta Api	%	53
9.9	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,301
9.10	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	68,92
10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**		
10.1	Persentase layanan pengguna e-government	%	100
10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Informasi dan Komunikasi Masyarakat/Publik	Kab/Kota	2
10.3	Presentase Akses Internet	%	90
10.4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
10.5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100
11	**Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**		
11.1	Jumlah UMKM Naik Kelas	UMK	500
11.2	Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru	UKM	350
11.3	Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi	%	2
11.4	Prosentase Kenaikan Volume Usaha Koperasi	%	2
11.5	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	20
11.6	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	1
11.7	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	1
12	**Urusan Penanaman Modal**		
12.1	Realisasi PMA	Rp. Triliun	21,9
12.2	Realisasi PMDN	Rp. Triliun	10,47
12.3	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di selesaikan tepat waktu sesuai SOP	Unit	675
12.4	Indeks Kepuasan Investor	Indeks	89,7
12.5	Jumlah investor	Perusahaan/ UU	393
12.6	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	7
13	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**		
13.1	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	Orang	3.511
13.2	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	27
13.3	Jumlah wirausaha muda	Orang	40
13.4	Jumlah pelatih yang Bersertifikat	Orang	25
13.5	Jumlah pembinaan cabang olahraga	Orang	42

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
13.6	Jumlah pembinaan atlet muda	Orang	267
13.7	Jumlah atlet berprestasi	Orang	55
13.8	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	20
13.9	Jumlah medali atlet muda Sumsel	Medali emas	40
13.10	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai Indeks	50
13.11	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Nilai Indeks	47
14	**Urusan Statistik**		
14.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
14.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
15	**Urusan Persandian**		
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100
16	**Urusan Kebudayaan**		
16.1	Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan	Cagar Budaya	850
16.2	Angka komulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan	OPK	700
16.3	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	Sertifikat	44
16.4	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Sertifikat	12
16.5	Jumlah Pergelaran Seni	Kali	13
16.6	Jumlah Kunjungan Museum	Orang	102.892
16.7	Terlestarikannya Cagar Budaya	Cagar Budaya	850

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
17	**Urusan Perpustakaan**		
17.1	Nilai kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,5
17.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	13,5
18	**Urusan Kearsipan**		
18.1	Persentase Perangkat Daerah provinsi dan kab/kota yang mengelola arsip secara baku	%	90
18.2	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang bersertifikat	Orang	80
III.3	**Layanan Urusan Pilihan**		
1	**Urusan Pariwisata**		
1.1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	8.903
1.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	904.503
1.3	Jumlah Paket Destinasi	Paket Destinasi	14
1.4	Jumlah Desa Wisata yang difasilitasi/ ditetapkan	Desa	40
1.5	Jumlah Tenaga Usaha Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Subsektor	8
1.6	Jumlah Asesor Kompetensi Bidang Pariwisata yang terlatih	Orang	7
1.7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persen	5,00%
1.8	Tingkat hunian akomodasi	%	85
2	**Urusan Pertanian**		
2.1	Produksi Tanaman Pangan		
	Padi	Ton	3.943.061
	Jagung	Ton	963.375
	Kedelai	Ton	2.909
2.2	Produksi Hortikultura		
	Cabai	Ton	24.303
	Bawang	Ton	710
	Jeruk	Ton	53.517
	Duku	Ton	49.880
	Durian	Ton	30.395
	Nanas	Ton	138.412

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
	Tanaman Obat	Ton	3.122
2.3	Produktivitas Tanaman Pangan		
	Padi	Ku/Ha	50,76
	Jagung	Ku/Ha	65,11
	Kedelai	Ku/Ha	12,38
2.4	Produktivitas Hortikultura		
	Cabai	Ku/Ha	50,79
	Bawang	Ku/Ha	56,44
	Jeruk	Ku/Ha	531,8
	Duku	Ku/Ha	124,4
	Durian	Ku/Ha	67,74
	Nanas	Ku/Ha	693,8
2.5	Nilai Tukar Petani Perkebunan	Nilai	98
2.6	Produktivitas sektor perkebunan		
	- Karet	Ton/Ha	1,36
	- Kelapa Sawit	Ton/Ha	3,5
	- Kopi	Ton/Ha	0,8
	- Kelapa	Ton/Ha	1,17
2.7	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	178
3	**Urusan Kehutanan**		
3.1	Produksi Kayu Sub Sektor kehutanan	M3	6.000.000
3.2	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	0,17
3.3	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%	0,17
3.4	Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan	Rasio	0,44
3.5	Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan	Ha	12.350
3.6	Penurunan luas kebakaran hutan	Ha	5.984,60
3.7	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	5

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
4	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**		
4.1	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100
4.2	Rasio Bauran EBT	%	21
4.3	Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga	SR	10.000
4.4	Jumlah IUP OP yang berproduksi	IUP	5
4.5	Minimnya Jumlah Kecelakaan Tambang yang mati	Orang	0
4.6	Jumlah PNBP Sektor ESDM	Rp (Milyar)	466,32
4.7	Jumlah Retribusi Sektor ESDM	(Rp Juta)	500
4.8	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100
5	**Urusan Perdagangan**		
5.1	Neraca Perdagangan	US$ juta	2.953
5.2	Persentase pertumbuhan ekspor	%	2,5
5.3	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	2,4 - 5
5.4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90
5.5	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	30
5.6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5
6	**Urusan Perindustrian**		
6.1	Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	14.873
6.2	Jumlah Industri Menengah Besar	IMB	544
6.3	Jumlah Industri Kreatif	IK	6.908
6.4	Jumlah Sentra Industri Kreatif	SIK	41
6.5	Konstribusi eskpor produk industri terhadap total ekspor	%	30,22
6.6	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ribu orang	220,6
6.7	Persentase tenaga kerja di Sektor Industri terhadap total pekerja	%	5,2

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
6.8	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	37,15
6.9	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Milyar)	Rp. Miliar	657,43
6.10	Nilai ekspor Produk Industri Pengolahan nonmigas (USD Juta)	USD Juta	341,27
6.11	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	Industri	230
6.12	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	3,2
6.13	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3,2
6.14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3,2
6.15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3,2
6.16	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	data industri	230
7	**Urusan Transmigrasi**		
7.1	Jumlah Penghasilan Kepala Keluarga Transmigran yang setara 3000 Kg beras per tahun	kg	3.800

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
8	**Urusan Kelautan dan Perikanan**		
8.1	Produksi perikanan tangkap	Ton	228.000
8.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	545.000
8.3	Volume ekspor produk kelautan dan perikanan	Ton	2.500,00
8.4	Konsumsi ikan	Kg/kap/Tahun	44
8.5	Produksi benur dan nener	Juta ekor	18
8.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	104,5
8.7	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	%	94,35
8.8	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	1.617
8.9	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	773.000
8.10	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	20
III.4	**Penunjang Urusan**		
1	**Perencanaan Pembangunan**		
1.1	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen	%	90
1.2	Ketepatan Penyampaian Draf Final PERKADA RKPD ke Biro Hukum	Tepat waktu	Tepat waktu
1.3	Persentase Indikator Sasaran RKPD yang Diakomodir Dalam APBD	%	83
2	**Keuangan**		
2.1	Opini BPK	WTP	WTP
2.2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.3	Persentase pencapaian penerimaan PAD	%	100
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**		
3.1	Nilai IPA (Indeks Profesionalitas ASN)	Angka	75

NO	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
3.2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100
3.3	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10
3.4	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100
3.5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	%	90
3.6	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan	%	75
4	**Penelitian dan Pengembangan**		
4.1	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	83
4.2	Nilai Ekosistem Inovasi	Skor	4,5
4.3	Indeks Inovasi Daerah	Poin	24.500
5	**Pengawasan**		
5.1	Indeks Integritas Daerah	Indeks	69
5.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	%	86
5.3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	68
5.4	Level Maturitas SPIP	Level	3
6	**Sekretariat Dewan**		
6.1	Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya	%	100

4. Indikator Kinerja Lainnya

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Lainnya RKPD Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Lainnya	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	1.114
2	PDRB (ADHB)	Rp. Triliun	542,3
3	PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp. Juta	39,53
4	Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)	Indeks	0,750

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021, serta memperhatikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2021 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 mengemban misi pembangunan tahun kelima RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

RKPD Tahun 2023 harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan KUA dan PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan APBD. Prioritas pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang
4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinergi yang solid antar Perangkat Daerah, kerjasama yang saling mengisi dan menguatkan antara Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat, sehingga sangat diharapkan setiap program dan kegiatan benar-benar bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah. Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan melalui sinergitas perencanaan pembangunan maka pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 akan ditempuh melalui kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

2. Seluruh kebijakan dan program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2023 selanjutnya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas dan partisipasi.
3. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 memuat daftar program dan kegiatan yang akan menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
4. Berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi dengan bekerja lebih keras dan lebih cerdas, memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan membangun kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan para pelaku usaha.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dalam bentuk laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan program RKPD.
6. RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD sehingga harus menjadi perhatian bagi seluruh *stakeholders* untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai target akhir kinerja Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023.
7. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 harus dipedomani oleh 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dalam menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kaidah pelaksanaan seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagai tujuan dari pembangunan daerah.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU